Laporan Tahunan **2012**
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Mempelopori **Masyarakat Digital** di **Indonesia**

Telkom Indonesia
the world in your hand

SEKILAS MENGENAI LAPORAN TAHUNAN 2012

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, atau disebut "Telkom", "Perusahaan", dan "Kami", menyajikan Laporan Tahunan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, yang disusun sesuai dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), pengganti dari Bapepam-LK No.X.K.6 dan X.K.7. Beberapa bagian tertentu dalam Laporan Tahunan ini juga berisi informasi yang dimuat dalam Form 20-F sesuai peraturan Securities and Exchange Commission ("SEC") Amerika Serikat. Namun, tidak ada bagian dari dokumen ini yang digabungkan untuk merujuk pada Form 20-F. Informasi dan data yang disajikan pada Laporan Tahunan ini bersumber pada data keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

Laporan Tahunan yang bersifat pandangan ke depan (*forward-looking statement*), termasuk tentang ekspektasi dan proyeksi atas kinerja operasional dan prospek bisnis di masa mendatang. Pernyataan seperti ini umumnya mengunakan kata seperti "percaya", "mengharapkan", "mengantisipasi", "memperkirakan", "memproyeksikan" atau kata-kata serupa lainnya. Selain itu, seluruh pernyataan yang bukan merupakan fakta historis, dalam Laporan Tahunan ini dapat dikategorikan sebagai *forward-looking statement*. Walaupun kami percaya bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar. Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian, termasuk akibat perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Pada bagian "Faktor-faktor Risiko" dan bagian-bagian lain di Laporan Tahunan ini diungkapkan faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil-hasil aktual yang berbeda secara material dengan ekspektasi kami.

Apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai Telkom lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Investor Relations, Grha Citra Caraka Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia. Tel: (62-21) 521 5109, Fax: (62-21) 522 0500 atau email: investor@telkom.co.id. Anda juga dapat mengunduh dokumen ini secara *online* melalui situs kami pada http://www.telkom.co.id.

Sebutan "Indonesia" dalam Laporan Tahunan 2012 ini merujuk kepada Republik Indonesia sedangkan "Pemerintah" adalah Pemerintah Indonesia dan "Amerika Serikat" atau "AS" adalah Amerika Serikat. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang resmi Indonesia sedangkan "Dolar AS" atau "US$" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Beberapa angka tertentu (termasuk persentase) telah mengalami pembulatan. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia.

Mempelopori Masyarakat Digital di Indonesia

Masyarakat digital telah menjadi kecenderungan yang mendunia, dengan makin meluasnya akses serta penggunaan lingkungan konvergensi Perangkat-Jaringan-Aplikasi (*Device-Network-Application*/"DNA") berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi dalam aktivitas sehari-hari: di rumah dan di tempat kerja, untuk edukasi atau berekreasi, maupun dalam berinteraksi dengan teman dan keluarga. Untuk Indonesia, pengembangan jaringan *broadband* serta pemerataan akses dan layanan telekomunikasi sebagai bagian dari gaya hidup digital juga merupakan komponen pembentuk konektivitas nasional, salah satu pilar dari Masterplan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Fokus PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk ("Telkom") sepanjang tahun 2012 pada penyelenggaraan layanan Telekomunikasi, Informasi, Media, *Edutainment* dan *Services* ("TIMES"), termasuk pengembangan *Indonesia Digital Network* ("IdNet"), tidak saja telah memberikan sumber-sumber pendapatan baru yang menunjang keberlanjutan pertumbuhan Telkom ke depan, namun juga berperan mempelopori masyarakat digital di Indonesia, sekaligus berkontribusi nyata pada pembangunan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Daftar Isi

HIGHLIGHTS 2

IKHTISAR

Ikhtisar Keuangan 16
Ikhtisar Operasional 18
Ikhtisar Saham dan Obligasi 20
Peristiwa Penting 24
Penghargaan dan Sertifikasi 26

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris 30
Laporan Direksi 34

TINJAUAN BISNIS

Industri Telekomunikasi di Indonesia 42
Strategi Perusahaan 43
Prospek Usaha Perusahaan 45
Portofolio Bisnis 46
Penjualan, Pemasaran dan Distribusi 51
Tarif Jasa Telekomunikasi 52
Layanan kepada Pelanggan 53
Perlindungan Konsumen 55
Tagihan, Pembayaran dan Penagihan 56
Faktor-Faktor Risiko 58
Infrastruktur Jaringan 72
Pengembangan Jaringan 76
Sumber Daya Manusia 78

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS PERUSAHAAN

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha 90
Tinjauan Keuangan 93
Kewajiban dan Komitmen 106
Likuiditas 107
Modal Kerja Bersih 108
Kemampuan Membayar Utang 108
Kolektibilitas Piutang 108
Struktur Modal 109
Belanja Modal 109
Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal 110
Perubahan Kebijakan Akuntansi 110
Perubahan Peraturan Perundang-undangan 111
Pengendalian Nilai Tukar 111
Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif atas Risiko Pasar 112
Transaksi dengan Pihak Berelasi 116
Aset Tetap 116
Asuransi 116
Informasi dan Fakta Material 116

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Konsep dan Landasan 120
Kerangka Kerja dan Kinerja GCG Telkom 121
Struktur Tata Kelola Perusahaan 124
Sistem Pengendalian Internal 156
Akuntan Independen Perseroan 158
Manajemen Risiko 158
Litigasi dan Perkara Hukum Penting 159
Sanksi Administratif 160
Akses Informasi Publik 160
Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan 161
Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) 163
Konsistensi Penerapan GCG 166
Evaluasi GCG 171

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Lingkungan Hidup 175
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3") 178
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan 183
Konsumen 189

PROFIL PERUSAHAAN

Riwayat Singkat Telkom 192
Kegiatan Usaha 192
Struktur Organisasi Perusahaan 192
Entitas Anak dan Asosiasi 196
Profil Dewan Komisaris 200
Profil Direksi 202
Informasi Efek 204
Alamat 209

INFORMASI TAMBAHAN (BAGI PEMEGANG SAHAM ADR)

Rangkuman Perbedaan Signifikan antara Praktik Tata Kelola Perusahaan di Indonesia dan Amerika 214
Rangkuman Perbedaan Signifikan antara SAK Indonesia dan IFRS 215
Anggaran Dasar 215
Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah 216
Mekanisme Perdagangan Pasar Modal dan ADS Telkom 217
Perpajakan 218
Riset dan Pengembangan 220
Dasar Hukum dan Peraturan 220
Persaingan 225
Perizinan 229
Merek, Hak Cipta, Desain Industri dan Paten 233

LAMPIRAN

Daftar Istilah 234
Referensi Silang Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 241

Sejarah panjang menempa kami...

1856-1882

Pada tanggal 23 Oktober 1856, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengoperasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor).

1906-1965

Pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi pemisahan jasa pos dan telekomunikasi sehingga ditangani oleh dua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.

1974

PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua divisi, yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("PT INTI") yang memproduksi perangkat telekomunikasi dan Perusahaan Umum Telekomunikasi ("PERUMTEL") untuk melayani jasa telekomunikasi domestik dan internasional.

1980

Bisnis telekomunikasi internasional diambil alih oleh PT Indonesian Satellite Corporation ("Indosat").

1991

Nama PT PERUMTEL berubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom dengan operasi bisnis terbagi atas dua belas wilayah telekomunikasi ("WITEL"). Kedua belas WITEL tersebut kemudian dirombak menjadi tujuh divisi regional ("DIVRE"), yaitu Divisi I Sumatera, Divisi II Jakarta dan sekitarnya, Divisi III Jawa Barat, Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Divisi V Jawa Timur, Divisi VI Kalimantan dan Divisi VII Indonesia Bagian Timur.

1995

Telkom melaksanakan penawaran saham perdana publik (*Initial Public Offering*) pada tanggal 14 November 1995 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada Tanggal 26 Mei 1995, Telkom mendirikan entitas anak yang menangani bisnis telepon seluler, Telkomsel.

1999

Undang-Undang Telekomunikasi (UU No.36/1999) yang berlaku efektif pada bulan September 2000 telah memfasilitasi masuknya pemain baru sehingga menumbuhkan persaingan usaha di industri telekomunikasi

2001

Telkom mengakuisisi 35% saham Indosat di Telkomsel sehingga menjadikannya pemegang saham mayoritas di perusahaan seluler itu dengan kepemilikan 77,7%, Indosat kemudian mengambil alih 22,5% saham Telkom di Satelindo dan 37,7% saham Telkom di PT Aplikanusa Lintasarta. Pada saat yang bersamaan, Telkom kehilangan hak eksklusifnya sebagai penyelenggara tunggal layanan telepon tidak bergerak di Indonesia

2002

Telkom melepaskan kepemilikan sahamnya sebesar 12,7% di Telkomsel kepada Singapore Telecom Mobile Pte Ltd. ("SingTel Mobile").

2004

Telkom meluncurkan layanan sambungan langsung internasional untuk telepon tidak bergerak.

2005

Satelit Telkom-2 diluncurkan untuk menggantikan seluruh layanan transmisi satelit yang sebelumnya dilayani oleh satelit Palapa B-4. Peluncurannya menjadikan jumlah satelit yang telah diluncurkan oleh Telkom menjadi delapan satelit, termasuk satelit Palapa A-1.

2009

Telkom bertransformasi dari Perusahaan Infocomm menjadi Perusahaan penyelenggara TIME. Wajah baru Telkom diperkenalkan kepada publik dengan menampilkan logo dan *tagline* baru Perusahaan "*the world in your hand*".

2010

Proyek kabel serat optik bawah laut JaKaLaDeMa yang menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar dan Mataram telah berhasil dirampungkan pada bulan April 2010.

2011

Reformasi infrastruktur telekomunikasi melalui proyek Telkom Nusantara Super Highway yang menyatukan nusantara mulai dari Sumatera hingga Papua, serta proyek *True Broadband Access* yang menyediakan akses internet ke pelanggan di seluruh Indonesia.

2012

Penetrasi *broadband* melalui pembangunan Indonesia WiFi untuk merealisasikan *Indonesia Digital Network* ("IDN").

Perubahan portofolio bisnis dari TIME menjadi TIMES (*Telecommunication, Information,* Media, *Edutainment & Services*) untuk meningkatkan *business value creation.*

Pembentukan Telkom Corporate University untuk membangun SDM Telkom yang mampu bersaing dalam bisnis internasional (*from competence to commerce*).

Belajar dari pelanggan

Pelanggan mengilhami kami untuk mengembangkan produk, meningkatkan kualitas jaringan dan menetapkan standar pelayanan yang tinggi. Produk, layanan dan karyawan kami berfokus pada pelanggan untuk terus mengembangkan solusi terbaik, karena bagi kami memuaskan pelanggan tidaklah cukup.

untuk memberikan yang terbaik...

dengan Visi, Misi dan Nilai yang kami miliki...

VISI

Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan *Telecommunication, Information,* Media, *Edutainment* dan *Service* ("TIMES") di kawasan regional.

MISI

- Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
- Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

Visi dan Misi ditetapkan berdasarkan keputusan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No.09/KEP/DK/2012 pada tanggal 30 Mei 2012.

Corporate Culture — The New Telkom Way

Basic Belief — Always The Best

Core Values — Solid, Speed, Smart

Key Behaviours — Imagine, Focus, Action

..serta Inisiatif Strategis...

1. Pusat Keunggulan
2. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio
3. Percepatan implementasi *broadband* melalui layanan konvergen
4. Pengelolaan portofolio nirkabel
5. Mengintegrasikan solusi ekosistem Telkom Group

Inisiatif strategis ditetapkan berdasarkan keputusan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No.09/KEP/DK/2012 yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2012.

6 Berinvestasi di layanan teknologi informasi

7 Berinvestasi di bisnis media dan *edutainment*

8 Berinvestasi di bisnis *wholesale* dan peluang bisnis internasional yang strategis

9 Memaksimalkan nilai aset di bisnis yang saling terkait

10 Mengintegrasikan *Next Generation Network* ("NGN") dan *Operational support system, Business support system, Customer support system and Enterprise relations management* ("OBCE") untuk mencapai penyempurnaan beban biaya

didukung jaringan telekomunikasi yang tersebar di Indonesia

Divisi Telkom Barat
(Sumatera, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat)

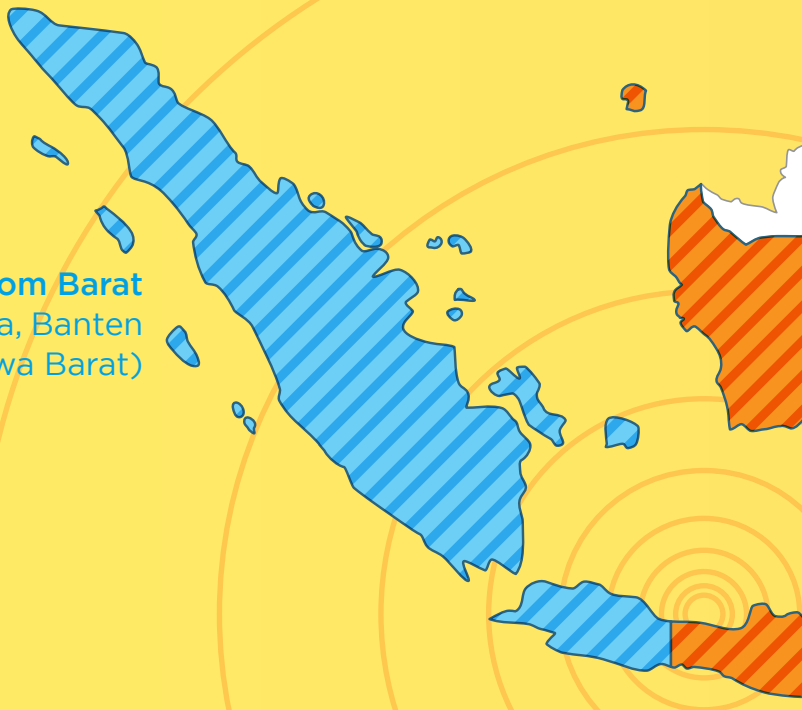

60.011 BTS

26,8 juta pelanggan telepon tetap

19,1 juta pelanggan *broadband*

125,1 juta pelanggan seluler

Divisi Telkom Timur
(Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia)

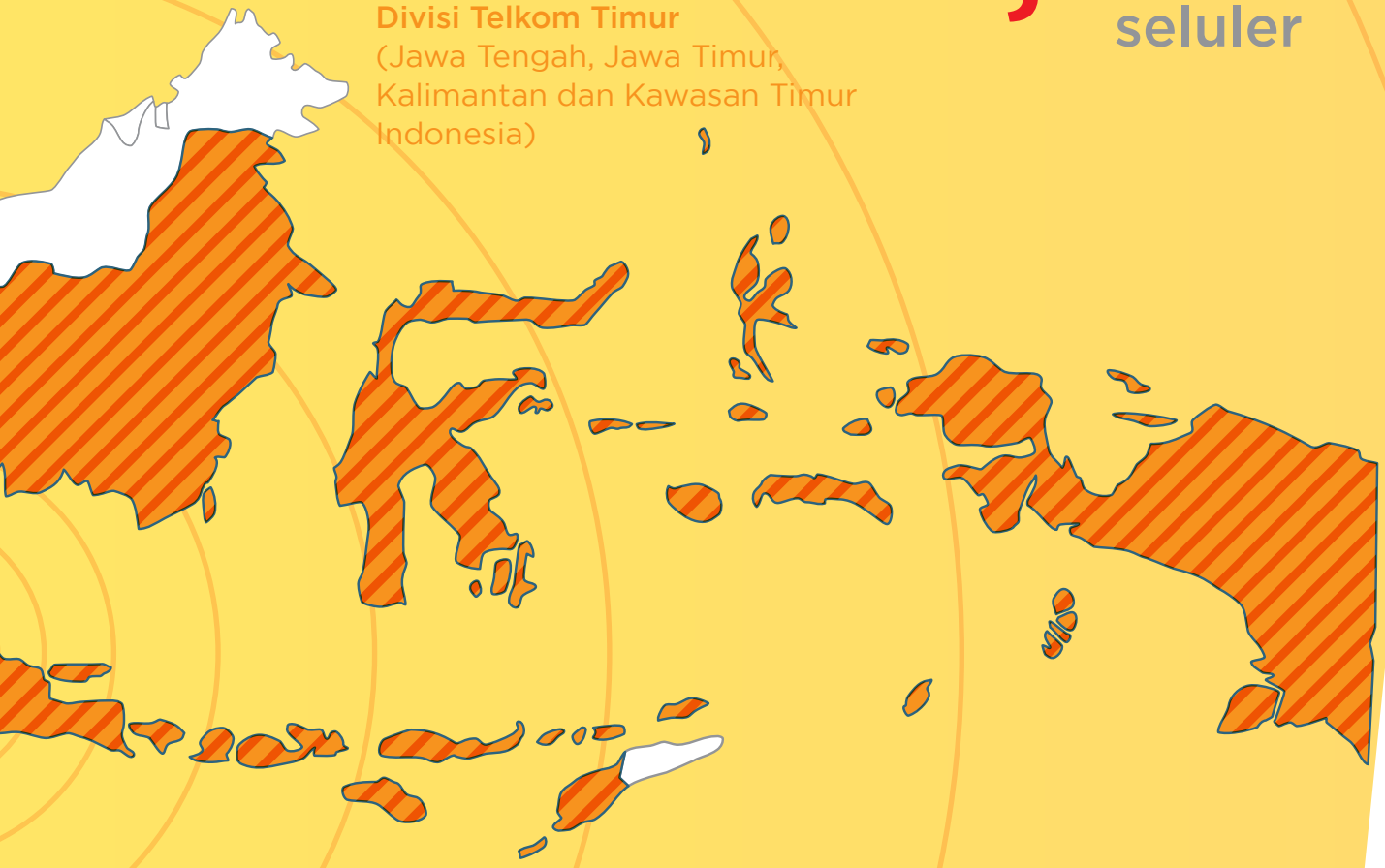

sumber daya manusia yang unggul

Jumlah Karyawan Telkom

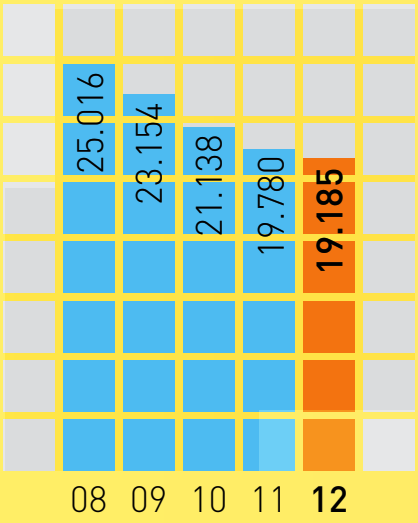

Jumlah Karyawan Entitas Anak

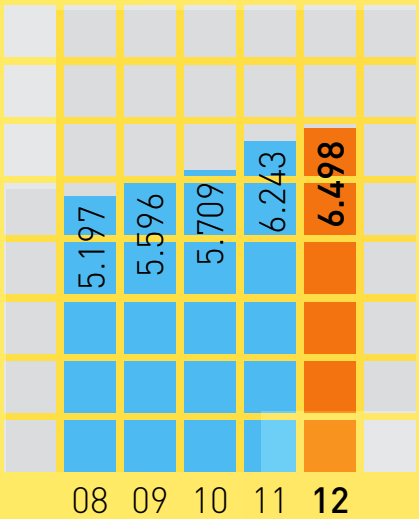

Telkom mendirikan Telkom Corporate University ("Telkom CorpU") sebagai investasi ke arah penciptaan pemimpin dan sumber daya manusia yang unggul di Perusahaan. Telkom CorpU juga merupakan salah satu wahana menuju strategi pusat keunggulan (*center of excellence*) yang meliputi *center of chiefship* (menciptakan *great leader*), *center of competence* (menciptakan *great people*), dan *center of certification* (menciptakan standar global).

menghasilkan prestasi yang lebih baik

Peningkatan Laba Bersih

17,2%

Rp**12,9** triliun

- Profitabilitas Telkom yang Solid

Peningkatan Pelanggan *Broadband* lebih dari dua kali lipat

82,8%

19,1 juta

Peningkatan Jumlah Pelanggan Seluler

16,9%

125,1 juta

Jumlah BTS Telkomsel

54.297

penambahan

11.674 BTS

- Penguatan Jaringan Telkomsel

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan (Berdasarkan SAK Indonesia)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

dalam miliar Rupiah, kecuali untuk Laba bersih per lembar Saham dan Laba bersih per ADS

	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*	2008*
Jumlah Pendapatan	77.143	71.253	68.629	68.220	64.974
Jumlah Beban	54.004	49.960	46.240	44.139	43.606
EBITDA disesuaikan	40.154	36.821	37.549	38.056	33.700
Laba Usaha	25.698	21.958	22.937	24.081	21.368
Laba tahun berjalan	18.362	15.470	15.870	16.043	14.725
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	12.850	10.965	11.537	11.399	10.672
Kepentingan nonpengendali	5.512	4.505	4.333	4.644	4.053
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	18.388	15.481	15.904	16.048	14.729
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	12.876	10.976	11.571	11.404	10.676
Kepentingan nonpengendali	5.512	4.505	4.333	4.644	4.053
Laba bersih per saham	669,19	559,67	586,54	579,52	540,38
Laba bersih per ADS (1 ADS : 40 saham biasa)	26.767,6	22.386,8	23.461,6	23.180,8	21.615,2

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

dalam miliar Rupiah

Aset	111.369	103.054	100.501	97.931	91.256
Liabilitas	44.391	42.073	44.086	48.436	47.662
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	51.541	47.510	44.419	38.562	33.910
Modal kerja bersih	3.866	(931)	(1.744)	(10.797)	(12.596)
Investasi pada entitas lain	275	235	254	151	169

Belanja Modal

dalam miliar Rupiah

Telkom	4.040	4.202	3.623	5.652	6.087
Telkomsel	10.656	8.472	8.197	12.673	15.915
Entitas anak lainnya	2.576	1.929	831	836	243
Jumlah Belanja Modal	**17.272**	**14.603**	**12.651**	**19.161**	**22.245**

Rasio Keuangan dan Operasi Konsolidasian

Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (ROA) (%)[1]	11,5	10,6	11,5	11,6	11,7
Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE) (%)[2]	24,9	23,1	26,0	29,6	31,5
Rasio Laba terhadap Pendapatan (Marjin Usaha) (%)[3]	33,3	30,8	33,4	35,3	32,9
Rasio Lancar (%)[4]	116,0	95,8	91,5	59,9	53,7
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)[5]	86,1	88,6	99,3	125,6	140,6
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%)[6]	39,9	40,8	43,9	49,5	52,2

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

(1) ROA merupakan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi jumlah aset pada 31 Desember akhir tahun.
(2) ROE merupakan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 31 Desember akhir tahun.
(3) Marjin usaha merupakan laba dibagi pendapatan.
(4) Rasio lancar merupakan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek pada 31 Desember akhir tahun.
(5) Jumlah liabilitas per ekuitas merupakan jumlah liabilitas dibagi ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 31 Desember akhir tahun.
(6) Jumlah liabilitas per jumlah aset merupakan jumlah liabilitas dibagi jumlah aset pada 31 Desember akhir tahun.

Pendapatan
(miliar Rupiah)

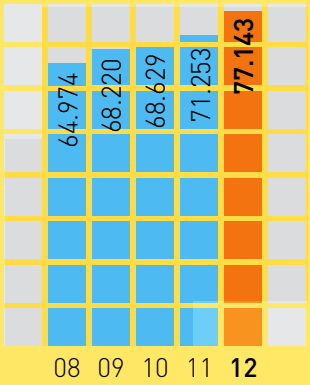

Beban
(miliar Rupiah)

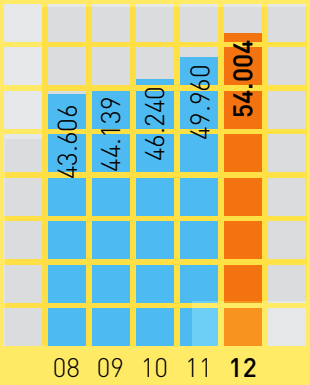

Laba Usaha
(miliar Rupiah)

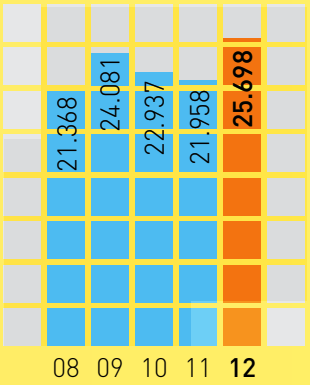

EBITDA Disesuaikan
(Rupiah)

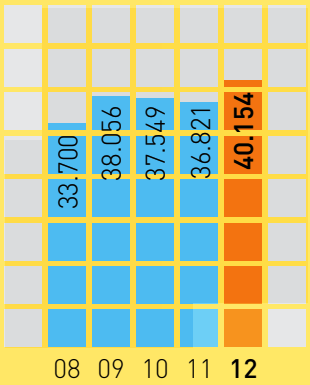

Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Induk
(miliar Rupiah)

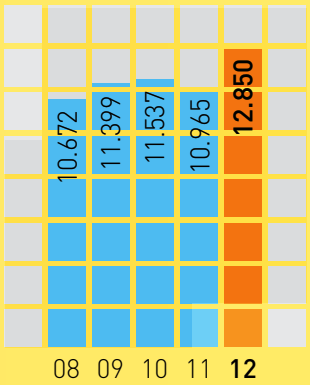

Laba Bersih per Saham
(Rupiah)

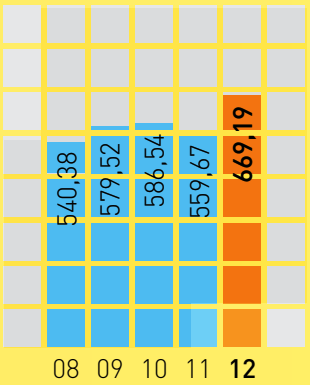

Aset
(Rupiah)

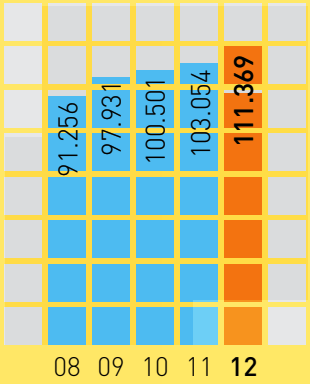

Liabilitas
(Rupiah)

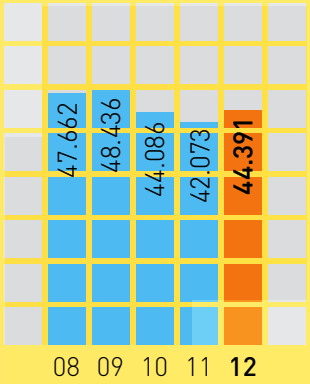

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
(Rupiah)

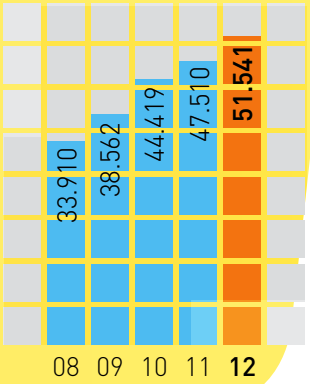

Ikhtisar Operasional

	Satuan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
		2012	2011	Perubahan (%)
Pelanggan *Broadband*				
Fixed broadband (Speedy)	(000) pelanggan	2.341	1.789	30,9
Mobile broadband (Flash)	(000) pelanggan	11.039	5.532	99,5
Blackberry	(000) pelanggan	5.764	3.153	82,8
Total Pelanggan *Broadband*	**(000)** pelanggan	**19.144**	**10.474**	**82,8**
Pelanggan Seluler				
Pasca bayar (*kartuHalo*)	(000) pelanggan	2.149	2.188	(1,8)
Pra bayar (simPATI, Kartu As)	(000) pelanggan	122.997	104.829	17,3
Total Pelanggan Seluler	**(000)** pelanggan	**125.146**	**107.017**	**16,9**
Pelanggan Telepon Tetap				
Fixed wireline	(000) pelanggan	8.946	8.602	4,0
Fixed wireless	(000) pelanggan	17.870	14.238	25,5
- Pasca bayar (Classy)	(000) pelanggan	428	468	(8,5)
- Pra bayar (Trendy)	(000) pelanggan	17.442	13.770	26,7
Total Pelanggan Telepon Tetap	**(000)** pelanggan	**26.816**	**22.840**	**17,4**
Pelanggan Lainnya				
Televisi berbayar	(000) pelanggan	1.191	1.000	19,1
Satelit-transponder	(000) MHz	2.650	2.360	12,3
Network				
BTS	unit	60.011	48.341	24,1
Layanan Pelanggan				
PlasaTelkom	unit	572	727	(21,3)
Grapari	unit	85	32	165,6

Pelanggan *Broadband*
(dalam ribuan)

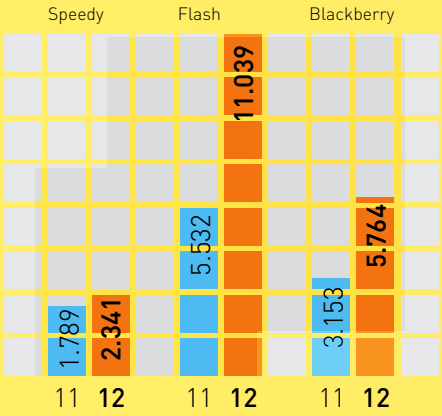

Pelanggan Seluler
(dalam ribuan)

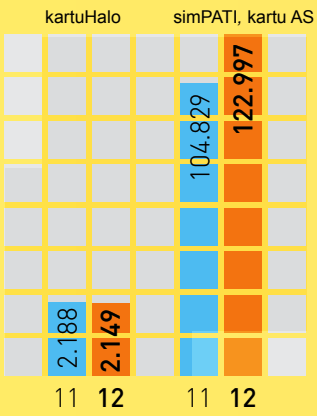

Pelanggan Telepon Tetap
(dalam ribuan)

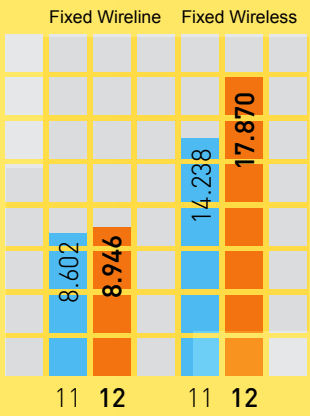

Pelanggan Lainnya
(dalam ribuan)

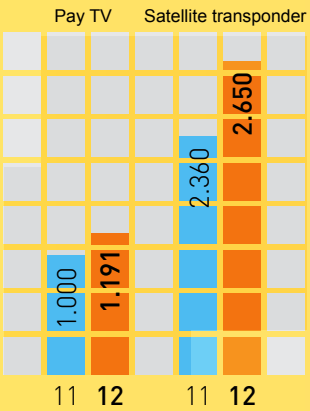

BTS
(dalam unit)

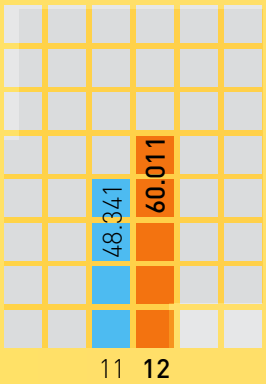

Layanan Pelanggan
(dalam unit)

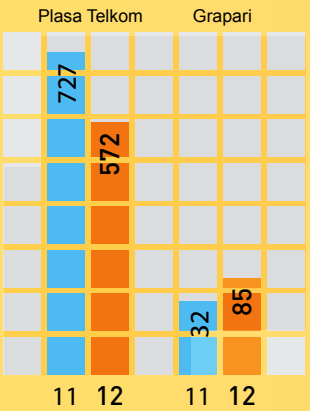

Ikhtisar Saham Biasa dan Obligasi

Grafik Harga Saham dan Volume Perdagangan Telkom di BEI 2011-2012

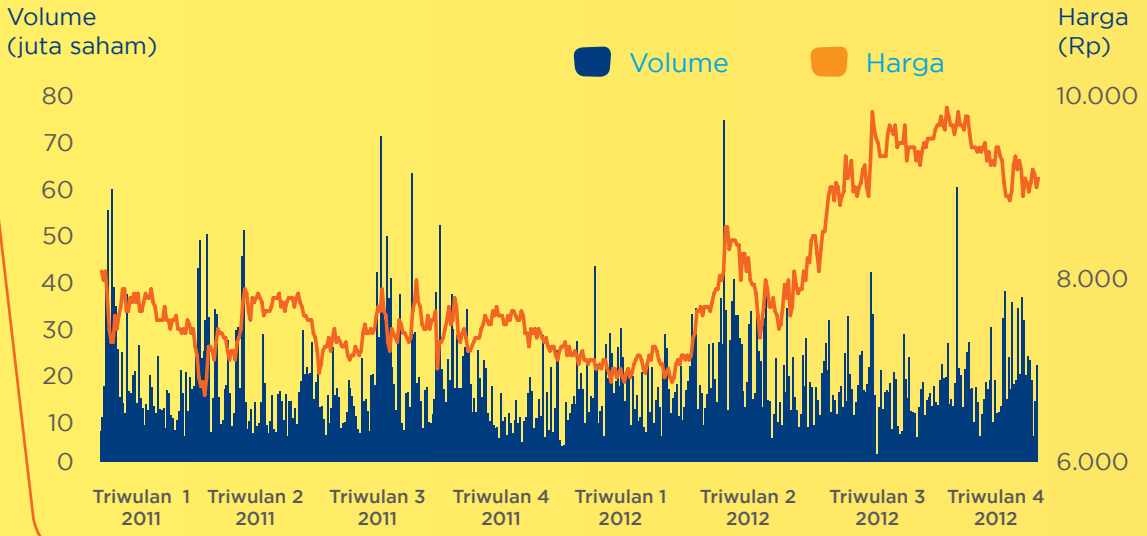

Grafik Harga Saham dan Volume Perdagangan Telkom di NYSE 2011-2012

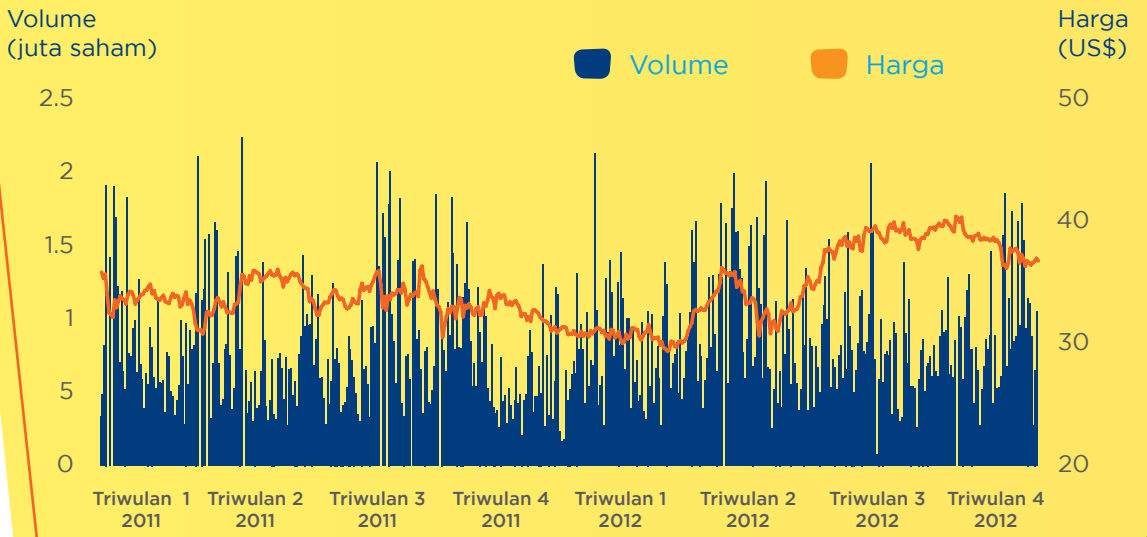

Harga Saham dan Volume Perdagangan

Berikut kami sajikan laporan harga saham tertinggi, terendah, penutupan, volume perdagangan, jumlah saham beredar serta kapitalisasi pasar dari saham biasa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") untuk periode yang tertera:

Tabel Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Telkom di BEI

Tahun Kalendar	Harga Saham[1]			Volume	Jumlah Saham Beredar	Kapitalisasi Pasar
	Tertinggi	Terendah	Penutupan	(lembar saham)		(Rp miliar)
	(dalam Rupiah)					
2008	10.250	5.000	6.900	6.162.126.500	19.669.424.780	135.719
2009	10.350	5.750	9.450	4.174.413.500	19.669.424.780	185.876
2010	9.800	6.950	7.950	5.707.850.000	19.669.424.780	156.372
2011	8.050	6.600	7.050	4.441.579.000		
Triwulan Pertama	8.050	6.600	7.350	1.297.346.000	19.669.424.780	144.570
Triwulan Kedua	7.850	6.800	7.350	957.638.000	19.627.724.280	144.264
Triwulan Ketiga	7.900	6.900	7.600	1.261.616.000	19.527.516.280	148.409
Triwulan Keempat	7.750	6.900	7.050	924.979.000	19.386.339.320	136.674
2012	9.950	6.650	9.050	4.600.560.500		
Triwulan Pertama	7.150	6.650	7.000	1.039.571.000	19.219.393.820	134.536
Triwulan Kedua	8.700	7.000	8.150	1.386.964.000	19.184.274.820	156.352
Triwulan Ketiga	9.850	7.950	9.450	1.020.030.500	19.153.568.820	181.001
Triwulan Keempat	9.950	8.650	9.050	1.153.995.000	19.149.068.820	173.299
September	9.750	9.150	9.450	287.944.500	19.153.568.820	181.001
Oktober	9.950	9.300	9.750	408.422.500	19.149.068.820	186.703
November	9.900	8.950	9.000	332.146.000	19.149.068.820	172.342
Desember	9.350	8.650	9.050	413.426.500	19.149.068.820	173.299
2013						
Januari	9.800	8.800	9.700	446.610.500	19.149.068.820	185.746
Februari	10.950	9.550	10.750	422.448.500	19.149.068.820	205.852

(1) Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio 1:2 untuk saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp250 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPST pada tanggal 30 Juli 2004, yang efektif pada tanggal 1 Oktober 2004. Nilai nominal hasil *stock split* telah diperhitungkan pada seluruh periode yang tertera.

Grafik Jumlah Saham Telkom yang Beredar dan Kapitalisasi Pasar 2011-2012

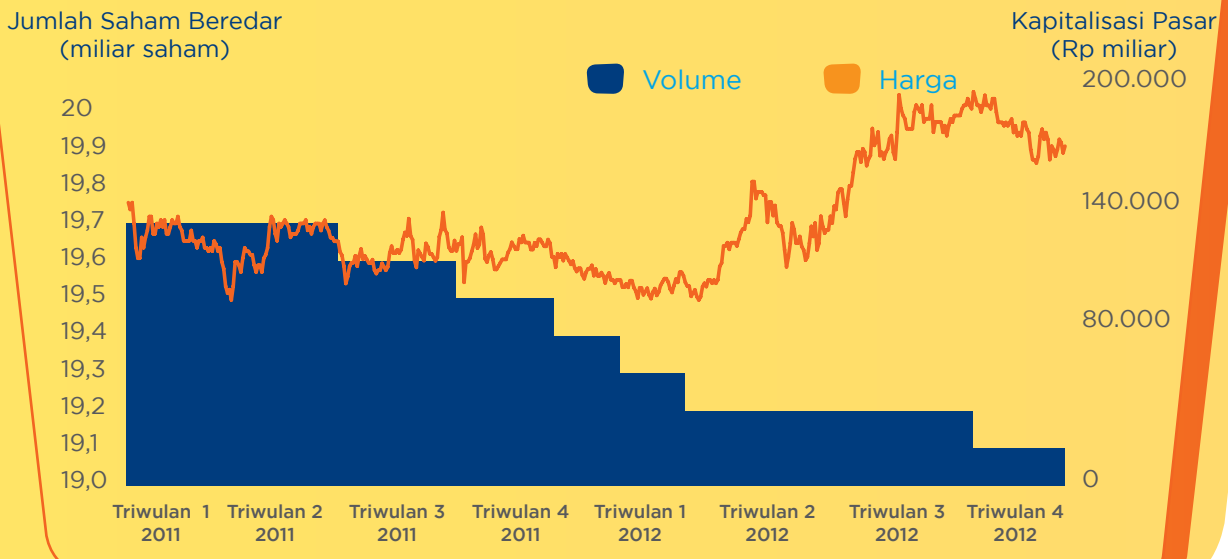

Pada tanggal 28 Desember 2012 harga saham Telkom pada hari terakhir perdagangan BEI di tahun 2012 ditutup di level Rp9.050.

Pada tabel di bawah ini, kami sajikan harga tertinggi, terendah, penutupan serta volume perdagangan ADS Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange ("NYSE") dan London Stock Exchange ("LSE") untuk periode yang tertera. Perdagangan ADS dilakukan secara "*off exchange*" (di luar bursa) di LSE. Berdasarkan peraturan LSE, yang dimaksud perdagangan "*off exchange*" adalah perdagangan yang dilakukan di bursa lain. Perdagangan baru dilaporkan ke LSE setelah transaksi selesai dilakukan.

Tabel Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Telkom di NYSE & LSE

Tahun Kalender	Harga Per ADS (NYSE)				Harga Per ADS (LSE)			
	Tertinggi	Terendah	Penutupan	Volume	Tertinggi	Terendah	Penutupan	Volume
	(dalam Dolar AS)			(ADS)	(dalam Dolar AS)			(ADS)
2008	45,50	17,31	25,01	98.988.347	45,74	16,89	24,62	38.028
2009	41,55	20,19	39,95	67.767.999	40,76	25,67	41,02	3.757
2010	43,80	30,33	35,65	69.803.576	42,00	30,76	34,91	19.673
2011	36,96	30,29	30,74	69.279.100	35,89	21,02	30,50	1.406.292
Triwulan Pertama	36,05	30,51	33,58	17.278.400	35,73	33,39	33,44	697
Triwulan Kedua	36,28	32,21	34,50	16.636.000	35,89	35,82	35,88	354.770
Triwulan Ketiga	36,96	30,29	33,07	20.886.200	35,59	33,58	34,44	87.554
Triwulan Keempat	34,48	30,62	30,74	14.478.500	21,02	21,02	30,50	963.271
2012	41,14	29,26	36,95	88.190.589	40,12	30,24	36,50	746.278
Triwulan Pertama	31,69	29,26	30,36	19.265.880	31,04	30,24	30,95	236.546
Triwulan Kedua	37,00	30,38	34,83	32.660.280	36,64	30,40	33,70	293.809
Triwulan Ketiga	41,14	34,28	38,93	19.696.121	39,78	34,30	39,10	88.412
Triwulan Keempat	41,00	36,00	36,95	16.568.308	40,12	36,50	36,50	127.511
September	40,53	37,87	38,93	5.230.487	39,10	39,10	39,10	50.000
Oktober	41,00	38,77	40,65	7.922.026	40,12	39,07	39,13	125.444
November	40,58	37,85	38,04	4.922.198	39,45	37,97	38,85	1.907
Desember	38,05	36,00	36,95	3.724.084	36,50	36,50	36,50	160
2013								
Januari	39,89	36,17	39,65	4.652.609	39,00	37,44	39,00	419,00
Februari	44,65	39,41	44,46	4.491.895	39,95	39,84	39,95	2.400

Pada tanggal 31 Desember 2012, hari terakhir perdagangan di NYSE dan LSE untuk tahun 2012, harga penutupan untuk satu ADS Telkom masing-masing US$36,95 dan US$36,50.

Tabel Obligasi Telkom

Nama Obligasi	Jumlah (Rp Juta)	Tanggal Terbit	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu (Tahun)	Tingkat Bunga	Penjamin	Wali Amanat	Peringkat
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A	1.005.000	25 Juni 2010	6 Juli 2015	5	9,6%	PT Bahana Securities; PT Danareksa Sekuritas; PT Mandiri Sekuritas;	PT CIMB Niaga Tbk	idAAA
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B	1.995.000	25 Juni 2010	6 Juli 2020	10	10,2%	PT Bahana Securities; PT Danareksa Sekuritas; PT Mandiri Sekuritas;	PT CIMB Niaga Tbk	idAAA

Peristiwa Penting

01
JANUARI

Telkom kembali memperoleh kepercayaan dari Kementerian Pertahanan sebagai penyedia layanan Tekonologi Informasi & Komunikasi ("TIK"), khususnya dalam kerja sama transponder serta layanan Jaringan Komunikasi Data Sistem Akuntansi Instansi (Jarkomta SAI).

02
FEBRUARI

Setelah lebih dari 14 tahun mengimplementasikan *System Application and Product* ("SAP"), Telkom telah mendapatkan sertifikat SAP *Customer Center of Expertise* ("CCoE") dan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil meraih SAP CCoE, dari sekitar 700 perusahaan atau institusi pengguna SAP di Indonesia.

03
APRIL

Data Center Telkom di Jatinegara diresmikan sebagai fasilitas *Green Data Center* Telkom yang pertama, dengan fitur-fitur ramah lingkungan seperti *Zero Depletion Refrigerant, Zero Depletion FAP, Environment Safe Materials* dan *Energy Saving*.

04
MEI

1. Rapat Umum Pemegang Saham Telkom pada 11 Mei 2012 antara lain menyetujui formasi baru jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Telkom.
2. Pembangunan gedung Telkom *Landmark Tower* ("TLT"), berlokasi di belakang gedung Grha Citra Caraka Telkom Jakarta, resmi dimulai pada tanggal 22 Mei 2012.

05
JUNI
Guna mendukung pertumbuhan industri kreatif digital di Indonesia, Telkom menandatangani Perjanjian Kerja sama ("PKS") Pengembangan dan Inkubasi Bisnis bidang TIK dengan 18 komunitas dan perusahaan pengembang perangkat lunak yang tergabung dalam Bandung *Digital Valley*.

06
JULI
Direktur Utama Telkom dan Telkomsel saat *executive meeting* dengan *Co-Founder* Apple, Steve Wozniak di Jakarta menyatakan Telkom Group siap membangun ekosistem *Device Network Application* ("DNA") yang sehat guna menghadirkan teknologi *broadband* dengan kualitas terbaik di Indonesia.

07
AGUSTUS
1. Telkom dan IBM Indonesia sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan layanan Teknologi Informasi ("TI") di Indonesia, khususnya dalam memberikan solusi TI terbaik untuk kalangan korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM").

2. Telkom menggelar layanan *Video Conference* ("Vicon") tanggal 29 Agustus 2012 di Istana Negara yang menghubungkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Liberia Ellen Johnson dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.

08
SEPTEMBER
1. Telkom menghadiri acara *Indonesia Investment Day* yang di selenggarakan di NYSE Wall Street, New York tanggal 24 September 2012. Acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diadakan bertujuan mengajak pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia.

2. Telkom mengadakan acara peluncuran Telkom CorpU tanggal 28 September 2012 sebagai salah satu wahana menuju *center of excellence* bagi seluruh karyawan.

09
NOVEMBER
1. PT Telkom Akses, entitas anak dengan kepemilikan mayoritas oleh Telkom, didirikan pada November 2012 untuk mendukung pengembangan *broadband* oleh Telkom di Indonesia.

2. Sinergi Telkom Group antara Telkom-Telkomsel telah menghasilkan fitur baru yang menarik bagi pelanggan Telkomsel *kartuHalo*, yakni layanan *Mobile Entertainment Groovia Lite*, yang berisi hiburan digital berupa *Live TV, TV on Demand*, film, musik, dan radio yang dapat diakses melalui berbagai media seperti laptop/PC, *smartphone*, dan *tablet*.

10
DESEMBER
Direktur Utama, Arief Yahya, meluncurkan *Speedy Instant Card*, produk akses internet *broadband* Telkom yang digelar untuk tahap awal di Bali.

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan

JANUARI

TelkomVision, produk TV berbayar Telkom, meraih *Great Performing Award* dalam ajang *Digital Media Award*, penghargaan *The Best Market Drive* dalam ajang Marketing Award 2011, dan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai TV berbayar dengan pertumbuhan penjualan tertinggi (800% dalam waktu setahun).

FEBRUARI

1. Penghargaan *Top Brand Award* 2012 untuk produk Speedy, Flexi pasca-bayar dan Flexi pra-bayar dari Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing.
2. Penghargaan peringkat kedua di kategori Kesehatan Ibu dan Anak di Sektor Swasta untuk implementasi i-CHAT (*I Can Hear and Talk*/aplikasi pembelajaran bahasa untuk tuna rungu) dari Kantor Urusan Khusus Presiden Republik Indonesia.
3. Penghargaan *Silver Winner InMa* 2012 untuk Majalah "KILAU" atas karya kreatif sampul muka, pada ajang IPMA yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Pers.
4. Penghargaan *Call Center Service Excellence Award* 2012 untuk *Call Center* 147 Telkom di kategori Telekomunikasi dan kategori Penyedia Layanan Internet, dari *Care Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Care-CCSL)* dan Majalah Service Excellence.

MARET

1. Penghargaan internasional sebagai *The Best Environmental Responsibility* dan *The Best Investor Relations Professional* dalam ajang *Asian Excellence Recognition Award* 2012 ke-2 dari Majalah *Corporate Governance Asia* yang berkedudukan di Hong Kong.
2. Penghargaan sebagai Pemimpin Perusahaan Penggerak Kewirausahaan, atas komitmen Telkom dalam menjalankan peran *Good Corporate Citizenship* melalui penyelenggaraan program kemitraan dengan UMKM dan program bina lingkungan, yang diselenggarakan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

APRIL

1. Penghargaan The Best CDMA Operator untuk Telkom melalui Telkom Flexi, serta *The Best GSM* Operator dan *Best Operator of the Year* untuk Telkomsel, entitas anak Telkom, dalam ajang Seluler Award 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah Selular, Tabloid Handphone dan Tabloid Seluler *Online* dari group Global Seluler Media.

2. Penghargaan *Indonesia Enterprise Risk Management Award* 2012 dari Majalah Business Review.

MEI

Penghargaan sebagai *The World's Biggest Public Companies* dalam ajang Forbes Global 2000 dari Majalah Forbes Indonesia.

JUNI

Penghargaan *Silver* untuk kategori *Strategy* dan *Tactical* serta *Bronze* untuk kategori *Special Award*, pada ajang BUMN *Marketing Award* 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track dengan dukungan BUMN Marketeers Club dan Markplus Inc.

JULI

1. Meraih penghargaan *Gold* di kategori *Telecommunication Industry*, serta penghargaan *Top 100 Worldwide, Top 50 Regional in Asia-Pacific*, dan *Special Achievement Award – The Most Engaging Annual Report*, dalam ajang 2011 *Vision Awards Annual Report Competition* yang diselenggarakan oleh League of American Communications Professionals, San Diego, Amerika Serikat.

2. Penghargaan 8 Besar Finalis pada ajang *Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise* Study 2012 yang diselenggarakan oleh Dunamis Organization Services.

3. Penghargaan *Sales Management Champion* dan *Communication Management Champion*, pada *Markplus Insight Award* 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketeers bekerja sama dengan PT JIExpo sebagai penyelenggara Jakarta Fair dan lembaga riset Markplus Insight.

4. Penghargaan *Social Business Innovation Award* untuk Telkom atas Pemberdayaan Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan *The Best Green CEO* di Sektor Telekomunikasi untuk Arief Yahya, dalam acara *Appreciation Night* Warta Ekonomi yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi.

SEPTEMBER
Penghargaan *Most Consistent Dividend Policy* dan *Best Strategic Corporate Social Responsibility* dalam ajang *Best Financial Institution Awards* ke-6 dan *Corporate Awards* ke-2 tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah Alpha Southeast Asia.

OKTOBER
1. Penghargaan *The Best for All Criteria, The Best for Employee Net Promoter Score, The Best for Human Capital Initiative Employee Self Service*, dan *The Best for CEO Commitment*, pada ajang *Indonesia Human Capital Study* 2012 yang didukung oleh Dunamis Human Capital serta Majalah Business Review.
2. Penghargaan Indonesia *Broadband Service Provider of the Year* 2012 dalam ajang Indonesia *Excellence Awards* 2012 yang diselenggarakan oleh Frost & Sullivan.
3. Penghargaan *The Best Innovation* dalam *Marketing Award* 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing.

NOVEMBER
1. Penghargaan *Best Corporate Overall* dalam survei tahunan *Corporate Governance* ke-4 yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* ("IICD").
2. Penghargaan di kategori Industri Bidang Telekomunikasi dalam *Economic Challenges Award* 2012 yang diselenggarakan oleh Metro TV.
3. Penghargaan sebagai *The Best CEO on Survival Management* untuk Arief Yahya, Direktur Utama Telkom, serta penghargaan *The Best Corporate of the Year* 2012 untuk Telkom, dalam Anugerah *Business Review* 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah *Business Review*.

DESEMBER
1. Penghargaan *Best Sustainability Report* 2011 untuk kategori Sektor Jasa serta peringkat ke-2 *Best Website* 2012, dalam kompetisi *Indonesia Sustainability Reporting Award* 2012 yang diselenggarakan oleh *National Center for Sustainability Reporting*.
2. Penghargaan sebagai *Best CEO BUMN Inovatif* Terbaik 2012 untuk Arief Yahya, Direktur Utama Telkom, dalam acara Anugerah BUMN 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track dengan dukungan Forum Humas BUMN dan CIS School of Innovation.
3. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index – The Most Trusted Companies* 2012 sebagai perusahaan sangat terpercaya yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* ("IICG") bekerja sama dengan Majalah SWA berdasarkan survei investor, analis dan *fund manager*.
4. Penghargaan *The Best e-Corp, The Best CIO* dan *The Best Future IT Leader* 2012 pada ajang Indonesia *Digital Summit* 2012, oleh Majalah SWA.
5. Penghargaan sebagai Korporasi Pilihan Serikat Pekerja Surat Kabar ("SPS") 2012 pada ajang SPS-Indonesia PR Summit ke-1 2012.

Sertifikasi

1. **Sertifikat ISO 9001:2008**
   Diberikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Consumer Service Barat, oleh TUV Rheinland Cert GmbH pada tahun 2011. Berlaku sampai dengan tahun 2013.

2. **Sertifikat ISO 9001:2008**
   Diberikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Telkom Flexi, oleh TUV Rheinland Cert GmbH pada tahun 2011. Berlaku sampai dengan tahun 2014.

3. **Sertifikat ISO/IEC 27001:2005**
   Diberikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Gedung Grha Citra Caraka, Divisi INFRATEL Lt. M dan Divisi ACCESS Lt. 7, oleh TUV Rheinland Japan Ltd., pada tahun 2012. Berlaku sampai dengan tahun 2015.

4. **Sertifikat AS/NZS ISO 9001:2008**
   Diberikan kepada PT Administrasi Medika (“AdMedika”), entitas anak tidak langsung dari Telkom, oleh Verification New Zealand Limited, pada tahun 2012. Berlaku sampai dengan tahun 2015.

5. **Sertifikat *Customer Center of Expertise***
   Diberikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. oleh SAP, pada tahun 2012. Berlaku sampai dengan tahun 2013.

Laporan Dewan Komisaris

Investasi Telkom pada jaringan *broadband* dan layanan konvergensi *triple-play* memberikan akses bagi Indonesia untuk meningkatkan keunggulan kompetitif melalui adopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan "*platform innovation*".

Investasi Telkom adalah langkah antisipatif dan strategis dalam kemajuan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang. Telkom harus mampu memastikan keberlanjutan eksistensinya ke depan dan senantiasa meningkatkan nilai tambah melalui investasi jaringan infrastruktur yang berdaya guna tinggi bagi peningkatan pendapatan dan *corporate value* untuk pemegang saham dan masyarakat Indonesia.

Jusman Syafii Djamal
Komisaris Utama

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada tahun 2012, Telkom berhasil memperlihatkan prestasi yang memuaskan terkait dengan upaya peningkatan pertumbuhan bisnis maupun capaian kinerja keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Telkom juga telah melakukan investasi yang substansial pada infrastruktur telekomunikasi, khususnya jaringan *broadband*, serta pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Telkom. Ini semua membuktikan konsistensi kami dalam terus meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2012 secara umum masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada bisnis seluler, selain kecenderungan pertumbuhan yang semakin pesat pada layanan *broadband* dan data. Telkom sendiri memiliki misi strategis untuk membangun dan menyediakan infrastruktur *broadband* di Indonesia. Selain untuk pertumbuhan bisnis Telkom, infrastruktur *broadband* merupakan wahana integrasi 17.000 pulau Nusantara.

Pengembangan jaringan *broadband* merupakan bagian dari jaringan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ("MP3EI") 2011-2025. Melalui pembangunan infrastruktur *backbone* serat optik di koridor-koridor ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur dikembangkan jaringan infrastruktur terkoneksi dengan yang sudah digelar di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, setelah itu disusul dengan jaringan koneksi *broadband* sampai ke rumah-rumah *(homepass)*. Dalam MP3EI pada tahun 2015, Pemerintah mentargetkan penggelaran sebuah jaringan *broadband* nasional yang menjangkau sekitar 30% dari rumah tangga *(household)* yang ada di Indonesia. Komitmen Telkom untuk berinvestasi membangun jaringan *broadband* merupakan bagian penting dari keberhasilan pelaksanaan MP3EI.

Tema Laporan Tahunan 2012 ini, "Mempelopori Masyarakat Digital di Indonesia", adalah ungkapan untuk menggambarkan langkah-langkah Telkom dalam melakukan investasi pada jaringan *broadband* dan memberikan layanan konvergensi *triple-play (voice-data-video)*. Pada akhirnya, investasi infrastruktur *broadband* berperan dalam memberikan akses bagi seluruh penduduk Indonesia untuk meraih keunggulan kompetitif melalui adaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui belanja modal ("capex") infrastruktur *broadband,* Telkom diharapkan dapat menciptakan *"platform of innovation"* bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Program-program kerja strategis Direksi di tahun 2012 ini secara garis besar difokuskan pada (i) peningkatan kinerja bisnis seluler sebagai kontributor utama pertumbuhan bisnis; (ii) pembangunan infrastruktur *backbone* dan jaringan *broadband* sebagai basis pertumbuhan; serta (iii) pengembangan bisnis-bisnis *new wave* yang diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan baru.

Direksi dengan dukungan seluruh jajaran Telkom dan Telkom Group telah bekerja dengan sangat baik. Dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan usaha maupun laba bersih tercatat meningkat cukup baik, di atas rata-rata industri maupun target yang ditetapkan. Strategi untuk fokus pada kinerja bisnis seluler dari entitas anak berhasil diterapkan dengan baik sehingga memungkinkan pencapaian tersebut. Jumlah capex dalam beberapa tahun terakhir ini juga terus meningkat, mencerminkan konsistensi Telkom dalam berinvestasi pada infrastruktur telekomunikasi sebagai dasar dari pertumbuhan bisnis. *Corporate Strategic Scenario* sebagai *blueprint* atau cetak biru Telkom telah di jalankan dengan tepat sasaran seperti rencana.

Kinerja operasional juga memperlihatkan pencapaian dan kemajuan yang menggembirakan. Sampai dengan akhir tahun 2012, persiapan pembangunan SKKL Sulawesi-Maluku-Papua sebagai jaringan *backbone* serat optik di kawasan Indonesia bagian timur telah tuntas untuk dapat direalisasi segera pada tahun 2014. Jaringan *backbone* sudah digelar di kawasan Indonesia barat dan tengah. Akselerasi pengembangan koneksi *broadband* ke pemakai akhir telah dilakukan melalui pembangunan koneksi *fixed broadband* ke rumah-rumah (*Fixed to the Home*/"FTTH") dan koneksi WiFi. Jumlah pengguna layanan data dan internet Telkom pada tahun 2012, baik *fixed* maupun *mobile broadband*, terlihat meningkat 82,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Direksi dalam mengelola jalannya Perusahaan sepanjang tahun 2012. Selain melalui rapat internal Dewan Komisaris, fungsi pengawasan tersebut terutama dilakukan melalui aktivitas komite-komite Komisaris sesuai bidangnya masing-masing. Komite Audit pada tahun 2012 telah bekerja secara intensif, antara lain dalam mengkaji independensi dan rencana pelaksanaan pekerjaan audit keuangan dari auditor independen yang baru ditunjuk, serta membahas implementasi sistem *whistleblowing*. Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain telah menyampaikan masukan terkait dengan usulan pencalonan personil di beberapa posisi

strategis di Telkom maupun Direksi dan Komisaris di Telkomsel, serta menyusun formulasi remunerasi yang dapat lebih memotivasi Direksi untuk meningkatkan profitabilitas Telkom. Sedangkan Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko selama tahun 2012 telah melakukan tinjauan dan pemantauan antara lain terhadap pemutakhiran *Corporate Strategic Scenario* sebagai rencana jangka panjang Perusahaan, realisasi capex, serta tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan proses pengawasan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas praktik Tata Kelola Perusahaan ("GCG") di Telkom. Sebagai perusahaan publik yang sahamnya juga tercatat di Bursa Efek New York, sistem dan mekanisme GCG Telkom dirancang dan telah beroperasi selama ini dengan standar *benchmark* yang tinggi, misalnya yang terkait dengan aspek transparansi, pengungkapan wajib, maupun akurasi informasi. Dewan Komisaris percaya bahwa keberadaan standar praktik terbaik GCG kelas dunia akan merupakan salah satu sumber daya yang efektif bagi Telkom untuk mengelola perubahan *"business cycle"* serta ekosistem lainnya dan memitigasi dampak risiko bisnis yang dihadapinya. Hal ini menjadi penting khususnya di industri dan lingkungan usaha yang akan semakin diwarnai oleh dinamika pasar, produk dan jasa, serta regulasi dan tentunya persaingan.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan

Dibandingkan situasi beberapa tahun yang lalu, saat ini persaingan antar operator telekomunikasi sudah terlihat lebih sehat, walaupun praktik perang harga masih tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi, termasuk oleh pihak regulator telekomunikasi di Indonesia. Sementara itu, tantangan terbesar bagi Telkom, dan operator telekomunikasi pada umumnya, adalah untuk mencari model-model bisnis yang dapat mengakomodasi semakin meluasnya kehadiran layanan-layanan media sosial saat ini. Berbagai layanan tersebut kini masih dianggap sebagai pelengkap atau komplementer bagi produk dan layanan yang disediakan oleh operator telekomunikasi, namun sesungguhnya berpotensi menjadi ancaman bagi arus pendapatan para operator yang telah berinvestasi membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Pengembangan bisnis-bisnis *new wave* di bidang media oleh Telkom dapat dipandang sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi tantangan tersebut. Pada saat yang sama, Telkom masih akan konsisten melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur *broadband* di Indonesia, baik sebagai misi nasional Telkom maupun sebagai strategi pertumbuhan bisnis ke depan. Monetisasi dari infrastruktur yang telah dibangun juga akan terus didorong, terutama dengan mempercepat penggelaran koneksi WiFi dalam program Indonesia WiFi. Selain itu, program kerja Direksi yang juga sangat penting adalah untuk membentuk Telkom menjadi suatu *"Learning Organization"* melalui pembentukan *"Corporate University"* dengan demikian membangun kapabilitas *human capital* Telkom sebagai modal utama pencapaian keberlanjutan Perusahaan ke masa mendatang.

Keanggotaan Direksi Telkom saat ini seluruhnya merupakan hasil kaderisasi kepemimpinan dari dalam Telkom. Hasil seleksi dari talenta-talenta terbaik Perusahaan yang tampil setelah mengalami proses akumulasi keahlian secara berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam mekanisme rotasi pekerjaan, mutasi jabatan dan seleksi internal. Dengan berbagai potensi tersebut, Dewan Komisaris menaruh keyakinan penuh akan kemampuan Direksi merealisasikan target-target yang ditetapkan untuk tahun 2013 dan membawa Telkom menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Perubahan Jajaran Komisaris

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Mahmuddin Yasin, Bobby AA Nazief dan Rudiantara, yang kini tidak lagi bersama Dewan Komisaris, atas kerja sama dan kontribusi yang baik selama masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris Telkom. Sekaligus, saya ingin menyambut Saudara Parikesit Suprapto dan Hadiyanto, masing-masing sebagai Komisaris, serta Virano Gazi Nasution sebagai Komisaris Independen, dalam jajaran Dewan Komisaris.

Apresiasi Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan

Mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Direksi dan seluruh jajaran karyawan Telkom atas dedikasi mereka terhadap keberhasilan transformasi Telkom menjadi perusahaan yang terus meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Dewan Komisaris juga berterima kasih pada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan kepada Telkom.

Jusman Syafii Djamal
Komisaris Utama

Laporan Direksi

Strategi pertumbuhan Telkom didasarkan pada prinsip "mengutamakan yang utama" serta fokus pada area-area pertumbuhan. Pada tahun 2012, strategi ini diwujudkan dengan mengalokasikan sumber-sumber daya Perusahaan terutama bagi investasi pada sumber daya manusia Telkom, menumbuhkan bisnis seluler, dan memperluas penetrasi *broadband* di Indonesia.

Arief Yahya
Direktur Utama

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Perusahaan dengan berbesar hati dapat melaporkan mengenai berbagai kemajuan yang terus dicapai oleh Telkom dalam proses transformasinya untuk menjadi penyelenggara utama bisnis *Telecommunications, Information, Media, Edutainment & Services* ("TIMES") di Indonesia dan unggul di regional. Lebih menggembirakan lagi, strategi transformasi tersebut telah mulai memberikan hasil yang baik sebagaimana terlihat dari pencapaian kinerja keuangan dan operasional kami sepanjang tahun 2012.

Kinerja Keuangan

Telkom menutup tahun 2012 dengan membukukan pencapaian kinerja keuangan yang sangat baik, dari sisi pendapatan maupun profitabilitas, yang tercatat tumbuh lebih tinggi dari rata-rata industri. Dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan konsolidasi tercatat tumbuh 8,3% di tahun 2012 menjadi sebesar Rp77,1 triliun, didorong oleh pertumbuhan sebesar 7,5% pada pendapatan dari bisnis seluler kami yang mengkontribusikan 39,8% pada pendapatan konsolidasi Telkom. EBITDA tumbuh 9,1% menjadi sebesar Rp40,2 triliun, dengan EBITDA marjin sebesar 52,1%.

Di sisi profitabilitas, Telkom membukukan peningkatan laba bersih sebesar 17,2% dari Rp11,0 triliun pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp12,9 triliun pada tahun 2012. Perolehan ini mencerminkan rasio laba per jumlah aset ("ROA") sebesar 11,5% dan laba per ekuitas ("ROE") sebesar 24,9%, dibandingkan 10,6% dan 23,1% masing-masing pada tahun sebelumnya. Sedangkan laba bersih per lembar saham adalah Rp669 atau mengalami kenaikan 19,6%.

Perkembangan lain yang dapat dilaporkan terkait aspek keuangan di 2012 adalah diselesaikannya program pembelian-kembali saham tahap IV untuk 520.355.960 lembar saham senilai total Rp3,8 triliun, yaitu 76% dari target program ini. Melalui program pembelian-kembali saham, kami berupaya meningkatkan nilai pemegang saham, dan memanfaatkan kondisi arus kas Perusahaan yang positif saat ini untuk keperluan pendanaan modal di masa mendatang. Pengeluaran Telkom untuk belanja modal *(capital expenditure)* tercatat sebesar Rp17,3 triliun pada tahun 2012, sekitar 50% diantaranya untuk perluasan jaringan akses radio dalam rangka mendukung bisnis seluler kami.

Fundamental Telkom yang kuat dengan kinerja yang juga baik pada akhirnya tercermin pada kinerja saham Perusahaan pada tahun 2012, dengan kapitalisasi pasar yang meningkat 28%, dan harga saham di BEI yang ditutup sebesar Rp9.050,- per saham, dibandingkan Rp7.050,- per saham setahun sebelumnya.

Kinerja keuangan yang sangat baik berhasil kami raih selama tahun 2012 tersebut secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2012.

Strategi Pertumbuhan 2012

Seluruh pencapaian yang baik tersebut tidak terlepas dari strategi Telkom yang telah melakukan transformasi bisnis secara mendasar sebagai jawaban atas perubahan kondisi lingkungan usaha yang telah, sedang dan masih akan terus berlangsung di era globasisasi ini. Saat ini, kecenderungan industri telekomunikasi telah semakin bergeser ke arah layanan *broadband* (data dan internet) baik *mobile broadband* maupun *fixed broadband*, dengan pertumbuhan terbesar di *mobile broadband* yaitu akses 3G dan WiFi. Disisi pasar, perkembangan yang diamati adalah munculnya layanan-layanan konvergensi *(multi-play* dan *multi-screen)* untuk segmen konsumer dan layanan *enterprise mobility* di segmen pelanggan bisnis atau perusahaan.

Strategi pertumbuhan kami didasarkan pada prinsip 'mengutamakan yang utama' dengan fokus pada area-area pertumbuhan masa depan. Pada tahun 2012, strategi ini dilaksanakan dengan mengalokasikan sumber-sumber daya Perusahaan terutama bagi investasi pada sumber daya manusia Telkom, menumbuhkan bisnis seluler, dan memperluas penetrasi *broadband* di Indonesia.

Center of Excellence

Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting karena transformasi bisnis Telkom membutuhkan juga transformasi kultur atau budaya kerja. Telkom harus mampu memobilisasi sumber daya manusianya untuk mempersiapkan, menerima dan menggerakkan perubahan sehingga akhirnya, kebiasaan menghadapi perubahan menjadi tertanam dalam perilaku berpikir dan bertindak setiap karyawan kami. Salah satu inisiatif strategis kami ke arah ini adalah melalui pembentukan Telkom CorpU pada tahun 2012.

Pembentukan Telkom CorpU merupakan salah satu wahana untuk mencapai *Center of Excellence* sebagaimana tercermin dalam strategi jangka panjang atau *Corporate Strategic Scenario* Telkom. Ada tiga fungsi utama Telkom CorpU yaitu pertama, sebagai *center of chiefship* yang akan melahirkan *great leader* kelas dunia; kedua, sebagai *center of competence* yang melahirkan *great people*; dan ketiga sebagai *center of certification* yang akan melahirkan SDM dengan *global standard*. Dengan demikian maka Telkom CorpU menjadi wahana strategis untuk meningkatkan keunggulan komparatif Telkom sebagai *Competence Centric Company*.

Langkah ini merupakan sebuah investasi jangka panjang Perusahaan dan kami berharap dapat menciptakan pemimpin-pemimpin perusahaan yang unggul, sumber daya manusia profesional yang kompeten, dan yang dilengkapi dengan sertifikasi berstandar global. Pada tahun 2012, upaya-upaya ini didukung antara lain oleh inisiatif *Global Talent Development Program*, dimana kami telah mengirim sekitar 109 karyawan mengikuti penugasan kerja di berbagai perusahaan telekomunikasi di Australia, Singapura, Hong Kong dan Timor Leste. Mereka ini diharapkan dapat memperoleh *exposure* pada *best practice* dan teknologi terkini yang berorientasi masa depan, selain membangun jaringan dan kemitraan di masing-masing perusahaan penugasan yang terkait rantai nilai *(value chain)* bisnis Telkom di luar negeri.

Kami juga telah mengikutsertakan 473 karyawan pada berbagai program sertifikasi profesi bertaraf internasional sepanjang tahun 2012. Sebagai bagian dari Telkom CorpU dan *center of excellence*, kami telah mendirikan Telkom *Professional Certification Centre* ("TPCC"), yang diarahkan untuk menjadi unit yang dikenal secara global sebagai lembaga sertifikasi yang berlaku nasional dan internasional. Ke depan, kami mengharapkan bahwa seluruh jenis kompetensi maupun proses-proses kerja dan operasional di Telkom dapat dilengkapi dengan standar sertifikasi masing-masing. Salah satu contoh adalah sertifikasi *Customer Center of Excellence* dari SAP yang untuk pertama kalinya diperoleh Telkom pada tahun 2012.

Winning Telkomsel

Entitas anak Perusahaan, Telkomsel, masih merupakan kontributor utama terhadap bisnis Perusahaan. Sejalan dengan prinsip mengutamakan yang utama, Telkom telah membentuk sebuah unit khusus, *Team Operation Support* ("TOS") Telkomsel, yang berfungsi untuk mempertajam dan menyelaraskan program-program kerja di Telkom khusus untuk mendukung pertumbuhan bisnis seluler kami melalui Telkomsel. Pada tahun 2012, upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas jaringan Telkom di Jakarta, Jawa Tengah dan Bali untuk menunjang peningkatan pangsa pasar Telkomsel di wilayah-wilayah tersebut, serta pembangunan jaringan *broadband* di 100 kota untuk menumbuhkan volume bisnis komunikasi data Telkomsel.

Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang menggembirakan, seperti terlihat dari pencapaian kinerja keuangan Telkomsel sampai dengan akhir tahun 2012, sebagaimana telah disinggung di atas sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan, EBITDA, dan laba bersih Telkomsel di tahun 2012 merupakan pencapaian yang cukup luar biasa, tumbuh *double digit* masing-masing sebesar 11,9%, 10,9% dan 22,5%, setelah pada dua tahun sebelumnya hanya mampu tumbuh dengan satu digit. Disisi operasional, jumlah pelanggan seluler Telkomsel tercatat meningkat 16,9% menjadi sekitar 125,1 juta pelanggan di akhir tahun 2012, mewakili penguasaan pangsa pasar sekitar 45,3% di Indonesia. Jumlah pengguna layanan komunikasi data Telkomsel yaitu melalui layanan *broadband* nirkabel (Flash) maupun layanan Blackberry juga meningkat signifikan sekitar 99,5% dan 82,8%.

Indonesia Digital Network

Sementara itu, pengembangan dan perluasan jaringan *broadband* merupakan upaya kami untuk fokus pada area-area pertumbuhan masa depan. Penguatan infrastruktur berbasis *broadband* untuk mendukung inovasi layanan dan produk menuju bisnis *Information*, *Media*, *Edutainment* dan *Services* ("IMES") menjadi andalan Kami untuk membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi Perusahaan. Tidak hanya itu, upaya tersebut juga sekaligus merupakan kontribusi kami secara langsung pada kemajuan ekonomi dan kecerdasan bangsa Indonesia, termasuk dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran program MP3EI 2011-2025 yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu, Telkom pada tahun 2012 meluncurkan inisiatif pengembangan *Indonesia Digital Network* ("IDN") dengan komponen-komponennya yaitu *Indonesia Digital Access* ("id-Access"), *Indonesia Digital Ring* ("id-Ring") dan *Indonesia Digital Convergence* ("id-Con").

Pengembangan jaringan *broadband* merupakan bagian dari penguatan konektivitas nasional, yaitu salah satu dari tiga pilar utama MP3EI. Sasaran dalam MP3EI terkait aspek ini adalah perwujudan jaringan *broadband* nasional yang dapat mencakup 30% dari rumah tangga *(household)* di Indonesia pada tahun 2015, atau sekitar 20 juta pelanggan. Melalui id-Access, Telkom berkomitmen mendukung pencapaian target tersebut dengan membangun akses *broadband* kecepatan tinggi melalui jaringan serat optik yang dapat memberikan 15 juta akses *broadband* ke rumah-rumah *(homepass)* serta satu juta *access point* WiFi yang dapat melayani 10 juta pelanggan. Sampai dengan akhir tahun 2012, kami telah berhasil membangun 4,7 juta koneksi *homepass* untuk mendukung produk baru kami yaitu *Speedy Instant*. Pengembangan id-Access juga didukung dengan melanjutkan program modernisasi jaringan telepon tetap ke rumah pelanggan melalui migrasi kabel tembaga ke serat optik dalam skema *Trade-In Trade-Off* ("TITO").

Komponen IDN yang kedua yaitu inisiatif id-Ring, yang sebelumnya dikenal sebagai Telkom Nusantara *Super Highway*, merupakan kontribusi Telkom pada proyek Palapa Ring dari Pemerintah RI untuk menghubungkan seluruh wilayah di kepulauan Nusantara ini ke dalam suatu jaringan *backbone* berbasis serat optik melalui jalur laut maupun darat. Proyek Palapa Ring ini akan

mengintegrasikan jaringan yang sudah ada saat ini dengan jaringan baru yang akan dibangun di Kawasan Indonesia Timur yaitu SKKL Sulawesi-Maluku-Papua yang menghubungkan Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura dan Merauke. Saat ini, Telkom sudah mengoperasikan infrastruktur *backbone* serat optik yang membentang dari Banda Aceh sampai Kupang, termasuk segmen Mataram-Kupang yang dibangun pada tahun 2012. Melalui id-Ring, Telkom berkomitmen membangun jaringan *backbone* berbasis serat optik maupun IP *(Internet Protocol)* dengan menggelar 30 *node terra router* dan sekitar 75.000 kilometer kabel serat optik. Proyek SKKL Sulawesi-Maluku-Papua dilaksanakan oleh sebuah konsorsium operator telekomunikasi di Indonesia, termasuk Telkom dengan porsi investasi 40%. Proses tender telah selesai menjelang akhir tahun 2012, dan pembangunan proyek akan dilaksanakan segera pada tahun 2013.

Secara keseluruhan, Telkom mengalokasikan belanja modal sekitar Rp1.864 miliar pada tahun 2012 untuk pembangunan jaringan *broadband* dan *backbone*. Hal ini didukung juga oleh penataan kembali struktur organisasi Telkom guna mempertajam fokus ke segmen-segmen bisnis *broadband* melalui pembentukan Divisi Broadband dan Divisi Wireless Broadband serta pendirian entitas anak baru yaitu PT Telkom Akses. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan *broadband* tersebut antara lain telah berdampak pada peningkatan jumlah pengguna layanan data dan internet kami di bawah *brand* Speedy menjadi 2,3 juta pengguna, yang mengkontribusikan pendapatan sebesar Rp4,2 triliun pada tahun 2012.

Sementara itu, inisiatif id-Con adalah upaya Telkom untuk membangun *platform* konvergensi untuk *multi-services* dan *multi-screen* berbasis *broadband*, yang akan menghadirkan berbagai produk dan layanan dalam bisnis IMES Telkom. Bisnis-bisnis ini, yang kami sebut sebagai bisnis *new wave*, merupakan area pertumbuhan masa depan yang juga menjadi fokus Perusahaan pada tahun 2012.

Masyarakat Digital

Dalam id-Con, Telkom tengah membangun ekosistem layanan konvergensi teknologi berbasis-IP yang berjalan di atas infrastruktur *broadband* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan konsumer maupun bisnis. Di segmen konsumer baik untuk konsumen rumah tangga maupun personal, Telkom akan fokus membangun bisnis media dan *edutainment*. Disini, Telkom telah memiliki layanan *mobile broadband* yang akan terus diperkaya dengan konten menarik seperti musik, video dan lain-lain. Produk layanan IPTV Telkom dengan *brand* Groovia tumbuh cukup baik dengan mencatat 33.600 pelanggan baru di tahun 2012, dan akan dikembangkan lebih lanjut dengan *platform* yang kami sebut UseeTV untuk menghadirkan layanan TV berbayar di rumah dan dimana saja melalui perangkat *mobile* pelanggan.

Untuk pelanggan bisnis, Telkom terus menghadirkan solusi-solusi IT *on-demand* melalui layanan *cloud computing*. Pada tahun 2012, Telkom antara lain telah memperkuat kapabilitas layanan Telkom *Cloud* melalui akuisisi fasilitas *data center* di Sentul, serta terus mengembangkan layanan *call center*, serta produk-produk baru seperti *e-Health*, *e-Education* dan *e-Tourism*. Pada *platform machine-2-machine* di segmen ini, Telkom telah memiliki layanan *payment* di bawah *brand* Delima, dan di tahun 2012 memulai kerja sama dengan perbankan untuk memanfaatkan penetrasi seluler yang sudah besar di Indonesia untuk mendorong inklusi finansial dalam menjangkau masyarakat yang selama ini relatif belum tersentuh layanan perbankan.

Fokus Telkom pada pengembangan bisnis-bisnis *new wave* pada portofolio IMES melalui id-Con, ditunjang oleh komponen lainnya pada idNet yaitu id-Access dan id-Ring, adalah merupakan upaya Telkom dalam mengakomodasi kecenderungan global akan konvergensi ekosistem Perangkat-Jaringan-Aplikasi DNA yang semakin cepat. Dengan demikian, Telkom akan 'Mempelopori Masyarakat Digital di Indonesia', yang kami angkat sebagai tema Laporan Tahunan 2012 ini.

Tata Kelola Perusahaan

Telkom senantiasa menerapkan standar yang tinggi dalam pelaksanaan praktik GCG, terutama aspek pelaporan keuangan guna meningkatkan kualitas transparansi dan sekaligus memfasilitasi kalangan investor dan analis untuk mengukur nilai perusahaan secara adil. Salah satu perkembangan penting dalam aspek ini adalah penyusunan laporan keuangan Perusahaan dengan berdasar pada *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"). Inisiatif ini telah berhasil direalisasi pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 berlanjut dengan tahapan terakhir yaitu fase *sustain*, dimana kami antara lain telah mengembangkan dan mengoperasikan sistem-sistem pendukung implementasi IFRS, menyusun proses transisi dari fase *sustain* ke fase bisnis sehari-hari, serta mengidentifikasi dan melakukan kajian atas standar-standar IFRS yang baru secara berkelanjutan. Pada waktu bersamaan, Telkom juga aktif mendorong penerapan IFRS di entitas anak dalam Telkom Group.

Komitmen kami dalam menjalankan praktik GCG selama ini telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak eksternal. Pada tahun 2012, Telkom antara lain memperoleh penghargaan *Most Trusted Company* 2012 untuk ke empat kalinya berturut-turut dalam survei *Corporate Governance Perception Index* oleh IICG, serta penghargaan *Best Corporate Overall* oleh lembaga IICD yang melakukan survei praktik GCG di 100 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Telkom menyadari bahwa keberlanjutan keberadaannya ke depan sebagai suatu entitas bisnis akan juga bergantung pada seberapa baik kami dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, atau yang umum dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* ("CSR"). Pelaksanaan CSR di Telkom terutama dilakukan melalui Program Kemitraan melalui penyaluran pinjaman bergulir dan kegiatan lain untuk pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah ("UKM"), serta program Bina Lingkungan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai berbagai aktivitas di bidang bantuan pendidikan, kesehatan, sarana umum dan pelestarian lingkungan. Pada tahun 2012, total dana untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") tercatat sebesar Rp405 miliar. Telkom juga aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam melalui program Telkom Peduli maupun partisipasinya dalam program BUMN Peduli yang dikelola oleh Kementerian BUMN.

Perubahan Jajaran Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2012 telah melakukan penggantian jajaran Direksi Telkom yang telah menyelesaikan masa tugasnya pada tahun 2012. Saya memperoleh kepercayaan untuk meneruskan masa tugas saya dan menggantikan Saudara Rinaldi Firmansyah di posisi Direktur Utama, seperti juga Indra Utoyo yang terus menjabat di posisinya saat ini. Sementara itu, RUPS telah mengangkat Saudara Honesti Basyir, Muhamad Awaluddin, Ririek Adriansyah, Priyantono Rudito, Rizkan Chandra, dan Sukardi Silalahi untuk menggantikan jajaran Direksi lainnya, yang tetap berjumlah delapan orang.

Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh jajaran manajemen dan karyawan Telkom ingin berterima kasih kepada Bapak Rinaldi Firmansyah, Bapak Sudiro Asno, Bapak Faisal Syam, Bapak Ermady Dahlan, Bapak I Nyoman G. Wiryanata dan Bapak Prasetiyo di jajaran Direksi sebelumnya. Mereka semua telah bekerja keras dan berkontribusi sangat baik dalam membangun pondasi yang kokoh bagi transformasi Telkom untuk menjalankan strategi pertumbuhan berkelanjutan kami ke depan.

Kendala-kendala yang dihadapi

Pencapaian kinerja keuangan yang menggembirakan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang kami hadapi selama tahun 2012. Adapun kendala-kendala yang kami hadapi antara lain: adanya kemungkinan konvergensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi global *(global technology companies)* penyedia konten yang beralih ke dalam bisnis telekomunikasi melalui penyediaan layanan telekomunikasi yang bersifat komplementer bagi pelanggan secara gratis yang merupakan bisnis utama *(core)* Telkom serta semakin berkembangnya layanan *over-the-top* ("OTT") dari perangkat *smartphone* yang menyediakan fasilitas komunikasi selain layanan suara *(voice)* dan pesan singkat (SMS), sehingga berdampak pada turunnya kinerja beberapa lini produk (telepon kabel tidak bergerak, telepon nirkabel tidak bergerak).

Prospek Tahun 2013

Telkom sangat optimis akan prospek bisnisnya ke depan. Di tahun 2013, kami masih akan fokus mendukung Telkomsel sebagai motor pertumbuhan saat ini yang masih sangat prospektif ke depan, termasuk dengan terus mendorong perluasan infrastruktur *broadband* Telkom dengan target 10 juta *homepass*, 5 juta layanan speedy, 1 juta WiFi. Pada saat bersamaan, kami akan terus membangun kapabilitas di bidang IMES, dan terutama di bisnis Media untuk segmen konsumer, yang pada saatnya nanti diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan Perusahaan. Telkom juga akan fokus pada ekspansi bisnis internasional ke wilayah-wiayah yang menjanjikan peluang pertumbuhan seperti antara lain di Macau, Taiwan dan Myanmar. Selain itu, kami tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan meng-*unlock value* dari bisnis-bisnis kami seperti bisnis menara telekomunikasi dan bisnis internasional.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai penutup, perkenankan saya mewakili Direksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran karyawan Telkom yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi sehingga Perusahaan dapat mencapai kinerja yang sangat baik di tahun 2012. Saya juga mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan dari Dewan Komisaris, serta kepada para pemegang saham, mitra usaha, pelanggan setia dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan kepada Telkom.

Jayalah Indonesia
Jayalah Telkom Indonesia

Arief Yahya
Direktur Utama/CEO

42 Industri Telekomunikasi di Indonesia

43 Strategi Perusahaan

45 Prospek Usaha Perusahaan

46 Portofolio Bisnis

51 Penjualan, Pemasaran dan Distribusi

52 Tarif Jasa Telekomunikasi

53 Layanan kepada Pelanggan

55 Perlindungan Konsumen

56 Tagihan, Pembayaran dan Penagihan

58 Faktor-Faktor Risiko

72 Infrastruktur Jaringan

76 Pengembangan Jaringan

78 Sumber Daya Manusia

Tinjauan Bisnis

TINJAUAN BISNIS

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Kami percaya bahwa penduduk Indonesia yang besar serta pertumbuhan ekonominya yang kuat menyediakan *platform* yang berkelanjutan bagi pasar telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, industri telekomunikasi di Indonesia tetap tumbuh secara substansial sejalan dengan semakin canggihnya konsumen serta tuntutan produknya. Namun, ada tantangan signifikan yang ditimbulkan oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sebagian daerah terpencil di Indonesia.

Sejak Pemerintah melakukan deregulasi di industri telekomunikasi, Indonesia menyaksikan membanjirnya pemain baru baik dari dalam maupun dari luar negeri yang memandang Indonesia sebagai salah satu sektor paling potensial dan strategis. Situasi ini menciptakan persaingan, terutama di bisnis sambungan telepon seluler maupun sambungan telepon nirkabel tidak bergerak.

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan kecenderungan ke arah makin meningkatnya permintaan bagi layanan komunikasi termasuk komunikasi data, perpindahan ke jaringan telepon nirkabel dan persaingan yang semakin terbuka dan ketat antar operator telekomunikasi.

Pemerintah melalui Kemenkominfo menjamin bahwa hal ini pada akhirnya menguntungkan pembangunan ekonomi Indonesia secara nasional.

Peluang bisnis di industri telekomunikasi Tanah Air semakin terbuka lebar sejalan dengan pertumbuhan bisnis seluler yang terus menciptakan inovasi baru dan memudahkan akses internet secara mobile. Kami percaya bahwa proyeksi dan tren saat ini pada umumnya menunjukkan pertumbuhan yang kuat akan layanan data dan pergeseran dari telekomunikasi tradisional ke arah penerapan teknologi HSPA+ dan LTE.

Apabila mengacu pada standar internasional, penetrasi akses internet maupun sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia terbilang masih rendah. Namun kami meyakini ada beberapa kecenderungan ke arah pertumbuhan yang signifikan pada industri telekomunikasi di Indonesia yang didukung oleh beberapa faktor, yakni di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan akan mendorong peningkatan permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
2. Perpindahan ke jaringan telepon nirkabel. Kami meyakini layanan telepon nirkabel akan semakin populer merujuk pada ekspansi cakupan layanan yang disertai peningkatan kualitas jaringan nirkabel, harga telepon seluler yang semakin terjangkau dan pertambahan fitur layanan prabayar yang mempermudah akses data secara *mobile*.
3. Pertambahan jumlah operator telekomunikasi. Kami memperkirakan persaingan pasar di sektor telekomunikasi di Indonesia akan semakin terbuka dan ketat ke depannya sebagai akibat dari reformasi peraturan Pemerintah yang menghapuskan sistem monopolistik/duopolistik.

STRATEGI PERUSAHAAN

Pada tahun 2012, Telkom terus beradaptasi dengan dinamika industri melalui penyempurnaan inisiatif strategis Perusahaan dengan fokus pada implementasi kerangka bisnis TIMES dan penguatan konsolidasi internal. Kami percaya bahwa inisiatif-inisiatif strategis ini mendukung transformasi menyeluruh dalam aspek organisasi, portofolio bisnis, infrastruktur, sistem dan budaya perusahaan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan visi untuk menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan bisnis TIMES di kawasan regional.

Tujuan-tujuan jangka panjang Telkom diharapkan dapat dicapai melalui strategi *sustainable competitive growth*, transformasi bisnis *legacy* dan pemberdayaan unit bisnis, serta dengan *unlock portfolio value*.

Selain sebagai sumber pertumbuhan baru, kami percaya bahwa bisnis IME juga mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis sektor telekomunikasi yang berkelanjutan.

Selain itu, kami terus berusaha meningkatkan sinergi di antara berbagai layanan telekomunikasi yang tersedia, serta memanfaatkan peluang pertumbuhan non-organik dengan berekspansi ke pasar luar negeri seperti di Singapura (*international carrier service*), Malaysia *(contact center)*, Hong Kong (*mobile virtual network operator/*"MVNO") dan di Timor Leste (seluler).

Strategi Telkom untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan di tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Mencapai *sustainable competitive growth*
b. Transformasi dan pemberdayaan:
   - Transformasi bisnis dan budaya *legacy*.
   - Pemberdayaan unit bisnis untuk mendorong pertumbuhan.
c. *Unlock Portfolio Value*:
   - Memperkuat bisnis inti.
   - Berinvestasi pada *New Economy Business* ("NEB") dan internasional serta peluang strategis.

Kami memiliki rencana untuk mencapai ketiga strategi besar tersebut dengan menjabarkan ke dalam 10 inisiatif strategis berikut ini:

1. **Pusat Keunggulan**
   Inisiatif strategis untuk mendukung peningkatan kinerja bisnis dan implementasi budaya perusahaan yang baru, kami membentuk "Telkom Corporate University" yang bertujuan mendidik karyawan agar dapat memenuhi standar internasional di industri TIMES.

2. **Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio**
   Untuk mengoptimalkan pengelolaan portofolio TIMES, maka ditetapkan *guidelines* yang bertujuan untuk mengatur interaksi bisnis antara Telkom sebagai *parent* dengan unit bisnis dan entitas anak yang dimilikinya.

3. **Percepatan implementasi *broadband* melalui layanan konvergen**
   Inisiatif strategis yang ditujukan untuk menjadikan *broadband* sebagai *middle ware* dalam era ekonomi digital dengan mengambil peran sebagai komplementor bagi seluruh segmen industri sehingga pada akhirnya *broadband* akan menjadi utilitas ke-4 setelah air, listrik dan bahan bakar minyak.

4. **Pengelolaan portofolio nirkabel**
   Inisiatif strategis untuk mengoptimalkan *value wireless* portofolio kami untuk menjadi penyedia layanan gaya hidup *mobile* terbaik di kawasan.

5. **Mengintegrasikan solusi ekosistem Telkom Group**
   Inisiatif strategis untuk memberikan solusi kebutuhan pelanggan secara ekosistem, dengan prioritas menciptakan sistem *lock-in* dan *customer experience management* melalui optimalisasi sumber daya internal dan eksternal yang didukung sistem *customer relationship management* yang terintegrasi.

6. **Berinvestasi di layanan teknologi informasi**
   Strategi berinvestasi dilayanan Teknologi Informasi ("TI") merupakan langkah strategis untuk memasuki industri IT dalam rangka melengkapi kapabilitas Telkom guna memberikan solusi dan meningkatkan kinerja industri lain. Strategi ini juga ditujukan untuk memperkecil perbedaan kapabilitas penyediaan solusi ICT segmen pelanggan konsumer, *enterprise* dan SME.

7. **Berinvestasi di bisnis media dan *edutainment***
   Dalam rangka konvergensi bisnis TIMES, Telkom memiliki inisiatif strategis untuk berinvestasi di bisnis media dan *edutainment* dimana peran Telkom menjadi *content aggregator* dan *delivery point*.

8. **Berinvestasi di bisnis *wholesale* dan peluang bisnis internasional yang strategis**
   Inisiatif strategis yang bertujuan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi *wholesale* kelas dunia yang menjadi pilihan untuk memaksimalkan *value* Telkom. Strategi ini juga digunakan untuk mengkonsolidasi posisi Telkom di pasar internasional dan melakukan ekspansi bisnis akuisisi dan aliansi ("A&A") ke luar negeri dengan memperhatikan tingkat *attractiveness* dan risiko investasi yang terkait.

9. **Memaksimalkan nilai aset di bisnis yang saling terkait**
   Inisiatif ini diarahkan untuk mengoptimalkan aset-aset non-produktif Telkom Group melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

10. **Mengintegrasikan *Next Generation Network* ("NGN") dan *operational support system, business support system, customer support system and enterprise relations management* ("OBCE") untuk mencapai penyempurnaan beban biaya**
    Inisiatif strategis untuk melakukan transformasi infrastruktur yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kapabilitas infrastruktur. Inisiatif ini juga ditujukan untuk mendukung program pemerintah MP3EI sekaligus menangkap peluang bisnis baru untuk mengirimkan multi layanan dan multi layar ke pelanggan. Termasuk di dalam inisiatif ini adalah transformasi IT sebagai *enabler* menuju *consolidated data*, *consolidated billing* dan *integrated corporate risk management* ("CRM") dalam Telkom Group.

Pertumbuhan non-organik merupakan salah satu bagian dari *broad strategy* Telkom menuju *'sustainable competitive growth'*. Beberapa faktor yang mendasari strategi pengembangan non-organik Telkom adalah:
- Merupakan strategi untuk mempertahankan pertumbuhan karena bisnis *legacy* yang cenderung stagnan/turun;
- Merupakan langkah untuk memitigasi risiko (seperti risiko permodalan dan kompetensi) dan mendapatkan sinergi serta penciptaan nilai (*value creation*) secara cepat;
- A&A pada NEB sebagai generator pendapatan baru; dan
- Ekspansi bisnis internasional untuk mendapatkan skala/manfaat yang besar dan memonetisasi (*monetize*) aset domestik dan international.

Pada tahun 2012, Telkom memfokuskan A&A pada area NEB yang mencakup portofolio IMES (*Information, Media, Edutainment* serta *Service*) yang menjanjikan pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan nilai valuasi yang berlipat. Portofolio IMES juga dapat menjadi

revenue driver bagi portofolio bisnis telekomunikasi ("T" pada "TIMES"). Proses A&A dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan hal berikut:
- Menciptakan nilai sinergi yang optimal dengan bisnis Telkom yang sudah ada;
- Potensi untuk meningkatkan pendapatan, EBITDA margin dan nilai perusahaan; dan
- Laba yang dapat dikontribusi dari entitas A&A tersebut.

Serangkaian aksi korporasi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2012 dalam rangka pengembangan non-organik di antaranya adalah:
- Akuisisi *data center* di Sentul untuk mendukung bisnis Telkom *Cloud*;
- Pembentukan entitas asosiasi dengan Pelindo II dengan entitas anak kami Metra untuk memberikan solusi IT bagi logistik di pelabuhan laut;
- Inisiatif *e-Health* untuk mendukung layanan kesehatan yang terpadu;
- Pengembangan Mitratel; dan
- Transformasi organisasi yang mendukung penggelaran layanan *broadband*.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Perkembangan signifikan yang telah terjadi beberapa tahun terakhir, dan yang mungkin terjadi di masa mendatang, dapat berpengaruh secara material terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan belanja modal kami, antara lain: (i) kenaikan dari layanan seluler, dengan kenaikan jumlah pelanggan dan menit pemakaian serta penurunan ARPU, (ii) kenaikan pada pendapatan dari layanan data, internet dan teknologi informasi, serta (iii) penurunan pada pendapatan dari layanan telepon kabel tidak bergerak.

Kami percaya faktor-faktor eksternal yang menguntungkan akan mendukung kemampuan kami untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dari layanan data, internet dan teknologi informasi serta layanan telepon seluler. Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif solid dalam beberapa tahun terakhir ini di tengah-tengah kelesuan perekonomian global. Dengan fundamental ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat dan pada gilirannya, akan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi, baik layanan telekomunikasi dasar maupun layanan nilai-tambah yang lebih canggih sebagai bagian dari kecenderungan gaya hidup digital di masyarakat modern.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional juga didukung oleh inisiatif Pemerintah melalui MP3EI yang telah dicanangkan pada tahun 2011. Salah satu dari tiga pilar utama MP3EI adalah penguatan konektivitas nasional, termasuk pengembangan sektor TIK. Hal ini sejalan dengan program IDN maupun inisiatif strategis kami melalui pengembangan Nusantara *Super highway* (Palapa *Ring* yang dikenal dengan *id-Ring*), yaitu jaringan kabel serat optik terdiri dari enam *ring* yang saling terhubung dan diberi nama sesuai dengan pulau-pulau utama di Indonesia, yang terdiri dari *Ring* Sumatera, *Ring* Jawa, *Ring* Kalimantan, *Ring* Sulawesi, *Ring* Bali dan Nusa Tenggara, serta *Ring* Kepulauan Maluku dan Papua. Kami berharap bahwa pembangunan koneksi jaringan telekomunikasi yang luas di ke-enam koridor ekonomi tersebut akan memungkinkan kami memberikan lebih banyak jenis layanan bernilai-tambah ke lebih banyak pelanggan dan dalam skala yang lebih besar, sekaligus membuka peluang pasar bagi produk-produk Telkom di portofolio IMES.

Kami percaya bahwa pergeseran preferensi konsumen ke arah gaya hidup digital akan menjadi faktor kunci yang mendorong pertumbuhan bisnis kami di tahun mendatang. Kami yakin kondisi ini akan menyebabkan terus meningkatnya permintaan akan layanan *broadband* (termasuk *mobile broadband*) yang dapat mengimbangi penurunan bisnis *legacy* kami (baik pendapatan dari telepon kabel tidak bergerak dan seluler maupun SMS). Kami memperkirakan peningkatan permintaan komunikasi data dan internet korporat akan berlanjut di tahun mendatang seiring perluasan kapasitas kami untuk melayani lebih banyak pelanggan UKM.

Untuk pembahasan masing-masing perkembangan signifikan di atas tadi, lihat pembahasan bab "Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Perusahaan" di bawah sub judul "Peningkatan Pendapatan Data, Internet dan Teknologi Informatika", "Pendapatan Seluler yang Stabil, Peningkatan Pelanggan dan Penurunan ARPU", "Penurunan Pendapatan Telepon Kabel Tidak bergerak" dan "Penurunan Pendapatan Interkoneksi" dalam Laporan Tahunan ini.

Portofolio Bisnis

PORTOFOLIO BISNIS

Telkom adalah BUMN serta saat ini adalah penyelenggara terbesar layanan telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Telkom melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi, serta layanan Internet dan komunikasi data. Telkom juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan *edutainment*, termasuk *cloud-based and server-based managed services*, layanan *e-Payment* dan *IT-enabler*, TV berbayar, serta *e-Commerce* dan layanan portal lainnya. Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp71.253 miliar dan Rp77.143 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012.

Sebagai perusahaan penyelenggara layanan TIMES, kami terus mengupayakan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan solusi, dari bisnis *legacy* sampai *New Economy Business*.

Layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak menyediakan sambungan telepon lokal, SLJJ, sambungan telepon internasional, serta layanan telekomunikasi lainnya dan layanan pendukung. Layanan sambungan nirkabel tidak bergerak menyediakan sambungan telepon lokal dan SLJJ berbasis teknologi CDMA serta berbagai layanan telekomunikasi lainnya. Layanan seluler menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak. Pada tahun 2012, selain pelanggan layanan interkoneksi dan Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel"), tidak ada satupun pelanggan yang berkontribusi lebih dari 1% pada pendapatan usaha Perusahaan. Layanan telekomunikasi kami mungkin akan mengalami efek musiman tertentu. Layanan seluler dan telepon nirkabel tidak bergerak cenderung mengalami peningkatan selama bulan Ramadhan dan tertinggi pada hari Lebaran, serta selama musim liburan di bulan Desember, sedangkan layanan telepon kabel tidak bergerak dari rumah dan perkantoran akan mengalami penurunan ketika jumlah hari kerja dibulan tersebut lebih sedikit atau dikarenakan lebih banyak pelanggan yang sedang berlibur.

Secara historis dan sampai dengan saat ini, bagian terbesar dari pendapatan usaha Perusahaan bersumber dari layanan terkait telekomunikasi, termasuk layanan data dan internet. Sebagai perusahaan penyelenggara layanan TIMES, kami terus mengupayakan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan solusi, dari bisnis *legacy* menjadi NEB. Portofolio bisnis kami dikelompokkan menjadi beberapa lini bisnis sebagai berikut:

A. Bisnis Telekomunikasi

Portofolio bisnis telekomunikasi di Telkom Group mencakup (i) layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak, (ii) layanan sambungan telepon nirkabel tidak bergerak, (iii) layanan seluler, (iv) layanan internet dan komunikasi data, (v) layanan jaringan, (vi) layanan interkoneksi, dan (vii) layanan tambahan.

1. *Layanan Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak*

Produk-produk dalam lini layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak adalah layanan *Plain Old Telepone Services* ("POTS"), layanan nilai-tambah ("VAS"), layanan *Intelligent Network* ("IN") dan layanan *Session Initiation Protocol* ("SIP"). Layanan IN merupakan layanan jaringan berbasis *Internet Protocol* ("IP") yang terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan sistem *exchange* Telkom. Layanan SIP merupakan layanan berbasis IP Multimedia *Subsystem* ("IMS") yang memadukan teknologi nirkabel dan kabel untuk komunikasi suara dan data.

Kami berhasil memperbaiki kinerja bisnis layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak dengan melanjutkan beberapa program, seperti *point reward* "Telkom Poin Rejeki Tumpah" dan *fixed business improvement program* sampai dengan 31 Desember 2012.

Kami melayani 8,9 juta pelanggan yang mewakili pangsa pasar hampir 100,0% dari total penetrasi pasar telepon kabel tidak bergerak di Indonesia sebesar 4,0%.

2. *Layanan Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak*

Layanan dengan merek dagang "Telkom Flexi" atau "Flexi" ini menggunakan teknologi CDMA yang memiliki mobilitas terbatas dan dikelola oleh Divisi Wireless Broadband.

Secara periodik, kami meluncurkan berbagai produk dan layanan telepon nirkabel tidak bergerak dalam bentuk program promosi. Persaingan di segmen ini sangat ketat. Sebagian disebabkan perubahan regulasi pada Desember 2010 mengenai perhitungan tarif *right-of-use*, yang menyebabkan perbedaan tarif antara layanan seluler GSM dan telepon nirkabel tidak bergerak menjadi tidak signifikan. Akibatnya di tahun 2011, jumlah pelanggan telepon nirkabel tidak bergerak kami mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2012, kami berhasil meningkatkan jumlah pelanggan kembali melalui perluasan layanan EVDO. Lihat "Infrastruktur Jaringan - Sambungan Telepon Tidak Bergerak dan Transmisi - Jaringan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak".

Kami akan terus mencari cara untuk mengembangkan Flexi di masa yang akan datang dan agar mampu mempertahankan kepemimpinan di bisnis sambungan telepon nirkabel tidak bergerak. Tujuan ini diupayakan antara lain melalui sinergi yang menguntungkan dengan lini produk dan layanan kami yang lain dengan Divisi Wireless Broadband sebagai pengelola layanan telepon nirkabel tidak bergerak serta peluncuran produk-produk WiFi sebagai pelengkap terhadap bisnis telepon Flexi.

3. *Layanan Seluler*

Kami menyediakan jasa komunikasi seluler dengan teknologi GSM dan frekuensi 3.5G melalui entitas anak, Telkomsel. Layanan seluler, di luar layanan *mobile data*, tetap menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan konsolidasi Perusahaan di tahun 2012.

Produk dan layanan seluler yang kami tawarkan dibagi ke dalam dua layanan, yaitu layanan pascabayar melalui produk *kartuHalo*, serta layanan prabayar yang disajikan melalui produk *simPATI* dan Kartu As.

- kartuHALO masih tercatat sebagai layanan komunikasi seluler pascabayar yang paling banyak digunakan sejak diperkenalkan pada tahun 1995. Pelanggan *kartuHalo* pada akhir tahun 2012 mencapai 2,1 juta atau setara dengan 53,4% pangsa pasar dari total pelanggan seluler pascabayar yang ada di Indonesia;

- simPATI adalah layanan prabayar yang dapat dibeli pada penjual seluler manapun dan tersedia dalam bentuk *voucher* perdana dan isi ulang dengan fitur terdepan dan lengkap dengan harga terjangkau pada waktu *off-peak*; dan

- KARTU As adalah inovasi layanan seluler terakhir dari Telkomsel untuk jenis prabayar dengan tarif yang dihitung per detik pemakaian. Kartu As ini menargetkan segmen pengguna muda.

Pada tahun 2012, kami melakukan sejumlah program pemasaran layanan seluler dalam rangka promosi sekaligus meningkatkan *awareness* terhadap merek Telkomsel. Kami meyakini program promosi tersebut berhasil mengukuhkan posisi layanan seluler kami di industri telekomunikasi seluler Indonesia. Pelanggan seluler kami meningkat dari 107,0 juta pelanggan pada akhir tahun 2011 menjadi 125,1 juta pelanggan pada akhir tahun 2012, tumbuh sebesar 16,9% atau 18,1 juta pelanggan.

4. *Layanan Broadband dan Internet*

Telkom menyediakan rangkaian produk dan layanan internet serta komunikasi data seperti diuraikan di bawah ini:

- Speedy True Broadband ***Broadband* internet** merupakan nama komersial untuk layanan internet *broadband* non seluler ini adalah "Speedy".
- Powered by FLASH 3.75G CEPAT · STABIL · MUDAH **Komunikasi data seluler** Telkomsel menyediakan internet dan komunikasi data melalui jaringan seluler dengan nama komersial "Flash";
- **Layanan SMS** untuk pelanggan seluler dan telepon kabel tidak bergerak;
- Layanan koneksi internet *dial up* dengan nama "**TelkomNet instan**";
- @wifi.id indonesia wifi merupakan solusi akses nirkabel internet bagi pelanggan layanan data bergerak pada area tertentu dengan memanfaatkan alat bayar Telkom, alat bayar ISP lain (*roaming*) maupun secara *bulk* dengan peralatan CPE berbasis teknologi WiFi. Pada tahun 2012, kami meluncurkan layanan Indonesia WiFi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan internet berbasis WiFi di beberapa tempat pelayanan seperti: bandara, pusat perbelanjaan, rumah sakit, universitas/sekolah, kafe, dan lain-lain dengan target hingga 1 juta *access point* ditahun 2013. Indonesia WiFi digelar dengan kecepatan minimum 10 Mbps sehingga bisa memenuhi kebutuhan *roaming, offloading*, retail dan lain-lain;
- "**FlexiNet**", merupakan layanan akses internet yang menggunakan jaringan TelkomFlexi. Pada tahun 2011, kami meluncurkan layanan "Flexi Hotspot" bagi pelanggan yang ingin memperoleh akses internet berkecepatan tinggi melalui koneksi internet tanpa kabel yang didukung infrastruktur *hotspot* Telkom. Layanan dapat diakses dengan mudah dari semua perangkat yang memiliki koneksi WiFi hanya dengan hanya memasukkan *username* dan *password* FlexiNet *Unlimited* atau Flexi *Mobile Broadband* yang tersedia di tiap area *hotspot*;
- **VPN**, merupakan jaringan pribadi yang menggunakan media seperti internet untuk menghubungkan *remote site* secara aman;
- **"ASTINet"**, melayani akses internet dengan menggunakan *gateway internet default* dan IP *address* publik milik kami untuk saluran komunikasi tetap atau *dedicated* selama 24 jam sehari;
- **VoIP**, Telkom menyediakan fasilitas untuk panggilan internasional dalam paket layanan VoIP premium dengan tarif terjangkau, yaitu melalui "Telkom Global-01017", sedangkan panggilan internasional standar dilayani melalui "TelkomSave". Kedua layanan tersebut dapat diakses dengan memutar nomor awalan khusus untuk panggilan internasional. Untuk menyediakan layanan ini, kami dalam hal ini bekerja sama dengan delapan *carrier global* yang merupakan *wholesaler* yang mengizinkan kami untuk mengakses jaringan internasional mereka. Kami bekerja sama dengan empat

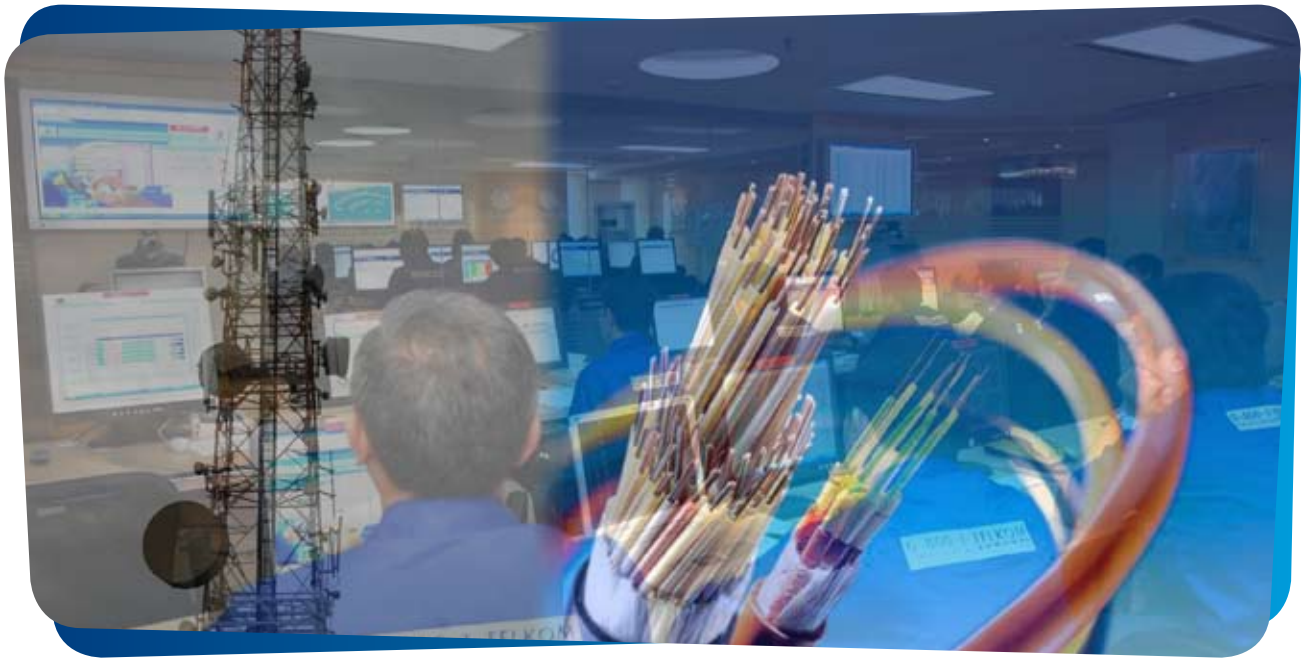

dari delapan *carrier* untuk layanan panggilan keluar, satu untuk panggilan ke dalam dan tiga untuk panggilan keluar dan ke dalam. Selama tahun 2012, Perusahaan mencatat sebanyak 3,6 juta menit panggilan keluar (menggunakan layanan Telkom Global-01017 dan TelkomSave) dan panggilan masuk VoIP (dari para mitra global Telkom). Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 580 ribu menit atau 19,3% pada segmen panggilan VoIP dibandingkan tahun 2011;

- **ISDN PRA** adalah jaringan digital untuk memfasilitasi layanan telekomunikasi multimedia, yang menggunakan *bandwidth* yang lebih lebar dan sistem digital antar terminal untuk melayani komunikasi suara, data dan video serta dengan kecepatan, kualitas dan kapasitas tinggi melalui satu saluran. Telkom juga menyediakan layanan akses internet berbasis-ISDN;
- **DINA*ccess*** merupakan layanan komunikasi dengan akses *dedicated* untuk melayani interkoneksi antar LAN dan layanan multimedia yang kecepatannya dapat disesuaikan kebutuhan pelanggan;
- **Global Datacom** adalah layanan komunikasi data bagi pelanggan korporasi yang menghubungkan kantor pusat dengan cabang atau klien di berbagai negara di dunia. Telkom bekerja sama dengan mitra global melalui Telin, entitas anak Telkom, dalam menyediakan layanan ini;
- **Metro Link** adalah layanan konektivitas berbasis jaringan Metro yang melayani *point to point, point to multipoint* dan *multipoint to multipoint;*
- **Metro I-net** merupakan solusi jaringan data berkapasitas tinggi berbasis IP atau *ethernet* yang menyediakan fleksibilitas, kemudahan dan keefektifan serta jaminan kualitas untuk segmen pelanggan korporat dan SME;
- **Jasa Penyewaan *Port (Port Wholesale)*** melayani penyewaan *port remote access server* bagi penyelenggara jasa internet, penyelenggara jasa konten (*Content Service Provider*), dan pelanggan korporat untuk kemudian dijual kembali kepada pelanggan mereka; dan
- ***Value-added service* Datacom** memberikan fasilitas tambahan yang menawarkan nilai tambah bagi pelanggan komunikasi data.

5. Layanan Jaringan

Kami mengelola secara langsung penyediaan layanan jaringan bagi pelanggan yang merupakan mitra usaha, pelaku bisnis maupun operator telekomunikasi pemegang lisensi lainnya ("OLO"). Layanan jaringan Telkom mencakup sewa transponder satelit, siaran satelit, VSAT, distribusi audio, dan sirkit langganan berbasis satelit maupun teresterial. Pelanggan layanan jaringan kami dapat membuat perjanjian untuk memperoleh layanan singkat seperti siaran beberapa menit atau perjanjian untuk jangka waktu yang lama untuk periode layanan satu sampai lima tahun.

6. Layanan Interkoneksi

Telkom juga memperoleh pendapatan dari perusahaan operator telekomunikasi lainnya yang memanfaatkan infrastruktur jaringan kami yang luas di Indonesia, baik untuk panggilan

yang berakhir atau hanya transit melalui jaringan kami. Dengan cara yang sama, Telkom juga membayar biaya interkoneksi kepada operator telekomunikasi lain untuk penggunaan jaringan mereka saat Perusahaan menyambungkan panggilan dari pelanggannya.

7. Layanan Tambahan

Kami memiliki perjanjian eksklusif dengan beberapa penanam modal berdasarkan perjanjian pola bagi hasil dalam rangka mengembangkan jasa telepon tidak bergerak, telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), jaringan data dan internet dan fasilitas-fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Rincian lebih lanjut tentang skema layanan tambahan, lihat Catatan 39 pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

Selain itu, kami juga memiliki usaha pendukung lainnya dan layanan tambahan yaitu usaha penyediaan BTS bagi operator seluler lain dan penyediaan fasilitas pendukung perangkat lainnya. Bisnis penyediaan menara ini dikelola melalui Mitratel, entitas anak kami.

B. Portofolio NEB dan *Strategic Business Opportunities*

NEB dan *Strategic Business Opportunities* merupakan bagian dari portofolio. Kami telah menunjuk TelkomMetra, entitas anak, sebagai *sub-holding* dengan fokus menangani pengembangan bisnis IME kami.

Portofolio NEB dan *Strategic Business Opportunities* mencakup:

1. ***IT Outsourcing* atau *Managed Application***, yang terdiri dari *cloud-based* dan *server-based management services* serta layanan konsultasi IT.
2. ***e-Payment/Layanan Pembayaran*** , meliputi:
   - ***Billing Payment*** adalah layanan yang memudahkan pelanggan untuk melaksanakan transaksi pembayaran pada penyedia jasa atau barang seperti PT PLN, Telkom, PDAM, PT KAI, dan lain-lain, melalui *collecting agent* seperti bank, koperasi, BPR, *convenience store*, dan lain-lain;
   - ***Remittance*** adalah layanan pengiriman uang di mana pengirim dan penerima dana tidak harus memiliki rekening di bank cukup dengan menggunakan perangkat seluler;
   - ***E-Money*** menyediakan layanan kepada pelanggan yang ingin melakukan manajemen keuangannya secara elektronik melalui media tertentu (*handphone*, kartu prabayar, atau suatu rekening virtual yang dapat diakses melalui media internet) agar dapat melakukan transaksi secara elektronik; dan
   - ***E-Voucher*** atau Telkom *Voucher* merupakan *single voucher* yang diterbitkan Telkom yang dapat digunakan untuk membeli atau mengisi ulang layanan milik Telkom Group, seperti kartu As, *SimPATI* dan Flexi Trendy, layanan prabayar TelkomVision dan Speedy Hotspot.
3. ***IT enabler services*** meliputi *business process outsourcing* dan *knowledge process outsourcing*, yang terdiri dari:
   - ***Network centric value added services***, yang mencakup layanan nilai-tambah berbasis-IT untuk data dan telepon, layanan pengamanan, serta layanan *server* dan *storage* untuk pelanggan konektivitas; dan
   - ***Integration services***, yang mencakup layanan integrasi jaringan dan perangkat keras terkait dengan CPE, aplikasi dan perangkat lunak, serta perangkat keras komputasi.

Portofolio bisnis Media dan *Edutainment* mencakup:

1. **Pay TV** adalah layanan TV berbayar (paket atau *a la carte*) yang disediakan melalui satelit kabel atau IPTV dengan konten premium seperti berita, olahraga, hiburan dan lain-lain. Layanan ini dikelola oleh entitas anak, Indonusa Telemedia dengan brand TelkomVision. Layanan komersial IPTV diluncurkan pada bulan Agustus 2011 dengan merek dagang Groovia TV dan saat ini tersedia di seluruh wilayah yang termasuk dalam lisensi penyelenggaraan layanan yaitu di wilayah Jabodetabek, Bali, Bandung, Semarang dan Surabaya. Per 31 Desember 2012, Perusahaan mencatat 1,2 juta pelanggan Pay TV.
2. **UseeTV** - *over the top* TV ("OTT TV") adalah layanan TV yang dapat diakses oleh pelanggan melalui jaringan internet.
3. **Iklan** merupakan layanan promosi komersial untuk produk atau jasa milik pihak ketiga yang disediakan melalui media *digital* maupun cetak seperti radio, televisi, internet, koran, brosur/*leaflet* dan papan iklan.
4. **Layanan portal**, menyediakan agregat dan distribusi konten. Selain aktivitas penjualan dan pembayaran terkait produk dan layanan Perusahaan yang dilakukan melalui *portal e-Commerce*, layanan portal *e-store* dan *on-device portal* juga memfasilitasi penjualan dan distribusi konten atau aplikasi, seperti *games*, aplikasi, berita, informasi olahraga, konten edukasi, musik, *ring back tones*, konten SMS dan lain-lain, yang dapat di *download* langsung ke perangkat *mobile* atau web pengguna. Konten atau aplikasi tersebut dapat diperoleh secara gratis maupun dengan membayar.

PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Kami mengoperasikan sejumlah jalur distribusi untuk produk dan layanan utama, termasuk layanan telepon nirkabel tidak bergerak, namun tidak termasuk layanan telepon seluler yang ditangani langsung oleh entitas anak kami, Telkomsel.

Berikut adalah jalur-jalur distribusi utama layanan dan produk Telkom:

1. **Plasa Telkom** adalah outlet/lokasi yang berfungsi sebagai *walk-in customer service points*, di mana pelanggan dapat mengakses seluruh produk dan layanan Telkom;
2. ***Call Center*** menangani pertanyaan-pertanyaan mengenai produk, layanan dan transaksi nasabah, kecuali fungsi *payment*. Call center kami juga mengoperasikan layanan pelanggan dan program telemarketing;
3. ***Partnership Store*** adalah perpanjangan jalur distribusi kami melalui kerja sama dengan berbagai outlet pemasaran pihak ketiga seperti toko komputer, toko elektronik, bank, dan sebagainya;
4. ***Feet on Street*** adalah *dealer* penjualan produk Telkom, terutama Speedy, yang melakukan aktivitas pemasaran secara langsung melalui *door-to-door, open table*, pameran, demo produk dan aktivitas sejenis;
5. ***Dealer* resmi dan gerai *retail*** merupakan outlet pendistribusian beragam produk telekomunikasi seperti penjualan kartu langganan Telkom Flexi, paket perdana dan *voucher*. Dealer ini non-eksklusif dan mendapat potongan harga atas seluruh produk yang mereka terima;
6. **Tim *Account Manager*** yang mengelola relasi dengan pelanggan personal dan pelanggan korporat;
7. **Telkom *Solution House* ("TSH")** adalah tempat dimana pelanggan *enterprise* dapat memperoleh informasi mengenai beragam solusi TIMES, layanan dan produk, serta teknologi terkini. Informasi yang disajikan di TSH ditayangkan dalam bentuk *live demo for free* (seperti Speedy, *Hotspot*, PDN, IP-Phone), *live demo* untuk kepentingan komersial (seperti *Video conference*), konsultasi *enterprise* dan solusi *ecosystem business* yang di sesuaikan dengan kebutuhan TIMES korporasi, dan demo simulasi (seperti *e-Payment* & VPN melalui GSM dan Flexi);
8. **SME *Centers*** adalah fasilitas untuk pelanggan bisnis yang berfungsi sebagai *communication center* dengan dukungan fasilitas perkantoran yang canggih, *community center* sebagai tempat berinteraksinya pelanggan, serta sebagai *commerce center* terutama untuk melayani solusi *e-commerce*; dan

9. ***Website Perusahaan*** merupakan wadah informasi seluruh produk dan layanan Telkom, baik multimedia maupun telefoni, yang dapat diakses pelanggan melalui situs *online* korporat di www.telkom.co.id.

Strategi Pemasaran

Kami mengoperasikan berbagai skema pemasaran untuk memperkuat merek dagang serta profil produk/layanan melalui pemasangan iklan di media masa cetak maupun elektronik, pemasaran langsung kepada pelanggan dan distribusi secara perorangan, melalui kampanye promosi khusus.

Distribusi dan pemasaran produk seluler dilakukan oleh Telkomsel, entitas anak, menggunakan jalur distribusi berikut ini:
- GraPARI pusat layanan pelanggan yang menyediakan akses kepada seluruh produk dan layanan Telkomsel;
- Outlet layanan GraPARI yang dikelola oleh pihak ketiga (d/h Gerai Halo);
- Jaringan dealer resmi yang terutama menjual kartu SIM prabayar dan *voucher*;
- Gerai bersama yang dioperasikan dengan Telkomsel dan PT Pos Indonesia; dan
- Gerai lainnya seperti bank.

Khusus untuk *kartuHalo*, Telkomsel fokus pada segmen korporasi dan profesional dengan tingkat pemakaian yang tinggi. Pemasaran untuk segmen ini ditangani oleh tim korporasi khusus yang bertanggung jawab untuk membina hubungan berkelanjutan dengan pelanggan, dengan senantiasa berusaha memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan korporasi.

Produk *simPATI* dan Kartu As dirancang untuk menarik segmen yang lebih luas khususnya pelanggan muda. Telkomsel memanfaatkan jalur pemasaran *above and below the line*, dengan melakukan kampanye ke sekolah dan komunitas tertentu selain memasang iklan di media cetak dan elektronik, menerapkan metode pemasaran seperti sisipan tagihan, tayangan *point-of-sale* serta acara promosi dan *sponsorship*.

Pangsa Pasar

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan kami adalah pendapatan seluler. Untuk informasi pangsa pasar seluler, lihat bagian "Informasi Tambahan (bagi Pemegang Saham ADR) - Persaingan - Seluler".

TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Telkom menerapkan tarif jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.36/1999 dan Peraturan Pemerintah No.52/2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

A. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No.15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap".

Berdasarkan Peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:
- biaya aktivasi;
- biaya berlangganan bulanan;
- biaya penggunaan; dan
- biaya fasilitas tambahan.

B. Tarif telepon seluler

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 ("Peraturan Menkominfo No.09/2008") tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif seluler dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*.

Berdasarkan Peraturan tersebut, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler terdiri dari tarif jasa teleponi dasar, tarif jelajah dan/atau tarif jasa multimedia, dengan struktur tarif sebagai berikut:

- biaya aktivasi;
- biaya berlangganan bulanan;
- biaya penggunaan; dan
- biaya fasilitas tambahan.

C. Tarif interkoneksi

BRTI dalam suratnya No.227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 untuk jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan jaringan tetap lokal dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No.201/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011 tanggal 29 Juli 2011, BRTI menyetujui revisi Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") Perusahaan terkait tarif interkoneksi. BRTI, dalam suratnya No.262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk merubah tarif interkoneksi SMS dari berbasis *sender keep all* ("SKA") menjadi berbasis biaya ("Non-SKA") efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

D. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No.03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan Terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

E. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit dan jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

F. Tarif IMES

Sebagai penyelenggara layanan IMES yang merupakan bisnis *New Economy* kami, Telkom bekerja sama dengan beberapa mitra. Kerja sama ini didasarkan kepada pertimbangan kapabilitas, *time to market* dan *creation idea*. Tarif layanan IMES ditentukan melalui kesepakatan dengan mitra berdasarkan pada pola dan skema kerja sama antara Telkom dengan mitra.

LAYANAN KEPADA PELANGGAN

Telkom menyediakan berbagai layanan jasa telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen pelanggan, dengan senantiasa mengedepankan kualitas pelayanan serta menjaga kepuasan pelanggan.

Kami menyediakan beberapa layanan nilai tambah melalui mana pelanggan dapat mengakses beragam produk dan layanan Perusahaan berdasarkan segmen pelanggan.

A. Segmen Pelanggan Personal

Dalam memfasilitasi pelanggan personal dalam mengakses produk dan layanan, kami menyediakan Plasa Telkom dan Call Center yang dikelola oleh Divisi Consumer Service.

1. Plasa Telkom

Plasa Telkom adalah fasilitas *walk-in customer service point* dimana pelanggan dapat memperoleh berbagai informasi produk dan layanan, termasuk tagihan, pembayaran, penangguhan langganan, promosi hingga penyampaian keluhan. Pada tahun 2012, sebagai bagian dari program optimalisasi biaya, Perusahaan telah mengurangi jumlah Plasa Telkom dari sebelumnya di 727 lokasi menjadi 572 lokasi. Seluruh fasilitas Plasa Telkom tersebut telah didesain-ulang untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik, termasuk mengakomodasi layanan-layanan lain yang ada di Telkom Group sehingga dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Saat ini Telkom tengah mengembangkan fasilitas Telkom Swalayan yang akan segera diluncurkan guna memperkuat jangkauan pelayanan serta mengimbangi berkurangnya jumlah lokasi Plasa Telkom.

2. *Call Center*

Melalui layanan call center, pelanggan dapat memperoleh akses pada produk dan layanan, menyampaikan keluhan atau menanyakan informasi seputar tagihan, program promosi dan fitur layanan melalui call center kami dengan memutar nomor "147" dari pesawat telepon. Fasilitas call center kami berada di tiga lokasi yaitu Medan, Jakarta dan Surabaya.

Bagi pelanggan seluler, Telkomsel memiliki call center dengan merek dagang "Caroline" atau singkatan dari Customer Care Online. Caroline dapat dihubungi melalui nomor-nomor berikut:

- "133" oleh pelanggan kartuHalo;
- "155" (24 jam, gratis) dan "188" (24 jam, berbayar) oleh pelanggan simPATI dan Kartu As;
- "021-21899811" untuk lokasi Jakarta, "022-2553811" untuk lokasi Bandung, "031-8403811" untuk lokasi Surabaya, "061-4578811" untuk lokasi Medan atau "08071811811" untuk lokasi lain di Indonesia melalui ponsel operator lain serta telepon tetap.

B. Segmen Pelanggan Korporat

Kami mengelompokkan pelanggan korporat menjadi pelanggan *business, enterprise, wholesale* dan internasional berdasarkan beberapa kriteria seperti kontribusi terhadap pendapatan, area geografi operasi pelanggan dan tipe serta ragam produk dan layanan yang kami tawarkan. Sebagai bagian dari strategi dalam menyediakan layanan pelanggan yang efektif, kami memiliki tim *account management* dalam mengelola hubungan dengan pelanggan korporat yang didukung oleh Telkom Solution House, SME center dan call center seperti penjelasan berikut.

1. *Account Management*

Divisi Business Service melayani pelanggan *business* yang yang terdiri dari pelanggan *small and medium enterprise*, pemerintah daerah ("Pemda"), koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat. Account manager maupun representatitive manager Divisi Business Service melakukan pengelolaan pelanggan baik secara langsung melalui kunjungan maupun tidak langsung melalui *outbound call*. Pelanggan bisnis dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan bidang/jenis usahanya yaitu *public and general services, plantation and manufacturing service* dan *trading and business services*.

Divisi Enterprise Service melayani pelanggan *enterprise* yang meliputi BUMN, perusahaan nasional dan perusahaan multi nasional. *Account manager* maupun *representatitive manager* Divisi Enterprise Service mengelola pelanggannya melalui *direct visiting*. Pelanggan *enterprise* berdasarkan bidang usahanya dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu *communication & media services, financial management services, government & public services, nation welfare services, plantation & manufacturing services, resources & utilities services* dan *trading & business services*.

Divisi Wholesale Service melayani pelanggan wholesale yang dikelompokkan dalam group carrier service berikut:

a. *Group carrier service* 1: melayani OLO Telkomsel, PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison"), AXIS, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan Pasiik Satelit Nusantara.
b. *Group carrier service* 2: melayani OLO Indosat, XL-Axiata, Bakrie Telecom, Smart Telecom, Batam Bintan Telecom dan ICON +.
c. *Group carrier service* 3: melayani operator dalam lingkup bisnis ISP, ITKP, jaringan tertutup (*close user group*), call center dan penyelenggara satelit.

Entitas anak kami, Telin, melayani operator internasional yang menyediakan layanan *voice* dan data ke Indonesia. Kami memiliki tim *account management* yang berada di Singapura, Hongkong dan Jakarta sebagai kantor pusat. Pada tahun 2012, Telin mulai mengoperasikan layanan telekomunikasi di Timor Leste setelah memperoleh lisensi dari regulator di negara tersebut.

2. *Telkom Solution House & SME Center*

Telkom menyediakan layanan khusus bagi pelanggan korporat melalui fasilitas Telkom Solution House yang berlokasi di Jakarta, Denpasar dan Surabaya. Sedangkan SME Center berlokasi di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Palembang, Balikpapan dan Makassar. SME Center secara umum berfungsi sebagai *community* dan *business center*.

3. *Call Center*

Perusahaan memberikan nomor "500250" bagi pelanggan *business* dan layanan khusus bebas pulsa untuk pelanggan *enterprise* melalui nomor "08001Telkom" ("08001835566").

Program Jaminan Tingkat Layanan

Telkom menawarkan program jaminan tingkat layanan (*service level guarantee*) yaitu tingkat layanan minimum yang dijanjikan kepada pelanggan terhadap kualitas produk dan penanganan.

Bagi pelanggan personal, program ini tersedia untuk pelanggan sambungan telepon tidak bergerak, Flexi maupun data dan internet. Jaminan layanan diberikan bagi pelanggan yang ingin melakukan pasang baru, perubahan jenis layanan, penyelesaian gangguan, pemulihan sambungan yang terisolir, dan keluhan atas tagihan. Apabila tingkat layanan minimum tersebut tidak terpenuhi, Telkom akan memberikan kompensasi non-tunai seperti misalnya gratis biaya berlangganan untuk jangka waktu tertentu.

Bagi pelanggan segmen korporat, jaminan tingkat layanan diberikan sesuai dengan kesepakatan kontrak antara Perusahaan dengan pelanggan terkait. Jaminan tingkat layanan juga diberikan kepada pelanggan operator lain dan *wholesale* tertentu yang menggunakan produk SL Digital, IP Transit dan Metro-E. Jaminan yang kami berikan sesuai dengan tingkat layanan, ketersediaan produk, waktu instalasi dan waktu perbaikan. Kami mengelompokkan tingkat layanan menjadi lima kategori (Bronze, Silver, Gold, Platinum dan Diamond) yang masing-masing dibedakan berdasarkan parameter teknis yang dijaminkan, fitur yang diberikan terhadap produk yang dikonsumsi dan besaran nilai harga yang disepakati.

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Kami secara rutin bekerja sama dengan perusahaan survei independen untuk melakukan riset untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan diberikan. Pada tahun 2012, Telkom memperoleh level *customer service index* ("CSI") dan *customer loyality index* ("CLI") melalui metode "*top two boxes*" dan "*top three boxes with seven scales*" sebagai berikut:

- Segmen pelanggan personal: 81,39% untuk CSI dan 67,07% untuk CLI;
- Segmen pelanggan *business*: 90,98% untuk CSI dan 84,92% untuk CLI;
- Segmen pelanggan *enterprise*: 91,35% untuk CSI dan 88,00% untuk CLI; dan
- Segmen pelanggan *wholesale* & internasional: 83,25% untuk CSI dan 82,85% untuk CLI.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telkom terus mengupayakan berbagai inisiatif dan penyempurnaan di bidang pengelolaan keamanan produk (*product safety*), layanan pengaduan dan jaminan purna jual untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan konsumen.

Sebagai salah satu bentuk penerapan GCG kepada pelanggan dan masyarakat, serta sejalan dengan misi Telkom untuk memberikan layanan yang terbaik, nyaman, produk berkualitas dan harga yang bersaing. Perusahaan terus menjaga komunikasi dengan para pelanggan. Kami percaya bahwa komunikasi yang efisien dan proaktif berperan penting bagi kelangsungan bisnis Perusahaan, serta untuk memastikan kualitas yang selalu di atas standar.

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar layanan dan purna jual, kami berkomitmen untuk menerapkan kompensasi yang adil melalui pemberlakuan garansi purna jual (*Service Level Guarantee*/"SLG"). Komitmen tersebut terus disesuaikan dengan tuntutan konsumen maupun masyarakat sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2012, Telkom terus mengupayakan berbagai inisiatif dan penyempurnaan di bidang pengelolaan keamanan produk (*product safety*), layanan pengaduan dan jaminan purna jual untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan konsumen, antara lain:

- Menjamin kualitas dan keamanan produk/layanan untuk memastikan kesesuaian proses pengambilan keputusan dalam peluncuran produk/layanan terhadap standar pengembangan produk/layanan yang harus kami patuhi (kami menyebutnya STARPRO) dan analisis 8 IC (*Internal Capabilities*); yang diterapkan sebelum barang atau jasa ditawarkan pada pelanggan atau masyarakat;
- Memegang prinsip untuk memastikan produk dan layanan yang dihasilkan berkualitas tinggi dan mampu memberikan manfaat secara maksimal serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi;
- Selalu menjaga kode etik dalam penjualan produk (penjualan langsung), beriklan dan berpromosi;

- Menerapkan praktik beriklan yang beretika dengan memperhatikan ketentuan kode etik periklanan di Indonesia;
- Memastikan bahwa produk dan layanan purna jual dapat secara mudah tersedia bagi publik;
- Mendukung penerapan prinsip-prinsip dan praktik persaingan yang sehat;
- Selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan; dan
- Senantiasa berupaya untuk memenuhi tolok ukur yang dipersyaratkan dalam beberapa Peraturan Menteri yang mengatur standar kualitas layanan, yaitu Peraturan Menteri tentang Pencapaian Standar Kualitas Layanan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap SLJJ, Jaringan Tetap Sambungan Internasional, Jaringan Tetap Lokal *fixed wireless access* ("FWA"), dan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP").

Pusat Layanan dan Mekanisme Pengaduan Konsumen

Kami menyediakan pusat pelayanan konsumen yang dapat langsung didatangi di setiap kantor wilayah maupun kantor cabang Telkom, selain itu juga tersedia pusat pengaduan secara *online* di *website* Perusahaan (www.telkom.co.id) serta *call center* dengan nomor "147".

TAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Kemudahan untuk memilih diantara berbagai jenis metode pembayaran, termasuk lokasi untuk melakukan pembayaran, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa telekomunikasi kami.

Telkom menerapkan sistem tagihan periodik sesuai dengan karakteristik produk maupun segmen pelanggan. Perusahaan menyediakan berbagai jenis moda pembayaran untuk memudahkan pelanggan jasa telekomunikasi Telkom dengan cara bekerja sama dengan *Collecting Agents* ("CA"), seperti bank umum nasional, bank umum daerah, PT POS Indonesia, koperasi pegawai, mini market, dan lain-lain. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Pembayaran tunai dapat dilakukan melalui loket-loket pembayaran

jasa Telkom seperti loket Plasa Telkom, Koperasi, Bank, kantor pos, minimarket dan sub CA lainnya, sedangkan pembayaran non tunai dilakukan melalui *auto debit,* kartu kredit, transfer ke rekening Telkom (khusus pelanggan korporasi/OLO), Anjungan Tunai Mandiri ("ATM"), *mobile banking, internet banking* ataupun *source of fund* (Flexicash, Mcash, atau Tcash).

Khusus untuk pengguna layanan seluler, Telkomsel salah satu entitas anak Telkom, telah menerapkan sistem penagihan baru yang berbasis *Online Charging System* ("OCS"), yang berlaku untuk produk prabayar maupun pascabayar. Sistem yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui kemudahan untuk memilih metoda pembayaran.

Sebelumnya, Telkomsel menerapkan sistem tagihan secara periodik dengan sistem yang sudah tersentralisasi, akurat dan standar di setiap wilayah. Pelanggan layanan pascabayar *kartuHalo* memperoleh lembar tagihan yang dikirim ke alamat domisili pelanggan setiap bulan dengan hitungan pemakaian berdasarkan: (i) jumlah menit penggunaan untuk layanan seluler; (ii) layanan nilai tambah yang dikenakan biaya penggunaan jangka waktu tertentu; dan (iii) biaya langganan untuk layanan dasar dan layanan lain. Sesuai kesepakatan dengan pelanggan, pemberitahuan tagihan juga dapat dikirimkan melalui *email*.

Pembayaran tagihan Telkomsel dapat dilakukan melalui pembayaran langsung di gerai Plasa GraPARI ataupun melalui ATM, *phone banking, internet banking, mobile banking,* kartu kredit dan *auto* debit. Telkomsel juga telah bekerja sama dengan CA, yaitu Bank Umum Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan PT Pos Indonesia, yang dapat menerima pembayaran dari pelanggan kartuHalo. Selain itu, pelanggan juga dapat membayar melalui *web* TCare (https://my.telkomsel.com).

Pengelolaan Piutang Pelanggan

Unit Finance, Billing and Collection Center ("FBCC") mengelola penagihan dan pembayaran atas piutang kepada pelanggan yang dikelompokkan sesuai konsep pengelolaan layanan pelanggan dan segmen produknya, dengan menggunakan aplikasi Telkom *Revenue Management System* ("TREMS"). Aplikasi TREMS memiliki fasilitas antara lain:

- Memungkinkan pelanggan membayar tagihannya di seluruh wilayah layanan;
- Penerimaan pembayaran tunai maupun non-tunai;
- Penerapan *Security Deposit* ("SD") untuk pelanggan yang akan berhenti berlangganan yang jumlahnya diestimasi berdasarkan tagihan rata-rata, *warm usage* ataupun pro-rata, dimana SD akan dihitung ulang pada tagihan berikutnya;
- Menerima pembayaran di muka sebagai uang muka tagihan yang akan terbit bulan berikutnya;
- Pembayaran secara parsial untuk pelanggan korporat;
- Pembayaran secara angsuran; dan
- Fitur Telkom Single Invoice ("TSI") yang menggabungkan beberapa tagihan dari beberapa layanan menjadi satu tagihan, selain berbagai kemudahan traksaksi pembayaran lainnya.

Dalam hal pelanggan belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo, pelanggan akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis produk dan layanannya. Sanksi yang dikenakan dapat berupa pengenaan biaya keterlambatan, isolir sampai pencabutan layanan, yang telah tercantum dalam Kontrak Berlangganan. Telkom telah menerapkan *Integrated Dunning Management System* ("IDMS") yang digunakan untuk memberikan informasi tagihan perdana serta melakukan *reminding call* untuk tagihan bulan berjalan, tunggakan satu bulan dan tunggakan dua bulan. IDMS juga digunakan untuk *electronic billing statement* ("eBS") yaitu pengiriman informasi tagihan melalui email pelanggan. Untuk pelanggan korporasi dan OLO, tagihan dicetak dan dikirim melalui kurir khusus.

Telkomsel telah memiliki mekanisme bagi penagihan piutang pelanggan. Untuk pembayaran yang tidak diterima hingga jatuh tempo dari tagihan yang bersangkutan, Telkomsel akan mengenakan sanksi berupa penghentian seluruh panggilan keluar. Apabila Telkomsel masih belum menerima pembayaran hingga dua bulan sejak tanggal jatuh tempo, sanksi akan ditingkatkan menjadi penutupan nomor pelanggan. Sementara itu, Telkomsel tetap mengupayakan adanya pembayaran dari pelanggan, termasuk kerja sama dengan mitra/institusi jasa penagih utang.

Bagi pelanggan yang telah ditutup nomor pelanggannya tapi masih ingin berlangganan layanan Telkomsel, harus menyelesaikan seluruh tunggakan dan mengajukan kembali permohonan layanan seluler baru. Telkomsel tidak membebankan biaya atau bunga atas keterlambatan.

Faktor-Faktor Risiko

Keberadaan Telkom sebagai suatu entitas bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kegiatan operasional maupun prospek usaha kami.

A. Risiko-Risiko yang Terkait Dengan Indonesia

1. Risiko – Risiko Politik dan Sosial

Peristiwa-Peristiwa sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dapat berdampak pada usaha kami

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi, yang berakibat pada berbagai peristiwa sosial dan politik yang menjadi ciri dari ketidakpastian perubahan lingkungan politik di Indonesia. Di tahun 1999, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas terbuka untuk memilih parlemen dan presiden. Indonesia memiliki banyak partai politik, dan tidak satupun dari partai-partai tersebut memegang mayoritas mutlak. Akibatnya, dari waktu ke waktu, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik, dan juga gejolak sosial dan sipil secara umum. Misalnya, sejak tahun 2000, ribuan orang telah berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi

di Jakarta dan kota lain di Indonesia memprotes mantan Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maupun sebagai reaksi terhadap isu-isu spesifik seperti pengurangan subsidi BBM, privatisasi BUMN, desentralisasi dan otonomi daerah, ataupun kampanye militer Amerika Serikat di Afganistan dan Irak. Pada umumnya, demonstrasi berlangsung dengan damai, meskipun terdapat beberapa demonstrasi yang berujung pada kerusuhan.

Gerakan separatisme dan pertentangan antar kelompok agama dan etnis juga telah berdampak pada gejolak sosial dan sipil di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Aceh di masa lalu dan belakangan ini juga di Papua, dimana terjadi bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan Tentara Nasional Indonesia. Di Papua, aktivitas pemberontak separatis terus berlanjut dan menyebabkan terjadinya insiden-insiden kekerasan. Konflik antar etnis juga sempat terjadi di Kalimantan, sementara konflik antar-agama terjadi di Maluku dan Poso.

Isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan juga telah mengemuka di Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah menetapkan sebuah undang-undang ketenagakerjaan baru yang memberikan perlindungan lebih besar kepada para pekerja. Hal ini mendorong pergerakan kaum buruh jika mereka merasa ada kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada mereka.

Tidak ada jaminan bahwa gejolak sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dalam skala yang lebih luas, ataupun bahwa gejolak-gejolak tersebut, secara langsung atau tidak langsung, tidak akan berdampak secara negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi maupun prospek usaha kami.

Aksi terorisme di Indonesia dapat mengganggu Indonesia, yang kemudian berpengaruh pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi kami, serta harga saham kami di pasar

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa insiden teror di Indonesia, diantaranya insiden pengeboman di Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2005, insiden bom Bali pada bulan Oktober 2002 dan 2005 dan pengeboman Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton hotels pada bulan Juli 2009. Pemerintah telah berhasil menangani beberapa aktivitas teror dalam beberapa tahun terakhir ini dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam tersebut. Namun, insiden teror kemungkinan masih akan berlanjut dan, apabila cukup serius ataupun meluas, akan memberikan dampak yang negatif pada investasi dan tingkat kepercayaan serta kinerja ekonomi Indonesia, dan juga dapat menyebabkan kerugian material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha, serta harga saham kami. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan teroris tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang atau, apabila hal tersebut terjadi, bahwa hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan bisnis ataupun harga saham kami di pasar modal Indonesia.

2. Risiko Makro Ekonomi

Perubahan negatif aktivitas ekonomi di tingkat global, regional ataupun di Indonesia dapat berpengaruh pada bisnis kami

Perubahan ekonomi di Indonesia, regional dan global dapat mempengaruhi kinerja kami. Dua peristiwa signifikan yang mempengaruhi ekonomi Indonesia adalah krisis keuangan Asia di tahun 1997 dan krisis ekonomi global tahun yang dimulai pada tahun 2008. Dampak krisis tahun 1997 di Indonesia antara lain adalah depresiasi nilai tukar Rupiah, penurunan Produk Domestik Bruto secara signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, gejolak sosial serta perkembangan politik yang cukup mencengangkan. Krisis ekonomi global yang dipicu oleh *krisis sub-prime mortgage* di Amerika Serikat juga menekan perekonomian Indonesia meskipun tidak seburuk tahun 1997. Pasar keuangan global juga mengalami gejolak akibat penurunan peringkat negara Amerika Serikat di tahun 2012 maupun keprihatinan terhadap krisis hutang di *Eurozone*. Saat ini masih terdapat ketidakpastian terhadap hasil program-program dukungan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara *Eurozone*, serta kekhawatiran terhadap keuangan negara-negara secara umum. Jika krisis berkepanjangan, ataupun meluas ke Asia dan Indonesia, kami tidak dapat menjamin tidak adanya dampak yang material dan merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta konsekuensinya terhadap usaha kami.

Kondisi ekonomi yang merugikan dapat berakibat pada melemahnya kegiatan ekonomi, berkurangnya pendapatan yang tersedia bagi konsumen untuk dibelanjakan dan mengurangi daya beli konsumen. Hal ini akan mengurangi permintaan akan layanan komunikasi termasuk layanan kami dan ini tentu dapat berpengaruh pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha maupun prospek usaha kami. Tidak ada jaminan bahwa

ketidakstabilan ekonomi tidak akan terjadi lagi di masa mendatang, ataupun bahwa, seandainya hal itu terjadi, tidak akan mempengaruhi kinerja bisnis kami.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan bisnis kami

Mata uang fungsional yang kami gunakan di Indonesia adalah Rupiah. Salah satu dampak terpenting dari krisis ekonomi di Asia yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Dari tahun 2008 hingga 2012, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berada di kisaran terendahnya sebesar Rp12.400 per Dolar AS ke Rp8.460 per Dolar AS. Akibatnya, kami mencatat kerugian sebesar Rp210 miliar pada tahun 2011 dan sebesar Rp189 miliar di tahun 2012. Pada tanggal 28 Desember 2012, nilai tukar Rupiah/Dolar AS berada di level Rp9.637,5 per Dolar AS.

Meskipun nilai tukar Rupiah relatif stabil terhadap Dolar AS sepanjang tahun 2012, tren ini dapat berbalik jika kondisi ekonomi global berubah dan krisis keuangan Eropa meluas ke Asia dan Indonesia. Apabila Rupiah terdepresiasi lebih lanjut terhadap mata uang lainnya dari tingkat nilai tukar per tanggal 31 Desember 2012, kewajiban kami dalam denominasi Dolar AS seperti hutang usaha, hutang pembelian (*procurements payable*), serta pembayaran pinjaman dan obligasi dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah. Depresiasi mata uang Rupiah akan mengakibatkan kerugian dalam transaksi mata uang asing, mempengaruhi secara signifikan pada biaya usaha dan laba bersih kami, serta mengurangi jumlah dividen dalam Dolar AS yang akan diterima oleh pemilik saham *American Depository* ("ADS") kami. Kami tidak dapat menjamin akan mampu mengelola risiko akibat nilai tukar dengan baik di masa depan dengan sukses ataupun mencegah dampak risiko nilai tukar mata uang terhadap usaha kami.

Meskipun Rupiah telah bebas dipertukarkan dan dikirimkan dari waktu ke waktu, Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia) melakukan intervensi di pasar uang sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakannya, baik dengan melepas Rupiah atau dengan menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Kami tidak dapat menjamin bahwa kebijakan nilai tukar mata uang mengambang yang diterapkan Bank Indonesia saat ini tidak akan berubah atau bahwa Pemerintah akan mengambil langkah tambahan untuk menstabilkan, menjaga atau menaikkan nilai tukar Rupiah dan jika salah satu dari langkah ini diterapkan, akan berhasil. Perubahan pada kebijakan nilai tukar mata uang mengambang dapat berdampak besar signifikan pada kenaikan suku bunga domestik, kelangkaan likuiditas, kontrol modal atau pasar, atau penahanan bantuan keuangan oleh lembaga pemberi pinjaman multinasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, kredit macet atau menurunnya penggunaan layanan oleh pelanggan kami, dan akibatnya, kami pun akan menghadapi kesulitan mendanai belanja modal dan menerapkan strategi usaha. Akibat lainnya dapat berupa dampak material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

Penurunan peringkat kredit pemerintah atau Perusahaan di Indonesia dapat mempengaruhi bisnis kami

Pada tanggal Laporan Tahunan, hutang jangka panjang berdenominasi mata uang asing Indonesia memperoleh peringkat "Baa3" oleh Moody's (meningkat dari "Ba1" pada tanggal 18 Januari 2012), "BB+" oleh Standard & Poor's (meningkat dari "bb" pada tanggal 8 April 2011) dan "BBB" oleh Fitch Ratings ("meningkat dari BB+ pada tanggal 15 Desember 2011"). Utang jangka pendek berdenominasi mata uang asing dinilai "B1/NP" oleh Moody's, "B" oleh Standard & Poor's dan "B" oleh Fitch Rating. Pada tanggal 18 Januari 2012, Moody's menaikkan peringkat hutang jangka panjang Indonesia menjadi status peringkat investasi.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh sampai saat ini, kecil kemungkinan lembaga-lembaga ini melakukan peninjauan atau perubahan peringkat menjadi lebih buruk dari tahun ini. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa Moody's, Standard & Poor's atau, Fitch Rating tidak akan mengubah atau menurunkan peringkat kredit Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak negatif terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan di Indonesia, termasuk kami, untuk mengumpulkan tambahan dana dan tingkat suku bunga dan kondisi komersial lainnya dimana dana tambahan tersedia. Suku bunga atas hutang berdenominasi Rupiah kami dengan tingkat bunga mengambang juga akan meningkat. Peristiwa semacam itu dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

3. Risiko-Risiko Bencana

Indonesia rentan terhadap bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kendali kami, yang berpengaruh negatif pada bisnis dan hasil usaha kami

Banyak daerah di Indonesia, termasuk daerah di mana kami beroperasi, rentan terhadap bencana alam seperti banjir, petir, angin ribut, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran dan juga kekeringan, pemadaman listrik dan peristiwa lainnya yang berada di luar kendali kami. Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah vulkanik paling aktif di dunia karena berada di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, sehingga mengalami aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa bumi, tsunami atau gelombang pasang yang merusak. Dari waktu ke waktu, bencana alam telah menelan korban jiwa, merugikan atau membuat sejumlah besar masyarakat mengungsi dan merusak peralatan kami. Peristiwa-peristiwa seperti ini telah terjadi di masa lalu, dan dapat terjadi lagi di masa depan, mengganggu kegiatan usaha kami, menyebabkan kerusakan pada peralatan dan memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja finansial dan keuntungan kami.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bencana alam telah terjadi di Indonesia (selain tsunami di Asia pada tahun 2004), termasuk tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006, gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2006, erupsi yang kemudian berkembang menjadi banjir lumpur panas di Sidoarjo Jawa Timur di tahun 2006, serta gempa bumi di Papua, Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera pada waktu yang berbeda di tahun 2009.

Gempa bumi yang melanda sebagian wilayah Jawa Barat pada tanggal 2 September 2009 menyebabkan kerusakan pada aset Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa di Sumatera Barat, yang mengganggu penyediaan layanan telekomunikasi di beberapa lokasi. Walaupun Tim Manajemen Krisis kami bekerja sama dengan karyawan dan mitra kami berhasil memulihkan layanan dengan cepat, gempa tersebut menyebabkan kerusakan parah terhadap aset kami. Ada sejumlah gempa bumi terdeteksi pada tahun 2010, walau tidak satupun yang memberikan risiko signifikan terhadap bisnis kami pada umumnya.

Banjir bandang dan banjir yang lebih meluas terjadi secara rutin selama musim hujan dari bulan November sampai bulan April 2011. Kota-kota besar khususnya Jakarta, sering mengalami banjir parah yang mengakibatkan gangguan besar, dan kadang-kadang menimbulkan korban jiwa. Jakarta mengalami banjir yang signifikan pada bulan Februari 2007 dan Solo di Jawa Tengah pada bulan Januari. Pada bulan Januari 2009 terjadi hujan deras yang menyebabkan runtuhnya sebuah bendungan diluar Jakarta, membanjiri ratusan rumah di daerah padat penduduk dan menyebabkan kematian sekitar 100 orang. Longsor terjadi secara rutin di daerah pedesaan selama musim hujan.

Ada banyak gunung berapi di Indonesia yang dapat meletus tanpa peringatan. Pada bulan Oktober dan November 2010, Gunung Merapi di Jawa Tengah meletus beberapa kali, menelan korban jiwa sekitar 140 orang, beberapa ratus ribu orang lainnya pada radius 20 km terpaksa mengungsi, menyebabkan kerusakan properti senilai miliaran Dolar dan mengganggu perjalanan udara. Sejak bulan April 2008, Gunung Soputan di Sulawesi Utara, Gunung Egon di Pulau Flores, Nusa Tenggara, Gunung Ibu di Maluku Utara dan Anak Krakatau di Selat Sunda telah menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Gunung Sinabung 60 km barat daya dari Medan, kota terbesar Sumatera Utara, meletus pada tanggal 29 Agustus 2010 setelah tidak beraktivitas selama 400 tahun. Abu dan asap belerang dari gunung berapi telah menyelimuti pedesaan dan tanaman.

Pada tahun 2010, kabel bawah laut yang merupakan bagian dari *backbone* kami mengalami kerusakan akibat dari tsunami di Sumatera Barat dan gempa di Sumbawa. Atas kerusakan tersebut, sudah dilakukan perbaikan.

Meskipun kami telah menerapkan Rencana Kelanjutan Usaha (*Business Continuity Plan*/"BCP") dan Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*/"DRP") yang diuji coba secara berkala, serta telah mengasuransikan aset kami untuk melindungi dari kerugian akibat bencana alam atau fenomena lainnya yang terjadi di luar kendali kami, tidak ada jaminan bahwa perlindungan asuransi akan cukup untuk menutupi potensi kerugian, atau bahwa premi yang dibayarkan untuk polis asuransi tersebut ketika diperbarui tidak akan naik secara substansial di masa depan, maupun bahwa bencana alam tidak akan mengganggu operasional kami secara signifikan.

Kami tidak dapat memberi jaminan bahwa peristiwa geologis atau meteorologis di masa depan tidak akan berdampak lebih besar pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi besar, gangguan geologis atau bencana lain akibat gangguan cuaca di kota yang padat penduduk manapun dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu ekonomi Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, sehingga berpengaruh pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

Operasional kami dapat terpengaruh oleh merebaknya wabah flu burung, virus flu A (H1N1) atau epidemi lainnya

Merebaknya wabah flu burung, virus flu A (H1N1) atau epidemi serupa, ataupun langkah-langkah yang ditempuh pemerintah di negara-negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, dalam menghadapi serangan wabah tersebut, dapat mengganggu perekonomian Indonesia maupun negara-negara lain dan menurunkan kepercayaan investor, sehingga dapat berpengaruh negatif secara material pada kondisi keuangan, hasil-hasil operasional maupun harga saham kami. Selanjutnya, operasi kami dapat terganggu signifikan bila karyawan kami tetap di rumah dan tidak pada tempat kerjanya untuk waktu yang panjang, sehingga dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan atau hasil operasi kami maupun nilai pasar dari sekuritas kami.

4. Risiko–Risiko Lain

Standar keterbukaan informasi korporat Indonesia berbeda signifikan dengan yang diterapkan di negara-negara lain termasuk Amerika Serikat.

Sebagai Perusahaan yang tercatat di BEI, LSE dan NYSE, kami tunduk pada aturan tata kelola perusahaan dan pelaporan di berbagai juridiksi hukum. Mungkin lebih sedikit informasi publik yang tersedia tentang perusahaan publik Indonesia, termasuk kami, dibanding pengungkapan yang lebih teratur oleh perusahaan publik di Negara dengan pasar sekuritas yang lebih mapan. Akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses ke tingkat dan jenis pengungkapan yang sama seperti yang tersedia di negara lain, dan perbandingan dengan perusahaan lain di negara lain mungkin tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Laporan keuangan kami yang disampaikan di sini telah sesuai dengan IFRS; namun demikian, kami menyampaikan laporan keuangan kepada OJK (dahulu Bapepam-LK) sesuai SAK Indonesia, yang memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dengan IFRS, dan kami membagikan dividen berdasarkan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk serta laba per saham sebagaimana ketentuan dalam SAK Indonesia.

Sesuai peraturan OJK dan BEI, kami menyampaikan laporan keuangan kepada OJK sesuai dengan SAK Indonesia. Kami telah menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012, kepada OJK tertanggal 6 Maret 2013, serta kepada SEC pada Form 6-K tertanggal 11 Maret 2013, yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan SAK Indonesia. Terdapat perbedaan dalam beberapa aspek yang signifikan antara SAK Indonesia dan IFRS, yang menyebabkan adanya perbedaan antara hasil-hasil keuangan yang dilaporkan berdsarkan SAK Indonesia dan IFRS, termasuk laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan pada pemilik entitas induk dan laba bersih per saham. Kami membagikan dividen berdasarkan laba tahun berjalan yang dapat diditribusikan pada pemilik entitas Induk dan laba bersih per saham sebagaimana perhitungan dalam SAK Indonesia.

Dalam perhitungan berdasarkan SAK Indonesia, laba tahun berjalan yang dapat diditribusikan pada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp10.965 miliar dan Rp12.850 miliar masing-masing pada tahun 2011 dan 2012, sedangkan laba bersih per saham adalah berturut-turut sebesar Rp559,67 dan Rp669,19 pada tahun 2011 dan 2012. Dividen per saham adalah sebesar Rp371,05 untuk 2011. Besarnya dividen per lembar saham untuk tahun 2012 akan ditentukan dalam RUPST 2013 yang dijadwalkan diselenggarakan pada April 2013.

Kami berbadan hukum di Indonesia, dan tidak menjamin bagi investor untuk menyampaikan proses panggilan, atau melaksanakan keputusan, atas kami di wilayah AS, atau melaksanakan keputusan pengadilan asing terhadap kami di Indonesia

Kami berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, beroperasi di bawah undang-undang Indonesia yang terkait dengan perseroan terbatas di Indonesia, dan aset utama kami berlokasi di Indonesia. Selain itu, anggota Komisaris dan Direksi kami bertempat tinggal di

Indonesia sedangkan sebagian besar aset mereka berada di luar AS. Oleh karenanya akan sulit bagi investor untuk mengajukan penyampaian panggilan, atau melaksanakan keputusan dari pengadilan di AS, terhadap kami atau para individu tersebut, di wilayah AS.

Kami telah diberitahukan oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Penasihat hukum Indonesia kami bahwa keputusan dari pengadilan AS, termasuk keputusan yang disampaikan berdasarkan ketentuan hak sesuai undang-undang sekuritas Federal AS atau undang-undang sekuritas dari negara bagian manapun di AS, tidak berlaku di pengadilan Indonesia, meskipun keputusan itu dapat diterima sebagai bukti yang tidak menentukan dalam pengajuan atas dasar klaim di pengadilan Indonesia. Terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan menyampaikan keputusan atas tindakan yang disidangkan di pengadilan Indonesia yang didasarkan pada ketentuan tanggung jawab perdata dalam undang-undang sekuritas federal AS atau undang-undang sekuritas negara bagian manapun di AS. Oleh karenanya, penuntut akan diminta menyampaikan tuntutannya terhadap kami atau para individu tersebut di pengadilan Indonesia.

Kepentingan pemegang saham pengendali kami dapat berbeda dengan kepentingan dari pemegang saham lainnya

Pemerintah menguasai 53,90% dari Saham Biasa yang diterbitkan dan beredar serta berwenang untuk menentukan hasil atas seluruh tindakan yang membutuhkan persetujuan para pemegang saham. Pemerintah juga memiliki satu saham Dwiwarna, yang memberinya hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu, termasuk pemilihan dan pemberhentian dari anggota Direksi maupun Komisaris perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas atau pemegang saham Dwiwarna mereka juga dapat menggunakan kekuasaannya untuk menerbitkan saham baru, dan mengubah Anggaran Dasar Perusahaan atau mendorong aksi *merger* atau membubarkan perusahaan, menaikkan atau menurunkan modal disetor atau mengurangi modal yang dikeluarkan, atau mengajukan veto atas langkah tersebut. Satu atau lebih langkah ini dapat berakibat pada penarikan saham yang didaftarkan dari bursa efek tertentu. Kemudian, melalui Menkominfo, Pemerintah dapat menggunakan posisinya sebagai regulator atas industri telekomunikasi Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Pemerintah memiliki 14,29% saham di PT Indosat Tbk ("Indosat"), pesaing kami dalam melayani sambungan telepon tidak bergerak langsung internasional dan pesaing entitas anak kami, Telkomsel, dalam melayani telepon seluler. Kepemilikan saham Pemerintah termasuk saham Seri A yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal strategis dalam Anggaran Dasar Indosat, termasuk keputusan untuk pembubaran Perusahaan, likuidasi dan kebangkrutan, serta mengizinkan Pemerintah untuk mengajukan satu kandidat Direktur pada Direksi dan satu kandidat Komisaris pada Dewan Komisaris. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan dimana kepentingan Pemerintah berbenturan dengan kepentingan kami. Tidak ada kepastian bahwa Pemerintah tidak akan memberikan peluang kepada Indosat, atau berpihak kepada Indosat saat menggunakan kekuasaannya sebagai regulator atas industri telekomunikasi Indonesia. Jika Pemerintah akan memprioritaskan bisnis Indosat dibandingkan kami atau akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Indosat, hal ini akan berdampak pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi serta prospek usaha kami.

B. Risiko-Risiko Terkait Dengan Bisnis Kami

1. Risiko Operasional

Kegagalan material dalam melanjutkan operasi jaringan, sistem utama, gateways kepada jaringan kami atau jaringan operator lainnya, dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami

Kami sangat bergantung pada operasi jaringan yang tidak terputus dalam memberikan layanan. Misalnya, kami tergantung pada akses terhadap sambungan telepon tidak bergerak kabel ("PSTN") untuk operasional panggilan telepon tidak bergerak kabel serta tujuan dan asal panggilan telepon seluler ke dan dari telepon tidak bergerak kabel, serta sebagian besar dari trafik panggilan telepon jarak jauh internasional dan seluler kami yang dilakukan melalui PSTN. Kami juga bergantung pada akses terhadap sambungan telepon tidak bergerak nirkabel ("CDMA"), jaringan internet dan *broadband* serta jaringan seluler. Jaringan terintegrasi kami termasuk jaringan akses kabel tembaga, jaringan akses serat optik, BTS, perangkat *switching*, perangkat transmisi optik dan radio, jaringan *IP core*, satelit dan *server* aplikasi.

Disamping itu, kami juga bergantung pada interkoneksi terhadap jaringan operator telekomunikasi lainnya untuk melayani panggilan dan data yang dikirimkan pelanggan kami kepada pelanggan operator di Indonesia dan luar negeri. Kami juga bergantung pada manajemen sistem informasi yang canggih secara teknologi dan sistem lainnya, seperti sistem pengaturan tagihan yang memungkinkan kami untuk melakukan kegiatan operasional. Jaringan kami, termasuk sistem informasi, TI dan infrastruktur serta jaringan operator lainnya yang memungkinkan pelanggan kami melakukan interkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan atau gangguan dalam operasinya akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, pemedaman listrik, kerusakan perangkat, kesalahan perangkat lunak jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa serupa lainnya.

Meskipun telah menerapkan Rencana Kelanjutan Bisnis dan Rencana Pemulihan Bencana yang komprehensif, kami tidak dapat menjamin bahwa rencana tersebut akan berhasil sebagian atau sepenuhnya jika bagian dari jaringan tersebut mengalami kerusakan atau gangguan yang parah. Kerusakan apapun yang berujung pada gangguan operasi atau penyediaan layanan kami, baik yang berasal dari gangguan operasional, bencana alam atau sebaliknya, dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

Jaringan kami, terutama jaringan akses kabel, menghadapi potensi ancaman keamanan baik fisik maupun cyber, seperti pencurian, perusakan atau tindakan lain untuk mengganggu operasional kami, yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap hasil operasional kami

Jaringan dan peralatan, khususnya jaringan akses kabel kami, menghadapi potensi ancaman keamanan baik fisik dan *cyber*. Ancaman fisik termasuk pencurian dan perusakan peralatan kami dan serangan terorganisasi terhadap infrastruktur utama dengan maksud mengganggu kegiatan operasi. Selain itu, perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia menghadapi peningkatan ancaman keamanan *cyber* sementara kegiatan bisnis menjadi semakin tergantung pada telekomunikasi dan jaringan komputer dan mengadopsi teknologi *cloud computing*. Ancaman keamanan *cyber* termasuk upaya mendapatkan akses tidak sah ke sistem kami atau memasukkan virus komputer atau perangkat lunak berbahaya di sistem kami untuk menyalahgunakan data konsumen dan informasi sensitif lainnya, merusak data atau mengganggu operasi kami. Akses yang tidak sah juga dapat diperoleh melalui cara-cara tradisional seperti pencurian komputer laptop, perangkat data *portable* dan ponsel serta pengumpulan intelijen pada karyawan yang memiliki akses.

Meskipun hingga saat ini kami belum pernah mengalami serangan *cyber* yang berhasil memberikan gangguan secara material, serangan *cyber* yang berhasil dapat membuat kami mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki kerusakan atau mengembalikan data, menerapkan perubahan organisasi yang besar dan melakukan pelatihan untuk mencegah serangan serupa di masa yang akan datang serta kehilangan pendapatan dan biaya litigasi akibat dari penyalahgunaan informasi sensitif, dan menyebabkan rusaknya reputasi yang nyata. Kami melakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan, termasuk meningkatkan kerja sama dengan kepolisian, terutama di daerah yang rawan terhadap kegiatan kriminal dan secara teratur melakukan peningkatan keamanan data kami. Namun demikian, tidak ada jaminan langkah-langkah pengamanan fisik dan *cyber* kami akan berhasil. Kerusakan pada jaringan, peralatan atau data kami dan kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan sebagai akibat dari serangan fisik dan *cyber* dapat mengganggu bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi secara material. Jaringan kami, terutama jaringan akses kabel, menghadapi potensi ancaman keamanan seperti pencurian dan perusakan, yang dapat berpengaruh negatif terhadap hasil-hasil operasi kami.

Kami menghadapi beberapa risiko terkait layanan internet

Selain ancaman keamanan *cyber*, karena kami menyediakan koneksi internet dan *host website* kepada pelanggan serta mengembangkan konten dan aplikasi internet, kami dianggap memiliki keterkaitan dengan konten yang dialirkan melalui jaringan atau terpampang di *website* yang terdaftar di *host* kami. Kami tidak dapat dan tidak melakukan pengawasan terhadap seluruh konten ini dan dapat menghadapi tuntutan hukum akibat keterkaitan dengan konten tersebut. Kasus semacam ini dapat menghabiskan biaya untuk proses hukum, mengalihkan tenaga dan perhatian manajemen, sekaligus merusak reputasi kami.

Kebocoran pendapatan dapat terjadi akibat kelemahan internal atau faktor eksternal dan jika terjadi, hal itu dapat berdampak negatif pada hasil usaha kami

Kebocoran pendapatan adalah risiko umum bagi semua operator telekomunikasi. Kami berpotensi mengalami kebocoran pendapatan, atau kesulitan memperoleh pendapatan yang merupakan hak kami, akibat kelemahan pada transaksi, penundaan proses transaksi, pelanggan yang tidak jujur atau faktor lainnya.

Kami telah mengambil langkah preventif untuk mengatasi potensi kebocoran pendapatan itu dengan meningkatkan fungsi pengendalian terhadap seluruh proses bisnis yang ada, menerapkan metode penjaminan pendapatan, memberlakukan kebijakan dan prosedur yang tepat serta menerapkan aplikasi sistem informasi guna menekan kebocoran pendapatan. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi kebocoran pendapatan yang signifikan di masa depan atau bahwa kebocoran itu tidak akan berdampak negatif pada hasil usaha kami.

Teknologi baru dapat berdampak negatif pada daya saing kami

Industri telekomunikasi dicirikan oleh perubahan yang cepat dan signifikan pada sisi teknologi. Kami akan menghadapi peningkatan persaingan akibat teknologi yang tengah berkembang saat ini atau yang akan dikembangkan di masa depan. Pengembangan atau aplikasi teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa depan mensyaratkan perubahan pada model bisnis, pengembangan produk, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru yang substansial. Produk dan layanan baru mungkin mahal untuk dikembangkan dan mendorong masuknya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perkembangan perubahan teknologi di masa depan akan mempengaruhi operasi atau daya saing layanan kami. Selanjutnya, kami juga tidak dapat menjamin untuk dapat mengintegrasikan teknologi baru ke dalam model bisnis yang ada saat ini secara efektif.

Guna menjaga dan memperkuat pertumbuhan bisnis, saat ini kami tengah melakukan transformasi ke bisnis TIMES. Sebagai bagian dari langkah transformasi ke bisnis TIMES, kami berniat mengembangkan bisnis-bisnis baru dimana kami juga dapat menyediakan konten bagi pelanggan telekomunikasi. Kami belum memiliki pengalaman substansial sebagai penyedia konten dan, kami tidak menjamin untuk dapat mengelola pertumbuhan bisnis konten secara efektif.

Kami tidak dapat menjamin teknologi kami tidak akan tertinggal, atau tidak akan terlibat persaingan dengan teknologi baru di masa depan, atau bahwa kami dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam kondisi yang berbeda dengan persyaratan komersial tertentu. Kegagalan kami untuk bereaksi terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

Satelit kami memiliki masa operasi yang terbatas dan dapat rusak atau hancur selama masa operasi orbit atau mengalami penundaan atau kegagalan peluncuran. Kehilangan atau kinerja yang berkurang dari satelit kami, baik dikarenakan kerusakan perangkat atau dicabutnya lisensi, dapat merugikan kondisi keuangan, hasil operasi dan kemampuan untuk memberikan layanan

Satelit Telkom-1 dan Telkom-2 kami memiliki masa operasi yang terbatas, saat ini diperkirakan akan berakhir masing-masing pada tahun 2015 dan 2020. Sejumlah faktor mempengaruhi masa operasi satelit tersebut, termasuk kualitas konstruksinya, ketahanan sistem, subsistem, dan komponen, cadangan bahan bakar di dalam, keakuratan peluncuran ke orbit, risiko terhadap badai mikrometeorit, atau peristiwa alam lainnya di angkasa, benturan dengan pecahan di orbit, atau cara pengawasan dan pengoperasian satelit tersebut. Kami saat ini menggunakan kapasitas transponder satelit yang dikaitkan dengan banyak aspek dari sisi bisnis, termasuk penyewaan kapasitas tersebut dan *routing* untuk layanan sambungan jarak jauh internasional dan seluler.

Selain itu, peraturan yang dibuat Persatuan Telekomunikasi Internasional ("ITU") menjelaskan bahwa sebuah slot satelit khusus telah disediakan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak untuk menentukan pihak mana yang berwenang menggunakan slot tersebut. Saat ini, meskipun kami memegang lisensi untuk menggunakan slot satelit khusus tersebut, jika satelit Telkom-1 dan Telkom-2 mengalami masalah teknis atau kerusakan, Pemerintah dapat menentukan bahwa kami telah gagal memanfaatkan slot yang ada dengan lisensi yang kami miliki, sehingga

dapat mendorong Pemerintah untuk mencabut lisensi kami. Kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa kami dapat mempertahankan penggunaan slot satelit khusus tersebut dengan cara yang dianggap cukup oleh Pemerintah.

Dalam mengantisipasi meningkatnya permintaan terhadap layanan satelit serta untuk mendukung strategi bisnis dalam penyediaan layanan TIMES, pada tahun 2009 kami menandatangani kontrak pengadaan satelit Telkom-3, yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2012. Namun demikian, akibat kegagagalan peluncuran di bulan Agustus 2012, satelit Telkom-3 kini berada di orbit yang tidak dapat dipergunakan. Sekalipun kami telah mengasuransikan biaya pengadaan satelit tersebut, kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 menyebabkan kami harus menyewa kapasitas transponder dari pihak ketiga agar dapat memenuhi komitmen pada pelanggan, dengan margin keuntungan yang diperkirakan lebih kecil dibandingkan yang dapat diperoleh apabila satelit Telkom-3 berhasil diluncurkan. Selain itu, kami juga akan harus melakukan pengadaan dan peluncuran satelit lainnya untuk menggantikan satelit Telkom-1 sebelum berakhirnya masa operasional satelit tersebut. Karena umumnya diperlukan waktu tiga tahun untuk mengembangkan dan meluncurkan satelit, meskipun satelit Telkom-1 masih dapat berfungsi beberapa tahun setelah estimasi berakhirnya masa operasionalnya di tahun 2015, namun dalam hal terjadi penundaan dalam pengembangan dan peluncuran satelit pengganti, atau apabila masa operasional satelit Telkom-1 berakhir sebelum satelit pengganti berhasil diluncurkan, atau apabila kerusakan atau kegagalan menyebabkan satelit-satelit kami saat ini tidak dapat dipergunakan, kami harus menyewa kapasitas transponder tambahan dari pihak ketiga, yang akan menambah biaya operasional kami. Kegagalan untuk menyewa kapasitas transponder dari penyedia pihak ketiga juga akan berdampak pada gangguan atau penghentian layanan satelit kami. Penghentian operasional satelit kami akan berdampak pada kenaikan beban usaha yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi kami yang lain, terutama di wilayah timur Indonesia yang saat ini sangat bergantung pada jangkauan satelit untuk menerima layanan telekomunikasi, serta dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi kami.

2. Risiko-Risiko Keuangan

Kami menghadapi risiko suku bunga

Hutang kami termasuk pinjaman bank untuk mendanai operasi. Jika diperlukan, kami berupaya untuk mengurangi potensi risiko terhadap suku bunga dengan melakukan kontrak *swap* suku bunga untuk melakukan *swap* atas suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap atas tenor pinjaman tertentu. Namun kebijakan lindung nilai (*hedging*) ini mungkin tidak cukup mengatasi risiko terhadap fluktuasi suku bunga dan hal ini dapat berdampak pada beban suku bunga yang besar dan berakibat buruk pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi kami.

Kami mungkin tidak berhasil mengelola risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar berpengaruh dan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi kami. Sebagian besar kewajiban hutang kami adalah dalam denominasi Rupiah dan sebagian besar belanja modal kami dalam Dolar AS. Sebagian besar pendapatan kami diperoleh dalam Rupiah dan hanya sebagian kecil dalam Dolar AS (antara lain dari layanan internasional). Kami juga dapat menambah hutang jangka panjang kami dalam mata uang lain selain Rupiah, termasuk dalam Dolar AS, untuk mendanai kebutuhan belanja modal.

Secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan kami bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing. Kami mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko mata uang asing terutama melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi mata uang asing dalam jangka waktu tiga sampai dengan dua belas bulan.

Meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS relatif stabil pada tahun 2012 pada tingkatan Rp9.000 per Dolar AS, kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan mampu mengelola risiko nilai tukar dengan sukses di masa depan atau bahwa usaha, kondisi keuangan atau hasil operasi kami tidak akan terpengaruh negatif akibat risiko nilai tukar.

Kami mungkin tidak mampu membiayai belanja modal yang dibutuhkan bagi kami untuk tetap kompetitif di industri telekomunikasi di Indonesia

Industri layanan telekomunikasi adalah padat modal. Agar kompetitif, kami harus secara terus-menerus mengembangkan, memodernisasi dan memperbaharui teknologi infrastruktur telekomunikasi kami, yang mencakup investasi modal yang substansial. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2010, 2011 dan 2012, belanja modal konsolidasi masing-masing berjumlah, Rp12.651 miliar, Rp14.603 miliar dan Rp17.272 milliar (US$1.792 juta). Kemampuan kami untuk membiayai belanja modal di masa depan akan bergantung pada kinerja operasional masa depan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini, tingkat suku bunga, serta keuangan, bisnis dan faktor-faktor lainnya, banyak di antaranya berada diluar dari kendali kami, dan bergantung pada kemampuan kami untuk mendapatkan tambahan pembiayaan eksternal. Kami tidak dapat menjamin bahwa pembiayaan tambahan akan tersedia bagi kami dengan persyaratan yang sesuai secara komersial, atau akan tersedia pembiayaan tambahan sama sekali. Selain itu, kami hanya dapat menambah pembiayaan sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang kami. Oleh karenanya, kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan memiliki sumber modal yang cukup untuk mengembangkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi agar tetap kompetitif di pasar telekomunikasi Indonesia. Kegagalan kami melakukan hal tersebut dapat memberi dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha kami.

3. Risiko-Risiko Hukum dan Kepatuhan

Jika kami terbukti melakukan penetapan harga oleh komisi anti-monopoli Indonesia dan tuduhan class action, kami dapat dikenakan kewajiban yang dapat menurunkan pendapatan kami dan berdampak negatif pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami

Pada tanggal 1 November 2007, Komite Pengawas Persaingan Usaha Indonesia ("KPPU") menerbitkan keputusan mengenai investigasi awal terhadap kami, entitas anak kami dengan kepemilikan saham mayoritas, Telkomsel, dan tujuh Perusahaan telekomunikasi lainnya atas tuduhan penetapan harga layanan SMS dan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti-monopoli ("UU No.5/1999"). Pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkomsel, XL Axiata Tbk ("XL"), PT Bakrie Telecom Tbk (sekarang Smartfren) ("Bakrie Telecom"), PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile-8") dan PT Smart Telecom ("Smart Telecom") bersama-sama melanggar Pasal 5 UU No.5/1999. Kami dan Telkomsel mengajukan banding atas putusan KPPU tersebut masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Jakarta Pusat. Pada tanggal 12 April 2011, Mahkamah Agung memerintahkan penggabungan banding untuk ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lihat "Butir 8. Informasi Keuangan Laporan Konsolidasian dan Informasi Keuangan Lainnya – Perkara Hukum". Jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan Perusahaan dan/atau Telkomsel, kami dapat dikenai denda, dengan jumlah tergantung pada putusan Pengadilan Negeri, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Sejumlah gugatan *class action* diajukan terhadap Telkomsel dan Indosat selama tahun 2007 dan 2008 di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, terkait dengan kepemilikan silang Temasek Holding terdahulu atas saham Telkomsel dan Indosat, sehingga diduga telah mengakibatkan penetapan harga atas layanan telekomunikasi yang merugikan masyarakat. Penuntut lalu mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi. Pada tanggal 27 Januari 2010, pengadilan memutuskan gugatan *class action* yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena penggugat menolak membuktikan kecakapan hukumnya dan dua anggota penggugat dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil penggugat. Pada tanggal 24 Mei 2010, hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima dengan alasan gugatan itu dianggap tidak serius dan penggugat gagal membuktikan kecakapan hukumnya sebagai wakil penggugat.

Walaupun kami senantiasa menjaga kehati-hatian setiap transaksi bisnis, tidak ada jaminan bahwa pelanggan kami yang lain, masyarakat atau mitra tidak akan mengajukan kasus serupa di masa depan. Jika Pengadilan Negeri dalam perkara *class action* baru, menerbitkan putusan yang berpihak pada penggugat, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Pernyataan berisi perkiraan yang mungkin tidak akurat

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan yang berisi perkiraan, termasuk pernyataan tentang sasaran-sasaran Telkom saat ini serta proyeksi kinerja operasional dan prospek usaha di masa depan. Penggunaan kata "percaya," "mengharapkan" "mengantisipasi," "memperkirakan," "memproyeksikan" dan kata yang serupa adalah untuk menunjukkan pernyataan yang sifatnya memperkirakan. Selain itu, seluruh pernyataan, kecuali pernyataan yang berisi data historis, merupakan pernyataan yang sifatnya memperkirakan. Walau kami yakin ekspektasi yang terkandung di dalamnya adalah masuk akal, kami tidak dapat memberi jaminan perkiraan itu dapat terealisasi nantinya. Pernyataan semacam ini terkait dengan beberapa risiko dan ketidakpastian, termasuk dinamika ekonomi, situasi sosial dan politik di Indonesia dan risiko lain yang disebutkan dalam "Faktor Risiko". Seluruh pernyataan yang sifatnya memperkirakan, baik tertulis atau pun verbal, oleh kami atau orang yang mewakili kami adalah terkait dengan risiko tersebut.

4. Risiko – Risiko Regulasi

Kami beroperasi di lingkungan hukum dan undang-undang yang tengah mengalami perubahan signifikan. Hal ini dapat berujung pada meningkatkan kompetisi, sehingga antara lain dapat menurunkan margin dan pendapatan operasional kami. Perubahan tersebut juga dapat secara langsung menurunkan margin kami atau mengurangi biaya para kompetitor kami. Perubahan regulasi yang tidak menguntungkan tersebut dapat berpengaruh negatif pada kami.

Reformasi peraturan telekomunikasi Indonesia yang telah dimulai oleh Pemerintah pada tahun 1999 telah mengakibatkan liberalisasi industri, termasuk penghilangan hambatan bagi masuknya pemain baru dan terjadinya persaingan. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah dan kompleksitas dari perubahan peraturan telah mengakibatkan kondisi peraturan yang tidak menentu. Selain itu, sejalan dengan perubahan peraturan dan hukum di sektor telekomunikasi Indonesia, perusahaan pesaing yang memiliki sumber daya lebih besar dari pada kami, dapat masuk ke sektor telekomunikasi di Indonesia dan bersaing dengan kami dalam melayani jasa telekomunikasi. Lebih jauh lagi, kami tidak mungkin mengantisipasi kebijakan yang dapat diterapkan pada teknologi baru. Kami memperoleh pendapatan signifikan dari jasa interkoneksi karena kami memiliki jaringan terbesar di Indonesia dan para pesaing kami harus membayar tarif untuk terhubung dengan jaringan kami. Sebagaimana diatur oleh Kemenkominfo, tarif layanan interkoneksi terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Tarif yang berlaku saat ini, efektif pada tahun 2011, telah menurunkan tarif rata-rata sebesar 1,5% hingga 3,0% dibandingkan dengan tarif yang berlaku efektif pada tahun 2008. Lihat bagian "Peraturan – Interkoneksi."

Sebagai contoh lain, pada tahun 2008, Pemerintah mensyaratkan operator telekomunikasi untuk memperbolehkan pesaing untuk memanfaatkan menara mereka tanpa ada diskriminasi. Para pesaing kami dapat menikmati potensi penghematan biaya yang besar daripada yang kami lakukan karena kami memiliki jaringan terbesar dan telah berinvestasi untuk membangun menara di berbagai wilayah. Lebih lanjut, para pesaing kami memperoleh akses ke wilayah-wilayah yang sebenarnya mereka tidak dapat mengaksesnya karena sangat jarang atau tidak ada menara telekomunikasi berada di wilayah perkotaan yang padat penduduk sedangkan kami memperoleh lebih sedikit manfaat karena kami telah menguasai lokasi di banyak lokasi semacam itu. Lihat bagian "Regulasi – Menara Telekomunikasi."

Di masa depan, Pemerintah mungkin akan mengumumkan atau menerapkan perubahan peraturan lainnya yang dapat berakibat negatif bagi bisnis kami atau lisensi usaha yang ada. Kami tidak dapat meyakinkan bahwa kami dapat bersaing dengan operator telekomunikasi nasional dan asing lainnya, bahwa perubahan peraturan itu tidak akan menghemat biaya para pesaing kami atau justru sebaliknya menekan pendapatan kami, atau bahwa perubahan peraturan itu, revisi atau intepretasi dari peraturan dan hukum yang berlaku saat ini atau di masa depan yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak akan berdampak negatif bagi bisnis dan hasil-hasil usaha kami.

Penghentian layanan SMS Premium Telkomsel telah berdampak pada turunnya pendapatan dari layanan ini. Tindakan serupa yang diambil BRTI atau Menkominfo di masa depan dapat mengurangi atau membatasi pertumbuhan pendapatan kami dari layanan ini atau produk terkait atau produk baru. BRTI atau Menkominfo juga dapat mengambil tindakan yang lebih agresif

yang dapat mengganggu penyediaan produk Telkomsel atau mengenakan denda atau sanksi administratif lainnya. Salah satu faktor ini dapat berdampak negatif secara material terhadap operasional dan kondisi keuangan kami.

Masuknya operator telekomunikasi baru ke Indonesia sebagai penyedia layanan sambungan langsung internasional dapat mengurangi marjin usaha, pangsa pasar dan hasil operasi layanan telekomunikasi internasional kami

Perusahaan kami memiliki lisensi dan telah mengoperasikan layanan Sambungan Langsung Internasional ("SLI") pada tahun 2004, dan memperoleh pangsa pasar yang signifikan pada akhir tahun 2006. Indosat, salah satu pesaing utama kami, memasuki pasar ini sebelumnya dan terus mempertahankan pangsa pasar yang besar untuk layanan SLI. Pada tahun 2009, Bakrie Telecom memperoleh lisensi SLI untuk mulai melakukan layanan sambungan langsung internasional dengan kode akses 009 meskipun belum memperoleh izin operasional. Terdapat kemungkinan bahwa operator lain juga akan memperoleh lisensi SLI di masa depan. Operasi para operator yang sudah ada dan masuknya operator baru ke pasar SLI, termasuk layanan VoIP oleh operator tersebut, terus menjadi ancaman kompetisi bagi kami. Kami tidak dapat menjamin bahwa efek yang merugikan itu tidak akan berlangsung terus atau persaingan yang semakin tinggi itu tidak akan mengurangi pangsa pasar kami atau marjin usaha dan hasil operasi layanan telepon tidak bergerak kami.

Kami menghadapi risiko terkait pembukaan kode SLJJ

Dalam upaya untuk meliberalisasi layanan SLJJ, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengalokasikan tiap penyedia layanan SLJJ kode akses tiga digit yang digunakan pelanggan saat melakukan panggilan SLJJ. Pada tahun 2005, Menkominfo mengumumkan kode akses tiga digit untuk panggilan SLJJ akan diterapkan secara bertahap dalam waktu lima tahun dan memberikan kepada kami kode akses "017" untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengizinkan kami untuk memperluasnya secara bertahap pada seluruh kode area. Indosat diberikan "011" sebagai kode akses SLJJ. Kami diminta untuk membuka kode akses SLJJ di seluruh wilayah yang tersisa pada tanggal 27 September 2011, saat mana jaringan kami di seluruh area kode di Indonesia telah siap menerima kode akses SLJJ tiga digit.

Kami memperkirakan bahwa operator lain akan harus mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk mempersiapkan jaringan mereka bagi kode akses tiga-digit. Sampai saat ini, belum ada permintaan dari operator berlisensi SLJJ lainnya kepada kami untuk menghubungkan jaringan mereka agar dapat menerima kode akses SLJJ, selain dari di Balikpapan, sehingga kami percaya bahwa, selain dari Balikpapan, tidak ada kode akses SLJJ milik operator berlisensi tersebut yang dapat digunakan oleh pelanggan dari operator lainnya. Namun demikian, apabila itu terjadi nantinya, implementasi kode akses SLJJ baru akan berpotensi meningkatkan persaingan dengan menawarkan lebih banyak pilihan layanan SLJJ bagi pelanggan kami. Selain itu, adanya kode akses SLJJ baru diperkirakan akan meningkatkan persaingan dan menurunkan kerja sama di antara pemain lama di industri ini, yang dapat berdampak pada mengecilnya margin dan pendapatan, antara lain, yang akan berdampak negatif pada kami.

Peraturan baru untuk konfigurasi menara BTS dapat menunda pendirian menara BTS baru atau mengubah penempatan menara yang ada dan mengurangi posisi kepemimpinan kami dengan mewajibkan kami berbagi-pakai menara dengan pesaing kami

Pada tahun 2008 dan 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pembangunan, utilisasi dan bagi-pakai menara BTS. Menyusul regulasi tersebut, pembangunan menara BTS memerlukan izin dari Pemda. Pemda memiliki hak untuk menentukan penempatan menara, lokasi dimana menara dapat dibangun, dan juga untuk menentukan biaya lisensi untuk membangun infrastruktur menara. Peraturan tersebut juga mewajibkan kami untuk membiarkan operator lain dapat meminjam ruang dan menggunakan menara telekomunikasi kami tanpa ada diskriminasi.

Peraturan ini juga dapat berdampak negatif terhadap alokasi pembangunan atau rencana ekspansi menara BTS kami karena pengembangan menara baru akan lebih rumit. Peraturan ini juga dapat berdampak buruk bagi menara BTS kami yang telah ada jika Pemda membuat perubahan regulasi terhadap penempatan menara yang telah ada.

Persyaratan untuk membagi ruang dalam menara seluler kami (Telkomsel) dan menara telepon nirkabel tidak bergerak (Telkom Flexi) juga akan merugikan kami sebagai pemimpin pasar karena memungkinkan pesaing untuk berkembang cepat, terutama di daerah perkotaan, dimana tempat ruang baru bagi menara tambahan akan sulit untuk didapatkan.

Efektif mulai tahun 2011, Pemda diijinkan untuk menarik biaya hingga 2,0% dari nilai pajak menara yang dibebankan. Meskipun kami tidak berharap jumlah biaya ini untuk menjadi material pada tahun 2012, tidak ada jaminan bahwa biaya tersebut tidak akan meningkat di masa yang akan datang.

5. Risiko Kompetisi Terkait Dengan Telekomunikasi Tidak Bergerak kami

Kami mungkin dapat kehilangan pelanggan sambungan telepon kabel dan terus menurunnya pendapatan dari layanan suara telepon kabel, sehingga dapat berpengaruh negatif secara material terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha kami

Kami terus kehilangan pelanggan telepon kabel sementara pendapatan dari layanan suara kabel juga terus menurun selama beberapa tahun terakhir akibat meningkatnya popularitas layanan suara bergerak dan komunikasi alternatif lainnya seperti VoIP. Tarif untuk layanan bergerak makin menurun dalam beberapa tahun ini, yang lebih lanjut mempercepat penggantian layanan suara kabel oleh layanan bergerak. Jumlah pelanggan telepon kabel tidak bergerak meningkat 3,6% pada akhir tahun 2011 dibandingkan dengan akhir tahun 2010 dan mengalami peningkatan sebesar 4,0% pada akhir tahun 2012. Pendapatan dari layanan suara kabel juga turun 6,5% di tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 dan turun sebesar 8,2% pada tahun 2012. Persentase pendapatan dari layanan suara kabel terhadap total pendapatan operasional terus menurun dari 14,4% pada tahun 2011 menjadi 12,2% di tahun 2012.

Kami telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi dampak penurunan pelanggan telepon kabel dan menstabilkan pendapatan kami dari layanan suara kabel. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan berhasil dalam menanggulangi dampak negatif dari pergeseran layanan suara kabel oleh layanan suara bergerak dan komunikasi alternatif lainnya, atau memperlambat penurunan pendapatan dari layanan suara kabel. Migrasi dari layanan suara kabel ke layanan bergerak dan komunikasi alternatif lainnya mungkin kian berkembang di masa depan sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan layanan suara kabel kami dan berdampak negatif secara material bagi hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha kami secara keseluruhan.

Layanan telepon nirkabel tidak bergerak kami mengalami persaingan ketat

Bisnis telepon nirkabel tidak bergerak kami menghadapi persaingan dengan meningkatnya jumlah operator, termasuk Bakrie Telecom dan Indosat, dan dari layanan seluler, SMS, VoIP, dan surat elektronik.

Persaingan di pasar telepon seluler dan nirkabel tidak bergerak tetap ketat, di mana tiap operator meluncurkan paket penawaran yang menarik dan kreatif. Menurunnya tarif rata-rata akibat tingginya persaingan di pasar seluler telah berdampak pada turunnya ARPU Telkom Flexi, dengan ARPU bulanan *blended* menurun dari Rp15.000 pada tahun 2010, Rp9.500 pada tahun 2011 dan Rp8.700 pada tahun 2012. Selain itu, apabila sebelumnya tarif layanan nirkabel tidak bergerak umumnya lebih rendah dibandingkan tarif seluler GSM, antara lain akibat perubahan regulasi pada Desember 2010 mengenai perhitungan biaya *right-of-use*, perbedaan tarif antara nirkabel tidak bergerak dan seluler GSM kini menjadi tidak signifikan. Akibatnya, pendapatan dari layanan nirkabel tidak bergerak cenderung menurun, dari Rp1.342 miliar pada 31 December 2011 menjadi Rp1.225 miliar pada 31 December 2012.

Kami telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi dampak kompetisi ketat dalam bisnis kabel tidak bergerak maupun keterbatasan kapasitas *bandwidth*. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan berhasil dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Kompetisi mungkin akan berkembang lebih lanjut di masa depan, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan dari layanan nirkabel tidak bergerak kami dan berdampak negatif terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha secara keseluruhan.

Layanan data dan internet kami menghadapi peningkatan persaingan, dan kami dapat mengalami penurunan marjin dari layanan tersebut akibat tingginya persaingan

Layanan Data dan Internet kami mengalami peningkatan kompetisi dari operator data dan internet serta operator telekomunikasi bergerak.

Operator akses *broadband* nirkabel yang telah memiliki lisensi pada tahun 2009 dengan teknologi Wi-Max memulai bisnis tersebut di kuartal keempat tahun 2010 (contohnya *First Media*). Operator lainnya diperkirakan akan mengoperasikan bisnisnya pada tahun 2012 dan akan berdampak negatif bagi pangsa pasar dan pendapatan layanan *Speedy Broadband* kami.

Kepopuleran BlackBerry telah meningkatkan jumlah pelanggan *mobile broadband*. Meningkatnya penggunaan layanan *mobile broadband* juga berdampak negatif pangsa pasar dan pendapatan dari layanan *fixed internet* dan *fixed data* kami.

Kami telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi dampak dari kompetisi ketat dalam bisnis data dan internet. Namun, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa kami akan sukses dalam upaya-upaya tersebut. Kompetisi yang lebih intensif di masa depan dapat mempengaruhi kinerja layanan data dan internet, dan selanjutnya dapat berdampak negatif bagi hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha kami secara keseluruhan.

6. Risiko-Risiko Persaingan Terkait Dengan Bisnis Seluler Kami (Telkomsel)

Persaingan antar operator yang ada dan pemain baru di industri ini dapat berdampak negatif pada bisnis seluler kami

Bisnis seluler di Indonesia sangat kompetitif. Persaingan antar penyedia layanan seluler di Indonesia terjadi dalam berbagai aspek, termasuk harga, kualitas jaringan dan jangkauan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta layanan konsumen. Bisnis seluler kami yang dioperasikan oleh Entitas Anak dengan kepemilikan mayoritas, Telkomsel, terutama bersaing dengan Indosat dan XL. Beberapa operator GSM dan CDMA lain juga menyediakan layanan seluler di Indonesia, termasuk Hutchison, PT Natrindo Telepon Seluler ("Natrindo" atau "AXIS"), Smart Telecom dan Bakrie Telecom. Selain penyedia layanan seluler yang ada saat ini, Menkominfo dapat menerbitkan lisensi bagi pemain seluler baru di masa depan, dan pemain tersebut akan bersaing dengan kami.

Kami meyakini bahwa persaingan bisnis layanan seluler akan terus meningkat. Penyedia layanan seluler baru maupun yang ada saat ini dapat menawarkan paket produk dan layanan yang lebih menarik, teknologi yang lebih canggih atau konvergensi dari beragam layanan telekomunikasi, sehingga berdampak pada tingginya tingkat pemutusan layanan, ARPU yang rendah, ataupun pengurangan, atau perlambatan pertumbuhan pada basis pelanggan seluler kami.

Peta persaingan dalam bisnis layanan seluler juga dapat terpengaruh oleh konsolidasi industri. Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk menggunakan logo dan merek yang sama dengan nama “smartfren”. Pada tanggal 18 Januari 2011, Mobile-8 mengakuisisi sejumlah besar saham di Smart Telecom, dan pada tanggal 12 April 2011, PT mobile-8 Telecom Tbk. berubah nama menjadi PT Smartfren Telecom, Tbk. Penyedia layanan seluler lainnya juga dapat melakukan konsolidasi di masa yang akan datang.

Persaingan antar penyedia teknologi baru bersama, masuknya pemain baru, pemain yang sudah ada dan konsolidasi antar penyedia layanan dapat berdampak negatif pada posisi kami, bisnis layanan seluler, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

Infrastruktur Jaringan

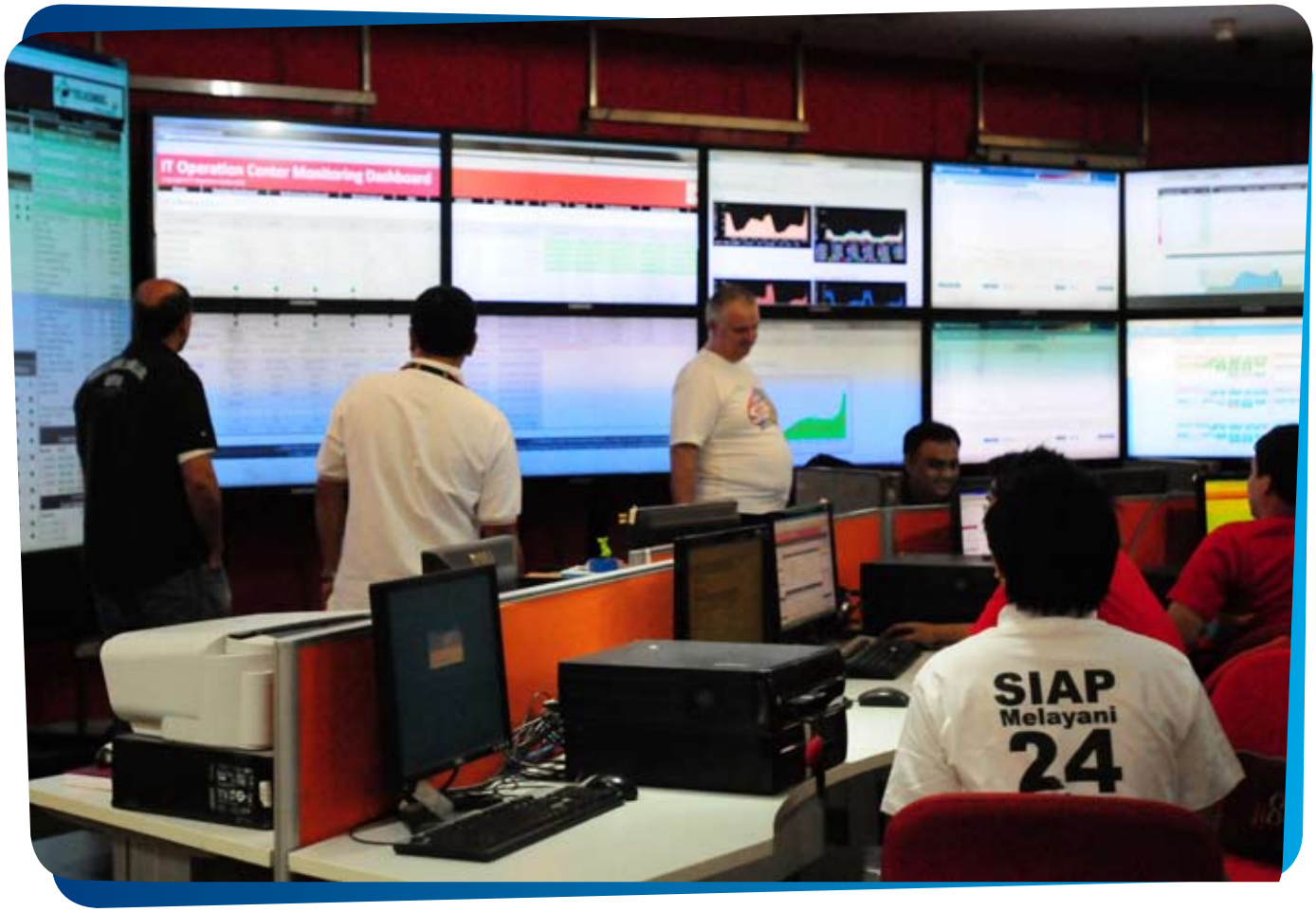

Telkom mengelola infrastruktur jaringan telekomunikasi meliputi jaringan telepon kabel dan nirkabel tidak bergerak, jaringan seluler dan jaringan transmisi *broadband* serta jaringan internasional, yang terus dimodernisasi dan diperluas untuk menghadirkan layanan TIMES selengkapnya.

Dalam rangka membangun infrastruktur yang berkualitas tinggi, efisien dan kompetitif dari sisi biaya untuk menyalurkan layanan-layanan TIMES, kami terus mengupayakan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jaringan menuju apa yang sebelumnya kami sebut sebagai jaringan Telkom One, sebagai suatu jaringan yang dibangun dan dioperasikan bersama oleh berbagai unit di Telkom Group, utamanya Telkomsel. Pembangunan jaringan infrastruktur yang efisien dan kompetitif dari sisi biaya untuk mendukung transformasi menjadi penyedia layanan TIMES terus dilakukan melalui pengembangan IDN yang, antara lain, menargetkan pembangunan 15 juta koneksi ke rumah tangga (*homepass*) di seluruh Indonesia pada tahun 2013, untuk menyalurkan layanan telepon (suara), IPTV dan *broadband*. Program IDN yang dimulai tahun 2012,

juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan *National Broadband Network* yang merupakan bagian dari program pemerintah dalam MP3EI.

Perwujudan IDN dilakukan melalui tiga program pengembangan sebagai berikut :

1. id-Access: pengembangan infrastruktur jaringan akses ke arah pelanggan menjadi *high speed broadband access* melalui jaringan serat optik dan WiFi.
2. id-Ring: pengembangan infrastruktrur jaringan transport menuju *IP-based and optical backbone network*.
3. id-Convergence ("id-Con"): pengembangan infrastruktur jaringan *service node* menuju *integrated* NGN untuk multi-layanan dan multi-layar.

Implementasi IDN dilakukan melalui sinergi di lingkungan Telkom Group, meliputi seluruh lapisan infrastruktur jaringan. Di tahun 2012, kami telah membangun dan mengoperasikan (i) *high speed optical access network* berbasis fiber to the home ("FTTH") dan WiFi untuk id-Access; (ii) *IP and optical backbone network* berbasis *terra router* dan serat optik yang mencakup seluruh Indonesia untuk id-Ring; dan (iii) *convergence service platform & multi-services* berbasis IMS untuk id-Con. Pembangunan infrastruktur IDN terus dilakukan dan pada tahun 2013 direncanakan dapat mencapai 15 juta *homepass*, 1 juta *access point* WiFi, 24 *node terra router* dan delapan node IMS yang didukung oleh 75 kilometer kabel serat optik.

A. Sambungan Telepon Tidak Bergerak Dan Transmisi

1. *Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak*

Per tanggal 31 Desember 2012, Telkom mengelola 8,9 juta sambungan telepon kabel tidak bergerak. Namun guna merespons *master plan* jaringan dan infrastruktur, kami menargetkan untuk melakukan transisi secara bertahap dari jaringan *legacy* ke NGN yang mencakup infrastruktur, metode layanan *new wave* dan operasi jaringan di tahun 2014 termasuk modernisasi jaringan infrastruktur sampai semua infrastruktur IP.

Tabel berikut menyajikan data sambungan telepon kabel tidak bergerak sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012:

Statistik Operasi	Sampai dengan akhir 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kapasitas sentral	13.908.003	12.180.214	11.237.229	11.094.063	11.038.818
Sambungan terpasang	11.109.156	11.005.208	10.510.048	10.013.565	9.838.537
Sambungan terpakai[1]	9.034.010	8.688.526	8.302.818	8.376.793	8.629.783
Sambungan berbayar	8.672.332	8.323.175	7.980.337	8.038.294	8.302.730
Telepon umum	273.929	278.505	322.481	338.499	327.053
Sambungan sirkit sewa terpakai[2]	3.342	3.662	3.988	4.273	6.084
Produksi pulsa telepon kabel tidak bergerak kabel (juta menit)[3]	6.770	8.054	9.403	54.186 [5]	62.940 [5]
Tingkat kegagalan[4]	2,7	2,2	2,5	3,1	3,5

(1) Sambungan terpakai terdiri dari sambungan pelanggan dan telepon umum, juga termasuk sejumlah sambungan yang kami operasikan untuk pola bagi hasil.
(2) Tidak termasuk sirkit sewa untuk jaringan dan bisnis multimedia.
(3) Terdiri dari pulsa panggilan lokal dan SLJJ, tidak termasuk telepon umum dan telepon seluler.
(4) Kesalahan per 100 kali sambungan setiap bulan.
(5) Dalam juta pulsa untuk tahun 2009 dan 2008.

2. *Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak*

Telkom mempunyai infrastruktur sambungan telepon nirkabel tidak bergerak yang terdiri dari *mobile switching center* ("MSC") yang terhubung dengan setiap sentral trunk lainnya. Setiap MSC terkait dengan *base station sub system* ("BSS") yang terdiri dari *base station controller* ("BSC") dan *base transceiver station* ("BTS"). Semuanya menghubungkan perangkat telepon genggam dan terminal telepon nirkabel tidak bergerak pelanggan ke sambungan telepon nirkabel tidak bergerak Telkom. Jumlah sambungan aktif telepon nirkabel tidak bergerak Telkom meningkat dari 14,2 juta pada tahun 2011 menjadi sekitar 17,9 juta pada tahun 2012.

Tabel berikut menyajikan data sambungan telepon nirkabel tidak bergerak sejak tahun 2008:

Statistik Operasi	Sampai dengan akhir 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kapasitas sentral (kapasitas MSC)(1)	32.262.120	33.261.850	24.048.993	23.393.631	15.885.020
Sambungan terpasang (kapasitas BTS)(1)	27.631.751	27.635.751	27.344.151	27.653.553	19.861.324
Sambungan terpakai(2)	17.869.591	14.237.522	18.161.278	15.139.057	12.725.425
Sambungan berbayar	17.868.991	14.221.413	18.142.955	15.115.892	12.698.827
Telepon umum	600	16.109	18.323	23.165	26.598
Produksi pulsa telepon nirkabel tidak bergerak/ produksi menit (juta)(3)	5.667	7.931	11.768	14.627	12.304

(1) Kapasitas BTS dan MSC pada tahun 2008 dihitung dengan asumsi trafik percakapan per pelanggan sebesar 30 mE.
(2) Sambungan terpakai terdiri dari sambungan pelanggan dan telepon umum, termasuk sambungan yang kami operasikan untuk pola bagi hasil.
(3) Berisi menit pemakaian dari panggilan-panggilan lokal dan SLJJ, kecuali panggilan melalui telepon umum koin dan telepon seluler bergerak.

3. *Jaringan Transmisi*

Selama tahun 2012, Telkom fokus pada pengembangan jaringan *broadband*, yang berperan sebagai tulang punggung ("*backbone*") infrastruktur jaringan Telkom Group secara keseluruhan. *Backbone* jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan transmisi, fasilitas sentral ("*switching*") jarak jauh serta *core routers* yang menghubungkan beberapa akses *node*. Sambungan-sambungan transmisi antara *node* dan fasilitas *switching* mencakup jaringan transmisi terestrial, yaitu jaringan serat optik, gelombang mikro, dan kabel bawah laut, maupun jaringan transmisi satelit dan teknologi transmisi lainnya.

Tabel berikut ini menunjukkan kapasitas transmisi per tanggal 31 Desember 2011 dan 2012:

Total Jaringan Transmisi	Kapasitas (Jumlah sirkit medium transmisi)					
	E1	STM-1	STM-4	STM-16	STM-64	STM-256
Sampai dengan Desember						
2011	132.691	671	65	35	184	-
2012	131.546	720	92	55	260	3

Catatan: Satuan transmisi backbone menggunakan satuan E1, STM1 (setara dengan 63 E1), STM4 (setara dengan 4 STM1), STM16 (setara dengan 4 STM4), STM64 (setara dengan 4 STM16) dan STM256 (setara dengan 4 STM64). STM ("*Synchronous Transfer Mode*") merupakan satuan transmisi yang umum diterapkan pada jaringan transmisi *backbone*. Untuk memfasilitasi layanan *broadband*, dibutuhkan jaringan transmisi berkapasitas besar dengan satuan nxSTM-1. Satuan E1 digunakan untuk mendukung layanan *legacy*.

Perusahaan mengoperasikan satelit Telkom-1 dan Telkom-2 beserta 205 stasiun bumi, termasuk satu stasiun master kendali satelit. Satelit Telkom-1 mempunyai kapasitas 36 *transponder*, termasuk 12 *transponder extended* C-band dan 24 *transponder* C-band standar, sedangkan satelit Telkom-2 mempunyai kapasitas 24 *transponder* C-band standar.

Sebagai tambahan dari dua satelit yang kini digunakan, Telkom juga menyewa beberapa *transponder* dari penyedia layanan satelit lainnya, seperti GE 23 dengan 11 *transponder*, satelit star-1 dengan dua *transporder*, satelit Sinosat dengan dua *transponder*, dan satelit JCSaT5a dengan 10 *transponder*.

Mengantisipasi pertumbuhan permintaan layanan satelit dan untuk mendukung strategi bisnis Telkom dalam menyediakan layanan TIMES, pada tanggal 2 Maret 2009, Telkom telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Academician M.F. Reshetnev Information Satellite Systems dari Rusia, untuk pengadaan sistem satelit Telkom-3. Peluncuran Satelit Telkom-3 dijadwalkan pada tahun 2012. Namun, akibat adanya gangguan saat peluncuran pada bulan Agustus 2012, satelit Telkom-3 kini berada pada orbit yang tidak dapat digunakan (*unusable orbit*). Telkom telah mengasuransikan biaya pengadaan satelit Telkom-3. Perusahaan akan menyewa kapasitas *transponder* satelit dari pihak ketiga, apabila diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan operasional sendiri maupun untuk pelanggan.

B. Jaringan Seluler

Layanan seluler kami yang dioperasikan oleh entitas anak, Telkomsel, memiliki cakupan terbesar dibandingkan operator seluler lainnya di Indonesia. Saat ini Telkomsel mengoperasikan layanan pada jaringan GSM/DCS, GPRS, EDGE serta 3,5G. Jaringan GSM/DCS terdiri dari *bandwidth* 7,5 MHz pada frekuensi 900 MHz dan *bandwidth* 22,5 MHz pada frekuensi 1.800 MHz. Kedua jaringan tersebut beroperasi sebagai sebuah jaringan *dual band* yang terintegrasi. Jaringan 3G Telkomsel memanfaatkan *bandwidth* 10 MHz pada frekuensi 2,1 GHz.

Per tanggal 31 Desember 2012, jaringan digital Telkomsel diperkuat oleh infrastruktur yang terdiri dari 54.297 BTS dengan kapasitas keseluruhan jaringan yang mampu memfasilitasi kebutuhan komunikasi bagi 125,1 juta pelanggan.

C. Jaringan Data dan Internet

Untuk menjamin tingkat kehandalan yang tinggi, Telkom mengimplementasikan jaringan data dan internet berbasis IP/MPLS yang bersifat hirarkis dan *dual homing*. Jaringan *IP backbone* kami telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan per tanggal 31 Desember 2012 mencakup 47 lokasi PoP dengan 22 *node terra router*, 18 *node core router* dan 545 *node PE router*.

Kami juga mengoperasikan *carrier metro Ethernet* sebagai agregator trafik layanan akses *broadband* menuju jaringan *IP Backbone*. Per 31 Desember 2012, tercatat sebanyak 1.004 *node metro ethernet* untuk menampung 1.536 GBps layanan akses *broadband*.

Telkom menyediakan layanan akses *broadband* berbasis telepon kabel tidak bergerak berbasis teknologi ADSL, dengan nama dagang "Speedy". Per tanggal 31 Desember 2012, Telkom mengoperasikan 4,7 juta *homepass* layanan akses *broadband* dan melayani 2,3 juta pelanggan Speedy, atau tumbuh 30,9% dibandingkan jumlah 1,8 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2011.

Sementara itu, Telkomsel, entitas anak kami, juga menyediakan layanan *broadband* dengan nama dagang "Flash". Per 31 Desember 2012, layanan Flash mencatat 11,0 juta pelanggan, dengan pertumbuhan sebesar 99,5% dibandingkan 5,5 juta pelanggan per 31 Desember 2011.

D. Jaringan Internasional

Telkom saat ini mengoperasikan tiga *gateway* internasional yaitu di Batam, Jakarta dan Surabaya. Ketiga *gateway* tersebut tersambung dengan jaringan domestik yang handal untuk memfasilitasi layanan Sambungan Langsung Internasional ("SLI"), yakni "007", baik untuk panggilan keluar maupun panggilan masuk. Sampai saat ini kami belum berencana untuk mengembangkan *gateway* baru.

Jaringan internasional Telkom didukung oleh Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL"), yaitu Dumai-Malaka Cable System dan SKKL Thailand-Indonesia-Singapore ("TIS"), hak pakai yang tidak dapat di batalkan *Indefeasible Right of Use*, dan satelit. Untuk mengembangkan dan memperkokoh jaringan internasional serta memperluas layanan *broadband*, sejak April 2007, entitas anak kami, Telin, juga bergabung dalam konsorsium kabel Asia America Gateway ("AAG") untuk pembangunan Batam Singapore Cable System yang menghubungkan Batam dengan Singapura. Perusahaan melalui Telin juga memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan akses internasional ke wilayah Indonesia Timur, selain juga menciptakan variasi layanan dan meraih peluang bisnis di Asia Selatan, Timur Tengah dan Eropa.

Selain itu, Perusahaan memiliki perjanjian layanan telekomunikasi internasional dengan operator di beberapa negara untuk memfasilitasi interkoneksi panggilan internasional. Karena Telkom tidak memiliki perjanjian dengan operator telekomunikasi di setiap tempat tujuan SLI, Perusahaan membuat kesepakatan dengan SingTel, Telekom Malaysia Berhad, Verizon, Belgacom, NTT, TIS, France Telecom, dan operator lainnya yang mana para operator telekomunikasi tersebut berfungsi sebagai penghubung untuk mengalihkan panggilan internasional ke tempat tujuan tertentu. Per tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional dengan 78 operator internasional di 27 negara. Perusahaan telah mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional tambahan dengan operator telekomunikasi lainnya guna melayani interkoneksi secara langsung, terutama operator di 20 tempat tujuan teratas untuk trafik SLI *outgoing*. Selain tersambung dengan 20 negara tujuan teratas trafik SLI *outgoing*, kami juga telah tersambung dengan 58 operator lainnya di berbagai negara.

PENGEMBANGAN JARINGAN

A. Pengembangan Jaringan Telepon Kabel Tidak Bergerak

Pada tahun 2012, kami terus mengembangkan infrastruktur dan membangun IDN. Rancangan IDN ini menunjukkan komitmen kami untuk terus membangun dan meningkatkan kualitas, efisiensi dan struktur biaya infrastruktur. Sejalan dengan transformasi menjadi penyelenggara layanan TIMES, kami fokus pada penyediaan: (i) *high speed broadband access* melalui *optical fiber network* & WiFi ("*id-Access*"), (ii) *IP-based and optical backbone network* ("*id-Ring*") dan (iii) *integrated NGN* dalam penyediaan berbagai layanan ("*id-Con*").

Beberapa proyek pengembangan sambungan telepon kabel tidak bergerak selama tahun 2012 terdiri dari proyek Jawa-Sumatera-Kalimantan ("Jasuka"), proyek Palapa Ring Mataram-Kupang, pembangunan dan modernisasi *broadband access* dengan Pola TITO, pembangunan *broadband access* dengan platform MSAN, proyek pembangunan FTTH, pembangunan IMS, proyek TSCS (Tarakan Sangata cable system) dan SBCS (Sumatera Bangka cable system), proyek *Dense Wavelength Division Multiplexing* ("DWDM") Regional, implementasi Telkom cache system, proyek SKKL SMP (Sulawesi Maluku Papua) dan proyek SKKL Jakarta-Batam-Singapura.

Sebagai upaya lebih lanjut untuk memperkokoh layanan TIMES, Perusahaan berencana untuk:

1. Terus meningkatkan jaringan untuk merealisasikan visi Perusahaan yaitu menyediakan *home digital environment*, meningkatkan layanan *enterprise broadband* dan layanan *broadband anywhere* di Indonesia.
2. Terus meningkatkan kemampuan jaringan *full IP data transport* melalui program: peningkatan *bandwidth* internet domestik dan internasional, ekspansi *terra IP backbone*, ekspansi *IP over lambda* berbasis 10 Gbps, 40 Gbps dan selanjutnya berbasis 100 Gbps per lambda, memfasilitasi konvergensi dan melakukan sinergi diantara jaringan Telkom Group, melanjutkan pembangunan *Metro Ethernet* yang difungsikan sebagai jaringan *single transport metro* untuk menyediakan layanan-layanan berbasis IP dan *multiplay*, melanjutkan implementasi FTTH, serta melanjutkan migrasi kabel tembaga yang telah ada dengan mekanisme TITO.
3. Mengimplementasikan *smart core* melalui program layanan konvergen *platform* berbasiskan IMS, mengimplementasikan database profil pelanggan terpadu, serta *service delivery platform* sebagai *service brokerage & orchestration*.

4. Memperluas jangkauan akses *broadband* sampai dengan pelanggan *enterprise* dan residensial melalui rangkaian program *managed enterprise services, managed smart CPE, home automation, surveillance,* dan *home interconnect*.

Untuk rincian komitmen dan kontrak Telkom lainnya yang signifikan lihat Catatan 41 di Laporan Keuangan Konsolidasian.

B. Pengembangan Jaringan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Pada tahun 2012, kami mengoptimalkan BTS yang telah ada dan merelokasi BTS dari area *low occupancy* ke area *inner city* dengan maksud untuk meningkatkan utilisasi. Pada 31 Desember 2012, jumlah BTS kami sejumlah 5.714 dengan total kapasitas 32,3 juta satuan sambungan Flexi. Kami terus mengembangkan cakupan layanan *Flexi mobile broadband* dengan mengimplementasikan teknologi *Evolution Data Optimization* ("EVDO") dan meningkatkan jumlah BTS EVDO sebanyak 1.157 BTS dengan total kapasitas 350.571 *line unit* per tanggal 31 Desember 2012. Disamping itu juga telah dilakukan beberapa program yang dapat meningkatkan efisiensi beban operasional seperti pemutakhiran sistem pendingin BTS yang lebih efisien.

C. Pengembangan Jaringan Seluler

Jangkauan layanan telepon seluler berbasis GSM yang disediakan oleh entitas anak kami, Telkomsel, menjangkau semua kota/kabupaten di Indonesia. Pada tahun 2012, Telkomsel telah menambah 11.674 BTS (termasuk 5.925 node-B untuk layanan 3,5G) dan 5.373 sentral pemancar dan penerima, serta memperluas jaringan selulernya untuk menjangkau semua kecamatan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatera.

D. Pengembangan Jaringan Data

Pada tahun 2012, Perusahaan terus memperbaiki kualitas jaringan data dengan menambah kapasitas dan cakupannya. Di tahun tersebut, kami menambahkan akses *broadband* yang menggunakan teknologi MSAN untuk 893.896 *homepass* dan FTTH untuk 95.709 *homepass*, sehingga sampai dengan 31 Desember 2012 Telkom telah mengoperasikan akses *broadband* sejumlah 4.692.015 *homepass*. Kami melakukan penambahan kapasitas dan cakupan *metro ethernet* maupun perluasan baru, meliputi perluasan cakupan dan kapasitas *IP core* melalui penerapan IP berbasis lambda 10Gbps dan 40 Gbps serta implementasi *terra router*. Pada tahun 2012 Telkom telah melakukan ekspansi tiga *node terra router* sehingga sampai dengan 31 Desember 2012 kami mengoperasikan 22 *node terra router* dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari program IDN, kami telah meningkatkan jaringan *IP Core* yang digunakan untuk mendukung bisnis TIMES dan mengintegrasikan jaringan NGN *Core* kami dengan bisnis telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak. *IP Core* dikembangkan dengan mengimplementasikan *platform* tunggal *terra-byte router* dengan arsitektur jaringan yang menggunakan sistem proteksi penuh. *IP Core* yang sudah beroperasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 terdiri dari 40 *node router core*, 545 *node* PE (*primary edge*) *router*, 560 10GB *Ethernet port* dan 750 GB *Ethernet port* .

Jaringan *Metro Ethernet* telah diperluas dengan pemasangan dan pemutakhiran 281. Sampai dengan 31 Desember 2012, kami mengoperasikan *node metro ethernet* sebanyak 1.005 *node* yang mampu menyediakan layanan *bandwidth* ke seluruh Indonesia. *Metro ethernet* juga digunakan sebagai penghubung utama dari IP DSLAM, MSAN untuk *broadband* Speedy, *softswitch*, VPN IP serta GPON *broadband* baik untuk *mobile backhaul*, solusi bisnis korporasi serta layanan *triple play*. Sampai dengan 31 Desember 2012, kami menambahkan 1.165 BTS *node* B menjadi 4.317 BTS *node* B.

Sampai dengan 31 Desember 2012, kami telah menambah kapasitas *gateway* internet sehingga kapasitas terpasang mencapai 106,4 Gbps dengan utilisasi 103,8 Gbps. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan kapasitas *gateway* internet agar mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik *broadband* yang diperkirakan tinggi baik untuk *fixed* maupun *mobile*. Pada tahun 2012 kami juga telah mengoperasikan *content distribution network* bekerja sama dengan Akamai, Google dan Yahoo dengan kapasitas 201 Gbps dengan utilisasi 75 Gbps.

Sumber Daya Manusia

Mengingat pentingnya aspek Sumber Daya Manusia ("SDM") sebagai salah satu sumber daya utama di setiap Perusahaan, kami memandang keberadaan SDM Telkom sebagai modal ("*human capital*") bagi organisasi.
Ini merupakan perubahan paradigma dari sebelumnya yang memandang SDM sebagai aset Perusahaan.

A. Profil SDM

Kami memiliki 25.683 orang karyawan per tanggal 31 Desember 2012, yang terdiri dari 19.185 karyawan Telkom dan 6.498 karyawan di entitas anak. Jumlah ini menurun 1,3% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2011, sejalan dengan berlanjutnya program *multi exit* sebagai bagian dari upaya revitalisasi dan penigkatan efisiensi SDM Telkom sejak tahun 2002.

Tabel profil karyawan berdasarkan posisi jabatan

Jabatan	Telkom	Entitas Anak	Telkom Group	%
2012				
Manajemen Senior	132	255	387	1,5
Manajemen Madya	2.571	1.048	3.619	14,1
Pengawas	9.991	1.774	11.765	45,8
Lainnya	6.491	3.421	9.912	38,6
Jumlah	**19.185**	**6.498**	**25.683**	**100,0**
2011				
Manajemen Senior	136	76	212	0,8
Manajemen Madya	2.497	1.157	3.654	14,0
Pengawas	9.694	2.162	11.856	45,6
Lainnya	7.453	2.848	10.301	39,6
Jumlah	**19.780**	**6.243**	**26.023**	**100,0**

Grafik profil karyawan berdasarkan posisi jabatan

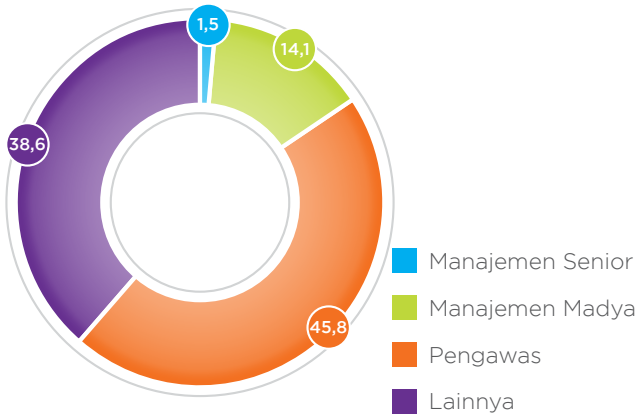

Tabel profil karyawan berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Telkom	Entitas Anak	Telkom Group	%
2012				
Pra Kuliah	6.349	515	6.864	26,7
Lulusan Diploma	4.619	926	5.545	21,6
Lulusan Universitas	6.506	4.634	11.140	43,4
Pasca Sarjana	1.711	423	2.134	8,3
Jumlah	**19.185**	**6.498**	**25.683**	**100,0**
2011				
Pra Kuliah	6.695	564	7.259	27,9
Lulusan Diploma	4.808	944	5.752	22,1
Lulusan Universitas	6.594	4.351	10.945	42,1
Pasca Sarjana	1.683	384	2.067	7,9
Jumlah	**19.780**	**6.243**	**26.023**	**100,0**

Grafik profil karyawan berdasarkan tingkat pendidikan

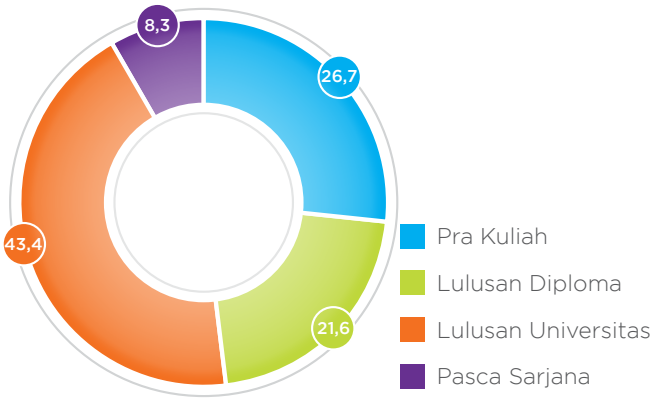

Tabel profil karyawan berdasarkan usia

Kelompok Usia	Telkom	Entitas Anak	Telkom Group	%
2012				
<30	820	1.538	2.358	9,2
31 - 45	4.654	4.429	9.083	35,4
>45	13.711	531	14.242	55,4
Jumlah	**19.185**	**6.498**	**25.683**	**100,0**
2011				
<30	913	1.686	2.599	10,0
31 - 45	5.089	4.127	9.216	35,4
>45	13.778	430	14.208	54,6
Jumlah	**19.780**	**6.243**	**26.023**	**100,0**

Grafik profil karyawan berdasarkan usia

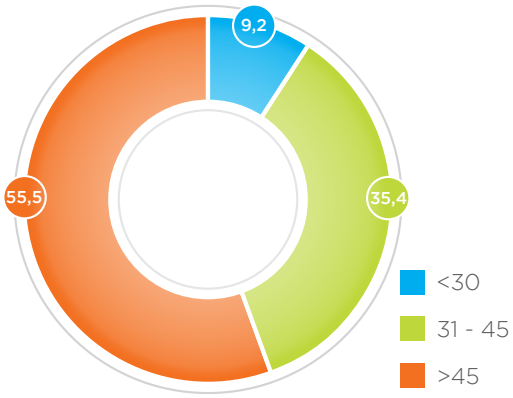

B. Pengelolaan SDM

Perusahaan telah menyusun *Human Capital Master Plan* untuk mengoptimalkan potensi *human capital* yang ada di Telkom Group. Penyusunan *Human Capital Master Plan* dilakukan secara terpadu dengan merujuk pada perencanaan korporasi jangka panjang maupun tahunan serta strategi bisnis masing-masing Perusahaan yang tergabung di Telkom Group. Penyusunan *Human Capital Master Plan* juga didasarkan pada analisis penawaran dan permintaan yang akurat serta terukur, yaitu dengan menggunakan referensi data acuan, terutama acuan rasio produktivitas pada beberapa Perusahaan sejenis.

Informasi yang ada dalam *Human Capital Master Plan* Telkom Group terdiri dari:
- Proyeksi mengenai jumlah *human capital* yang dihitung berdasarkan portofolio bisnis selama periode lima tahun ke depan;
- Proyeksi tentang komposisi *human capital* secara rinci dengan mengacu pada komposisi *job stream*, pendidikan, usia dan jabatan; dan
- Rencana ketenagakerjaan yang berisi rencana SDM tahunan di masing-masing Perusahaan yang termasuk jajaran Telkom Group.

Penyusunan *Human Capital Master Plan* yang terpadu membantu Perusahaan dalam:
- Memproyeksikan kebutuhan *human capital* secara tepat, baik dari sisi jumlah dan kompetensinya;
- Menyusun rencana pengalokasian karyawan dan rencana pengembangan karir; dan
- Mengukur produktivitas *human capital*.

Pemenuhan kebutuhan SDM serta infrastruktur terkait dilakukan dengan berdasar pada prinsip sinergi dan optimalisasi sumber daya internal yang ada di jajaran Telkom Group.

Strategi pengelolaan SDM kami menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompetensi SDM searah dengan portofolio bisnis yang semakin fokus pada TIMES. Kami juga berupaya meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara Perusahaan di jajaran Telkom Group dan terus menekankan penerapan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk lima tahun ke depan dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha Perusahaan.

Rencana pengalokasian karyawan disusun paling lambat pada triwulan IV setiap tahun dan berlaku selama satu tahun ke depan. Rencana pengalokasian karyawan berisi berbagai informasi diantaranya: nama posisi yang sudah, atau sedang dan akan dijabat oleh karyawan; layer posisi; *job stream*; lokasi kerja; jumlah formasi; rencana pengaturan karyawan tiap bulan termasuk promosi, mutasi, status penugasan (berjangka waktu/tidak berjangka waktu); dan mutasi masuk dan keluar (*in/out*).

Rencana ketenagakerjaan disusun dengan mengidentifikasi kebutuhan karyawan, yang mengacu pada *Human Capital Plan* atau *Rolling Human Capital Plan* Telkom Group. Fokus dari rencana ketenagakerjaan adalah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dengan merujuk pada acuan yang kompetitif. Kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada di samping tetap melakukan rekrutmen sekitar 20% dari jumlah karyawan yang keluar.

Rencana ketenagakerjaan mencakup penjelasan mengenai profil sumber daya yang dihitung berdasarkan aktivitas bisnis dari tiap perusahaan di jajaran Telkom Group, serta penjelasan berdasarkan pekerjaan, posisi, umur dan latar belakang pendidikan.

1. *Rekrutmen SDM*

Pelaksanaan rekrutmen SDM dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya internal melalui sinergi di jajaran Telkom Group. Sinergi di bidang perekrutan ini bertujuan mengedepankan efisiensi dalam hal biaya pergantian karyawan di masing-masing perusahaan, serta untuk mendapatkan kandidat terbaik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, sinergi ini dengan sendirinya juga memfasilitasi pengembangan karir setiap karyawan di jajaran Telkom Group. Jika dimungkinkan, kebutuhan karyawan akan dipenuhi oleh kandidat yang berasal dari dalam Telkom Group sendiri. Untuk perekrutan eksternal, Perusahaan lebih memfokuskan pada perekrutan karyawan berpendidikan lebih tinggi dalam rangka memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan usaha. Kami juga mengirim lebih banyak karyawan dari Telkom untuk penugasan di perusahaan lain di Telkom Group.

Sinergi dalam hal perekrutan mencakup:
- Pelaksanaan *career days*;
- Pemanfaatan bersama atas infrastruktur dan fasilitas seperti tempat kegiatan pelatihan atau penilaian dalam proses penyeleksian karyawan;
- Pemanfaatan bersama atas database kandidat serta modul atau materi terkait pengetahuan produk Telkom Group; dan
- Inisiatif sinergi di bidang rekrutmen lainnya.

Pada tahun 2012, kami telah merekrut karyawan baru sebanyak 280 orang.

2. *Pengembangan Kompetensi SDM*

a. *Competency Based Human Resources Management ("CBHRM")*

Telkom telah menetapkan strategi pengembangan kompetensi *human capital* yang dituangkan dalam *Human Capital Master Plan*, yang senantiasa diperbaharui setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perusahaan. Pelaksanaannya juga diselaraskan dengan strategi bisnis yang berdasarkan kepada *Corporate Strategic Scenario* ("CSS"), *Master Plan for Human Capital* ("MPHC"), *Human Capital Development Plan* ("HCD *Plan*"), transformasi organisasi serta kondisi keuangan Perusahaan.

Kami menerapkan pendekatan CBHRM dalam rangka penilaian terhadap kompetensi SDM yang ada. Model CBHRM terdiri atas *Core Competency* (*values*), *Generic Competency* (*Personal Quality*), dan *Specific Competency* (*Skill & Knowledge*). Ketiga model ini dikembangkan dan disempurnakan untuk mendukung penilaian kemampuan pegawai secara adil dan transparan.

Telkom memiliki direktori kompetensi yang memuat daftar kompetensi yang diperlukan Perusahaan, yang senantiasa diperbaharui agar mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis Perusahaan, termasuk jenis-jenis kompetensi *skill & knowledge* yang sesuai dengan perubahan portofolio bisnis menjadi TIMES.

Pengembangan kompetensi karyawan dititikberatkan pada hal-hal berikut ini:
- Pengembangan budaya, yang memfokuskan pada internalisasi dan penguatan *core values* Perusahaan sebagai basis pembentukan budaya, yaitu *Commitment to Long Term, Customer First, Caring Meritocracy, Co-Creation of Win-Win Partnership*, dan *Collaborative Innovation* atau disebut Telkom 5C;
- Pengembangan kemampuan peran, yang terfokus pada pengembangan kualitas pribadi yang dibutuhkan oleh setiap kategori peran yang dipilih/didefinisikan; dan
- Pengembangan kemampuan sesuai tuntutan pekerjaan.

Menyusul transformasi bisnis Perusahaan yang terfokus pada bisnis TIMES, penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan yang bersifat perubahan kompetensi dan pengembangan kompetensi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk perubahan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan kompetensi karyawan agar mampu menyikapi perubahan telekomunikasi berbasis TDM menjadi telekomunikasi berbasis IP dan kompetensi IMES. Sementara itu, pelatihan untuk pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan karyawan dengan kompetensi tertentu guna mendukung portofolio bisnis Perusahaan.

Selama 2012, fokus program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan yang diselenggarakan Telkom adalah di bidang teknologi, pemasaran dan manajemen telekomunikasi, informasi bisnis dan pengembangan bisnis *new wave* untuk mendukung terwujudnya visi Telkom menjadi *market leader* dalam penyelenggaraan TIMES. Pelatihan ini diselenggarakan di Telkom Learning Center serta di berbagai lembaga pendidikan/pelatihan eksternal terkemuka.

Untuk meningkatkan kerja sama unit bisnis Telkom Group dan untuk efisiensi biaya dilakukan sinergi Telkom Group yang meliputi kerja sama program, kerja sama partisipan, maupun kerja sama di bidang fasilitas.

Kemudian guna menciptakan pemimpin masa depan, disediakan program pengembangan kepemimpinan antara lain:
- Kepemimpinan Tingkat Dasar (*Supervisory Leadership Fundamental, Supervisory Leadership Functional*);

- Kepemimpinan Tingkat Menengah (*Functional Leadership, Publict Leadership* untuk Manajemen Madya); dan
- Kepemimpinan Tingkat Senior (*Functional Leadership, Commander Training, Public Leadership* untuk Manajemen Senior).

Selama tahun 2012, sebanyak 21.013 karyawan (*man-program*) telah mengikuti pelatihan yang bersifat pengembangan kompetensi. Dalam program pengembangan kompetensi dimaksud, sebanyak 3.899 karyawan mengikuti program pengembangan kompetensi untuk stream Telekomunikasi, 3.951 karyawan untuk stream Informasi dan 139 karyawan untuk Media dan *Edutainment*, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk *Leadership Programme* telah diikuti sebanyak 934 karyawan, *New Culture* diikuti 488 karyawan dan Synergi Telkom Group 295 karyawan. Adapun program sertifikasi diikuti 473 karyawan.

Penetapan keikutsertaan karyawan dalam keseluruhan program pengembangan kompetensi tersebut ditentukan oleh kebutuhan Perusahaan dan karyawan dengan memperhatikan kesetaraan gender dan persamaaan kesempatan kepada seluruh karyawan.

Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi karyawan juga termasuk fasilitas *Knowledge Management* dimana setiap karyawan berkesempatan untuk bertukar ide, konsep dan berbagi informasi melalui artikel yang dapat diakses oleh semua karyawan.

Agar karyawan tergerak mengikuti jalur pengembangan kompetensi Perusahaan, kami telah menerapkan sistem penilaian yang obyektif atas kinerja karyawan. Penilaian atas kinerja masing-masing karyawan terkait dua aspek, yaitu aspek hasil, berdasarkan sasaran kerja individu dan aspek proses, berdasarkan kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan. Pelaksanaannya dilakukan secara *online* terhadap sejumlah indikator perilaku terkait yang ditunjukkan oleh karyawan saat bekerja (*demonstrated behavior*).

b. Telkom CorpU

Dalam mengaplikasikan *value* perusahaan yakni *commitment to long term* dan *caring meritocracy*, kami melakukan investasi pada aspek SDM (*invest in people*). Untuk merealisasikannya, maka pembinaan pimpinan (*leader*) dan karyawan (*people*) merupakan *strategic initiative* pertama dan utama yang diformulasikan sebagai "*Center of Excellence*". Sebagai upaya mewujudkan *center of excellence* tersebut, maka pada tanggal 28 September 2012 dibentuklah Telkom Corporate University ("Telkom CorpU") yang diharapkan dapat menciptakan suatu sistem yang dapat melahirkan *leader* dan *people* yang unggul. Adapun fungsi utama Telkom CorpU sebagai *center of excellence* ada tiga yaitu:

- ***Center of chiefship (creating great leader)***
  Telkom CorpU diharapkan mampu melahirkan *leader-leader* masa depan yang semakin berkualitas dan berkelas internasional, yang secara berkesinambungan mampu melakukan estafet kepemimpinannya sesuai tuntutan jaman. Kami meyakini bahwa *leader* yang berhasil, akan mampu melahirkan *leader-leader* berikutnya yang jauh lebih berhasil. Dengan demikian, melalui Telkom CorpU ini maka akan terjadi kaderisasi yang sukses.
- ***Center of competence (creating great people)***
  Telkom CorpU diharapkan mampu menghasilkan *people* yang berkualitas tinggi dan tangguh, karena *people* inilah yang sangat berperan dalam keberhasilan Perusahaan.
- ***Center of certification (creating global standard)***
  Telkom CorpU diharapkan mampu mencetak SDM dengan global *standard*. Setiap program pengembangan *leadership* dan kompetensi harus memiliki standar internasional dan setiap lulusannya memiliki sertifikasi dengan standar internasional.

Salah satu program utama Telkom CorpU pada tahun 2012 adalah *Global Talent Program* ("GTP") yang merupakan inovasi kami di bidang *human capital* yang berangkat dari

keyakinan (*believe*) dan menjadi kendaraan (*vehicle*) untuk menghadapi persaingan global. Kami menginginkan seluruh SDM kami mempunyai *global exposure*. Karena bagaimananpun juga iklim bisnis tidak lagi dapat dibendung dengan batas-batas geografis sebuah negara. Bahkan, walaupun berada di Indonesia, layanan bisnis TIMES yang kami kelola sudah menjadi lintas negara karena para kompetitor merupakan perusahaan berskala internasional.

Global exposure ini sangat dibutuhkan untuk memahami skema bisnis yang berkembang di tataran internasional. Kami secara bertahap telah mengirimkan *talent-talent* dalam GTP agar mereka mempunyai *global exposure* dan *global experience* sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan berskala internasional. Pada tahun 2012 ini kami telah mengirimkan sebanyak 109 orang ke berbagai negara antara lain Singapore, Hongkong, Australia, Timor Leste, dan Myanmar.

Program Telkom CorpU lainnya pada tahun 2012 yaitu *international certification*. Pada tahun 2012 sebanyak 363 orang telah memperoleh sertifikat internasional di berbagai bidang.

3. *Remunerasi Karyawan*

Telkom memberikan paket remunerasi yang kompetitif sesuai peraturan yang berlaku dan harga pasar, yang terdiri dari gaji pokok dan gaji terkait dengan tunjangan, bonus dan berbagai fasilitas, termasuk program pensiun dan program pelayanan kesehatan pasca kerja, tunjangan kesehatan karyawan dan beberapa anggota keluarga inti, bantuan perumahan dan fasilitas lainnya, juga yang terkait dengan kinerja unit. Paket remunerasi ini senantiasa dievaluasi agar pergerakan gaji karyawan sesuai dengan harga pasar.

Untuk pemberian bonus, Perusahaan umumnya telah membuat anggaran namun baru akan mendistribusikannya pada tahun berikutnya setelah bonus tersebut diakui (*accrued*). Dalam kurun lima tahun terakhir, Perusahaan telah membayarkan bonus tahunan berkisar antara Rp326,9 miliar sampai Rp519,6 miliar. Terkait pemberian bonus tahun 2012, Perusahaan akan berpegang pada penyelesaian audit atas Laporan Keuangan 2012 serta persetujuan dari RUPS. Entitas Anak juga memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya.

4. *Penghargaan Karyawan*

Setiap tahun, kami memberikan beberapa bentuk penghargaan sebagai apresiasi Perusahaan terhadap karyawan yang berprestasi dalam mendukung pencapaian target bisnis. Penghargaan juga diberikan kepada pihak eksternal yang ikut membesarkan nama Telkom. Program penghargaan juga dilakukan oleh perusahaan di jajaran Telkom Group dalam rangka memotivasi karyawan mereka.

5. *Pelayanan SDM Berbasis TI*

Untuk memfasilitasi proses kerja seluruh karyawan, Telkom membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi untuk

mempermudah koordinasi kebijakan dan sosialisasi strategi bisnis Perusahaan antara pembuat kebijakan, pengelola SDM dan karyawan. Infrastruktur tersebut adalah *website Human Capital & General Affairs* yang dapat diakses oleh karyawan yang ingin mengetahui berbagai kebijakan dan informasi lain terkait pengelolaan dan pengembangan SDM.

Selain itu, layanan-layanan SDM berbasis TI yang telah kami kembangkan sejak tahun 2009 terus dioptimalkan, seperti Sasaran Kerja Individu ("SKI") *online*, absensi *online*, Surat Perintah Perjalanan Dinas ("SPPD") *online*, cuti *online*, *career online* dan *Training Need Analysis* ("TNA") *online*. Telkom juga menerapkan berbagai aplikasi TI seperti proses otomatisasi bisnis Perusahaan baik berupa nota dinas elektronik, *virtual meeting*, *shared files*, *online* survei, dan *intranet*.

Pada bulan Oktober 2007 Perusahaan telah mendirikan media relasi karyawan dan pusat pelayanan SDM untuk memastikan isu-isu yang berhubungan dengan karyawan dapat ditangani dan dikomunikasikan secara efektif. Kami juga menyiapkan sarana telepon, layanan personal, email dan *website* agar dapat memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan pihak SDM.

Entitas anak kami juga menerapkan beragam strategi komunikasi agar fungsi SDM dapat dirasakan oleh seluruh karyawan.

6. *Program Pensiun*

Usia pensiun untuk seluruh karyawan Telkom adalah 56 tahun. Kami memiliki dua program pensiun, yaitu (i) Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") yang ditujukan bagi karyawan tetap yang direkrut sebelum tanggal 1 Juli 2002; dan (ii) Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang berlaku bagi karyawan tetap lainnya.

a. Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP")

Perhitungan pensiun bagi peserta PPMP didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika karyawan tersebut meninggal. Dana Pensiun Telkom bertugas mengelola program ini dan sumber utama Dana Pensiun ini berasal dari iuran karyawan dan Perusahaan. Partisipasi karyawan dalam program ini sebesar 18% dari gaji pokok (sebelum bulan Maret 2003, tingkat kontribusi karyawan adalah sebesar 8,4%) sedangkan Perusahaan memberikan kontribusi sisanya. Minimum manfaat pensiun bulanan untuk karyawan yang pensiun sekitar Rp425.000 setiap bulannya. Kontribusi Perusahaan kepada Dana Pensiun mencapai Rp485 miliar, Rp187 miliar dan Rp186 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember, 2010, 2011 dan 2012.

Telkomsel juga melaksanakan PPMP bagi karyawannya. Dengan program ini, karyawan berhak mendapatkan manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan gaji dasar atau gaji bersih terakhir yang diterima dan masa bakti karyawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), mengelola program ini berdasarkan kontrak asuransi tahunan. Hingga tahun 2004, kontribusi karyawan kepada program ini adalah sebesar 5% dari gaji yang dibayarkan bulanan sementara Telkomsel membayar sisa kontribusi yang ditetapkan. Sejak 2005, kontribusi terhadap program dilakukan sepenuhnya oleh Telkomsel. Selain itu, Telkomsel juga menyediakan program penghargaan bagi karyawan dengan masa bakti yang lama dalam bentuk uang tunai atau tambahan cuti. Penghargaan ini diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama jangka waktu tertentu atau pada saat pemutusan hubungan kerja.

Infomedia juga menyelenggarakan PPMP bagi karyawannya.

b. Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP")

Telkom menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi karyawan tetap yang direkrut sejak tanggal 1 Juli 2002. PPIP dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), dimana karyawan dapat memilih di antara berbagai DPLK yang menyelenggarakan program ini. Kontribusi tahunan Perusahaan terhadap PPIP ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar karyawan peserta, yaitu mencapai Rp4 miliar, Rp5 miliar dan Rp5 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.

Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efektif dan kompetitif, kami juga memiliki program Pensiun Dini ("Pendi"). Program ini sejalan dengan pelaksanaan *Human Capital Master Plan* 2013-2017 yang diperkirakan akan mengurangi jumlah karyawan Telkom sebanyak 1.548 karyawan. Program ini ditawarkan secara sukarela kepada karyawan yang dianggap telah memenuhi persyaratan tertentu terkait

pendidikan, usia, jabatan dan kinerja. Sejak tahun 2002 hingga 31 Desember 2012, Perusahaan telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,3 triliun sebagai kompensasi bagi 14.195 karyawan yang mengikuti program ini. Program Pendi tahun 2012 diikuti oleh 781 karyawan dan efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013.

7. *Program Pelayanan Kesehatan*

a. Pengelolaan Kesehatan Karyawan

Peningkatan kesejahteraan karyawan diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas Perusahaan. Untuk itu, Telkom menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan dan pensiunan beserta keluarga intinya yang dikelola oleh Yayasan Kesehatan ("Yakes") Telkom. Hingga 31 Desember 2012, total karyawan dan pensiunan beserta keluarga intinya yang menjadi peserta layanan kesehatan Yakes Telkom mencapai 124.543 orang.

b. Pelayanan Kesehatan Pasca Kerja

Perhatian Perusahaan terhadap kesejahteraan juga berlanjut hingga karyawan memasuki masa pensiun, yaitu di antaranya dengan menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh karyawan yang telah pensiun, termasuk istri atau suami dan anak. Kami menyediakan dua jenis pendanaan untuk jaminan kesehatan pensiun, yakni:

i. Bagi karyawan yang diangkat sebagai calon pegawai sebelum tanggal 1 November 1995 dan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun, mereka berhak mengikuti jaminan layanan kesehatan yang dikelola oleh Yakes Telkom. Kontribusi Perusahaan terhadap pelaksanaan program ini sebesar Rp991 miliar, Rp361 miliar dan Rp300 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.

ii. Bagi semua karyawan tetap lainnya, mereka memperoleh layanan kesehatan dalam bentuk tunjangan asuransi. Telkom memberikan kontribusi sebesar Rp20 miliar, Rp19 miliar dan Rp18 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 untuk menjalankan program ini.

Entitas anak memberikan tunjangan kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang disponsori oleh pemerintah yang dikenal sebagai Jamsostek.

8. *Pengelolaan Hubungan Karyawan dengan Manajemen*

Merujuk pada Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.87 tahun 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Membentuk Organisasi, karyawan Telkom mendirikan "Serikat Karyawan Telkom" atau "SEKAR". Hingga 31 Desember 2012, SEKAR beranggotakan 17.931 karyawan atau 93,5% dari jumlah karyawan Telkom.

Sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.16/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, SEKAR berhak mewakili karyawan dalam perundingan PKB dengan manajemen Perusahaan. Pada tahun 2012, telah dilakukan perundingan PKB V sebanyak lima kali untuk memperbaharui PKB IV yang telah berakhir. PKB IV yang berlaku saat ini efektif sampai dengan 31 Desember 2012. Kami dan SEKAR sepakat untuk memperpanjang pemberlakuan PKB IV.

Telkomsel dan Infomedia juga memiliki serikat pekerja. Serikat karyawan di Telkomsel, "SEPAKAT" atau "Serikat Pekerja Karyawan Telkomsel" beranggotakan 3.731 karyawan atau 82% dari jumlah karyawan Telkomsel. Baik kami maupun entitas anak tidak pernah mengalami aksi serikat kerja yang berarti.

9. *Aktivitas Ekstrakurikuler*

Kami memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekstrakurikuler, terutama yang dapat mendukung produktivitas karyawan. Aktivitas ekstrakurikuler karyawan meliputi bidang keagamaan, budaya dan olahraga. Kegiatan ini juga terbuka bagi keluarga karyawan, seperti dalam kompetisi pembacaan Al-Quran, paduan suara gereja dan Utsawa Dharma Gita (Hindu) dan kegiatan olah raga.

C. Biaya Pendidikan & Pelatihan SDM

Untuk pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan selama tahun 2012, Perusahaan mengalokasikan dana Rp158 miliar, atau rata-rata sebesar Rp8 juta per karyawan yang mengikuti program tersebut. Pada tahun 2011, biaya yang dikeluarkan adalah Rp157 miliar, atau rata-rata Rp8 juta per karyawan.

90 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

93 Tinjauan Keuangan

106 Kewajiban dan Komitmen

107 Likuiditas

108 Modal Kerja Bersih

108 Kemampuan Membayar Utang

108 Kolektibilitas Piutang

109 Struktur Modal

109 Belanja Modal

110 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

110 Perubahan Kebijakan Akuntansi

111 Perubahan Peraturan Perundang-undangan

111 Pengendalian Nilai Tukar

112 Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif atas Risiko Pasar

116 Transaksi dengan Pihak Berelasi

116 Aset Tetap

116 Asuransi

116 Informasi dan Fakta Material

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 yang disajikan dalam buku Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan Konsolidasian ini disajikan berdasarkan SAK di Indonesia yang dalam beberapa hal berbeda dengan IFRS. Lihat Catatan 49 pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk rekonsiliasi dengan IFRS.

Kami adalah penyedia utama layanan telekomunikasi lokal, domestik, dan internasional di Indonesia, serta penyedia layanan telepon seluler terkemuka melalui entitas anak dengan kepemilikan mayoritas, Telkomsel. Visi kami adalah menjadi penyelenggara TIMES di kawasan regional. Pada tanggal 31 Desember 2012, kami memiliki sekitar 171,1 juta pelanggan sambungan telepon yang terdiri dari 125,1 juta pelanggan telepon seluler yang dimiliki Telkomsel, 8,9 juta pelanggan sambungan telepon tidak bergerak kabel, 17,9 juta pelanggan sambungan telepon tidak bergerak nirkabel dan 19,1 juta pelanggan *broadband*. Kami juga menyediakan beragam layanan komunikasi lain, termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data dan layanan terkait komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkit langganan, jaringan pintar dan layanan terkait, televisi kabel dan layanan VoIP. Kami bertekad untuk siap menghadapi tantangan pasar dan industri yang mungkin timbul dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan basis pelanggan, kualitas jaringan, nama merek dan kemampuan tindakan strategis kami.

Perekonomian Indonesia memberikan iklim usaha yang menguntungkan bagi pengembangan usaha kami. Hal ini terlihat dari pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,9%, inflasi yaitu rata-rata sebesar 4,9% serta nilai tukar rata-rata yang relatif stabil yang berkisar Rp8.773 ke Rp10.456 selama tahun 2008 sampai 2012. Walaupun eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan dan entitas anak tidak material, kami rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman yang terutama didenominasi dalam Dolar AS dan Yen Jepang. Penjelasan lebih lanjut tentang risiko nilai tukar ini dapat dilihat dalam "Pengungkapan Kualitatif dan Kuantitatif atas Risiko Pasar – Risiko Nilai Tukar".

Hasil usaha Perusahaan selama dua tahun untuk periode 2011 sampai 2012 mencerminkan pertumbuhan pada pendapatan. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika yang meningkat sebesar 15.5% disebabkan pertumbuhan pemakaian data oleh pengguna ponsel dan pertambahan pelanggan *mobile broadband*, serta peningkatan pendapatan seluler sebesar 7,5%.

Telkom membukukan kinerja keuangan yang mengesankan di tahun 2012 dengan peningkatan 8,3% pada pendapatan usaha dan 17,2% pada laba bersih.

Hasil usaha Perusahaan tahun 2011 ke 2012 juga mencerminkan peningkatan pada beban. Peningkatan tersebut dipicu oleh beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi serta beban karyawan. Pertumbuhan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh peningkatan kapasitas jaringan guna mendukung pelayanan kami terhadap pelanggan.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan

Peningkatan Pendapatan Telepon Seluler Karena Peningkatan Pelanggan dan Penurunan ARPU

Pendapatan telepon seluler meningkat sebesar 7,5% dari tahun 2011 ke tahun 2012 yang dipicu oleh kenaikan pelanggan seluler sebesar 16,9% di tahun 2012. Pendapatan Telkomsel dari layanan telepon seluler (pendapatan pemakaian, pendapatan abonemen bulanan dan fitur) mencakup sekitar 39,8% dari total pendapatan konsolidasian kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dibandingkan dengan 40,1% di tahun 2011.

Kami yakin persaingan usaha mulai bergeser sebagai akibat peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang berpengaruh pada peningkatan pembelian *smartphone*, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan layanan data. Fenomena ini tercermin dari ARPU bulanan yang menurun dari sekitar Rp39.000 pada tahun 2011 menjadi sekitar Rp37.000 pada tahun 2012, yang dikompensasi dengan peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika.

Kami yakin kompetisi bergeser menjadi lebih rasional di Indonesia, tetapi kami masih melihat kompetisi sebagai risiko utama pada bisnis kami. Penjelasan lebih lanjut atas risiko yang terkait dengan bisnis ini dapat dilihat pada "Faktor-Faktor Risiko-Risiko terkait dengan Bisnis Kami – Risiko-Risiko Persaingan Terkait Dengan Bisnis Seluler Kami (Telkomsel)".

Peningkatan pada Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika memberikan kontribusi sebesar 35,9% terhadap jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan 33,6% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011. Pendapatan kami dari data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar 15,5% dari 2011 ke 2012. Peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika sebesar 38,3% terutama dipicu oleh peningkatan pemakaian data pada telepon seluler dan langganan *mobile broadband*. Sebagai bagian dari transformasi kami menjadi penyelenggara TIMES dan tujuan perusahaan untuk menumbuhkan bisnis *new wave*, kami terus mencari peluang untuk memperoleh pendapatan dari bisnis sejenis.

Penurunan Pendapatan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar 8,2% dari Rp11.619 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp10.662 miliar pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak sebesar 8,2% dan sambungan telepon tidak bergerak nirkabel sebesar 8,7%, yang sebagian diimbangi dengan peningkatan pendapatan *call center* dan pendapatan lain-lain. Kami meyakini bahwa pendapatan sambungan kabel tidak bergerak menurun disebabkan peningkatan pemakaian dan penurunan tarif atas layanan seluler serta meningkatnya penetrasi dari pelanggan seluler di Indonesia. Walaupun kami memperkirakan sambungan telepon tidak bergerak akan tetap memberikan kontribusi pada pendapatan kami di masa mendatang, kami memperkirakan kecenderungan penurunan pendapatan telepon kabel tidak bergerak akan terus terjadi.

Seluler dan sambungan telepon tidak bergerak nirkabel menawarkan kenyamanan yang meningkat, dan pada kasus tertentu saat pelanggan melakukan panggilan kepada pelanggan lain menggunakan jaringan penyelenggara yang sama, tarif menjadi lebih rendah dibandingkan panggilan menggunakan sambungan telepon tidak bergerak yang dilakukan kepada pelanggan dari penyelenggara lain.

Sebagai bagian dari strategi korporasi kami, kami senantiasa berupaya untuk mengoptimalisasi bisnis sambungan telepon tidak bergerak melalui berbagai cara, termasuk efisiensi biaya dan meningkatkan nilai tambah layanan sambungan telepon tidak bergerak. Kami juga berupaya lebih cepat untuk meningkatkan penetrasi sambungan telepon tidak bergerak dengan mengurangi belanja modal per satuan sambungan melalui penggunaan teknologi sambungan telepon tidak bergerak nirkabel serta meningkatkan akses jaringan sambungan telepon tidak bergerak kabel dan infrastruktur yang telah ada menuju infrastruktur NGN dengan kemampuan *broadband*.

Kami meningkatkan kinerja sambungan telepon tidak bergerak dengan menambahkan program loyalitas pelanggan yang disebut program "Telkom Poin Rejeki Tumpah" dan implementasi program FBIP, sedangkan untuk sambungan nirkabel tidak bergerak diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur nirkabel dengan layanan EVDO. Upaya kami tersebut membuahkan hasil dengan meningkatnya jumlah pelanggan sambungan telepon tidak bergerak kabel sebesar 4,0% atau menjadi 8,9 juta serta pelanggan sambungan telepon tidak bergerak nirkabel sebesar 25,5% atau menjadi 17,9 juta pelanggan.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Sebagai bagian dari keseluruhan strategi bisnis Perusahaan, kami mengubah pendekatan segmen usaha dari berbasis produk menjadi berbasis pelanggan di tahun 2012. Perubahan ini mengakibatkan perubahan penyajian informasi segmen di tahun 2012, dimana Manajemen mengubah laporan segmen dari segmen sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler dan lain-lain menjadi segmen korporat, perumahan, perorangan dan lain-lain. Kami juga menyajikan kembali informasi segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, tapi dengan alasan ketidakpraktisan, kami tidak menyajikan kembali informasi segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010.

Kami memiliki empat segmen operasi utama, yaitu korporat, perumahan, perorangan dan lain-lain.
- Segmen korporat menyediakan jasa telekomunikasi diantaranya interkoneksi, sirkit langganan, satelit, VSAT, *contact center, broadband access*, usaha layanan informasi teknologi serta data dan internet kepada perusahaan dan institusi;
- Segmen perumahan menyediakan jasa telekomunikasi tidak bergerak, TV berbayar serta data dan internet kepada pelanggan perumahan;
- Segmen perorangan menyediakan jasa telekomunikasi seluler bergerak dan sambungan nirkabel tidak bergerak termasuk akses bergerak dan layanan teknologi informatika, data dan layanan internet kepada pelanggan perorangan; dan
- Segmen lain-lain yang menyediakan jasa pengelolaan gedung.

Untuk informasi detail terkait informasi segmen kami, lihat catatan 38 pada Laporan Keuangan Konsolidasian. Hasil segmen usaha kami untuk tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Layanan per Segmen Pelanggan

	Satuan	Tahun yang berakhir 31 Desember	
		2012	2011
Segmen Korporat			
Satelit-transponder	(000) MHz	2.650	2.360
Leased Channel & Satellite	(000) e1	388.462	357.413
IPLC	(000) Mbps	15.782	11.641
Datacomm	(000) Mbps	281.063	161.890
Corporate Internet	(000) Mbps	66.340	42.639
Fixed wireline	(000) pelanggan	1.343	1.286
Fixed broadband (Speedy)	(000) pelanggan	263	231
Segmen Perumahan			
Fixed wireline	(000) pelanggan	7.603	7.316
Pay Television	(000) pelanggan	1.191	1.000
Fixed broadband (Speedy)	(000) pelanggan	2.078	1.558
Segmen Perorangan			
Seluler	(000) pelanggan	125.146	107.017
Fixed wireless (Classy + Trendy)	(000) pelanggan	17.870	14.238
Mobile broadband (Flash)	(000) pelanggan	11.039	5.532
Blackberry	(000) pelanggan	5.764	3.153

Hasil Operasi Berdasarkan Segmen

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012		2011
	Rp(miliar)	US$(juta)	Rp(miliar)
Korporat			
Pendapatan			
Pendapatan eksternal	15.579	1.616	14.279
Pendapatan antar segmen	6.468	671	5.289
Jumlah pendapatan segmen	22.047	2.287	19.568
Beban Segmen	(17.976)	(1.865)	(15.659)
Hasil Segmen	4.071	422	3.909
Beban penyusutan dan amortisasi	(2.079)	(216)	(1.890)
Provisi penurunan nilai piutang	(92)	(10)	(255)
Perumahan			
Pendapatan			
Pendapatan eksternal	7.360	764	8.171
Pendapatan antar segmen	2.223	231	1.888
Jumlah pendapatan segmen	9.583	995	10.059
Beban Segmen	(7.939)	(824)	(8.322)
Hasil Segmen	1.644	171	1.737
Beban penyusutan dan amortisasi	(1.168)	(121)	(1.389)
Provisi penurunan nilai piutang	(505)	(52)	(454)
Perorangan			
Pendapatan			
Pendapatan eksternal	54.087	5.612	48.733
Pendapatan antar segmen	2.188	227	2.180
Jumlah pendapatan segmen	56.275	5.839	50.913
Beban Segmen	(36.372)	(3.774)	(34.679)
Hasil Segmen	19.903	2.065	16.234
Beban penyusutan dan amortisasi	(10.940)	(1.135)	(11.007)
Provisi penurunan nilai piutang	(318)	(33)	(174)
Lain-lain			
Pendapatan			
Pendapatan eksternal	117	12	70
Pendapatan antar segmen	648	67	350
Jumlah pendapatan segmen	765	79	420
Beban Segmen	(685)	(71)	(342)
Hasil Segmen	80	8	78
Beban penyusutan dan amortisasi	(22)	(2)	(14)

HASIL SEGMEN

Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Segmen Korporat

Pendapatan segmen korporat meningkat sebesar Rp2.479 miliar, atau 12,7%, dari Rp19.568 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp22.047 miliar pada tahun 2012. Peningkatan pendapatan segmen ini terutama disebabkan kenaikan pendapatan interkoneksi Rp1.632 miliar, atau 40,8% terutama karena peningkatan pendapatan IP transit dan SLI *outgoing*. Pendapatan internet dan data naik sebesar Rp705 miliar, atau 15,8% terutama disebabkan kenaikan pendapatan *metro ethernet* serta data, internet dan layanan telekomunikasi sejalan dengan peningkatan volume data *metro ethernet* sebesar 70,8%, dari 140.733 Mbps di tahun 2011 menjadi 240.315 Mbps di 2012.

Beban segmen korporat meningkat sebesar Rp2.317 miliar, atau 14,8%, dari Rp15.659 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp17.976 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan karena kenaikan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp1.763 miliar, atau 31,4% terutama akibat peningkatan beban kerja sama serta beban operasi dan pemeliharaaan antena dan tower. Beban karyawan juga meningkat sebesar Rp459 miliar, atau 15,1% dari tahun 2011.

Segmen Perumahan

Pendapatan segmen perumahan menurun sebesar Rp476 miliar, atau 4,7%, dari Rp10.059 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp9.583 miliar pada tahun 2012 yang terutama disebabkan penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak sebesar Rp616 miliar, atau 10,2% akibat penurunan ARPU *wireline* serta penurunan pemakaian dikarenakan pergeseran pemakaian ke layanan telepon seluler dan telepon nirkabel tidak bergerak.

Beban segmen perumahan turun sebesar Rp383 miliar, atau 4,6%, dari Rp8.322 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp7.939 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan pendapatan ganti rugi sebesar Rp521 miliar karena adanya klaim asuransi sehubungan dengan kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 dan peningkatan beban karyawan sebesar Rp382 miliar, atau naik 11,7% dibandingkan tahun 2011.

Segmen Perorangan

Pendapatan segmen perorangan meningkat sebesar Rp5.362 miliar, atau 10,5%, dari Rp50.913 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp56.275 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan seluler sebesar Rp4.957 miliar, atau naik 15,0%, dan peningkatan pendapatan interkoneksi sebesar Rp444 miliar, atau 14,1% dibanding tahun 2011. Peningkatan pendapatan seluler terutama disebabkan peningkatan pendapatan fitur seluler sebesar Rp2.553 miliar, atau 49,1% dan peningkatan pendapatan SLJJ seluler sebesar Rp1.397 miliar ditahun 2012 dibandingkan tahun 2011, atau 20,6%. Peningkatan pendapatan interkoneksi terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan seluler lokal.

Beban segmen perorangan meningkat sebesar Rp1.693 miliar, atau 4,9%, dari Rp34.679 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp36.372 miliar pada tahun 2012, terutama karena peningkatan beban interkoneksi sebesar Rp196 miliar, atau 4,2%, dan peningkatan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp1.025 miliar, atau 7,6%. Peningkatan beban operasi dan pemeliharaan terutama disebabkan peningkatan beban transportasi beban frekuensi radio. Di sisi lain beban penyusutan menurun sebesar Rp1.066 miliar, atau 9,9% disebabkan karena penurunan beban penurunan nilai aset dari Rp563 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp247 miliar pada tahun 2012.

Segmen Lain-lain

Pendapatan segmen lain-lain meningkat sebesar Rp345 miliar, atau 82,1%, dari Rp420 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp765 miliar pada tahun 2012 disebabkan peningkatan pendapatan layanan telekomunikasi lainnya dari TelkomProperty sebesar Rp273 miliar, atau 368% sebagai hasil dari peningkatan pendapatan manajemen proyek sebesar Rp57 miliar, atau 102,8% dan pendapatan jasa keamanan sebesar Rp206 miliar, atau 100%. Sebagai tambahan, pendapatan sewa gedung meningkat sebesar Rp71 miliar, atau 20,5% disebabkan peningkatan pendapatan sewa gedung sebesar Rp24 miliar, atau 48,7% dan pemeliharaan gedung sebesar Rp46 miliar, atau 15,6%.

Beban segmen lain-lain meningkat sebesar Rp343 miliar, atau 100,3%, dari Rp342 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp685 miliar pada tahun 2012 terutama karena peningkatan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp154 miliar, atau 37,4% yang disebabkan peningkatan pada beban manajemen proyek, beban terkait operasional gedung dan tanah serta beban listrik, gas, dan air.

Segmen Korporat
(miliar Rupiah)

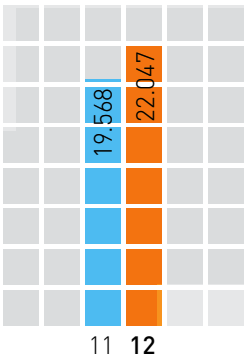

Segmen Perumahan
(miliar Rupiah)

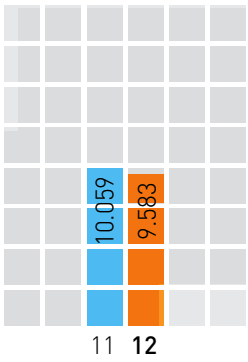

Segmen Perorangan
(miliar Rupiah)

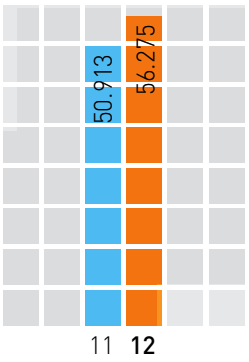

Tinjauan Keuangan

A. Perbandingan Posisi Keuangan

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember			
	2012		2011	2010
	Rp(miliar)	US$(juta)	Rp(miliar)	Rp(miliar)
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				
Jumlah Aset Lancar	27.973	2.901	21.258	18.729
Jumlah Aset Tidak Lancar	83.396	8.653	81.796	81.772
Jumlah Aset	111.369	11.554	103.054	100.501
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	24.107	2.501	22.189	20.473
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.284	2.105	19.884	23.613
Jumlah Liabilitas	44.391	4.606	42.073	44.086
Ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk	51.541	5.348	47.510	44.419

*Dinyatakan kembali, lihat Catatan 48 pada Laporan Keuangan Konsolidasian

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

ASET

Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2012 posisi aset lancar mencapai Rp27.973 miliar (US$2.901 juta) dibandingkan Rp21.258 miliar pada 31 Desember 2011. Peningkatan aset lancar kami terutama disebabkan oleh meningkatnya aset keuangan lancar lain sebesar Rp3.965 miliar, atau 1.063,0%, serta kas dan setara kas kami sebesar Rp3.484 miliar, atau 36,2%.

Peningkatan di atas sebagian dikompensasi oleh:
- Penurunan aset tersedia untuk dijual sebesar Rp791 miliar, atau 100,0% karena sudah dijual/ direalisasikan di tahun 2012 dan tidak adanya penambahan aset yang tersedia untuk dijual di tahun 2012; serta
- Penurunan pajak dibayar dimuka sebesar Rp415 miliar, atau 52,7%.

Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2012, posisi aset tidak lancar mencapai Rp83.396 miliar (US$8.653 juta) dibandingkan Rp81.796 miliar pada 2011. Peningkatan aset tidak lancar terutama disebabkan peningkatan aset tetap sebesar Rp2.150 miliar, atau 2,9%. Peningkatan di atas sebagian dikompensasi oleh:
- Penurunan uang muka dan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp307 miliar, atau 8,0% karena penurunan uang muka pembelian aset tetap; dan
- Penurunan aset tak berwujud sebesar Rp346 miliar, atau 19,3%.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2012, posisi liabilitas jangka pendek mencapai Rp24.107 miliar (US$2.501 juta) dibandingkan Rp22.189 miliar pada 31 Desember 2011. Peningkatan liabilitas jangka pendek kami terutama disebabkan oleh:
- Peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.373 miliar, atau 28,7%, terutama terkait dengan gaji dan tunjangan sebesar Rp591 miliar serta program pensiun dini sebesar Rp699 miliar; dan
- Peningkatan utang pajak sebesar Rp805 miliar, atau 77,5%

Peningkatan di atas sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.042 miliar, atau 13,2%, yang terutama terkait dengan pembelian peralatan, material dan layanan dari pihak ketiga.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2012, posisi liabilitas jangka panjang mencapai Rp20.284 miliar (US$2.105 juta) dibandingkan Rp19.884 miliar pada 31 Desember 2011. Liabilitas jangka panjang kami mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan utang sewa pembiayaan sebesar Rp1.500 miliar, atau 477,7%. Peningkatan tersebut dikompensasi dengan:

- Penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp735 miliar, atau 19,4%;
- Penurunan utang bank sebesar Rp448 miliar, atau 6,2%;
- Penurunan pinjaman penerusan sebesar Rp221 miliar, atau 11,0%; dan
- Penurunan obligasi dan wesel bayar sebesar Rp172 miliar, atau 5,1%.

Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp5.997 miliar, atau 9,8%, dari Rp60.981 miliar pada 31 Desember 2011 menjadi Rp66.978 miliar pada 31 Desember 2012. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp18.388 miliar pada 31 Desember 2012, diimbangi dengan dividen tunai sebesar Rp10.734 miliar dan pembelian modal saham yang diperoleh kembali sebesar Rp1.744 miliar. Sebagai hasilnya, laba ditahan mengalami peningkatan sebesar Rp5.723 miliar, atau 18,0%, dan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp4.031 miliar atau 8,5% dari Rp47.510 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp51.541 miliar pada tanggal 31 Desember 2012.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

ASET

Aset Lancar

Aset lancar berjumlah Rp18.729 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp21.258 miliar (US$2.344 juta) pada tanggal 31 Desember 2011 mencerminkan peningkatan sebesar Rp2.529 miliar, atau 13,5%. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Peningkatan aset tersedia untuk dijual sebesar Rp791 miliar, atau 100%, pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0 miliar pada tanggal 31 Desember 2010;
- Peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp573 miliar, atau 14,6%, dari Rp3.936 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp4.509 miliar pada tahun 2011;
- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp514 miliar, atau 5,6%, dari Rp9.120 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp9.634 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Lihat analisis terperinci pada bagian arus kas bersih; dan
- Peningkatan tagihan restitusi pajak sebesar Rp238 miliar, atau 178,9%, dari Rp133 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp371 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2011 posisi aset tidak lancar mencapai Rp81.796 miliar (US$9.021 juta) dibandingkan Rp81.772 miliar pada 31 Desember 2010. Perubahan aset tidak lancar kami terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka dan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp722 miliar, atau 23,3%, dan peningkatan beban manfaat pensiun dibayar di muka sebesar Rp247 miliar, atau 33,2%. Peningkatan di atas sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap sebesar Rp935 miliar, atau 1,2%.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2011 posisi liabilitas jangka pendek mencapai Rp22.189 miliar (US$2.447 juta) dibandingkan Rp20.473 miliar pada 31 Desember 2010. Peningkatan liabilitas jangka pendek kami terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.381 miliar, atau 40,5%; dan
- Peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.133 miliar, atau 16,8%.

Peningkatan di atas sebagian dikompensasi oleh:

- Penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp327 miliar, atau 43,4%; dan
- Penurunan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp491 miliar, atau 9,3%.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2011 posisi liabilitas jangka panjang mencapai Rp19.884 miliar (US$2.193 juta) dibandingkan Rp23.613 miliar pada 31 Desember 2010. Penurunan liabilitas jangka panjang kami terutama disebabkan oleh:

- Penurunan utang bank sebesar Rp3.025 miliar, atau 29,5%; dan
- Penurunan pinjaman penerusan sebesar Rp729 miliar, atau 26,6%.

Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp4.566 miliar, atau 8,1%, dari Rp56.415 miliar pada 31 Desember 2010 menjadi Rp60.981 miliar pada 31 Desember 2011. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp15.481 miliar pada tahun 2011, diimbangi dengan dividen tunai sebesar Rp8.849 miliar dan pembelian modal saham yang diperoleh kembali sebesar Rp2.059 miliar. Sebagai hasilnya, laba ditahan mengalami peningkatan sebesar Rp5.146 miliar, atau 19,4%, dan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp3.091 miliar, atau 7,0%, dari Rp44.419 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp47.510 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

B. Perbandingan Laba Rugi Komprehensif

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2012			2011		2010	
	(Rp miliar)	(US$ juta)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
Pendapatan							
Pendapatan Telepon							
Seluler							
Pendapatan pemakaian	29.477	3.059	38,2	27.189	38,1	28.024	40,9
Pendapatan abonemen bulanan	696	72	0,9	571	0,8	528	0,8
Fitur	558	58	0,7	838	1,2	582	0,8
Jumlah Pendapatan Seluler	**30.731**	**3.189**	**39,8**	**28.598**	**40,1**	**29.134**	**42,5**
Tidak Bergerak							
Pendapatan pemakaian	7.323	760	9,5	8.114	11,4	9.287	13,6
Pendapatan abonemen bulanan	2.805	291	3,6	3.004	4,2	3.251	4,7
Call center	228	24	0,3	198	0,3	-	-
Pendapatan instalasi	112	11	0,1	135	0,2	179	0,3
Lain-lain	194	20	0,2	168	0,2	223	0,3
Jumlah Pendapatan Tidak Bergerak	**10.662**	**1.106**	**13,7**	**11.619**	**16,3**	**12.940**	**18,9**
Jumlah Pendapatan Telepon	**41.393**	**4.295**	**53,5**	**40.217**	**56,4**	**42.074**	**61,4**
Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika							
Internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika	14.857	1.541	19,3	10.740	15,0	8.297	12,1
Short Messaging Service ("SMS")	12.631	1.311	16,4	13.093	18,4	11.289	16,5
VoIP	81	8	0,1	53	0,1	197	0,3
e-Business	55	6	0,1	38	0,1	18	-
Jumlah Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika	**27.624**	**2.866**	**35,9**	**23.924**	**33,6**	**19.801**	**28,9**
Pendapatan Interkoneksi	**4.273**	**443**	**5,5**	**3.509**	**4,9**	**3.735**	**5,4**
Pendapatan Jaringan	**1.208**	**125**	**1,6**	**1.301**	**1,9**	**1.058**	**1,5**
Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya	**2.645**	**275**	**3,5**	**2.302**	**3,2**	**1.961**	**2,8**
Jumlah Pendapatan	**77.143**	**8.004**	**100,0**	**71.253**	**100,0**	**68.629**	**100,0**
Beban Usaha							
Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi							
Operasi dan pemeliharaan	9.012	935	16,7	9.191	18,4	8.836	19,1
Beban pemakaian frekuensi radio	3.002	312	5,6	2.846	5,7	2.892	6,3
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.452	151	2,7	1.235	2,5	1.177	2,5
Listrik, gas dan air	879	91	1,6	836	1,7	841	1,8
Beban pokok penjualan telepon, *set top box*, kartu SIM dan RUIM	687	71	1,3	879	1,8	1.067	2,3
Asuransi	671	70	1,2	431	0,9	384	0,8
Sewa sirkit dan CPE	407	42	0,8	406	0,8	215	0,5
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	293	30	0,5	291	0,5	283	0,6
Beban pokok jasa teknologi infomatika	222	23	0,4	144	0,3	200	0,5
Beban perjalanan	57	6	0,1	54	0,1	60	0,1
Lain-lain	121	13	0,2	59	0,1	91	0,2
Jumlah Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi	**16.803**	**1.744**	**31,1**	**16.372**	**32,8**	**16.046**	**34,7**

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2012			2011		2010	
	(Rp miliar)	(US$ juta)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
Beban Penyusutan dan amortisasi	**14.456**	**1.500**	**26,8**	**14.863**	**29,7**	**14.612**	**31,6**
Beban Karyawan							
Cuti, insentif dan tunjangan lainnya	3.400	353	6,3	2.814	5,6	2.575	5,6
Gaji dan tunjangan	3.257	338	6,0	3.001	6,0	2.751	6,0
PPh karyawan	1.022	106	1,9	1.043	2,1	796	1,7
Beban pensiun berkala bersih	789	82	1,5	501	1,0	504	1,1
Program Pendi	699	73	1,3	517	1,0	-	-
Perumahan	200	21	0,4	197	0,4	214	0,5
Beban LSA	121	13	0,2	96	0,2	78	0,2
Beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih	90	9	0,2	199	0,4	238	0,5
Asuransi	83	9	0,2	70	0,2	68	0,1
Beban imbalan pasca kerja lainnya	65	7	0,1	65	0,1	66	0,1
Lain-lain	60	6	0,1	52	0,1	42	0,1
Jumlah Beban Karyawan	**9.786**	**1.015**	**18,2**	**8.555**	**17,1**	**7.332**	**15,9**
Beban Interkoneksi	**4.667**	**484**	**8,6**	**3.555**	**7,1**	**3.086**	**6,7**
Beban Pemasaran	**3.094**	**321**	**5,7**	**3.278**	**6,6**	**2.525**	**5,5**
Beban Umum dan Administrasi	**3.036**	**315**	**5,6**	**2.935**	**5,9**	**2.537**	**5,4**
Rugi (laba) selisih kurs bersih	**189**	**20**	**0,3**	**210**	**0,4**	**(43)**	**(0,1)**
Beban lain-lain	**1.973**	**205**	**3,7**	**192**	**0,4**	**145**	**0,3**
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	**(11)**	**(1)**		**(10)**		**(14)**	
Jumlah Beban	**54.004**	**5.604**	**100,0**	**49.960**	**100,0**	**46.240**	**100,0**
Penghasilan lain-lain	**(2.559)**	**(266)**		**(665)**		**(548)**	
Laba Usaha	**25.698**	**2.666**		**21.958**		**22.937**	
Penghasilan pendanaan	596	62		546		421	
Biaya pendanaan	(2.055)	(213)		(1.637)		(1.928)	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**24.228**	**2.514**		**20.857**		**21.416**	
Beban pajak penghasilan	(5.866)	(609)		(5.387)		(5.546)	
Laba Tahun Berjalan	**18.362**	**1.905**		**15.470**		**15.870**	
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain - Bersih	**26**	**3**		**11**		**34**	
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**18.388**	**1.908**		**15.481**		**15.904**	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**12.850**	**1.333**		**10.965**		**11.537**	
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**12.876**	**1.336**		**10.976**		**11.571**	
Laba per saham dasar	**669,19**	**0,07**		**559,67**		**586,54**	

TINJAUAN KEUANGAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

A. Pendapatan

Jumlah pendapatan meningkat sebesar Rp5.890 miliar, atau 8,3%, dari Rp71.253 miliar pada 2011 menjadi Rp77.143 miliar pada 2012. Peningkatan pendapatan di tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan seluler, pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika serta pendapatan interkoneksi dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, yang diimbangi dengan penurunan pendapatan telepon tidak bergerak dan jaringan.

1. Pendapatan Telepon Seluler

Pendapatan telepon seluler meningkat sebesar Rp2.133 miliar, atau 7,5%, dari Rp28.598 miliar pada 2011 menjadi Rp30.731 miliar pada 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pemakaian dan pendapatan abonemen bulanan, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pendapatan fitur.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp2.288 miliar, atau 8,4%, dari Rp27.189 miliar di tahun 2011 menjadi Rp29.477 miliar di tahun 2012 disebabkan karena peningkatan *minutes of usage* sebesar 11,1% menjadi 184,8 miliar menit pada tahun 2012 dan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 16,9%. Sedangkan pendapatan abonemen bulanan meningkat sebesar Rp125 miliar, atau 21,9%, dari Rp571 miliar di tahun 2011 menjadi Rp696 miliar di tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan Flash dan Blackberry sebesar 93,1% dengan pendapatan tumbuh sebesar 21,5%. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan pada pendapatan fitur sebesar Rp280 miliar, atau 33,4%, dari Rp838 miliar di tahun 2011 menjadi Rp558 miliar di tahun 2012 disebabkan karena munculnya Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang penyelenggaraan jasa pesan premium dan pengiriman jasa pesan singkat ke banyak tujuan.

2. Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp957 miliar, atau 8,2%, dari Rp11.619 miliar pada 2011 menjadi Rp10.662 miliar pada 2012. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan pemakaian sebesar Rp791 miliar, atau 9,7%, dari Rp8.114 miliar pada 2011 menjadi Rp7.323 miliar pada 2012 disebabkan karena penurunan pemakaian lokal dan SLJJ. Lebih lanjut, pendapatan abonemen bulanan juga menurun sebesar Rp199 miliar, atau 6,6% di tahun 2012. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak ini disebabkan oleh penurunan penggunaan layanan telepon tidak bergerak karena beralihnya pengguna ke layanan telepon seluler.

3. Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informasi meningkat sebesar Rp3.700 miliar, atau 15,5%, dari Rp23.924 miliar pada 2011 menjadi Rp27.624 miliar pada 2012. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika sebesar Rp4.117 miliar, atau 38,3%, dari Rp10.740 miliar di tahun 2011 menjadi Rp14.857 miliar di tahun 2012, yang dipicu oleh pertumbuhan pendapatan data komunikasi seluler dari pemakaian data oleh pengguna ponsel dan kenaikan pelanggan Flash sebesar 99,5%, dari 5,5 juta pelanggan di tahun 2011 menjadi 11,0 juta pelanggan di tahun 2012. Peningkatan pendapatan internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika juga sebagian disebabkan oleh kenaikan pelanggan Speedy sebesar 30,9%, dari 1,8 juta pelanggan di tahun 2011 menjadi 2,3 juta pelanggan di tahun 2012, peningkatan volume data yang melalui jaringan VPN sebesar 41,9% dari 28.702 Mbps di 2011 menjadi 40.748 Mbps di 2012, dan peningkatan volume data yang melalui *metro ethernet* sebesar 70,8%, dari 140.733 Mbps di 2011 menjadi 240.315 Mbps di 2012.

Volume SMS menurun sebesar 47,8%, dari 226,4 miliar SMS menjadi 118,1 miliar SMS di tahun 2012, sementara pendapatan SMS menurun lebih sedikit sebesar Rp462 miliar, atau 3,5%, dari Rp13.093 miliar pada 2011 menjadi Rp12.631 miliar pada 2012. Penurunan volume SMS sejalan dengan peningkatan pemakaian *internet-based messaging*. Penurunan yang lebih sedikit pada pendapatan SMS disebabkan oleh penerapan interkoneksi berbasis biaya untuk SMS pada 1 Juni 2012. Sebelum Juni 2012, SMS dikirim dan diterima di antara operator dengan menggunakan basis "*Sender Keeps All*". Efektif pada 1 Juni 2012, sejalan dengan rezim interkoneksi berbasis biaya untuk panggilan *voice*, Pemerintah menerapkan interkoneksi berbasis biaya untuk SMS. Penerapan interkoneksi berbasis biaya untuk SMS secara umum memberi keuntungan bagi

pendapatan SMS Telkomsel karena Telkomsel secara historis memiliki jumlah SMS masuk yang lebih besar daripada jumlah SMS keluar.

4. Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak Telkom dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung internasional incoming dari layanan SLI (TIC-007).

Pendapatan interkoneksi meningkat sebesar Rp764 miliar, atau 21,8%, dari Rp3.509 miliar pada 2011 menjadi Rp4.273 miliar pada 2012. Peningkatan pendapatan interkoneksi disebabkan oleh peningkatan pendapatan interkoneksi domestik dan transit sebesar Rp547 miliar, atau 26,4%, dari Rp2.071 miliar di tahun 2011 menjadi Rp2.618 miliar di tahun 2012 disebabkan terutama karena peningkatan interkoneksi seluler sebesar Rp538 miliar, atau 30,2%, dan pendapatan interkoneksi internasional meningkat sebesar Rp217 miliar, atau 15,1%, yang disebabkan adanya promo tarif panggilan internasional ke semua negara tujuan dan meningkatnya jumlah panggilan masuk ke pelanggan seluler.

Jumlah pendapatan interkoneksi mencapai kontribusi sebesar 5,5% terhadap pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan 4,9% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.

5. Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan menurun sebesar Rp93 miliar, atau 7,1%, dari Rp1.301 miliar di 2011 menjadi Rp1.208 miliar pada 2012 terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan sewa sirkit sebesar Rp87 miliar, atau 9,5%, dari Rp911 miliar di tahun 2011 menjadi Rp824 miliar di tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan tarif sewa sirkit.

6. Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pada 2012, pendapatan Telkom dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp343 miliar, atau 14,9%, dari Rp2.302 miliar pada 2011 menjadi Rp2.645 miliar pada 2012. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan *Customer Premise Equipment* (CPE) dan terminal sebesar Rp307 miliar, atau 41,5%, dan peningkatan pendapatan sewa sebesar Rp182 miliar, atau 83,1% serta peningkatan pendapatan TV berbayar sebesar Rp146 miliar, atau 56,4%. Pendapatan TV berbayar meningkat disebabkan oleh peningkatan substansial pada pelanggan Pay TV sebesar 19,1% dari 1,0 juta pelanggan di tahun 2011 menjadi 1,2 juta pelanggan di tahun 2012.

Peningkatan pendapatan diatas diimbangi dengan penurunan pendapatan dari kompensasi KPU yang disebabkan oleh penurunan proyek KPU untuk membangun layanan pusat internet di berbagai ibu kota provinsi di tahun 2012 dan penurunan pendapatan bisnis direktori telepon.

7. Pendapatan lain

Pendapatan lain meningkat sebesar Rp1.894 miliar dari Rp665 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.559 miliar pada tahun 2012. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan kompensasi asuransi sebesar Rp1.772 miliar yang diterima dari penjamin asuransi sehubungan dengan asuransi Satelit Telkom-3 yang dibangun dan diluncurkan tetapi gagal mencapai orbitnya pada tanggal 7 Agustus 2012, Lihat Catatan 11 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

B. Beban

Jumlah beban meningkat sebesar Rp4.044 miliar, atau 8,1%, dari Rp49.960 miliar pada 2011 menjadi Rp54.004 miliar pada 2012. Peningkatan jumlah beban terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasi dan pemeliharaan, beban karyawan dan beban interkoneksi dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp431 miliar, atau 2,6%, dari Rp16.372 miliar pada 2011 menjadi Rp16.803 miliar pada 2012.

Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi lainnya juga disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Beban asuransi meningkat sebesar Rp240 miliar, atau 55,7%, dari Rp431 miliar di tahun 2011 menjadi Rp671 miliar di tahun 2012, disebabkan oleh peningkatan beban asuransi aset tetap dari satelit Telkom-3;
- Beban hak penyelenggaraan dan KPU meningkat sebesar Rp217 miliar, atau 17,6%, dari Rp1.235 miliar di tahun 2011 menjadi Rp1.452 miliar di tahun 2012. Peningkatan beban tersebut disebabkan adanya peningkatan dana yang dicadangkan untuk proyek KPU periode berjalan, dari 1% menjadi 1,9%, yang berdampak pada meningkatnya belanja infrastruktur dan peningkatan jumlah pendapatan sebesar Rp5.889 miliar, atau 8,3%, yang kami gunakan sebagai dasar perhitungan proyek KPU; dan

- Beban pemakaian frekuensi radio meningkat sebesar Rp156 miliar, atau 5,5%, dari Rp2.846 miliar di tahun 2011 menjadi Rp3.002 miliar di tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan *bandwidth* seluler.

Peningkatan di atas dimbangi oleh hal-hal berikut:

- Beban pokok penjualan telepon, *set-up top box* kartu SIM dan RUIM menurun sebesar Rp192 miliar, atau 21,8%, dari Rp879 miliar di tahun 2011 menjadi Rp687 miliar di tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh packaging yang lebih murah untuk kartu SIM dan RUIM; dan
- Beban operasi dan pemeliharaan menurun sebesar Rp179 miliar, atau 1,9%, disebabkan oleh menurunnya beban yang terkait dengan peningkatan kapasitas stasiun penerima dan transmisi serta layanan *broadband* Telkomsel;

2. Beban Penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi menurun sebesar Rp407 miliar, atau 2,7%, dari Rp14.863 miliar pada 2011 menjadi Rp14.456 miliar pada 2012 yang terutama disebabkan oleh penurunan beban penurunan nilai aset tetap sebesar Rp316 miliar, atau 56,1%, dari Rp563 miliar di tahun 2011 menjadi Rp247 miliar di tahun 2012. Sebagai tambahan, beban amortisasi menurun sebesar Rp23 miliar, atau 3,8%, dari Rp599 miliar di tahun 2011 menjadi Rp576 miliar di tahun 2012 disebabkan oleh penurunan beban penurunan nilai *goodwill* dan penurunan beban amortisasi lisensi, dan beban penyusutan juga menurun sebesar Rp68 miliar, atau 0,5%, dari Rp13.701 miliar di tahun 2011 menjadi Rp13.633 miliar di tahun 2012. Penurunan beban penyusutan terutama disebabkan oleh beban penyusutan peralatan sentral telepon dan jaringan akses.

3. Beban Karyawan

Beban karyawan meningkat sebesar Rp1.231 miliar, atau 14,4%, dari Rp8.555 miliar pada 2011 menjadi Rp9.786 miliar pada 2012. Peningkatan beban karyawan ini sebagian disebabkan oleh peningkatan beban tunjangan cuti insentif dan tunjangan lainnya sebesar Rp586 miliar, atau 20,8%, dari Rp2.814 miliar di tahun 2011 menjadi Rp3.400 miliar di tahun 2012, peningkatan beban program pensiun dini sebesar Rp182 miliar, atau Rp35,2%, dari Rp699 miliar di tahun 2012, dibandingkan dengan Rp517 di tahun 2011, serta peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp256 miliar, atau Rp8,5%, dari Rp3.257 miliar di tahun 2012, dibandingkan dengan Rp3.001 di tahun 2011.

4. Beban Interkoneksi

Beban interkoneksi meningkat sebesar Rp1.112 miliar, atau 31,3%, dari Rp3.555 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp4.667 miliar pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya beban interkoneksi domestik dan transit sebesar Rp1.050 miliar, atau 43,5%, dan peningkatan pendapatan interkoneksi internasional.

Beban interkoneksi mencapai 8,6% dari beban konsolidasian untuk tahun 2012 dibandingkan dengan 7,1% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.

5. Beban Pemasaran

Beban pemasaran menurun sebesar Rp184 miliar, atau 5,6%, dari Rp3.278 miliar pada 2011 menjadi Rp3.094 miliar pada 2012, terutama disebabkan oleh penurunan beban iklan dan promosi sebesar Rp249 miliar, atau 9,1% yang disebabkan oleh optimalisasi beban pemasaran.

6. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp101 miliar, atau 3,4%, dari Rp2.935 miliar pada 2011 menjadi Rp3.036 miliar pada 2012, sebagian disebabkan oleh peningkatan beban umum sebesar Rp201 miliar, atau 61,7%, dari Rp326 miliar di tahun 2011 menjadi Rp527 miliar di tahun 2012. Peningkatan beban umum disebabkan oleh peningkatan beban biaya pengganti fasilitas kendaraan jabatan terkait dengan perubahan kebijakan perusahaan serta adanya beban pesangon yang disebabkan pergantian direksi di tahun 2012. Beban penyisihan piutang dan persediaan usang meningkat sebesar Rp32 miliar, atau 3,6%, dari Rp883 miliar di tahun 2011 menjadi Rp915 miliar di tahun 2012. Peningkatan ini terutama berasal dari penilaian individual dan kolektif tahun berjalan atas penurunan nilai piutang

Peningkatan beban penyisihan piutang dan persediaan usang diimbangi sebagian dengan penurunan beban sumbangan sosial sebesar Rp161 miliar, atau 55,5%, dari Rp290 miliar di tahun 2011 menjadi Rp129 miliar di tahun 2012 Penurunan ini disebabkan oleh keputusan pemegang saham untuk menurunkan rasio kontribusi laba bersih perusahaan untuk tanggung jawab sosial dari 2,0% di tahun 2011 menjadi 1,0% di tahun 2012.

Beban jasa profesional menurun sebesar Rp48 miliar, atau 20,4%, sedangkan beban keamanan dan *screening* menurun sebesar Rp35 miliar, atau 36,1%, dari Rp97 miliar di tahun 2011 menjadi Rp62 miliar di tahun 2012.

7. Rugi (laba) selisih kurs - bersih

Rugi selisih kurs bersih menurun sebesar Rp21 miliar, dari sebesar Rp210 miliar pada 2011 menjadi sebesar Rp189 miliar pada 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai tukar Yen Jepang terhadap rupiah sebesar 4,3% dan naiknya aset Telkom akibat penguatan Dollar AS sebesar 6,3%.

8. Beban lain-lain

Beban lain-lain meningkat sebesar Rp1.781 miliar dari Rp192 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp1.973 pada tahun 2012. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan pengakuan kembali dari nilai tercatat Satelit Telkom-3 sebesar Rp1.606 miliar yang telah dibangun dan diluncurkan tetapi gagal mencapai orbitnya pada tanggal 7 Agustus 2012. Lihat Catatan 11 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

C. Laba Usaha dan Marjin Laba Usaha

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha meningkat sebesar Rp3.740 miliar, atau 17,0%, dari Rp21.958 miliar pada 2011 menjadi Rp25.698 miliar pada 2012. Marjin laba meningkat dari 30,8% pada 2011 menjadi 33,3% pada 2012.

D. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp3.371 miliar, atau 16,2%, dari Rp20.857 miliar pada 2011 menjadi Rp24.228 miliar pada 2012. Marjin laba sebelum pajak meningkat dari 29,3% pada 2011 menjadi 31,4% pada 2012.

E. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp479 miliar, atau 8,9%, dari Rp5.387 miliar pada 2011 menjadi Rp5.866 miliar pada 2012, mengikuti peningkatan laba sebelum pajak.

F. Pendapatan Komprehensif Lain

Pendapatan komprehensif lain meningkat sebesar Rp15 miliar, atau 136,4%, dari Rp11 miliar pada 2011 menjadi Rp26 miliar pada 2012 disebabkan karena peningkatan pada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp24 miliar diimbangi dengan penurunan pada perubahan selisih bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp9 miliar.

G. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp2.907 miliar, atau 18,8%, dari Rp15.481 miliar pada 2011 menjadi Rp18.388 miliar pada 2012.

H. Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali meningkat sebesar Rp1.007 miliar, atau 22,4%, dari Rp4.505 miliar pada 2011 menjadi Rp5.512 miliar pada 2012.

I. Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp1.885 miliar, atau 17,2%, dari Rp10.965 miliar pada 2011 menjadi Rp12.850 miliar pada 2012.

J. Laba Bersih per Saham

Laba bersih per saham meningkat sebesar Rp109 atau 19,5%, dari Rp560 di tahun 2011 menjadi Rp669 di tahun 2012.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

A. Pendapatan

Jumlah pendapatan meningkat sebesar Rp2.624 miliar, atau 3,8%, dari Rp68.629 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp71.253 miliar pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan di tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika, jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya yang diimbangi dengan penurunan pendapatan telepon tidak bergerak, pendapatan telepon seluler dan interkoneksi. Pendapatan telepon seluler, yang merupakan komponen terbesar dari pendapatan usaha kami, menunjukkan sedikit penurunan sebesar Rp536 miliar, atau 1,8% di tahun 2011.

1. Pendapatan Telepon

Pendapatan Telepon Seluler

Pendapatan telepon seluler menurun sebesar Rp536 miliar, atau 1,8%, dari Rp29.134 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp28.598 miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pemakaian, yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan fitur.

Pendapatan pemakaian menurun sebesar Rp835 miliar, atau 3,0%, dari Rp28.024 miliar di tahun 2010 menjadi Rp27.189 miliar di tahun 2011 disebabkan oleh penurunan pemakaian lokal. Penurunan pada pendapatan pemakaian diimbangi dengan peningkatan pada pendapatan fitur sebesar Rp256 miliar, atau 44,0%, dari Rp582 miliar di tahun 2010 menjadi Rp838 miliar di tahun 2011.

Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp1.321 miliar, atau 10,2%, dari Rp12.940 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp11.619 miliar pada tahun 2011. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan pemakaian sebesar Rp1.173 miliar, atau 12,6%, dari Rp9.287 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp8.114 miliar pada tahun 2011 yang disebabkan oleh penurunan pemakaian lokal dan SLJJ. Kemudian, pendapatan abodemen bulanan juga menurun sebesar Rp247 miliar, atau 7,6% di tahun 2011. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak ini terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan layanan telepon tidak bergerak karena pelanggan beralih ke teknologi baru.

2. Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar Rp4.123 miliar, atau 20,8%, dari Rp19.801 miliar pada 2010 menjadi Rp23.924 miliar pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika sebesar Rp2.443 miliar, atau 29,4%, dari Rp8.297 miliar di tahun 2010 menjadi Rp10.740 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh peningkatan pelanggan Speedy sebesar 8,5%, dari 1,6 juta pelanggan di tahun 2010 menjadi 1,8 juta pelanggan ditahun 2011, dan peningkatan pelanggan Flash sebesar 45,7%, dari 3,8 juta pelanggan di tahun 2010 menjadi 5,5 juta pelanggan di tahun 2011. Peningkatan ini juga disebabkan oleh peningkatan volume data yang melalui jaringan VPN sebesar 18,4%, dari 24.237 Mbps menjadi 28.702 Mbps, dan peningkatan volume data yang melalui *metro ethernet* sebesar 131,0%, dari 60.924 Mbps menjadi 140.733 Mbps.

Pendapatan SMS juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan sebesar Rp1.804 miliar atau 16,0% dari Rp11.289 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp13.093 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume SMS sebesar 13,4% dari 199,6 miliar SMS di tahun 2010 menjadi 226,4 miliar SMS di tahun 2011.

3. Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi turun sebesar Rp226 miliar, atau 6,1%, dari Rp3.735 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.509 miliar pada tahun 2011. Pendapatan interkoneksi internasional turun sebesar Rp123 miliar, atau 7,9%, dari Rp1.561 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.438 miliar di tahun 2011. Pendapatan interkoneksi domestik dan transit turun sebesar Rp103 miliar, atau 4,7%, dari Rp2.174 miliar di tahun 2010 menjadi Rp2.071 miliar di tahun 2011. Penurunan pendapatan interkoneksi sebagian disebabkan oleh penurunan pendapatan interkoneksi seluler sebesar Rp113 miliar, atau 6,0%, yang disebabkan oleh promosi dari industri seluler atas pengurangan tarif panggilan antar sesama pelanggan dalam satu penyedia jaringan. Selain itu, pemerintah menetapkan tarif interkoneksi yang lebih rendah di tahun 2011 dibandingkan dengan tarif di tahun 2010. Pendapatan interkoneksi juga menurun disebabkan oleh penurunan pendapatan interkoneksi seluler dan internasional karena peningkatan substantial pada penggunaan VoIP untuk melakukan panggilan, termasuk melalui telepon seluler dengan menggunakan aplikasi seluler VoIP.

Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak Telkom dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung *incoming* dari layanan SLI (TIC-007).

Jumlah pendapatan interkoneksi berkontribusi sebesar 4,9% dari pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 5,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

4. Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan meningkat sebesar Rp243 miliar, atau 23,0%, dari Rp1.058 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.301 miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan substansial pada pendapatan sewa sirkit sebesar Rp224 miliar, atau 32,6%, dari Rp687 miliar di tahun 2010 menjadi Rp911 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kapasitas sewa sirkit dari 40.451 E1 di tahun 2010 menjadi 118.357 E1 di tahun 2011 sejalan dengan peningkatan permintaan akibat pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan penurunan tarif sewa sirkit.

Pendapatan sewa *transponder* satelit meningkat sebesar Rp19 miliar, atau 5,1%, dari Rp371 miliar di tahun 2010 menjadi Rp390 miliar di tahun 2011 yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas sewa akibat adanya peningkatan permintaan.

5. Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pada tahun 2011, pendapatan dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp341 miliar, atau 17,4%, dari Rp1.961 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp2.302 miliar pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan TV berbayar sebesar Rp100 miliar, atau 62,9%, dari Rp159 miliar di tahun 2010 menjadi Rp259 miliar pada tahun 2011; peningkatan kompensasi KPU sebesar Rp88 miliar, atau 25,7%, dari Rp342 miliar di tahun 2010 menjadi Rp430 miliar di tahun 2011 serta peningkatan pendapatan lain-lain meningkat sebesar Rp26 miliar, atau 22,2%, dari Rp117 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp143 miliar pada tahun 2011.

Pendapatan TV berbayar meningkat disebabkan oleh peningkatan substansial pada pelanggan TelkomVision sebesar 369,7% dari 212,9 ribu pelanggan di tahun 2010 menjadi 1 juta pelanggan di tahun 2011 akibat promosi yang intensif dan penurunan tarif. Pendapatan dari kompensasi KPU meningkat terutama disebabkan oleh pendapatan dari proyek KPU di tahun 2011 untuk membangun layanan pusat internet di berbagai ibu kota provinsi. Pendapatan lain-lain meningkat disebabkan oleh pendapatan dari bisnis direktori telepon menjadi Rp349 miliar pada tahun 2011.

B. Beban

Jumlah beban meningkat sebesar Rp3.720 miliar, atau 8,0%, dari Rp46.240 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp49.960 miliar pada tahun 2011. Peningkatan jumlah beban terutama disebabkan oleh meningkatnya beban karyawan, beban pemasaran serta beban interkoneksi. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp326 miliar, atau 2,0%, dari Rp16.046 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp16.372 miliar pada tahun 2011. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban pemeliharaan menara, gedung perkantoran dan BTS sebesar Rp355 miliar, atau 4,0%, disebabkan oleh meningkatnya beban karena adanya peningkatan kapasitas stasiun penerima dan transmisi serta layanan *broadband* Telkomsel.

Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Beban sewa sirkit dan CPE meningkat sebesar Rp191 miliar, atau 88,8%, dari Rp215 miliar di tahun 2010 menjadi Rp406 miliar di tahun 2011;
- Beban hak penyelenggaraan dan KPU meningkat sebesar Rp58 miliar, atau 4,9%, dari Rp1.177 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.235 miliar di tahun 2011. Peningkatan beban ini mengikuti peningkatan jumlah pendapatan sebesar 3,8%; dan
- Beban asuransi meningkat sebesar Rp47 miliar, atau 12,2%, dari Rp384 miliar di tahun 2010 menjadi Rp431 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh beban asuransi atas kerusakan kabel bawah laut terkait bencana tsunami di Sumatera Barat dan gempa di Sumbawa pada tahun 2010.

Peningkatan di atas sebagian dimbangi oleh hal-hal berikut:

- Beban pokok penjualan telepon, *set top box*, kartu SIM dan RUIM turun sebesar Rp188 miliar, atau 17,6%, dari Rp1.067 miliar di tahun 2010 menjadi Rp879 miliar di tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh kemasan yang lebih murah untuk kartu SIM dan RUIM;
- Beban pokok jasa teknologi informatika turun sebesar Rp56 miliar, atau 28,0%, dari Rp200 miliar di tahun 2010 menjadi Rp144 miliar di tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah lisensi *software* akibat berakhirnya beberapa lisensi *software* dan penunjukan Sigma sebagai penyedia *software* serta menurunnya beban pemeliharaan *software*; dan
- Beban pemakaian frekuensi radio menurun sebesar Rp46 miliar, atau 1,6%, dari Rp2.892 miliar di tahun 2010 menjadi Rp2.846 miliar di tahun 2011, disebabkan oleh peraturan baru yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2010, dimana biaya hak pakai BTS yang dibayarkan kepada pemerintah tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah BTS yang dipakai, namun dihitung berdasarkan *bandwidth* yang digunakan.

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp251 miliar, atau 1,7%, dari Rp14.612 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp14.863 miliar pada tahun 2011 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan sebesar Rp616 miliar, atau 4,7%, dari Rp13.085 miliar di tahun 2010 menjadi Rp13.701 miliar di tahun 2011, disebabkan oleh

beban penyusutan fasilitas pendukung, BTS dan peralatan *switching* yang diimbangi dengan penurunan baban penyusutan untuk jaringan kabel, peralatan pemrosesan data serta sewa pembiayaan.

Dengan meningkatnya persaingan dalam pasar layanan sambungan nirkabel tidak bergerak yang berdampak pada tarif rata-rata yang lebih rendah, menurunnya jumlah pelanggan aktif, dan menurunnya rata-rata pendapatan per pelanggan ("*Average Revenue Per User*" atau "ARPU"), kami melakukan pengujian penurunan nilai untuk unit penghasil kas layanan telepon nirkabel tidak bergerak. Lihat "Faktor-faktor Risiko – Layanan telepon nirkabel tidak bergerak kami mengalami persaingan ketat". Jumlah tercatat aset terkait layanan telepon nirkabel tidak bergerak yang mengalami penurunan nilai diturunkan hingga sebesar jumlah terpulihkan, yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan perhitungan estimasi nilai pakai. Dalam menentukan nilai pakai, manajemen menggunakan pertimbangan dalam menentukan proyeksi kinerja operasional masa depan, dan dalam menentukan tingkat pertumbuhan dan tingkat diskonto.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diterapkan berdasarkan pemahaman kami atas informasi historis dan ekspektasi atas kinerja operasional masa depan. Proyeksi arus kas mencerminkan ekspektasi manajemen terhadap pendapatan, pertumbuhan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi ("*Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortisation*" atau "EBITDA"), dan arus kas operasi atas dasar unit penghasil kas layanan sambungan nirkabel tidak bergerak menghasilkan surplus arus kas bersih sejak tahun 2013 dan pengembalian tingkat profitabilitas di tahun 2016. Proyeksi arus kas manajemen juga mempertimbangkan ekspektasi wajar manajemen terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro dan ekspektasi pasar terhadap industri telekomunikasi di Indonesia. Proyeksi tersebut mengasumsikan bahwa manajemen akan menerima lisensi dan menyelenggarakan jasa layanan sambungan nirkabel bergerak secara efektif yang akan mengeliminasi keterbatasan pada jasa yang diselenggarakan sekarang dimana hanya dapat digunakan oleh pelanggan dalam kode area tertentu. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 11,4%, yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Tingkat pertumbuhan perpetuitas yang digunakan adalah 0% dengan asumsi jumlah pelanggan akan terus meningkat setelah lima tahun, ARPU akan menurun sehingga hanya tingkat pertumbuhan jangka panjang yang dapat diabaikan akan dicapai dalam pasar yang kompetitif.

Perusahaan mengakui penurunan nilai untuk aset-aset dalam kelompok unit penghasil kas layanan sambungan nirkabel tidak bergerak pada 31 Desember 2011, yang menyebabkan rugi penurunan nilai sebesar Rp563 miliar (2010: nihil) yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai bagian dari "Penyusutan dan amortisasi". Perubahan asumsi penting, termasuk asumsi tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan dalam proyeksi arus kas, dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai pakai. Kenaikan sebesar 1% pada tingkat diskonto yang digunakan akan menambah rugi penurunan nilai menjadi Rp907 miliar. Namun jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas layanan sambungan nirkabel tidak bergerak sangat dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam melaksanakan rencananya, termasuk rencana untuk menyelenggarakan jasa layanan telepon nirkabel bergerak, yang diharapkan akan menghasilkan surplus arus kas dan tingkat profitabilitas sesuai proyeksi. Apabila kinerja dari unit penghasil kas layanan telepon nirkabel tidak bergerak terus mengalami penurunan atau rencana-rencana manajemen tidak terlaksana seperti yang diharapkan dalam periode keuangan selanjutnya, analisa harus dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tambahan penurunan nilai di tahun yang akan datang.

3. Beban Karyawan

Beban karyawan meningkat sebesar Rp1.223 miliar, atau 16,7%, dari Rp7.332 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp8.555 miliar pada tahun 2011. Peningkatan beban karyawan ini sebagian disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp250 miliar, atau 9,1%, dari Rp2.751 miliar di tahun 2010 menjadi Rp3.001 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh kenaikan gaji dasar tahunan sebesar 8,0% untuk mengimbangi inflasi.

Selain itu, kenaikan juga disebabkan oleh adanya beban program pensiun dini sebesar Rp517 miliar di tahun 2011 dan tidak adanya program pensiun dini yang ditawarkan di 2010. Beban cuti, insentif dan tunjangan lainnya juga memberikan kontribusi kenaikan sebesar Rp239 miliar, atau 9,3%, dari Rp2.575 miliar di tahun 2010 menjadi Rp2.814 miliar di tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan insentif.

Beban pajak penghasilan karyawan juga meningkat sebesar Rp247 miliar, atau 31,0%, dari Rp796 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.043 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini mengikuti peningkatan beban gaji dan tunjangan.

4. Beban Interkoneksi

Beban interkoneksi meningkat sebesar Rp469 miliar, atau 15,2%, dari Rp3.086 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.555 miliar pada tahun 2011. Beban interkoneksi meningkat terutama disebabkan peningkatan beban interkoneksi domestik seluler dan transit (beban interkoneksi untuk panggilan antara sesama pelanggan Telkomsel yang diarahkan melalui jaringan seluler operator lain), sebesar Rp434 miliar, atau 21,9% sejalan dengan peningkatan pada jumlah pelanggan Telkomsel di 2011 sebesar 13,8%.

Beban interkoneksi mencapai 7,1% dari jumlah beban konsolidasian untuk tahun 2011 dibandingkan dengan 6,7% untuk tahun 2010.

5. Beban Pemasaran

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp753 miliar, atau 29,8%, dari Rp2.525 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.278 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan dan promosi sebesar Rp749 miliar, atau 37,6%. Peningkatan beban iklan dan promosi ini disebabkan oleh perubahan skema insentif *dealer* di Telkomsel.

6. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp398 miliar, atau 15,7%, dari Rp2.537 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp2.935 miliar pada tahun 2011, sebagian disebabkan oleh peningkatan beban penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang sebesar Rp358 miliar, atau 68,2%, dari Rp525 miliar di tahun 2010 menjadi Rp883 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan perubahan penilaian piutang ragu-ragu berdasarkan umur piutang menjadi tingkat kolektibilitas.

Selain itu, beban sumbangan sosial meningkat sebesar Rp119 miliar, atau 69,6%, dari Rp171 miliar di tahun 2010 menjadi Rp290 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh keputusan pemegang saham untuk meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk tanggung jawab sosial perusahaan dari 1,0% jumlah laba komprehensif di tahun 2010 menjadi 2,0% jumlah laba komprehensif di tahun 2011. Dana ini dialokasikan secara merata untuk program kemitraan dan bina lingkungan.

Beban jasa profesional meningkat sebesar Rp72 miliar, atau 44,2%, dari Rp163 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp235 miliar pada tahun 2011.

Peningkatan beban jasa profesional, sumbangan sosial serta beban penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang diimbangi oleh penurunan beban keamanan dan *screening* sebesar Rp118 miliar, atau 54,9%, dari Rp215 miliar di tahun 2010 menjadi Rp97 miliar di tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan Telkom untuk melakukan penurunan jumlah tenaga kerja keamanan dan menggunakan tenaga kerja keamanan dari entitas anak, bukan dari pihak ketiga.

Selain itu beban penagihan menurun sebesar Rp74 miliar, atau 18,5%, dari Rp401 miliar di tahun 2010 menjadi Rp327 miliar di tahun 2011.

7. (Laba) Rugi Selisih Kurs – bersih

(Laba) rugi selisih kurs bersih menurun sebesar Rp253 miliar, atau 588,4%, dari laba selisih kurs sebesar Rp43 miliar pada tahun 2010 menjadi rugi selisih kurs sebesar Rp210 miliar pada tahun 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh apresiasi mata uang Yen dan Dolar AS sebesar 5,6% dan 0,7% di tahun 2011 yang berakibat pada peningkatan biaya hutang dalam denominasi Yen dan Dolar AS.

C. Laba Operasi dan Marjin Usaha Operasi

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, laba operasi menurun sebesar Rp979 miliar, atau 4,3%, dari Rp22.937 miliar pada 2010 menjadi Rp21.958 miliar pada tahun 2011. Sementara itu, pendapatan meningkat sebesar Rp2.624 miliar, atau 3,8%. Marjin laba menurun dari 33,4% pada tahun 2010 menjadi 30,8% pada tahun 2011.

D. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak menurun sebesar Rp559 miliar, atau 2,6%, dari Rp21.416 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp20.857 miliar pada tahun 2011. Marjin laba sebelum pajak menurun dari 31,2% pada tahun 2010 menjadi 29,3% pada tahun 2011.

E. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp159 miliar, atau 2,9%, dari Rp5.546 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp5.387 miliar pada tahun 2011, mengikuti penurunan laba sebelum pajak 2,6%.

F. Pendapatan Komprehensif Lain

Pendapatan komprehensif lain menurun sebesar Rp23 miliar, atau 67,6%, dari Rp34 miliar pada 2010 menjadi Rp11 miliar pada 2011 disebabkan karena peningkatan di selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp5 miliar diimbangi dengan penurunan pada perubahan selisih bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp28 miliar.

G. Laba Komprehensif

Laba komprehensif tahun berjalan menurun sebesar Rp423 miliar, atau 2,7%, dari Rp15.904 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp15.481 miliar pada tahun 2011.

H. Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali meningkat sebesar Rp172 miliar, atau 4,0%, dari Rp4.333 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp4.505 miliar pada tahun 2011.

I. Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menurun sebesar Rp572 miliar, atau 5,0%, dari Rp11.537 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp10.965 miliar pada tahun 2011.

J. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham menurun sebesar Rp27 atau 4,6%, dari Rp587 di tahun 2010 menjadi Rp560 di tahun 2011.

C. Perbandingan Arus Kas Bersih

Tabel berikut menyajikan informasi yang berhubungan dengan arus kas konsolidasi Perusahaan, seperti yang disajikan dalam (dan disiapkan dalam basis yang sama) pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember			
	2012 (Rp miliar)	2012 (US$ juta)	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)
Arus Kas Bersih:				
dari kegiatan operasi	27.941	2.898	30.553	27.759
untuk kegiatan investasi	(11.311)	(1.173)	(14.505)	(16.518)
untuk kegiatan pendanaan	(13.314)	(1.381)	(15.539)	(9.820)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.316	344	509	1.421
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	168	17	5	(106)
Kas dan setara kas pada awal tahun	9.634	1.000	9.120	7.805
Kas dan setara kas pada akhir tahun	13.118	1.361	9.634	9.120

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2012 arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi mencapai Rp27.941 miliar (US$2.898 juta), menurun dibandingkan Rp30.553 miliar pada tahun 2011. Penurunan arus kas kami terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas untuk beban sebesar Rp8.235 miliar, atau 32,4% yang sebagian dikompensasi dengan peningkatan penerimaan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp4.391 miliar, atau 6,5% karena meningkatnya pendapatan kami.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Pada tahun 2012 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi menurun menjadi sebesar Rp11.311 miliar (US$1.173 juta) dibandingkan dengan Rp14.505 miliar pada tahun 2011. Penurunan arus kas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pembelian aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp3.975 miliar dan penurunan pembayaran kas untuk pembelian aset tetap sebesar Rp4.976 miliar, atau 37,7%. Penurunan ini diimbangi sebagian dengan perolehan dari klaim asuransi sebesar Rp1.862 miliar, atau 14.323,1%, terkait klaim atas kegagalan peluncuran satelit Telkom-3.

Selain dari kas di tangan dan kas di bank, kami menginvestasikan sebagian besar kelebihan kas kami dari waktu ke waktu dalam bentuk deposito berjangka. Sejak 14 Mei 2004, kami juga telah menginvestasikan sebagian kelebihan uang kas kami dalam reksadana dan surat berharga lainnya yang berbasis mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2012, aset keuangan lancar lainnya yang dimiliki dalam bentuk reksadana dan surat berharga lainnya sebesar Rp4.338 miliar (US$450 juta).

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2012 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan menurun menjadi sebesar Rp13.314 miliar (US$1.381 juta) dibandingkan dengan Rp15.539 miliar di tahun 2011. Penurunan sebesar Rp2.225 miliar, atau 14,3% tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pinjaman penerusan dan utang bank sebesar Rp3.075 atau 41,9% dan penurunan pembayaran untuk saham yang diperoleh kembali sebesar Rp315 miliar, atau 15,3%. Penurunan ini diimbangi sebagian dengan peningkatan pembayaran dividen tunai sebesar Rp1.058 miliar, atau 17,4% kepada pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2011 arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi meningkat menjadi sebesar Rp30.553 miliar (US$3.368 juta) dibandingkan Rp27.759 miliar pada tahun 2010. Peningkatan arus kas dari kegiatan operasi tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.953 miliar, atau 4,6% sebagai dampak dari peningkatan pendapatan kami;
- Penurunan pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp484 miliar, atau 5,4%; dan
- Penurunan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp470 miliar, atau 8,1%.

Peningkatan arus kas dari kegiatan operasi tersebut diimbangi sebagian oleh:

- Penurunan penerimaan tagihan restitusi pajak sebesar Rp659 miliar, atau 100,0% karena tidak ada tagihan restitusi pajak yang diakui pada tahun 2011; dan
- Peningkatan pembayaran pengembalian kas kepada pelanggan sebesar Rp612 miliar, atau 158,5%.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Pada tahun 2011 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi menurun menjadi sebesar Rp14.505 miliar (US$1.600 juta) dibandingkan dengan Rp16.518 miliar pada tahun 2010. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pembelian aset tetap sebesar Rp1.755 miliar, atau 11,7%.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2011 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan meningkat menjadi sebesar Rp15.539 miliar (US$1.713 juta) dibandingkan dengan Rp9.820 miliar pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Penurunan penerimaan kas dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya sebesar Rp4.731 miliar, atau 56,9% sebagai dampak dari penurunan penerimaan kas dari perolehan pinjaman penerusan dan utang bank sebesar Rp2.146 miliar, atau 44,3%, serta penurunan penerimaan kas dari perolehan obligasi sebesar Rp2.991 miliar karena tidak ada obligasi yang diterbitkan pada tahun 2011; dan
- Peningkatan pembayaran kas untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan sebesar Rp2.059 miliar karena tidak dilakukan pembelian pada tahun 2010.

Peningkatan tersebut diimbangi sebagian oleh penurunan pembayaran kas untuk pelunasan pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya sebesar Rp1.131 miliar, atau 12,4% yang terutama disebabkan penurunan pembayaran kas untuk pelunasan pinjaman penerusan dan utang bank sebesar Rp1.382 miliar, atau 15,9%.

KEWAJIBAN DAN KOMITMEN

A. Kewajiban Kontraktual

Tabel berikut menyajikan informasi tentang kewajiban kontraktual pada tanggal 31 Desember 2012.

Kewajiban Kontraktual	Jatuh Tempo Pembayaran				
	Jumlah (Rp Miliar)	Kurang Dari 1 Tahun (Rp Miliar)	1-3 Tahun (Rp Miliar)	3-5 Tahun (Rp Miliar)	Lebih Dari 5 Tahun (Rp Miliar)
Utang Jangka Pendek[1][6]	37	37	-	-	-
Utang Jangka Panjang[2][6]	16.914	5.111	7.450	1.285	3.068
Utang Sewa Pembiayaan[3]	2.324	510	666	473	675
Bunga Atas Utang Jangka Pendek, Utang Jangka Panjang Dan Kewajiban Sewa Pembiayaan[7]	848	142	280	215	211
Operating Leases[4]	13.829	2.017	3.518	3.099	5.195
Kewajiban Pengadaan Yang Tidak Bersyarat[5]	10.355	10.355	-	-	-
Jumlah	**44.307**	**18.172**	**11.914**	**5.072**	**9.149**

(1) Terkait dengan utang jangka pendek yang diperoleh dari Bank Ekonomi dan Bank CIMB Niaga, lihat Catatan 16 pada Laporan Keuangan Konsolidasian;
(2) Lihat Catatan 17-20 pada Laporan Keuangan Konsolidasian;
(3) Terkait dengan sewa pembiayaan untuk instalasi dan peralatan, kendaraan bermotor, perangkat pemrosesan dan perangkat kantor untuk jaringan telekomunikasi Telkom Flexi dan CPE;
(4) Terkait dengan sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan;
(5) Belanja modal yang disepakati di bawah pengaturan kontraktual;
(6) Tidak termasuk komitmen kontraktual untuk suku bunga;
(7) Lihat "Risiko-Risiko Terkait Dengan Bisnis Kami - Risiko-Risiko Keuangan – Kami Menghadapi Risiko Suku Bunga".

Lihat Catatan 41 Laporan Keuangan Konsolidasian untuk detail lebih lanjut mengenai komitmen kontraktual. Sebagai tambahan atas kewajiban kontraktual di atas, pada tanggal 31 Desember 2012, Telkom memiliki kewajiban jangka panjang untuk pensiun, imbalan kesehatan pascakerja dan penghargaan masa kerja. Telkom mengalokasikan Rp300 miliar untuk imbalan kesehatan pascakerja dan Rp186 miliar untuk program pensiun manfaat pasti di tahun 2012. Lihat catatan 34 dan 36 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

B. Kewajiban Pokok Terutang

Saldo liabilitas konsolidasian (terdiri dari pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan utang bank) pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, tercantum pada tabel berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2012 (Rp miliar)	2012 (US$ juta)	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)
Rupiah Indonesia	16.192	1.680	14.142	17.667
Dolar Amerika Serikat(1)	2.052	213	2.561	3.147
Yen Jepang(2)	1.031	107	1.168	1.191
Jumlah	**19.275**	**2.000**	**17.871**	**22.015**

(1) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, yang dikonversikan ke dalam Rupiah dengan kurs Rp9.015, Rp9.075 dan Rp9.645= US$1, yaitu nilai jual Reuters untuk Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal tersebut.
(2) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, yang dikonversikan ke dalam Rupiah pada Rp110,8, Rp117,0 dan Rp111,8 = Yen 1, yaitu nilai tukar beli untuk Yen pada setiap tanggal tersebut.

Dari seluruh liabilitas Telkom Group pada tanggal 31 Desember 2012, pembayaran yang dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2013, 2014-2015 dan 2016-2017 dan seterusnya masing-masing sebesar Rp5.658 miliar, Rp8.116 miliar dan Rp1.758 miliar.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai liabilitas Telkom dan Telkomsel, lihat Catatan 16-20 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

C. Kontrak Material

Pada 2011 dan 2012, kami tidak mengajukan kontrak material baru atau mengubah kontrak material yang sudah ada, di luar kontrak yang sudah dimasukkan atau diubah dalam kegiatan usaha biasa.

LIKUIDITAS

Sumber Likuiditas

Sumber utama likuiditas perusahaan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional dan pinjaman jangka panjang melalui pasar modal serta pinjaman jangka panjang dan jangka pendek melalui fasilitas bank. Kami membagi sumber likuiditas kami menjadi likuiditas internal dan eksternal.

A. Likuiditas Internal

Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kami terutama mengandalkan likuiditas internal kami. Pada tanggal 31 Desember 2012, kami memiliki kas dan setara kas sebesar Rp13.118 miliar. Selama tahun 2012, kas dan setara kas meningkat sebesar Rp3.484 miliar. Selama tahun 2012, peningkatan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi terutama peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp71.910 miliar.

Kami mencatatkan pembayaran kembali bersih atas utang tahun berjalan untuk pinjaman sebesar Rp9.098 miliar pada tahun 2010, Rp7.967 miliar pada tahun 2011 dan Rp5.843 miliar pada tahun 2012. Arus kas keluar pada tahun 2012 terutama digunakan untuk pembayaran:

- Pinjaman jangka panjang sebesar Rp4.259 miliar;
- Pinjaman jangka pendek sebesar Rp654 miliar; dan
- Utang sewa pembiayaan sebesar Rp418 miliar.

Kekuatan likuiditas internal kami tercermin dari rasio lancar, yaitu perbandingan antara aset lancar dibandingkan liabilitas jangka pendek, sebesar 116,0% atau meningkat dari 95,8% di tahun 2011.

B. Likuiditas Eksternal

Sumber likuiditas eksternal kami yang paling utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar. Selama tahun 2012 likuiditas eksternal yang kami gunakan adalah:

- Utang bank sebesar Rp3.936 miliar; dan
- Pinjaman jangka pendek sebesar Rp590 miliar;

C. Sumber Likuiditas yang belum digunakan

Fasilitas kredit yang tersedia tetapi belum kami manfaatkan antara lain:

- ABN Amro sebesar Rp1.925 miliar;
- CIMB Niaga sebesar Rp1.204 miliar;
- Bank BRI sebesar Rp214 miliar;
- Bank BNI, sebesar Rp200 miliar; dan
- Sindikasi BNI, BRI dan Mandiri sebesar Rp2,5 miliar.

MODAL KERJA BERSIH

Modal kerja bersih, dihitung dari selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek, berjumlah sebesar defisit Rp931 miliar pada 31 Desember 2011 dan surplus Rp3.866 miliar (US$401 juta) pada 31 Desember 2012. Peningkatan modal kerja bersih terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan substansial aset keuangan lancar lainnya, terutama aset keuangan tersedia untuk dijual, sebesar Rp3.965 miliar;
- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp3.484 miliar; dan
- Penurunan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp1.042 miliar.

Hal di atas diimbangi dengan:

- Peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.373 miliar;
- Peningkatan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp808 miliar; dan
- Penurunan aset tersedia untuk dijual sebesar Rp791 miliar.

Kami meyakini bahwa modal kerja kami memadai untuk memenuhi ketentuan yang ada saat ini. Telkom berharap modal kerja bersih dapat dipenuhi dari berbagai sumber pendanaan termasuk penerimaan kas dari kegiatan operasional dan pinjaman bank. Lihat bagian "Likuiditas".

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan membayar utangnya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, sangat dipengaruhi oleh sumber likuiditas Perusahaan. Lihat pembahasan pada bagian "Likuiditas".

A. Liabilitas Jangka Pendek

Kemampuan Perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel berikut:

Rasio	2012	2011
Kas	Rp13.118 miliar	Rp9.634 miliar
Aset keuangan lancar lainnya	Rp4.338 miliar	Rp373 miliar
Persediaan	Rp579 miliar	Rp758 miliar
Aset lancar	Rp27.973 miliar	Rp21.258 miliar
Liabilitas jangka pendek	Rp24.107 miliar	Rp22.189 miliar
Rasio lancar (*current ratio*)	116,0%	95,8%
Rasio cepat (*quick ratio*)	113,6%	92,4%
Rasio kas (*cash ratio*)	72,4%	45,1%

B. Liabilitas Jangka Panjang

Kemampuan Perusahaan untuk membayar utang jangka panjang dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel di bawah ini:

Rasio	2012	2011
Utang (debt)	Rp19.275 miliar	Rp17.871 miliar
Ekuitas	Rp51.541 miliar	Rp47.510 miliar
Biaya pendanaan	Rp2.055 miliar	Rp1.637 miliar
EBITDA	Rp40.154 miliar	Rp36.821 miliar
Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*)	37,4%	37,6%
Rasio utang terhadap EBITDA (*debt to* EBITDA)	48,0%	48,5%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga (*times interest earned ratio*)	19,5 kali	22,5 kali

Untuk pembahasan mengenai utang Perusahaan, lihat Catatan 16-20 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan relatif stabil di tahun 2011 dan 2012, yang dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel di bawah ini:

Rasio	2012	2011
Piutang	Rp5.223 miliar	Rp4.915 miliar
Pendapatan	Rp77.143 miliar	Rp71.253 miliar
Lama penagihan rata-rata (*average collection period*)	24,7 hari	25,2 hari
Rasio perputaran piutang (*receivable turnover*)	14,8 kali	14,5 kali

Rasio-rasio di atas menunjukkan bahwa dalam menagih piutangnya, Perusahaan membutuhkan waktu rata-rata 25 hari. Selain itu, dana yang ditanam dalam piutang rata-rata dapat berputar 15 kali dalam satu tahun.

Perusahaan telah membentuk provisi atas penurunan nilai piutang berdasarkan pada nilai ketertagihan dari tingkat penurunan nilai historis dan nilai individual dari kualitas kredit dan historis kredit dari para pelanggan sebesar Rp2.047 miliar di tahun 2012 dan Rp1.732 miliar di tahun 2011. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, nilai tercatat piutang usaha Perusahaan dan entitas anak yang dipertimbangkan telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp2.189 miliar dan Rp2.068 miliar. Manajemen menyimpukan bahwa piutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk dengan piutang usaha yang tidak jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan historis piutang yang tertagih dengan baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

Untuk pembahasan mengenai piutang Perusahaan, lihat Catatan 5 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

STRUKTUR MODAL

Struktur modal Telkom per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	Jumlah (Rp miliar)	Porsi (%)
Jangka Pendek	37	(0,0)
Jangka Panjang	19.238	27,2
Hutang	19.275	27,2
Modal	51.541	72,8
Jumlah Modal Yang Investasikan	**70.816**	**100,0**

Kami melakukan pendekatan kualitatif untuk menentukan struktur permodalan dan tingkat hutang. Berdasarkan perjanjian sindikasi pinjaman hutang dengan BNI dan BRI per tanggal 16 Juni 2009, kami diminta untuk menjaga tingkat rasio hutang terhadap modal tidak lebih dari 2,0 dan *debt service coverage ratio* diatas 1,25 kali. Pada tanggal 31 Desember 2012. Rasio hutang terhadap modal ("DER") Telkom adalah 37,4% dan *debt service coverage ratio* adalah 4,3 kali, mengindikasikan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam melunasi hutangnya. Tingkat hutang ditentukan pada strategi usaha saat ini dan masa depan. Untuk mendapatkan tingkat hutang yang optimal, kami juga mempertimbangkan tingkat rasio hutang dengan membandingkan sesama industri telekomunikasi di kawasan regional.

Lihat Catatan 45 pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk informasi kebijakan Manajemen atas struktur modal.

BELANJA MODAL

Pada tahun 2012, belanja modal Perusahaan sebesar Rp17.272 miliar (US$1.792 juta), lebih kecil dari anggaran belanja modal sebesar Rp19.863 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penundaan beberapa proyek pembangunan SKKL.

Kami mengelompokkan kategori belanja modal berikut ini untuk keperluan perencanaan, yaitu:

- *Broadband services*, terdiri dari akses *broadband*, IT, aplikasi dan konten, serta *service node*;
- *Network infrastructure*, terdiri dari jaringan transmisi, *metro ethernet and Regional Metro Junction* ("RMJ"), dan IP *backbone* serta satelit;
- *Optimazing legacy*, terdiri dari telepon nirkabel tidak bergerak dan telepon kabel tidak bergerak; dan
- Belanja modal pendukung.

Belanja modal Telkom Group pada tahun 2012, mencapai Rp17.272 miliar, dimana dari jumlah tersebut, Telkom sebagai entitas induk mengeluarkan belanja modal sebesar Rp4.040 miliar (US$419 juta), Telkomsel sebesar Rp10.656 miliar (US$1.106 juta) dan belanja modal entitas anak lainnya sebesar Rp2.576 miliar (US$267 juta) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel realisasi belanja modal	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember			
	2012 (Rp miliar)	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)
Telkom (Entitas Induk)				
Broadband services	1.662	1.875	1.313	1.312
Network infrastructure	2.060	1.979	1.861	2.208
Optimizing legacy	86	156	264	1.913
Pendukung	232	192	185	219
Sub total untuk Telkom (Entitas Induk)	**4.040**	**4.202**	**3.623**	**5.652**
Entitas Anak				
Telkomsel	10.656	8.472	8.197	12.673
Lainnya	2.576	1.929	831	836
Subtotal untuk Entitas Anak	**13.232**	**10.401**	**9.028**	**13.509**
Jumlah untuk Telkom Group	**17.272**	**14.603**	**12.651**	**19.161**

Jumlah aktual pengeluaran belanja modal dapat berbeda dari angka-angka yang dicantumkan di atas karena beberapa sebab, termasuk namun tidak terbatas pada, perekonomian Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Euro ataupun mata uang asing lainnya yang relevan, ketersediaan pembiayaan dari pemasok atau fasilitas lain dengan persyaratan yang dapat kami terima, masalah teknis dan non-teknis dalam pengadaan serta instalasi peralatan, maupun kemungkinan kami memasuki bisnis-bisnis yang baru.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

A. Tujuan dari Ikatan

Ditahun2012,kamimemilikiikatanmaterialdenganbeberapa kontraktor, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi dan jaringan kabel. Hal ini diantaranya terkait dengan proyek pembangunan *broadband access* dengan *platform* MSAN, proyek GPON, proyek ekspansi *metro ethernet*, proyek Palapa Ring Mataram-Kupang, proyek SKKL Sumatera-Bangka, proyek SKKL Tarakan-Tanjung Selor, proyek SKKL Jakarta-Bangka-Batam-Singapura dan proyek SKKL Luwuk-Tutuyan.

Entitas anak kami, Telkomsel, juga memiliki ikatan material untuk investasi barang modal, diantaranya terkait dengan pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G serta pengadaan peralatan dan jasa terkait *Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support*. Selain itu, TelkomProperty dan Mitratel masing-masing memiliki ikatan material untuk investasi barang modal terkait dengan pembangunan gedung Telkom Landmark Tower dan pengadaan menara telekomunikasi.

Lihat Catatan 44a pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk pembahasan lengkap mengenai ikatan material untuk pembelian barang modal.

B. Sumber Dana

Secara historis, kami membiayai belanja modal terutama dari kas dari aktivitas operasional. Di tahun 2013, kami mengalokasikan belanja modal sekitar Rp27,2 triliun, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2012. Peningkatan anggaran belanja modal yang signifikan tersebut sebagian besar akan dialokasikan secara proporsional ke layanan *broadband* dan juga peningkatan ke entitas anak. Kami memperkirakan akan mendanai sebagian besar kebutuhan belanja modal di 2013 dari kas yang berasal dari aktivitas operasional, namun kami juga dapat mempertimbangkan alternatif sumber-sumber pendanaan lain.

Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi ikatan di atas diharapkan berasal dari sumber dana internal maupun eksternal Perusahaan. Lihat pembahasan pada bagian "Belanja Modal".

C. Mata Uang yang Menjadi Denominasi

Pada tanggal 31 Desember 2012, rincian ikatan material untuk pembelian barang modal berdasarkan mata uang, adalah sebagai berikut:

Mata Uang	Jumlah dalam Mata Uang Asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	6.678
Dolar AS	380	3.674
Euro	0,2	3
SGD	0,1	0
		10.355

D. Langkah-Langkah untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing yang Terkait

Perusahaan rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing, terutama dalam Dolar AS dan Yen Jepang. Namun demikian, eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan tidak material.

Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Risiko nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Perusahaan yang meningkat diharapkan dapat disalinghapus dengan deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek terutang.

Untuk pembahasan lebih detail mengenai ikatan material untuk investasi barang modal, lihat Catatan 41 dan 44 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 2012 kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, diantaranya:

SAK	Dampak Penerapan SAK
PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"	Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan tiga tingkat hierarki pengungkapan nilai wajar, risiko likuiditas serta penjelasan mengenai keandalan pengukuran nilai wajar.
ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa"	Pendapatan terkait dengan jasa konstruksi atau pengembangan/ peningkatan dibawah perjanjian konsesi jasa diakui berdasarkan tahap penyelesaian kerja yang telah diselesaikan. Pendapatan operasi dan jasa diakui pada periode dimana jasa diberikan. Saat lebih dari satu jasa diberikan pada perjanjian konsesi jasa, penghasilan yang diterima dialokasikan dengan acuan pada nilai relatif dari jasa tersebut. Selain itu, infrastruktur yang dikembangkan berdasarkan perjanjian konsesi jasa tidak diakui sebagai aset tetap dari operator.
ISAK 25, "Hak Atas Tanah"	Perusahaan diharuskan untuk mencatat hak atas tanah termasuk biaya yang timbul untuk memproses dan memperpanjang hak atas tanah sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi.

Untuk pembahasan lengkap mengenai perubahan pada pernyataan SAK dan interpretasi pernyataan SAK, lihat Catatan 2a pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selama tahun 2012 tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan. Lihat pembahasan pada bagian "Informasi Tambahan (bagi Pemegang Saham ADR) – Dasar Hukum dan Peraturan".

PENGENDALIAN NILAI TUKAR

Informasi Nilai Tukar

Tabel berikut memuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berdasarkan nilai tukar tengah, yaitu nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli Bank Indonesia untuk periode terlampir.

Tahun	Pada akhir periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
	(Rp Per US$1)			
2008(1)	10.950	9.757	12.151	9.051
2009(1)	9.400	10.356	11.980	9.400
2010(1)	8.991	9.078	9.365	8.924
2011(1)	9.068	8.773	9.170	8.508
2012	9.670	9.380	9.707	8.892
September(2)	9.588	9.566	9.593	9.450
Oktober(2)	9.615	9.597	9.615	9.583
November(2)	9.605	9.628	9.643	9.603
Desember(2)	9.670	9.646	9.707	9.598
2013				
Januari(2)	9.698	9.687	9.740	9.635
Februari(2)	9.667	9.687	9.725	9.634
Maret(22)(2)	9.743	9.704	9.743	9.678

Sumber: Bank Indonesia
(1) Menggunakan nilai tukar tengah pada hari kerja terakhir setiap bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia untuk periode yang bersangkutan.
(2) Menggunakan nilai tukar tengah harian yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang berlaku untuk periode yang bersangkutan.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter yang berdenominasi mata uang asing adalah nilai tukar beli dan jual yang dipublikasikan oleh Reuters pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Nilai tukar beli dan jual yang dipublikasikan oleh Reuters untuk aset dan liabilitas moneter masing-masing sebesar Rp9.005 dan Rp9.015 per Dolar AS posisi 31 Desember 2010, Rp9.060 dan Rp9.075 per Dolar AS posisi 31 Desember 2011 dan Rp9.630 dan Rp9.645 per Dolar AS posisi 28 Desember 2012.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian dinyatakan dalam Rupiah. Pencantuman konversi Rupiah ke dalam Dolar AS dalam Laporan Tahunan ini semata-mata demi kemudahan bagi pembaca dan menggunakan kurs rata-rata beli dan jual Rp9.637,5 per Dolar AS seperti yang dipublikasikan oleh Reuters pada tanggal 28 Desember 2012.

Pada tanggal 22 Maret 2013, kurs beli dan jual Dolar AS berdasarkan Reuters masing-masing sebesar Rp9.740 dan Rp9.745 per Dolar AS.

Valuta Asing

Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mata uang asing liberal yang memungkinkan aliran bebas valuta asing. Transaksi modal termasuk pengiriman modal, laba, deviden dan bunga, bebas dari pengendalian nilai tukar. Namun demikian, beberapa peraturan mempunyai dampak terhadap sistem nilai tukar. Misalnya, hanya bank yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi atas valuta asing dan melaksanakan transaksi pertukaran terkait dengan impor dan ekspor barang. Selain itu, bank-bank Indonesia (termasuk cabang bank asing di Indonesia) diharuskan melapor ke Bank Indonesia untuk setiap transfer dana yang melebihi 10.000 Dolar AS. Sebagai Perusahaan milik Negara dan berdasarkan ketetapan Ketua Tim Koordinasi Pinjaman Komersial Luar Negeri ("PKLN"), kami diharuskan mendapatkan persetujuan dari PKLN sebelum mendapatkan pinjaman komersial asing dan harus menyerahkan laporan berkala kepada PKLN selama jangka waktu pinjaman.

Selama tahun 2012, nilai tukar rata-rata Rupiah terhadap Dolar AS adalah sebesar Rp9.380, dengan nilai terendah dan tertinggi, masing-masing sebesar Rp9.707 dan Rp8.892. Berita-berita mengindikasikan bahwa Bank Indonesia akan melakukan intervensi terhadap pasar uang mata asing melalui pembelian dan penjualan mata uang asing untuk menstabilisasi nilai rupiah, bilamana dianggap telah terjadi fluktuasi signifikan atas nilai tukar.

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF ATAS RISIKO PASAR

Kami menghadapi risiko pasar yang muncul akibat perubahan nilai tukar, suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang tentunya akan berdampak pada kami. Kami tidak secara umum melakukan lindung nilai atas kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing tetapi pada kewajiban tahun berjalan kami. Pada tahun berjalan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, aset kami dalam mata uang asing mencapai 71,9% terhadap kewajiban dalam mata uang asing. Potensi terhadap risiko suku bunga dikelola melalui kombinasi kewajiban dan aset tetap dan tidak tetap, termasuk aset dengan suku bunga tetap jangka pendek. Potensi risiko pasar tersebut berfluktuasi selama tahun 2010, 2011 dan 2012 seiring dengan ekonomi Indonesia yang terpengaruh oleh perubahan pada nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan suku bunga itu sendiri. Kami tidak dapat memperkirakan apakah kondisi itu akan berlanjut di 2013 atau seterusnya.

Risiko Nilai Tukar

Potensi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar terutama yang berasal dari transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman dalam mata uang asing. Kewajiban termasuk hutang dan piutang dalam denominasi mata uang Dolar AS dan Yen Jepang. Meningkatnya risiko nilai tukar mata uang asing terhadap kewajiban Perusahaan dan entitas anaknya diharapkan dapat terkompensasi sebagian oleh deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing dengan memperhatikan kecenderungan perubahan pada nilai tukar di masa datang.

Informasi yang disajikan dalam tabel berikut didasarkan pada asumsi kurs jual dan beli Dolar AS dan mata uang lainnya, yang dikutip dari Reuters pada tanggal 31 Desember 2012 untuk aset dan kewajiban moneter. Kurs beli dan jual posisi per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp9.630 dan Rp9.645 terhadap US$1.

Namun kami yakin asumsi ini dan informasi yang digambarkan dalam tabel berikut mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk fluktuasi atau depresiasi Rupiah di masa depan.

	Saldo per 31 Desember 2012		Jatuh Tempo yang Diharapkan						
	Mata Uang Asing (dalam Jutaan)	Setara Rupiah (Rp dalam Jutaan)	2013	2014	2015	2016	2017	Seterusnya	Nilai wajar
			(Rp dalam Jutaan)						
ASET									
Kas dan Setara Kas									
Dollar AS	413	3.980.579	3.980.579	-	-	-	-	-	3.980.579
Yen Jepang	1	148	148	-	-	-	-	-	148
Lain-lain[1]	6	61.494	61.494	-	-	-	-	-	61.494
Aset keuangan lancar lainnya									
Dollar AS	7	69.067	69.067	-	-	-	-	-	69.067
Piutang Usaha									
Pihak Berelasi									
Dollar AS	9	86.932	86.932	-	-	-	-	-	86.932
Pihak Ketiga									
Dollar AS	75	721.819	721.819	-	-	-	-	-	721.819
Lain-lain[1]	0,44	4.251	4.251	-	-	-	-	-	4.251
Piutang lain-lain									
Dollar AS	1	11.563	11.563	-	-	-	-	-	11.563
Lain-lain[1]	0,06	573	573	-	-	-	-	-	573
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya									
Dollar AS	10	95.385	-	95.385	-	-	-	-	95.385
LIABILITAS									
Utang usaha									
Pihak Berelasi									
Dollar AS	1	14.361	14.361	-	-	-	-	-	14.361
Pihak Ketiga									
Dollar AS	320	3.096.063	3.096.063	-	-	-	-	-	3.096.063
Lain-lain[1]	2	23.253	23.253	-	-	-	-	-	23.253
Utang Lain-Lain									
Dollar AS	0,92	8.858	8.858	-	-	-	-	-	8.858
Lain-lain[1]	0,13	1.251	1.251	-	-	-	-	-	1.251
Beban yang Masih Harus Dibayar									
Dollar AS	75	725.784	725.784	-	-	-	-	-	725.784
Yen Jepang	33	3.677	3.677	-	-	-	-	-	3.677
Lain-lain[1]	3	29.152	29.152	-	-	-	-	-	29.152
Uang Muka Pelanggan dan Pemasok									
Dollar AS	0,80	7.669	7.669	-	-	-	-	-	7.669
Lain-lain[1]	0,20	1.885	1.885	-	-	-	-	-	1.885
Utang Bank Jangka Pendek									
Dollar AS	0,42	4.091	4.091	-	-	-	-	-	4.091
Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun									
Dollar AS	31	297.386	297.386	-	-	-	-	-	331.624
Yen Jepang	768	85.882	85.882	-	-	-	-	-	115.251
Wesel Bayar									
Dollar AS	68	661.062	432.284	191.726	37.052	-	-	-	667.109
Liabilitas Jangka Panjang[2]									
Dollar AS	113	1.090.517	-	334.658	275.251	189.940	121.997	168.671	1.105.913
Yen Jepang	8.447	944.700	-	85.882	85.882	85.882	85.882	601.172	957.317

(1) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar AS dengan menggunakan nilai tukar umum pada akhir periode pelaporan.
(2) Liabilitas jangka panjang untuk keperluan tabel ini terdiri dari pinjaman dalam mata uang asing dari pinjaman penerusan, utang sewa pembiayaan dan pinjaman bank jangka panjang.

Risiko Suku Bunga

Eksposur terhadap fluktuasi tingkat bunga terutama merupakan hasil dari perubahan pada tingkat bunga mengambang diterapkan untuk utang jangka panjang. Risiko ini berkaitan dengan pinjaman di bawah program pinjaman Pemerintah yang telah digunakan untuk membiayai pengeluaran modal kami. Fluktuasi suku bunga dipantau untuk meminimalkan dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dengan tingkat bunga variabel menghadapkan Perusahaan dan entitas anak pada risiko suku bunga. Untuk mengukur risiko pasar dari fluktuasi suku bunga, Perusahaan dan entitas anak terutama menggunakan profil tingkat bunga dan jatuh tempo dari aset dan kewajiban keuangan berdasarkan perubahan jadwal dari tingkat bunga.

Aliran kas aktual dari instrumen hutang itu dalam denominasi Rupiah, Dolar AS, Euro dan Yen Jepang, seperti yang disajikan dalam tabel. Informasi yang disampaikan dalam tabel telah dihitung berdasarkan asumsi berikut: (i) suku bunga tetap untuk deposito berjangka Rupiah berdasarkan suku bunga rata-rata yang berlaku untuk penempatan berjangka tiga bulan efektif sejak tanggal 31 Desember 2012 yang dikenakan oleh bank tempat deposito itu ditempatkan; (ii) suku bunga variabel untuk kewajiban jangka panjang dalam Rupiah terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 dan berdasarkan ketentuan suku bunga dalam kontrak yang dihitung dari suku bunga deposito tabungan rata-rata 3 bulan untuk masa enam bulan yang berlaku untuk sertifikat Bank Indonesia bertenor tiga bulan atau berdasarkan suku bunga rata-rata yang dikenakan bank; (iii) suku bunga tetap atas deposito dalam Dolar AS berdasarkan suku bunga rata-rata yang berlaku untuk penempatan tiga bulan yang dikenakan lembaga pemberi pinjaman manapun tempat deposito itu ditempatkan per 31 Desember 2012; dan (iv) nilai efek yang dapat dijual dihitung berdasarkan nilai efek itu per 31 Desember 2012. Namun, asumsi ini dapat berubah di masa depan. Asumsi ini berbeda dengan suku bunga yang digunakan dalam perhitungan Laporan Keuangan Konsolidasi kami; karenanya, jumlah yang tertera di tabel dapat berbeda dengan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi kami.

	Saldo per 31 Desember 2012			Jatuh Tempo						
	Mata Uang Asing (dalam jutaan)	Setara Rp (Rp dalam jutaan)	Suku Bunga (%)	2013	2014	2015	2016	2017	Seterusnya	Nilai Wajar
				(Rp dalam jutaan)						
ASET										
Suku Bunga Tetap										
Kas dan Setara Kas										
Deposito berjangka										
Rupiah	7.547.601	7.547.601	6,25	7.547.601	-	-	-	-	-	7.547.601
Dollar AS	375	3.620.513	1,76	3.620.513	-	-	-	-	-	3.620.513
Aset keuangan lancar lainnya										
Rupiah	241.565	241.565	-	241.565	-	-	-	-	-	241.565
Dolar AS	7	69.067	-	69.067	-	-	-	-	-	69.067
LIABILITAS										
Utang Bank Jangka Pendek										
Suku Bunga Variable										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	33.047	33.047	-	33.047	-	-	-	-	-	33.047
Bunga	3.811	3.811	10,92	3.811	-	-	-	-	-	-
Dollar AS										
Pokok Pinjaman	0,42	4.091	-	4.091	-	-	-	-	-	4.091
Bunga	0,01	75	6	75	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Jangka Panjang[1]										
Suku Bunga Variable										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	10.922.583	10.922.583	-	4.318.227	3.282.984	2.195.103	493.556	329.643	303.070	11.006.856
Bunga	1.409.788	1.409.788	8,11	610.918	400.354	198.627	74.296	40.401	85.192	-
Dollar AS										
Pokok Pinjaman	133	1.290.024	-	545.429	345.510	194.108	130.190	74.787	-	1.298.276
Bunga	7	79.225	3,16	36.546	22.988	12.665	5.537	1.489	-	-
Suku Bunga Tetap										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	3.007.800	3.007.800	-	7.800	-	1.005.000	-	-	1.995.000	3.355.029
Bunga	1.772.829	1.772.829	9,28	301.201	308.561	244.620	203.271	204.755	510.421	-
Dollar AS										
Pokok Pinjaman	69	663.312	-	153.499	155.701	100.059	42.691	42.691	168.671	710.741
Bunga	10	92.523	4,14	26.876	19.826	12.777	9.764	8.031	15.249	-
Yen Jepang										
Pokok Pinjaman	9.215	1.030.582	-	85.882	85.882	85.882	85.882	85.882	601.172	1.072.568
Bunga	1.786	199.720	3,10	31.277	28.615	25.952	23.356	20.628	69.892	-
Utang sewa pembiayaan										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	2.228.341	2.228.341	-	479.249	370.827	251.432	229.003	222.938	674.892	2.228.341
Bunga	848.478	848.478	10,94	142.120	151.843	128.180	108.234	106.800	211.301	-
Dollar AS										
Pokok Pinjaman	10	95.629	-	30.742	25.173	18.136	17.059	4.519	-	95.629
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Liabilitas jangka panjang terdiri dari pinjaman yang dikenai bunga, yaitu pinjaman penerusan, obligasi, wesel bayar dan pinjaman bank jangka panjang dan termasuk nilai jatuh temponya.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Telkom memiliki beberapa perjanjian tertentu dan terlibat dalam transaksi dengan sejumlah pihak yang berelasi dengan Telkom, baik yang berbentuk perusahaan patungan, koperasi maupun yayasan. Pihak yang berelasi tersebut termasuk juga dengan Pemerintah serta badan usaha yang terkait atau yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, seperti BUMN. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Catatan 37 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

ASET TETAP

Aset tetap Telkom digunakan untuk operasional telekomunikasi, yang sebagian besar terdiri peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan peralatan sentral telepon. Penjelasan lebih lanjut atas aset tetap dapat dilihat pada Catatan 11 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Berdasarkan Undang-Undang No.5/1960, hak kepemilikan atas tanah dimiliki Negara Republik Indonesia, kecuali hak kepemilikan yang diberikan kepada individu di Indonesia. Penggunaan tanah diberlakukan melalui hak atas tanah termasuk Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Guna Usaha ("HGU"). Pemegang hak atas tanah dapat menggunakan tanah sepenuhnya untuk periode tertentu, yang harus diperbarui dan diperpanjang. Hak atas tanah secara umum dapat diperjualbelikan dan dapat dijaminkan dalam kesepakatan untuk memperoleh pinjaman tertentu.

Kami memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di seluruh Indonesia dengan HGB untuk jangka waktu 20-45 tahun, yang akan jatuh tempo antara tahun 2013 dan 2052. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan ada kesulitan dalam memperoleh perpanjangan hak atas tanah pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Telkom, termasuk entitas anak, memiliki hak guna lahan atas 2.913 properti. Telkom memegang HGB untuk sebagian besar dari properti tersebut. Berdasarkan PP No.40/1996, maksimal waktu berlakunya HGB adalah 30 tahun dan dapat diperbarui untuk 20 tahun berikutnya. Telkom tidak memiliki masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi penggunaan properti. Seluruh aset Telkom dan entitas anak tertentu telah dijaminkan untuk obligasi dan wesel bayar. Pada tanggal 31 Desember 2012, aset tetap tertentu entitas anak dengan nilai tercatat sebesar Rp2.841 miliar telah dijaminkan untuk perjanjian pinjaman. Lihat Catatan 16, 19 dan 20 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

ASURANSI

Aset tetap material yang bernilai signifikan, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko akibat gempa bumi, tsunami, erupsi, kebakaran, pencurian, petir, bencana alam dan risiko lainnya. Aset Perusahaan dilindungi oleh *Property All Risk Insurance Policy* dengan skema *sum insured basis* dan *first loss basis*. Polis asuransi Perusahaan juga melindungi terhadap gangguan sementara yang terjadi pada bisnis kami. Selain itu, Telkom juga memberikan perlindungan asuransi untuk satelit Telkom-1 dan Telkom-2 secara terpisah. Manajemen meyakini bahwa cakupan asuransi kami cukup untuk menutupi potensi kerugian dari risiko yang tidak pasti.

Pada tanggal 7 Agustus 2012, satelit Telkom-3 telah diluncurkan, tetapi gagal mencapai orbitnya. Satelit Telkom-3 tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan asuransi yang memadai untuk menutup kerugian atas kejadian ini. Pada November 2012, Telkom telah menerima pembayaran klaim asuransi dari PT Asuransi Jasindo atas gagalnya peluncuran satelit Telkom-3 di Baikonur, Kazakhstan sebesar US$185 juta.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL

A. Pengaturan Transaksi Di Luar Neraca

Kontinjensi kami dijelaskan pada Catatan 42 sedangkan ikatan dan perjanjian signifikan kami dijelaskan dalam Catatan 41 pada Laporan Keuangan Konsolidasian dan diringkas dalam Tabel Pengungkapan Kewajiban Kontraktual di halaman 106. Selain dari itu, pada tanggal 31 Desember 2012 Perusahaan tidak mempunyai pengaturan transaksi di luar neraca yang kemungkinan mempunyai dampak material pada Laporan Keuangan Konsolidasian baik di masa kini maupun yang akan datang terhadap posisi keuangan, pendapatan atau beban, hasil usaha, likuiditas, belanja modal dan sumber-sumber pendanaan.

B. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

No	Tanggal	Peristiwa
1	7 Januari 2013	PT Nokia Siemens Network ("NSN") setuju untuk memperpanjang periode penyesuaian harga dengan menerapkan harga akhir untuk setiap perangkat lunak, perangkat keras dan layanan dari New Solution yang dibeli oleh Telkomsel.
2	8 Januari 2013	Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra Media ("MM") dengan kepemilikan 99,83% yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa periklanan dan jasa terkait lainnya.
3	8 Januari 2013	Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra TV ("Metra TV") dengan kepemilikan 99,83% yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan.
4	9 Januari 2013	Para pemegang saham Telin menyetujui pendirian entitas anak Telin di Australia bernama Telekomunikasi Indonesia Internasional Australia Pty. Ltd ("Telkom Australia") yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan layanan berbasis IT.
5	17 Januari 2013	Sigma menandatangani perjanjian jual saham dan pengalihan utang dengan Landeskreditbank Baden-Wurttemberg-Forderbank ("L-Bank") and Step Stuttgarter Engineering Park Gmbh ("STEP") sebagai pemegang saham PT German Center Indonesia ("GCI"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Sigma menyetujui untuk membeli seluruh saham GCI yang dimiliki oleh L-Bank dan STEP serta mengambil alih utang pemegang saham L-Bank dengan harga beli sebesar US$18 juta (Rp170 miliar).
6	22 Januari 2013	Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra Digital Media ("MDM") dengan kepemilikan 99,83% yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa informasi telekomunikasi dan jasa lainnya.
7	31 Januari 2013	Pada tanggal 31 Januari 2013, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa tanggal 29 Januari 2013, PT Prima Jaya Informatika ("PJI") mengajukan Peninjauan Kembali ("PK") kepada Mahkamah Agung ("MA") terhadap putusan MA yang membatalkan putusan pailit Telkomsel. Atas hal tersebut, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA pada tanggal 7 Februari 2013. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, PK tersebut masih dalam proses dan diharapkan akan diputuskan pada bulan Maret 2013. Pada tanggal 31 Januari 2013, Pengadilan memutuskan bahwa biaya kurator sebesar Rp147 miliar harus ditanggung Telkomsel. Telkomsel menolak putusan tersebut dan mengajukan keberatan pada tanggal 12 Februari 2013 serta berencana untuk mengajukan PK.
8	25 Februari 2013	Telkomsel terpilih sebagai salah satu perusahaan yang diberikan tambahan lisensi 3G untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz.

Peristiwa-peristiwa di atas diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perusahaan di masa datang tanpa menimbulkan risiko yang material bagi Perusahaan. Untuk pembahasan lebih detail atas peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan, lihat Catatan 47 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

C. Informasi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak ada kejadian signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Tahunan ini.

120 Konsep dan Landasan

121 Kerangka Kerja dan Kinerja GCG Telkom

124 Struktur Tata Kelola Perusahaan

156 Sistem Pengendalian Internal

158 Akuntan Independen Perseroan

158 Manajemen Risiko

159 Litigasi dan Perkara Hukum Penting

160 Sanksi Administratif

160 Akses Informasi Publik

161 Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan

163 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

166 Konsistensi Penerapan GCG

171 Evaluasi GCG

Tata Kelola Perusahaan

Konsep dan **Landasan**

Kecenderungan ke arah masyarakat digital saat ini memberikan konsekuensi semakin cepatnya perubahan mulai dari perubahan perilaku pelanggan, daur hidup teknologi, sampai aspek regulasi formal. Hal ini menuntut organisasi untuk mengembangkan kapabilitas yang diperlukan agar mampu mengelola risiko perubahan dengan baik yang berujung pada dimilikinya kemampuan "berpikir cepat dan bertindak cepat" serta "mengetahui apa yang tidak diketahui" (*managing the unknown*). Sejak tahun 2004 hingga sekarang kami terus memberdayakan dan memperkuat manajemen pengetahuan sebagai sarana pembelajaran organisasi dan karyawan. Kami ingin Telkom menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) melalui fokus pengelolaan sumber daya manusia dan pengetahuan untuk dimilikinya kompetensi yang berkontribusi nyata pada sukses bisnis (*from competence to commerce*), tidak lain adalah sebagai wujud nyata pengelolaan *Good Corporate Governance* ("GCG") di Perusahaan untuk mengantarkan kelangsungan pertumbuhan usaha dan eksistensi Perusahaan ke masa mendatang.

(GCG Dalam Konteks Manajemen Pengetahuan)

Komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang bertanggung jawab merupakan landasan bagi penerapan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi Telkom.

Komitmen penerapan GCG dalam organisasi Telkom mencerminkan keyakinan bahwa GCG merupakan kunci sukses pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien dan berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangkan persaingan sehingga Perusahaan dapat memenuhi kewajibannya secara baik kepada Pemegang Saham, pelanggan, karyawan, mitra bisnis, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Mengingat saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di BEI dan NYSE, maka penerapan GCG selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang perseroan dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG") di Indonesia juga secara fundamental dituntut untuk mengelola praktik GCG yang efektif agar mematuhi ketentuan yang dimuat dalam *Sarbanes Oxley Act* Tahun 2002 ("SOA") serta peraturan US SEC lainnya.

Peraturan dan ketentuan dalam SOA yang relevan di antaranya adalah (i) SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen Telkom untuk bertanggung jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*/"ICOFR") yang memadai sehingga memastikan keandalan pelaporan keuangan Telkom dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan PSAK dan/atau IFRS dan (ii) SOA Seksi 302 yang menghendaki tanggung jawab dari pihak manajemen Telkom terhadap pembuatan, pemeliharaan dan evaluasi terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diungkapkan dalam laporan dengan ketentuan *Exchange Act* dan telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil kajian manajemen terhadap prosedur dan pengendalian pengungkapan ICOFR dan pengungkapan terkait dapat dilihat pada bagian "Prosedur dan Pengendalian".

Terkait dengan independensi audit, maka Telkom mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di OJK dan US SEC mengenai independensi anggota Komite Audit.

Seiring dengan transformasi *portfolio* bisnis TIMES (*Telecommunication, Information, Media, Edutainment* dan *Services*) yang dikelola oleh Telkom dan entitas anak, maka penerapan GCG terus dikuatkan dan dikembangkan dalam sebuah kerangka tata kelola *group* usaha atau *subsidiary governance* yang mencakup seluruh Entitas di bawah Telkom Group. Kesungguhan membangun *subsidiary governance* diawali dengan penguatan komitmen manajemen oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group berupa pernyataan dan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bukti kesungguhan penerapan GCG di Perusahaan.

Tahun 2012 merupakan tahun penguatan GCG di seluruh *group* usaha (*subsidiary governance*). Penguatan ini dimaksudkan agar penerapan GCG senantiasa melekat dan selaras dengan tuntutan bisnis dan perubahan industri saat ini yang tengah berlangsung yang disikapi Perusahaan berupa transformasi *portfolio* bisnis dan transformasi organisasi. Melalui Sub-Direktorat Business Effectiveness, penguatan GCG Telkom Group dibangun dan dikembangkan penerapannya di seluruh *group* usaha agar tercipta praktik bisnis yang beretika (GCG *as ethics*) dan terbukti prinsip GCG dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari bekerja (GCG *as knowledge*).

KERANGKA KERJA DAN KINERJA GCG TELKOM

Komitmen Telkom untuk menerapkan GCG diwujudkan dalam suatu kerangka kerja kebijakan penerapan GCG yang diatur dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman GCG No.29/2007. Kerangka kerja tersebut memuat beberapa sistem yang terintegrasi sebagai prasyarat atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG untuk tujuan menjamin dan memastikan penerapan GCG efektif sampai pada tingkat operasional yaitu memastikan bahwa setiap transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal, dijalankan secara beretika dan sesuai dengan praktik

tata kelola Perusahaan yang baik dan benar. Beberapa sistem yang dimaksud adalah: Etika Bisnis, Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal, Kepemimpinan, Pengelolaan Tugas dan Tanggungjawab, Pemberdayaan Manajemen dan Kompetensi Karyawan, Evaluasi Kinerja, serta Penghargaan dan Pengakuan.

Dalam perjalanannya kerangka kerja GCG terus dipertajam dan dikuatkan terutama terkait dengan inisiatif-inisiatif baru untuk mengintegrasikan pengelolaan *Governance Risk and Compliance* ("GRC") secara terpadu melalui pengelolaan kinerja usaha, GCG, manajemen risiko, kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial yang satu sama lain saling mendukung untuk terwujudnya pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perseroan. Telkom menyadari bahwa dinamika bisnis harus mampu diantisipasi oleh Perusahaan, oleh karenanya beberapa inisiatif tata kelola terus digali dan dirancang agar terjamin keberlanjutan organisasi, dengan satu keyakinan bahwa GCG bukan penghambat melainkan sebaliknya harus mampu menopang pertumbuhan kinerja perusahaan yang berkelanjutan, sebagaimana yang terungkap pada gambar dibawah ini:

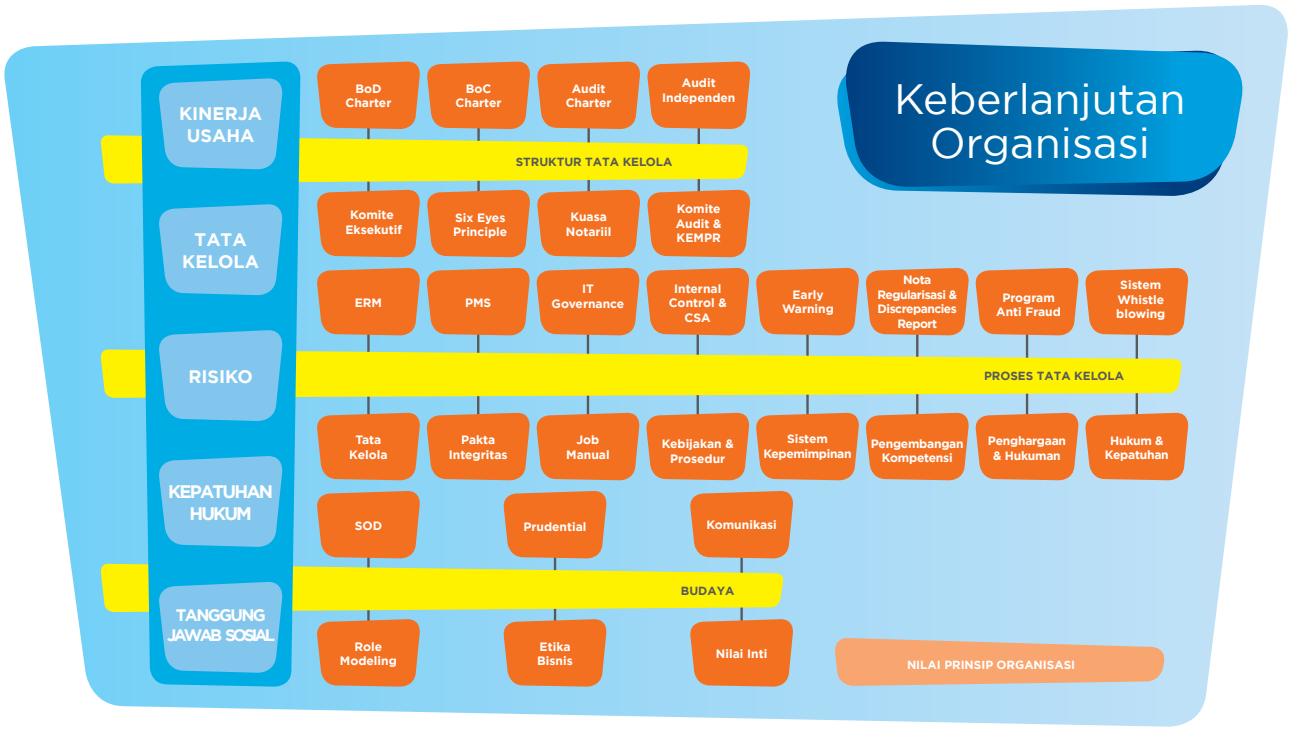

KEMPR : Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko
ERM : *Enterprise Risk Management*
PMS : *Performance Management System*
CSA : *Control Self-Assessment*
SOD : *Segregation of Duties*

Road Map & Initiative Penguatan Tata Kelola

Meskipun penerapan GCG Telkom telah diakui baik oleh penilai eksternal dan persepsi investor, kami terus berupaya memperbaiki kebijakan dan infrastuktur sistem pendukung GCG melalui inisiatif-inisiatif baru penguatan tata kelola yang kami kelompokkan menjadi tiga pilar utama sebagaimana gambar di atas meliputi:

1. **Penguatan Struktur Tata Kelola**
   Membangun inisiatif tata kelola untuk lebih menguatkan efektivitas komunikasi dan hubungan organ Perusahaan untuk menghindari potensi terjadinya *agency problem* dan untuk mencapai efektivitas *chemistry* antar elemen Perusahaan dengan tetap memperhatikan *check and balances* dan bercirikan kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan, melalui: evaluasi dan penguatan BoD/BoC/Audit *Charter*, pemberdayaan komite, penerapan "*six eyes principles*" untuk menjamin akuntabilitas inisiatif bisnis, pelaksanaan kuasa notariil, dan lain-lain.

2. Penguatan Proses Tata Kelola

Membangun inisiatif tata kelola untuk lebih menguatkan tata laksana pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien, melalui: penerapan *Enterprise Risk Management*, penerapan Pakta Integritas dalam ruang lingkup *group* usaha, penguatan tata kelola IT, remediasi pengendalian internal khususnya pengendalian internal untuk menjamin keandalan laporan keuangan, penguatan sistem kepemimpinan, dan lain lain.

3. Penguatan Budaya

Menanamkan tata nilai luhur melalui penerapan budaya Perusahaan dan etika bisnis sebagai modal dipraktikkannya etika usaha yang bermartabat dan dimilikinya karyawan dengan integritas dan moral terpuji melalui: penerapan *segregation of duties* ("SOD") dalam proses bisnis, *role modeling* kepemimpinan, memastikan dijalankannya etika bisnis dan praktik usaha yang amanah/menjalankan prinsip kehati-hatian (prudensial), terus menguatkan tata nilai Perusahaan, dan lain-lain.

Berikut *road map* penerapan dan penguatan GCG

2003 – 2006

- Penguatan GCG melalui penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (kepatuhan SOA seksi 404 dan SOA seksi 302);
- Penguatan GCG, Etika Bisnis, pengelolaan *Distinct Job Manual* ("DJM"), evaluasi kebijakan dan prosedur Perusahaan, pengembangan kompetensi SDM, pengembangan sistem kepemimpinan, penguatan independensi audit, dan lain-lain untuk mendukung kepatuhan SOA seksi 404 dan SOA seksi 302;
- Pelaksanaan *integrated audit* (*financial audit* yang terintegrasi dengan ICOFR *audit*);
- Penguatan tata kelola TI (IT *Governance*); dan
- Evaluasi dan pemetaan kembali kebijakan, proses bisnis dan operasional.

2007

- Penguatan organ tata kelola meliputi: penguatan BoC/BoD dan *Audit Charter*, Revitalisasi Komite Eksekutif, Pengembangan *Enterprise Risk Management* ("ERM"), pengembangan *early warning report,* pelaksanaan program *anti fraud*; dan
- Penguatan proses tata kelola dengan cara memastikan ketersediaan kebijakan pada seluruh proses untuk menjamin responsibilitas dan akuntabilitas.

2008

- Penguatan organ tata kelola melalui inisiatif manajemen antara lain: penerapan nota regularisasi, pelaporan *discrepancies*, penguatan sistem *whistleblowing*; dan
- Penguatan proses tata kelola untuk mewujudkan pengelolaan risiko sebagai kebutuhan dalam setiap proses.

2009

- Penguatan organ tata kelola melalui kebijakan Pakta Integritas dan penerapan "*six eyes principles*" dalam proses inisiasi bisnis; dan
- Penguatan proses tata kelola melalui penerapan risiko secara disiplin.

2010

- Penguatan organ tata kelola melalui kebijakan kuasa notariil dan penguatan budaya Perusahaan *The Telkom Way*; dan
- Penguatan proses tata kelola melalui pengelolaan risiko sebagai budaya yang melekat

2011

- Penguatan organ tata kelola melalui inisiatif membangun GCG Telkom Group dengan penetapan Pedoman GCG Telkom Group sebagaimana yang diatur dalam kebijakan Perusahaan No.PD.602/2011; dan
- Penguatan proses tata kelola untuk memastikan pengelolaan risiko dan kepatuhan berjalan efektif di Perusahaan.

2012

- Penguatan organ tata kelola melalui pemberdayaan GCG Telkom Group, perancangan *checklist* penerapan GCG dan pedoman *self assessment* GCG bagi entitas anak, dan penetapan Direksi entitas anak sebagai *members of executive board* Telkom Group dan Vice President Telkom sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Group Head Telkom Group sebagaimana diatur dalam Kebijakan Organisasi Kantor Perusahaan No.PD.202/2012; dan
- Penguatan proses tata kelola untuk memastikan proses bisnis selaras dengan transformasi bisnis dan transformasi organisasi.

2013

- Penguatan organ tata kelola melalui pengembangan, penerapan dan *self assessment* GCG untuk entitas anak; dan
- Penguatan proses tata kelola untuk memastikan proses bisnis selaras dengan transformasi bisnis dan transformasi organisasi "*New Telkom*".

2014

- Penguatan organ tata kelola melalui *self assessment* GCG untuk entitas anak dan perbaikan penerapannya; dan
- Penguatan proses tata kelola melalui penerapan disiplin proses berbasis ISO/sertifikasi ISO untuk organisasi baru "*New Telkom*".

2015
- Penguatan organ tata kelola melalui pelaksanaan audit GCG oleh eksternal untuk sebagian entitas anak; dan
- Penguatan proses tata kelola untuk memastikan sertifikasi/*surveillance* ISO.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan GCG, Telkom senantiasa memperbaiki struktur maupun prosedur pelaksanaannya dan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran di setiap lini Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memitigasi potensi risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta tanggung jawab baik di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, manajemen maupun karyawan Telkom.

Secara internal, struktur maupun prosedur pelaksanaan GCG diatur dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan GCG No.29/2007 yang memuat kerangka kerja operasional terpadu untuk memastikan agar setiap transaksi yang dilakukan, baik internal maupun eksternal, telah sesuai dengan etika maupun praktik tata kelola Perusahaan yang baik dan benar. Setiap tahun, Perusahaan mengevaluasi efektivitas setiap penerapan kebijakan. Pada saat yang sama, Perusahaan juga menjamin pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dilakukan secara independen dan menyeluruh untuk mencapai target efesiensi di seluruh lini organisasi sekaligus menjaga integritas Perusahaan di mata otoritas dan publik secara luas.

A. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunan ("RUPST") maupun RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam organisasi tata kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perusahaan. RUPST wajib diselenggarakan setahun sekali sedangkan RUPSLB dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam RUPST dan RUPSLB, pemegang saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang, terutama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis terkait dengan:
- Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Telkom;
- Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Dewan Komisaris serta Direksi Telkom;
- Menilai kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang ditelaah;
- Penentuan dan persetujuan terhadap penggunaan laba Perusahaan termasuk dividen; dan
- Perubahan Anggaran Dasar. RUPS juga berwenang untuk mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham pengendali yang memiliki saham Seri A Dwiwarna berkewajiban untuk memperhatikan tanggung jawabnya saat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan manajemen Perusahaan, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam hal lainnya. Pemerintah memiliki hak khusus yang dapat digunakan ketika memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, divestasi atau likuidasi melalui forum RUPST dan RUPSLB.

Mekanisme penggunaan hak suara oleh para pemegang saham saat penyelenggaraan RUPST maupun RUPSLB telah diatur sedemikian rupa sehingga pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya.

Selama tahun 2012 Telkom telah mengadakan RUPS Tahunan pada tanggal 11 Mei 2012 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Agenda 1	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2011.
Agenda 2	1. Mengesahkan : a. Laporan Keuangan Perseroan (Konsolidasian) Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of* PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia"; dan b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Zainal, Juhana & Rekan dengan pendapat "wajar dalam semua hal material berkaitan dengan laporan keuangan pokok secara-keseluruhan". 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2011.
Agenda 3	Menerima baik Laporan Direksi tentang Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi II Telkom Tahun 2010.
Agenda 4	1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011 yang berjumlah Rp10.965.127.913.176 diperuntukkan sebagai berikut: a. Dividen Tunai sebesar 55% dari laba bersih atau sejumlah Rp6.030.820.352.247 atau minimal sebesar Rp313,969 per saham; b. Spesial Dividen Tunai sebesar 10% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.096.512.791.318 atau minimal Rp57,085 per saham; dan c. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar Rp3.837.794.769.612 yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan. 2. Menyetujui pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2011 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang berhak menerima Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan b. Dividen dan Spesial Dividen akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 22 Juni 2012. 3. Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen. 4. Menyetujui penetapan besaran Dana PKBL Tahun Buku 2012 dengan rincian sebagai berikut: a. Program Kemitraan sebesar 0,75% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011 atau sebesar Rp82.238.459.349; dan b. Program Bina Lingkungan sebesar 0,25% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011 atau sebesar Rp27.412.819.783.
Agenda 5	Menyetujui : 1. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2012 sama dengan remunerasi Tahun Buku 2011; dan 2. Total Tantiem *Gross* bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 setara dengan 0,46% dari Laba Bersih.
Agenda 6	Menyetujui: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (bekerja sama dengan Ernst & Young Global Limited) untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2012 dan audit penggunaan Dana PKBL untuk Tahun Buku 2012; 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan 3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya.
Agenda 7	1. Menyetujui Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: a. Pasal 17 ayat 6 tentang perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris; b. Pasal 22 ayat 1 tentang muatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; c. Menyisipkan 1 (satu) ayat baru yang menjadi ayat 5 pada Pasal 22 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; dan d. Pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang jumlah minimum surat kabar yang memuat pengumuman dan pemanggilan RUPS. 2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Agenda 8	1. Pemberhentian dengan hormat: a. Bapak Bobby A.A. Nazief sebagai Komisaris; dan b. Bapak Rudiantara sebagai Komisaris Independen. 2. Pengangkatan: a. Bapak Parikesit Suprapto sebagai Komisaris; b. Bapak Hadiyanto sebagai Komisaris; dan c. Bapak Virano Gazi Nasution sebagai Komisaris Independen. Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 kecuali Komisaris sebelumnya yang kembali menjabat sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015. 3. Pemberhentian dengan hormat Bapak Rinaldi Firmansyah sebagai Direktur Utama. 4. Pengalihan jabatan Bapak Arief Yahya yang semula menjabat sebagai Direktur Enterprise & Wholesale menjadi Direktur Utama Perseroan. 5. Pengangkatan kembali Bapak Indra Utoyo sebagai Direktur Information Technology, Solution & Strategic Portfolio dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat dan berakhir sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ke-5 sejak pengangkatannya yaitu yang akan diadakan pada tahun 2017, dan dihitung sebagai masa jabatan kedua. 6. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu: a. Bapak Honesti Basyir sebagai Direktur Keuangan; b. Bapak Muhamad Awaluddin sebagai Direktur Enterprise & Wholesale; c. Bapak Ririek Adriansyah sebagai Direktur Compliance & Risk Management; d. Bapak Priyantono Rudito sebagai Direktur Human Capital & General Affair; e. Bapak Rizkan Chandra sebagai Direktur Network & Solution; dan f. Bapak Sukardi Silalahi sebagai Direktur Konsumer. dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 kecuali untuk Bapak Arief Yahya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015. 7. Pemberian Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Seluruh catatan RUPST tahun sebelumnya tersebut telah direalisasikan pada tahun 2012.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap tindakan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolekif kepada Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris Telkom memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan, kecuali jika akhir masa jabatan jatuh bukan pada hari kerja. Jika hal itu terjadi, maka akhir masa jabatan jatuh pada hari berikutnya.

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, termasuk perencanaan dan pengembangan, operasi dan anggaran, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan dan pelaksanaan mandat dan keputusan RUPS. Dewan Komisaris tidak berwenang untuk menjalankan maupun mengelola Perusahaan, kecuali dalam situasi apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara karena suatu sebab;
- Memberikan saran dan pendapat kepada RUPST mengenai pelaporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perusahaan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor dan hal-hal penting serta strategis lainnya terkait dengan aksi korporasi Perusahaan;
- Melakukan evaluasi atas rencana kerja dan anggaran Perusahaan, mengikuti perkembangan Perusahaan, dan melakukan koordinasi dengan Direksi jika ada gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah sehingga Direksi dapat segera mengumumkannya kepada para pemegang saham serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh; dan
- Memastikan program pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah diterapkan dan terpelihara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

2. Komposisi Dewan Komisaris

Struktur Dewan Komisaris Telkom terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu seorang Komisaris Utama yang merupakan pimpinan dewan dan 4 (empat) Komisaris, dua di antaranya merupakan Komisaris Independen.

Per tanggal 1 Januari 2012 sampai 11 Mei 2012, komposisi Dewan Komisaris Telkom terdiri dari:
1) **Jusman Syafii Djamal**, Komisaris Utama.
2) **Bobby A.A. Nazief**, Komisaris.
3) **Mahmuddin Yasin**, Komisaris.
4) **Johnny Swandi Sjam**, Komisaris Independen.
5) **Rudiantara**, Komisaris Independen.

Pada tanggal 11 Mei 2012, RUPST Telkom telah menyetujui perubahan pada komposisi Dewan Komisaris Perusahaan. Dengan demikian, per tanggal 11 Mei 2012, komposisi Dewan Komisaris Telkom terdiri dari:
1) **Jusman Syafii Djamal**, Komisaris Utama.
2) **Hadiyanto**, Komisaris.
3) **Parikesit Suprapto**, Komisaris.
4) **Johnny Swandi Sjam**, Komisaris Independen.
5) **Virano Gazi Nasution**, Komisaris Independen.

Tiap anggota Dewan Komisaris juga memiliki penugasan dan kegiatan terkait dalam komite-komite Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Komisaris	Penugasan dan Kegiatan Terkait
Jusman Syafii Djamal (Komisaris Utama)	Selain menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau juga mengetuai Komite Nominasi dan Remunerasi.
Johnny Swandi Sjam (Komisaris Independen)	Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit, anggota Komite Evaluasi dan *Monitoring* Perencanaan dan Risiko ("KEMPR") serta anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Virano Gazi Nasution (Komisaris Independen)	Beliau merupakan anggota Komite Audit, KEMPR, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
Hadiyanto (Komisaris)	Beliau merupakan anggota KEMPR dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Parikesit Suprapto (Komisaris)	Beliau juga merupakan Ketua KEMPR dan merupakan anggota Komite Audit dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Profil singkat anggota Dewan Komisaris disajikan pada halaman 200-201.

3. Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

Keanggotaan Dewan Komisaris Telkom telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan maupun peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku terkait independensi anggota Dewan Komisaris maupun jumlah Komisaris Independen, untuk menjaga independensi fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan menjamin terlaksananya mekanisme *check and balance*. Antar anggota Dewan Komisaris, dan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Jumlah Komisaris Independen adalah 2 (dua) orang, atau 40% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Jumlah ini juga telah melewati batas minimum jumlah komisaris independen yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia yaitu 30%. Tugas utama Komisaris Independen, selain melakukan pengawasan, juga memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas.

4. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak atas remunerasi bulanan dan tunjangan-tunjangan. Mereka juga berhak mendapatkan tantiem berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan, yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Anggota Dewan Komisaris juga berhak mendapatkan tunjangan secara *lumpsum* pada saat mereka berhenti dari posisinya.

Pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dihitung berdasarkan formula yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan yang juga dipakai untuk penentuan gaji Direksi, dan besarannya mengacu pada persentase gaji Direktur Utama yang telah disetujui oleh RUPS. Sesuai ketentuan Peraturan

Menteri BUMN PER-07/MBU/2010, RUPS dapat menetapkan penghasilan dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

Prosedur penetapan remunerasi atas Dewan Komisaris kami adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris;
- Komite Nominasi dan Remunerasi meminta pihak independen untuk menyusun kerangka kerja untuk remunerasi Dewan Komisaris;
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris di Tahun 2012

(dalam juta Rupiah)

Komisaris	Honorarium	Tantiem	Asuransi	Tunjangan Lainnya	Jumlah
Jusman Syafii Djamal	1.034,9	1.838,9	-	682,5	3.556,3
Hadiyanto	578,7	-	-	537,0	1.115,7
Parikesit Suprapto	578,7	-	-	478,7	1.057,4
Johnny Swandi Sjam	940,4	1.655,0	-	750,8	3.346,2
Virano Gazi Nasution	578,7	-	-	558,5	1.137,2
Bobby A.A. Nazief*	361,7	1.655,0	3.038,2	275,1	5.330,0
Mahmuddin Yasin*	361,7	1.655,0	3.038,2	237,6	5.292,5
Rudiantara*	361,7	1.655,0	3.038,2	262,6	5.317,5

*) sampai dengan 11 Mei 2012

5. Laporan Kegiatan Dewan Komisaris

a. *Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris*

Secara garis besar, selama tahun 2012 Dewan Komisaris telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

i. Memberi pendapat dan nasihat, serta meminta penjelasan, antara lain mengenai:
   - Perubahan struktur organisasi;
   - Pelaksanaan RKAP tahun 2012 dan rancangan RKAP tahun 2013;
   - Rencana pembentukan entitas anak, yaitu antara lain Telkom Landmark Tower dan Telkom Akses; dan
   - *Key Performance Indicator* ("KPI") untuk seluruh anggota Direksi berdasarkan Kontrak Manajemen yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai bagian dari evaluasi Dewan Komisaris terhadap kinerja masing-masing anggota Direksi.

ii. Memberi tanggapan atas laporan berkala Direksi. Menyampaikan tanggapan atas Laporan Keuangan Perusahaan triwulan I tahun 2012, triwulan II tahun 2012, dan triwulan III tahun 2012, serta mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

iii. Melaksanakan tugas Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan RUPS.
   - Membahas agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2011;
   - Membahas dan mengusulkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang akan melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;
   - Membahas dan mengusulkan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris; dan
   - Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2010 tanggal 19 Mei 2011.

b. *Rapat Dewan Komisaris*

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali atau pada setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari salah satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya sepersepuluh saham Telkom yang beredar.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak dapat tercapai, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara mayoritas

anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili pada rapat. Apabila jumlah suara berimbang, maka keputusan yang diajukan harus ditolak. Kuorum untuk seluruh rapat Dewan Komisaris adalah lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili kuasa yang diberikan kepada salah satu Komisaris yang hadir pada rapat tersebut.

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 kali di tahun 2012.

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Jusman Syafii Djamal	Komisaris Utama	8 dari 8
Johnny Swandi Sjam	Komisaris Independen	8 dari 8
Virano Gazi Nasution*	Komisaris Independen	3 dari 6
Hadiyanto*	Komisaris	5 dari 6
Parikesit Suprapto*	Komisaris	6 dari 6

* sejak tanggal 11 Mei 2012

Tabel Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Jusman Syafii Djamal	Komisaris Utama	13 dari 13
Johnny Swandi Sjam	Komisaris Independen	13 dari 13
Virano Gazi Nasution*	Komisaris Independen	6 dari 9
Hadiyanto*	Komisaris	7 dari 9
Parikesit Suprapto*	Komisaris	9 dari 9
Arief Yahya	Direktur Utama/CEO	12 dari 13
Muhammad Awaluddin*	Direktur Enterprise & Wholesale	9 dari 9
Honesti Basyir*	Direktur Keuangan	7 dari 9
Priyantono Rudito*	Direktur Human Capital & General Affair	8 dari 9
Rizkan Chandra*	Direktur Network & Solution	8 dari 9
Sukardi Silalahi*	Direktur Konsumer	9 dari 9
Ririek Adriansyah*	Direktur Compliance & Risk Management	8 dari 9
Indra Utoyo	Direktur IT Solution & Strategic Portfolio	11 dari 13

* sejak tanggal 11 Mei 2012

6. *Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris*

Sepanjang tahun 2012, Telkom melaksanakan beberapa program pelatihan peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Program	Lokasi	Tanggal
Jusman Syafii Djamal	*Update* Perkembangan Teknologi	Stockholm, Swedia	2 – 8 Oktober 2012
	Assessment GCG	Jakarta, Indonesia	6 November 2012
Johnny Swandi Sjam	*Mobile World Congress* 2012	Barcelona, Spanyol	27 Februari – 1 Maret 2012
	National Association of Broadcasters ("NAB") *Show* 2012	Las Vegas, Amerika Serikat	16 – 19 April 2012
	Update Perkembangan Teknologi	Stockholm, Swedia	2 – 8 Oktober 2012
	Assessment GCG	Jakarta, Indonesia	6 November 2012
Virano Gazi Nasution	*Assessment* GCG	Jakarta, Indonesia	6 November 2012

7. Assessment Terhadap Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Secara keseluruhan, RUPS merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris Telkom, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam tahun yang bersangkutan.

Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012 dilakukan dalam RUPS Telkom yang akan diselenggarakan di tahun 2013.

Assessment GCG Terhadap Dewan Komisaris

Telkom juga melakukan *Assessment* atas kinerja implementasi GCG oleh Dewan Komisaris sebagai salah satu Organ GCG. Proses *Assessment* dilakukan oleh IICG sebagai pihak independen yang melakukan pemeringkatan CGPI atas Telkom. Terdapat 13 aspek penerapan GCG yang dinilai dalam rangka mewujudkan bisnis yang beretika, bermartabat dan bertanggung jawab secara berkeadilan, yaitu aspek komitmen, kesungguhan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, kerja sama, visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta etika bisnis dan budaya risiko.

Atas *Assessment* GCG ini, Telkom meraih predikat "*The Most Trusted Company*".

8. Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.

9. Alamat Dewan Komisaris

Alamat resmi Dewan Komisaris Telkom adalah Grha Citra Caraka, Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710, Indonesia.

C. Direksi

1. Struktur Direksi

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Untuk dapat dipilih, calon Direktur harus diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Setiap Direktur Telkom memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan, kecuali jika masa jabatan akhir jatuh bukan pada hari kerja. Jika hal itu terjadi, maka masa akhir jabatan jatuh pada hari berikutnya. Pemegang saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Per tanggal 31 Desember 2011, struktur Direksi Telkom terdiri dari 8 (delapan) Direktur, yaitu:

1. **Rinaldi Firmansyah**, Direktur Utama (CEO)
2. **Sudiro Asno**, Direktur Keuangan (CFO)
3. **Faisal Syam**, Direktur Human Capital & General Affairs
4. **Ermady Dahlan**, Direktur Network & Solution (Pejabat pelaksana COO)
5. **I Nyoman G Wiryanata**, Direktur Konsumer
6. **Arief Yahya**, Direktur Enterprise & Wholesale
7. **Prasetio**, Direktur Compliance & Risk Management
8. **Indra Utoyo**, Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio (CIO)

Pada tanggal 11 Mei 2012, RUPST Telkom telah menyetujui perubahan pada komposisi Direksi Perusahaan. Dengan demikian, per tanggal 31 Desember 2012, struktur Direksi Telkom terdiri dari 8 (delapan) Direktur, yaitu:

1. **Arief Yahya**, Direktur Utama (CEO)
2. **Indra Utoyo**, Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio
3. **Honesti Basyir**, Direktur Keuangan (CFO)
4. **Priyantono Rudito**, Direktur Human Capital & General Affairs
5. **Sukardi Silalahi**, Direktur Konsumer
6. **Rizkan Chandra**, Direktur Network & Solution
7. **Muhammad Awaluddin**, Direktur Enterprise & Wholesale
8. **Ririek Adriansyah**, Direktur Compliance & Risk Management

2. Lingkup dan Tugas Utama Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, secara garis besar tanggung jawab utama Direksi Telkom adalah memimpin dan mengelola operasional Perusahaan serta mengendalikan dan mengelola aset-aset Telkom dengan pengawasan dari Dewan Komisaris.

Direksi juga berhak untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas hal atau kejadian apapun, dengan pihak lain.

Tugas pokok masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

a. *Direktur Utama*
   - Mengoordinasikan fungsi-fungsi *corporate* untuk hal-hal yang terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi, pengendalian *infrastructure*, IT dan *solution* dalam rangka dukungan operasi bisnis untuk mengeksploitasi bisnis/ *services* yang sudah "*established*", dan pengendalian risiko, serta *interfacing with external constituent*;
   - Mengendalikan fungsi perencanaan strategis dalam lingkup Telkom Group dan mengarahkan upaya pertumbuhan dengan fokus pada bisnis baru (non-organik);
   - Mengendalikan operasional *corporate* dengan fokus *driving new business, entering/developing new market* serta internasionalisasi/regionalisasi;
   - Mengendalikan fungsi-fungsi keuangan *human capital* dan *compliance & risk management*;
   - Mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi *enterprise support* yang terkait dengan *corporate communication & affair* dan fungsi *internal audit* serta pengendalian kebijakan pengelolaan *community development*;
   - Mengintegrasikan dan mengnyinergikan kebijakan serta penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran Perusahaan;
   - Mengintegrasikan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Direksi;
   - Mengendalikan implementasi strategi bisnis;
   - Mengangkat dan memberhentikan pemangku jabatan pada posisi tertentu sesuai dengan peraturan manajemen karir yang ditetapkan;
   - Melaporkan secara periodik kinerja Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan publik; dan
   - Direksi dalam menjalankan fungsinya berkoordinasi dan mengendalikan pengelolaan bisnis Telkom yang diselenggarakan melalui entitas anak yang perumusannya dilaksanakan dalam Dewan Eksekutif Telkom Group.

b. *Direktur IT, Solution & Strategic Portofolio ("ITSS")*
   - Mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi *corporate planning, strategic business development* dan inovasi Perusahaan untuk kepentingan sinergi bisnis dalam lingkup Telkom Group; dan
   - Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan operasional fungsi pada unit operasi, maka Direktur ITSS mengendalikan unit operasi Divisi Solution Convergence Center ("DSC") dan Innovation & Design Center ("IDe Center").

c. *Direktur Keuangan ("KEU")*
   - Mengelola dan mengendalikan keuangan Perusahaan (fungsi *Chief Financial Officer*) untuk kepentingan sinergi bisnis dalam lingkup Telkom Group dan operasional fungsi keuangan Telkom secara terpusat; dan
   - Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan operasional fungsi keuangan pada unit operasi Telkom, maka Direktur KEU mengendalikan Unit Finance Billing & Collection Center ("FBCC").

d. *Direktur Human Capital & General Affairs ("HCGA")*
   - Mengelola penyelenggaraan fungsi *human capital management, business performance* management, *supply management* dan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk melakukan fungsi koordinasi di lingkungan Telkom Group, serta mengendalikan operasional unit bisnis yang ada di bawahnya; dan
   - Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan operasional fungsi pada unit operasi, maka Direktur HCGA mengendalikan unit Human Capital Center ("HC Center"), Human Resource Assessment Service ("HRAS"), Management Consulting Center ("MCC"), Community Development Center ("CDC"), dan Corporate University ("CorpU").

e. *Direktur Network & Solution ("NWS")*
   - Mengelola penyelenggaraan fungsi *infrastructure, IT and solution* dalam rangka dukungan operasi bisnis untuk mengeksploitasi bisnis yang sudah "*established*" dalam satu manajemen yang fokus dan terintegrasi pada lingkup Telkom Group; dan
   - Memastikan efektivitas penyelenggaraan operasional fungsi pada unit operasi, maka Direktur NWS mengendalikan unit operasi

yaitu, Divisi Infrastruktur Telekomunikasi ("Div Infratel"), Divisi Access ("DIVA"), Divisi Broadband ("DBB"), Divisi Wireless Broadband ("DWB"), Maintenance Service Center ("MSC") dan Information Service Center ("ISC").

f. *Direktur Consumer*
- Mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi *delivery channel* dan *customer management* pelanggan *retail* serta fungsi pengelolaan *fixed wireless* termasuk fungsi koordinasi dengan Telkom Group; dan
- Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan operasional fungsi pada unit operasi, maka Direktur Consumer mengendalikan Divisi Consumer Services Barat dan Timur.

g. *Direktur Enterprise & Wholesale ("EWS")*
- Mengelola, mengendalikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan fungsi *delivery channel* dan *customer management* pada pelanggan *enterprise* dan *Small Medium Enterprise* ("SME") termasuk fungsi koordinasi di lingkungan Telkom Group; dan
- Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan operasional fungsi pada unit operasi, maka Direktur EWS mengendalikan Divisi Enterprise Service ("DES") dan Divisi Business Service ("DBS").

h. *Direktur Compliance & Risk Management ("CRM")*
- Mengelola dan mengendalikan proses dan aktivitas bisnis Perusahaan agar dapat berjalan efektif dan efisien, *complies* terhadap seluruh *legal requirement* yang relevan dan regulasi yang berlaku serta antisipatif terhadap *threats & risks* yang dapat menghambat kelangsungan kegiatan bisnis dan eksistensi Perusahaan, termasuk melakukan fungsi koordinasi di lingkungan Telkom Group;
- Mengelola unit Legal & Compliance, Manajemen Risiko Perusahaan dan Business Effectiveness, Security & Safety dan Unit Supply Center ("SUC"); dan
- Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan operasional fungsi pada unit operasi, maka Direktur CRM mengendalikan Divisi Wholesale Service ("DWS").

3. Piagam Direksi

Dalam hal aktivitas dan tindakan dalam pengurusan Perusahaan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan Perundang-undangan, maka dilakukan prosedur yang tetap menjunjung prinsip akuntabilitas melalui kesepakatan, persetujuan dan atau pengaturan antar anggota Direksi. Piagam Direksi bertujuan untuk efisiensi dan percepatan proses pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi dalam tata kelola administrasi pengurusan Perusahaan, dan mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja. Di dalam Piagam ini juga diatur mekanisme hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan hubungan kelembagaan dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan dalam peran pengurusan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kebijakan Remunerasi Direksi

Setiap Direktur berhak atas gaji bulanan dan tunjangan lain (termasuk tunjangan pensiun). Di samping itu Direktur juga mendapatkan bagian tantiem atas kinerja dan pencapaian perusahaan yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Bonus dan insentif dianggarkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diusulkan kepada pemegang saham dalam forum RUPST.

5. Prosedur Penentuan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab membuat formula gaji Direksi. Formula yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Formula yang telah ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan disetujui oleh rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kemudian diajukan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 9 Mei 2003, Dewan Komisaris ditugaskan untuk menentukan formula besaran tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dengan mengacu pada hasil telaah konsultan independen. Setelah hasil telaah independen tersebut dibahas dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyusun formula yang berlaku sejak 1 Januari 2003. Besaran tunjangan dan gaji Direksi yang ditentukan oleh Dewan Komisaris tersebut kemudian dilaporkan kepada pemegang saham Dwiwarna dalam RUPST pada tanggal 24 Juni 2005.

Sesuai peraturan yang berlaku maka gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dilaporkan kepada otoritas pasar modal dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tabel Remunerasi Direksi di Tahun 2012

(dalam juta Rupiah)

Direksi	Gaji	Tantiem	Asuransi	Tunjangan Lainnya	Jumlah
Arief Yahya	2.154,1	3.310	120,9	2.418,8	8.003,8
Indra Utoyo	2.025,5	3.310	113,5	1.865,5	7.314,6
Honesti Basyir	1.157,4	-	66,2	1.443,3	2.666,9
Priyantono Rudito	1.157,4	-	66,2	1.463,4	2.687,0
Ririek Adriansyah	1.157,4	-	66,2	1.354,7	2.578,3
Muhammad Awaluddin	1.157,4	-	66,2	1.373,8	2.597,5
Rizkan Chandra	1.157,4	-	66,2	1.819,7	3.043,3
Sukardi Silalahi	1.157,4	-	66,2	1.353,2	2.576,8
Rinaldi Firmansyah*	964,5	3.678	6.752	988,2	12.382,1
Ermady Dahlan*	868,1	3.310	6.076	674,4	10.928,9
Faisal Syam*	868,1	3.310	6.076	705,5	10.960,0
I Nyoman G Wiryanata*	868,1	3.310	6.076	951,9	11.206,4
Sudiro Asno*	868,1	3.310	6.076	793,5	11.048,0
Prasetio*	868,1	3.310	6.076	702,0	10.956,3

*) sampai dengan 11 Mei 2012

6. *Rapat Direksi*

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama namun kedudukannya dapat digantikan oleh Direktur lainnya apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena alasan apapun.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya sepersepuluh atau lebih dari jumlah saham biasa yang beredar.

Pengambilan keputusan rapat Direksi berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilaksanakan berdasarkan atas pengambilan suara mayoritas dari anggota Direksi yang hadir. Kuorum rapat dicapai apabila lebih dari setengah dari anggota Direksi hadir atau diwakili dengan sah secara hukum dalam rapat tersebut. Setiap anggota Direksi yang hadir memiliki satu suara (dan satu suara untuk setiap Direktur lainnya yang diwakili).

Pada tahun 2012 rapat Direksi dilaksanakan sebanyak 48 kali.

Tabel Kehadiran Rapat Direksi:

Direksi	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Rinaldi Firmansyah	Direktur Utama	17 dari 18
Sudiro Asno	Direktur Keuangan	15 dari 18
Faisal Syam	Direktur Human Capital & General Affairs	18 dari 18
Ermady Dahlan	Direktur Network & Solution	16 dari 18
I Nyoman G Wiryanata	Direktur Konsumer	18 dari 18
Prasetio	Direktur Compliance & Risk Management	13 dari 18
Arief Yahya	Direktur Utama	47 dari 48
Indra Utoyo	Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio	47 dari 48
Honesti Basyir*	Direktur Keuangan	25 dari 30
Priyantono Rudito*	Direktur Human Capital & General Affair	29 dari 30
Sukardi Silalahi*	Direktur Konsumer	28 dari 30
Muhammad Awaluddin*	Direktur Enterprise & Wholesale	29 dari 30
Ririek Adriansyah*	Direktur Compliance & Risk Management	29 dari 30
Rizkan Chandra*	Direktur Network & Solution	28 dari 30

* sejak tanggal 11 Mei 2012

7. *Program Peningkatan Kompetensi Direksi*

Selama tahun 2012, anggota Direksi tercatat mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi dan seminar, baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara, dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi.

Tabel Peningkatan Kompetensi Direksi:

Nama	Program	Lokasi	Tanggal
Arief Yahya	*Benchmark* bisnis media (digital media & IPTV) di BesTV	Shanghai, Cina	15-18 Oktober 2012
	Forum Kepemimpian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")*	Jakarta, Indonesia	22 Mei 2012
	Forum Human Capital Indonesia ("FHCI")*	Bandung, Indonesia	22 Juni 2012
	*Asean Latin Business Forum**	Jakarta, Indonesia	9 - 10 Juli 2012
	Seminar Nasional *Broadband Economy**	Jakarta, Indonesia	11 Desember 2012
	Markplus Conference 2012*	Jakarta, Indonesia	13 Desember 2012
	Program Sekolah Staf Pimpinan BI*	Jakarta, Indonesia	26 Juli 202
	PR Summit 2012*	Yogyakarta, Indonesia	4 Desember 202
Indra Utoyo	*Benchmark* bisnis vertikal (transportasi, kesehatan, logistik)	India	12-14 April 2012
	Benchmark bisnis media (digital media & IPTV) di BesTV	Shanghai, Cina	15-18 Oktober 2012
	Digital Asia Executive Brainstorming Innovation Forum	Singapura	4-5 Desember 2012
	Benchmark ke *head quarter e-Bay* Asia Pasific, *Benchmark* operasional bisnis *e-commerce*	Seoul, Korea	6-7 Desember 2012
	Bali Annual Telkom International ("BATIC") 2012*	Bali, Indonesia	10-13 Juli 2012
	*Markplus Conference 2012**	Jakarta, Indonesia	13 Desember 2012
Honesti Basyir	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern ("FKSPI")*	Bali, Indonesia	2-5 Juli 2012
Priyantono Rudito	Forum Asia *Organizational Culture Summit* 2012	Johor Baru, Malaysia	18-19 November 2012
	BUMN Marketing Day 2012*	Jakarta, Indonesia	20 Juni 2012
	Seminar Nasional 'Menyelamatkan Ekonomi Indonesia dengan Ekonomi Berbasis Pengetahuan'*	Bandung, Indonesia	3 November 2012
	Conferences & Exhibitions 7th HR EXPO 2012*	Jakarta, Indonesia	11-12 Desember 2012
Sukardi Silalahi	Pertemuan BUMN Marketeers di PT Garuda Indonesia*	Jakarta, Indonesia	29 Juni 2012
	Pertemuan BUMN Marketeers di PT Hutama Karya*	Jakarta, Indonesia	19 Oktober 2012
	Pertemuan BUMN Marketeers di PT PP*	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2012
Muhammad Awaluddin	CIO *Summit* 2012 by Fairfax Business Media & IDC Asia/Pacific	Singapura	2 Agustus 2012
	Business Ecosystem Workshop by Frost & Sullivan	Sydney, Australia	20-25 September 2012
	KIN Asean Forum - CMO by Kellogs- CMO Club	Jakarta, Indonesia	12 Desember 2012
	Rakernas IMA (Indonesia *Marketeers Association*)*	Bali, Indonesia	26 Oktober 2012
Ririek Adriansyah	Seminar Capacity Asia 2012: *Increasing Regional Connectivity*	Bangkok, Thailand	28-29 November 2012
Rizkan Chandra	*Benchmark* Wifi *Implementation in South Korea*	Korea Selatan	16-19 Juli 2012
	Benchmark China Mobile, China Unicom & China Telecom	Beijing, China	24-25 September 2012
	Sharing Session with Biel Wiggenhorn	Bandung, Indonesia	28 September 2012
	Benchmark Cisco Executive Briefing Center	London, Inggris	20-23 November 2012
	*Markplus Conference 2012**	Jakarta, Indonesia	13 Desember 2012

*) Direksi sebagai Pembicara dalam Seminar/Workshop/Konferensi/Pelatihan

8. *Assessment Terhadap Kinerja Anggota Direksi*

a. *Proses Pelaksanaan Assessment atas Kinerja Anggota Direksi*

Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun oleh RUPS, dengan mengacu pada pencapaian KPI Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, pencapaian realisasi atas RKAP.

Pencapaian KPI Direksi yang dijadikan acuan penilaian oleh Dewan Komisaris, diperoleh setelah melalui proses penetapan internal. *Assessment* atas kinerja Direksi diinisiasi dengan pengisian realisasi Kontrak Manajemen ("KM") secara *online* dan dilengkapi oleh Unit Business Performance Evaluation ("BPE") sebagai Tim Evaluator yang ditindaklanjuti dengan pertemuan tatap muka untuk proses klarifikasi dan penetapan nilai akhir kinerja yang kemudian disampaikan kepada Komite Kinerja dan Direktur Utama untuk penetapan final dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tahun 2012, kinerja Direksi juga dinilai oleh Tim yang ditunjuk Kementrian BUMN untuk menilai keunggulan kinerja perusahaan mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul ("KPKU") BUMN. KPKU tidak lain adalah kriteria penilaian keunggulan kinerja berbasis *Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellence* ("MBCFPE"), pada penilaian ini Telkom dinilai telah mencapai level "*Emerging Industry Leader*". Pencapaian penilaian ini termasuk pencapaian tertinggi diantara BUMN yang lain dan merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama oleh perusahaan yaitu sejak tahun 2000 perusahaan dan unit bisnis/divisi yang menerapkan dan menilai keunggulan kinerjanya mengacu pada kriteria MBCFPE.

b. *Kriteria yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Assessment atas Kinerja Anggota Direksi*

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan *assessment* atas kinerja direksi adalah berbasis *balance scorecard* dengan pengukuran 4 aspek utama yaitu *Financial, Customer, Internal Business Process* dan *Learning and Growth* dan mengandung 3 KPI yaitu *shared* KPI, *common* KPI dan *specific* KPI. *Shared* KPI merupakan KPI dengan penamaan, target, realisasi dan pencapaian yang sama untuk seluruh Direksi. *Common* KPI adalah KPI dengan penamaan dan target yang sama, namun realisasi dan pencapaian yang berbeda untuk setiap Direksi. *Specific* KPI adalah KPI yang berbeda untuk masing-masing Direksi dan merupakan program yang spesifik yang menjadi tugas utama dan prioritas masing-masing Direktur dan Direktorat yang dipimpinnya.

c. *Pihak yang Melakukan Assessment*

Pihak internal yang melakukan *assessment* atas kinerja Kontrak Manajemen Direksi adalah Komite Kinerja dan Direktur Utama setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Unit BPE Direktorat HCGA. Secara keseluruhan, penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

d. *Assessment GCG Terhadap Direksi*

Telkom juga melakukan *assessment* atas kinerja implementasi GCG oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Proses *assessment* dilakukan oleh IICG sebagai pihak independen yang melakukan pemeringkatan CGPI atas Telkom. Terdapat 13 aspek penerapan GCG yang dinilai dalam rangka mewujudkan bisnis yang beretika, bermartabat dan bertanggung jawab secara berkeadilan, yaitu aspek komitmen, kesungguhan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, kerja sama, visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta etika bisnis dan budaya risiko.

Atas *assessment* GCG ini, Telkom meraih predikat "*The Most Trusted Company*".

Komitmen dan Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam proses Assessment GCG "Corporate Governance Perception Index, 6 November 2012"

D. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

1. *Komite Audit*

Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat *Audit Committee Charter* yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. *Audit Committee Charter* dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan OJK dan SEC serta peraturan terkait lainnya. Terakhir, *Audit Committee Charter* ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No.11/KEP/DK/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit Telkom Group. Selama tahun 2012 tidak ada perubahan peraturan yang terkait dengan Komite Audit kami yang mengharuskan kami untuk melakukan amandemen terhadap *Audit Committee Charter* tersebut.

a. *Profil Komite Audit*

Telkom memiliki Komite Audit yang terdiri dari enam anggota: dua Komisaris Independen, satu Komisaris dan tiga anggota eksternal independen yang tidak terafiliasi dengan Telkom.

Pada tahun 2012 terdapat perubahan komposisi keanggotaan Komite Audit. Sampai dengan 11 Mei 2012, susunan Komite Audit terdiri dari; (i) Rudiantara (Komisaris Independen - ketua); (ii) Salam (Sekretaris); (iii) Johnny Swandi Sjam (Komisaris Independen); (iv) Bobby A.A. Nazief (Komisaris); (v) Sahat Pardede; dan (vi) Agus Yulianto. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Mei 2012 memutuskan untuk tidak melanjutkan masa tugas Rudiantara dan Bobby A.A. Nazief.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2012 dan sampai saat ini terdiri dari:

Keanggotaan	Nama
Ketua	Johnny Swandi Sjam
Sekretaris	Salam
Anggota	Virano Gazi Nasution
	Parikesit Suprapto
	Sahat Pardede
	Agus Yulianto

Di bawah ini adalah profil ringkas dari masing-masing anggota Komite Audit:

Johnny Swandi Sjam - Komisaris Independen
Sebagai Ketua Komite Audit, Johnny Swandi Sjam bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas tiap anggota Komite Audit.

Salam - Sekretaris/Anggota
Salam bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas anggota Komite Audit, melakukan korespondensi, menyiapkan dokumentasi, menyiapkan Laporan Tahunan Komite Audit dan mengoordinasikan proses seleksi auditor independen.

Salam adalah akuntan bersertifikat dan berpengalaman dalam bidang *auditing*, akuntansi dan keuangan. Antara tahun 1974 dan 1989, beliau adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau juga pernah menjabat sebagai AVP Divisi Pengembangan Usaha PT Rajawali Wirabhakti Utama, Kepala Corporate Control Unit PT Pabrik Rokok Cap Bentoel dan Direktur Keuangan PT Telekomindo Primakarya. Beliau meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan Jakarta.

Parikesit Suprapto – Komisaris
Parikesit Suprapto bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tata kelola perusahaan serta memantau peraturan pasar modal dan perundangan lainnya yang terkait dengan operasi Perusahaan.

Virano Gazi Nasution – Komisaris Independen
Virano Gazi Nasution bertugas untuk mengawasi dan memantau teknologi informasi Perusahaan.

Sahat Pardede – Anggota
Sahat Pardede bertugas untuk mengawasi dan memantau proses *integrated audit*, proses konsolidasi laporan keuangan, penerapan standar akuntansi keuangan, dan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan ("ICOFR").

Sahat Pardede adalah akuntan publik bersertifikat dan *managing partner* di Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat & Rekan. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dan keahlian di bidang *auditing* dan akuntansi keuangan dan pengendalian internal sesuai dengan SOA Seksi 404. Pada tahun 1981 hingga 2000, beliau adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau meraih gelar sarjana bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta dan meraih gelar Master bidang *Business Administration* dari Universitas Saint Mary di Halifax, Kanada.

Agus Yulianto – Anggota
Agus Yulianto bertugas untuk mengawasi dan memantau efektivitas manajemen risiko (khususnya risiko-risiko pelaporan keuangan) yang dilaksanakan Direksi, memantau kemungkinan terjadinya kecurangan dan/atau penyimpangan yang berpotensi merugikan Perusahaan dan penanganan pengaduan.

Agus Yulianto adalah akuntan bersertifikat dan berpengalaman dalam bidang *auditing*, akuntansi dan keuangan. Antara tahun 1983–1999, beliau adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau juga pernah bekerja sebagai konsultan senior pada Jakarta Iniative Task Force, *procurement audit specialist* untuk proyek-proyek yang didanai Bank Dunia. Sebelum ditunjuk sebagai anggota Komite Audit, beliau bekerja di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Ketua

Tim Financial Management Specialist untuk sebuah proyek di Aceh yang dikelola oleh Bank Dunia dan didanai Multi Donor Fund. Beliau meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta dan meraih gelar Master bidang akuntansi dari Universitas Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.

b. *Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit*
Audit Committee Charter secara garis besar memuat tujuan, fungsi dan tanggung jawab Komite Audit.
Berdasarkan *Charter* ini Komite Audit bertanggung jawab untuk:
- Mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan atas nama Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal;
- Mendiskusikan dengan auditor internal dan eksternal semua lingkup pekerjaan, baik pekerjaan audit dan *non*-audit serta rencana audit mereka;
- Menelaah laporan keuangan konsolidasian Telkom serta efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan ("ICOFR");
- Mengadakan rapat secara berkala dengan auditor internal dan eksternal, tanpa kehadiran manajemen, masing-masing untuk membahas hasil evaluasi dan hasil audit mereka atas pengendalian internal Telkom serta kualitas laporan keuangan Telkom secara keseluruhan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam bidang yang terkait dengan akuntansi dan keuangan, serta kewajiban lain yang diharuskan oleh SOA.

Selain itu, Komite Audit juga bertugas untuk menerima dan menangani pengaduan. Untuk membantu tugas-tugasnya, Komite Audit dapat menunjuk konsultan independen atau penasihat profesional.

c. *Independensi Komite Audit*
Peraturan OJK tentang Komite Audit mensyaratkan bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, sementara dua anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian (dalam konteks *Item* 16A dari *Form* 20 F) dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan. Agar memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, anggota eksternal Komite Audit:
- Bukan pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa *non*-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
- Bukan sebagai pejabat eksekutif kami dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
- Tidak boleh terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas;
- Tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi;

- Tidak boleh memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, saham Perusahaan; dan
- Tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun yang terkait dengan bisnis Perusahaan.

d. *Ahli Keuangan Komite Audit*
Dewan Komisaris telah menetapkan Sahat Pardede, anggota Komite Audit, memenuhi kualifikasi sebagai Ahli Keuangan dan Akuntansi Komite Audit seperti yang diuraikan pada *Item* 16A *Form* 20-F, dan sebagai anggota "independen" sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 10A-3 dari *Exchange Act*. Sahat Perdede telah menjadi anggota Komite Audit sejak Februari 2004. Sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit, dan sampai saat ini, beliau berpraktik sebagai Akuntan Publik Bersertifikat di Indonesia yang menyediakan jasa audit dan jasa keuangan lainnya kepada sejumlah perusahaan swasta dan lembaga-lembaga publik. Beliau juga adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.

e. *Kebijakan dan Prosedur Pre-Approval Komite Audit*
Telkom menerapkan kebijakan dan prosedur *Pre-Approval* yang mensyaratkan bahwa semua jasa *non*-audit yang akan diberikan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen, sebagaimana ditetapkan dalam *Audit Committee Charter*, harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Komite Audit. Berdasarkan *Charter* tersebut, jasa *non*-audit mungkin dapat diperkenankan untuk dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen dengan ketentuan bahwa: (i) Direksi harus menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian jasa *non*-audit yang akan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen; dan (ii) Komite Audit akan memutuskan apakah jasa *non*-audit yang diajukan akan memengaruhi independensi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen atau akan menimbulkan benturan kepentingan.

Konsisten dengan *Section* 10(i)(1)(B) dari *Exchange Act* paragraf (c) (7) (i) (C) dari *Rule* 2-01 *Regulation* S-X yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang tersebut, *Audit Committee Charter* memberikan pengecualian untuk persyaratan *Pre-Approval* atas jasa *non*-audit yang diperkenankan, apabila (i) jumlah seluruh biaya jasa *non*-audit tersebut tidak lebih dari lima persen dari jumlah biaya audit yang dibayarkan oleh Telkom kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen selama tahun buku dimana jasa tersebut diberikan atau (ii) jasa yang diajukan tidak dianggap sebagai jasa *non*-audit pada saat perjanjian untuk melaksanakannya ditandatangani. Selain dari kedua hal tersebut, pelaksanaan jasa *non*-audit harus disetujui lebih dulu oleh seorang anggota Komite Audit yang telah mendapat pelimpahan wewenang untuk memberikan *pre-Approval* dari Komite Audit atau langsung oleh Komite Audit.

Laporan Komite Audit

Berikut ini adalah laporan kegiatan Komite Audit untuk tahun buku 2012:

Auditor Independen dan Independensi Auditor

Pada tahun 2012 Telkom melakukan pergantian auditor independen dari KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan, *member firm of* PricewaterhouseCoopers global network ("PwC") kepada KAP Purwantono, Suherman & Surja, *member firm of* Ernst & Young Global Limited ("E&Y"). Penunjukan E&Y sebagai auditor independen untuk melaksanakan integrated audit tahun buku 2012 telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Mei 2012.

Komite Audit telah menelaah dan membahas dengan E&Y yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat dan pendapat mereka mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kualitas dan akseptabilitas dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan. Penelaahan dan pembahasan Komite Audit juga menyangkut hal-hal yang harus didiskusikan dengan Komite Audit sesuai standar *auditing* mengenai komunikasi dengan Komite Audit, standar dari Public Company Accounting Oversight Board ("PCAOB"), Peraturan OJK dan SEC serta peraturan lain yang berlaku, harus didiskusikan dengan Komite Audit. Selain itu, Komite Audit juga telah mendiskusikan dengan E&Y mengenai independensi Kantor Akuntan Publik terhadap Manajemen Perusahaan dan terhadap Perusahaan sendiri termasuk hal-hal yang tercantum dalam surat E&Y, seperti yang diwajibkan menurut Peraturan PCAOB 3526, *Communication with Audit Committee Concerning Independence* dan mempertimbangkan pengaruh dari jasa-jasa *non-*audit dari Kantor Akuntan Publik. Komite Audit telah menerima surat dari E&Y yang memberikan penjelasan, seperti yang diwajibkan menurut peraturan PCAOB 3526, mengenai semua hubungan antara E&Y dengan Perusahaan yang menurut pertimbangan profesional mereka dapat dianggap mengganggu independensi. E&Y telah mendiskusikan independensinya dengan Komite Audit dan telah memberikan konfirmasi melalui suratnya tersebut bahwa, menurut pertimbangan profesional mereka, E&Y adalah independen terhadap Perusahaan.

Integrated Audit

- Komite Audit telah menelaah laporan manajemen mengenai evaluasi manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan dan laporan E&Y mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komite Audit juga telah membahas *significant deficiencies* yang diidentifikasi selama proses evaluasi dan proses audit dengan manajemen dan E&Y serta rencana manajemen untuk meremediasi kelemahan-kelemahan pengendalian internal atas pelaporan keuangan tersebut.
- Komite Audit telah membahas dengan internal auditor Perusahaan dan E&Y mengenai seluruh lingkup dan rencana audit mereka. Komite Audit telah mengadakan rapat-rapat dengan internal auditor dan E&Y, tanpa kehadiran manajemen, untuk membahas hasil pemeriksaan dan hasil evaluasi mereka terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan serta kualitas pelaporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

Komite Audit juga telah menelaah dan mendiskusikan laporan keuangan konsolidasian auditan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dalam Laporan Tahunan (*Form* 20F) dengan manajemen Perusahaan. Diskusi ini mencakup kualitas dan akseptabilitas standar akuntansi keuangan yang diterapkan Perusahaan, kelayakan *accounting judgement* yang signifikan dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Manajemen telah mengonfirmasikan kepada Komite Audit bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut:

(i) merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disajikan dengan penuh integritas serta objektif; dan

(ii) telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan tersebut, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris telah menyetujui agar laporan keuangan konsolidasian auditan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian serta evaluasi manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan untuk disertakan ke dalam *Annual Report on Form* 20F yang akan dilaporkan Perusahaan kepada US SEC.

Whistleblower

- Komite Audit telah menyusun prosedur untuk menerima dan menangani pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal dan *auditing*, termasuk prosedur untuk menjaga kerahasiaan, pengaduan tanpa nama yang disampaikan karyawan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 dan *Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section* 301 tentang *Public Company Audit Committee*.
- Berkaitan dengan manajemen risiko perusahaan, Komite Audit juga mengawasi dan memonitor risiko kecurangan dan risiko-risiko pelaporan keuangan yang mungkin berdampak material pada laporan keuangan.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2012, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 30 kali. Rapat ini diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dalam *Audit Committee Charter* dan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi tiap anggota dan Komite Audit. Jumlah pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Rapat Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rudiantara**	20	15	75%
Johnny Swandi Sjam*	30	25	83%
Bobby A. A. Nazief**	20	14	70%
Parikesit Suprapto*	10	7	70%
Virano Gazi Nasution*	10	7	70%
Salam	30	29	97%
Sahat Pardede	30	30	100%
Agus Yulianto	30	30	100%

(*) Mulai tanggal 11 Mei2012
(**) Sampai dengan tanggal 11 Mei 2012

Jakarta, 26 Maret 2013

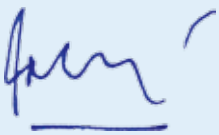

Johnny Swandi Sjam
Ketua Komite Audit

2. *Komite Nominasi dan Remunerasi*

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.003/KEP/DK/2005 tertanggal 21 April 2005 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

a. *Profil Komite Nominasi dan Remunerasi*

Berikut ini adalah susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2012.

Keanggotaan	Nama
Ketua	Jusman Syafii Djamal
Anggota	Hadiyanto
	Parikesit Suprapto
	Johnny Swandi Sjam
	Virano Gazi Nasution
Sekretaris/Anggota	Yuki Indrayadi

Jusman Syafii Djamal - Ketua/Komisaris

Jusman Syafii Djamal merupakan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan bertanggung jawab terhadap pemberian arahan dan koordinasi pelaksanaan tugas Komite.

Hadiyanto - Komisaris

Hadiyanto merupakan anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan masukan yang berasal dari pihak yang berhubungan dengan pemegang saham pengendali terkait dengan isu nominasi dan remunerasi.

Parikesit Suprapto - Komisaris

Parikesit Suprapto merupakan anggota Komite dan bertanggung untuk mengoordinasikan masukan yang berasal dari pemegang saham pengendali terkait dengan isu nominasi dan remunerasi.

Johnny Swandi Sjam - Komisaris Independen

Johnny Swandi Sjam adalah anggota Komite dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan isu nominasi dan remunerasi dengan pihak manajemen dan pihak eksternal yang independen.

Virano Gazi Nasution - Komisaris Independen

Virano Gazi Nasution adalah anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan isu nominasi dan remunerasi dengan pihak manajemen dan pihak eksternal yang independen.

Yuki Indrayadi - Sekretaris Dewan Komisaris

Yuki Indrayadi adalah sekretaris merangkap sebagai anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengelola administrasi dan dokumentasi Komite.

b. *Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi*

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk:

- Mengembangkan sistem nominasi dan pemilihan bagi posisi strategis dalam Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan, antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan independensi;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memilih kandidat bagi posisi strategis di Perusahaan, yaitu satu level di bawah direktur, sebagaimana juga Direktur dan Komisaris pada entitas anak yang dikonsolidasi dengan kontribusi mencapai 30% atau lebih terhadap pendapatan konsolidasian Perusahaan, seperti Telkomsel. Khusus untuk Telkomsel, rekomendasi Komite dikonsultasikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;dan
- Merumuskan sistem remunerasi bagi Direksi berdasarkan perhitungan kewajaran dan kinerjanya.

c. *Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi*

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Nominasi adalah anggota yang tidak memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2012, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan terhadap hal-hal terkait nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Nominasi

Komite ini bertugas sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No.07/KEP/DK/2010 tertanggal 30 April 2010 terkait dengan penunjukan posisi strategis di Perusahaan, yaitu:

1. Mengisi posisi yang berada setingkat di bawah Direksi perusahaan atau Direksi pada entitas anak, Direksi harus berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.
2. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, untuk mengisi posisi Direksi dan Dewan Komisaris dalam entitas anak yang dikonsolidasi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian sebesar 30% atau lebih, Direksi Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2012, Komite telah menyampaikan masukan terkait dengan usulan pencalonan beberapa posisi strategis, yaitu: Head of Internal Audit serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Telkomsel. Komite juga memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kandidat-kandidat anggota Direksi Perseroan, yang pengusulannya oleh Dewan Komisaris merupakan permintaan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Remunerasi

Pada tahun 2012, Komite membantu Dewan Komisaris dalam menyiapkan usulan mengenai remunerasi anggota Direksi untuk diajukan kepada pemegang saham. Dengan dibantu oleh konsultan independen, bahan usulan remunerasi tersebut disusun berdasarkan *benchmark* terhadap remunerasi Direksi perusahaan-perusahaan telekomunikasi regional.

Secara umum, usulan remunerasi Direksi yang direkomendasikan Komite kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham, didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan semakin kompetitif dan semakin kompleksnya industri telekomunikasi serta posisi Telkom Group yang harus dipertahankan sebagai pemain utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia, maka pada tahun 2012 posisi Telkom selayaknya diapresiasi lebih tinggi, yaitu pada level P-75 (kwartil atas) pasar untuk *Total Reward* (yang terdiri dari gaji, bonus, serta seluruh komponen tunjangan dan fasilitas) bagi Direksinya, guna memberikan motivasi yang memadai bagi Direksi Telkom dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2012, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 kali.

Tabel Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
Jusman Syafii Djamal	11	11	100%
Johnny Swandi Sjam	11	11	100%
Virano Gazi Nasution*	5	3	60%
Parkesit Suprapto*	5	5	100%
Hadiyanto*	5	4	80%
Yuki Indrayadi	11	11	100%
Rudiantara**	6	5	83%
Mahmuddin Yasin*	6	5	83%
Bobby A. A. Nazief**	6	6	100%

(*) Mulai tanggal 11 Mei 2012
(**) Sampai dengan tanggal 11 Mei 2012

Jakarta, 26 Maret 2013

Jusman Syafii Djamal
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

3. *Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko*

Komite Evaluasi dan *Monitoring* Perencanaan dan Risiko atau "KEMPR" (sebelumnya Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko) dibentuk dengan mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No.04/KEP/DK/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (*charter*) KEMPR PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang merupakan perubahan dari Keputusan Dewan Komisaris No.06/KEP/DK/2006 tanggal 19 Mei 2006 jo. Keputusan Dewan Komisaris No.02/KEP/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009.

Tujuan pembentukan KEMPR di antaranya adalah untuk melakukan tinjauan atas rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja anggaran tahunan Perusahaan serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan kedua hal tersebut. Komite ini juga bertanggung jawab terhadap pemantauan pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan dan bertugas memberikan hasil tinjauan yang komprehensif sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam meninjau dan memantau proses pelaksanaan bisnis Perusahaan, penganggaran belanja modal serta penerapan manajemen risiko Perusahaan.

a. *Profil Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko*

Pada tahun 2012, susunan keanggotaan KEMPR berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.07/KEP/DK/2012 tanggal 28 Mei 2012 terdiri dari:

Keanggotaan	Nama
Ketua	Parikesit Suprapto
Sekretaris	Ario Guntoro
Anggota	Hadiyanto
	Johnny Swandi Sjam
	Virano Gazi Nasution
	Adam Wirahadi
	Widuri M. Kusumawati

Parikesit Suprapto - Komisaris

Parikesit Suprapto adalah ketua KEMPR dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan, mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas dari seluruh anggota Komite.

Ario Guntoro – Sekretaris/Anggota

Sebagai sekretaris KEMPR, Ario Guntoro bertugas mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas Komite dan penjadwalan pelaksanaan kerja Komite, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian *Corporate Strategic Scenario* ("CSS") dan *Capital Expenditure*.

Ario Guntoro adalah seorang profesional dengan pengalaman luas di bidang keuangan, investasi dan perbankan. Setelah berkecimpung di sektor perbankan swasta nasional mulai dari 1994 hingga 1999 sebagai Corporate Officer hingga Brand Manager, Ario Guntoro bekerja untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") mulai dari 1999 hingga 2004, dengan jabatan terakhir Assistant Vice President Divisi HIPA. Sebelum bergabung ke dalam KEMPR pada tahun 2004, bertugas sebagai penasihat khusus di PT ("Persero") PPA. Ario Guntoro meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993.

Hadiyanto – Komisaris

Sebagai anggota KEMPR, Hadiyanto, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi RJPP/CSS, implementasi RKAP dan implementasi *enterprise risk management* serta implementasi inisiatif pertumbuhan bisnis non-organik.

Johnny Swandi Sjam – Komisaris Independen
Sebagai anggota KEMPR, Johnny Swandi Sjam, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi RJPP/CSS, implementasi RKAP dan implementasi *enterprise risk management* serta implementasi inisiatif pertumbuhan bisnis non-organik.

Virano Gazi Nasution – Komisaris Independen
Sebagai anggota KEMPR, Virano Gazi Nasution, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi RJPP/CSS, implementasi RKAP dan implementasi *enterprise risk management* serta implementasi inisiatif pertumbuhan bisnis non-organik.

Adam Wirahadi – Anggota
Tugas utama Adam Wirahadi adalah melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko Perusahaan, pemantauan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Perundang-undangan dan evaluasi aspek legal dari tindakan-tindakan tertentu Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Sebelum bergabung dengan KEMPR pada tahun 2003, Adam Wirahadi bekerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai dari 1999-2000. Kemudian, pada tahun 2001-2003 menjadi peneliti/analis di sebuah LSM dan konsultan lingkungan usaha, staf ahli di DPR-RI pada tahun 2001-2002, dan anggota tim penyusun naskah akademik dan RUU pada beberapa kementerian pada tahun 2001-2003. Adam Wirahadi meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (1998) dan Hukum (2007) dari Universitas Indonesia.

Widuri Meintari Kusumawati – Anggota
Tugas utama Widuri Meintari Kusumawati adalah melakukan penilaian terhadap usulan RKAP yang diajukan manajemen dan memantau pencapaiannya serta memantau pertumbuhan usaha entitas anak.

Sebelum bergabung dengan KEMPR, Widuri M Kusumawati bekerja di Kementerian Keuangan (2000-2003) dan di sebuah bank swasta lokal (2003-2004). Widuri M. Kusumawati meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000.

b. *Tugas dan Tanggung Jawab Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko*
Lingkup tugas dari KEMPR adalah untuk:
- Menyampaikan laporan evaluasi atas usulan RJPP atau CSS dan RKAP yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan CSS dan RKAP;
- Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan CSS dan RKAP serta penerapan manajemen risiko Perusahaan; dan
- Memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko.

c. *Independensi Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko*
Seluruh anggota KEMPR (kecuali Parikesit Suprapto, Hadiyanto, Johnny Swandi Sjam dan Virano Gazi Nasution) merupakan anggota eksternal dan bersifat independen.

Laporan Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko

Sepanjang tahun 2012, KEMPR melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi CSS periode berjalan, implementasi RKAP 2012, implementasi anggaran belanja modal (capex) dalam RKAP 2012, analisis investasi pada entitas anak dan implementasi manajemen risiko perusahaan. Selain itu, KEMPR juga melakukan evaluasi atas usulan CSS tahun 2013-2017, usulan RKAP tahun 2013, serta tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Kegiatan KEMPR dalam tahun 2012:

1. ***Corporate Strategic Scenario ("CSS")***
   KEMPR memantau implementasi RJPP/CSS periode 2012-2016 khususnya yang terkait dengan tahun berjalan dan melakukan evaluasi atas usulan CSS untuk periode 2013-2017 yang menjadi dasar bagi pengembangan *Corporate Annual Message* ("CAM") 2013 dan RKAP tahun 2013. Sesuai pemutakhiran strategi secara berkala atas RJPP, maka CSS periode 2013-2017 merupakan pemutakhiran atas CSS periode 2012-2016 dengan dilakukannya penajaman pada beberapa *strategic initiatives* seperti layanan *broadband, wireless*, solusi ekosistem, investasi pada bisnis terkait yang dapat me-*leverage* aset, integrasi NGN dan OBCE dan membangun *center of excellence*, serta proyeksi keuangan periode 2013-2017.

2. ***Annual Business Budget Plan***
   Dalam menjalankan RKAP 2012, Dewan Komisaris menginstruksikan kepada Direksi agar pelaksanaan belanja modal memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan proses *procurement*. Selain itu, Dewan Komisaris meminta agar Direksi mengintensifkan eksplorasi pengembangan bisnis *information* media dan *edutainment*.

   Dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKAP tahun 2012, KEMPR antara lain fokus pada pemantauan upaya perseroan dalam melakukan akselerasi peningkatan pendapatan dari bisnis *new wave* dan mempertahankan kinerja bisnis *legacy*. Akselerasi pendapatan *new wave* mencakup *broadband, data communication* serta *information*, media, dan *edutainment*.

   Untuk pemantauan kinerja entitas anak, termasuk Telkomsel terdapat 4 (empat) entitas anak yang menjadi fokus *monitoring* di tahun 2012, yaitu: Indonusa, TelkomMetra dan Dayamitra. Pemantauan terhadap Telkomsel terutama pada penguatan bisnis *broadband* sebagai *new business* Telkomsel, serta efisiensi biaya. Terkait bisnis *broadband*, selain penggelaran infrastruktur, hal lain yang menjadi perhatian adalah formulasi bisnis model *broadband* yang tepat. Adapun pengkajian terhadap Indonusa sebagai *provider* televisi berbayar, difokuskan pada pencapaian target EBITDA dan *net income* sesuai target yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi Indonusa cukup berat, terutama dalam menguasai *market share*, serta mendayagunakan penguasaan pasar tersebut dalam keberhasilan pencapaian indikator kinerja finansial. Sedangkan pemantauan terhadap TelkomMetra menitikberatkan pada upaya efisiensi biaya, serta pengelolaan beberapa anak perusahaan agar mencapai target. Pemantauan terhadap Dayamitra menitikberatkan pada penggunaan *shareholder loan* yang disetujui dan persiapan pelaksanaan *strategic corporate action* terhadap Dayamitra.

   Dalam rangka mendapatkan hasil pemantauan yang lebih optimal, KEMPR melakukan beberapa kunjungan lapangan untuk memantau kemajuan pelaksanaan belanja modal dan perkembangan pencapaian RKAP. Kunjungan lapangan yang telah dilakukan KEMPR pada tahun 2012 mencakup kunjungan lapangan terhadap pembangunan Sumatera-Bangka *Cable System* ("SBCS") segmen pembangunan Pangkal Pinang-Muntok dan Palembang-Sungsang, pembangunan Metro-E *Node*-B untuk Telkomsel, pembangunan Tarakan-Tanjung Selor *Cable System* ("TSCS") dan pembangunan modernisasi jaringan akses melalui pola TITO. Selain itu juga dilakukan kunjungan lapangan yang berkaitan dengan *monitoring* kinerja regional terhadap unit-unit bisnis di ketujuh wilayah kerja Perseroan dan juga entitas anak yaitu PT Telkomsel, PT Dayamitra dan PT Infomedia.

3. ***Enterprise Risk Management (Manajemen Risiko Perusahaan/"ERM")***
   KEMPR bertugas melakukan pemantauan terhadap penerapan ERM pada tahun 2012 termasuk mengenai penanganan risiko-risiko yang berdampak signifikan terhadap RKAP 2012. Beberapa jenis risiko yang masuk dalam kategori *very high risk* dalam tahun 2012 yaitu Risiko Bisnis Flexi, Risiko Regulasi Menara, Risiko Regulasi SMS Premium dan Risiko Bisnis Speedy. KEMPR secara khusus memantau upaya-upaya mitigasi terhadap jenis-jenis risiko yang masuk dalam kategori *very high risk*. Sebagai catatan disampaikan bahwa perkembangan salah satu jenis risiko yang masuk dalam kategori *very high risk* yaitu risiko regulasi SMS Premium sangat tergantung pada faktor eksternal yaitu pencabutan Surat Edaran BRTI No.177/2011 dan revisi Permen Kominfo No.1/2009 tentang Jasa Pesan Premium. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi pada jenis risiko regulasi menara dengan terjadinya kecenderungan Pemda-pemda menerapkan perda/regulasi terkait menara telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh para operator telekomunikasi.

4. *Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris*

Selama tahun 2012, KEMPR melakukan kajian terhadap tindakan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris yang antara lain terdiri dari:

- Persetujuan pelaksanaan pembangunan Indonesia WiFi;
- Persetujuan *equity call* dan *shareholder loan* kepada Sigma;
- Persetujuan capex ISP 3rd *route*;
- Persetujuan *equity call* bagi Sigma untuk pembangunan data *center* lokasi Sentul;
- Persetujuan penganggaran capex pembangunan jaringan akses Metro-E untuk *Node*-B;
- Persetujuan pembentukan entitas anak baru; dan
- Persetujuan pemberian *equity call* dan *shareholder loan* bagi Mitratel.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya selama tahun 2012 KEMPR menghasilkan berbagai laporan dan kajian (evaluasi) dengan perincian sebagai berikut:

	CSS	RKAP		CAPEX		ERM	Aksi Korporasi (CA)
		2012	2013	2011	2012		
Laporan	5	13	0	16	0	8	0
Kajian/Evaluasi	2	1	1	5	1	7	5

Rapat Komite Evaluasi dan *Monitoring* Perencanaan dan Risiko

Selama 2012 KEMPR melaksanakan 23 kali rapat Komite yang terdiri atas:

- Sebelum RUPS Tahunan 2012 tanggal 11 Mei 2012 sebanyak 8 (delapan) kali rapat Komite dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko

Nama	Jumlah Rapat(*)				Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
	CSS	RKAP	ERM	CA		
Bobby A.A. Nazief	2	1	1	0	4	56%
Mahmuddin Yasin	2	0	0	0	2(**)	33%
Johnny Swandi Sjam	2	3	1	1	7	89%
Ario Guntoro	2	4	1	1	8	100%
Adam Wirahadi	2	4	1	1	8	100%
Widuri M. Kusumawati	2	4	1	1	8	100%

(*) Jumlah rapat tersebut diluar pelaksanaan 2 kali rapat internal.
(**) Terdapat Surat Kuasa atas ketidakhadiran Wakil Ketua.

- Sesudah RUPS Tahunan 2012 tanggal 11 Mei 2012 sebanyak 15 kali rapat komite dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Rapat Komite Evaluasi dan *Monitoring* Perencanaan Risiko

Nama	Jumlah Rapat(*)				Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
	CSS	RKAP	ERM	CA		
Parikesit Suprapto	0	9	2	1	12	81%
Hadiyanto	0	8	2	1	11	75%
Johnny Swandi Sjam	0	11	2	2	15	100%
Virano Gazi Nasution	0	8	2	1	11	75%
Ario Guntoro	0	11	2	2	15	100%
Adam Wirahadi	0	11	2	2	15	100%
Widuri M. Kusumawati	0	11	2	2	15	100%

(*) Jumlah rapat tersebut diluar pelaksanaan 1 kali rapat internal.

Jakarta, 26 Maret 2013

Parikesit Suprapto
Ketua KEMPR

E. Komite-komite di Bawah Direksi

1. Dasar Hukum Pembentukan

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perusahaan, Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atau persetujuan Direksi melalui komite-komite dibawah yang disebut Komite Eksekutif (*joint approval authority*) sebagai penjabaran dari Piagam Direksi. Keberadaan Komite Eksekutif diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan percepatan proses pengambilan keputusan Direksi sesuai objek masing-masing Komite.

Ketua dan anggota Komite Eksekutif adalah Direksi Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Eksekutif dapat memanggil sumber-sumber yang independen.

Keberadaan Komite Eksekutif berkembang dari waktu ke waktu sesuai dinamika bisnis dan organisasi yang terjadi. Direksi telah mengeluarkan Peraturan Perusahaan No.PD.608.00/r.00/HK.000/COP-D0030000/2011 yang berlaku sejak 28 Oktober 2011, yang menetapkan keberadaan Komite Ekskutif sebagai berikut:

a. Komite Etika dan SDM
b. Komite Treasury dan Keuangan
c. Komite Pengelolaan Anak Perusahaan
d. Komite Investasi
e. Komite Risiko, Kepatuhan dan Revenue Assurances
f. Komite Disclosure

2. Kebijakan Perusahaan mengenai Independensi Komite

Komite dibentuk oleh Direksi yang diberi kewenangan untuk memutuskan/menyetujui kebijakan/transaksi operasional yang memerlukan persetujuan paling sedikit 2 (dua) Direksi.

3. Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya tentang Rapat Komite

- Rapat Komite adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Komite dan persetujuan atau usul keputusan Komite Eksekutif dilakukan atau diberikan langsung pada saat pelaksanaan rapat Komite dan dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah anggota Komite.
- Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite atas tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite dapat dilakukan melalui Rapat Komite atau tanpa mengadakan rapat Komite (Keputusan Sirkuler) dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

4. Profil Anggota Komite Eksekutif

Anggota Komite Eksekutif adalah Direksi Perusahaan, untuk profil lengkap lihat bagian Profil Direksi halaman 202-203.

Berikut ini adalah uraian mengenai masing-masing Komite Eksekutif tersebut:

1) Komite Etika dan SDM

a. Komposisi Susunan Keangggotaan Komite Etika dan SDM

Periode 1 Januari 2012 – 10 Mei 2012:

Ketua : Rinaldi Firmansyah/ Direktur Utama
Sekretaris : 1) VP HR Policy
2) VP Organization Development
Anggota : 1) Faisal Syam/Direktur HCGA
2) Prasetio/Direktur CRM
3) Direktur terkait

Periode 11 Mei 2012 – 31 Desember 2012:

Ketua : Arief Yahya/Direktur Utama
Sekretaris : 1) VP HR Policy
2) VP Organization Development
Anggota : 1) Priyantono Rudito/ Direktur HCGA
2) Ririek Adriansyah/ Direktur CRM
3) Direktur terkait

b. Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyetujui dan menetapkan kebijakan penerapan dan penegakan *Good Corporate Governance*;
- Menyetujui dan menetapkan kebijakan etika Perusahaan dan disiplin pegawai; dan
- Menyetujui dan menetapkan kebijakan di bidang SDM.

2) Komite Treasury dan Keuangan

a. Komposisi Susunan Keanggotaan Komite Treasury dan Keuangan

Periode 1 Januari 2012 – 10 Mei 2012:

Ketua : Sudiro Asno/Direktur KEU
Sekretaris : VP Treasury Management
Anggota : 1) Prasetio/Direktur CRM
2) Indra Utoyo/Direktur ITSS

Periode 11 Mei 2012 – 31 Desember 2012:

Ketua : Honesti Basyir/Direktur KEU
Sekretaris : VP Treasury Management
Anggota : 1) Ririek Adriansyah/ Direktur CRM
2) Indra Utoyo/Direktur ITSS

b. Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyetujui dan menetapkan transaksi-transaksi treasury/keuangan yang terkait dengan *financial accounting, treasury & tax, management accounting, asset & procurement management*;
- Menyetujui dan menetapkan strategi pengelolaan kas Perusahaan; dan
- Menyetujui dan menetapkan *Financial Risk Acceptance* Perusahaan.

3) Komite Pengelolaan Anak Perusahaan

a. Komposisi Susunan Keanggotaan Komite Pengelolaan Anak Perusahaan

Periode 1 Januari 2012 – 10 Mei 2012:

Ketua : Rinaldi Firmansyah/ Direktur Utama
Sekretaris : VP Bussiness Porto folio & Sinergy
Anggota : 1) Sudiro Asno/Direktur KEU
2) Indra Utoyo/Direktur ITSS
3) Prasetio/Direktur CRM
4) Direktur terkait

Periode 11 Mei 2012 – 31 Desember 2012:

Ketua : Arief Yahya/Direktur Utama
Sekretaris : VP Bussiness Porto folio & Sinergy
Anggota : 1) Honesti Basyir/Direktur KEU
2) Indra Utoyo/Direktur ITSS
3) Ririek Adriansyah/ Direktur CRM
4) Direktur terkait

b. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memberikan persetujuan atau menetapkan rencana kerja, arah dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan bisnis dan pengelolaan risiko di Anak Perusahaan;
- Memberikan persetujuan transaksional dan/atau inisiatif-inisiatif bisnis yang terkait dengan Anak Perusahaan, dalam rangka percepatan proses pengambilan keputusan dengan menerapkan praktik pengelolaan Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan azas kehati-hatian;
- Memberikan persetujuan atas usulan tindakan Direksi Anak Perusahaan yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan sebagai pemegang saham Anak Perusahaan;
- Memberikan persetujuan atas rencana *corporate action* yang akan dijalankan di Anak Perusahaan, seperti penambahan dan pengurangan modal (emisi saham baru/*capital injection*/*equity call*/divestasi) di Anak Perusahaan, *merger & acquisition*;
- Memberikan persetujuan atas usulan agenda RUPS Anak Perusahaan yang diajukan secara tertulis oleh Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan berhak mengajukan agenda RUPS Anak Perusahaan yang akan dibahas dalam RUPS Anak Perusahaan;
- Memberikan persetujuan atas rencana keputusan RUPS Anak Perusahaan yang akan disampaikan oleh wakil/kuasa Perusahaan sebagai pemegang saham dalam RUPS Anak Perusahaan, termasuk menetapkan penggunaan laba bersih Anak Perusahaan, menetapkan komponen dan besaran remunerasi dan/atau kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan memerlukan persetujuan Perusahaan sebagai pemegang saham; dan
- Melakukan *fit and proper test* terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang berasal dari luar Perusahaan.

c. Frekuensi Rapat Komite dan Tingkat Kehadiran Komite dalam Rapat

Selama tahun 2012, Komite Pengelolaan Anak Perusahaan telah melaksanakan rapat sebanyak 27 dan telah dihadiri oleh mayoritas anggota Komite.

d. Pelaksanaan Kegiatan Komite pada Tahun Buku

Pada tahun 2012, Komite Pengelolaan Anak Perusahaan telah membahas dan menyetujui pelaksanaan RUPST serta RUPS Sirkuler di Anak Perusahaan.

4) Komite Investasi

a. Komposisi Susunan Keanggotaan Komite Investasi

Periode 1 Januari 2012 – 10 Mei 2012:

Ketua : Rinaldi Firmansyah/ Direktur Utama

Sekretaris : VP Management Accounting
Anggota : 1) Sudiro Asno/Direktur KEU
2) Ermady Dahlan/Direktur NWS
3) Indra Utoyo/Direktur ITSS
4) Prasetio/Direktur CRM
5) Direktur terkait

Periode 11 Mei 2012 – 31 Desember 2012:
Ketua : Arief Yahya/Direktur Utama
Sekretaris : VP Management Accounting
Anggota : 1) Honesti Basyir/Direktur KEU
2) Rizkan Chandra/Direktur NWS
3) Indra Utoyo/Direktur ITSS
4) Ririek Adriansyah/ Direktur CRM
5) Direktur terkait

b. *Tugas dan Tanggung Jawab*
- Menyetujui dan menetapkan program-program investasi capex Perusahaan.

c. *Frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat*
Selama tahun 2012, Komite Investasi telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

d. *Pelaksanaan Kegiatan Komite pada Tahun Buku*
Pada tahun 2012, Komite Investasi membahas mengenai rencana bisnis dan sinkronisasi rencana kerja terkait program Indonesia *Digital Network*.

5) Komite Risiko, Kepatuhan dan Revenue Assurance

a. *Komposisi Susunan Keanggotaan Komite Risiko, Kepatuhan dan Revenue Assurance*
Periode 1 Januari 2012 – 10 Mei 2012:
Ketua : Prasetio/Direktur CRM
Sekretaris : OVP Risk Management
Anggota : 1) Sudiro Asno/Direktur KEU
2) Direktur Terkait

Periode 11 Mei 2012 – 31 Desember 2012:
Ketua : Ririek Adriansyah/Direktur CRM
Sekretaris : OVP Risk Management
Anggota : 1) Honesti Basyir/Direktur KEU
2) Direktur Terkait

b. *Tugas dan Tanggung Jawab*
- Menetapkan *risk profile* dan *risk appetite* Perusahaan;
- Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko dan kepatuhan;
- Mengeliminasi atas proses bisnis yang tidak efisien, penguatan pengendalian internal dan mitigasi risiko;
- Mengawasi efektivitas proses *revenue assurance*; dan
- Merekomendasikan pencegahan maupun perbaikan potensi kebocoran pada siklus *revenue*.

c. *Frekuensi Rapat Komite dan Tingkat Kehadiran Anggota dalam Rapat*
Selama tahun 2012, Komite Risiko, Kepatuhan dan *Revenue Assurance* telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dihadiri oleh seluruh anggota.

d. *Pelaksanaan Kegiatan Komite pada Tahun Buku*
Rapat-rapat yang diselenggarakan Komite Risiko, Kepatuhan dan *Revenue Assurance* selama tahun 2012 membahas hal-hal berikut:
- Risiko bisnis terkait kerjasama dengan mitra;
- Risiko operasional terkait pengelolaan asuransi Perusahaan; dan
- Risiko operasional terkait risiko bencana (*disaster risk*).

6) Komite Disclosure

a. *Komposisi Susunan Keanggotaan Komite Disclosure*
Periode 1 Januari 2012 – 10 Mei 2012:
Ketua : Sudiro Asno/Direktur KEU
Wakil Ketua : Prasetio/Direktur CRM
Sekretaris : 1) VP Enterprise Management Audit
2) VP Financial Accounting
3) VP Investor Relation
Anggota : Keanggotaan Komite Disclosure diatur lebih detil dalam Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang Pedoman Pengungkapan (Disclosure).

Periode 11 Mei 2012 – 31 Desember 2012:
Ketua : Honesti Basyir/Direktur KEU
Sekretaris : Ririek Adriansyah/Direktur CRM
Sekretaris : 1) VP Enterprise Management Audit
2) VP Financial Accounting
3) VP Investor Relation

Anggota : Keanggotaan Komite Disclosure diatur lebih detil dalam Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang Pedoman Pengungkapan (*Disclosure*).

b. *Tugas dan Tanggung Jawab*
- Menyetujui pengungkapan informasi yang bersifat historis maupun *forward looking statement*, yaitu semua informasi yang mengandung unsur proyeksi (*future result*) mengenai operasi, kondisi keuangan, kinerja keuangan dan hal-hal yang bersifat keuangan dan statistik.
- Menentukan tingkat materialitas dari suatu risiko atau peristiwa untuk diungkapkan di dalam *disclosure* serta memastikan bahwa semua informasi yang material yang dapat mempengaruhi penyusunan *disclosure* telah diungkapkan secara lengkap, akurat, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku (*compliance*).
- Membahas kekurangan yang signifikan (*significant deficiencies*) sehubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang dilaporkan oleh *Internal Audit* (hasil *test of control* maupun hasil audit pengendalian internal oleh auditor eksternal) untuk menentukan apakah kekurangan tersebut secara individual atau secara keseluruhan merupakan kelemahan yang material (*material weakness*) yang harus diungkapkan dalam laporan kepada US SEC serta mengungkapkannya kepada auditor eksternal dan Komite Audit.
- Memberikan rekomendasi dan/atau surat representasi kepada *Certifying Officer/ Approver* untuk mensertifikasi/menyetujui suatu *disclosure* yang akan dikeluarkan kepada pihak eksternal.

c. *Frekuensi Rapat Komite dan Tingkat Kehadiran Anggota dalam Rapat*
Selama tahun 2012, Komite *Disclosure* telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dan telah dihadiri oleh seluruh anggota.

d. *Pelaksanaan Kegiatan Komite pada Tahun Buku*
Rapat-rapat yang diselenggarakan Komite *Disclosure* selama tahun 2012 membahas hal-hal berikut:
- Laporan Keuangan lengkap Triwulanan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3) tahun 2012;
- Laporan Tahunan Tahun 2011;
- Info Memo Triwulanan (Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3) tahun 2012;
- Permasalahan akuntansi yang sedang dievaluasi serta kebijakan akuntansi terkait; dan
- *Timeline filing*/penyampaian laporan keuangan ke otoritas pasar modal, OJK dan BEI.

F. Sekretaris Perusahaan / Investor Relations ("IR")

Dipimpin oleh seorang Vice President ("VP") di bawah Direktur Keuangan, IR bertanggung jawab atas kesiapan penyajian informasi pada proses inter relasi antara Perusahaan dengan *shareholder* sesuai dengan aturan tata hubungan yang ditentukan, serta terpeliharanya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada manajemen agar mampu merespon dinamika pemegang saham dan pasar modal secara tepat dan efektif.

1. *Profil Sekretaris Perusahaan*

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Agus Murdiyatno, Beliau memulai karirnya sebagai auditor keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun 1996, beliau bergabung dengan Coopers & Lybrand's Jakarta Office sebagai Senior Information Systems Auditor. Pada tahun 1997, beliau bergabung dengan Excelcom, perusahaan seluler terkemuka di Jakarta, sebagai Revenue Assurance Manager and Information Systems Audit Manager. Pada tahun 1998, beliau bergabung dengan KPMG, beliau bertanggung jawab untuk mengelola risiko teknologi dan jasa audit internal. Pada tahun 2003, beliau memulai karir konsultannya saat bergabung dengan Divisi Konsultan Manajemen Ernst & Young, beliau dipromosikan sebagai Direktur Eksekutif Business Risk Services pada tahun 2006. Agus Murdiyatno bergabung dengan Telkom Group sebagai Direktur dan Chief Operating Officer PT Sigma Cipta Caraka pada bulan Juni 2009. Pada tanggal 1 November 2009, beliau ditunjuk sebagai VP Investor Relations/Corporate Secretary untuk periode 2009-2012 berdasarkan keputusan Rapat Direksi. Memperoleh gelar

sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, dan juga memiliki sertifikasi sebagai *Certified Information Systems Auditor* ("CISA") dan *Certified Internal Auditor* ("CIA"). Beliau ditunjuk kembali untuk jangka waktu 2012 -2014.

2. Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Aktivitas utama Sekretaris Perusahaan /IR adalah sebagai berikut:

a. Mengarahkan, menyelenggarakan dan mengendalikan proses administratif, pemenuhan permintaan informasi (untuk Laporan Tahunan, informasi kepada investor dan *filing*) melalui media *online*, merancang *detail meeting & presentation* dan diseminasi laporan;
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan *shareholder relation*, yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari pemegang saham;
c. Mengoordinasikan program pembinaan hubungan dengan investor yang mencakup tugas identifikasi target interaksi, program pendekatan ke seluruh investor dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas minat investor;
d. Mengoordinasikan program pengembangan informasi, yang mencakup tugas pengembangan *platform* informasi, pengelolaan *feedback*, pengolahan informasi strategis yang terkait dengan fluktuasi dan trend harga saham, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengayaan informasi yang dapat diperoleh Perusahaan;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan *annual meeting* dan *conference calls*;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan media komunikasi dalam penyelenggaraan laporan berkala dan penyediaan *release* (*disclosure*), penyediaan dokumen *filing*, pengelolaan *website*, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses penyajian informasi yang dibutuhkan oleh investor dan komunitas pasar modal; dan
g. Memberikan rekomendasi/*advice* kepada BoD untuk hal-hal yang terkait dengan *corporate action* dalam merespon berbagai informasi investor dan hal-hal yang berhubungan dengan pasar modal.

Telkom sangat memperhatikan dua prinsip penting GCG, akuntabilitas dan transparansi. Melalui Unit IR dan Unit Pemasaran, Telkom secara berkelanjutan berupaya untuk memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan akurat, jelas, tepat dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan integritas pasar dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Tugas dan peran Sekretaris Perusahaan dipandang sangat strategis untuk menjamin implementasi tata kelola di Perusahaan maupun dalam ruang lingkup *group* usaha (*subsidiary governance*).

Berdasarkan Keputusan Direksi No.05/2009 tanggal 4 Maret 2009 dan Keputusan Direksi No.26/2010 tanggal 27 Juli 2010, tugas dan peran Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh beberapa unit kerja, yaitu:

No.	Tugas dan Peran Sekretaris Perusahaan	Penanggung Jawab
1.	**Tata kelola Perusahaan**	
	a. Komunikasi, koordinasi dengan divisi-divisi terkait implementasi, *monitoring*, assessment dan penelaahan tata kelola di perusahaan.	Unit Corporate Communication & Affair
	b. Menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen dalam mengelola Perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.	
	c. Memfasilitasi dan membangun hubungan yang efektif antar Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan permasalahan keagenan (*agency problem*) dan tetap mengedepankan hubungan *check and balances*.	
	d. Memastikan dikelolanya hubungan kontrak antara pemilik dan pengelola serta Dewan Komisaris dan Direksi *charter* untuk memastikan tindakan pengendalian yang efektif terhadap keputusan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak dan dalam kondisi tertentu diperlukan untuk menjamin kelangsungan perusahaan.	
	e. Menyeimbangkan kompetensi dan kecukupan informasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencegah terjadinya gap kompetensi dan *asymmetric information* antara Dewan Komisaris dan Direksi.	
	f. Mengelola dan memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (*Annual Report*) telah mencantumkan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.	Subdit Investor Relations - DITKUG
	g. CSR Mengoordinasikan penyelenggaraan aktivitas perusahaan yang terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan.	Unit CDC
	h. *Corporate philosophy* Mensosialisasikan dan memonitor implementasi *Corporate Philosophy, Corporate Value*, Sistem, Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan.	Subdit Organizational Development – DIT HCGA
	i. Kebijakan GCG. Menyusun kebijakan berikut kerangka kerja pengelolaan GCG di Perusahaan termasuk kebijakan GCG dalam ruang lingkup *group* usaha (*subsidiary governance*).	Subdit Business Effectiveness – DIT CRM
2.	**BoD *Administration & Corporate Office***	
	Membantu Direksi dalam berbagai kegiatan, informasi dan dokumentasi antara lain:	Sub Unit Corporate Office Support Administration - Unit Corporate Communication & Affair
	a. Menyiapkan Daftar Khusus, berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.	
	b. Membuat Daftar Pemegang Saham.	
	c. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat risalah rapat.	
	d. Penyelenggaraan RUPS.	
3	**Sinergi dan Koordinasi**	
	a. Komunikasi dan sinergi dengan Sekretaris Perusahaan Group mengenai informasi dan hal-hal yang berkaitan visi, misi dan pengelolaan tata kelola Telkom Group.	Sub Unit Business Portfolio Synergy
	b. Komunikasi dan sinergi program dalam ruang lingkup Telkom Group.	PMO
4	***Legal/Regulatory Compliance***	
	a. Kepatuhan atas ketentuan keuangan dan pasar modal: - Mengingatkan dan memberi masukan kepada Direksi agar Perusahaan selalu mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan pasar modal serta berpegang teguh pada Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan; - Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta praktik-praktik internasional berkaitan dengan GCG; dan - Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perusahaan dengan OJK dan BEI, dimana saham Perseroan tercatat dan pemangku kepentingan.	Subdit Investor Relation - DITKUG
	b. Kepatuhan atas ketentuan regulasi: - Mengingatkan dan memberi masukan kepada Direksi agar Perusahaan selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan sesuai regulasi; dan - Mengikuti perkembangan industri, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan.	Sub Unit Regulatory Management – Unit Corporate Communication & Affair
	c. Kepatuhan atas ketentuan perseroan dan legal. Mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa Perusahaan selalu mematuhi peraturan Perundang-undangan.	Subdit Legal & Compliance – DIT CRM

No.	Tugas dan Peran Sekretaris Perusahaan	Penanggung Jawab
5	***Communication/Disclosure (Liaison Offiser).***	
	a. Komunikasi dengan Otoritas Keuangan, Investor dan Pasar Modal: - Mengelola komunikasi dua arah serta memelihara hubungan baik dengan OJK dan BEI; - Menyiapkan dan mengomunikasikan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu mengenai kinerja dan prospek Perseroan kepada masyarakat pasar modal, serta pemangku kepentingan, bekerjasama dengan divisi terkait; - Memberikan pelayanan kepada pemegang saham atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan (contoh: informasi kepada investor, temu wartawan, media dan analisis reguler mengenai dampak makro terhadap kinerja perusahaan); dan - Mempublikasikan *Corporate Action* Perusahaan secara taktis, strategis dan tepat waktu.	Subdit Investor Relations - DITKUG
	b. Komunikasi Publik, Pelanggan dan internal - Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada *stakeholders*, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik; - Merevisi tampilan dan tata kelola media internal perusahaan dan menjalin hubungan baik dengan *stakeholders* melalui penyelenggaraan *event* penting; dan - Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang disampaikan kepada *stakeholders*, baik dalam *website*, buletin atau media informasi lainnya.	Subdit Public Relation – Unit Corporate Communication & Affair

G. Unit Internal Audit

Unit Internal Audit ("IA") berperan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas aktivitas bisnis Perusahaan.

1. *Kepala Unit Internal Audit*

IA dipimpin oleh seorang Group Chief Internal Audit, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Per tanggal 31 Desember 2012, Group Chief Internal Audit Telkom dijabat oleh Erry Anwardiredja.

Profil singkat Erry Anwardiredja

Lahir 18 November 1957, menjabat Kepala Internal Audit Telkom sejak tahun 2012 dan ditunjuk berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Direktur Utama. Telah berkarir di Telkom dan perusahaan-perusahaan Telkom Group sejak tahun 1989, dengan posisi terakhir sebelum menjabat Group Chief Internal Audit adalah VP Internal Audit Telkomsel, entitas anak Telkom (2011 - 2012) dan VP Financial System Telkomsel (2009 - 2011).

Jumlah Personil Unit Internal Audit

Pada akhir tahun 2012, jumlah personil dalam unit IA tercatat sebanyak 81 orang.

2. *Kualifikasi/Sertifikasi Profesi*

Untuk memelihara dan meningkatkan tenaga auditor yang memiliki kompetensi memadai untuk dapat berperan sesuai dengan lingkup kegiatan IA dalam mengawal perkembangan bisnis Perusahaan, IA senantiasa melakukan upaya-upaya dalam:

- Mengikutsertakan auditor IA dalam pelatihan, seminar dan *workshop* yang bersifat teknis Telkom; dan
- Mengikutsertakan auditor IA dalam pembelajaran berkelanjutan yang bersertifikasi, baik lokal maupun internasional.

Selama tahun 2012 IA secara aktif mengikutsertakan auditornya dalam persiapan sertifikasi internasional seperti *Certifed Information System Auditor* ("CISA") dan *Certified Internal Auditor* ("CIA"). Pada bulan Mei 2012, seorang auditor IA telah memperoleh sertifikasi internasional CISA.

3. *Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit*

Sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku, IA merupakan unit yang independen terhadap unit-unit kerja lain dalam organisasi Telkom dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Internal Audit Telkom:

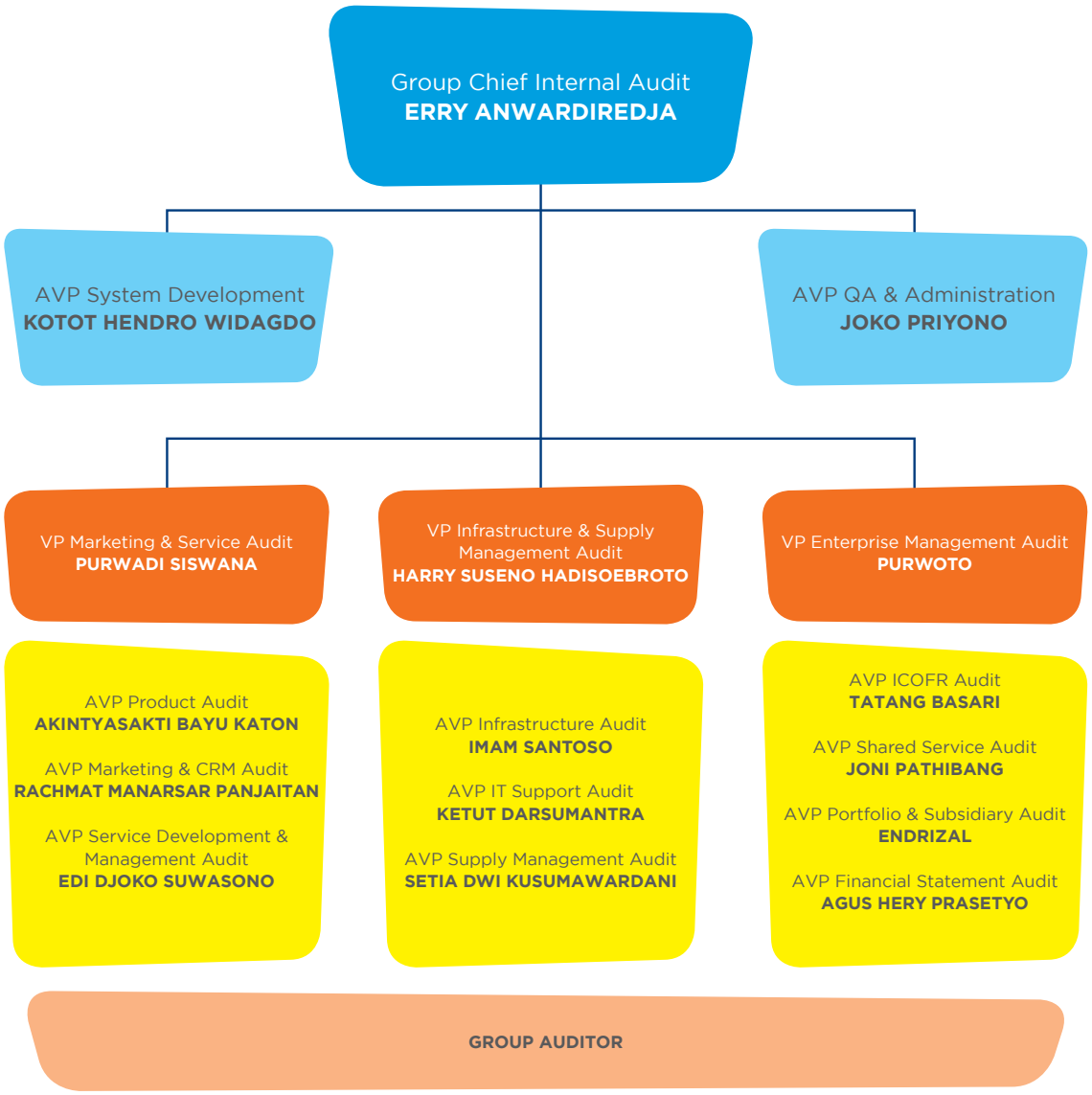

4. ***Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit***

Peran IA dalam rangka pengawalan terhadap bisnis Perusahaan dilakukan melalui fungsi utama IA sebagai pemberi jaminan (*assurance*) dan layanan konsultasi internal (*internal consulting services*).

Aktivitas IA diarahkan pada komitmen bahwa misi IA dapat terselenggara secara metodologis, yang berarti tahapan kegiatan pemberi jaminan dan layanan konsultasi internal yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pemantauan hasil tindak lanjut merupakan proses yang terstandardisasi dan terukur. Untuk tujuan ini, pada tahap persiapan audit, metodologi audit berbasis risiko menjadi pedoman utama yang menekankan bahwa penentuan unit yang layak audit (*auditable*) didasarkan pada tingkat risiko, makin tinggi risiko makin tinggi keharusan untuk diaudit. Tingkat risiko dari objek audit (*auditee*) didasarkan kepada risiko yang telah dipetakan dan ditetapkan oleh Perusahaan maupun penilaian profesional oleh IA sendiri.

Guna memfasilitasi paradigma audit berbasis risiko tersebut, IA telah dilengkapi dengan sebuah alat manajemen yaitu Sistem Manajemen Audit ("AMS") yang merupakan sebuah sistem aplikasi untuk mendokumentasikan pelaksanaan audit berbasis risiko secara *online*.

Peningkatan peran serta IA dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas *assurance* atas operasional Perusahaan melalui aktivitas audit maupun non-audit. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi dapat diatasi melalui pengendalian internal yang efektif. Jika ditemukan ketidakefektifan pada pengendalian suatu proses bisnis dan atau risiko yang di luar kendali, maka dilakukan *substantive test*, yaitu pengujian lanjut objek audit guna mendalami akar permasalahannya.

Selain itu, sebagai konsekuensi pencatatan saham Telkom di BEI maupun NYSE, IA secara periodik melakukan pengujian dan audit terhadap efektivitas dan kecukupan pelaksanaan pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan sesuai standar *Internal Control over Financial Reporting* ("ICOFR").

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan audit dan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya melakukan pengendalian internal bagi para unit bisnis, setiap triwulan, unit bisnis melakukan *Control Self Assessment* ("CSA") terhadap pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya. Secara periodik, IA melakukan evaluasi terhadap hasil CSA tersebut untuk mengukur tingkat kecukupannya dan menghasilkan rekomendasi perbaikan baik terhadap rancangan maupun pelaksanaan.

Tahap selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan layanan konsultasi internal. Layanan konsultasi internal antara lain difokuskan pada penyelenggaraan operasional Perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi pengelolaan infrastruktur (alat produksi), produk dan layanan serta operasi pendukung, termasuk identifikasi Risiko Pelaporan Keuangan *Group* (*Group Financial Reporting Risk/*"GFRR"), penyusunan proses bisnis entitas anak dan pengelolaan SDM. Aktivitas konsultasi internal ini lebih merupakan solusi pencegahan sebagai antisipasi agar penyelenggaraan bisnis tetap pada arah yang tepat dan mengindahkan rambu-rambu peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari Perusahaan yang punya komitmen tinggi terhadap keberhasilan GCG, IA memiliki peran penting dalam mekanisme *whistleblower* yang merupakan ranah Komite Audit dan Executive Investigative Committee ("EIC"), dimana kepala IA ditunjuk sebagai sekretaris EIC. Mekanisme *whistleblower* berfungsi untuk mengakomodasi setiap pengungkapan 'pengaduan' oleh karyawan untuk diteruskan kepada manajemen. Pada gilirannya, jika Komite Audit dan EIC menilai bahwa pengaduan perlu diselidiki lebih lanjut, IA akan mengambil peran untuk menindaklanjuti sebagai bagian dari tugas audit.

Hasil-hasil kegiatan di atas dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit kemudian hasil-hasil tersebut akan diinformasikan kepada objek audit untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan.

Untuk memastikan bahwa objek audit telah memberikan respon yang cukup atas hasil audit dan konsultasi internal, maka perlu dilakukan upaya pengawasan lebih lanjut. Tindak lanjut di lapangan dilakukan oleh objek audit yang kemudian dimonitor oleh IA. Untuk hal ini, tindak lanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu penyelesaian yang disepakati bersama.

5. ***Piagam Internal Audit***
   Unit IA Telkom telah dilengkapi dengan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) sebagai suatu dokumen formal perusahaan, yang berisi uraian tentang visi, misi, struktur, status, tugas, tanggung jawab dan wewenang IA, termasuk juga persyaratan personil auditor IA. Penyusunan Piagam Internal Audit berpedoman pada standar internasional bagi praktik profesi internal audit yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor ("IIA"), dan telah disetujui oleh Direktur Utama maupun Komite Audit Telkom.

6. ***Pelaksanaan Kegiatan Audit dan Konsultasi di Tahun 2012***
   Sesuai dengan Rencana Kerja Internal Audit Tahunan untuk tahun 2012, pada periode tahun 2012, Unit IA telah melaksanakan dan menyelesaikan 114 objek audit dan konsultasi yang terdiri atas 1 program audit yang merupakan bagian dari PKAT tahun 2011 dan 113 program audit dan konsultasi dari Rencana Kerja tahunan 2012.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

A. Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian dan Prosedur Pengungkapan

Di bawah pengawasan dan dengan partisipasi dari manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama Perseroan, setara dengan Chief Executive Officer ("CEO") dan Direktur Keuangan, setara dengan Chief Financial Officer ("CFO"), manajemen

melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di dalam *Rules* 13a-15 (e) dan 15 (d) dari *Exchange Act*). Berdasarkan evaluasi ini, CEO dan CFO Perusahaan telah menyimpulkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan telah efektif. Manajemen melakukan pengendalian dan prosedur pengungkapan termasuk, tanpa dibatasi meliputi pengendalian dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan di dalam laporan yang disampaikan atau diajukan berdasarkan *Exchange Act* telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan format SEC dan bahwa informasi tersebut dikumpulkan dan disampaikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu atas pengungkapan yang dipersyaratkan.

B. Kepatuhan

Kepatuhan dikelola oleh unit Legal & Compliance dibawah Direktur CRM. Unit ini berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan, keputusan Perusahaan dan seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Secara proaktif, Perusahaan menjalankan kebijakan kepatuhan pada tingkat unit bisnis dan tingkat transaksional. Beberapa aktivitas kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2012 antara lain adalah:

- Mendukung aktivitas bisnis dengan menyediakan *legal advice* melalui penyampaian kajian hukum (*legal opinion*) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait kesesuaian dengan hukum atau ketentuan yang berlaku (*legal advisory*);
- Melakukan evaluasi kajian risiko dan legal (*risk & legal review*) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Perusahaan (*legal review of businesss & policy initiatives*); dan
- Penyelesaian kasus litigasi dan *non* litigasi (*litigation*);

C. Evaluasi atas Efektivitas Pengendalian Internal

Laporan Manajemen Mengenai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara memadai, sebagaimana didefinisikan dalam *Exchange Act Rules* 13a-15(f) dan 15d-15(f). Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang oleh, atau di bawah pengawasan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, dan dilakukan oleh Direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan termasuk kebijakan dan prosedur yang: (1) berkaitan dengan pengelolaan pencatatan secara rinci, akurat dan wajar yang mencerminkan transaksi dan pelepasan aset Perusahaan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat secara semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa pendapatan dan biaya Perusahaan diterima dan dikeluarkan hanya berdasarkan kewenangan manajemen dan Direksi Perusahaan; dan (3) memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencegahan atau deteksi secara tepat waktu dalam hal perolehan, penggunaan atau pelepasan aset Perusahaan yang tidak sah yang dapat memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Dengan keterbatasan yang ada, pengendalian internal atas pelaporan keuangan kemungkinan tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Di samping itu, proyeksi atas evaluasi efektivitas pada masa mendatang mengandung risiko bahwa pengendalian mungkin menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi, atau karena tingkat kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur mungkin menurun.

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012. Dalam melakukan penilaian, Manajemen Perusahaan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh *Internal Control – Integrated Framework* yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission ("COSO"). Berdasarkan penilaian ini, manajemen menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2012, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan telah efektif.

Laporan Atestasi Kantor Akuntan Publik

Efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, kantor akuntan publik independen dan terdaftar, sebagaimana dinyatakan dalam laporan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

Perubahan dalam Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan sepanjang tahun fiskal yang baru saja berakhir yang akan sangat memengaruhi atau kemungkinan akan sewajarnya berpengaruh secara material, terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk terus memperbaiki proses internal kontrol dan akan terus melakukan peninjauan dan pemantauan atas kontrol pelaporan keuangan serta prosedurnya untuk memastikan kepatuhan atas persyaratan dalam *Sarbanes-Oxley Act* serta aturan terkait yang ditentukan oleh COSO. Perusahaan juga akan terus mencurahkan sumber daya secara signifikan untuk peningkatan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dari waktu ke waktu.

AKUNTAN INDEPENDEN PERSEROAN

Sesuai prosedur yang berlaku dan dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen, RUPST Telkom tanggal 11 Mei 2012 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Suherman & Surja (bekerja sama dengan Ernst & Young global limited), yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012. Biaya jasa untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2012 disetujui sebesar Rp26,6 miliar (tidak termasuk PPN). Biaya audit tersebut tidak termasuk biaya penerbitan *consent letter* auditor kami sebelumnya sebesar Rp4,4 miliar.

KAP Purwantono, Suherman & Surja menjadi akuntan publik Perusahaan sejak tahun 2012. Akuntan yang menandatangani Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2012 adalah Hari Purwantono.

Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom untuk tahun buku 2011 diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers).

KAP Purwantono, Suherman & Surja juga ditunjuk melakukan audit atas Efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan tahun buku 2012 serta audit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") tahun buku 2012.

Biaya dan Jasa Auditor Eksternal

Tabel berikut menyajikan ringkasan tagihan terkait jasa audit untuk tahun 2010, 2011, 2012:

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember		
	2010(1)	2011(1)	2012(2)
	(Rp juta)		
Biaya Audit	41,872	40,503	26,619
Biaya yang terkait Audit	-	-	-
Biaya Jasa Perpajakan	398	70	-
Semua biaya lainnya	400	400	326

(1) Audit dilakukan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
(2) Audit dilakukan oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja.

MANAJEMEN RISIKO

A. Sistem Manajemen Risiko

Sejak 2006, kami telah menerapkan manajemen risiko mengacu kepada kerangka kerja COSO *Enterprise Risk Management*. Dalam penerapannya, manajemen risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG dan pengendalian internal di Perusahaan.

Visi Perusahaan terkait dengan penerapan manajemen risiko adalah: "Menjadikan pengelolaan risiko sebagai BUDAYA YANG MELEKAT dalam pelaksanaan proses bisnis dan operasional". Untuk itu, sejak tahun 2008 kami telah membangun dan mengembangkan:

- **Aspek Struktural** meliputi pengembangan visi manajemen risiko, misi, komitmen, *tone at the top*, lingkungan internal yang kondusif, kebijakan, pengembangan kompetensi, *IT tools* dan kesisteman;
- **Aspek Operasional** meliputi penentuan *Risk Acceptance Criteria*, pelaksanaan *Risk Assessment* dan pengembangan manajemen risiko untuk fungsi spesifik; dan
- **Aspek Perawatan** meliputi monitoring implementasi manajemen risiko, pelaporan berkala (*risk reporting*), menjaga pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Serta melakukan *review* melalui *Risk Management Index*, Survei Budaya Risiko maupun penilaian Tingkat Maturitas Implementasi.

Saat ini implementasi manajemen risiko di Perusahaan telah mencapai tingkatan dimana manajemen risiko telah diintegrasikan di seluruh entitas Perusahaan. Ke depan kami telah menyusun *road map* pengembangan Entity *Risk Management* sebagai berikut:

- 2013: peningkatan ERM *Maturity Level* pada *initial Stage Quantified Level*;
- 2014: peningkatan ERM *Maturity Level* pada *intermediate Stage Quantified Level*;
- 2015: peningkatan ERM *Maturity Level* pada *advanced stage Quantified Level*; dan
- 2016: peningkatan ERM *Maturity Level* masuk ke *Optimized Level*.

B. Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko dilakukan secara berkala meliputi aktivitas:

1. *Review* dan *monitoring* implementasi manajemen risiko unit secara berkala setiap tiga bulan.
2. Penyusunan Laporan Analisa Risiko dan Kepatuhan secara berkala setiap tiga bulan.
3. Rapat pembahasan terkait risiko Perusahaan di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris.
4. Melakukan pengukuran implementasi Budaya Risiko melalui survey kepada sejumlah responden.
5. Melakukan pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko (ERM *Maturity Level*).

C. Risiko-Risko yang Dihadapi Perusahaan

Risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dapat dilihat pada bagian "Tinjauan Bisnis" - "Faktor-Faktor Risiko" meliputi:

1. Risiko terkait Indonesia antara lain terkait perubahan situasi politik, sosial, ekonomi makro, bencana alam dan sebagainya.
2. Risiko terkait Perusahaan meliputi:
   - Risiko Operasi meliputi gangguan atas alat produksi, keamanan aset, potensi kebocoran pendapatan, perubahan teknologi, pengoperasian bisinis satelit, dan sebagainya;
   - Risiko Finansial meliputi perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar rupiah, kesulitan pendanaan;
   - Risiko *Legal & Compliance* meliputi beberapa masalah yang dihadapi Perusahaan;
   - Risiko Regulasi meliputi ketentuan regulasi yang harus dipatuhi oleh Perusahaan; dan
   - Risiko Kompetisi meliputi potensi peningkatan kompetisi di seluruh portofolio bisnis.

D. Upaya Pengelolaan Risiko

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, perusahaan melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan aspek Struktural, Operasional dan Perawatan atas implementasi manajemen risiko di seluruh entitas anak.
2. Peningkatan Kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko (*six eyes principle*).
3. Pengembangan manajemen kelangsungan usaha (*Business Continuity Management*) dan *Crisis Management*.
4. Pengembangan *Revenue Assurance* untuk proteksi kebocoran dan Program *Anti Fraud*/ Anti Kecurangan.
5. Pengembangan *Enterprise Security Governance* untuk melindungi aset fisik dan *non* fisik (misalnya *Information System Security* dengan mengembangkan ISO 27000).
6. Pengembangan Program Pengendalian Internal.
7. Pengembangan *Regulatory Management*.

LITIGASI DAN PERKARA HUKUM PENTING

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, kami telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Atas perkara-perkara hukum di bawah ini, Telkom berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material bagi kami atau entitas anak kami. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Telkom mencadangkan sebesar Rp53 miliar pada tanggal 31 Desember 2012.

Lihat Catatan 42 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom.

Berikut disampaikan penjelasan tentang perkara-perkara hukum penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan dan entitas anak, dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

A. Perkara yang Dihadapi Perusahaan

Pokok Perkara	Status Perkara	Dampak Keuangan (Rp)
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ("KPPU") Kami sebagai pihak terlapor dengan KPPU sebagai pihak pelapor dalam perkara adanya dugaan pelanggaran terhadap pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	18 miliar

B. Perkara yang Dihadapi Entitas Anak

Pokok Perkara	Status Perkara	Dampak Keuangan (Rp)
KPPU Telkomsel sebagai pihak terlapor dengan KPPU sebagai pihak pelapor dalam perkara adanya dugaan pelanggaran terhadap pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	25 miliar
Pengadilan Niaga Telkomsel sebagai pihak termohon dengan PT Prima Jaya Informatika sebagai pihak pemohon dalam perkara permohonan kepailitan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada pihak termohon akibat utang pihak termohon yang tidak dibayar.	Dalam proses Peninjauan Kembali ("PK") di tingkat MA, karena PT Prima mengajukan PK atas putusan MA tersebut.	5 miliar

C. Perkara yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2012, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2012 tidak ada sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas pasar modal atau otoritas lainnya kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Telkom.

AKSES INFORMASI PUBLIK

Kepada publik, Telkom menyampaikan informasi melalui *website* Perusahaan (www.telkom.co.id), beberapa penerbitan informasi secara khusus baik di media massa cetak maupun elektronik dan khusus kepada karyawan dan keluarganya informasi Perusahaan disampaikan melalui penerbitan majalah internal.

Selain itu masyarakat juga dapat menghubungi secara langsung di:

Investor Relations
Grha Citra Caraka Lt.5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710
Telp : (62-21) 521 5109
Fax : (62-21) 522 0500
Email/*mailist* : investor@telkom.co.id

Di bawah ini daftar aktivitas keterbukaan dan koordinasi kami selama tahun fiskal 2012:

Aktivitas Transparansi Informasi	Jumlah Aktivitas	Bulan	Tanggal
Conference Call(*)	4	April Juli Oktober	3, 30 31 25
Pertemuan Analis/Investor	175	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember	9, 11, 18, 19 8, 9 , 10, 15, 16, 17, 20, 22, 23 5, 8, 9, 12, 14, 15, 30 4, 5, 11, 12, 18, 19, 26, 27 2, 9, 16, 23, 24, 30, 31 6, 7, 13, 19, 20, 21, 27, 28 4, 5, 19 1, 8, 9, 14, 15 3, 5, 12, 13, 17, 18, 19, 21 3, 4, 10, 16, 17, 18, 31 1, 14, 21, 22, 27,28, 29 6, 12, 17, 20
Paparan Publik	1	Mei	3
Rapat Umum Pemegang Saham	1	Mei	11
Siaran Pers	5	Februari April Mei Agustus September	28 2 15 8 15
Konferensi Investor	1	Desember	4 – 5
Roadshow	7	Januari-Februari Maret Agustus September Oktober November	30 Januari - 3 Februari 14 – 16 30 – 31 24, 25 – 27 11 7 – 8
Kunjungan Investor	-		
Pengumuman Koran:			
a. RUPS	4	April Mei	11, 26, 30 15
b. Laporan Keuangan	2	Mei Juli	30 30
c. Dividen	1	Mei	15
d. Edaran	-		

(*) *Conference Call* adalah forum pertemuan antara Direksi Telkom dengan para Investor dalam dan luar negeri, untuk membahas hasil laporan keuangan triwulanan melalui media elektronik, yaitu *teleconference*. *Conference Call* biasanya dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya laporan triwulanan dalam bentuk *Info Memo*.

ETIKA BISNIS DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Moral dan etika merupakan landasan penerapan GCG di Perusahaan, mengingat bahwa organisasi tidak lain adalah terdiri dari orang-orang di dalamnya. Seiring waktu pembelajaran kami dalam mengelola GCG, maka penerapan GCG tidak dapat dipisahkan dari menjalankan bisnis yang beretika dan membentuk kesadaran Perusahaan dan karyawan yang memiliki kepekaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud menjadi warga negara yang baik agar Telkom terus maju dan dicintai pelanggannya.

A. Etika Bisnis

Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yaitu bisnis yang berkinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Direksi No.KD.05/2005, Telkom telah memiliki perangkat Etika Bisnis Telkom, yang merupakan standar perilaku Perusahaan maupun perilaku karyawannya dalam berhubungan dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, sesama karyawan dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan.

B. Pemberlakuan Penerapan Kode Etik Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan

Sesuai ketentuan *Sarbanes Oxley Act* ("SOA") 2002 seksi 406, Telkom menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat kunci lainnya serta seluruh karyawan yang dapat dilihat pada *website* kami http://www.telkom.co.id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/kode-etik/ dan setiap

perubahan dan pengesampingan terhadap kode etik kami informasikan melalui *website* tersebut.

C. Penguatan Etika Bisnis Telkom Group

Sesuai arah pengembangan dan penerapan GCG yang melingkupi *Group* Usaha, maka dalam pedoman GCG Telkom Group (No.PD.602.00/r.00/HK000/COP-D0030000/2011) ditetapkan kode etik Telkom Group sebagai penguatan budaya Perusahaan meliputi:

1. Perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group berusaha untuk menjadi Perusahaan yang jujur dan menjadi panutan dengan cara menjalankan bisnis yang sehat, kuat dan adil yang digerakkan oleh tata nilai yang terpuji serta taat kepada hukum dan menghormati semua pemangku kepentingan.
2. Perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group wajib menjalankan atau mengelola bisnis Perusahaan dengan memperhatikan prinsip etika bisnis dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan peduli kepada masyarakat, budaya dan lingkungan hidup.
4. Tindakan melawan hukum dan melanggar etika adalah tindakan yang dilarang, meskipun untuk alasan bisnis atau karena tekanan dari pihak manapun.
5. Perusahaan melindungi setiap pelapor yang memberikan informasi terkait dengan pelanggaran legal, kejadian tidak etis atau tindakan lain yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dan kode etik karyawan Telkom Group yang menyatakan bahwa setiap karyawan Telkom Group senantiasa :

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan kewajaran dalam bertindak dan menjalankan tugas.
2. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
3. Menghormati hak individual dan keragaman sebagai sumber kekuatan Telkom Group.
4. Menjunjung tinggi budaya Perusahaan.
5. Menjaga keamanan aset dan melindungi kerahasiaan informasi Perusahaan.
6. Memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan.
7. Senantiasa mengejar laba dan pertumbuhan usaha dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis.
8. Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dijalankan.
9. Menjaga dan meningkatkan reputasi Telkom Group.
10. Peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

D. Sosialisasi dan Upaya Penegakan Etika Bisnis

Pemahaman dan upaya mengingatkan kembali kepada karyawan tentang Tata Nilai dan Etika Bisnis dilakukan melalui pengiriman materi sosialisasi dan sekaligus *assessment* yang dilaksanakan setiap tahun. Materi tersebut berkaitan dengan pemahaman: GCG, etika bisnis, pakta integritas, *fraud*, manajemen risiko, pengendalian internal ("SOA"), *whistleblowing*, pelarangan gratifikasi, tata kelola TI, menjaga keamanan informasi dan hal-hal lainnya yang terintegrasi terkait dengan praktik tata kelola Perusahaan. Upaya dimaksud dilakukan melalui program Survei Etika Bisnis dengan populasi seluruh karyawan. Survei dilakukan secara *online*, melalui media portal/*intranet* Perusahaan yang diakhiri dengan pernyataan kesediaan karyawan untuk menjalankan etika bisnis di Perusahaan.

Pemahaman dan penerapan etika bisnis berikut hasil survei setiap tahun diaudit secara internal maupun eksternal melalui proses audit SOA 404 terkait dengan penerapan *control environment* sesuai kerangka kerja pengendalian internal COSO pada audit pengendalian internal tingkat entitas.

E. Budaya Perusahaan

Telkom senantiasa membangun sistem dan budaya Perusahaan yang terintegrasi sebagai pendekatan pengelolaan bisnis yang komprehensif untuk mencapai keunggulan kinerja Perusahaan, menjalankan kepatuhan, menjalankan bisnis yang beretika dan dimilikinya kesadaran Perusahaan dan karyawan yang peka akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud warga negara yang baik. Lebih dari itu sistem dan budaya terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan bisnis untuk mewujudkan cita-cita agar Telkom terus maju, dicintai pelanggannya, kompetitif di industrinya dan dapat menjadi role model Perusahaan. Sejak tahun 2009 dilakukan transformasi budaya baru Perusahaan yang disebut dengan "*The Telkom Way*".

Nilai-Nilai Perusahaan

Budaya Perusahaan *The Telkom Way* memiliki lima nilai Perusahaan yaitu: *Commitment to long- term, Customer first, Caring meritocracy, Co-creation of win-win partnership* dan *Collaborative innovation* yang selanjutnya kami sebut dengan istilah 5C.

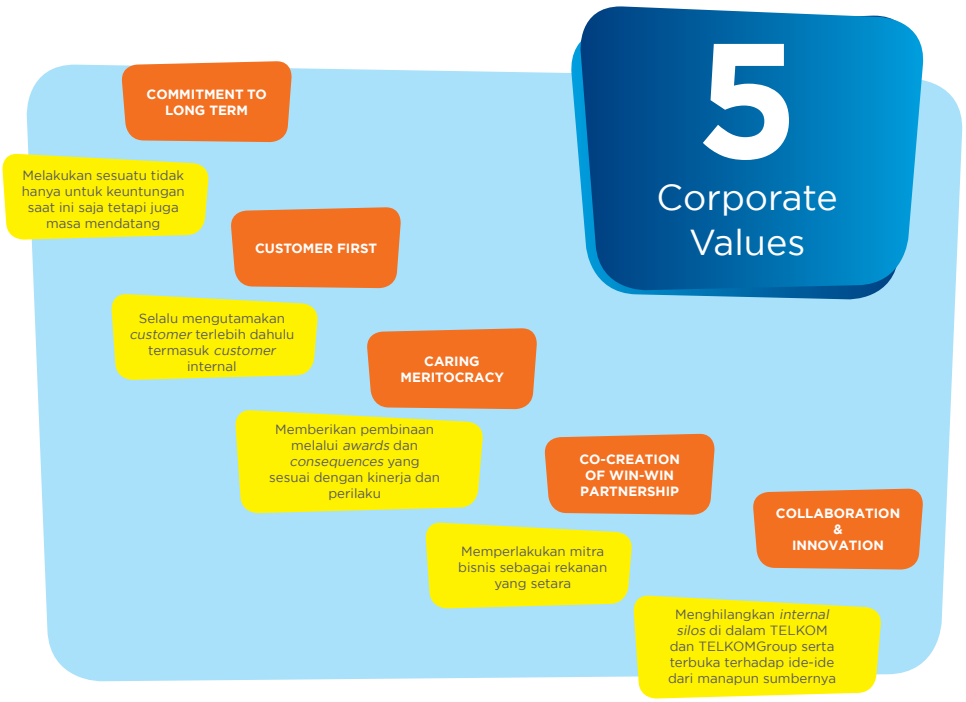
5
Corporate Values
COMMITMENT TO LONG TERM
Melakukan sesuatu tidak hanya untuk keuntungan saat ini saja tetapi juga masa mendatang
CUSTOMER FIRST
Selalu mengutamakan customer terlebih dahulu termasuk customer internal
CARING MERITOCRACY
Memberikan pembinaan melalui awards dan consequences yang sesuai dengan kinerja dan perilaku
CO-CREATION OF WIN-WIN PARTNERSHIP
Memperlakukan mitra bisnis sebagai rekanan yang setara
COLLABORATION & INNOVATION
Menghilangkan internal silos di dalam TELKOM dan TELKOMGroup serta terbuka terhadap ide-ide dari manapun sumbernya

Nilai-nilai 5C merupakan *upgrade* dari nilai-nilai budaya perusahaan yang terdahulu, dengan lebih menonjolkan terbangunnya perilaku baru yang spesifik melalui beberapa pendekatan. Pada semester II tahun 2012, Perusahaan menetapkan *Great Spirit* 3S (*Solid, Speed, Smart*) agar lebih memacu pencapaian kinerja unggul.

F. Evaluasi Implementasi Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan

Setiap tahun kami melakukan survei internal untuk mengetahui efektivitas penerapan budaya Perusahaan dan etika bisnis, kami menyebutnya dengan istilah Etika Bisnis *Family Survey*. Beberapa pertanyaan survei kami tanyakan kepada karyawan secara *online* agar dapat menjangkau semua karyawan secara cepat, antara lain meliputi: GCG, Etika Bisnis, Tata Nilai *The Telkom Way*, *anti fraud*, pengendalian internal, pakta integritas, *whistleblowing system*, dan lain-lain dan hasil survei tiga tahun terakhir adalah 73,62 poin (tahun 2010); 79,07 poin (tahun 2011) dan 76,53 poin (tahun 2012) dari skala 100 poin.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Sebagai bagian dari *entity level control*, sejak tahun 2006 Telkom telah menerapkan *whistleblower* program yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindak lanjuti pengaduan dari karyawan Telkom Group dan dari pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Penerapan *whistleblower* program yang dikelola oleh Komite Audit ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan diratifikasi dengan Keputusan Direksi.

A. Penyampaian dan Pengelola Pelaporan Pelanggaran

Karyawan Telkom Group ataupun pihak ketiga dapat menyampaikan pengaduan mengenai permasalahan akuntansi dan *auditing*, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi, dan pelanggaran kode etik langsung kepada Komisaris Utama atau kepada Ketua Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui email, fax atau surat dengan alamat:

Email : ka301@telkom.co.id
Fax : 021 527 1800
Website : www.whistleblower.telkom.co.id
Surat : Komite Audit
PT Telkomunikasi Indonesia Tbk.,
Grha Citra Caraka, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710

Pengaduan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Disampaikan melalui *website*, email, fax atau surat;
- Memberikan informasi mengenai permasalahan pengendalian internal, akuntansi, *auditing*, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi, dan pelanggaran kode etik;
- Informasi yang dilaporkan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

B. Perlindungan bagi Pelapor

Telkom mengelola mekanisme *whistleblowing* sebagaimana kebijakan Perusahaan yang terbarukan yaitu No.KD.48/2009 untuk menampung dan menjamin keamanan karyawan dan pihak ketiga yang menyampaikan keluhan atau laporan tindak pelanggaran.

C. Pihak yang mengelola pengaduan

Pihak yang mengelola pengaduan adalah Komite Audit dan akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

D. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan untuk memenuhi Peraturan OJK No.IX.1.5 dan *Sarbanes-Oxley Act* 2002 Section 301 tentang *Public Company Audit Committee* harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan *Good Corporate Governance*. Karena itu, syarat pengaduan diperlukan untuk menjaga agar para pelapor menyampaikan pengaduan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Komite Audit akan menindaklanjuti pengaduan pihak ketiga termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Telkom Group yang berkaitan dengan:

- **Akuntansi dan *Auditing*.** Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit terutama yang menyangkut independensi Kantor Akuntan Publik;
- **Pelanggaran Peraturan**
  Pelanggaran terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Telkom maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Telkom;
- **Kecurangan dan/atau Dugaan Korupsi**
  Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Telkom; dan
- **Kode Etik**
  Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi Telkom atau mengakibatkan kerugian bagi Telkom. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain: tidak jujur, benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Telkom, atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik.

Telkom juga telah membangun suatu mekanisme kerja antara Komite Audit dengan Internal Audit dan Komite Investigasi termasuk protokol dengan Telkomsel untuk menindak lanjuti pengaduan yang diterima. Selain itu, *whistleblower program* juga telah disosialisasikan dan telah dipahami oleh karyawan.

Selama tahun 2012, Komite Audit menindak lanjuti 2 pengaduan yang masuk dan memenuhi syarat dengan kategori pengaduan terkait dengan akuntansi, pengendalian internal, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan pelanggaran kode etik.

Penggunaan dan hasil Sistem *Whistleblowing*

Deskripsi	Jumlah	Keterangan
Jumlah pengaduan	4	Pengaduan yang diterima
Memenuhi syarat	2	Pengaduan yang layak ditindaklanjuti
Kategori pengaduan	2	Dugaan kecurangan
Progress pengaduan	2	Pengaduan sedang dalam proses tindak lanjut

E. Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

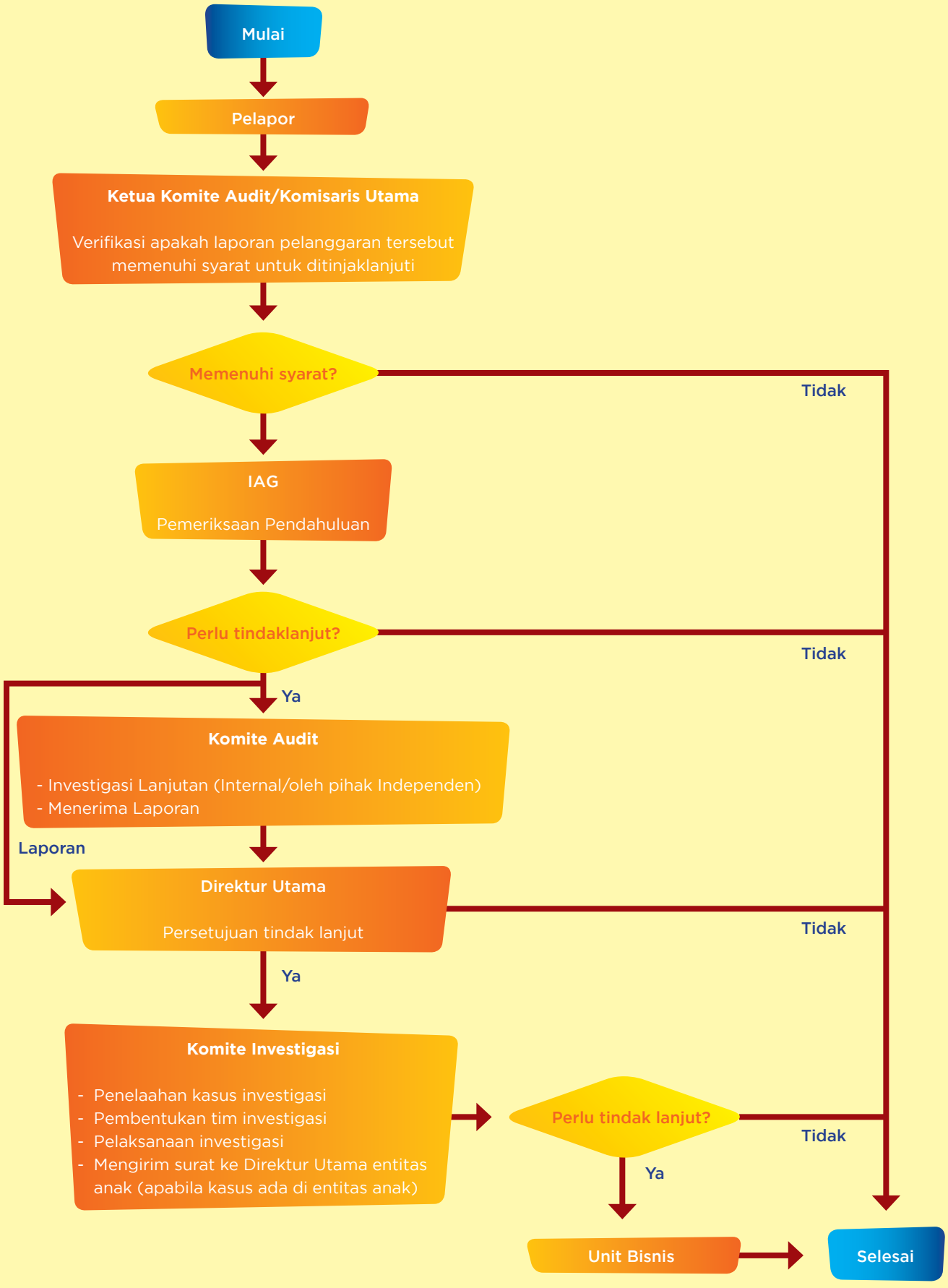

KONSISTENSI PENERAPAN GCG

Di lingkungan Telkom, pemahaman akan GCG terus bertambah baik seiring dengan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama mengelola GCG. Telkom meyakini bahwa GCG merupakan sebuah sistem yang dinamis dan dari waktu ke waktu harus diperkuat dan dipebaharui agar sejalan dengan perubahan bisnis dan lingkungan usaha yang terjadi. Dengan terus disesuaikan kekiniannya, maka penerapan GCG diharapkan akan berkontribusi secara nyata mendukung pertumbuhan usaha dan bukan sebaliknya dianggap sebagai penghambat kelincahan organisasi.

Perjalanan mengelola GCG mengantarkan Perusahaan untuk menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajamen risiko dan pengendalian internal. Praktik ini menuntut Perusahaan untuk mampu mengelola GRC yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis. Penerapan manajemen risiko awalnya tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk dapat menguasai kompetensi, memperoleh keakuratan dalam mengenali risiko industri dan organisasi, serta mampu menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari budaya karyawan. Akhirnya, berkat kesungguhan, konsistensi dan kesabaran manajemen, maka diperoleh hasil dimana manajemen risiko saat ini telah memberikan warna baru dan berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penguatan penerapan GCG di Telkom Group, kuncinya adalah kemampuan Perusahaan untuk mampu mengelola data, informasi dan pengetahuan dengan baik.

Beberapa aktivitas utama yang terus dijaga konsistensi penerapannya untuk mendukung praktik GCG yang searah dengan pengelolaan bisnis antara lain adalah:

A. Sistem Pengelolaan Kinerja

Untuk mewujudkan prinsip GCG khususnya akuntabilitas, Telkom mengelola pertanggung jawaban kinerja karyawan dalam sebuah Sistem Manajemen Performansi Karyawan melalui kebijakan Perusahaan No.PD.208.00/2011. Sebagaimana maksud dan tujuan ditetapkannya kebijakan ini, maka asas objektif adil dan transparan diterapkan mengacu pada pedoman pengukuran dan penilaian kinerja yang bertanggung jawab dalam mekanisme kontrak manajemen melalui penetapan indikator kinerja sesuai ruang lingkup tugas dan peran unit dan individu di organisasi dan penetapan target yang disepakati mengacu pada target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan Perusahaan. Target kinerja diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit sampai dengan karyawan dengan memperhatikan prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Time Related* ("SMART"), sedangkan evaluasinya dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan) sesuai indikator kinerja yang diukur dalam mekanisme penelaahan manajemen, yang didukung beberapa aplikasi sistem informasi secara *online*.

Melengkapi kebijakan No.PD.208.00/2011 ditetapkan kebijakan Direktur HCGA No.PR.208.01/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Performansi Karyawan yang secara garis besar menilai kinerja karyawan meliputi: kinerja individu dan kompetensi individu (*core competency* dan *spesific competency*). Penilaian kinerja individu mengacu pada realisasi kontrak manajemen dan penilaian kompetensi karyawan dilakukan melalui penilaian 360 derajat oleh yang bersangkutan, atasan, bawahan dan rekan sejawat/satu tingkat. Kedua proses penilaian dilakukan secara *online* melalui aplikasi sistem informasi berbasis web pada intranet/portal Perusahaan.

B. Penerapan Pakta Integritas dan Penguatan Anti Gratifikasi

Konsistensi penerapan Pakta Integritas telah dimulai sejak penerbitan kebijakan pada tahun 2009 yang mempertajam penerapan GCG terutama berkaitan dengan 9 (sembilan) area implementasi GCG yaitu kode integritas, etika bisnis, menghindari benturan kepentingan, larangan melakukan gratifikasi, larangan melakukan transaksi dengan orang dalam, menjaga kerahasiaan informasi, pencegahan atas tindakan memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada area pengadaan dan kemitraan, integritas layanan dan integritas pelaporan keuangan perusahaan.

Inisiatif penajaman/penguatan GCG melalui kebijakan Pakta Integritas, masih dipandang perlu untuk memberikan perhatian khusus pada area-area tertentu terkait dengan pencegahan potensi kerugian keuangan Perusahaan dan untuk terwujudnya '*island of integrity*' sebagai salah satu alat atau instrumen reformasi birokrasi dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("KKN") dengan konsentrasi pada upaya penciptaan keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi. Tahun 2012 terjadi pergantian Dewan Komisaris dan Direksi dan telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen penegakkan GCG.

Arahan Direktur Utama dan penandatanganan Pakta Integritas di hadapan senior leader Telkom Group

C. Pengelolaan Proses Berstandar ISO

Sejak tahun 1996, Telkom secara konsisten telah menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO dan pada tahun 2001 penerapannya diintegrasikan dengan kriteria keunggulan kinerja berbasis *Malcolm Baldrige*. Penerapan kedua sistem manajemen mutu tersebut (ISO dan *Malcolm Baldrige*) tidak lain adalah untuk membangun proses tata kelola dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan disiplin proses dan pendokumentasian yang baik berbasis ISO dan peningkatan keunggulan kinerja Perusahaan mengacu pada penilaian keunggulan kinerja *Malcolm Baldrige*. Tahun 2012 Perusahaan dinilai keunggulan kinerjanya oleh Tim penilai KPKU dari Kementerian BUMN dan secara internal dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pada tingkat Unit Bisnis/ Divisi meliputi Unit Network Regional dan Unit Divisi Enterprise.

D. Penerapan Tata Kelola Perencanaan Perusahaan

Konsistensi untuk mengelola perencanaan yang baik adalah salah satu perhatian utama manajemen dalam menerapkan GCG. Sesuai kebijakan Perusahaan No.KD.74/LB100/CA-20/2006, manajemen berupaya untuk memastikan bahwa perencanaan Perusahaan dilakukan lebih sistematis, tidak rumit, teratur, terintegrasi, selaras dengan visi dan misi Perusahaan, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya; juga memudahkan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pada saat pelaksanaan nantinya.

Model perencanaan Perusahaan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tahap perencanaan yaitu:

1. Penyelarasan harapan pemangku kepentingan
2. Perumusan strategi perusahaan (*strategic formulation*)
3. Penerapan strategi bisnis

Peran GCG dalam perencanaan Perusahaan adalah untuk menjamin dan memastikan keseluruhan proses dan kegiatan perencanaan dapat berlangsung baik, bertanggung jawab, transparan dan mampu memberi nilai tambah yang berkesinambungan bagi Perusahaan, serta tentu saja tidak bertentangan dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

E. Penerapan Tata Kelola TI

Penguatan tata kelola TI terus diupayakan, mengingat Telkom adalah Perusahaan yang bergerak dalam bisnis informasi dan menyalurkan data/informasi pelanggan yang harus terjamin keamanannya, Telkom senantiasa berusaha untuk memanfaatkan seluas mungkin penggunaan teknologi dalam pengelolaan Perusahaan karena secara langsung meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Perusahaan. Hampir seluruh titik dalam *value-chain* Perusahaan, yang mencakup pengoperasian jaringan seluruh infrastruktur alat produksi, semua aspek penting dalam manajemen Perusahaan seperti keuangan, logistik, sumber daya manusia termasuk juga pelayanan kepada karyawan, pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya telah terintegrasi dalam jaringan TI.

Kerangka kerja pengelolaan tata kelola TI mengacu pada *Control Objectives for Information and related Technologies* ("COBIT") yang dituangkan sebagai kebijakan Keamanan Sistem Informasi (No.KD 57/2007) meliputi:

- Informasi, sistem pengolahan data/informasi, jaringan dan sarana penunjang merupakan aset informasi yang sangat penting bagi Perusahaan;
- Penerapan sistem keamanan informasi untuk menjamin integritas aset dan informasi, sehingga dapat menjaga nilai kompetitif, arus kas, profitabilitas, kepatuhan hukum dan citra komersil perusahaan;
- Penerapan sistem keamanan informasi meliputi penilaian risiko, penilaian keamanan, kepatuhan pada peraturan dan hukum dan kebutuhan bisnis; dan
- Keberhasilan penerapan sistem keamanan informasi dapat dicapai dengan menerapkan pemahaman yang sama, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.

Beberapa contoh praktik tata kelola TI dalam operasi Perusahaan adalah pengelolaan *user access review, password management*, pengelolaan *audit log/audit trail*, pengelolaan *end user computing*.

F. Penerapan *e-procurement*

Sebagai wujud komitmen penerapan GCG dan Pakta Integritas, Telkom terus konsisten hingga saat ini untuk mengelola proses pengadaan dan kemitraan dengan penggunaan sistem *e-auction* melalui aplikasi JALINTRADE yang meminimalkan kontak fisik antara pemasok/mitra dengan panitia karena keseluruhan proses tender dan negosiasi telah berbasis komputer sehingga berlangsung adil dan transparan.

Beberapa manfaat yang telah diperoleh antara lain: kecepatan proses tender, penetapan calon peserta tender secara elektronik sesuai persyaratan yang ditentukan, pemilihan pemenang secara elektronik, dan manfaat lainnya terkait dengan kualitas proses yang semakin baik, kewajaran harga, keadilan, transparansi dan mencegah terjadinya intervensi.

G. Pengembangan Kompetensi SDM

Perubahan *portfolio* bisnis dari Infocom ke TIMES menimbulkan implikasi pergeseran kompetensi yang diperlukan. Sesuai kerangka kerja GCG yang telah dirumuskan, kompetensi dan kemampuan SDM merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan Perusahaan untuk dapat mewujudkan praktik GCG. Sebaik apapun kebijakan dan proses yang telah dirancang tidak akan membuahkan hasil yang optimal jika manusia yang menjalankan aktivitas tersebut tidak profesional.

Dalam implementasinya, pengelolaan pengetahuan di Perusahaan difokuskan untuk menciptakan nilai bisnis yang menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan proses penciptaan (*acquisition*), berbagi (*sharing*) dan pemanfaatan (*utilization*) pengetahuan yang dibutuhkan Perusahaan.

Guna mendukung proses pengelolaan pengetahuan tersebut, Perusahaan telah menyediakan *Knowledge Management System* yang diberi nama KAMPIUN yang merupakan bank data (*repository*) sebagai sarana bagi setiap karyawan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dengan cara mengunggah atau mengunduh melalui sistem, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas beranekaragam permasalahan pekerjaan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan produktivitas dan kualitas pekerjaan.

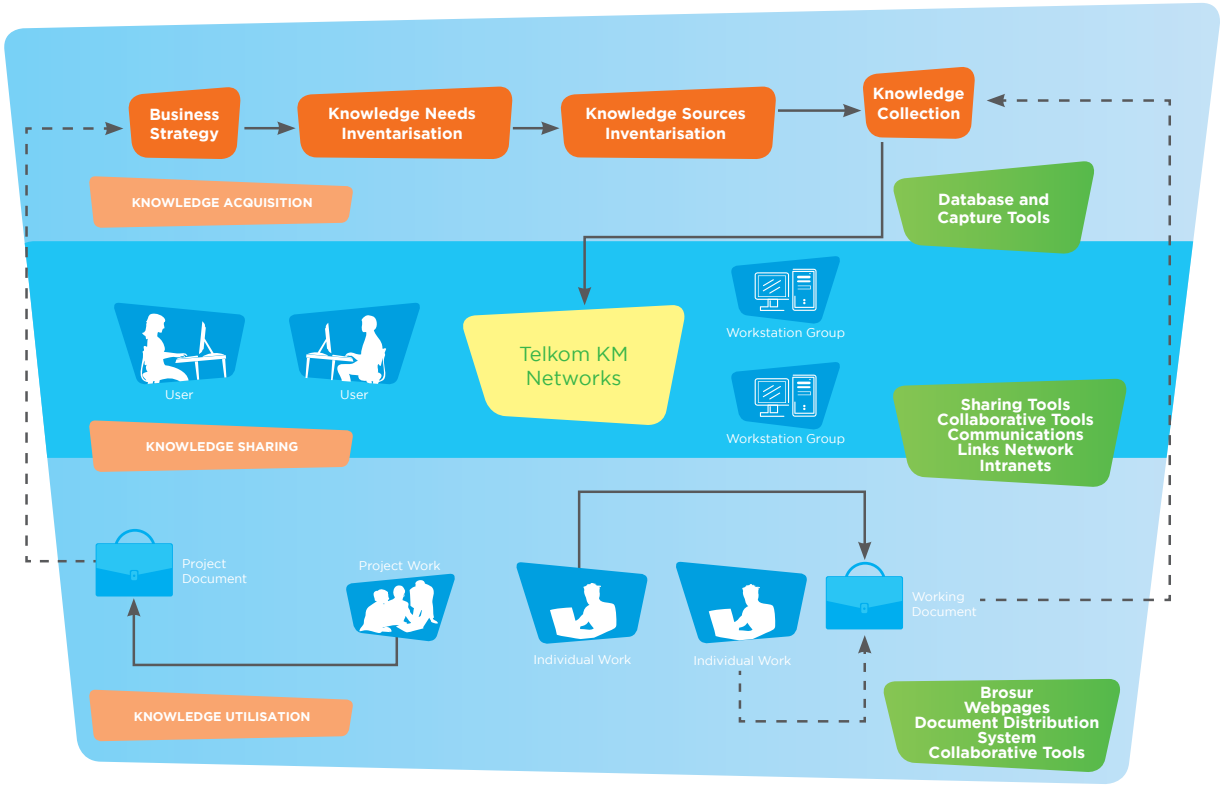

Tujuan akhir dari pengelolaan pengetahuan adalah terciptanya *learning organization*, yaitu suatu kondisi dimana organisasi akan tetap berjalan terus tanpa ketergantungan kepada pegawai tertentu dengan memproyeksikan dirinya menjadi *knowledge based enterprise* melalui transformasi *Learning Center* sebagai unit pembelajaran dengan metoda konvensional telah bertransformasi menjadi Corporate University ("CorpU") yang merupakan wahana peningkatan kompetensi yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Perusahaan agar terbentuk *Center of Excellent Human Capital* bertaraf internasional di industri TIMES yang dapat mendukung peningkatan performansi bisnis dan implementasi budaya baru dengan *tagline* "*from Competence to Commerce*" yang mempunyai makna bahwa karyawan yang kompeten yang akan meng-*create* bisnis.

Lihat bagian "Sumber Daya Manusia" halaman 81 untuk informasi lebih detail mengenai pengembangan kompetensi SDM.

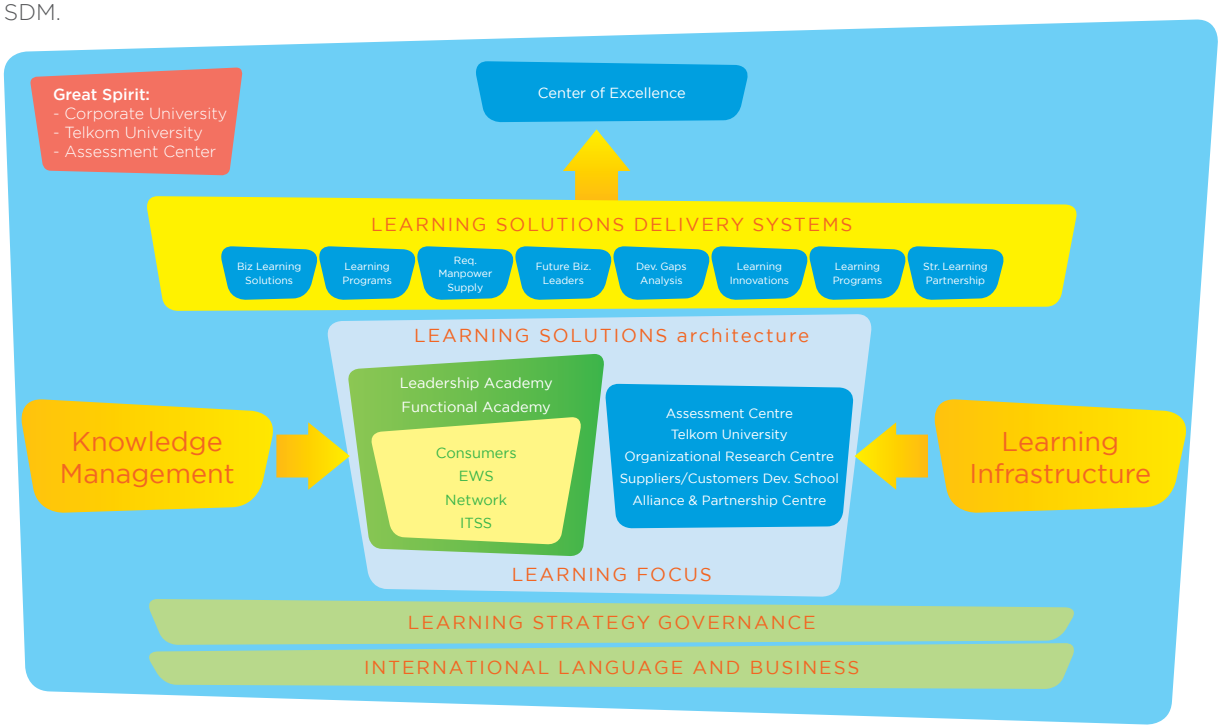

Telkom CorpU menggunakan metodologi yang berprinsip bahwa semua *learning & development* berkorelasi dan mendukung langsung kepada performansi bisnis. Telkom CorpU menjadi pusat peningkatan kompetensi bagi seluruh karyawan Telkom Group dengan metode pembelajaran terbaik yang menggabungkan berbagai metode pembelajaran ilmu-ilmu konseptual dengan ilmu-ilmu empirikal/praktikal.

H. Pengelolaan Kepemilikan Informasi dan *Intangible Asset*

Informasi dan seluruh *intangible asset*, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban Perusahaan adalah menjadi milik Perusahaan. Perusahaan mempunyai Peraturan tentang Pengelolaan Pengetahuan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual sesuai No.PD.605/2011. Dengan terlindungi dan terkelolanya kekayaan intelektual maka diharapkan dapat menambah *income generate* dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kreativitas dan inovasi atas produk dan jasa baru atau yang telah ada menjadi aset perusahaan. Perusahaan mengelola *database* meliputi ciptaan, merek, desain industri, invensi, rahasia dagang, hak cipta, hak atas merek, hak atas desain industri, paten dan hak atas rahasia dagang. Secara rutin perusahaan mengelola berbagai kegiatan yang menjadi *intangible aset* seperti inovasi melalui portal http://inovasi.telkom.co.id yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

I. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Memahami dan mengerti kebutuhan serta ekspektasi pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pengelolaan GCG untuk mewujudkan kesetaraan berkeadilan bagi pemangku kepentingan. Melalui budaya perusahaan "*The Telkom Way*", manajemen Perusahaan berusaha untuk menumbuhkan tata nilai dan budaya Perusahaan dengan cara pemahaman dikalangan karyawan Perusahaan akan nilai-nilai yang harus senantiasa disampikan kepada semua pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pusat inspirasi termasuk norma dan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan.

Berikut nilai-nilai pemangku kepentingan yang diidentifikasi:

Pemangku Kepentingan	Nilai Pemangku Kepentingan
Pelanggan	Tingkat kepuasan produk dan layanan
	Akurasi dan transparansi penagihan dan operasi
	Jaminan kelangsungan produk dan layanan
Pemegang Saham	Selalu memberikan dividen kepada pemegang saham
	Tren harga saham terus naik
	Selalu beradaptasi dengan lingkungan baru
	Memenangkan pasar dan selalu siap berkompetisi
	Kelangsungan pertumbuhan kinerja keuangan
	Jaminan tata kelola ekspansi bisnis
	Praktek manajemen kelas dunia
Karyawan	Kesejahteraan karyawan
	Tempat berkarir yang baik
Pemerintah	Kepatuhan pada aturan pemerintah
	Transparansi dan kepatuhan pajak
	Menjadi contoh bagi BUMN-BUMN
	Turut serta meningkatkan PDB
Pesaing	Persaingan bisnis yang adil
	Kemitraan bisnis yang saling membangun
	Membagi sumber daya untuk menekan biaya
Investor & Komunitas Keuangan	Transparansi pelaporan Perusahaan
	Laporan keuangan Perusahaan yang andal
Masyarakat	Lapangan kerja
	Multiplier effect ekonomi
	Memberikan dampak positif bagi masyarakat luas

Menindaklanjuti Keluhan Pelanggan dan Masyarakat
Dalam kondisi bisnis telekomunikasi yang telah mencapai titik jenuh, keseimbangan pemenuhan kebutuhan dan ekspektasi berbagai pemangku kepentingan merupakan tantangan tersendiri dalam menerapkan GCG. Dari waktu ke waktu, pelanggan maupun masyarakat umum telah menyampaikan kritik atau keluhan mengenai industri dan layanan telekomunikasi antara lain perang tarif yang berdampak pada penurunan ARPU dan penurunan kualitas layanan, keluhan layanan tagihan tetap, fenomena sedot pulsa dan lain-lain. Telkom menggunakan masukan ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanannya, dan segera menanggapi serta menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dan masyarakat, karena telah menjadi komitmen kami untuk selalu mengedepankan praktik usaha yang beretika dan memberikan kepuasan layanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

EVALUASI GCG

Pencapaian kinerja GCG di Perusahaan dimonitor melalui evaluasi tahunan oleh IICG, sebuah lembaga independen pemeringkat GCG di Indonesia. IICG secara rutin melakukan riset dan pemeringkatan CGPI terhadap Perusahaan publik (emiten), BUMN maupun Perusahaan lain diluar kategori emiten dan BUMN.

Proses penilaian dan pemeringkatan CGPI meliputi empat tahap dengan bobot nilai yang berbeda:
1. Tahap *self assessment*, Perusahaan diminta untuk mengisi kuesioner sesuai tema penilaian GCG.
2. Tahap observasi dokumen, dimana Perusahaan menyampaikan kebijakan, prosedur dan bukti-bukti lain yang menunjukan penerapan GCG di Perusahaan.
3. Tahap penilaian makalah dan presentasi, dimana Perusahaan menyusun makalah yang menjelaskan kegiatan Perusahaan dalam menerapkan GCG sesuai tema penilaian dan mempresentasikan makalahnya kepada dewan juri.
4. Tahap pengamatan, dimana dewan juri IICG mengunjungi Perusahaan untuk melakukan tanya jawab, pengamatan dan peninjauan lokasi untuk menelaah kepastian penerapan GCG di Perusahaan dengan mengacu pada hasil *self assessment*, pengamatan dokumen dan makalah.

Sebagai hasilnya, Telkom kembali memperoleh predikat terbaik sebagai *The Most Trusted Company* sesuai tema penilaian GCG pada tahun 2012 yaitu "GCG dalam Perspektif Risiko".

Selain penilaian oleh IICG, Telkom juga seringkali terpilih oleh lembaga-lembaga pemeringkat lain sebagai nominasi untuk diamati karena dipandang sebagai salah satu *benchmark* atau panutan bagi Perusahaan lain. Beberapa pencapaian atas evaluasi tersebut antara lain adalah:
1. Penghargaan *Most Consistent Dividend Policy and Best Strategic Corporate Social Responsibility* dari Alpha Southeast Asia Magazine.
2. Penghargaan Indonesia *Sustainability Reporting Awards* ("ISRA").
3. *The Best Environmental Responsibility* dan *The Best Investor Relations Professional* dari Majalah Corporate Governance Asia Hong Kong.
4. Penghargaan *Best Corporate overall* dari Indonesian Institute for Corporate Directorship ("IICD") mengenai praktik *Corporate Governance* di perusahaan publik di Indonesia.
5. Penghargaan 1st *The Best GCG Implementation of The Year* 2012 pada Anugerah *Business Review*.
6. Penghargaan *The Best Corporate of The Year* 2012 dari Majalah Business Review.
7. Penghargaan 2nd *Best* GCG *Implementation* dari Anugerah BUMN.
8. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index – The Most Trusted Companies* 2012 sebagai perusahaan sangat terpercaya yang diselenggarakan oleh IICG bekerja sama dengan Majalah SWA berdasarkan survei investor, analis dan *fund manager*.

175
Lingkungan Hidup

178
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3")

183
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

189
Konsumen

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab **Sosial dan Lingkungan**

Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sebagai dasar pelaksanaan Undang-undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang". Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.47/2012 tersebut menjadi dasar bagi Telkom dalam melaksanakan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dalam tataran global disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* ("CSR").

Selain itu, sebagai sebuah BUMN, Telkom juga berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL"), yang pada hakikatnya mempunyai tujuan serupa dengan CSR dengan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Sesuai ketentuan, sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan PKBL berasal dari penyisihan laba Perusahaan bagian Pemerintah, sedangkan pembiayaan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan berasal dari anggaran Perusahaan.

Seperti layaknya sebuah perusahaan kelas dunia, Telkom juga memiliki tanggung jawab sosial pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, selain manfaat yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya, dalam rangka memastikan eksistensinya ke masa mendatang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012, mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang meliputi program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen.

LINGKUNGAN HIDUP

Telkom secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya, selain untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup.

A. Kebijakan

Komitmen kami untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dituangkan dalam Surat Edaran No.ED.130/PS000/SDM-20/2008 tentang Langkah-langkah Efisiensi dalam Rangka Penghematan di Lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang dilaksanakan melalui berbagai program, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat. Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional Perusahaan harus ditekan serendah mungkin dan kami bertanggung jawab atas dampak tersebut.

B. Jenis Program

Kami berupaya untuk melakukan berbagai program terkait pelestarian lingkungan hidup yang terangkum dalam program Telkom *Go Green Action*, meliputi; mitigasi emisi karbon, efisiensi energi, pemakaian energi terbarukan, konsep kantor tanpa kertas, pengelolaan limbah, pengelolaan dan daur ulang air, serta penanaman satu miliar pohon. Seluruh upaya terkait pelestarian lingkungan hidup tersebut menghasilkan penghargaan bagi Telkom sebagai salah satu dari 20 perusahaan *Best Environment Responsibility* dari Corporate Governance Asia.

1. ***Upaya Mitigasi Emisi Karbon***

   Tanggung jawab lingkungan terkait dengan emisi karbon ("CO^2") akibat operasional Telkom, terutama pemakaian listrik konvensional dan penggunaan BBM, telah menjadi perhatian kami. Walaupun secara spesifik kami belum menghitung *carbon footprint* Telkom, namun berbagai langkah strategis dalam upaya mitigasi emisi karbon telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan berlanjut sampai tahun 2012.

   Langkah strategis tersebut dituangkan dalam *road map* akuisisi teknologi baru melalui pengimplementasian peralatan berefisiensi tinggi, antara lain:

   a. Penggunaan AC berteknologi *inverter*, *retrofit* system fluida dan thermodinamika AC dengan *Artticmaster* dan ekstensifikasi penggunaan *refrigerant hydrocarbon* sebagai pengganti freon ("CFC").
   b. Proyek percontohan implementasi lampu LED dengan tingkat efisiensi yang mencapai 90% dibandingkan lampu TL yang saat ini digunakan sehingga diharapkan dapat dicapai pemakaian listrik menjadi 10% dari kondisi saat ini.
   c. Pemasangan *capasitor bank* untuk menekan pemborosan akibat daya reaktif di STO-STO dengan daya terpasang >200kVA dan *power factor* <0,8.
   d. Modernisasi *switching* alat produksi dari TDM-switch yang mengonsumsi energi lebih tinggi, *huge & bulky footprint* dan pembuangan panas yang besar (*mass heat dissipation*) menjadi *soft switch* yang mengonsumsi energi lebih sedikit (*low power consumption*), *small & modular footprint* dan pembuangan panas yang rendah (*less heat dissipation*).
   e. Modernisasi *rectifier* dari tipe *linear-mode* yang memerlukan energi input yang tinggi (*high input power*) dan tingkat konversi efisiensi (*efficiency conversion*) yang rendah (kurang dari 65%) menjadi *switch-mode* yang

Telkom sebagai perusahaan besar berperan aktif melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca ("GRK") yang tertuang dalam program seperti upaya mitigasi emisi karbon, efisiensi energi gedung perkantoran, efisiensi energi BTS, dan *earth hour*. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta tanggung jawab lingkungan.

memerlukan energi input yang lebih rendah (*low input power*) dan tingkat konversi efisiensi (*efficiency conversion*) yang tinggi (lebih dari 91%).

f. Pengimplementasian *green data center* dengan kelebihan *zero depletion refrigrant* (no CFC), *zero depletion* FAP (N2 100% Natural Gas), *environment safe material* (tanpa timbal) dan hemat energi (LED *Light & Cooling System Management*).

Pengimplementasian peralatan berefisiensi tinggi diharapkan dapat dicapai penghematan pemakaian listrik, beban pemeliharaan dan mengurangi *down time* perangkat karena kegagalan sistem pengkondisi ruangan.

2. Efisiensi Energi Gedung Perkantoran

Sistem energi di gedung-gedung perkantoran Telkom telah kami buat menjadi semakin efisien. Berbagai langkah strategis yang diterapkan untuk itu, antara lain:

- Penggunaan kumpulan kapasitor (*capasitor bank*) untuk mengoptimalkan penggunaan listrik;
- Pemasangan kaca film pada jendela untuk mengurangi efek panas dari luar sehingga mengurangi kebutuhan untuk pendinginan atau pemakaian AC;
- Penggantian penerangan konvensional dengan penerangan hemat energi;
- Penggantian AC *chiller* dengan AC berdiri;
- Penerapan secara ketat "nyala-mati" listrik guna menghemat pemakaian listrik;
- Mendidik karyawan mengenai penghematan energi;
- Pengelompokan *switch* untuk mengurangi efek pemanasan dan menghemat listrik;
- Pemasangan alat pengatur waktu (*timer*) pada penerangan di luar gedung; dan
- Penempatan papan peringatan dan stiker di berbagai lokasi yang strategis guna mengingatkan karyawan untuk menghemat listrik dan air.

Di beberapa lokasi operasi, penghematan energi yang signifikan berhasil kami capai melalui pengalihan dari *switch* TDM ke teknologi *soft switch* yang memberikan penghematan dari 59,9A ke 23,9A. Sejak pertama kali diterapkan di seluruh Indonesia pada tahun 2009, proyek *soft switch* ini telah meliputi *call agents* (*soft switch*) di 23 lokasi dan gerbang *trunk* di 28 lokasi dengan kapasitas sebanyak 24.837.620 *Line* Unit ("LU") guna menambah kapasitas sambungan telepon tidak bergerak, serta keperluan modernisasi sentral dan akses dengan mengganti TDM *switch* yang sudah melampaui usia teknis.

3. Efisiensi Energi BTS

Penghematan energi yang signifikan juga datang dari penggunaan BTS di luar gedung pada semua lokasi BTS Telkom Flexi dan Telkomsel. BTS di luar gedung berukuran lebih kecil dibandingkan BTS di dalam gedung dan tidak membutuhkan gardu dan pendingin. Dengan BTS di luar gedung yang digunakan berjumlah 2.876 unit maka dalam kurun waktu satu tahun, kami telah menghemat energi dari berkurangnya keperluan pendinginan tersebut hingga 90% atau 3.291,3 KVA atau mencapai Rp55 miliar.

4. Pemakaian Energi Terbarukan

Mitigasi emisi karbon yang signifikan telah dilakukan melalui perubahan pola konsumsi energi dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan antara lain penggunaan energi matahari, air dan angin. Meskipun dalam skala kecil, kami telah mulai melaksanakan konsep "*carbon free*" untuk beberapa kegiatan operasional. Dengan menggunakan sel tenaga matahari sebagai energi untuk BTS, emisi karbon yang dapat dikurangi dapat mencapai 961,39 ton CO^2 setiap tahunnya.

Telkomsel menjadi pelopor dalam penggunaan BTS yang menggunakan energi terbarukan dari energi matahari mikrohidro, telah mengoperasikan sebanyak 4.400 BTS yang menggunakan sel bertenaga matahari di seluruh Indonesia dan menjadikannya operator dengan BTS ramah lingkungan terbanyak di Asia.

Energi terbarukan juga diimplementasikan untuk lokasi-lokasi di kepulauan dan perkotaan

lainnya yang masih menggunakan sumber tenaga genset 7x24 jam antara lain melalui pemanfaatan pembangkit listrik *hybrid* yang menggabungkan sel surya (*solar cell*) dan tenaga angin (*windpower*). Penggunaan energi terbarukan berupa pembangkit listrik *hybrid* diharapkan dapat dicapai penghematan beban pemakaian listrik, beban pemeliharaan dan beban konsumsi BBM hingga 98%, sementara 2% BBM masih diperlukan untuk keperluan pemeliharaan genset.

5. ***Konsep Kantor Tanpa Kertas***
   Upaya lainnya dalam mitigasi emisi karbon adalah dengan menerapkan konsep Kantor Tanpa Kertas. Telkom telah menerapkan konsep ini melalui aplikasi nota dinas *online* sejak 1998 di beberapa unit dan telah diimplementasikan secara nasional. Sejak konsep ini diimplementasikan, manajemen Telkom membuat kebijakan pemotongan anggaran pembelian kertas secara signifikan. Dengan pemakaian kertas seminimum mungkin, kami telah mengurangi jumlah sampah kertas.

   Saat ini, seluruh unit di Telkom telah menggunakan aplikasi nota dinas *online* untuk pengiriman nota dinas di internal Telkom. Selama tahun 2012, surat nota dinas yang dibuat oleh seluruh unit di Telkom melalui aplikasi nota dinas *online* berjumlah 260.960 buah.

   Dengan asumsi rata-rata satu nota dinas terdiri dari 2 (dua) lembar dan ditujukan kepada 3 (tiga) orang penerima dan selanjutnya masing-masing diteruskan kepada 3 (tiga) orang, maka dapat dihitung 260.960 dokumen surat x 2 lembar x 3 penerima x 3 disposisi sama dengan 4.697.280 lembar kertas atau sama dengan 9.395 rim kertas. Dengan menggunakan aplikasi nota dinas *online*, kami telah menghemat kertas sebanyak 9.395 rim kertas.

   Telkom juga mengedukasi para karyawan dan pelanggan dalam menerapkan konsep tersebut, antara lain dalam hal penerbitan surat tagihan elektronik, pembayaran tagihan secara terpusat melalui *teller*, Anjungan Tunai Mandiri ("ATM"), *phone banking, internet banking, mobile banking* dan *auto debit*.

6. ***Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3")***
   Pengelolaan sampah dilakukan bersama Dinas Kebersihan setempat. Pengawasan rutin diterapkan guna menekan jumlah sampah yang tercecer. Telkom juga melakukan pengelolaan sampah dan pembuangan secara bertanggung jawab di seluruh kantor operasional.

   Terhadap material yang dapat didaur ulang, seperti; baterai bekas, kabel tembaga dan material logam, prosesnya diserahkan kepada pihak ketiga. Perangkat dan peralatan yang sudah tua diganti dengan perangkat dan peralatan baru dan khusus untuk AC baru diharuskan AC yang tidak menggunakan gas Freon R6 atau Halon sehingga emisi karbon dapat dikurangi. Agar kebijakan *retrofit* gas freon berjalan efektif, kami mengadakan pelatihan untuk Teknisi yang menangani Musicool dan memperoleh sertifikasi dari PT Pertamina (Persero).

7. ***Pengelolaan dan Pemakaian Air Daur Ulang***

Air sangat vital untuk kehidupan manusia dan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan ekosistem. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemakaian air menjadi isu yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan upaya mitigasi emisi karbon. Dalam kaitan ini, kami memiliki komitmen yang tinggi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemakaian air.

Konsumsi air Telkom relatif rendah yang dipergunakan untuk operasional gedung dan keperluan minum karyawan yang mayoritas dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum ("PDAM") tempat kami beroperasi. Meskipun volume konsumsi air relatif sedikit, kami telah melaksanakan langkah strategis dalam pengelolaan air dengan pemasangan biopori dan penampung air di sekeliling gedung kantor untuk menampung air hujan serta melakukan proses daur ulang air yang secara sederhana dilakukan dengan menggunakan filtrasi berbasis arang dan hasil air daur ulang digunakan untuk mencuci kendaraan operasional dan menyiram tanaman di halaman kantor.

8. ***Gerakan Bersepeda ke Kantor (Bike to Work)***

Dalam rangka hidup sehat dan sekaligus memitigasi emisi karbon, Perusahaan menghimbau karyawan untuk bersepeda ke kantor setiap hari Jumat. Himbauan ini dikeluarkan pada tahun 2009 dan pelaksanaannya direspons dengan baik oleh sebagian besar karyawan hingga tahun 2012. Kami mengharapkan hal ini akan menjadi kebiasaan yang merupakan bagian dari gerakan nasional "*Bike to Work*" dan membudaya di kalangan karyawan.

9. ***Satu Miliar Pohon untuk Indonesia (One Billion Indonesia Trees - "OBIT")***

Sebagaimana tertuang dalam komitmen Manajemen pada tanggal 23 Desember 2011 yang lalu, yang menyatakan bahwa Telkom sebagai BUMN mendukung penuh Program OBIT sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada tahun 2020 mendatang yang dipertegas oleh Kementerian BUMN untuk membangun dan mengembangkan 2 juta hektar hutan rakyat di Pulau Jawa hingga 2014 dan pada tahun 2012, Telkom berhasil melakukan penanaman sebanyak 16.000 pohon pada tanah seluas 36 hektar.

10. ***Earth Hour***

Secara rutin setiap tahunnya Telkom berpartisipasi dalam kegiatan "*Earth Hour*" yang digalakkan oleh WWF yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup dengan mengurangi konsumsi energi listrik. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pemadaman listrik selama 1 jam pada hari Sabtu, minggu ke-4 bulan Maret setiap tahun pada pukul 20.30-21.30.

C. Dampak Keuangan dari Kegiatan

Pada tahun 2012, Telkom mengeluarkan biaya total sebesar Rp348 miliar untuk seluruh program tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup.

D. Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Dengan mengusung visi untuk menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan TIMES di kawasan regional dengan misi penyediaan layanan TIMES berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sekaligus menjadi model pengelolaan korporasi terbaik, Perusahaan harus memperhatikan juga pengendalian lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Untuk memenuhi regulasi Pemerintah dalam hal menerapkan SMK3, pada tahun 2012 Telkom dan GSD telah memperoleh sertifikasi SMK3.

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ("K3")

A. Ketenagakerjaan

1. ***Kebijakan***

Strategi pengelolaan SDM kami menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompetensi SDM searah dengan portofolio bisnis Telkom Group yang semakin fokus pada Telekomunikasi, Informasi, Multimedia, *Edutainment* dan *Services* ("TIMES"). Kami juga berupaya meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara Perusahaan di jajaran Telkom Group dengan terus menekankan penerapan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk lima tahun ke depan dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha Perusahaan.

Undang-undang No.13 tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan di Telkom untuk memastikan kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

a. *Pengelolaan Hubungan Karyawan dengan Manajemen*
Hubungan antara karyawan dengan manajemen perusahaan telah terbina dengan baik. SEKAR yang beranggotakan sekitar 93,5% karyawan Telkom merupakan organisasi yang berhak mewakili karyawan dalam berhubungan dengan manajemen dan telah terlibat secara aktif dalam perundingan PKB dengan manajemen.

b. *Rekrutmen SDM*
Rekrutmen SDM Telkom dilakukan melalui rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki melalui sinergi di jajaran Telkom Group agar tercapai efisiensi biaya pergantian karyawan dan didapatkan kandidat terbaik sesuai keperluan serta secara bersamaan memfasilitasi pengembangan karir bagi karyawan yang ada. Rekrutmen eksternal difokuskan pada perekrutan karyawan berpendidikan yang lebih tinggi dan karyawan dengan kompetensi yang belum dimiliki Telkom.

c. *Pengembangan Kompetensi*
Penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan yang bersifat perubahan kompetensi dan pengembangan kompetensi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk perubahan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan kompetensi karyawan agar mampu menyikapi perubahan telekomunikasi berbasis TDM menjadi telekomunikasi berbasis IP dan kompetensi IMES. Sementara itu, pelatihan untuk pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan karyawan dengan kompetensi tertentu guna mendukung portofolio bisnis Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi bagi karyawannya yang saat ini dikelola melalui pembentukan Telkom CorpU. Salah satu program Telkom CorpU adalah *international certification* dan GTP yang memberikan peluang bagi talent terbaik perusahaan untuk memiliki *global exposure* dan *global experience* melalui pengiriman mereka ke berbagai negara di Asia Pasifik.

d. *Remunerasi Karyawan*
Telkom dan entitas anak memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya yang terdiri dari gaji bulanan, berbagai tunjangan dan fasilitas antara lain fasilitas perumahan, pensiun dan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dan secara rutin dievaluasi agar pergerakan gaji karyawan sesuai dengan harga pasar.

e. *Pelayanan Kesehatan*
Telkom menyediakan layanan kesehatan yang dikelola oleh Yakes bagi karyawan dan pensiunan beserta keluarga inti yang menjadi tanggungannya yang diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas Perusahaan.
Jaminan kesehatan juga disediakan untuk seluruh karyawan yang telah pensiun, termasuk keluarga yang menjadi tanggungan dalam dua jenis pendanaan, yakni:
- bagi karyawan yang diangkat sebagai pegawai sebelum tanggal 1 November 1995 dan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun, berhak mengikuti jaminan layanan kesehatan yang dikelola oleh Yakes Telkom; dan
- bagi semua karyawan tetap lainnya, memperoleh layanan kesehatan dalam bentuk tunjangan asuransi.

Entitas anak Telkom memberikan tunjangan kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang disponsori oleh pemerintah yang dikenal sebagai Jamsostek.

f. *Program Pensiun*
Telkom memiliki dua program pensiun, yaitu (i) Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") yang ditujukan bagi karyawan tetap yang direkrut sebelum tanggal 1 Juli 2002; dan (ii) Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang berlaku bagi karyawan tetap lainnya.

g. *Penghargaan karyawan*
Secara rutin, Telkom dan perusahaan di jajaran Telkom Group memberikan apresiasi kepada karyawan dan unit yang berprestasi dalam mendukung pencapaian target bisnis perusahaan. Pemberian penghargaan ini untuk memotivasi karyawan agar memberikan kontribusi yang lebih baik di periode mendatang.

h. *Tingkat perpindahan (turnover) karyawan*
Tingkat perpindahan karyawan yang keluar dari perusahaan dengan berbagai sebab antara lain pengunduran diri secara sukarela, diangkat menjadi pejabat baik di lingkungan Telkom, entitas anak maupun Pemerintahan, meninggal dunia, pensiun normal dan pensiun dini yang merupakan program yang ditawarkan secara terbuka dan bersifat sukarela bagi karyawan yang memenuhi kriteria tertentu.

i. *Kesetaraan gender dan kesempatan kerja*
Telkom tidak memiliki kebijakan internal terkait ketenagakerjaan yang membedakan penerapannya berdasarkan *gender*. Seluruh peraturan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh karyawan tanpa membedakan *gender*. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh karyawan.

2. Jenis Program
Selama tahun 2012, Telkom telah melaksanakan kegiatan di bidang ketenagakerjaan, antara lain:
a. Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") IV telah disepakati dan disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui surat keputusan No.PKB.310/ORG/DPP-SEKAR/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan perpanjangan terakhir No.PKB.222/DPP-DPP00.000/2012 tanggal 23 Agustus 2012.
b. Jumlah pegawai baru yang direkrut selama tahun 2012 adalah 280 orang.
c. Pengembangan kompetensi karyawan
Selama tahun 2012, sebanyak 21.013 karyawan (*man-program*) telah mengikuti pengembangan kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri:
   - 3.889 karyawan mengikuti program Telekomunikasi;
   - 3.951 karyawan mengikuti program Informasi;
   - 139 karyawan mengikuti program Media serta program *Edutainment*.
   - Pengembangan bakat kepemimpinan diikuti sebanyak 934 karyawan;
   - Telkom *New Culture* diikuti 488 karyawan;
   - *Synergy* Telkom Group diikuti 295 karyawan;
   - Program sertifikasi diikuti 473 karyawan;
   - Program GTP telah mengirimkan 109 karyawan ke berbagai negara di Asia Pasifik antara lain Singapura, Hong Kong, Australia, Timor Leste, dan Myanmar; dan
   - Program *international certification* di berbagai bidang telah diperoleh 363 karyawan.

d. Remunerasi yang diberikan kepada karyawan telah disesuaikan dengan indeks inflasi dan prestasi karyawan.
e. Berbagai penghargaan telah dianugerahkan kepada karyawan berprestasi baik dari

internal maupun dari pihak eksternal serta penghargaan yang diserahkan untuk unit-unit berprestasi, dengan rincian sebagai berikut:
- Penghargaan internal dianugerahkan kepada 224 karyawan;
- Penghargaan eksternal berupa tanda jasa kehormatan dari Pemerintah (Presiden RI) kepada 7 karyawan; dan
- Penghargaan unit diserahkan kepada 40 unit.

f. Tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan selama tahun 2012 adalah sebanyak 622 orang.
g. Selama tahun 2012, jumlah karyawan dan pensiunan beserta keluarga intinya yang menjadi peserta layanan kesehatan Yakes Telkom mencapai 124.543 orang.
h. Program pensiun
   - Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP")
     PPMP dikelola oleh Dana Pensiun dengan perhitungan pensiun bagi peserta PPMP menggunakan jasa aktuaria yang didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika karyawan tersebut meninggal. Sumber utama Dana Pensiun ini berasal dari iuran karyawan dan Perusahaan. Partisipasi karyawan dalam program ini sebesar 18% dari gaji pokok (sebelum bulan Maret 2003, tingkat kontribusi karyawan adalah sebesar 8,4%) sedangkan Perusahaan memberikan kontribusi sisanya. Minimum manfaat pensiun bulanan untuk karyawan yang pensiun sekitar Rp425.000 setiap bulannya.

   - Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP")
     PPIP merupakan program pensiun bagi karyawan tetap yang direkrut sejak tanggal 1 Juli 2002 yang dikelola oleh DPLK yang dipilih secara mandiri oleh karyawan ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar karyawan peserta.

     Telkomsel juga melaksanakan PPMP bagi karyawannya. Dengan program ini, karyawan berhak mendapatkan manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan gaji pokok atau gaji total dan masa bakti. PT Asuransi Jiwasraya, BUMN asuransi jiwa, mengelola program ini berdasarkan kontrak asuransi tahunan. Hingga tahun 2004, kontribusi karyawan kepada program ini adalah sebesar 5% dari gaji yang dibayarkan bulanan sementara Telkomsel membayar sisa kontribusi yang ditetapkan. Mulai tahun 2005, total kontribusi kepada program dilakukan sepenuhnya oleh Telkomsel.

3. Dampak Keuangan dari Kegiatan

Berikut adalah dampak keuangan dari beberapa program ketenagakerjaan yang dimiliki Telkom:
a. Biaya yang dikeluarkan untuk program rekrutmen adalah sebesar Rp2 miliar
b. Program pengembangan kompetensi:
   - Pelatihan dan pendidikan selama tahun 2012, Telkom mengalokasikan Rp158 miliar atau rata-rata sebesar Rp8 juta per karyawan yang mengikuti program tersebut;
   - Biaya yang dikeluarkan untuk GTP adalah sebesar Rp14 miliar; dan
   - Biaya yang dikeluarkan untuk program *international certification* adalah sebesar Rp6 miliar.
c. Kontribusi Perusahaan untuk pelayanan kesehatan pasca kerja dan tunjangan asuransi selama tahun 2012 adalah masing-masing sebesar Rp300 miliar dan Rp18 miliar.
d. Kontribusi Perusahaan untuk PPMP dan PPIP selama tahun 2012 masing-masing mencapai Rp186 miliar dan Rp5 miliar.
e. Biaya yang dikeluarkan untuk penyerahan penghargaan adalah sebesar Rp10 miliar

Lihat bagian Sumber Daya Manusia halaman 78 untuk informasi yang lebih detail mengenai ketenagakerjaan.

B. Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3")

1. Kebijakan

Sejak 2009, pengelolaan K3 difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun. Komitmen Telkom untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja diwujudkan dalam kebijakan Perusahaan yang diatur dalam Keputusan Direksi tentang Penetapan Kebijakan Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Perusahaan (*Enterprise Security and Safety Governance*) No.KD.37/UM400/COO-D0030000/2010.

2. *Jenis Program*

Setiap tahun survei K3 diselenggarakan bersamaan dengan survei pendapat karyawan Telkom. Survei K3 ini dilakukan untuk mengetahui apakah lingkungan kerja karyawan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Hasil survei K3 tersebut menunjukkan Telkom memperoleh skor 78% yang dikategorikan sebagai "Cukup Baik".

Berbagai kegiatan yang dilakukan terkait dengan program K3 selama tahun 2012 antara lain adalah:

a. *Pelatihan tentang keselamatan kerja*
   - Pelatihan Ahli K3 Umum di Diklat Area Semarang;
   - Simulasi Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Telkom Jakarta Timur;
   - Simulasi Tanggap Darurat Serangan Udara terhadap objek vital bekerja sama dengan TNI AU di SPU Satelit Cibinong;
   - Pelatihan dan simulasi Tanggap Darurat bencana alam Tsunami di Telkom Aceh; dan
   - Pelatihan dan simulasi Tanggap Darurat bencana alam gempa bumi di berbagai lokasi antara lain di Telkom Padang, Menado dan Surabaya.

b. *Pencapaian target 'zero accident'*

Lokasi	Jam Kerja Selamat
Area Telkom Bekasi	1.639.416
Area Telkom Bogor	3.617.629
Area Telkom Jakarta Barat	1.940.008
Area Telkom Jakarta Selatan	1.929.540
Area Telkom Jakarta Timur	3.650.688
Area Telkom Jakarta Utara	2.087.478
Area Telkom Tangerang	3.763.452
Regional Telkom Sumatera	9.939.368
Regional Telkom Jawa Barat	3.624.569
Regional Telkom Jawa Tengah	7.759.884
Regional Telkom Jawa Timur	6.365.912
Regional Telkom Kalimantan	4.745.153
Regional Telkom KTI	10. 273.934
GKP Telkom Bandung	4.050.202
GCC Telkom Jakarta	3.566.679
GCC Telkom Jakarta Pusat	2.502.112

c. *Aplikasi SMK3 online dan safety care online*
   i. Aplikasi SMK3 *online* dapat diakses oleh seluruh pegawai organik yang memuat kriteria pengukuran SMK3 dan dapat digunakan untuk *monitoring*, evaluasi dan analisis secara *online* sehingga mempermudah dan mempercepat proses implementasi dan pemutakhiran secara nasional.
   ii. Aplikasi *safety care online* merupakan sarana untuk menumbuhkan kepedulian pegawai terkait aspek-aspek K3 di lokasi kerja masing-masing, misalnya untuk menginformasikan kondisi di lokasi pekerjaan yang berisiko terhadap kelangsungan K3 sehingga dapat segera ditindaklanjuti solusinya.

d. *Penghargaan yang diterima dalam bidang K3*
   i. *Zero accident* dari Kemenakertrans sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012 untuk lokasi-lokasi sebagai berikut:
      - Gedung Telkom eks DIVRE-II GCC Jakarta mencapai 5.712.000 jam kerja selamat;
      - Telkom Area Jakarta Selatan Gedung eks Datel Selatan mencapai 24.688.016 jam kerja selamat;
      - Telkom Area Jakarta Barat Gedung eks Datel Barat mencapai 6.315.381 jam kerja selamat; dan
      - Kantor Regional–VI Kalimantan Balikpapan Kalimantan Timur mencapai 68.669.236 jam kerja selamat.
      - Telkom Area Balikpapan Gedung eks Datel Balikpapan Kalimantan Timur mencapai 11.333.732 jam kerja selamat; dan
      - Gedung Divisi Consumer Service Regional KTI Makassar Sulawesi Selatan mencapai 2.260.204 jam kerja selamat.

   ii. *Zero accident* dari Gubernur DKI Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012 untuk lokasi-lokasi sebagai berikut:
      - Gedung Telkom eks DIVRE-II GCC Jakarta mencapai 5.712.000 jam kerja selamat;
      - Telkom Area Jakarta Selatan Gedung eks Datel Selatan mencapai 24.688.016 jam kerja selamat; dan
      - Telkom Area Jakarta Barat Gedung eks Datel Barat mencapai 24.776.525 jam kerja selamat.

   iii. Tertib K3 dari Gubernur DKI Jakarta untuk lokasi-lokasi sebagai berikut:
      - Gedung Telkom eks DIVRE-II GCC Jakarta;

- Telkom Area Jakarta Selatan Gedung eks Datel Selatan; dan
- Telkom Area Jakarta Barat Gedung eks Datel Barat.

iv. Penghargaan SMK3LLK dari Vico Indonesia dengan total nilai 62,2 sehingga dapat mengikuti lelang jasa/karyawanan yang diselenggarakan di Vico untuk kategori risiko tinggi.

v. Penghargaan Kemenakertrans Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan hasil audit sistem manajemen K3 yang direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan untuk kategori Tingkat Lanjutan" untuk lokasi-lokasi sebagai berikut:
- Telkom Area Jakarta Barat dengan hasil pencapaian 92%;
- Telkom Area Balikpapan Kalimantan Timur dengan hasil pencapaian 88%
- Telkom Area Jakarta Selatan dengan hasil pencapaian 94%; dan
- Gedung Kantor Pusat Telkom di Bandung Barat dengan hasil pencapaian 90%.

3. Dampak Keuangan dari Kegiatan

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan K3 pada tahun 2012 adalah sebesar Rp944 juta.

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

A. Kebijakan

Berbagai kegiatan yang dijalankan dalam program kemitraan ditujukan untuk memicu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi masyarakat. Adapun sasaran dari pelaksanaan program ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bisnis utama Telkom.

Tujuan pelaksanaan program adalah membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan masyarakat yang sejahtera. Pelaksanaan program mengacu pada Keputusan Direksi No.KD.21/PR000/COP-B0030000/2010 tentang Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dan inisiatif Telkom dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat (*community development*), melalui Program Bina Lingkungan maupun aktivitas CSR Perusahaan.

B. Jenis Program

1. Program Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Program Kemitraan

Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah para pelaku UKM. Adapun sektor kegiatan usaha mereka meliputi industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya. Program pelatihan dan pemberian pinjaman bergulir diberikan berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan perkembangan dan potensi setempat pada kedelapan sektor tersebut.

Pada tahun 2012, kami telah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang berlangsung di seluruh Indonesia yang diikuti calon mitra binaan maupun mitra binaan. Selain itu juga, telah disalurkan pinjaman bergulir untuk para pelaku UKM yang menjadi mitra binaan sebesar Rp344 miliar dengan jumlah mitra binaan sebanyak 9.346 unit usaha.

Kami menindaklanjuti penyaluran pinjaman bergulir dengan melakukan pemantauan atas penggunaan, pengelolaan maupun tingkat pengembaliannya. Untuk memotivasi seluruh mitra binaan agar berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengembalikan dana pinjaman tepat waktu, secara periodik dilakukan penilaian disertai pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

Beberapa contoh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan tahun 2012 adalah:

- Indigopreneur
  Pelatihan Indigopreneur ditujukan untuk UKM yang belum menjadi mitra binaan Telkom dengan materi *e-commerce*, kewirausahaan dan perbankan, IT, *imagineering mindset, self awareness and enterpreuners goal setting*, bisnis kreatif dan *platinum track* dan selama tahun 2012 secara nasional telah diselenggarakan di 6 lokasi.

Adapun tujuan program ini adalah :

a. Menjadikan industri UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan;
b. Meningkatkan kemampuan pelaku UKM dalam bidang ICT;
c. Mengoptimalkan kapasitas dan ketahanan pelaku UKM melalui pembentukan pola berpikir yang kreatif, inovatif, mandiri dan tangguh.

- Pelatihan *e-Commerce*

  Pelatihan dimaksudkan untuk membekali para pelaku UKM pengetahuan mengenai *e-commerce*, mengingat UKM merupakan tulang punggung pertumbuhan perekonomian negara.

  Pelatihan *e-commerce* merupakan komitmen Telkom meningkatkan potensi 100.000 UKM Indonesia melalui pemanfaatan TIK yang efektif, untuk berbisnis dan berinteraksi secara *online*. Melalui program ini UKM lokal dapat mengembangkan bisnis dengan solusi TIK berkualitas dan terjangkau, seperti *web builder, web hosting* dan *domain*.

  Kehadiran fasilitas *e-commerce* tersebut diharapkan dapat mengembangkan perekonomian daan memfasilitasi para Mitra Binaan untuk bertransaksi secara *online*. Melalui peningkatan pengetahuan dalam teknologi informasi diharapkan para pelaku UKM lebih memahami pemanfaatan teknologi informasi secara efektif sehingga pelaku UKM mampu bersaing dengan UKM dari negara lain dan berkiprah di kancah global.

- Bawang Goreng dari Palu

  Berawal dari sebuah kampung di Palu, Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai penghasil bawang di Sulawesi, Ibu Fauzi Salim mulai berjualan bawang goreng sambil jualan sarung Donggala sejak tahun 2004. Ibu Fauzi Salim mulai menjadi mitra binaan Telkom mulai tahun 2006 dengan pinjaman Rp40 juta. Berbekal pinjaman tersebut dipergunakan untuk membuka outlet dan konsentrasi pada produksi bawang goreng dengan merek Sal-Han yang beralamat di Jl. Sis Al Jufri 48 Palu.

  Sebelum mendapat bantuan Telkom, kapasitas produksinya berkisar antara 100 kg dan 300 kg. Setelah mendapat bantuan kapasitas produksi meningkat menjadi berkisar antara 600 kg dan 1 ton dengan pendapatan Rp600.000 hingga Rp5 juta per hari dengan penjualan hasil produksi bawang gorengnya telah merambah Makassar, Manado, Gorontalo, Surabaya, Jakarta bahkan Malaysia. Industri ini memberi lapangan kerja bagi setidaknya 40 orang, belum termasuk pedagang yang memasarkan produksinya yang mencapai ratusan orang. Berkat kepeloporan dan kegigihannya mengembangkan

industri bawang goreng di Palu sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungannya, industri Bawang Goreng Sal-Han menjadi salah satu pemenang Telkom CSR *Award* 2012.

- Patin Asap
  Awal 2007, Firman Edi merintis industri olahan ikan patin segar dan ikan patin asap di pasar sekitar Kampung Patin, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Waktu itu, Firman melihat adanya peluang ikan patin olahan yang sangat besar karena adanya *over* produksi budi daya ikan patin. Pada awalnya banyak pesanan dari konsumen yang ditolak karena keterbatasan modal awal untuk pembelian bahan baku dan proses produksi.

  Setelah mengikuti program Mitra Binaan Telkom pada tahun 2007, usaha olahan ikan patin dan ikan asapnya berkembang sangat pesat. Semula produksi hanya sekitar 150 kg per hari dilakukan di 1 rumah olahan dengan 7 karyawan, sekarang melonjak menjadi sekitar 750 ton hingga 1 ton per hari dilakukan di 2 rumah olahan dengan 20 karyawan. Pemasaran produksi ikan patin asap telah menyebar ke seantero Nusantara (Riau, Batam, Jakarta, Sumatera Barat dan Aceh) dan pasar internasional (Malaysia).

b. *Program Kreativitas*
   Program ini hakikatnya bertujuan untuk menggali kreativitas masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi dari kegiatan yang berbasis pada teknologi TIMES. Berbagai kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2012 tersaji dalam uraian berikut:
   - Komunitas Digital Indonesia (Indigo)
     Indigo atau Indonesia *Community Digital* adalah program untuk menumbuhkan kreativitas digital melalui kerja sama dengan berbagai komunitas antara lain Santri Indigo, IndigoPreneur. Prakarsa strategis Indigo diluncurkan tahun 2007, untuk memfasilitasi komunitas kreatif Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital dan membangun industri yang akan ikut berkontribusi pada ekonomi nasional.

     Pengembangan industri kreatif yang melibatkan komunitas adalah bagian dari strategi jangka panjang kami untuk membangun dan mendinamiskan industri komunikasi digital infrastruktur, layanan, aplikasi, dan konten. Melalui program Indigo, kami ingin memposisikan diri sebagai penyedia sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan para pelaku industri kreatif sehingga secara bersama-sama menumbuhkan pasar bagi karya kreatif digital di Indonesia.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat

a. *Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat*
   Bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik keahlian, pengetahuan maupun perilaku pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat dan keluarga besar Telkom Group. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi program-program: Bagimu Guru Ku Persembahkan, i-CHAT dan *Cooperative Academic Education*.

   i. Bagimu Guru Ku Persembahkan
   Program ini sudah berjalan selama enam tahun dan merupakan salah satu upaya kami untuk ikut membangun dan menciptakan dunia pendidikan berkualitas di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan antara lain melalui pemberian pelatihan kepada para guru, ujung tombak dunia pendidikan.

   Pada tahun ke-6 ini, pelatihan dititikberatkan pada pembangunan karakter selain juga memperkuat muatan materi interaktif pada penggunaan IT untuk mengajar. Ada tiga tujuan dari program "Bagimu Guru Ku Persembahkan", yaitu:
   - Menjadikan guru sebagai "*agent of change*" dalam dunia pendidikan di Indonesia;
   - Menambah wawasan guru dalam bidang ICT;
   - Memberdayakan komunitas guru yang telah mengikuti pelatihan.

   Pada tahun 2012, program yang dikemas dalam bentuk interaktif sehingga para guru dapat berinteraksi langsung dengan pemberi materi ini dilaksanakan sebanyak 2 angkatan di Jakarta dan 1 angkatan di Denpasar.

   ii. i – CHAT (*I Can Hear and Talk*)
   i-CHAT adalah perangkat lunak yang berupa aplikasi dan portal hasil kreativitas unit Research Development Center

("RDC") Telkom yang bertujuan membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi kalangan tunarungu dan anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal pendengaran dengan masyarakat luas menggunakan isyarat yang diterjemahkan melalui monitor dan suara.

Aplikasi yang resmi tersedia dibuat dalam dua *mode: mode offline*, yang mengharuskan pengguna untuk melakukan instalasi program pada komputernya dan *mode online* yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan mengakses situs i-CHAT di http://www.i-chat.web.id. Saat ini portal tersebut memuat aplikasi i-CHAT secara *online* yang terdiri dari lima modul: Kamus, Abjad Jari, Bilangan, Tematik, dan Susun Kalimat.

Program i-CHAT selama tahun 2012 berlangsung di beberapa SLB di Medan, Bandung, Cimahi, Semarang, Sleman Bantul, Surabaya dan Banjarmasin.

iii. ***Cooperative Academic Education* ("Co-Op")**

Telkom sebagai BUMN menaruh perhatian kepada program pemerintah untuk menjembatani "*link and match*" dunia perguruan tinggi dengan dunia industri melalui Program Co-Op dengan tema "*Optimizing Co-Op Benefit to Enhance Competitive Advantage for Corporate and Other Stakeholder*".

Sejak tahun 1997 Telkom telah aktif menyelenggarakan Program Co-Op yang merupakan suatu bentuk kerja sama dalam pelaksanaan praktik kerja di lapangan yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja sekaligus sebagai partisipasi dalam kegiatan pembangunan pencerdasan anak bangsa. Pelaksanaan Co-Op dapat melalui magang ditempatkan di Perusahaan Telkom Group atau pendampingan ditempatkan di Mitra Binaan Telkom selama kurun waktu tiga bulan.

Program Co-Op 2012 yang berlangsung pada Februari s/d Maret 2012 berhasil menyeleksi 1.246 mahasiswa dari 65 perguruan tinggi se-Indonesia. Panitia bersama DPPK kemudian menjaring 474 mahasiswa sebagai peserta Co-Op Telkom Group

b. *Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum*

Berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Program INSAN, Program *Broadband Learning Center* ("BLC"), "Mudik Asyik" dan bantuan pembangunan sarana umum.

i. **Internet Sehat dan Aman ("INSAN")**

INSAN adalah program nasional yang ditujukan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman ke berbagai kalangan yang diinisiasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan terbuka untuk partisipasi berbagai pihak. Melalui program ini diharapkan penggunaan internet dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Untuk mencegah dampak negatif dari informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma dan budaya Indonesia, hukum dan agama yang bersumber dari internet dengan fokus pada perlindungan pengguna anak-anak Telkom meluncurkan *domain name system* ("DNS") Nawala yang merupakan sistem penyaring dalam penggunaan internet di Indonesia. DNS Nawala adalah program *non*-komersil Telkom bekerja sama dengan Asosiasi Warnet Indonesia dan dapat digunakan secara gratis oleh pengguna internet di seluruh Indonesia.

Secara spesifik, DNS Nawala akan mengurangi konten-konten negatif yang tidak sesuai peraturan perundangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa Indonesia, seperti pornografi dan perjudian. Selain itu, DNS Nawala juga akan memblokir situs internet yang mengandung konten berbahaya seperti *malware*, situs *phising* (penyesatan) dan sejenisnya. Dengan adanya program ini maka diharapkan internet dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman

sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat kemajuan serta kesejahteraan bangsa.

ii. *Broadband Learning Center* ("BLC")

Kegiatan lain yang dijalankan dan berhubungan dengan perluasan akses masyarakat untuk menjangkau fasilitas TIMES yang dikelola Telkom adalah pemberian bantuan membangun akses internet. Sasaran utamanya adalah jajaran Pemda dengan memberikan bantuan peralatan komputer yang dilengkapi fasilitas WiFi.

Peran BLC saat ini :

- Sebagai tempat pelatihan mengenai dasar-dasar internet;
- Mencerdaskan serta mendidik masyarakat melalui pelatihan internet; dan
- Mendidik para pengusaha UKM, khususnya yang menjadi mitra binaan Telkom, dengan memberikan pelatihan cara membuat *blog* untuk memasarkan produk-produknya melalui internet secara *online*.

iii. Mudik Asyik

Program Mudik Asyik dilaksanakan dengan dua tujuan: sebagai apresiasi kepada pelanggan dan mitra kerja, serta dukungan terhadap imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik menggunakan sepeda motor. Tujuan mudik yang dilayani meliputi kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta beberapa kota di Sumatera.

Pada H-3 jelang Idul Fitri 1433-H, melalui program Mudik Asyik Telkom Group 2012, Telkom memberangkatkan sebanyak 3.250 pemudik yang terdiri dari *frontliner outlet, sales force* dan *authorized dealer* Telkomsel, Telkom Flexi, Speedy dan mitra kerja Telkom Group se-Jabodetabek dari Jakarta ke sejumlah kota di Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan menggunakan tidak kurang dari 65 unit bus pariwisata AC. Program ini merupakan wujud terima kasih Perusahaan kepada mitra kerja yang telah bekerja keras mempromosikan dan memasarkan produk-produk Telkom Group.

iv. Bantuan Pembangunan Sarana Umum

Bantuan diberikan dalam bentuk partisipasi pada berbagai kegiatan pembangunan sarana maupun prasarana, yang digunakan masyarakat luas. Pembangunan dapat dilakukan atas inisiatif pemerintah daerah maupun organisasi nirlaba yang bekerja sama dengan Telkom.

Selama tahun 2012, kami telah menyalurkan bantuan dalam skema Bina Lingkungan senilai Rp6 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan sarana publik meliputi: BUMN Peduli, Bencana Alam, Pendidikan/Pelatihan, Kesehatan Masyarakat, Sarana Umum, Sarana Ibadah dan Pelestarian Alam.

c. *Peningkatan Kesehatan Masyarakat*

Salah satu komitmen Telkom memfasilitasi terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik adalah melalui pemanfaatan kompetensi Telkom di bidang ICT diluncurkannya *e-Health* untuk komunitas kesehatan di Indonesia. Dengan kompleksitas pelayanan kesehatan serta mobilitas masyarakat yang makin tinggi, maka sudah menjadi keharusan *e-Health* untuk mulai diimplementasikan di lingkungan kesehatan. Implementasi *e-Health* di Indonesia mempunyai tantangan sendiri, mulai dari adopsi TI *health care* yang masih rendah, implementasi TI dalam silo-silo, format data yang beragam, rendahnya komunikasi dan keengganan berbagi data antar *stakeholder*, hingga regulasi yang kurang mendukung beberapa inisiasi *e-Health* sudah dilakukan, antara lain *piloting* elektronik Klaim Jamkesda di DIY, Integrasi 6 rumah sakit vertikal di Jakarta, *piloting* SPGDT di DKI, dan beberapa implementasi solusi vertikal. Dengan inisiasi solusi *e-Health* yang sudah dilakukan, diharapkan dapat membantu mensolusikan kebutuhan IT di lingkungan Dinas Kesehatan.

d. *Peningkatan Sarana Ibadah Masyarakat*

Telkom ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pembangunan maupun perbaikan sarana ibadah, baik masjid, gereja, maupun bangunan keagamaan lainnya.

Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ibadah masyarakat yang diharapkan terbentuknya perilaku masyarakat yang lebih baik. Peningkatan sarana dan prasarana ibadah ini melalui program CSR, merupakan wujud kepedulian Telkom terhadap lingkungan sekitar, sebagai bentuk kontribusi Telkom kepada masyarakat.

e. *Program Bantuan Bencana Alam dan Bantuan Masyarakat*

Seluruh bantuan Bencana Alam tersebut didistribusikan kepada para korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2012. Bantuan-bantuan tersebut adalah pembelian sembako dan dapur umum, obat-obatan dan posko kesehatan, fasilitas telekomunikasi gratis, tenda Mandi Cuci Kakus ("MCK"). Telkom menyalurkan bantuan pada saat terjadinya dan pasca bencana. Beberapa contoh kegiatan bantuan pasca bencana diantaranya:

- Pemulihan fasilitas sarana pendidikan di Rado Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang hancur akibat banjir bandang;
- Pembangunan kembali gedung sekolah yang rusak akibat letusan Gunung Merapi, yakni SDN Bronggang Baru-Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga asrama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Salam, Kabupaten Magelang serta renovasi SD Negeri 2 Balerante, Kabupaten Klaten di Jawa Tengah; dan

- Merenovasi dan membangun kembali gedung-gedung sekolah di Indonesia yang rusak akibat bencana alam.

C. Dampak Keuangan dari Kegiatan

Pada tahun 2012, penggunaan dana untuk kegiatan Program Pengembangan Sosial Kemasyarakatan di atas mencapai sebesar Rp356 miliar.

KONSUMEN

A. Kebijakan

Sebagai wujud tanggung jawab penerapan GCG kepada pelanggan dan masyarakat dan sejalan dengan misi kami untuk memberikan layanan yang terbaik, nyaman, produk berkualitas dan harga yang bersaing, kami terus menjaga komunikasi dengan para pelanggan. Kami menyadari komunikasi yang lancar dan proaktif berperan penting bagi kelangsungan bisnis Perusahaan di samping memastikan kualitas yang sesuai dengan standar. Dalam rangka memastikan pemenuhan standar layanan purna jual, kami berkomitmen untuk menerapkan kompensasi yang adil melalui pemberlakuan SLG ("*Service Level Guarantee*", Garansi Purna Jual). Komitmen kami terus kami sesuaikan dengan tuntutan konsumen dan masyarakat sebagaimana ketentuan yang telah kami atur dalam kebijakan Perusahaan KD DIRJASA No.C.Tel.1758/YN000/JAS-53/04 tahun 2004 dan KD ND.C000 No.C.Tel.18/4N000/KNS-24/06 tahun 2006.

B. Jenis Program

Beberapa cara telah kami lakukan dan terus kami sempurnakan di tahun 2012, tidak lain untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan konsumen melalui peluncuran produk yang berkualitas, pengelolaan keamanan produk (*product safety*), layanan pengaduan dan jaminan purna jual.

1. ***Peluncuran Produk/Layanan***

   Sebelum produk/layanan ditawarkan ke konsumen dan publik, untuk menjamin kualitas dan keamanan produk/layanan dengan memastikan kesesuaian proses pengambilan keputusan dalam peluncuran produk/layanan terhadap standar pengembangan produk/layanan yang harus kami patuhi (kami menyebutnya STARPRO) dan analisis 8 IC (*Internal Capabilities*) yang meliputi kualitas, keandalan, ketersediaan, tagihan dan pembayaran, jangkauan layanan, kompatibilitas, fitur dan kesiapan faktor-faktor pendukung produk.

2. ***Orientasi pada kepuasan pelayanan pelanggan melalui Telkom Integrated Quality Assurance dengan framework ROSE (Raise on Service Excellence)***

   a. Memegang prinsip untuk memastikan produk dan layanan yang dihasilkan bernilai tinggi dan mampu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya serta mampu mendorong perekonomian masyarakat dan negara.
   b. Selalu menjaga kode etik dalam penjualan produk (penjualan langsung), promosi dan beriklan.
   c. Menerapkan praktik beriklan yang beretika dengan memperhatikan ketentuan kode etik periklanan di Indonesia.
   d. Memastikan bahwa produk dan layanan purna jual dapat secara mudah tersedia bagi publik.
   e. Mendukung penerapan prinsip-prinsip dan praktik persaingan yang sehat.

3. ***Pusat Layanan dan Mekanisme Pengaduan Konsumen***

   Telkom menyediakan pusat pelayanan konsumen yang dapat langsung didatangi di setiap kantor wilayah maupun kantor cabang Telkom, selain itu juga tersedia pusat pengaduan secara *online* di *website* Perusahaan (www.telkom.co.id) serta *call center* dengan nomor "147".

C. Biaya yang dikeluarkan

Pada tahun 2012, Telkom mengeluarkan biaya total sebesar Rp533 miliar, untuk seluruh program terkait tanggung jawab sosial terhadap konsumen.

GRHA CITRA CARAKA
Telkom
Indonesia

192 Riwayat Singkat Telkom

192 Kegiatan Usaha

192 Struktur Organisasi Perusahaan

196 Entitas Anak dan Asosiasi

200 Profil Dewan Komisaris

202 Profil Direksi

204 Informasi Efek

209 Alamat

Profil Perusahaan

Riwayat **Singkat Telkom**

Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan diperdagangkan di BEI, NYSE, LSE dan Public Offering Without Listing ("POWL") di Jepang.

Riwayat singkat Telkom dari tahun ke tahun dapat dilihat pada bagian "Sejarah Panjang Menempa Kami".

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika serta optimalisasi sumber daya Perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi:

1. **Usaha Utama**
   a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Usaha Penunjang**
   a. Menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
   b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Penjelasan mengenai produk dan layanan Perusahaan dapat dilihat pada bagian "Tinjauan Bisnis – Portofolio Bisnis".

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Telkom telah mencanangkan sebuah *grand strategy* menuju pertumbuhan kompetitif yang berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan organik yang akan dicapai dengan penguatan bisnis inti melalui fokus pada strategi segmentasi pelanggan yaitu segmen layanan

konsumer, layanan *enterprise*, layanan *wholesale* dan internasional, yang didukung oleh 10 juta sambungan POTS dan 5 juta sambungan Speedy.
2. Pertumbuhan non-organik yang akan dicapai melalui strategi *related diversification* berupa pengembangan bisnis baru, pengelolaan portofolio strategis, serta membangun sinergi antara Telkom dan entitas anak.

Dalam rangka implementasi yang efektif dari strategi-strategi tersebut di atas, dipandang perlu adanya beberapa hal sebagai berikut:
1. Direktur yang fokus menangani segmen layanan *wholesale* dan internasional.
2. Direktur yang fokus menangani pengembangan portofolio bisnis.
3. Mekanisme atau *model parenting* yang mampu membangun sinergi antara entitas anak dengan entitas induk maupun antar-entitas anak.

Untuk itu, pada tahun 2012 Telkom telah melakukan beberapa perubahan menyangkut pembagian tugas dan wewenang Direksi, sebagai berikut:
1. Mengalihkan tugas dan wewenang penanganan bisnis di segmen *wholesale* dan internasional, dari semula di bawah Direktur EWS menjadi di bawah Direktur CRM. Dengan demikian Direktur EWS dapat lebih fokus pada pengembangan segmen bisnis *enterprise*.
2. Menambah tugas dan wewenang Direktur CRM untuk menangani segmen bisnis *wholesale* dan internasional, selain tugas dan wewenangnya sebagai Direktur CRM.
3. Menyesuaikan tugas dan wewenang Direktur ITSS agar lebih fokus pada upaya inovasi dan pengembangan portofolio bisnis, dengan mengalihkan sebagian aktivitas Direktorat ITSS, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pendayagunaan IT dan tarif, menjadi di bawah Direktorat NWS.
4. Menambah tugas dan wewenang Direktur NWS untuk menangani pengelolaan dan pendayagunaan IT serta *service operation & management*, untuk mendukung upaya pengembangan bisnis yang sudah berjalan.

Selain itu, untuk membangun sinergi yang lebih efektif di lingkungan Telkom Group, kami membentuk struktur Dewan Eksekutif beranggotakan empat Direktur Utama dari entitas anak. Dewan Eksekutif menjalankan tugas *advisory* terkait dengan formulasi strategi, perencanaan, penetapan kebijakan serta pemantauan kinerja untuk masing-masing lini bisnis, yaitu bisnis seluler, bisnis internasional, bisnis IME dan bisnis menara telekomunikasi.

Nama Direktorat	Fungsi dan Wewenang
Direktorat NWS	Fokus pada pengelolaan *Infrastructure Strategy & Governance*, IT *Strategy & Governance*, dan *Solution* serta pengelolaan pendayagunaan IT dan *service operation & management*, dalam rangka dukungan upaya eksploitasi bisnis yang sudah berjalan dan pengendalian operasional infrastruktur melalui Divisi Infrastruktur Telekomunikasi, Divisi Access, Maintenance Service Center, Information System Center, Divisi Wireless Broadband serta Divisi Broadband.
Direktorat ITSS	Fokus pada pengelolaan fungsi *Corporate Strategic Planning, Strategic Business Development, Innovation Strategy & Sinergy* serta pengendalian operasi unit-unit: Divisi Solution Convergence dan Innovation & Development Center.
Direktorat Konsumer	Fokus dalam pengelolaan bisnis segmen konsumer serta pengendalian operasi Divisi Consumer Services Barat dan Divisi Consumer Services Timur.
Direktorat EWS	Fokus pada pengelolaan bisnis segmen *enterprise & wholesale* serta pengelolaan Divisi Enterprise Services dan Divisi Business Services.
Direktorat CRM	Fokus pada pengelolaan fungsi *Risk Management, Legal* dan *Compliance, Business Effectiveness, Security & Safety*, dan selain itu, penanganan bisnis segmen *wholesale* dan internasional, serta pengendalian operasional Divisi Wholesale Services.
Direktorat HCGA	Fokus pada manajemen SDM Perusahaan serta penyelenggaraan operasional SDM secara terpusat melalui unit Human Capital Center, serta pengendalian operasi unit: Corporate University, HR Assessment Center, Management Consulting Center dan Community Development Center serta Supply Center.
Direktorat Keuangan	Fokus pada pengelolaan keuangan Perusahaan serta mengendalikan operasi keuangan secara terpusat melalui unit Finance, Billing & Collection Center.

STRUKTUR ORGANISASI
TELKOM GROUP

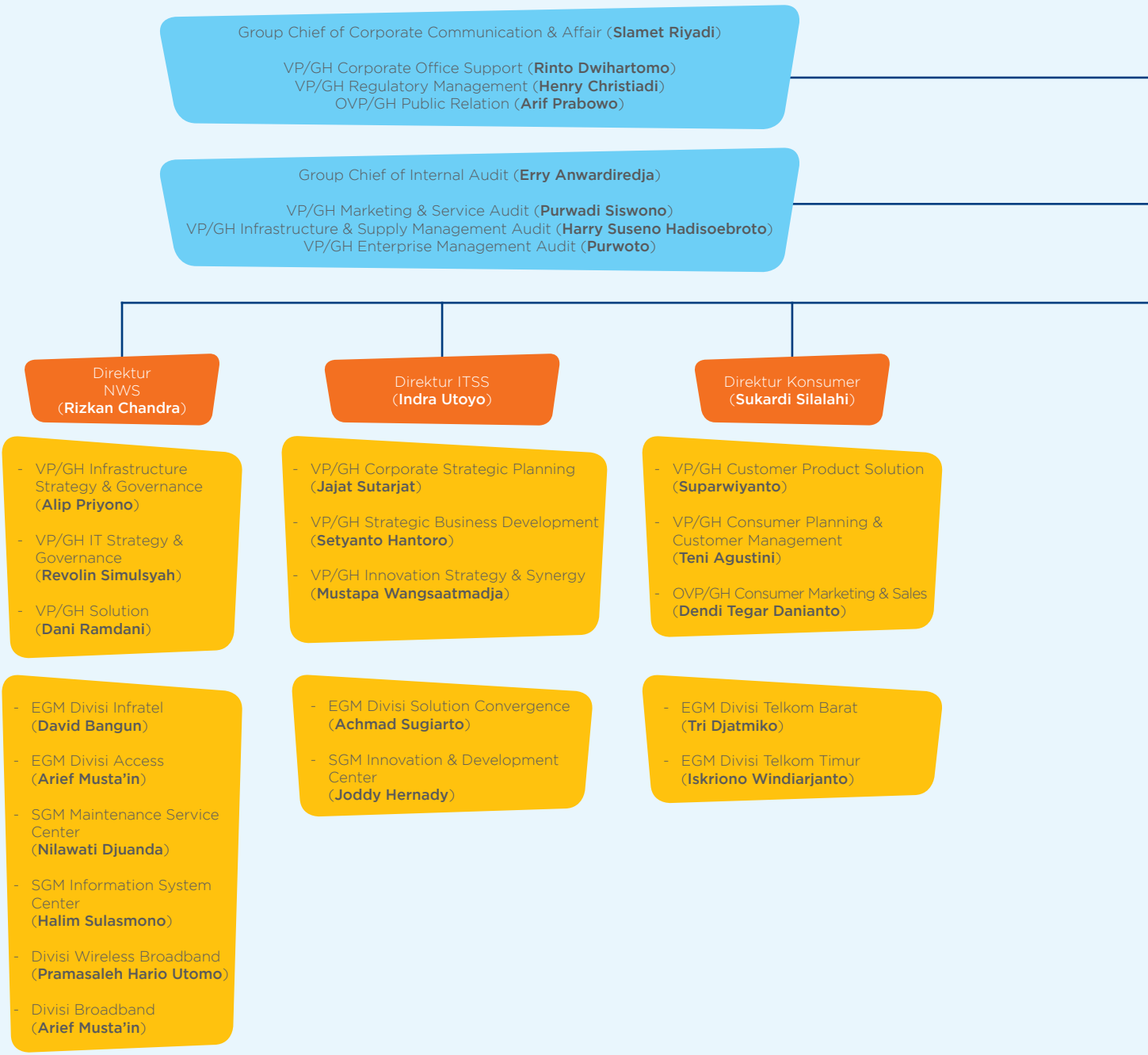
Group Chief of Corporate Communication & Affair (Slamet Riyadi)
VP/GH Corporate Office Support (Rinto Dwihartomo)
VP/GH Regulatory Management (Henry Christiadi)
OVP/GH Public Relation (Arif Prabowo)
Group Chief of Internal Audit (Erry Anwardiredja)
VP/GH Marketing & Service Audit (Purwadi Siswono)
VP/GH Infrastructure & Supply Management Audit (Harry Suseno Hadisoebroto)
VP/GH Enterprise Management Audit (Purwoto)
Direktur NWS (Rizkan Chandra)
- VP/GH Infrastructure Strategy & Governance (Alip Priyono)
- VP/GH IT Strategy & Governance (Revolin Simulsyah)
- VP/GH Solution (Dani Ramdani)
- EGM Divisi Infratel (David Bangun)
- EGM Divisi Access (Arief Musta'in)
- SGM Maintenance Service Center (Nilawati Djuanda)
- SGM Information System Center (Halim Sulasmono)
- Divisi Wireless Broadband (Pramasaleh Hario Utomo)
- Divisi Broadband (Arief Musta'in)
Direktur ITSS (Indra Utoyo)
- VP/GH Corporate Strategic Planning (Jajat Sutarjat)
- VP/GH Strategic Business Development (Setyanto Hantoro)
- VP/GH Innovation Strategy & Synergy (Mustapa Wangsaatmadja)
- EGM Divisi Solution Convergence (Achmad Sugiarto)
- SGM Innovation & Development Center (Joddy Hernady)
Direktur Konsumer (Sukardi Silalahi)
- VP/GH Customer Product Solution (Suparwiyanto)
- VP/GH Consumer Planning & Customer Management (Teni Agustini)
- OVP/GH Consumer Marketing & Sales (Dendi Tegar Danianto)
- EGM Divisi Telkom Barat (Tri Djatmiko)
- EGM Divisi Telkom Timur (Iskriono Windiarjanto)

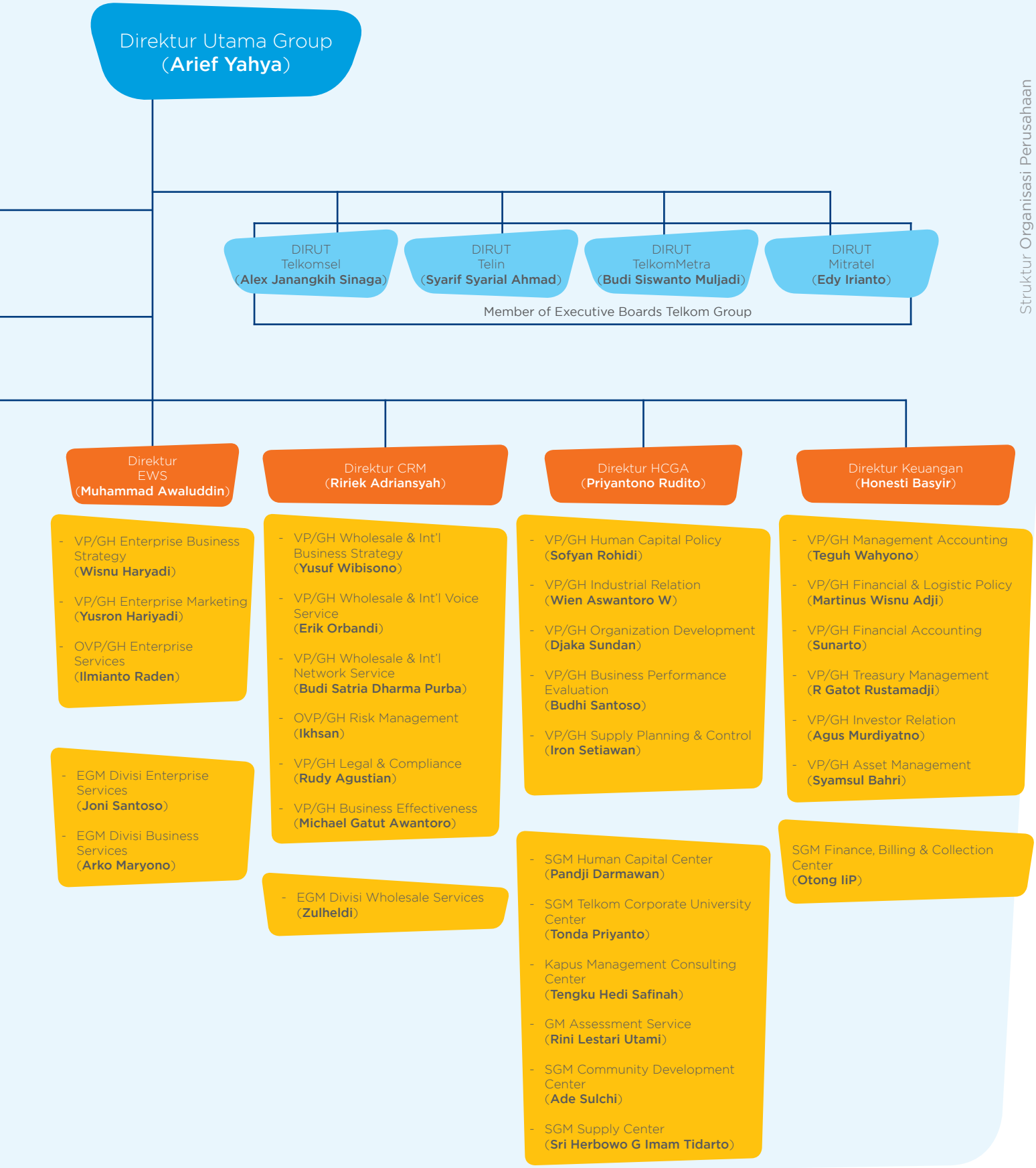
Direktur Utama Group
(Arief Yahya)
DIRUT
Telkomsel
(Alex Janangkih Sinaga)
DIRUT
Telin
(Syarif Syarial Ahmad)
DIRUT
TelkomMetra
(Budi Siswanto Muljadi)
DIRUT
Mitratel
(Edy Irianto)
Member of Executive Boards Telkom Group
Direktur
EWS
(Muhammad Awaluddin)
- VP/GH Enterprise Business Strategy (Wisnu Haryadi)
- VP/GH Enterprise Marketing (Yusron Hariyadi)
- OVP/GH Enterprise Services (Ilmianto Raden)
- EGM Divisi Enterprise Services (Joni Santoso)
- EGM Divisi Business Services (Arko Maryono)
Direktur CRM
(Ririek Adriansyah)
- VP/GH Wholesale & Int'l Business Strategy (Yusuf Wibisono)
- VP/GH Wholesale & Int'l Voice Service (Erik Orbandi)
- VP/GH Wholesale & Int'l Network Service (Budi Satria Dharma Purba)
- OVP/GH Risk Management (Ikhsan)
- VP/GH Legal & Compliance (Rudy Agustian)
- VP/GH Business Effectiveness (Michael Gatut Awantoro)
- EGM Divisi Wholesale Services (Zulheldi)
Direktur HCGA
(Priyantono Rudito)
- VP/GH Human Capital Policy (Sofyan Rohidi)
- VP/GH Industrial Relation (Wien Aswantoro W)
- VP/GH Organization Development (Djaka Sundan)
- VP/GH Business Performance Evaluation (Budhi Santoso)
- VP/GH Supply Planning & Control (Iron Setiawan)
- SGM Human Capital Center (Pandji Darmawan)
- SGM Telkom Corporate University Center (Tonda Priyanto)
- Kapus Management Consulting Center (Tengku Hedi Safinah)
- GM Assessment Service (Rini Lestari Utami)
- SGM Community Development Center (Ade Sulchi)
- SGM Supply Center (Sri Herbowo G Imam Tidarto)
Direktur Keuangan
(Honesti Basyir)
- VP/GH Management Accounting (Teguh Wahyono)
- VP/GH Financial & Logistic Policy (Martinus Wisnu Adji)
- VP/GH Financial Accounting (Sunarto)
- VP/GH Treasury Management (R Gatot Rustamadji)
- VP/GH Investor Relation (Agus Murdiyatno)
- VP/GH Asset Management (Syamsul Bahri)
SGM Finance, Billing & Collection Center
(Otong IiP)

ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

Untuk mendukung pengembangan bisnisnya, Telkom Group terus bertumbuh baik secara organik maupun non-organik. Pertumbuhan secara organik dilakukan dengan ekspansi divisi-divisi yang ada dan sinergi di antara entitas anak Telkom. Sementara pertumbuhan secara non-organik dicapai melalui aksi korporasi berupa akuisisi terhadap perusahaan yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada seluruh jajaran Telkom Group dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kelangsungan bisnis.

Tabel berikut ini menyajikan struktur Telkom Group, termasuk kepemilikan langsung dan tidak langsung di berbagai entitas anak per 31 Desember 2012. Tabel tersebut memuat daftar lengkap entitas anak dan entitas asosiasi Telkom, beserta persentase kepemilikan kami di masing-masing entitas tersebut per 31 Desember 2012. Informasi yang sama juga tersaji di Catatan 1d dan 9 pada Laporan Keuangan Konsolidasian yang ada di bagian Laporan Tahunan ini.

Entitas Anak dengan Kepemilikan Langsung

Nama	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi	Deskripsi
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	65%	Telekomunikasi	Beroperasi	Telkomsel yang didirikan pada 26 Mei 1995 merupakan operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler.
PT Multimedia Nusantara ("Metra" atau "TelkomMetra")	100%	Jasa jaringan telekomunikasi & multimedia	Beroperasi	TelkomMetra diakuisisi pada 9 Mei 2003, merupakan NEB kami. TelkomMetra berfokus pada layanan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan jasa serta layanan multimedia (jasa sistem komunikasi data, jasa portal dan jasa transaksi *online*).
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII" atau "Telin")	100%	Telekomunikasi	Beroperasi	Telin menyediakan layanan telepon tetap (KSO-III Jabar & Banten) dan telekomunikasi internasional. Diakuisisi pada tanggal 31 Juli 2003, Telin bertanggung jawab mengelola telekomunikasi internasional serta mengelola bisnis Telkom di luar negeri.
PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo" atau "PINs")	100%	Jasa dan pembangunan telekomunikasi	Beroperasi	PINs pada awalnya didirikan untuk menyelenggarakan KSO di wilayah Sumatera dan diakuisisi pada tanggal 15 Agustus 2002.
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra" atau "Mitratel")	100%	Telekomunikasi	Beroperasi	Mitratel menyediakan layanan telepon tidak bergerak, penyediaan sarana-prasarana telekomunikasi dan jasa telekomunikasi. Diakuisisi pada tanggal 17 Mei 2001, Mitratel telah bertransformasi dengan menggarap bisnis penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk penyediaan menara telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan penempatan BTS bagi para operator telekomunikasi di seluruh Indonesia.
PT Indonusa Telemedia ("Indonusa" atau "TelkomVision")	100% (termasuk melalui 0,46% kepemilikan oleh TelkomMetra)	TV berlangganan dan konten	Beroperasi	TelkomVision didirikan pada tanggal 7 Mei 1997, dengan fokus pada penyediaan layanan multimedia (TV berbayar dan layanan internet). Sejak tahun 2007, TelkomVision merupakan operator Pay TV pertama di Indonesia yang meluncurkan produk DTH *Prepaid* (*Prepaid Satellite Pay*-TV) dengan nama "TelkomVision".
PT Graha Sarana Duta ("GSD" atau "TelkomProperty")	99,99%	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil dan pengembang	Beroperasi	Diakuisisi pada tanggal 25 April 2001. TelkomProperty memiliki cakupan wilayah kerja di seluruh Indonesia dan melakukan pengelolaan gedung-gedung milik Perusahaan dan pihak ketiga.
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo")	60%	Telekomunikasi	Berhenti beroperasi	Napsindo menyediakan *Network Access Point* ("NAP"), *Voice Over Data* ("VOD") dan jasa terkait lainnya. Napsindo didirikan pada tanggal 29 Desember 1998 dan telah berhenti beroperasi terhitung tanggal 13 Januari 2006.
PT Telkom Akses ("Telkom Akses")	100%	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	Belum beroperasi	Telkom Akses didirikan pada tanggal 26 November 2012.

Entitas Anak dengan Kepemilikan Tidak Langsung

Nama	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi	Deskripsi
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia")	100% (termasuk melalui 49% kepemilikan oleh Perusahaan)	Jasa data dan informasi – menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa *call center*	Beroperasi	Infomedia diakuisisi pada tanggal 22 September 1999 untuk menyelenggarakan KSO di Sumatera. Infomedia telah melakukan transformasi bisnis dari 3 pilar bisnis (layanan direktori, layanan *contact center* dan layanan konten) menjadi layanan *Business Process Outsourcing* dan *Digital Media & Rich Content.*
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma" atau "telkomsigma")	100% melalui TelkomMetra	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, *outsourcing*, dan pemeliharaan lisensi dan piranti lunak	Beroperasi	Telkomsigma didirikan pada tanggal 1 Mei 1987 dengan fokus pada penyediaan jasa IT Solusi.
PT Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd ("Telin Singapore")	100% melalui Telin	Telekomunikasi	Beroperasi	Telin Singapore didirikan pada tanggal 6 Desember 2007 berdasarkan hukum Repulik Singapura. Ragam layanan yang dimiliki adalah jasa telekomunikasi termasuk tetapi tidak terbatas jasa *voice* dan data berbasis internet, layanan data, *callback/call re-origination*, jasa kartu telepon *prepaid* dan *resale* jasa sewa sirkuit.
PT Metra Plasa ("Metra Plasa")	60% melalui TelkomMetra	Jasa portal	Beroperasi	TelkomMetra mendirikan Metra Plasa bersama dengan eBay International AG pada tanggal 9 April 2012.
PT Administrasi Medika ("AdMedika")	75% melalui TelkomMetra	Jasa administrasi asuransi kesehatan	Beroperasi	AdMedika didirikan pada tanggal 25 Februari 2010, yang melayani jasa *claim online* antara pihak rumah sakit dan perusahaan asuransi kesehatan.
PT Finnet Indonesia ("Finnet")	60% melalui TelkomMetra	Data dan komunikasi perbankan	Beroperasi	Finnet didirikan pada tanggal 31 Oktober 2005, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur TI, aplikasi dan konten untuk melayani kebutuhan sistem informasi dan transaksi keuangan bagi industri perbankan dan jasa keuangan lainnya.
PT Telkom Landmark Tower ("TLT")	55% melalui Telkom Property	Jasa pengembangan dan manajemen properti	Beroperasi	TelkomProperty mendirikan TLT bersama dengan Yakes Telkom pada tanggal 1 Februari 2012.
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("Telin Hong Kong")	100% melalui Telin	Telekomunikasi	Beroperasi	Telin Hong Kong didirikan di Hong Kong pada tanggal 8 Desember 2010 dan telah memperoleh *Unified Carrier License* pada tanggal 1 Maret 2011 untuk membangun, memberikan dan memelihara pelayanan jaringan telekomunikasi publik dengan menggunakan instalasi radio komunikasi.
PT Metranet ("Metra-Net")	100% melalui TelkomMetra	Jasa portal multimedia	Beroperasi	Metra-Net didirikan pada tangal 17 April 2009.
Telkomsel Finance B.V ("TFBV")	100% melalui Telkomsel	Keuangan	Beroperasi	TFBV didirikan di Amsterdam pada tanggal 7 Februari 2005 untuk tujuan peminjaman dan pengumpulan dana, termasuk penerbitan obligasi, wesel bayar atau instrumen utang.
Aria West International Finance B.V. ("AWI BV")	100% melalui Telin	Jasa di bidang perdagangan dan keuangan	Berhenti beroperasi	AWI BV didirikan pada 3 Juni 1996 dan telah berhenti beroperasi sejak tanggal 31 Juli 2003.
Telekomunikasi Selular Finance Limited ("TSFL")	100% melalui Telkomsel	Keuangan	Beroperasi	TSFL didirikan pada tanggal 22 April 2002 dengan tujuan pengumpulan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham *debenture* obligasi, hipotek atau surat berharga lainnya.
Telekomunikasi Indonesia International (TL) S.A ("Telin Timor Leste ")	100% melalui Telin	Telekomunikasi	Beroperasi	Telin Timor Leste didirikan pada tanggal 11 September 2012 untuk menyediakan layanan telekomunikasi yang berkedudukan dan beroperasi di Timor Leste. Telkomcel, merek dagang seluler dari Telin Timor Leste didirikan pada tanggal 17 September 2012 untuk menyediakan layanan telekomunikasi seluler yang menjangkau seluruh distrik di Timor Leste dan internet *broadband* dengan jaringan 3G pada Frekuensi 850 Mhz.
PT Graha Yasa Selaras ("GYS")	51% melalui Telkom Property	Pariwisata	Belum beroperasi	TelkomProperty mendirikan GYS bersama dengan Yakes Telkom pada tanggal 7 April 2012 untuk berbisnis di bidang jasa *hospitality*/perhotelan.

Entitas Asosiasi

Nama	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi	Deskripsi
Scicom ("MSC") Bhd ("Scicom")	29,71% melalui Telin	Jasa *call center*	Beroperasi	Scicom didirikan pada tahun 1997 dan merupakan penyedia pusat informasi berbasis di Malaysia.
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	49% melalui TelkomMetra	Jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa terkait lainnya	Beroperasi	TelkomMetra mendirikan ILCS bersama dengan Pelindo II pada tanggal 21 September 2012 untuk menyediakan jasa solusi teknologi informatika logistik di pelabuhan-pelabuhan.
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")	40%	Jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan	Beroperasi	Patrakom didirikan pada tanggal 28 September 1995.
PT Citra Sari Makmur ("CSM")	25%	Jasa penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (*Very Small Aperture Terminal* atau "VSAT"), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait	Beroperasi	CSM didirikan pada tanggal 14 Februari 1986.
PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")	22,38%	Jasa penyewaan *transponder* satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik	Beroperasi	PSN didirikan pada tanggal 2 Juli 1991. PSN melakukan penawaran saham perdana atas saham biasa dan mencatatkan sahamnya di National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations ("NASDAQ") pada bulan Juni 1996, namun Perusahaan melakukan divestasi pada tanggal 6 November 2001 setelah gagal memenuhi persyaratan tertentu dari NASDAQ *National Market Listing*.

Ventura Bersama

Nama	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi	Deskripsi
PT Melon Indonesia ("Melon")	51% melalui TelkomMetra	Jasa *Digital Content Exchange* Hub ("DCEH")	Beroperasi	Melon merupakan perusahaan ventura bersama antara TelkomMetra dan South Korea Telecom. Melon didirikan pada tanggal 16 Agustus 2010. Perusahaan yang merupakan realisasi ekspansi di bisnis *Media & Edutainment* ini fokus pada bisnis layanan musik digital dan konten lain untuk telepon seluler, komputer pribadi, kanal elektronik konsumen dan media digital lainnya.

STRUKTUR TELKOM GROUP

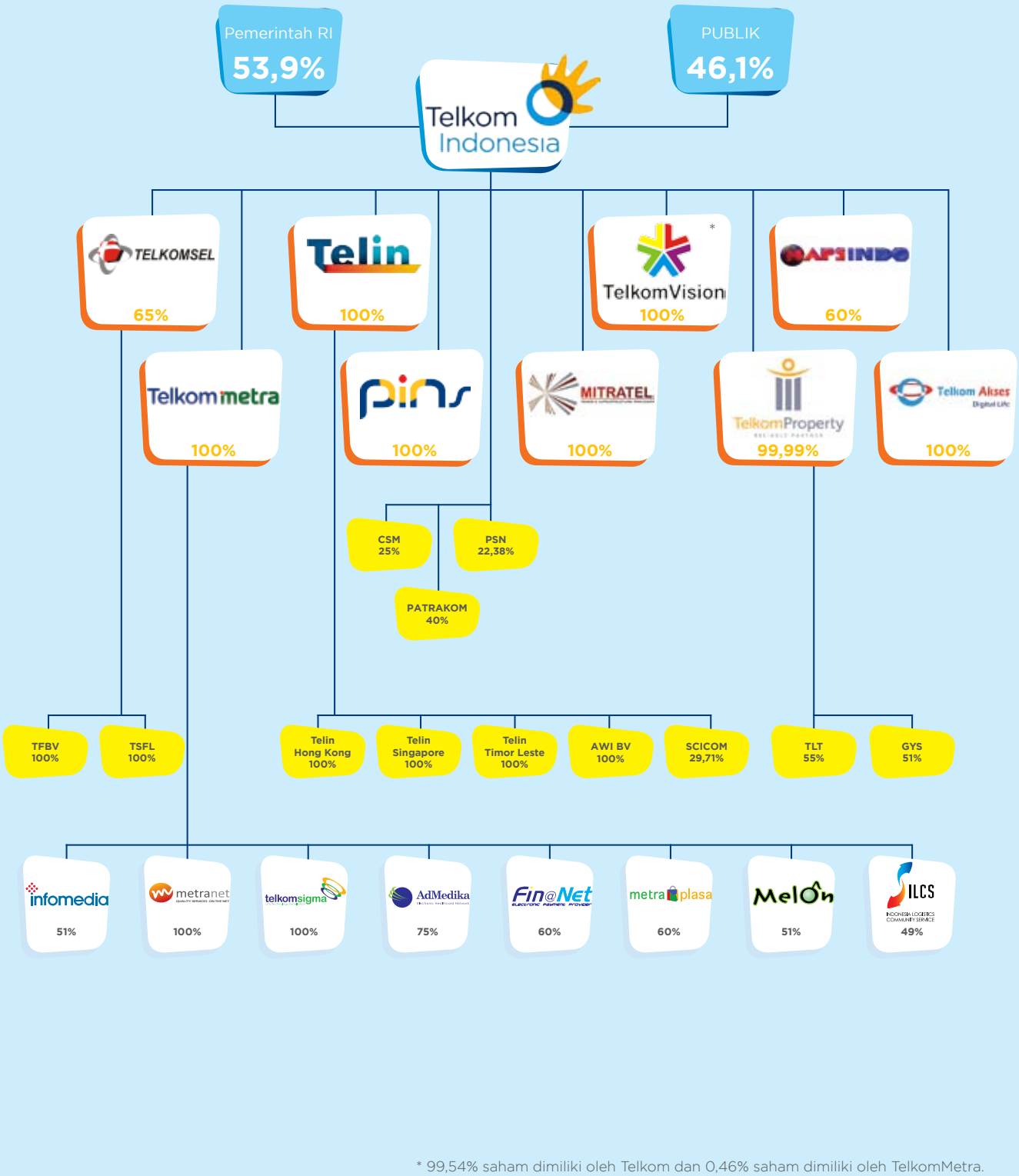

* 99,54% saham dimiliki oleh Telkom dan 0,46% saham dimiliki oleh TelkomMetra.

Profil Dewan Komisaris

JUSMAN SYAFII DJAMAL
KOMISARIS UTAMA

Jusman Syafii Djamal, 58 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sejak 1 Januari 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) PT Cardig Aero Services Tbk, Komisaris Utama (Independen) PT Toba Bara Sejahtera Tbk, Komisaris Utama (Independen) PT Mandala Airline dan Chairman Matsushita Gobel Foundation. Sejak 20 Mei 2011 ditunjuk oleh Presiden RI menjadi anggota Komite Inovasi Nasional (*Think Tank of the President of the Republic Indonesia on Innovation Policy*). Pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (2007-2009) dan anggota Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (2007), untuk mengevaluasi dan menemukan "*root causes*" tragedi kecelakaan transportasi di sektor Angkutan Udara, Angkutan Pelayaran/Laut, Kereta Api dan Jalan Raya. Memiliki pengalaman mengelola industri pesawat terbang dalam berbagai posisi strategis antara lain Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (2000-2002), Direktur Sumber Daya Manusia PT IPTN (1999-2000), Direktur Helikopter, Sistem Senjata dan Antariksa (*Helicopters, Defence Technology and Satellite*) (1996-1999), Ketua Tim Implementasi Program Restrukturisasi PT IPTN (1998-2001), Chief Project Engineering, Pengembangan & Rancang Bangun N250 (1989-1995). Sebagai *professional aerodynamics engineer* dengan 20 tahun pengalaman di bidang keahlian *Computational Aerodynamics* dan *Configuration Development*. Pernah menerima Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten No.ID 0 021 669 *Flight Control Systems* berbasis elektronik bersama Alm. Bambang Pamungkas pada 15 Agustus 2008. Penerima Bintang Jasa Nararya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1995. Penulis Buku *Grand Techno Economic Strategy* - Siasat Memicu Produktivitas (Penerbit Mizan, 2009). Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin di bidang *Aeronautical Engineering* dari Institut Teknologi Bandung (1983).

JOHNNY SWANDI SJAM
KOMISARIS INDEPENDEN

Johnny Swandi Sjam, 52 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sejak 1 Januari 2011. Saat ini juga sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Infrastruktur dan Jasa Telekomunikasi pada Kamar Dagang dan Industri ("KADIN") Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris PT Inti (Persero) (2010-2011), Direktur Utama PT Indosat Tbk (2007-2009) dan Direktur PT Indosat Tbk (2005-2007), Presiden Direktur Satelindo (2002-2003), dan beberapa jabatan penting lain di entitas anak Indosat seperti Satelindo, Sisindosat dan Intikom (1997-2002). Memiliki gelar Diploma III bidang Ahli Teknik Komputer dari Institut Teknologi Bandung, Diploma IV bidang Manajemen Industri dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri Departemen Perindustrian, gelar Sarjana bidang Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma, Jakarta dan gelar Master di bidang Administrasi dan Kebijakan Bisnis dari Universitas Indonesia, Jakarta.

PARIKESIT SUPRAPTO
KOMISARIS

Parikesit Suprapto, 61 tahun, menjabat sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sejak 11 Mei 2012. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian BUMN (2010-2012), Deputi Bidang Usaha Industri Perbankan dan Pembiayaan, Kementerian BUMN (2008-2010), dan Penasehat Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM bidang Usaha Kecil (2006-2008). Di lingkungan korporasi antara lain pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indosat Tbk (2011-2012) dan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Perusahaan dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Jakarta (1980), gelar Master di bidang *Economic Development* dari Indiana University, Indiana, AS (1990) dan gelar Doktor di bidang *Development Economics* dari University of Notre Dame, Indiana, AS (1995).

HADIYANTO
KOMISARIS

Hadiyanto, 50 tahun, menjabat sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sejak 11 Mei 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dan Alternate Executive Director, World Bank, di Washington DC, AS. Di lingkungan korporasi, pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk (2007-2012) dan Komisaris Utama PT Bank Ekspor Indonesia (2007-2009). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, *Master of Law* ("LLM") dari Harvard University Law School, AS dan gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung.

VIRANO GAZI NASUTION
KOMISARIS INDEPENDEN

Virano Gazi Nasution, 44 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sejak 11 Mei 2012. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Niaga, PT Indonesia Comnet Plus, entitas anak PT PLN (Persero) (2009-2012), Staf Ahli pada Menteri Komunikasi dan Informatika (2008-2009) dan Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk (2001-2005). Memiliki gelar Master of Science di bidang *Engineering Economics* dari Stanford University, AS.

Dewan Komisaris ditunjuk berdasarkan hasil keputusan RUPST Telkom No.Tel.110/PR000/COP-A0070000/2012 tanggal 11 Mei 2012. Tidak ada hubungan afiliasi antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan pemegang saham. Untuk penjelasan mengenai pelatihan peningkatan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris di tahun 2012, lihat bagian "Tata Kelola Perusahaan – Struktur Tata Kelola Perusahaan – Dewan Komisaris".

Profil Direksi

ARIEF YAHYA
DIREKTUR UTAMA

Arief Yahya, 51 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Telkom sejak 11 Mei 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Telkomsel, entitas anak Telkom. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama Telkom, berkarir di berbagai posisi di Telkom antara lain sebagai Direktur Enterprise & Wholesale (2005-2012); Kepala Divisi Regional V Jawa Timur (2004-2005) dan Kepala Divisi Regional VI Kalimantan (2003-2004). Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1986) dan gelar Master di bidang *Telematics* dari University of Surrey, Inggris (1994).

HONESTI BASYIR
DIREKTUR KEUANGAN

Honesti Basyir, 44 tahun, menjabat sebagai Direktur Keuangan Telkom sejak 11 Mei 2012. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, pernah menjabat berbagai posisi di Telkom antara lain sebagai Vice President ("VP") Strategic Business Development, Direktorat ITSS (2012); VP Strategic Business Development, SICP (2010-2012); Project Controller Project Management Office (2009-2010) dan Assistant Vice President ("AVP") Business & Finance Analysis (2006-2009). Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1992) dan Master di bidang *Corporate Finance* dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (2004).

INDRA UTOYO
DIREKTUR IT, SOLUTION & STRATEGIC PORTFOLIO

Indra Utoyo, 51 tahun, menjabat sebagai Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio ("ITSS") Telkom sejak 11 Mei 2012. Meniti karir di Telkom sejak tahun 1986 di berbagai posisi, dengan jabatan terakhir sebelum ditunjuk menjabat Direktur ITSS adalah sebagai Direktur IT, Solution & Supply (2007-2012). Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1985) dan gelar Master di bidang *Communication & Signal Processing* dari Imperial College, University of London, Inggris (1994).

SUKARDI SILALAHI
DIREKTUR KONSUMER

Sukardi Silalahi, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur Konsumer Telkom sejak 11 Mei 2012. Berkarir di Telkom sejak tahun 1991, dan sebelum ditunjuk sebagai Direktur Konsumer antara lain pernah menjabat sebagai Executive General Manager ("EGM") Divisi Consumer Service Timur (2011-2012); Deputy EGM Divisi Consumer Service Barat (2010-2011); EGM Divisi Regional VI Kalimantan (2008-2010) dan Deputy EGM Divisi Fixed Wireless Network (2007-2008). Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1989).

Direksi ditunjuk berdasarkan hasil keputusan RUPST Telkom No.Tel.110/PR000/COP-A0070000/2012 tanggal 11 Mei 2012. Tidak ada hubungan afiliasi antara sesama anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham. Untuk penjelasan mengenai tugas dan fungsi Direksi beserta pelatihan peningkatan kompetensi yang telah diikuti Direksi di tahun 2012, lihat bagian "Tata Kelola Perusahaan – Struktur Tata Kelola Perusahaan – Direksi".

MUHAMMAD AWALUDDIN
DIREKTUR ENTERPRISE & WHOLESALE

Muhammad Awaluddin, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Enterprise & Wholesale ("EWS") Telkom sejak 11 Mei 2012. Saat ini menjabat juga sebagai Presiden Komisaris Infomedia, entitas anak tidak langsung dari Telkom. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur EWS, antara lain pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Infomedia (2010-2012); EGM Divisi Access Network, Telkom (2010) dan EGM Divisi Regional I Sumatera, Telkom (2007-2010). Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1990) dan gelar Master of Business Administration dari European University, Antwerpen, Belgia (1998).

RIZKAN CHANDRA
DIREKTUR NETWORK & SOLUTION

Rizkan Chandra, 44 tahun, menjabat sebagai Direktur Network & Solution ("NS") Telkom sejak 11 Mei 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di entitas anak kami, Telkomsel, dan sebagai Komisaris di Metranet, entitas anak tidak langsung kami. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur NS antara lain pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Sigma, entitas anak tidak langsung kami (2010-2012); Senior General Manager ("SGM") Telkom Learning Center (2008 -2010) dan VP Infrastructure & Service Planning (2007-2008). Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (1992) dan gelar Master di bidang *Management of Technology* dari National University of Singapore (2000).

PRIYANTONO RUDITO
DIREKTUR HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIR

Priyantono Rudito, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Human Capital & General Affairs ("HCGA") Telkom sejak 11 Mei 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di Telkomsel, entitas anak Telkom. Meniti karir di Telkom sejak tahun 1991, antara lain pernah menjabat sebagai VP Corporate Strategic Planning (2011-2012) dan VP Marketing & Consumer Care (2007-2011). Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1991) serta gelar Master of Business di bidang *Marketing* (1997) dan gelar Doktor di bidang *Management* (2011) dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.

RIRIEK ADRIANSYAH
DIREKTUR COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT

Ririek Adriansyah, 49 tahun, menjabat sebagai Direktur Compliance & Risk Management ("CRM") Telkom sejak 11 Mei 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Telin, Entita Anak Telkom. Berkarir di Telkom dan Telkom Group sejak tahun 1990, sebelum ditunjuk sebagai Direktur CRM antara lain pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Telin, entitas anak Telkom (2011-2012); Direktur Marketing & Sales, Telin (2010-2011); Direktur International Carrier Service, Telin (2008-2010) dan Deputy EGM Divisi Infratel, Telkom (2004-2008). Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1989).

Informasi Efek

A. Komposisi Pemegang Saham

Modal dasar Perseroan terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna, dan 79.999.999.999 saham Seri B (saham biasa). Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh 20.159.999.280, terdiri dari satu saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Satu lembar saham Seri A Dwiwarna tersebut merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") sehingga Pemerintah memiliki hak suara istimewa dan hak untuk memveto pengajuan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi atau Dewan Komisaris, penerbitan saham baru dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk perubahan untuk menggabungkan atau membubarkan kami sebelum masa berlakunya berakhir, menambah atau mengurangi modal dasar dan mengurangi saham yang dipesan (*subscribed capital*). Hak-hak dan batasan-batasan material yang terdapat pada saham biasa, juga berlaku pada saham Dwiwarna kecuali Pemerintah tidak dapat mengalihkan saham Dwiwarna. Saham Dwiwarna yang dimiliki Pemerintah memberikan hak pengawasan yang efektif pada Telkom bahkan jika terjadi penurunan pemilikan saham biasa dan hak-hak yang terkait dengan saham Dwiwarna hanya dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar, yang mungkin akan diveto oleh Pemerintah. Lihat Catatan 22 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

Tabel Pemegang Saham Telkom Pada Tanggal 31 Desember 2012

	Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri B (Saham Biasa)	%
Pemerintah Republik Indonesia	1	10.320.470. 711	53,90
Publik		8.828.598.108	46,10
Sub Total Modal (Ditempatkan Dan Disetor Penuh)	1	19.149.068. 819	100,00
Saham Treasuri (Saham Yang Dibeli Kembali)		1.010.930.460	-
Total	1	20.159.999.279	100,00

Komposisi pemegang saham Telkom per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

1. *Pemegang Saham dengan Kepemilikan Lebih dari 5% (Pemegang Saham Utama/ Pengendali)*

Jenis Saham	Identitas Orang atau Kelompok	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Seri A	Pemerintah	1	-
Seri B	Pemerintah	10.320.470.711	53,90

Selama tiga tahun terakhir, persentase saham yang dimiliki oleh Pemerintah masing-masing sebesar 52,5%, 53,2% dan 53,9% pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.

2. *Kepemilikan Saham oleh Direktur dan Komisaris*

Pada tanggal 31 Desember 2012 tidak ada Direktur atau manajer senior kami yang memiliki lebih dari 1,0% saham Perusahaan. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2012 tidak ada Komisaris yang memiliki saham biasa Perusahaan.

Direktur atau Komisaris	Jumlah Saham (Seri B)	Persentase Kepemilikan
Direksi		
Indra Utoyo	5.508	<0,01
Priyantono Rudito	108	<0,01
Sukardi Silalahi	108	<0,01
Jumlah	5.724	<0,01

3. Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Kelompok	Jumlah Saham (Seri B)	Persentase Kepemilikan
Asing		
Badan usaha	7.477.394.954	39,05
Perorangan	3.409.940	0,01
Lokal		
Badan usaha		
Perusahaan terbatas	402.107.377	2,10
Reksa dana	413.240.544	2,16
Perusahaan asuransi	287.653.540	1,50
Dana Pensiun	143.963.690	0,75
Lain-lain	5.673.024	0,03
Perorangan	95.155.039	0,50
Total	8.828.598.108	46,10

4. Persentase Saham yang Dimiliki di Indonesia dan di Luar Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 29.321 pemegang saham, termasuk Pemerintah, terdaftar sebagai pemegang saham biasa kami, termasuk 7.747.686.854 saham biasa yang dimiliki oleh 1.665 pemegang saham di luar Indonesia. Hingga tanggal 31 Desember 2012, terdapat 119 pemegang saham ADS yang memiliki 54.942.205 ADS (1 ADS setara dengan 40 saham biasa).

B. Kronologis Pencatatan Saham

Kronologis Pencatatan Saham

		Komposisi Kepemilikan Saham			
Tanggal	**Tindakan Korporasi**	**Pemerintah Republik Indonesia**	**%**	**Publik**	**%**
13/11/1995	Pra-Penawaran Umum Perdana	8.400.000.000	100	-	
14/11/1995	IPO				
	Penjualan saham milik Pemerintah	(933.334.000)		933.334.000	
	Emisi saham baru Telkom			933.333.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.466.666.000	80	1.866.667.000	20
11/12/1996	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(388.000.000)		388.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.078.666.000	75,8	2.254.667.000	24,2
15/05/1997	Pemerintah membagikan saham insentif kepada para pemegang saham publik	(2.670.300)		2.670.300	
	Komposisi kepemilikan saham	7.075.995.700	75,8	2.257.337.300	24,2
07/05/1999	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(898.000.000)		898.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	6.177.995.700	66,2	3.155.337.300	33,8
02/08/1999	Pembagian bonus saham (emisi) (setiap 50 saham mendapatkan 4 saham)	494.239.656		252.426.984	
	Komposisi kepemilikan saham	6.672.235.356	66,2	3.407.764.284	33,8
07/12/2001	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(1.200.000.000)		1.200.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.472.235.356	54,3	4.607.764.284	45,7
16/07/2002	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(312.000.000)		312.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.160.235.356	51,2	4.919.764.284	48,8
30/07/2004	Pemecahan nilai nominal saham (1:2)				
	Komposisi kepemilikan saham	10.320.470.712	51,2	9.839.528.568	48,8
21/12/2005	Program pembelian saham kembali (I)[1]	10.320.470.712	51,7	9.628.238.068	48,3
29/06/2007	Program pembelian saham kembali (II)[2]	10.320.470.712	52,3	9.413.238.068	47,7
20/06/2008	Program pembelian saham kembali (III)[3]	10.320.470.712	52,5	9.348.954.068	47,5
19/05/2011	Program pembelian saham kembali (IV)[4]	10.320.470.712	53,9	8.828.598.108	46,1

(1) Program pembelian kembali saham tahap pertama dimulai pada tanggal 21 Desember 2005 (bertepatan dengan RUPSLB ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Juni 2007.
(2) Program pembelian kembali saham tahap kedua dimulai pada tanggal 29 Juni 2007 (bertepatan dengan RUPSLB ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Juni 2008.
(3) Program pembelian kembali saham tahap ketiga dimulai pada tanggal 20 Juni 2008 (bertepatan dengan RUPSLB ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Desember 2009.
(4) Program pembelian kembali saham tahap kempat dimulai pada tanggal 19 Mei 2011 (bertepatan dengan RUPST ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan November 2012

1. *Program Kepemilikan Saham Karyawan Telkom*

Program kepemilikan saham karyawan atau *Employee Stock Ownership Program* ("ESOP") merupakan suatu program yang memungkinkan partisipasi karyawan untuk memiliki saham Perusahaan. Pada saat penawaran saham perdana tanggal 14 November 1995, terdapat jumlah saham Telkom sebanyak 116.666.475 lembar saham dimiliki oleh 43.218 pegawai. Pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 11.311.122 lembar saham Telkom dimiliki oleh 10.591 pegawai dan pensiunan Telkom.

2. *Pembelian Efek oleh Penerbit dan Penerbit Terafiliasi*

Tabel Pembelian Efek oleh Penerbit dan Penerbit yang Terafiliasi

Periode		Jumlah saham yang diperoleh kembali	Harga rata-rata yang dibayarkan per lembar saham (Rp)	Jumlah lembar saham yang diperoleh kembali sesuai program yang diumumkan kepada publik	Jumlah lembar saham maksimum yang masih dapat dibeli sesuai program
					1.007.999.964
SBB I	2006	118.376.500	8.044	118.376.500	889.623.464
SBB II	2007	126.364.000	9.689	244.740.500	763.259.464
SBB III	2008	245.834.000	8.491	490.574.500	517.425.464
SBB IV	2011	283.085.460	7.337	773.659.960	645.161.290
	2012	-	-	-	362.075.830
	Januari	66.895.000	6.997	840.554.960	295.180.830
	Februari	60.052.500	6.905	900.607.460	235.128.330
	Maret	39.998.000	6.906	940.605.460	195.130.330
	April	9.140.000	7.636	949.745.460	185.990.330
	Mei	16.859.000	7.687	966.604.460	169.131.330
	Juni	9.120.000	7.751	975.724.460	160.011.330
	Juli	14.423.500	8.737	990.147.960	145.587.830
	Agustus	8.902.500	9.026	999.050.460	136.685.330
	September	7.380.000	9.431	1.006.430.460	129.305.330
	Oktober	4.500.000	9.548	1.010.930.460	124.805.330
	November	-	-	1.010.930.460	124.805.330
	Desember	-	-	1.010.930.460	124.805.330
	Total	520.355.960	7.996	1.010.930.460	-

Sampai dengan 31 Desember 2012, Telkom telah membeli kembali saham sebanyak 1.010.930.460 lembar saham biasa atau setara dengan 5,0% dari saham biasa yang diterbitkan dan beredar dengan harga agregat pembelian kembali senilai Rp8.067 miliar, belum termasuk biaya broker dan kustodian. Selama program pembelian kembali, Telkom telah membeli kembali saham biasa dengan perincian sebagai berikut: 118.376.500 lembar saham di tahun 2006, 126.364.000 lembar saham di tahun 2007, 245.834.000 lembar saham di tahun 2008, 283,085,460 lembar saham di tahun 2011 dan 237,270,500 lembar saham di tahun 2012. Pada tahun 2011 dan 2012, Telkom telah melakukan pembelian kembali saham biasa sebanyak 520.355.960 lembar dengan harga agregat pembelian kembali sebesar Rp3.803 miliar. Lihat Catatan 24 Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom.

Kami berencana untuk mempertahankan, menjual atau menggunakan saham yang dibeli kembali untuk keperluan lain sesuai dengan Peraturan OJK No.XI.B.2, UU No.40/2007 mengenai Perusahaan Terbatas dan hasil keputusan RUPST tanggal 11 Juni 2010 yang mensyaratkan Direksi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk melaksanakan atau mengalihkan saham yang dibeli kembali dan melaporkan penggunaan atau pengalihannya kepada RUPST. Sebelum memberikan persetujuan, Dewan Komisaris terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

C. Kronologis Penerbitan Obligasi

Pada tanggal 16 Juli 2002, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp1.000 miliar pada harga nominal untuk jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini dikenakan bunga tetap sebesar 17% per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal 16 Oktober 2002. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya, dan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2007. Wali amanat obligasi ini adalah BRI (efektif sejak tanggal 17 Januari 2006 menggantikan BNI) dan kustodiannya adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2007, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas hutang obligasi tersebut.

Obligasi Rupiah kedua diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2010 masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT CIMB Niaga, Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2012, peringkat obligasi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*). Lihat bagian "Ikhtisar — Ikhtisar Saham Biasa dan Obligasi" halaman 20.

D. Kebijakan Dividen

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2012 akan ditetapkan pada pelaksanaan RUPST pada tahun 2013.

Tabel Kronologis Pembayaran Dividen

Tahun Dividen	Tanggal RUPST	Rasio Pembayaran (%)[1]	Jumlah Dividen (Rp Juta)	Dividen Per Lembar Saham
2007	20 Juni 2008	70	8.999.913[2]	455,87
2008	12 Juni 2009	55	5.840.708	296,94
2009	11 Juni 2010	50	5.666.070[3]	288,06
2010	19 Mei 2011	55	6.345.350[4]	322,59
2011	11 Mei 2012	65	7.127.333[5]	371,05

(1) Rasio pembayaran merupakan persentase laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang dibayar ke pemegang saham sebagai dividen.
(2) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan Desember 2007 sejumlah Rp965.398 juta.
(3) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan Desember 2009 sejumlah Rp524.190 juta.
(4) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 masing-masing sejumlah Rp276.072 juta dan Rp250.085 juta.
(5) Terdiri dari dividen tunai sejumlah Rp6.030.820 juta dan dividen tunai spesial sejumlah Rp1.096.513 juta.

Dividen Telkomsel

Berdasarkan RUPST yang diselenggarakan pada bulan April 2012, Telkomsel menyetujui, antara lain, dividen tunai sebesar Rp10.259 miliar yang merupakan 80% dari laba bersih Telkomsel di tahun 2011. Dari dividen yang diumumkan, sebanyak Rp3.591 miliar telah dibayarkan kepada ("SingTel *Mobile*").

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012, dividen tunai dibayarkan kepada SingTel *Mobile*, pemegang saham minoritas Telkomsel, masing-masing berjumlah Rp3.261 miliar, Rp2.726 miliar dan Rp3.231 miliar.

E. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal	Alamat	Jasa	Biaya	Periode Penugasan
AUDITOR EKSTERNAL KAP Purwantono, Suherman & Surja (Member firm of Ernst & Young Global Limited)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2, Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.52 - 53 Jakarta 12190, Indonesia Tel. : (62-21) 52895000 Fax. : (62-21) 52894100	Melakukan *Integrated Audit* PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. ("Telkom") dan Audit Umum atas laporan keuangan entitas anak perusahaan tahun buku 2012.	Rp26.619.000.000	2012
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network)	Plaza 89 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-7 No. 6 Jakarta 12940 Tel. : (62-21) 5212901 Fax. : (62-21) 52905555	Penerbitan *Consent Letter*	Rp4.400.000.000	2012
BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Datindo Entrycom	Puri Datindo – Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.34, Jakarta 10220 Tel. : (62-21) 570 9009 Fax. : (62-21) 570 9026	Bertindak sebagai lembaga penyimpanan (Kustodian) saham biasa Telkom yang diperdagangkan di BEI.	Rp136.000.000	Sejak IPO Telkom 1995
WALI AMANAT PT Bank CIMB Niaga Tbk.	Graha Niaga, Lt. 20 Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190 Tel. : (62-21) 300 6420, ext. 32001 - 32003 Fax. : (62-21) 250 5777	Mewakili kepentingan pemegang Obligasi dengan Perusahaan untuk obligasi II Telkom.	Rp82.500.000	2010

Profesi Penunjang Pasar Modal	Alamat	Jasa	Biaya	Periode Penugasan
KUSTODIAN SENTRAL PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman, Kav.52 - 53 Jakarta, 12190 Tel. : (62-21) 529 91099 Fax. : (62-21) 529 91199	- Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi saham di BEI - Layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil *corporate action.*	Rp33.000.000	Sejak 1995
AGEN PEMERINGKAT PT Pefindo	Panin Tower - Senayan City, Lt. 17 Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 Tel. : (62-21) 7278 2380 Fax. : (62-21) 7278 2370	Menyediakan peringkat atas risiko kredit atas penerbitan obligasi Telkom.	Rp140.250.000	2010, 2011
BANK KUSTODIAN ADS The Bank of New York Mellon Depositary Receipts	101 Barclay Street, 22nd Floor West New York, NY 10286 Tel. : (1-212) 815 8162 Fax. : (1-212) 571 3050	Bertindak sebagai lembaga penyimpanan (Kustodian) saham ADS yang diperdagangkan di NYSE dan LSE.	US$95.286	Sejak 1995

ALAMAT

Perusahaan: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

No	Kantor	Alamat	Telepon	Fax
1	**Kantor Pusat GKP Telkom** www.telkom.co.id	Jl. Japati No.1, Bandung 40133	(62-22) 452 7101	(62-22) 424 0313
2	**Corporate Communication & Affairs** corporate_comm@telkom.co.id	Grha Citra Caraka Lantai 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 529 22007	(62-21) 520 3322
3	**Investor Relation** investor@telkom.co.id	Grha Citra Caraka Lantai 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 521 5109	(62-21) 522 0500
4	**Divisi Infratel**	Grha Citra Caraka Lantai M Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 522 1400 (62-21) 522 1500	(62-21) 522 9600
5	**Divisi Access**	Grha Citra Caraka Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 5290 3482	(62-21) 522 1300
6	**Maintenance Service Center**	GKP Telkom Lantai 4 Jl. Japati No.1, Bandung 40133	(62-22) 452 4129	(62-22) 452 4125
7	**Information System Center**	GKP Telkom Lantai 4 Jl. Japati No.1, Bandung 40133	(62-22) 452 4228	(62-22) 720 1890
8	**Divisi Wireless Broadband**	Grha Flexi Lantai 2 Jl. Kebon Sirih No.36, Jakarta 10110	(62-21) 344 7070	(62-21)344 0707
9	**Divisi Broadband**	Grha Citra Caraka Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 5290 3482	(62-21)522 1300
10	**Divisi Solution Convergence** www.c4.telkom.co.id c4@telkom.co.id	Menara Multimedia Lantai 15 Jl. Kebon Sirih No.12, Jakarta 10110	(62-21) 386 0500	(62-21) 386 6267
11	**Innovation & Design Center**	Jl. Gegerkalong Hilir No.47 Bandung 40152	(62-22) 457 1050 (62-22) 457 1051	(62-22) 201 4669 (62-22) 201 3505
12	**Divisi Consumer Services Barat**	Grha Citra Caraka Lantai 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 521 5100	(62-21) 520 2733
13	**Divisi Consumer Services Timur**	Jl. Ketintang No.156 Surabaya 60231	(62-31) 828 6000	(62-31) 828 6080
14	**Divisi Enterprise Services**	Chase Plaza Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12910	(62-21) 386 6600	(62-21) 386 8400
15	**Divisi Business Services**	Jl. Letjen S. Parman Kav.8 Lantai 2, Jakarta 11440	(62-21) 565 8500	(62-21) 565 2800
16	**Divisi Wholesale Services**	Grha Citra Caraka Lantai 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 5291 7007	(62-21) 5289 2080
17	**Human Capital Center**	GKP Telkom Lantai 5 Jl. Japati No.1, Bandung 40133	(62-22) 452 5428	(62-22) 720 6986
18	**Corporate University**	Jl. Gegerkalong Hilir No.47, Bandung 40152	(62-22) 201 4508 (62-22) 201 4441	(62-22) 201 4429
19	**Management Consulting Center**	Jl. Cisanggarung No.2 , Bandung 40115	(62-22) 452 1620	(62-22) 452 1549
20	**Assessment Service Center**	Jl. Hegarmana No.71, Bandung 40141	(62-22) 203 9255 (62-22) 203 5269	(62-22) 203 9231
21	**Community Development Center**	GKP Telkom Lantai 8 Jl. Japati No.1, Bandung 40133	(62-22) 452 8219	(62-22) 452 8206
22	**Supply Center**	GKP Telkom Lantai 6 Jl. Japati No.1, Bandung 40133	(62-22) 452 6327	(62-22) 720 6583
23	**Finance, Billing & Collection Center**	GKP Telkom Lantai 3 Jl. Japati No.1, Bandung 40133	(62-22) 452 3371	(62-22) 452 3377

Entitas Anak dengan Kepemilikan Langsung

No	Perusahaan	Alamat	Telepon	Fax
1	**PT Telekomunikasi Selular** www.telkomsel.com	Wisma Mulia Mezzanine Lantai 19 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.42, Jakarta 12710	*(62-21) 524 0811*	*(62-21) 529 06122*
2	**PT Indonusa Telemedia** www.telkomvision.com	Gedung TelkomVision Lantai 3 Jl. Prof. Dr. Supomo No.139, Tebet, Jakarta 12810	*(62-21) 829 8800*	*(62-21) 831 7400*
3	**PT Graha Sarana Duta** www.telkomproperty.co.id	Menara Telkom Property, Gedung Annex Jl. Kebon Sirih No.10-12, Jakarta 10110	*(62-21) 380 0868*	*(62-21) 3483 0653*
4	**PT Telekomunikasi Indonesia, International** www.telin.co.id	Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 24 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38, Jakarta 12710	*(62-21) 2995 2300*	*(62-21) 5296 2358*
5	**PT Multimedia Nusantara** www.metra.co.id	The East Tower Lantai 37 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav.E3.2 No.1 Jakarta 12950	*(62-21) 521 0123*	*(62-21) 521 0124*
6	**PT Dayamitra Telekomunikasi** www.mitratel.co.id	Gedung Grha Pratama Lantai 5 Jl. M.T. Haryono Kav.15, Jakarta 12810	*(62-21) 8370 9592* *(62-21) 8370 9593*	*(62-21) 8370 9591*
7	**PT Pramindo Ikat Nusantara** www.pramindo.com	Plaza Kuningan, Gedung Annex Lantai 7 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C11-C14 Jakarta Selatan 12940	*(62-21) 520 2560*	*(62-21) 5292 0156*
8	**PT Napsindo Primatel International**	Gedung Elektrindo, Lantai 6 Jl. Prof. Dr. Supomo No.139, Tebet, Jakarta Selatan	*(62-21) 520 9202*	*(62-21) 520 9305*
9	**PT Telkom Akses**	Gedung Telkom, Lantai 7 Jl. S. Parman Kav.8, Jakarta Barat 11440	*(62-21) 2933 7000*	*(62-21) 2933 6000*

Entitas Anak dengan Kepemilikan Tidak Langsung

No	Perusahaan	Alamat	Telepon	Fax
1	**PT Infomedia Nusantara** www.infomedianusantara.co.id	Jl. RS. Fatmawati Kav.77-81 Jakarta 12150	(62-21) 720 1221	(62-21) 720 1226
2	**PT Finnet Indonesia** www.finnet-indonesia.com	Menara Bidakara Lantai 12 & 21 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta 12870	(62-21) 829 9999	(62-21) 828 1999
3	**PT Sigma Citra Caraka** www.telkomsigma.co.id	Menara DEA I Lantai 8, Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat IX Kav.E43 No.1 Jakarta 12950	(62-21) 576 2150	(62-21) 576 2155
4	**Aria West International Finance B.V**	Equity Trust Co. Nv., Strawinskylaan 3105 Atrium Lantai 7, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands	(31-20) 406 44 65	(31-20) 642 76 75
5	**PT Administrasi Medika** www.admedika.co.id	Telkom STO Gambir, Gedung C Lantai 3, 4 & 5 Jl. Medan Merdeka Selatan No.12, Jakarta 10110	(62-21) 3483 1100	(62-21) 3483 5489
6	**Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd.** www.telin.sg	1 Maritime Square #09-63 Harbour Front Center, Singapore 099253	(65) 6278 8189	(65) 6273 1169
7	**PT Metra Plasa**	Mulia Business Park, Building J Jl. Letjen MT Haryono Kav.58 – 60 Pancoran, Jakarta 12780	(62-21) 7918 7250	(62-21) 7918 7252
8	**PT Telkom Landmark Tower**	Grha Citra Caraka Lantai 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710	(62-21) 521 5565	(62-21) 521 5576
9	**Telekomunikasi Indonesia International Ltd.** www.telin.hk	Unit 05 9/FL, Ocean Center No.5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong	(852) 3102 3309	(852) 3102 3306
10	**PT Metra-Net** www.metranet.co.id	Mulia Business Park, Building J Jl. Letjen MT Haryono Kav.58 – 60 Pancoran, Jakarta 12780	(62-21) 7918 7250	(62-21) 7918 7252
11	**PT Telekomunikasi Indonesia International S.A** www.telkomcel.tl	Timor Plasa Avenida Presidente Nicolau Labato Dili, Timor Leste	(670) 7408 0002	(670) 7408 0002

Entitas Asosiasi

No	Perusahaan	Alamat	Telepon	Fax
1	**PT Citra Sari Makmur** www.csmcom.com	Chase Plaza Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12910	(62-21) 520 8311 (62-21) 570 0194	(62-21) 570 4656
2	**PT Pasifik Satelit Nusantara** www.psn.co.id	Gedung Kantor Taman, A9 Unit C3 - C4 Jl. Mega Kuningan Raya Lot 8/9 No.9 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950	(62-21) 576 2292	(62-21) 576 2290
3	**PT Patra Telekomunikasi Indonesia** www.patrakom.co.id	Jl. Pringgodani 2 No.33 Alternatif Cibubur, Depok 16954	(62-21) 845 4040	(62-21) 845 7610
4	**Scicom Bhd** www.scicom-intl.com	Menara TA One Lantai 25, Jl. P. Ramlee No.22 Kuala Lumpur, Malaysia 50250	(60-3) 2162 1088	(60-3) 2164 9820
5	**PT Integrasi Logistik Cipta Solusi** www.ilcs.co.id	Plasa Telkom Jakarta Utara, Lantai 4 Jl. Yos Sudarso Kav.23-23 Jakarta Utara 14320	(62-21) 4393 2555	(62-21) 4393 6555

Ventura Bersama

No	Perusahaan	Alamat	Telepon	Fax
1	**PT Melon Indonesia** www.melon.co.id	Gedung Telkom DCS 1 Lantai 7 Jl. Sisingamangaraja Kav.4 – 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110	(62-21) 7280 0044	(62-21) 724 4390

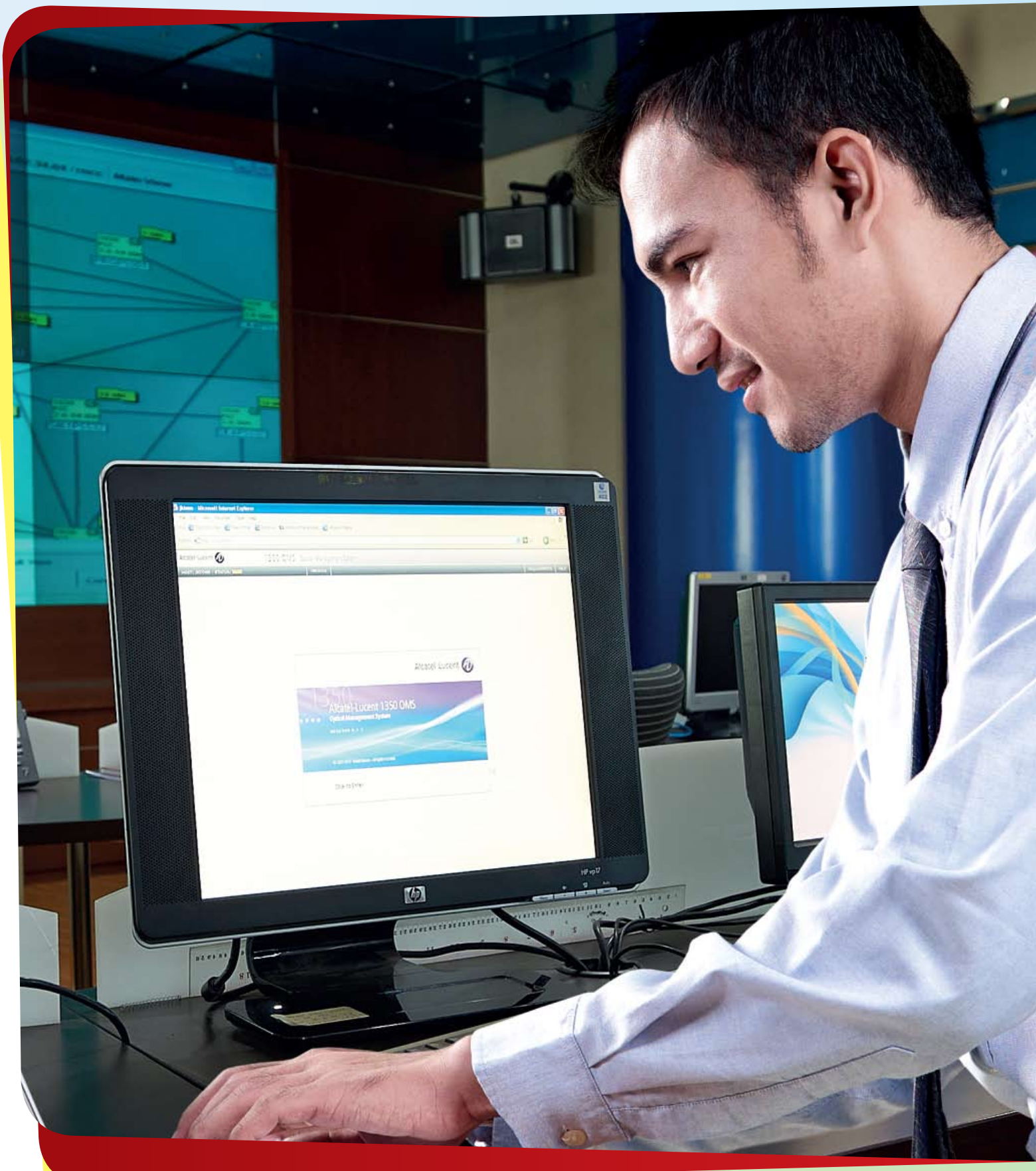
Alcatel-Lucent 1350 OMS

214 Rangkuman Perbedaan Signifikan antara Praktik Tata Kelola Perusahaan di Indonesia dan Amerika

215 Rangkuman Perbedaan Signifikan antara SAK Indonesia dan IFRS

215 Anggaran Dasar

216 Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah

217 Mekanisme Perdagangan Pasar Modal dan ADS Telkom

218 Perpajakan

220 Riset dan Pengembangan

220 Dasar Hukum dan Peraturan

225 Persaingan

229 Perizinan

233 Merek, Hak Cipta, Desain Industri dan Paten

Informasi **Tambahan** (Bagi pemegang Saham ADR)

RANGKUMAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN DI INDONESIA DAN AMERIKA

Berikut ini diuraikan secara ringkas rangkuman umum mengenai perbedaan signifikan antara praktik tata kelola perusahaan di Indonesia dan Amerika.

A. Tinjauan Hukum Indonesia

Perusahaan publik Indonesia diwajibkan untuk mematuhi dan memenuhi praktik tata kelola perusahaan yang telah berlaku. Persyaratan dan standar praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan publik diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT") No.40/2007; Undang-undang No.8/1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"); Undang-undang No.19/2003 mengenai BUMN; Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; Peraturan OJK dan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Sebagai tambahan terhadap peraturan-peraturan tersebut, anggaran dasar perusahaan publik memasukkan ketentuan yang ditujukan untuk implementasi praktik tata kelola perusahaan.

Pada tanggal 30 November 2004, Pemerintah membentuk KNKG berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP-49/M.EKONOM/1/2004. Pendirian tersebut merupakan revitalisasi Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan ("KNTKP") yang didirikan pada tahun 1999. Tujuan KNKG adalah meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia dan untuk memberi saran kepada Pemerintah tentang hal-hal yang terkait dengan tata kelola, untuk sektor korporasi dan publik.

KNKG merumuskan Kode Tata Kelola Perusahaan 2006 ("Kode") yang merekomendasikan standar tata kelola perusahaan yang lebih ketat untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Meskipun KNKG merekomendasikan agar Kode diterapkan oleh Pemerintah sebagai dasar reformasi hukum, namun sampai dengan Laporan Tahunan ini diselesaikan, Pemerintah belum menerbitkan peraturan yang sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

B. Komposisi Direksi Independen

Standar pencatatan NYSE mensyaratkan bahwa Direksi perusahaan yang tercatat di NYSE harus terdiri dari mayoritas direktur independen dan bahwa Komite tertentu harus terdiri dari para direktur independen.

Tidak seperti halnya perusahaan di Amerika, manajemen perusahaan Indonesia terdiri dari dua lembaga dengan status yang sama, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Pada umumnya Direksi bertanggung jawab atas kegiatan bisnis rutin perusahaan dan diberi wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sementara Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab mengawasi Direksi dan berdasarkan UUPT Indonesia diberi mandat untuk memberikan saran kepada Direksi.

Berkenaan dengan Dewan Komisaris, UUPT mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik memiliki setidaknya dua anggota. Meskipun UUPT tidak mengatur mengenai komposisi Dewan Komisaris, namun Peraturan Pencatatan No.I-A dalam KEP.305/BEJ/07-2004 yang dikeluarkan oleh BEI (Peraturan BEI I-A) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari anggota Dewan Komisaris perusahaan publik harus independen.

UUPT menyatakan bahwa Direksi setidaknya terdiri dari dua anggota, yang masing-masing harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimum yang ditetapkan dalam UUPT. Sebagai tambahan, berdasarkan Peraturan BEI I-A, menyatakan sekurang-kurangnya satu anggota Direksi harus merupakan anggota yang tidak terafiliasi.

C. Komite-Komite

Standar pencatatan NYSE mensyaratkan bahwa perusahaan yang tercatat di NYSE harus memiliki Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Kompensasi. Masing-masing komite tersebut harus terdiri atas direktur independen dan dilengkapi dengan piagam tertulis yang membahas hal-hal spesifik yang terdapat pada standar pencatatan.

UUPT tidak mengharuskan perusahaan publik Indonesia membentuk setiap Komite yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE tersebut. Namun, Peraturan OJK No.IX.I.5 dan BEI I-A mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik tercatat membentuk Komite Audit yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota, yang salah satunya harus sebagai Komisaris Independen dan bertindak selaku ketua Komite Audit. Sedangkan kedua anggota Komite Audit yang lain harus dari pihak independen dan setidaknya salah satu anggota harus memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan.

Komite Audit kami terdiri dari enam anggota: dua Komisaris Independen, seorang Komisaris dan tiga

anggota independen eksternal yang tidak berafiliasi dengan kami.

Peraturan pencatatan NYSE yang diterapkan sesuai Peraturan 10A-3(c)(3) *Exchange Act* mengharuskan emiten swasta asing dengan saham yang tercatat di NYSE untuk memiliki Komite Audit yang terdiri dari direktur independen. Namun, emiten swasta asing dapat dikecualikan dari persyaratan independensi apabila: (i) Pemerintah atau Bursa Efek negara asal mengharuskan perusahaan memiliki Komite Audit; (ii) Komite Audit terpisah dari Direksi dan memiliki anggota dari luar Direksi, seperti pada kasus kami, dari anggota Dewan Komisaris; (iii) Anggota Komite Audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif perusahaan yang menjadi anggota Komite audit; (iv) Pemerintah atau Bursa Efek negara asal mengharuskan Komite Audit untuk independen dari manajemen perusahaan; dan (v) Komite Audit bertanggung jawab atas penunjukan, retensi dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal. Kami memanfaatkan pengecualian ini dan menyampaikannya secara tertulis kepada NYSE.

Tidak semua anggota Komite Audit kami merupakan direktur independen sebagaimana dipersyaratkan Peraturan 10A-3 *Exchange Act*. Kami mengacu pada pengecualian umum sesuai Peraturan 10A-3(c)(3) mengenai komposisi Komite Audit. Kami meyakini bahwa hal ini tidak mempengaruhi secara material kemampuan Komite Audit untuk bertindak independen.

D. Pengungkapan Berkenaan Dengan Tata Kelola Perusahaan

Standar pencatatan NYSE mengharuskan perusahaan yang tercatat di NYSE untuk menyajikan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan pada *website*-nya. Pedoman tersebut, antara lain, harus mencantumkan: standar kualifikasi direktur, tanggung jawab direktur, hubungan direktur dengan manajemen dan penasihat independen, kompensasi direktur, orientasi dan pendidikan yang berkelanjutan bagi direktur, suksesi manajemen serta evaluasi kinerja tahunan. Selain itu, CEO perusahaan yang tercatat di NYSE harus menyatakan kepada NYSE setiap tahunnya bahwa ia tidak menemukan adanya pelanggaran apapun oleh perusahaan terhadap standar pencatatan tata kelola perusahaan NYSE. Sertifikasi harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan perusahaan kepada para pemegang saham. Tidak ada persyaratan pengungkapan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mirip dengan standar pencatatan NYSE yang diuraikan di atas. Namun, Undang-undang Pasar Modal pada umumnya mengharuskan perusahaan publik Indonesia mengungkapkan jenis informasi tertentu kepada para pemegang saham dan OJK, khususnya informasi yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan saham perusahaan publik dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan para pemegang saham dalam mempertahankan kepemilikan sahamnya di perusahaan publik tersebut.

E. Kode Etik dan Perilaku Bisnis

Standar pencatatan NYSE mengharuskan setiap perusahaan yang tercatat di NYSE untuk mengadopsi dan menempatkan di website perusahaannya, kode etik dan perilaku bisnis bagi Direksi, pejabat dan karyawannya. Tidak ada persyaratan serupa berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, perusahaan yang diharuskan menyampaikan laporan berkala ke SEC, harus mengungkapkan dalam Laporan Tahunannya tentang penerapan kode etik bagi pejabat keuangan senior perusahaan.

RANGKUMAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA SAK INDONESIA DAN IFRS

Lihat Catatan 49 Laporan Keuangan Konsolidasian.

ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perusahaan ("Anggaran Dasar") telah didaftarkan sesuai UUPT No.1/1995 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-7468.HT.01.04. TH.97 Tahun 1997. Sehubungan dengan diterbitkannya UUPT No.40/2007 yang menggantikan UUPT No.1/1995, Perusahaan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("HAM") Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU.46312.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah didaftarkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 17 Oktober 2008, Lampiran Berita Negara No.20155.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dilakukan dalam rangka memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis, persyaratan minimum untuk melakukan pemberitahuan dan panggilan RUPS sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta beberapa perubahan redaksional. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilakukan berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No.30 tanggal 7 Juni 2012. Pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-34558 tanggal 24 September 2012.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA PEMERINTAH

Hubungan yang terjalin antara Telkom dengan Pemerintah sangat menyeluruh dalam berbagai hal. Pemerintah adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali. Pemerintah juga bertindak sebagai regulator yang membuat, mengawasi dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan sektor telekomunikasi, menetapkan tarif serta menerbitkan lisensi. Di satu sisi, Pemerintah juga merupakan salah satu pelanggan dan pemberi pinjaman bagi Telkom.

Dalam bagian ini, "Pemerintah" diartikan sebagai Pemerintah Republik Indonesia dan kementerian, departemen dan lembaga pemerintah, namun tidak termasuk BUMN.

A. Pemerintah Sebagai Pemegang Saham

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali utama yang menguasai 53,9% kepemilikan saham kami. Kepemilikan Pemerintah atas satu Saham Seri A Dwiwarna memberikannya hak suara khusus dan hak veto. Menurut peraturan yang berlaku, "kepemilikan" saham Biasa dan satu Saham Seri A Dwiwarna kami berada di bawah Departemen Keuangan RI ("Depkeu") yang kemudian memberikan kewenangan kepada Menteri BUMN untuk menggunakan hak-hak yang diberikan dalam saham ini sebagai "pemegang saham pengendali" kami.

Sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali, Pemerintah berkepentingan atas kinerja kami, baik terkait dengan layanan yang kami berikan kepada bangsa maupun kemampuan kami untuk beroperasi secara komersial. Hak dan batasan material yang berlaku untuk saham biasa juga berlaku untuk Saham Seri A Dwiwarna, dengan pengecualian Pemerintah tidak boleh mengalihkan kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna dan Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan: (i) pengajuan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi; (ii) pengajuan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris; (iii) penerbitan saham baru; dan (iv) perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk tindakan untuk menggabungkan atau membubarkan Perusahaan, meningkatkan atau mengurangi modal dasar, atau mengurangi modal ditempatkan.

B. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah dalam perannya sebagai Regulator berwenang mengatur sektor telekomunikasi melalui Menkominfo. Menkominfo berwenang menerbitkan peraturan pelaksanaan atas undang-undang, yang umumnya memiliki lingkup yang luas. Keputusan Menkominfo mendefinisikan struktur industri, menetapkan formula tarif, menentukan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU"), dan mengendalikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi persaingan, operasional dan keuangan kami. Melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Ditjen Postel"), Menkominfo mengatur alokasi frekuensi dan menentukan jumlah sambungan telepon tidak bergerak.

Kami diharuskan untuk memperoleh lisensi dari Ditjen Postel untuk setiap jenis layanan yang ditawarkan, termasuk frekuensi yang dipergunakan (sebagaimana dialokasikan oleh Menkominfo). Kami dan operator lain diharuskan membayar biaya hak penggunaan frekuensi. Telkomsel memiliki beberapa lisensi yang diterbitkan oleh Menkominfo (beberapa sebelumnya dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan) untuk penyediaan jasa selulernya dan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia terkait dengan investasi oleh Telkomsel untuk pembangunan jasa sambungan telepon seluler dengan jangkauan nasional, termasuk perluasan jangkauan jaringannya. Pemerintah, melalui Menkominfo sebagai regulator, berwenang untuk memberikan lisensi baru untuk pendirian ventura bersama dan pengaturan baru lainnya, khususnya di bidang telekomunikasi.

C. Pemerintah Sebagai Pemberi Pinjaman

Pada bulan Juli 1994, Pemerintah mengatur sebuah fasilitas dengan sejumlah institusi asing untuk menyediakan dana bagi kami dalam bentuk pinjaman penerusan. Pinjaman tersebut dibuat melalui dan dijamin oleh Pemerintah. Sampai dengan 31 Desember 2012, saldo pinjaman penerusan sebesar Rp1.987 miliar (US$206 juta), termasuk jumlah yang jatuh tempo dalam satu tahun. Kami diwajibkan untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman kepada Pemerintah, yang selanjutnya akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada masing-masing pemberi pinjaman. Sampai dengan 31 Desember 2012, 71,1% dari pinjaman penerusan tersebut merupakan pinjaman dalam mata uang asing. Sisanya, sebesar 28,9% dari pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Pada tahun 2012, tingkat suku bunga tahunan atas pinjaman yang harus dibayar kembali adalah sebesar 6,79% dalam Rupiah, 4,0% dalam Dolar Amerika Serikat dan 3,1% dalam Yen Jepang.

D. Pemerintah sebagai Pelanggan

Sejumlah departemen dan lembaga Pemerintah memanfaatkan layanan kami sebagai pelanggan langsung secara komersial. Tidak ada layanan yang diberikan secara cuma-cuma. Kami melayani departemen dan lembaga Pemerintah tersebut sebagai pelanggan terpisah. Pada tahun 2012, jumlah

pendapatan yang bersumber dari departemen dan lembaga Pemerintah sebesar Rp237 miliar, berkisar 0,31% terhadap total pendapatan konsolidasian serta bukan merupakan jumlah yang material terhadap pendapatan Perusahaan. Departemen dan lembaga Pemerintah ini diperlakukan sama halnya dengan pelanggan perumahan terkait biaya koneksi dan biaya bulanan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif layanan bisnis. Hal ini tidak berlaku terhadap tarif untuk sambungan lokal, jarak jauh dan SLI.

Kami memiliki kebijakan untuk tidak melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi kecuali persyaratannya tidak kurang menguntungkan dibandingkan bila kami melakukannya dengan pihak ketiga. Kementerian BUMN telah menyarankan kami untuk menghindari transaksi dengan entitas lain di bawah kendali mereka kecuali dengan persyaratan yang konsisten dengan kebijakan kami sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan Peraturan OJK, setiap transaksi yang terdapat benturan kepentingan dengan emiten BEI lain, harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham biasa kami yang tidak memiliki benturan kepentingan terhadap transaksi yang dimaksud, kecuali benturan kepentingan tersebut telah ada sebelum Perusahaan tercatat dan sepenuhnya diungkapkan dalam prospektus.

MEKANISME PERDAGANGAN PASAR MODAL DAN ADS TELKOM

Saham biasa Telkom tercatat dan diperdagangkan di BEI. Selain BEI, saham Telkom juga tercatat di NYSE dan LSE melalui mekanisme ADS. Satu lembar saham ADS mewakili 40 lembar saham biasa. Saham Telkom juga terdaftar di Jepang melalui POWL.

A. Pasar Saham Indonesia

Pasar saham Indonesia yang dikenal dengan BEI sejak 1 Desember 2007, merupakan penggabungan dua bursa saham di Indonesia yang beroperasi di dua lokasi berbeda, yaitu Bursa Efek Jakarta yang berlokasi di Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Pada tanggal 28 Desember 2012, BEI memiliki 459 emiten dan 116 anggota perusahaan pialang aktif. Selama tahun 2012, volume perdagangan di BEI mencapai 117,87 miliar lembar saham. Pada tanggal 28 Desember 2012 total kapitalisasi pasar BEI senilai Rp4.126,99 triliun (US$428 miliar).

Perdagangan saham harian di BEI berlangsung dari Senin sampai Kamis yang terdiri dari dua sesi perdagangan untuk pasar reguler maupun pasar negosiasi. Sesi perdagangan pertama dimulai pukul 09.30 hingga pukul 12.00, sementara sesi kedua berlangsung antara pukul 13.30 - 16.00. Pada hari Jumat, sesi pertama di mulai pukul 09.30 - 11.30 dan sesi kedua di mulai pukul 14.00 - 16.00. Hanya ada satu sesi perdagangan pasar tunai setiap harinya yang berlangsung dari Senin sampai Kamis mulai pukul 09.30 - 12.00 dan pada hari Jumat dari pukul 09.30 - 11.30. Di samping itu juga terdapat sesi pra-pembukaan yang berlangsung dari Senin sampai Jumat pukul 09.10.00 - 09.29.59 khusus untuk pasar reguler.

Perdagangan saham dibagi menjadi tiga segmen, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai (kecuali untuk *right issue* yang hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi pada sesi pertama). Pasar reguler merupakan mekanisme perdagangan saham dalam lot standar di pasar lelang yang dilakukan secara terus-menerus selama jam bursa. Perdagangan pasar reguler dan pasar tunai pada umumnya dilaksanakan dalam unit lot, yaitu satu lot yang terdiri dari 500 lembar saham.

Perdagangan saham di pasar negosiasi dilakukan melalui negosiasi langsung: (i) antara anggota BEI, (ii) antara klien melalui satu anggota BEI, (iii) antara klien dan anggota BEI atau (iv) antara anggota BEI dengan Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI").

Transaksi di pasar regular BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada hari perdagangan ketiga setelah transaksi dilakukan. Transaksi di pasar negosiasi dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara anggota bursa yang menjual dan yang membeli, untuk setiap transaksi yang dilakukan. Transaksi di pasar tunai harus diselesaikan pada hari transaksi tersebut dilakukan dan dilaporkan kepada BEI. Jika anggota bursa gagal melakukan pembayaran, saham terkait dapat diperdagangkan melalui negosiasi langsung berdasarkan persyaratan tunai dan langsung (*cash and carry*). Setiap anggota bursa harus membayar biaya transaksi sesuai aturan BEI. Untuk setiap keterlambatan pembayaran biaya transaksi, BEI mengenakan denda sebesar 1,0% dari jumlah yang terhutang untuk setiap hari keterlambatan. BEI berhak mengenakan sanksi kepada anggota bursa atas pelanggaran terhadap peraturan bursa, yang dapat berupa denda, peringatan tertulis, skorsing, hingga pencabutan izin sebagai anggota bursa.

Untuk setiap transaksi yang dilakukan di BEI, setiap anggota bursa diwajibkan untuk membayar biaya

transaksi sebesar 0,018% dari nilai transaksi (untuk transaksi di pasar reguler dan pasar tunai). Untuk pasar negosiasi, biaya transaksi tergantung kepada kebijakan bursa. Besaran biaya transaksi bulanan minimal adalah Rp20 juta, sebagai kontribusi untuk penyediaan fasilitas bursa dan tetap berlaku untuk anggota bursa dalam keadaan suspensi atau yang Surat Persetujuan Anggota Bursa-nya ("SPAB") dicabut.

B. Perdagangan Saham di NYSE dan LSE

Bank of New York Mellon (sebelumnya The Bank of New York) bertindak sebagai lembaga penyimpan ("Kustodian") saham ADS, yang diperdagangkan di NYSE dan LSE.

Investor dapat membayar biaya penjaminan secara langsung atau melalui pialang yang mewakili mereka untuk pengiriman dan penyerahan ADS demi keperluan penarikan saham. Kustodian berhak menerima bayaran saat pendistribusian saham kepada investor dengan mengurangi jumlah yang didistribusikan dengan biaya kustodian atau dengan menjual sebagian dari *property* yang akan didistribusikan untuk membayar biaya kustodian. Kustodian dapat menarik iuran tahunan untuk layanan penjaminan dengan mengurangi distribusi kas, atau secara langsung mengirim tagihan ke investor atau dengan menagih ke rekening pihak yang mewakili mereka. Kustodian dapat menolak memberikan layanan sebelum investor menyelesaikan tagihan atas layanan tersebut.

PERPAJAKAN

Berikut adalah ikhtisar konsekuensi pajak Indonesia dan Federal Amerika Serikat ("AS") terkait dengan pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau saham biasa. Ikhtisar ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan seluruh aspek perpajakan yang mungkin relevan terkait dengan keputusan pembelian, pemilikan atau penjualan ADS atau saham biasa.

Investor diharapkan berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka mengenai konsekuensi pajak Indonesia dan pajak AS atas transaksi pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau saham biasa.

A. Perpajakan Indonesia

Berikut ini adalah ikhtisar konsekuensi pajak di Indonesia atas kepemilikan dan pelepasan saham biasa atau ADS kepada perorangan asing atau Perusahaan asing yang memiliki saham biasa atau ADS ("Pemegang Saham asing") yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN").

1. ***Dividen***

   Dividen yang dideklarasikan oleh Telkom untuk diambil dari laba ditahan, dan dibayarkan kepada Pemegang Saham Bukan WNI terkait saham biasa atau ADS dikenakan pajak penghasilan di Indonesia, yang pada tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini tarifnya adalah 20% atas jumlah yang dibayarkan (dalam hal pembayaran dividen tunai) atau atas porsi kepemilikan pemegang saham dari nilai yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah yang ditetapkan oleh perjanjian pajak berganda dapat diterapkan jika penerima dividen memenuhi persyaratan ketat yang berlaku. Di bawah perjanjian pajak berganda Indonesia-Amerika Serikat, pajak penghasilan atas dividen umumnya, tanpa memperhitungkan hak suara 25%, berkurang menjadi 15%.

2. ***Capital Gains***

   Penjualan atau pengalihan saham biasa melalui BEI dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang melakukan transaksi diwajibkan memotong pajak tersebut. Kepemilikan saham pendiri atau penjualan atau pengalihan saham pendiri melalui BEI, berdasarkan peraturan pajak Indonesia yang berlaku saat ini, dapat dikenakan tambahan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5%.

   Dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan, perkiraan laba bersih yang diterima atau masih akan diterima dari penjualan aset bergerak di Indonesia, yang dapat mencakup saham biasa yang tidak tercatat di BEI atau ADS, oleh Pemegang Saham bukan WNI (kecuali penjualan aset berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia) dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia dengan tarif 20%. Pada tahun 1999, Menkeu mengeluarkan keputusan yang menyatakan perkiraan laba bersih untuk penjualan saham yang diterima oleh wajib pajak bukan penduduk di Perusahaan non-publik sebesar 25% dari harga jual, yang menghasilkan tarif efektif pajak penghasilan sebesar 5% dari harga penjualan. Pajak ini merupakan pajak penghasilan final dan kewajiban membayar berada di pihak pembeli (apabila merupakan wajib pajak Indonesia) atau Perusahaan (apabila pembeli adalah wajib pajak bukan WNI).

   Dalam hal pembeli atau pialang Indonesia, berdasarkan undang-undang pajak Indonesia, diharuskan memotong pajak atas pembayaran atas pembelian saham biasa atau ADS, maka pembayaran tersebut dapat dibebaskan dari

pemotongan pajak penghasilan Indonesia atau pajak Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian pajak berganda yang berlaku, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota (termasuk perjanjian pajak berganda AS-Indonesia).

3. ***Bea Meterai***
   Transaksi saham di Indonesia dikenakan bea meterai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, bea meterai sebesar Rp3.000 dikenakan untuk nilai transaksi sampai dengan Rp1.000.000 sedangkan bea meterai sebesar Rp6.000 dikenakan untuk nilai transaksi nilai lebih dari Rp1.000.000.

B. Pertimbangan Tertentu Mengenai Pajak Penghasilan Federal AS

Berikut ini adalah rangkuman beberapa konsekuensi pajak penghasilan AS yang berhubungan dengan akuisisi kepemilikan dan pengalihan ADS atau saham biasa oleh Pemegang Saham Warga Amerika yang memiliki ADS atau saham biasa mereka sebagai aset modal (umumnya, properti yang dimiliki sebagai investasi) di bawah seksi 1221 US *Internal Revenue Code* ("*Tax Code*"). Ringkasan ini berdasarkan hukum Federal AS tentang pajak penghasilan yang berlaku, yang dapat diartikan secara berbeda atau dapat berubah, kemungkinan dengan dampak retroaktif.

1. ***Perihal Klasifikasi Ambang Perusahaan Investasi Asing Pasif ("PIAP")***
   Suatu perusahaan non AS seperti Telkom akan diperlakukan sebagai PIAP, untuk keperluan pajak penghasilan Federal AS, jika 75% atau lebih dari pendapatan kotornya terdiri dari penghasilan "pasif" tertentu atau 50% atau lebih asetnya adalah pasif. Berdasarkan pendapatan dan aset Perusahaan di tahun 2012, Telkom meyakini bahwa Telkom tidak diklasifikasikan sebagai PIAP. Oleh karena status PIAP ditentukan oleh fakta intensif yang dibuat secara tahunan, tidak ada jaminan bahwa Perusahaan tidak atau tidak akan diklasifikasikan sebagai PIAP. Diskusi di bawah ini tentang "Dividen" dan "Penjualan atau Pengalihan Lainnya atas ADS atau Saham Biasa" ditulis dengan dasar bahwa Perusahaan tidak akan diklasifikasikan sebagai PIAP untuk keperluan pajak penghasilan Federal AS.

2. ***Dividen***
   Setiap pembagian tunai yang dibayar oleh Perusahaan dari keuntungan dan laba sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip pajak penghasilan Federal AS, akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dividen dan akan dimasukkan dalam penghasilan kotor Pemegang Saham Warga Negara AS pada saat diterima. Penerima penghasilan dividen yang bukan Perusahaan pada umumnya akan dikenakan pajak penghasilan dividen dari suatu "Perusahaan asing yang memenuhi persyaratan" dengan tarif pajak Federal AS maksimum 15%, bukan tarif pajak marjinal yang berlaku pada penghasilan biasa, sepanjang telah memenuhi persyaratan periode kepemilikan tertentu. Perlu dicatat bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011, dividen dari sebuah Perusahaan asing yang memenuhi syarat diperlakukan sebagai pendapatan biasa dengan tarif pajak maksimum sebesar 39,6% untuk penerima dividen non-perusahaan setelah akhir 2010.

3. ***Penjualan atau Pengalihan Lainnya atas ADS atau Saham Biasa***
   Pemegang Saham Warga Negara AS umumnya mengakui keuntungan atau kerugian modal dari penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau saham biasa sebesar selisih antara jumlah yang terealisasi pada saat pengalihan terjadi dengan basis pajak yang telah disesuaikan bagi pemegang saham untuk ADS atau saham biasa tersebut. Suatu keuntungan ataupun kerugian modal bersifat jangka panjang apabila ADS atau saham biasa telah dimiliki selama lebih dari satu tahun dan umumnya akan menjadi sumber keuntungan atau kerugian AS untuk keperluan kredit pajak asing AS.

4. ***Konsekuensi PIAP***
   Jika Perusahaan diklasifikasikan sebagai PIAP pada suatu tahun pajak, Pemegang Saham Warga Negara AS harus mematuhi aturan-aturan khusus yang umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapuskan manfaat penangguhan pajak penghasilan Federal AS yang dapat diperoleh Pemegang Saham Warga Negara AS dari investasinya di suatu Perusahaan non-AS yang tidak membagikan semua labanya pada basis saat ini. Dalam hal ini, Pemegang Saham Warga Negara AS mungkin dikenakan tarif pajak penghasilan biasa atas (i) keuntungan yang diakui pada penjualan ADS atau saham biasa dan (ii) kelebihan distribusi yang dibayarkan atas ADS atau saham biasa (umumnya merupakan pembagian yang melebihi 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang Telkom bayarkan selama tiga tahun pajak sebelumnya). Di samping itu, Pemegang Saham Warga Negara AS akan dikenakan bunga atas keuntungan atau kelebihan

distribusi tersebut. Selain itu, tarif maksimum 15% terhadap dividen Perusahaan tidak akan dikenakan jika Perusahaan dikategorikan sebagai PIAP.

5. ***Cadangan Pajak Penghasilan dan Persyaratan Pelaporan Informasi***

   Cadangan pajak penghasilan dan persyaratan pelaporan informasi AS pada umumnya berlaku untuk beberapa pembayaran kepada pemegang saham non-korporasi tertentu. Suatu pihak pembayar pajak akan diwajibkan untuk menahan cadangan pajak penghasilan dari setiap pembayaran dividen, atau hasil dari penjualan atau pelunasan ADS atau saham biasa dalam teritori AS atau oleh pembayar AS atau perantara AS kepada pemegang saham, selain penerima yang dikecualikan, jika pemegang saham tersebut gagal untuk memberikan nomor pokok wajib pajak yang benar atau tidak dapat memenuhi pengecualian dari persyaratan cadangan pajak penghasilan. Besarnya tarif cadangan pajak penghasilan adalah 25% pada tahun-tahun sampai dengan 2012.

   Cadangan pajak penghasilan bukanlah pajak tambahan dan dapat dikreditkan terhadap liabilitas pajak penghasilan Federal AS dari Pemegang Saham Warga Negara AS atau, apabila dalam hal melebihi liabilitasnya, maka akan dikembalikan oleh Kantor Pajak AS atau *Internal Revenue Service* ("IRS") apabila klaim untuk pengembalian uang telah disampaikan kepada IRS.

RISET DAN PENGEMBANGAN

Telkom secara rutin melakukan investasi untuk meningkatkan produk dan layanan. Pengeluaran yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp8 miliar, Rp13 miliar dan Rp13 miliar (US$1 juta) masing-masing untuk tahun 2010, 2011 dan 2012. Pada tahun 2012, pengeluaran dilakukan terkait dengan riset dan pengembangan yang mendukung penerapan *Mobile Broadband, Home Network, Device, Machine to Machine*, dan *Cloud Computing*, pada aspek bisnis, produk dan jasa, serta pada aspek infrastruktur jaringan telekomunikasi.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN

Kerangka kerja untuk industri telekomunikasi terdiri dari Undang-undang tertentu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan dan diberlakukan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi pertama kali diformulasikan dan diartikulasikan dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi" yang termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.72/1999 tanggal 17 September 1999.

A. Undang-undang Telekomunikasi

Secara umum sektor telekomunikasi diatur melalui Undang-undang No.36/1999 ("Undang-undang Telekomunikasi"), yang berlaku sejak 8 September 2000. Undang-undang Telekomunikasi menetapkan panduan dalam reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru dan meningkatkan transparansi dan kompetisi.

Undang-undang Telekomunikasi menghapuskan konsep "badan penyelenggara" sehingga mengakhiri tanggung jawab kami dan Indosat sebagai badan penyelenggara untuk melakukan koordinasi layanan telekomunikasi dalam negeri dan internasional. Dalam rangka meningkatkan persaingan, Undang-undang Telekomunikasi melarang praktik monopolistik dan persaingan tidak sehat antar sesama operator telekomunikasi.

Undang-undang Telekomunikasi telah diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Beberapa peraturan teknis yang fundamental diantaranya adalah:

- Peraturan Pemerintah No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Menkominfo No.1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkominfo No.31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.33/2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar; dan
- Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.4/2001 tertanggal 16 Januari 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/06/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.4/2001 tentang Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 Pembangunan Telekomunikasi Nasional.

B. Regulator Telekomunikasi

Pada bulan Februari 2005, kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi beralih dari Departemen Perhubungan ke kementerian yang baru terbentuk yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kemenkominfo"). Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Menkominfo melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian industri telekomunikasi di Indonesia. Pada 28 Oktober 2010, Menkominfo melakukan reformasi organisasi dan tata kerja termasuk mengalihkan kewenangan perizinan dan otoritas pengaturan kepada dua direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, sesuai Peraturan Menkominfo No.17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menyusul reformasi tersebut, dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Menkominfo No.15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tertanggal 20 Juni 2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menkominfo yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi sehingga hal-hal yang terkait dengan materi muatan khusus bidang pos dan telekomunikasi beralih kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informasi ("DJPPI") antara lain perizinan, penomoran, interkoneksi, kewajiban pelayanan universal dan persaingan usaha. Adapun hal-hal terkait spektrum frekuensi radio dan standarisasi alat dan perangkat telekomunikasi beralih ke Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ("SDPPI").

Menyusul pemberlakuan Undang-undang Telekomunikasi, Kementerian Perhubungan membentuk badan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.31/2003 tertanggal 11 Juli 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menkominfo No.36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 tentang hal yang sama (kemudian diubah dengan Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tertanggal 7 Februari 2011) ("Peraturan Menkominfo No.36/2008").

Sesuai Peraturan Menkominfo No.36/2008, BRTI mempunyai kewenangan mengatur industri telekomunikasi di Indonesia termasuk penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi. BRTI yang diketuai oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informasi ini terdiri dari sembilan anggota, yaitu enam dari elemen masyarakat dan tiga dari lembaga pemerintah (Dirjen SDPPI dan Dirjen PPI serta wakil Pemerintah ketiga ditunjuk oleh Menkominfo).

C. Klasifikasi dan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Undang-undang Telekomunikasi membagi penyelenggaraan telekomunikasi ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; (2) penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan (3) penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Setiap penyelenggaraan telekomunikasi harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Menkominfo. Peraturan Menkominfo No.1/2010 dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 tertanggal 31 Mei 2001 tentang Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi (diubah dengan Peraturan Menkominfo No.31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tertanggal 9 September 2008) adalah peraturan pelaksanaan dasar yang mengatur perizinan.

Peraturan Menkominfo No.1/2010 membagi penyelenggaraan jaringan menjadi penyelenggaraan jaringan tetap dan bergerak. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 membagi penyelenggaraan jasa menjadi penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia.

D. Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia

Tahun 1995, Telkom memperoleh hak monopoli untuk menyediakan layanan telekomunikasi lokal tidak bergerak yang berlaku hingga 31 Desember 2010 dan layanan SLJJ hingga 31 Desember 2005. Indosat dan Satelindo (yang kemudian melebur ke dalam Indosat) memperoleh hak duopoli untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional dasar hingga tahun 2004.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-undang Telekomunikasi, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif kami untuk menyediakan sambungan telepon kabel tidak bergerak dalam negeri dan sambungan langsung jarak jauh, dan hak duopoli Indosat dan Satelindo untuk menyediakan layanan sambungan teleponi dasar internasional. Pemerintah sebaliknya menerapkan kebijakan duopoli dengan menciptakan persaingan antara kami dan Indosat sebagai penyelenggara layanan dan jaringan yang lengkap.

E. Layanan SLJJ

Dalam rangka liberalisasi layanan SLJJ, Pemerintah mengubah Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional berdasarkan Keputusan Menkominfo No.6/P/M.KOMINFO/5/2005 tertanggal 17 Mei 2005 (Keputusan Menkominfo No.6/2005) yang memberikan kepada tiap penyelenggara layanan SLJJ suatu kode akses tiga digit yang memperbolehkan pelanggan memilih penyedia layanan SLJJ alternatif dengan cara memutar kode akses tiga digit tersebut. Keputusan Menkominfo No.6/2005 tidak mengharuskan adanya penerapan langsung kode akses tiga digit untuk panggilan SLJJ, namun sebagai penyedia layanan SLJJ pertama, Telkom harus secara bertahap membuka jaringan untuk kode akses tiga digit di seluruh wilayah berkode di Indonesia mulai 1 April 2010. Telkom diberikan kode akses SLJJ 017 sedangkan Indosat diberikan kode akses 011. Menkominfo kemudian mengubah kembali Rencana Telekomunikasi Nasional berdasarkan Keputusan Menkominfo No.43/P/M.KOMINFO/12/2007 tertanggal 3 Desember 2007 (Keputusan Menkominfo No.43/2007) yang menunda penerapan akses tiga digit untuk panggilan SLJJ di seluruh wilayah berkode di Indonesia hingga tanggal 27 September 2011.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No.43/2007, kami membuka jaringan bagi layanan akses tiga digit 01X di Balikpapan pada 3 April 2008. Sejak tanggal tersebut, para pelanggan kami dapat melakukan panggilan SLJJ dari Balikpapan dengan menggunakan kode Indosat "011" sebagai prefiks. Seperti disyaratkan dalam Keputusan Menkominfo 43/2007, kami juga membuka jaringan ke seluruh Indonesia untuk penerapan kode akses tiga digit untuk panggilan SLJJ kabel tidak bergerak dan nirkabel tidak bergerak 01X bagi Indosat dan operator berlisensi lainnya mulai tanggal 27 September 2011. Hingga saat ini tidak ada operator telekomunikasi lain telah mengirimkan permintaan kepada kami untuk menghubungkan jaringannya dan membuka akses SLJJ.

F. Layanan SLI

Kami memperoleh izin penyelenggaraan SLI pada Mei 2004 dan mulai menawarkan layanan SLI bagi pelanggan layanan telepon tidak bergerak dengan menggunakan kode akses "007" pada Juni 2004. Sedangkan kode akses untuk pengguna layanan SLI Indosat adalah "001". Pada Desember 2005, perjanjian interkoneksi dengan Indosat membuat pelanggan Indosat dapat mengakses layanan SLI kami dengan memutar "007" dan pelanggan layanan kami dapat mengakses layanan SLI Indosat dengan memutar "001".

G. Layanan Nirkabel Mobilitas Terbatas

Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.35/2004 tertanggal 11 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas ("Keputusan Menhub No.KM.35/2004"), kemudian diubah dengan Keputusan Menkominfo No.16/PER/M.KOMINFO/06/2011 tertanggal 27 Juni 2011 mengatur bahwa hanya penyelenggara jaringan tetap lokal yang telah memperoleh izin dari Menteri yang dapat menawarkan layanan akses nirkabel mobilitas terbatas (atau nirkabel tidak bergerak). Keputusan Menhub No.KM.35/2004 juga menyatakan bahwa tiap penyelenggara layanan nirkabel mobilitas terbatas harus menyediakan layanan teleponi dasar. Indosat, Bakrie Telecom dan *Mobile*-8 juga memiliki izin penyelenggaraan layanan nirkabel mobilitas terbatas.

H. Seluler

Layanan telepon seluler di wilayah Indonesia dilakukan melalui spektrum frekuensi radio 1,8 GHz, 2,1 GHz dan 900 MHz meskipun saat ini layanan seluler padapita frekuensi 900 MHz hanya dilakukan oleh Indosat yang telah memperoleh izin pada tanggal 31 Agustus 2012 yang lalu. Menkominfo mengatur penggunaan spektrum frekuensi. Telkomsel memperoleh alokasi frekuensi untuk layanan seluler pada pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Berbeda dengan 1,8 GHz, pita frekuensi 2,1 GHz dialokasikan melalui proses seleksi dan diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- Keputusan Menkominfo No.03/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tertanggal 9 Januari 2006 tentang Peluang Usaha untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular Generasi Ketiga dengan Cakupan Nasional;
- Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tertanggal 13 Januari 2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
- Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/1/2006, tertanggal 13 Januari 2006 tentang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;
- Peraturan Menkominfo No.04/PER/M.KOMINFO/1/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Tata Cara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000;
- Peraturan Menkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tertanggal 8 Februari 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler; dan

- Keputusan Menkominfo No.07/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Penetapan Dokumen Lelang Dalam Rangka Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.

I. Interkoneksi

Undang-undang Telekomunikasi secara tegas melarang praktik bisnis monopoli dan tidak adil, dan mewajibkan penyedia jaringan untuk mengizinkan pengguna dalam satu jaringan untuk mengakses pengguna atau layanan di jaringan lainnya dengan membayar biaya interkoneksi yang disepakati oleh tiap operator jaringan. Peraturan Pemerintah No.52/2000 tertanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan pengenaan biaya interkoneksi antara dua operator jaringan atau lebih harus transparan, adil dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Menkominfo menerbitkan Peraturan No.8/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi ("Peraturan Menkominfo No.8/2006"), yang mengatur penerapan skema tarif interkoneksi berbasis biaya bagi seluruh operator layanan dan jaringan telekomunikasi sebagai ganti dari skema pembagian pendapatan. Dengan skema baru tersebut biaya interkoneksi ditentukan oleh operator jaringan panggilan berakhir berdasarkan rumusan tarif pada biaya inkremen jangka panjang (*long run incremental*).

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menkominfo No.8/2006 operator harus memasukkan proposal DPI kepada BRTI yang berisi pengajuan tarif interkoneksi untuk tahun berikutnya. Operator wajib menggunakan metode berbasis biaya dalam menyiapkan proposal DPI, BRTI dan Menkominfo wajib menggunakan metode yang sama dalam mengevaluasi DPI dan menyetujui tarif interkoneksi.

Terkait dengan Peraturan Menkominfo No.8/2006 dan Surat BRTI No.246/BRTI/VIII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007, kami mengajukan proposal DPI pada Oktober 2007, yang meliputi penyesuaian atas penyelenggaraan, konfigurasi, teknis dan layanan yang ditawarkan. Pada Desember 2007, kami dan seluruh operator jaringan menandatangani perjanjian interkoneksi baru yang menggantikan seluruh perjanjian interkoneksi antara kami dan operator jaringan lainnya yang ditandatangani pada Desember 2006.

Pada tanggal 5 Februari 2008, BRTI mengharuskan kami dan operator lainnya untuk mulai menerapkan tarif interkoneksi berbasis biaya. Pada tanggal 11 April 2008, sesuai dengan Keputusan Dirjen Postel No.205/2008, BRTI dan Menkominfo menyetujui DPI dari semua operator untuk menggantikan perjanjian interkoneksi sebelumnya. DPI yang disetujui pada tahun 2008 berlaku hingga 29 Juli 2011, ketika biaya interkoneksi baru diimplementasikan sebagaimana diatur dalam surat BRTI No.227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi 2011. Penetapan ini sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya interkoneksi yang dilakukan di tahun 2010 oleh Kemenkominfo dan disepakati oleh seluruh operator yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama. Hasil perubahan biaya interkoneksi ini berakibat pada turunnya besaran biaya interkoneksi.

Pada tanggal 12 Desember 2011, BRTI menetapkan kebijakan perubahan skema biaya SMS dari basis *sender keeps all* menjadi berbasis biaya yang mengharuskan perubahan terhadap DPI Tahun 2011 yang telah disepakati. Peraturan Menkominfo No.8/2006 mengatur bahwa DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, wajib mendapatkan persetujuan BRTI, yang mengharuskan perubahan terhadap DPI kami dan Telkomsel yang kemudian disetujui BRTI pada tanggal 20 Juni 2012. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perhitungan ulang biaya interkoneksi untuk tahun 2012 tidak dilakukan karena terlebih dahulu perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi biaya interkoneksi tahun 2011.

J. VoIP

Pada Januari tahun 2007, Pemerintah memberlakukan peraturan interkoneksi baru serta sistem kode akses lima digit untuk layanan VoIP berdasarkan Keputusan Menkominfo No.06/P/M.KOMINFO/5/2005. Berdasarkan keputusan ini, kode akses awal untuk VoIP, yang sebelumnya 01X, berubah menjadi 010XY. Pada tanggal 27 April 2011, diterbitkan Peraturan Menkominfo No.14/PER/M.KOMINFO/04/2011, yang menekankan standar kualitas terkait layanan VoIP dan berlaku efektif tiga bulan kemudian, yang mengharuskan kami dan operator lainnya mematuhi peraturan tersebut dalam melayani VoIP.

K. IPTV

Pada tanggal 19 Agustus 2009, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No.30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan IPTV di Indonesia dalam rangka

mengakomodir konvergensi layanan telekomunikasi dengan penyiaran dan transaksi elektronik. Pada Juli 2010 Menkominfo mengganti peraturan ini dengan Peraturan Menkominfo No.11/PER/M.KOMINFO/07/2010 ("Peraturan Menkominfo No.11/2010") yang menjadi dasar hukum untuk pemberian izin dan penyediaan layanan IPTV, termasuk hak dan kewajiban penyedia layanan IPTV, standar teknis, persyaratan kepemilikan asing dan penggunaan penyedia konten dalam negeri.

Peraturan Menkominfo No.11/2010 mengakui bahwa IPTV adalah bentuk konvergensi dari telekomunikasi, penyiaran, multimedia dan transaksi elektronik, dan menyatakan bahwa hanya konsorsium yang terdiri dari setidaknya dua entitas bisnis Indonesia dapat memperoleh izin sebagai penyedia IPTV. Masing-masing anggota konsorsium harus secara bersama-sama setidaknya memiliki satu izin sebagai penyedia jaringan tidak bergerak lokal, penyedia layanan internet dan sebagai penyelenggara layanan penyiaran. Konsorsium hanya dapat menyediakan layanan IPTV pada area cakupan dimana konsorsium memiliki ketiga izin yang disyaratkan. Peraturan Menkominfo No.11/2010 juga mensyaratkan bahwa layanan IPTV disalurkan melalui jaringan kabel.

Kami memperoleh izin IPTV melalui entitas anak kami, PT Indonusa Telemedia, pada tanggal 27 April 2011. Izin tersebut meliputi wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Semarang.

L. Satelit

Bisnis satelit internasional kami sangat diatur keberadaannya. Selain menjadi subjek dari pemberian izin domestik di Indonesia, seperti peraturan penggunaan slot orbit dan frekuensi radio, pengoperasian satelit kami juga menjadi subjek Badan Komunikasi Radio dari Persatuan Telekomunikasi Internasional.

Lebih lanjut, Peraturan Menkominfo No.37/P/M.KOMINFO/12/2006 tertanggal 6 Desember 2006 mengharuskan operator satelit asing memiliki izin hak labuh untuk beroperasi di Indonesia dimana operator satelit asing tersebut harus melakukan koordinasi dengan operator satelit domestik, termasuk Telkom, untuk menjamin tidak ada satelit dan sistem teresterial Indonesia yang terganggu.

M. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi, setiap penyelengara jaringan harus mampu menjamin perlindungan hak-hak konsumen, antara lain terkait dengan kualitas layanan, tarif dan kompensasi. Konsumen yang dirugikan oleh penyelenggaraan yang ceroboh dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada penyedia layanan tersebut. Peraturan perlindungan konsumen telekomunikasi menyediakan standar layanan bagi operator telekomunikasi.

N. KPU

Seluruh penyelenggara telekomunikasi baik penyelenggara jaringan dan/atau jasa terikat oleh peraturan KPU yang mensyaratkan mereka untuk berkontribusi menyediakan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka pemerataan sarana telekomunikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang pada umumnya dilakukan melalui kontribusi secara finansial. Peraturan Menkominfo No.32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tertanggal 1 Oktober 2008 mengenai KPU (diubah dengan Peraturan Menkominfo No.03/2010 tertanggal 1 Februari 2010) (Peraturan Menkominfo No.32/2008) menyebutkan dana KPU yang diterima akan digunakan untuk membiayai layanan teleponi, SMS dan akses internet di wilayah terpencil dan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang tidak ekonomis yang ditentukan sebagai wilayah KPU.

Pembayaran KPU yang disyaratkan dihitung dari persentase pendapatan kotor tidak terkonsolidasi yang dikurangi piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi (misalnya beban biaya piutang tidak tertagih) dan pembayaran yang diterima dari biaya interkoneksi yang dimiliki pihak selain kami dan Telkomsel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7/2009 tertanggal 16 Januari 2009 mengenai Tarif untuk penerimaan negara bukan pajak yang berlaku untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika ("PP NO.7/2009"), tarif KPU yang berlaku adalah 1,25% dari pendapatan kotor.

O. Beban *Regulatory* Telekomunikasi

Pada tanggal 16 Januari 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.7/2009, yang mengatur jenis dari penerimaan negara bukan pajak yang berlaku untuk Menkominfo yang berasal dari berbagai layanan, termasuk telekomunikasi.

Pada tanggal 13 Desember 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.76/2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah No.7/2009. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.76/2010, Telkom tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar biaya atas hak penggunaan yang dihitung berdasarkan stasiun radio yang didirikan di jaringan kami, kecuali stasiun radio yang didirikan di backbone Telkom, terhitung sejak 15 Desember 2010. Akibatnya, biaya atas hak penggunaan

Telkom dihitung berdasarkan lebar pita (*bandwidth*) spektrum frekuensi radio yang Telkom gunakan.

Selain biaya atas hak penggunaan spektrum frekuensi radio, Peraturan Pemerintah No.7/2009 mewajibkan seluruh operator telekomunikasi untuk membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, sebesar 0,5% dari pendapatan kotor *non* konsolidasi yang dapat dikurangi dengan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan pembayaran kewajiban interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak pihak lain.

Berdasarkan Undang-undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("Undang-undang No.28/2009"), pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas menara telekomunikasi. Retribusi ini tidak lebih dari 2% NJOP PBB menara telekomunikasi. Saat ini terdapat sekitar 525 Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang berpotensi mengenakan retribusi terhadap menara telekomunikasi Telkom yang berada dalam wilayah hukumnya. Telkom mengantisipasi jumlah peraturan daerah yang mengenakan biaya ini akan meningkat ke depannya.

P. Menara Telekomunikasi

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama ("Peraturan Menkominfo No.02/2008"). Sesuai Peraturan Menkominfo No.02/2008 tersebut pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan izin dari lembaga pemerintah terkait, sedangkan pemerintah daerah menentukan penempatan dan lokasi pendirian menara telekomunikasi tersebut. Selain itu, penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi dan pemilik menara lainnya harus memberikan izin kepada operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasi mereka, tanpa diskriminasi dengan memperhatikan kemampuan teknis menara.

Oleh karena penyenggaraan menara telekomunikasi terkait dengan beberapa instansi pemerintahan tanggal 30 Maret 2009, diterbitkan peraturan bersama dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18/2009, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2009, Peraturan Menkominfo No.19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3/P/2009 mengenai pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi ("Peraturan Bersama").

Peraturan Bersama itu mengatur bahwa izin pembangunan menara telekomunikasi diberikan oleh Bupati atau Walikota yang mengepalai pemerintahan lokal di Indonesia, dan gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Bersama itu juga memuat standar pembangunan dan mensyaratkan agar menara telekomunikasi dibangun untuk dapat digunakan bersama oleh para penyedia layanan telekomunikasi. Pemilik menara telekomunikasi diizinkan untuk mengenakan biaya tertentu, yang dinegosiasikan dengan merujuk pada biaya terkait dengan biaya investasi dan operasional, pengembalian investasi dan keuntungan. Tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli terkait kepemilikan dan pengelolaan menara telekomunikasi.

PERSAINGAN

Langkah-langkah yang diambil pasca adopsi Undang-undang Telekomunikasi di tahun 2001 mengubah sektor telekomunikasi Indonesia dari duopoli antara Indosat dan Telkom menjadi beberapa penyedia layanan telekomunikasi. Lihat "Peraturan-Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia".

Undang-undang Persaingan

Pemerintah saat ini berkampanye mengenai, liberalisasi persaingan dan transparansi di sektor telekomunikasi, walaupun pemerintah tidak berupaya mencegah para operator untuk memperoleh dan meningkatkan dominasinya di pasar. Pemerintah sebaliknya melarang para operator untuk menyalahgunakan posisi dominannya tersebut. Pada bulan Maret 2004, Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan No.33/2004, yang berisi larangan untuk melakukan penyalahgunaan oleh para penyedia layanan dan jaringan yang memiliki posisi dominan. Sebuah penyedia dinilai memiliki posisi dominan berdasarkan faktor seperti cakupan bisnis, jangkauan wilayah layanan dan apakah salah satu penyelenggara mengendalikan pasar tertentu. Secara khusus, Keputusan No.33/2004 melarang dumping, penetapan harga yang merugikan, subsidi silang, kewajiban menggunakan layanan penyelenggara tertentu (kecuali para pesaing) dan menghambat interkoneksi wajib (termasuk diskriminasi terhadap penyelenggara tertentu).

Persaingan di sektor telekomunikasi, sebagaimana seluruh sektor usaha di Indonesia, diatur secara lebih umum dalam UU No.5/1999 tanggal 5 Maret 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli"). UU Anti Monopoli melarang perjanjian dan kegiatan yang mengarah pada persaingan bisnis tidak sehat, serta penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Sebagaimana

ditetapkan dalam UU Anti Monopoli, KPPU dibentuk dengan fungsi sebagai pengawas anti monopoli di Indonesia yang berwenang untuk menerapkan ketentuan UU Anti Monopoli.

UU Anti Monopoli diterapkan bersama peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No.57/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengenai Merger dan Akuisisi yang dapat Mengarah pada Praktik-praktik Monopoli atau Praktik Bisnis yang Tidak Sehat. Peraturan Pemerintah No.57/2010 membolehkan konsultasi secara sukarela dengan KPPU sebelum dilakukannya sebuah aksi merger atau akuisisi, yang mengakibatkan KPPU mengeluarkan pendapat yang tidak mengikat. Peraturan Pemerintah No.57/2010 juga mewajibkan penyerahan laporan kepada KPPU setelah sebuah *merger* atau akuisisi diselesaikan jika transaksi melebihi batas nilai aset atau penjualan.

A. Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak, Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak dan SLJJ

Hak eksklusif Telkom untuk menyediakan layanan sambungan kabel tidak bergerak untuk jangkauan domestik di Indonesia berakhir setelah diterapkannya UU Telekomunikasi pada tahun 2000. Menteri Perhubungan menerbitkan lisensi kepada Indosat untuk melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak untuk jangkauan domestik pada bulan Agustus 2002 dan untuk SLJJ pada bulan Mei 2004. Telkom membuat kesepakatan interkoneksi dengan Indosat pada tanggal 23 September 2005 yang memungkinkan interkoneksi antara layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak di Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Balikpapan, Denpasar dan wilayah tertentu lainnya. Pada 2006, Indosat dapat melayani SLJJ ke seluruh penjuru Tanah Air melalui jaringan nirkabel tidak bergerak berbasis CDMA, jaringan telepon tidak bergerak dan kesepakatan interkoneksi dengan Telkom.

Dalam upaya meliberalisasi SLJJ, Pemerintah mewajibkan tiap penyedia SLJJ untuk menerapkan kode akses tiga digit yang dapat diputar oleh pelanggan yang melakukan panggilan SLJJ. Peraturan ini pertama kali diterapkan di Balikpapan pada tahun 2008, di mana penduduk Balikpapan diberi pilihan untuk melakukan panggilan SLJJ secara normal atau untuk memilih kode akses tiga digit yang diberikan kepada Indosat atau kepada Telkom. Dengan peraturan yang berlaku saat ini, sistem ini akan diterapkan secara nasional mulai tanggal 27 September 2011. Lihat "Peraturan - Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia".

Indosat tetap merupakan pesaing terbesar Telkom dalam melayani sambungan telepon tidak bergerak kabel dan SLJJ. Telkom juga bersaing dengan penyedia layanan sambungan telepon tidak bergerak kabel lain seperti PT Bakrie Telecom, Tbk (sebelumnya Ratelindo) dan PT Batam Bintan Telecom. Persaingan pada layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak sudah sejak lama kami hadapi dan akan terus bertambah yaitu dengan adanya persaingan dari layanan seluler, terutama dengan adanya penurunan tarif seluler dan persaingan dari layanan alternatif lainnya seperti layanan sambungan telepon nirkabel tidak bergerak, SMS, VoIP dan email.

Telkom Flexi, layanan sambungan telepon nirkabel tidak bergerak kami adalah jaringan akses nirkabel terbesar di Indonesia dengan cakupan 370 kota dan menawarkan mobilitas terbatas dan menawarkan pelanggan dengan dasar tarif PSTN yang secara umum lebih rendah dari tarif seluler. Sebagai perbandingan Indosat meluncurkan layanan CDMA dengan nama "StarOne" di Surabaya dan Jakarta pada tahun 2004. Bakrie Telecom menawarkan layanan sambungan telepon nirkabel tidak bergerak di lebih dari 30 kota dan Mobile-8 diberikan lisensi sambungan telepon nirkabel tidak bergerak secara nasional pada tahun 2009. Secara umum, teknologi yang digunakan oleh CDMA dan operator sambungan telepon nirkabel tidak bergerak adalah teknologi yang lebih murah dan membuat operator dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dibanding operator GSM. Selain itu, biaya pengguna frekuensi untuk sambungan telepon nirkabel tidak bergerak untuk lisensi stasiun radio lebih rendah dari seluler.

B. Seluler

Kami mengoperasikan bisnis layanan seluler melalui entitas anak, Telkomsel dengan kepemilikan saham mayoritas. Sejak tanggal 31 Desember 2012, pasar seluler Indonesia didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan XL Axiata, yang secara gabungan menguasai 83,1% dari pasar seluler bergerak. Para penyedia layanan lainnya adalah Hutchinson, Natrindo, Smart Telecom dan Bakrie Telecom.

Sampai dengan 31 Desember 2012, terdapat 276,0 juta pelanggan seluler bergerak di Indonesia, meningkat sebesar 10,7% dari sekitar 249,4 juta yang tercatat pada 31 Desember 2011. Penetrasi seluler di Indonesia mencapai sekitar 110% sampai dengan 31 Desember 2012.

Kami percaya bahwa Telkomsel dapat bersaing secara efektif di pasar seluler Indonesia dari sisi

harga, jangkauan, kualitas layanan, dan layanan bernilai tambah. Sejak tanggal 31 Desember 2012, Telkomsel tetap menjadi penyedia layanan seluler terbesar di Indonesia, yang melayani sekitar 125,1 juta pelanggan dan menguasai pangsa pasar 45,3% dari pasar seluler bergerak. Di urutan kedua dan ketiga, terdapat Indosat dan XL Axiata, dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 21,2% dan 16,6%, berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan yang dilayani per 31 Desember 2012. Selain operator GSM yang beroperasi secara nasional, sejumlah penyelenggara GSM dengan cakupan wilayah lebih kecil, layanan analog dan telepon nirkabel tidak bergerak, juga beroperasi di Indonesia.

Hutchison dan Natrindo juga menyediakan layanan seluler di Indonesia dan pada tahun 2012 telah mendapatkan tambahan 10 MHz dari spektrum frekuensi berlisensi 3G (2,1 GHz). Spektrum tambahan ini menaikkan spektrum frekuensi menjadi masing-masing 20 MHz dan 25 MHz. Sesuai dengan pengumuman Menkominfo No.19/PIH/KOMINFO/2/2013 tanggal 25 Februari 2013, Telkomsel terpilih sebagai salah satu perusahaan yang akan diberikan lisensi 3G tambahan frekuensi radio dalam *bandwidth* 2,1 GHz.

C. SLI

Telkom memperoleh lisensi SLI komersial pada bulan Mei 2004 dan pada bulan Juni 2004 Perusahaan mulai melayani SLI secara penuh bagi pelanggan telepon kabel tidak bergerak. Telkom memperoleh lisensi tersebut setelah penghapusan hak eksklusif Indosat atas pengoperasian layanan SLI pada bulan Agustus 2001 oleh Ditjen Postel.

Telkom melakukan persiapan menyeluruh untuk dapat menawarkan layanan SLI sebelum diperolehnya lisensi itu pada tahun 2004. Persiapan awal Telkom termasuk meningkatkan fasilitas *switching* untuk membangun kemampuan *International Gateway* di Batam, Jakarta dan Surabaya. Dua penghubung *microwave*, yang menghubungkan Batam-Singapura dan Batam-Pangerang (Malaysia), dibangun untuk memfasilitasi koneksi dengan operator luar negeri. Pada tahun 2003, bersama dengan Singtel Mobile dan CAT, Telkom membangun sistem kabel bawah laut TIS untuk menghubungkan Batam, Singapura dan Thailand. Telkom menyelesaikan pengembangan kabel optik bawah laut untuk menghubungkan Dumai (Indonesia) dengan Melaka (Malaysia) pada bulan Desember 2004, merujuk pada perjanjian dengan Telekom Malaysia Berhad. Kabel internasional Telkom diperpanjang dengan membeli kapasitas *bandwidth* untuk menghubungkan Hong Kong, Amerika Serikat dan negara lainnya. Pada bulan Desember 2004, Telkom menyelesaikan bagian dasar untuk menghubungkan dengan *Satellite* Intelsat. Jaringan Batam Singapore *Cable System* mulai beroperasi pada bulan Mei 2009, sementara jaringan Asia Amerika Gateway mulai beroperasi pada bulan Oktober 2009. Pada tanggal 25 Januari 2008, Telkom mengalihkan kegiatan operasi internasionalnya, termasuk SLI, kepada entitas anak, Telin.

Telkomsel merupakan basis pelanggan konsumen terbesar dalam layanan SLI. SLI menghadapi persaingan terutama dengan semakin berkembangnya layanan *broadband* sehingga kualitas layanan *voice* berbasis internet seperti misalnya *Skype* dan *Google Talk* menjadi semakin baik.

D. VoIP

Kami secara resmi meluncurkan layanan VoIP pada bulan September 2002. VoIP menggunakan komunikasi data untuk mengalihkan trafik suara ke internet, yang umumnya menawarkan penghematan biaya yang sangat besar kepada pelanggan. Sejumlah perusahaan, antara lain: XL Axiata, Indosat, Atlasat Solusindo Pte. Ltd., PT Gaharu Sejahtera, PT Satria Widya Prima, PT Primedia Armoekadata Internet dan PT Jasnita Telekomindo juga menyediakan layanan VoIP berlisensi di Indonesia. Operator lain yang tidak berlisensi juga melayani VoIP yang dapat diakses melalui situs atau melalui piranti lunak yang memungkinkan komunikasi suara melalui internet dengan menggunakan komputer atau *smartphone*.

Operator VoIP bersaing terutama berdasarkan harga dan kualitas layanan. Operator VoIP, termasuk Telkom, telah mulai menawarkan *budget call* dan produk lainnya yang ditujukan bagi pengguna yang sensitif terhadap harga seperti kartu panggil prabayar, yang diharapkan dapat menghasilkan persaingan lebih besar di antara operator VoIP dan penyedia layanan SLI. Saat ini Telkom menawarkan layanan utama VoIP Telkom Global-01017 dan Telkom Save sebagai alternatif yang lebih rendah-biaya. Telkom Save menawarkan potongan harga untuk negara-negara tertentu yang memiliki trafik terbesar untuk panggilan dari Indonesia, sedangkan untuk negara-negara lain kami menawarkan tarif VoIP reguler.

E. Satelit

Kawasan Asia-Pasifik, khususnya wilayah Asia Tenggara, masih membutuhkan satelit sebagai infrastruktur telekomunikasi maupun infrastruktur penyiaran (*broadcasting*). Kebutuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Tingginya permintaan pasar untuk trunking GSM;
- Masih bertumbuhnya pasar televisi DTH; dan
- Satelit sebagai solusi pemulihan pada saat bencana alam (*disaster recovery*).

Pada saat yang sama, banyaknya operator regional maupun global yang mengarahkan operasi layanan satelitnya untuk kawasan Asia Tenggara menyebabkan persaingan bisnis satelit di kawasan ini terus meningkat, baik dalam hal jangkauan, produk maupun harga. Asia Tenggara merupakan pasar yang paling terfragmentasi bagi operator satelit di dunia, dengan jumlah pemain sekitar 17 (tujuh belas) operator global maupun regional, yaitu:

1. SES Global (Luxembourg)
2. Eutelsat Asia (France)
3. APT Satellite (Hong Kong)
4. AsiaSat (Hong Kong)
5. JSAT (Japan)
6. MEASAT (Malaysia)
7. MCI – Media Citra Indostar (Indonesia)
8. Indosat (Indonesia)
9. VinaSat (Vietnam)
10. SingTel/Optus (Singapore)
11. Telkom (Indonesia)
12. ChinaSat (China)
13. Mabuhay (Philippines)
14. Thaicom (Thailand)
15. ABS (Hong Kong)
16. ProtoStar (Singapore)
17. Lippo Star (Indonesia)

Operator satelit global dengan kapasitas yang lebih besar umumnya dapat memanfaatkan kelebihan skala ekonomi operasionalnya untuk menawarkan harga yang lebih murah tanpa mempengaruhi kinerja keuangan operator tersebut. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya subsidi pasar premium di tengah pasar yang sangat kompetitif.

Industri satelit di Indonesia merupakan salah satu industri dengan tingkat persaingan yang paling tinggi di wilayah Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari bergesernya struktur pasar sejak tahun 2003 dari monopoli menjadi oligopoli. Salah satu penyebab terjadinya pergeseran struktur ini adalah karena Pemerintah Indonesia tidak mengatur secara ketat industri satelit di Indonesia. Sekalipun Peraturan Menteri No.37/P/M.KOMINFO/12/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Menkominfo telah memberikan *entry barrier* bagi operator satelit asing, namun kebijakan "*open-sky*" yang berlaku, pada kenyataannya meningkatkan persaingan antara operator satelit Indonesia dengan operator satelit asing. Penyebab lainnya dari pergeseran struktur pasar adalah keterbatasan kapasitas operator satelit domestik, termasuk Telkom, yang tidak dapat mengambil keuntungan dari pertumbuhan permintaan pasar yang pesat di Indonesia.

Penyelenggaraan layanan satelit kami pada intinya terdiri dari penyewaan transponder satelit kepada penyiar (*broadcaster*) dan operator penyedia layanan VSAT, seluler dan SLI, dan ISP serta menyediakan jasa *up linking* dan *down linking* stasiun bumi satelit kepada pengguna domestik dan internasional. Kami menghadapi persaingan dari penyedia jasa asing dan domestik dan bersaing ketat di Indonesia dengan Indosat dan Pasifik Satelit Nusantara ("PSN"). Satelit yang dioperasikan swasta dan melayani pasar penyiaran di wilayah yang dijangkau satelit Telkom-1 dan Telkom-2 termasuk AsiaSat-2, AsiaSat-4, AsiaSat-3S, Apstar-2R, Apstar-5, Apstar-6, ThaiCom 3, Measat-2, Measat-3, Measat-3a, PanAmSat-4 dan PanAmSat-7. Pesaing kami di wilayah Asia meliputi Measat Sdn. Bhd, penyelenggara satelit Measat, APT Satellite penyelenggara satelit Apstar dan Shin Satellite PCL, dan penyelenggara satelit ThaiCom.

Selain itu, dengan bertambahnya popularitas televisi DTH, terdapat peningkatan persaingan dalam bisnis satelit karena bertambahnya penyelenggaraan satelit regional baru yang lebih kuat. DTH adalah penerimaan program-program satelit dengan pilihan tersendiri di setiap rumah. Penyiar nasional mengikuti tren ini dan mulai berusaha mendapatkan lisensi DTH jasa penyiaran nasional di Indonesia. Televisi DTH akan membuat penyiar dapat menyalurkan program mereka tanpa mempergunakan jaringan telekomunikasi Telkom, dengan demikian seluruhnya melewati jaringan komunikasi Telkom. Dengan bertambahnya popularitas DTH, Telkom menghadapi kemungkinan berkurangnya jumlah pelanggan karena DTH mempergunakan *platform* satelit yang tidak disediakan oleh Perusahaan.

F. BTS

Sampai dengan 31 Desember 2012, kami mengoperasikan 60.011 BTS di seluruh Indonesia. Melalui entitas anak, Mitratel. Telkom menyewakan ruang kepada operator lain untuk menempatkan peralatan telekomunikasinya pada menara-menara tersebut, yang tentunya akan memberikan pendapatan sewa. Pesaing utama Telkom dalam bisnis ini adalah XL Axiata, Indosat, Bakrie Telecom dan PT Tower Bersama.

G. Lain-lain

Deregulasi di sektor telekomunikasi Indonesia telah membuka peluang persaingan yang berkenaan dengan bisnis multimedia, internet, dan layanan

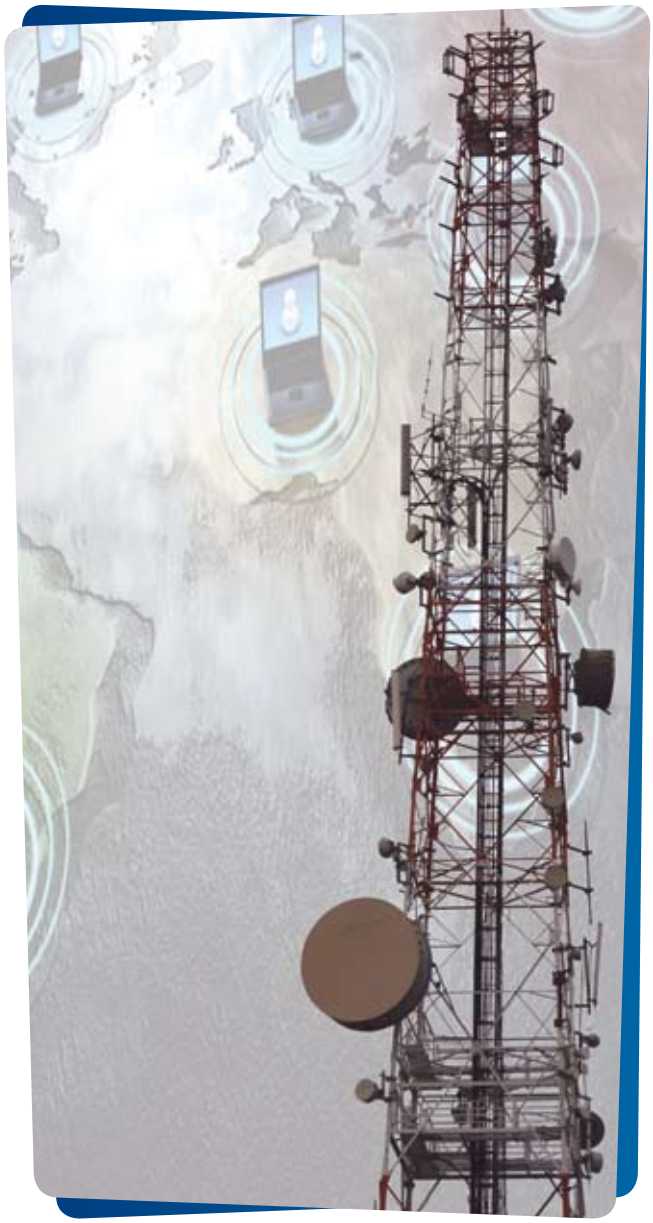

yang terkait dengan komunikasi data. Ragam bisnis ini mencapai momentumnya saat ini sehingga memunculkan persaingan yang sangat ketat, khususnya dalam hal harga, rentang layanan yang disediakan, kualitas maupun jangkauan jaringan, serta kualitas layanan kepada pelanggan.

PERIZINAN

Dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi secara nasional, Telkom memiliki sejumlah izin atas beberapa produk dan layanannya sesuai dengan Undang-undang, peraturan atau keputusan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2010 ("Peraturan Menkominfo No.01/2010") tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Ketentuan Jaringan Telekomunikasi, Telkom diwajibkan untuk menyesuaikan lisensi yang dimilikinya agar dapat menyediakan layanan telekomunikasi. Kami telah memiliki beberapa lisensi baru yang telah disesuaikan sesuai ketentuan yang baru, sebagai berikut:

A. Jaringan Tetap dan Layanan Jasa Teleponi Dasar

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Telkom mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jaringan tetap, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Menkominfo No.01/2010, Telkom telah mendapatkan penyesuaian izin di tahun 2010 untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal, SLJJ, SLI dan jaringan tetap tertutup, sebagai berikut:

- Keputusan Menkominfo No.381/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
- Keputusan Menkominfo No.382/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
- Keputusan Menkominfo No.383/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Telepon Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk; dan
- Keputusan Menkominfo No.398/KEP/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 28 November 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menkominfo No.381, 382 dan 383 di atas, izin penyelenggaraan jaringan tetap dan jasa teleponi dasar yang sebelumnya dimiliki Telkom berdasarkan Keputusan Menhub No.KP.162/2004 tanggal 13 Mei 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Masing-masing izin tersebut di atas tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun sekali.

B. Seluler

Telkomsel mempunyai izin untuk melaksanakan layanan telepon seluler GSM secara nasional dengan menggunakan radio selebar 7,5 MHz pada pita frekuensi 900 MHz dan selebar 22,5 MHz pada pita frekeunsi 1800 MHz. Telkomsel juga memiliki izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengembangkan layanan seluler dengan jangkauan nasional, termasuk memperluas kapasitas jaringannya. Sebagai tambahan, Telkomsel juga

memiliki izin dan lisensi serta registrasi pada pemerintah daerah tertentu dan/atau instansi pemerintah, terutama terkait dengan operasinya di wilayah bersangkutan, properti yang dimiliki dan/atau pembangunan dan penggunaan fasilitas BTS.

Pada bulan Februari 2006, Pemerintah melaksanakan tender untuk tiga izin penggunaan spektrum frekuensi radio 2,1 GHz, masing-masing selebar 5 MHz, yang akan digunakan bersama izin baru untuk pengoperasian jaringan telekomunikasi seluler 3G tingkat nasional. Salah satu izin 3G ini diberikan kepada Telkomsel. Telkomsel mendapatkan izin 3G pada pita frekuensi 2,1 GHz tersebut untuk periode 10 tahun berdasarkan Keputusan Menkominfo No.19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tanggal 14 Februari 2006. Izin tersebut dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi oleh Menkominfo. Telkomsel mulai menyediakan layanan 3G secara komersial sejak bulan September 2006.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No.101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006, lisensi Telkomsel diperbaharui untuk menyediakan hak: (i) layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 900 MHz dan 1800 MHz; (ii) layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio di 2,1 GHz (3G); dan (iii) layanan telekomunikasi dasar. Izin ini tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

C. SLI

Kami memulai layanan sambungan internasional sejak tahun 2004. Lisensi operasi jaringan tetap dari layanan sambungan internasional mengalami penyesuaian pada tahun 2010 untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menkominfo No.01/2010 dengan penerbitan Keputusan Menkominfo No.383/2010. Lisensi tersebut tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, tetapi akan dievaluasi pada tahun 2015.

Kami juga memiliki lisensi untuk mengoperasikan jaringan tetap tertutup berdasarkan Keputusan Menkominfo No.398/KEP/M.KOMINFO/11/2010 yang menyesuaikan lisensi sebelumnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menkominfo No.01/2010. Lisensi ini memungkinkan Telkom untuk menyewakan jaringan tetap tertutup yang terpasang kepada operator jaringan dan layanan telekomunikasi lainnya, termasuk menyediakan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL langsung ke Indonesia untuk operator telekomunikasi luar negeri.

Menurut Keputusan Menkominfo No.16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang ketentuan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui SKKL, operator telekomunikasi luar negeri yang akan memberikan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL langsung ke Indonesia diwajibkan untuk membangun kemitraan dengan penyedia layanan jaringan tetap tertutup. Sejalan dengan Keputusan Menkominfo No.16/2005, fasilitas transmisi telekomunikasi internasional yang disediakan melalui SKKL dilayani oleh Telkom dengan mengacu pada hak labuh, yang melekat pada lisensi Telkom untuk mengoperasikan jaringan tetap layanan panggilan internasional. Telkom juga memiliki hak labuh berdasarkan surat hak labuh No.006-OS/DJPT.6/HLS/3/2010 tanggal 2 Maret 2010 dari Menkominfo.

Pada tanggal 2 Maret 2010, Menkominfo mengeluarkan keputusan No.75/KEP/M.KOMINFO/03/2010 yang memberikan lisensi untuk operasi jaringan tetap tertutup kepada Telin, entitas anak kami, yang memungkinkan Telin untuk menyediakan layanan infrastruktur internasional. Secara terpisah, Telin mendapat jaminan hak labuh di Indonesia dari Dirjen Postel untuk memberikan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL.

D. VoIP

Telkom memiliki izin penyelenggaraan jasa ITKP sesuai Keputusan Ditjen Postel No.384/KEP/DJPT/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 29 November 2010 untuk menyediakan layanan VoIP. Izin tersebut di atas tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

Telkomsel juga memiliki izin penyelenggaraan jasa ITKP sesuai Keputusan Dirjen Postel No.226/DIRJEN/2009 untuk menyediakan layanan VoIP. Izin tersebut tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

E. ISP

Telkom memiliki izin untuk menyediakan layanan internet sesuai Keputusan Ditjen Postel No.83/KEP/DJPPI/KOMINFO/4/2011 pada tanggal 7 April 2011. Izin penyelenggaraan ini tidak memiliki batas masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

Telkomsel juga memiliki izin menyelenggarakan layanan multimedia Jasa Akses Internet dengan wilayah penyelengaraan nasional sesuai Keputusan Dirjen Postel No.213/DIRJEN/2010. Izin penyelenggaraan ini tidak memiliki batas masa

berlaku, namun akan dievaluasi setiap satu tahun dan dievaluasi menyeluruh setiap lima tahun.

F. Jasa Interkoneksi Internet

Telkom memiliki izin untuk menyediakan jasa interkoneksi internet sesuai Keputusan Ditjen Postel No.275/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi internet PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Izin penyelenggaraan ini tidak memiliki batas waktu untuk masa berlakunya, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

G. BWA

Pada bulan Juli 2009, Telkom mendapatkan lisensi BWA untuk dua belas zona, yang terdiri dari tujuh zona lisensi 3,3 GHz (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, JABODETABEK dan Banten) dan lima zona berlisensi untuk 2,3 GHz (Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Maluku dan Sulawesi bagian Utara).

Pada bulan Agustus 2009, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No.237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 tentang Penunjukan Pemenang Lelang untuk *Packet Switched* Berbasis Akses Jaringan Tetap Lokal Menggunakan Operator 2.3 GHz Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* Nirkabel. Karena beberapa pemenang tender mengalami kesulitan dalam implementasi menggunakan standar teknologi yang ditetapkan oleh Kemkominfo, Menkominfo lalu menerbitkan Permen No.19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tertanggal 14 September 2011 ("Peraturan Menkominfo No.19/2011"), yang membebaskan operator yang memberikan layanan di frekuensi radio 2,3 GHz untuk tidak wajib menggunakan teknologi khusus seperti disyaratkan untuk frekuensi radio 2,3 GHz, yang diatur dalam Permen No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009 April 24, 2009 ("Peraturan Menkominfo No.22/2009"). Terkait dengan Peraturan Menkominfo No.19/2011, operator yang melayani pada frekuensi radio 2,3 GHz sekarang diizinkan untuk bebas memilih teknologi mereka untuk menyediakan layanan BWA di frekuensi radio 2,3 GHz, yang disesuaikan dengan persyaratan bahwa mereka harus membayar biaya hak penggunaan tahunan pada tahun ketiga hingga kesepuluh dari masa berlaku lisensi perubahan

teknologi dari yang disyaratkan Peraturan Menkominfo No.22/2009. Pada tanggal 9 Januari 2012, Menkominfo mengumumkan rencananya untuk mengadakan tender tambahan untuk frekuensi radio 2,3 GHz di range 2300-2360 MHz untuk layanan BWA dengan menggunakan teknologi netral.

Peraturan Menkominfo No.19/2011 juga mengatur kewajiban komponen tertentu bagi perangkat dan perlengkapan telekomunikasi yang digunakan dalam melayani BWA di frekuensi radio 2,3 GHz. Kewajiban komponen domestik sebelumnya ditetapkan 30% untuk stasiun pelanggan dan 40% untuk *base stations*, dan akan dinaikkan menjadi 50% dalam lima tahun.

Akibat perubahan ke teknologi netral sesuai Peraturan Menkominfo No.19/2011, kami kehilangan dukungan *vendor* bagi teknologi pilihan kami yang berdasarkan teknologi *fixed*. *Vendor* sebaliknya memilih mendukung teknologi BWA bergerak yang dipilih oleh operator lain. Teknologi BWA bergerak bersaing dengan Telkomsel. Karenanya kami mengembalikan 4 IPSFR dari 5 zona yang kami menangkan. Kami mempertahankan IPSFR zona Maluku sehingga kami dapat tetap memenuhi kualifikasi sebagai operator BWA frekuensi 2,3 GHz dan mendapat akses ke jaringan BWA yang dikelola oleh operator lain.

Menjadi operator BWA sejalan dengan transformasi bisnis kami menuju TIMES yang menuntut kami untuk memiliki infrastruktur dengan kemampuan merespons pasar yang semakin kompleks dan permintaan produk dan layanan yang semakin konvergen, baik pada pelanggan *enterprise* atau *wholesale*.

H. Sistem Komunikasi Data ("SISKOMDAT")

Telkom menyelenggarakan layanan SISKOMDAT berdasarkan Keputusan Dirjen PPI No.169/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Masa berlaku izin ini tidak terbatas namun Kemkominfo melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan secara menyeluruh terhadap izin ini.

I. Metode Pembayaran dengan *e-Money*

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.11/11/ PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 Mei 2009 tentang pengoperasian Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ("APMK") dan Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tentang *e-money*, Bank Indonesia telah mengatur kembali definisi dari "Penerbit" dan "Pengakuisisi" dalam kegiatan APMK dan bisnis *e-money*. Bank Indonesia telah mengkonfirmasikan status Telkom sebagai penerbit *e-money* berdasarkan surat Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No.11/13/DASP pada tanggal 25 Mei 2009. Kami menjalankan bisnis *e-money* dengan *brand* "T-Cash" dan "Flexi Cash".

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.9/9/DASP tanggal 19 Januari 2007, Telkomsel juga telah mendapat persetujuan menyelenggarakan kegiatan APMK dengan menerbitkan kartu prabayar Telkomsel Tunai.

J. Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

Berdasarkan tanda izin dari Bank Indonesia No.11/23/Bd/8 tertanggal 5 Agustus 2009 dan No.12/48/DASP/13, Telkom dan Telkomsel telah mendapatkan izin sebagai penyedia layanan transfer uang. Telkom menyediakan jasa transfer uang yang disebut Delima.

K. IPTV

Pada tangga 27 April 2011, kami dan TelkomVision memperoleh persetujuan penyelenggaraan layanan IPTV melalui Keputusan Menkominfo No.160/KEP/M.KOMINFO/04/2011 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV Komsorsium Telkom dan Telkom Vision. Layanan IPTV kami diberikan di lima lokasi yaitu Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya dan Bali dengan merek dagang Groovia TV.

L. Ijin Usaha Jasa Konstruksi ("IUJK")

Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 6 Juni 2012 telah menerbitkan IUJK untuk Telkom dengan No.1-3273-858971-2-001772. IUJK ini berlaku untuk melakukan usaha jasa pelaksanaan konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan bidang pekerjaan meliputi: arsitektur, sipil, mekanikal dan elektrikal. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2015.

MEREK, HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI DAN PATEN

Telkom senantiasa melahirkan inovasi baru dalam layanan dan produk sejalan dengan dinamika portofolio bisnis Perusahaan. Untuk melindungi sekaligus memberikan penghargaan terhadap kreativitas tersebut, Telkom telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan ìntelektual yang terdiri dari merek, hak cipta, desain industri dan paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("Ditjen HKI"), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak kekayaan intelektual yang didaftarkan Telkom meliputi: (i) merek dagang atas produk dan layanan, serta logo dan nama Perusahaan; (ii) hak cipta atas logo nama Perusahaan, logo produk dan layanan Perusahaan, program-program komputer, karya tulis dan lagu; dan (iii) paten sederhana dan paten biasa atas penemuan-penemuan di bidang teknologi berupa produk, sistem dan metode di bidang telekomunikasì.

Pada tahun 2012, tidak ada merek dagang baru yang didaftarkan.

Berikut ini daftar hak cipta yang telah terdaftar untuk periode tahun 2012:

No	Judul Ciptaan	No.Permohonan	Tanggal Permohonan	Tanggal Terdaftar
1	Program Komputer "AGENCY (*Advance Guideline tool for Engineering of Central Frequency)*"	C00201003559	1 Oktober 2010	18 Januari 2012
2	Program Komputer "Aplikasi *Advertising Management System* ("AMS")"	C00201004516	23 Desember 2010	3 Februari 2012
3	Program Komputer "Flexi *Games*"	C00201004515	23 Desember 2010	3 Februari 2012
4	Program Komputer "Flexi Komik"	C00201004517	23 Desember 2010	3 Februari 2012
5	Program Komputer "Aplikasi Pembelajaran Bahasa untuk Tuna Rungu: I-CHAT"	C00201003117	24 Agustus 2010	1 Februari 2012

Berikut daftar hak kekayaan intelektual yang sudah diajukan pendaftarannya pada periode tahun 2011 – 2012:

No	Nama Paten	Tipe Hak Kekayaan Intelektual	No.Permohonan	Tanggal Permohonan	Tanggal Terdaftar
1	Label Kartu Telepon Umum *Wireless* (tanpa kabel) - Telkom Sobat	Desain Industri	A00200802007	8 Juli 2008	21 September 2011
2	Flexi *Market*	Hak Cipta	C00201103620	22 September 2011	-
3	*Session Initiation Protocol Client*	Hak Cipta	C00201104855	20 Desember 2011	-
4	*City Info* H! Bandung	Hak Cipta	C00201104854	20 Desember 2011	-
5	*Location Based Social Networking*	Hak Cipta	C00201104856	20 Desember 2011	-
6	Perangkat dan Metode *Emergency Broadband Acces Network* ("EBAN")	Paten	P00201200068	6 Februari 2012	-

Daftar Istilah

3G
Istilah umum untuk teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga. 3G menawarkan koneksi berkecepatan tinggi bagi telepon seluler dan perangkat komunikasi bergerak lainnya, sehingga memungkinkan jalannya aplikasi *video conference* dan aplikasi lainnya yang membutuhkan konektivitas *broadband* ke jaringan internet.

3,5G
Pengelompokan teknologi data dan telepon bergerak yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai performa yang lebih baik daripada sistem 3G, yang merupakan langkah menuju peluncuran kapasitas 4G.

ADS
American Depository Share (atau juga disebut dengan *American Depositary Receipt* atau "ADR"), yaitu sertifikat yang diperdagangkan di pasar surat berharga AS (seperti Bursa Saham New York) yang mewakili sejumlah saham asing. Satu sertifikat ADS mewakili 40 saham Seri B kami.

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line adalah bentuk teknologi jalur pelanggan digital, yang merupakan sebuah teknologi komunikasi data yang memungkinkan pengiriman data yang cepat dengan menggunakan kabel telepon tembaga daripada dengan kabel modem telepon konvensional.

APMK
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran dalam bentuk kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* ("ATM") dan/atau kartu debet.

ARPU
Average Revenue per User adalah ukuran yang digunakan terutama oleh Perusahaan telekomunikasi dan jaringan, yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan dari rata-rata pengguna layanan. Istilah ini diartikan sebagai total pendapatan yang dibagi oleh jumlah pelanggan atau pengguna yang menggunakan layanan itu.

Backbone
Jaringan telekomunikasi utama yang terdiri dari fasilitas transmisi dan *switching* yang menghubungkan beberapa *node* akses jaringan. Jaringan transmisi antara fasilitas *node* dan *switching* termasuk gelombang mikro, kabel bawah laut, satelit, serat optik dan teknologi transmisi lainnya.

Bandwidth
Kapasitas hubungan komunikasi.

Bapepam-LK
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, merupakan pendahulu OJK

Broadband
Pengiriman sinyal telekomunikasi yang termasuk atau menangani jangkauan (pita) frekuensi yang relatif lebar.

BSC
Base Station Controller yang merupakan perangkat yang bertanggung jawab untuk alokasi sumber daya radio ke stasiun bergerak, pengaturan frekuensi dan pengalihan antara BTS yang dikendalikan oleh BSC.

BSS
Base Station Subsystem yaitu bagian dari jaringan telepon seluler yang bertanggung jawab untuk menangani trafik dan sinyal antara telepon bergerak dan subsistem *switching* jaringan. BSS terdiri dari dua komponen: BTS dan BSC.

BTS
Base Transceiver Station yang merupakan perangkat untuk mengirim dan menerima sinyal telepon radio ke dan dari sistem telekomunikasi lain.

BUMN
Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan milik Pemerintah, perusahaan milik negara, entitas milik negara, perusahaan negara, perusahaan milik publik, atau parastatal yang merupakan badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama Pemerintah sebagai pemiliknya.

BWA
Broadband Wireless Access adalah sebuah teknologi yang melayani akses internet nirkabel atau akses jaringan komputer berkecepatan tinggi di area yang luas.

CDMA
Code Division Multiple Access adalah suatu teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan ke beberapa frekuensi dan suatu kode tertentu diberikan untuk setiap pengiriman data atau suara, yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi spektrum frekuensi yang sama.

CPE
Customer Premises Equipment merupakan perangkat *handset*, penerima, *set-top box* atau perangkat lain yang digunakan oleh pelanggan layanan telekomunikasi nirkabel, tetap maupun berbasis *broadband*, yang merupakan milik dari operator jaringan tertentu dan diletakkan pada lokasi pelanggan.

DCS
Digital Communication System yang merupakan sistem selular bergerak dengan menggunakan teknologi GSM yang beroperasi di pita frekuensi 1800 MHz.

Dial-Up
Akses internet dengan menggunakan saluran telepon tetap atau telepon bergerak.

Downlink
Frekuensi sinyal radio frekuensi yang dipancarkan oleh satelit ke stasiun bumi.

DPI
Dokumen Penawaran Interkoneksi adalah sebuah regulasi mencakup semua fasilitas, termasuk tarif interkoneksi, fasilitas teknis dan masalah administrasi yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan operator telekomunikasi kepada operator lainnya untuk akses interkoneksi.

DSL
Digital Subscriber Line adalah teknologi yang menyediakan kombinasi pelayanan mencakup *voice*, data dan penyiaran video satu arah yang dikirimkan melalui distribusi *exsisting copper feeder* dan saluran pelanggan.

DTH
Penyiaran satelit *Direct-to-Home* adalah pendistribusian sinyal televisi yang berasal dari satelit stasiun bumi berkekuatan tinggi ke antena kecil dan alat penerima satelit yang terpasang di rumah-rumah di seluruh wilayah satu negara.

Dual Band
Kemampuan jaringan seluler bergerak dan telepon genggam seluler bergerak untuk dapat beroperasi di dua frekuensi, seperti frekuensi GSM 900 dan frekuensi GSM 1800.

E-Business
Solusi *electronic business* termasuk layanan pembayaran elektronik, *data center* internet dan solusi aplikasi dan konten. Lihat "*Portofolio Bisnis New Economic Business* ("NEB") dan *Strategic Opportunities*" pada bagian Tinjauan Bisnis.

E-Commerce
Electronic commerce merupakan penjualan dan pembelian produk atau layanan melalui sistem elektronik seperti jaringan internet dan jaringan komputer lainnya.

E-Money
Electronic money adalah uang yang dipertukarkan secara elektronik.

E-Payment
Disebut juga sebagai *electronic funds transfer*, merupakan pertukaran atau pengiriman uang secara elektronik dari satu rekening ke rekening lain, baik dalam satu institusi keuangan yang sama atau beberapa institusi keuangan yang beragam, melalui sistem berbasis komputer.

E1 Link
Unit transmisi *backbone* yang beroperasi melalui dua kumpulan kabel yang terpisah, biasanya pasangan kabel yang dijalin. Kecepatan data E1 *link* adalah 2.048 Mbps (*full duplex*) yang terbagi menjadi 32 *timeslots*.

EBITDA Disesuaikan
Laba usaha sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi. EBITDA disesuaikan dan rasio-rasio terkait lainnya yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini merupakan indikator tambahan atas kinerja dan likuiditas Perusahaan yang merupakan ukuran keuangan yang tidak diatur dalam SAK.

EBS
Enterprise Business Solution merupakan solusi konsultasi bagi pelanggan korporasi yang menjadi bagian solusi TIMES, dan demo simulasi (untuk *e-Payment* dan VPN melalui Jaringan Telepon Tetap, GSM dan Flexi).

EDC
Electronic Data Capture adalah sistem komputer yang dirancang untuk pengumpulan data klinis dalam bentuk elektronik untuk digunakan terutama pada uji coba klinis pada manusia.

EDGE
Enhanced Data rates for GSM Evolution merupakan teknologi telepon bergerak digital yang memungkinkan pengiriman data yang lebih baik sebagai perpanjangan teknologi GSM yang sesuai.

Edutainment
Edukasi dan hiburan (*entertainment*).

EVDO
Evolution Data Optimize merupakan layanan telepon berbasis *broadband* nirkabel berteknologi 3G dan berkecepatan tinggi untuk layanan CDMA.

Fiber Optik
Kabel yang menggunakan serat optik dan teknologi laser di mana pantulan cahaya yang mewakili data dikirim melalui filamen kaca yang tipis.

FTTx
Fiber to the "x" adalah istilah umum untuk arsitektur jaringan *broadband* yang menggunakan serat optik untuk menggantikan seluruh atau sebagian dari *loop* lokal logam biasa yang digunakan untuk telekomunikasi terakhir. Istilah ini berasal dari generalisasi beberapa konfigurasi dari penyebaran serat seperti serat ke rumah, serat ke *node* atau serat ke gedung.

Gateway
Gateway adalah perangkat yang menjembatani jaringan berbasis paket (IP) dan jaringan berbasis sirkuit (PSTN).

Gb
Gigabyte adalah satuan ukuran informasi yang digunakan, misalnya, untuk mengukur memori atau kapasitas penyimpanan pada komputer.

Gbps
Gigabyte per second adalah rata-rata jumlah bits, karakter, atau blok per unit waktu yang bergerak antara perangkat dalam sistem pengiriman data. Biasanya diukur dalam kumpulan bit unit per detik atau *byte* per detik.

GHz
Gigahertz. *Hertz* (yang disimbolkan Hz) adalah satuan ukuran internasional untuk frekuensi yang didefinisikan sebagai jumlah siklus per detik dari sebuah fenomena berkala.

GPON
Gigabyte-Passive Optical Network adalah jenis sistem jaringan optik pasif yang paling banyak digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik dan sinyal ke seluruh pengguna akhir.

GPRS
General Packet Radio Service yang merupakan teknologi *packet switching data* yang memungkinkan informasi untuk dikirim dan diterima di seluruh jaringan bergerak dan hanya menggunakan jaringan tersebut ketika terdapat data yang akan dikirim.

GSM
Global System for Mobile Telecommunication yang merupakan standar Eropa untuk telepon seluler digital.

Homepass
Sambungan dengan akses ke jaringan suara telepon tetap, IPTV dan layanan *broadband*.

HSPA+
Evolved High Speed Packet Access yang merupakan Proyek Kemitraan Generasi Ketiga Seri 7 dengan arsitektur berpusat IP-*centric* yang lebih sederhana untuk jaringan telepon bergerak yang melampaui sebagian besar model perangkat lama. HSPA+ dapat mencapai kecepatan pengiriman data tertinggi hingga 42 Mbit/detik untuk *downlink* dan 22 Mbit/detik untuk *uplink*.

IME
Information, Media dan *Edutainment*.

IMT-2000
International Mobile Telecommunications-2000 adalah spesifikasi yang ditetapkan oleh Persatuan Telekomunikasi Internasional. Layanan aplikasi termasuk telepon nirkabel untuk wilayah yang luas, akses internet bergerak, panggilan video dan TV bergerak, di lingkungan yang serba bergerak.

Intelligent Network
Jaringan telekomunikasi independen di mana fungsi logis telah dipindahkan dari *switch* dan ditempatkan di noda komputer yang disebarkan melalui jaringan tersebut. Ini memungkinkan alat tersebut untuk mengembangkan dan mengendalikan layanan dengan lebih efisien sehingga layanan telepon baru dapat diluncurkan dengan cepat.

Interkoneksi
Hubungan fisik dari sebuah jaringan *carrier* dengan perangkat atau fasilitas yang bukan merupakan bagian dari jaringan itu.

IP
Internet *Protocol* merupakan metode atau protokol melalui mana data dari satu komputer dikirim ke komputer lainnya melalui internet.

IP *Core*
Kelompok data logis yang digunakan untuk membuat *field programmable gate array* atau *application-specific integrated circuit* untuk sebuah produk.

IP DSLAM
Internet *Protocol-Digital Subscriber Line Access Multiplexer* merupakan perangkat jaringan yang ditempatkan dekat lokasi pelanggan yang memungkinkan saluran telepon terhubung secara cepat ke internet dengan cara menghubungkan beberapa saluran telekomunikasi berlangganan digital (DSL) dengan saluran *backbone* internet berkecepatan tinggi yang menggunakan teknik *multiplexing*.

IP VPN
Layanan komunikasi data yang menggunakan IP *Multi Protocol Label Switching* ("MPLS") dan menjadi dasar bagi hubungan satu perangkat ke perangkat lain. Layanan ini terhubung ke sistem keamanan data, L2TP dan IPSec. Kecepatannya tergantung pada kebutuhan pelanggan, mulai dari 64 Kbps hingga 2 Mbps.

IPTV
Internet *Protocol Television* adalah sistem yang memungkinkan layanan televisi disiarkan dengan menggunakan internet *protocol* melalui jaringan *packet-switched* seperti internet, dan bukan melalui jaringan umum, sinyal satelit dan televisi kabel.

ISDN
Integrated Services Digital Network, yaitu sebuah jaringan yang menyediakan konektivitas digital *end-to-end* dan memungkinkan pengiriman suara, data dan video dalam secara bersamaan serta menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi.

ISP
Internet *Service Provider* adalah organisasi yang menyediakan akses internet.

Kapasitas Terminal Lokal
Sekumpulan saluran di terminal lokal tertentu yang terhubung dan dapat dihubungkan dengan *outside plant*.

Kbps
Kilobyte per *second* adalah ukuran kecepatan transmisi sinyal digital yang dinyatakan dalam ribuan *bit* per detik.

Kemenkominfo
Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi yang memiliki wewenang mengeluarkan regulasi telekomunikasi, yang dipindahtangankan dari Deppen pada Februari 2005.

KSO
Kerja Sama Operasi yang merupakan bentuk perjanjian yang mencakup *build, operate* dan *transfer* yang sebelumnya digunakan Telkom, di mana mitra konsorsium menginvestasikan dan mengoperasikan fasilitas milik Telkom di divisi regional. Mitra konsorsium itu dimiliki oleh operator internasional dan perusahaan swasta nasional atau Telkom, pada saat Telkom telah mengakuisisi mitra konsorsium tersebut.

Lambda
Lambda merujuk pada panjang gelombang, terutama dalam ilmu fisika, teknik elektro dan matematika.

LAN
Local Area Network adalah jaringan dengan stasiun yang saling terkoneksi yang memungkinkan pembagian sumber daya jaringan satu sama lain, dan pada umumnya mencakup suatu wilayah yang terbatas (misalnya dalam sebuah gedung).

LTE
Long Term Evolution adalah standar teknologi untuk komunikasi data nirkabel berkecepatan tinggi untuk telepon bergerak dan terminal data.

Manfaat Iuran Pensiun Pasti
Jenis program pensiun yang besaran kontribusi tahunan dari perusahaan telah ditentukan. Rekening pribadi disiapkan bagi para peserta program dan manfaatnya dihitung berdasarkan jumlah yang disetorkan ke dalam rekening tersebut (melalui kontribusi perusahaan dan, jika mungkin, kontribusi karyawan) ditambah dengan pendapatan investasi apapun dalam bentuk uang yang tersimpan di dalam rekening tersebut. Hanya kontribusi perusahaan kepada rekening tersebut yang dijamin, bukan manfaat di masa depannya. Dalam program iuran pasti, manfaat masa depan sangat berfluktuasi berdasarkan pendapatan investasinya.

Manfaat Pensiun Pasti
Jenis program pensiun di mana perusahaan menjanjikan manfaat bulanan tertentu pada saat karyawan pensiun yang ditetapkan sejak awal oleh suatu formula, berdasarkan pada sejarah pendapatan, masa kerja dan usia karyawan, bukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi. Program ini dikatakan "pasti" dalam kaitannya dengan formula untuk menghitung kontribusi perusahaan yang telah diketahui sejak awal.

Mbps
Megabyte per *second* adalah satuan pengukuran pengiriman sinyal digital yang dinyatakan dalam jutaan *bit* per detik.

Metro Ethernet
Jembatan atau hubungan antara lokasi yang terpisah secara geografis, jaringan ini menghubungkan pelanggan LAN di beberapa lokasi yang berbeda.

MHz
Megahertz adalah satuan pengukur frekuensi. Satu MHz setara dengan satu juta siklus per detik.

Mobile Broadband
Istilah pemasaran untuk akses internet nirkabel melalui modem *portable*, telepon bergerak, modem USB nirkabel atau perangkat bergerak lainnya.

MSAN
Multi Service Access Network adalah teknologi jaringan akses serat optik generasi ketiga dan *platform* tunggal yang mampu mendukung akses teknologi dan layanan tradisional, yang banyak digunakan, maupun yang baru, yang mana secara bersamaan menyediakan *gateway* untuk jaringan inti NGN. MSAN memungkinkan kami untuk menyediakan layanan *triple play* yang mendistribusikan akses internet berkecepatan tinggi, layanan paket suara dan layanan IPTV secara bersamaan melalui infrastruktur jaringan yang sama.

Network Access Point
Fasilitas pertukaran jaringan publik di mana beberapa ISP terkoneksi satu sama lain melalui pengaturan *peering*.

NGN
Next Generation Network merupakan istilah umum yang merujuk pada jaringan berbasis paket untuk meyediakan layanan, termasuk jasa telekomunikasi, dan dapat menggunakan beberapa *broadband*, teknologi yang memungkinkan pemindahan kualitas layanan yang mana fungsi layanan tersebut bertindak secara independen dari teknologi pokok pemindahan. NGN dimaksudkan untuk dapat memindahkan beragam jenis layanan (*voice*, data dan berbagai jenis media, seperti video) dengan satu jaringan dengan merangkumnya ke dalam paket-paket, seolah hal ini dioperasikan di internet. NGN umumnya dibangun di sekitar internet *protocol*.

***Node* B**
BTS untuk jaringan 3G W-CDMA/UMTS.

OBCE
Operational, Business, Customer support system and Enterprise relations management adalah bagian dari inisiatif strategis kami.

Off-net
Komunikasi antara dua pelanggan dari operator telekomunikasi yang berbeda.

OJK
Otoritas Jasa Keuangan, pengganti dari Bapepam-LK, merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor industri keuangan *non* bank.

OLO
Other Licensed Operator, merujuk pada operator telekomunikasi lain di luar Telkom.

On-net
Komunikasi antara dua pelanggan dari operator telekomunikasi yang sama.

Outside Plant
Perangkat dan fasilitas yang digunakan untuk menghubungkan lokasi pelanggan dengan terminal telepon lokal.

Panggilan Lokal
Panggilan antara pelanggan di wilayah penomoran yang sama tanpa memerlukan nomor awalan.

PDN
Packet Data Network adalah jaringan komunikasi digital yang memecah kumpulan data yang akan dikirim ke segmen-segmen yang disebut paket, yang kemudian disalurkan sendiri-sendiri.

PKLN
Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang merupakan tim gabungan yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya untuk mempertimbangkan permintaan dari perusahaan BUMN seperti Telkom untuk memperoleh pinjaman komersial dari luar negeri.

POWL
Public Offering Without Listing adalah penawaran publik tanpa harus mendaftarkan sahamnya di bursa.

PSTN
Public Switched Telephone Network yaitu jaringan telepon yang dioperasikan dan dipelihara oleh Telkom dan Unit KSO untuk dan atas nama Telkom

Pulsa
Pulsa adalah satuan perhitungan biaya telepon.

RMJ
Regional Metro Junction adalah layanan instalasi jaringan kabel antara kota di satu wilayah atau provinsi.

Roaming
Istilah umum yang merujuk pada perpanjangan layanan konektivitas di suatu lokasi yang berbeda dengan lokasi rumah di mana layanan itu terdaftar.

RUIM *Card*
Removable User Identity Module, kartu pintar yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam telepon tetap nirkabel yang secara unik mengidentifikasi jaringan pelanggan CDMA dan berisi data pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori untuk menyimpan pesan.

RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham, yang juga dapat berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

Saluran Sewa
Saluran transmisi telekomunikasi yang menghubungkan satu poin yang tidak bergerak dengan titik lainnya, yang disewa dari satu operator untuk keperluan khusus.

Saluran Terpasang
Saluran yang telah selesai dibangun sebagai poin distribusi dan siap untuk dihubungkan kepada pelanggan.

SDP
Service Delivery Platform merujuk pada sejumlah komponen yang menyediakan arsitektur penghantar layanan (seperti penciptaan layanan, kendali sesi dan protokol) untuk sebuah jenis layanan.

SIM *Card*
Subscriber Identity Module yaitu kartu pintar yang dimasukkan ke dalam telepon seluler yang dapat mengidentifikasi jaringan pelanggan GSM dan berisi data pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori untuk menyimpan pesan.

SKKL
Sistem Komunikasi Kabel Laut adalah kabel yang dibentangkan di bawah laut antara stasiun yang dibangun di daratan untuk menghantarkan sinyal telekomunikasi melalui jalan bawah laut.

SLI
Sambungan Langsung Internasional merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin melakukan panggilan internasional tanpa bantuan seorang operator dari terminal telepon manapun.

SLJJ
Sambungan Langsung Jarak Jauh adalah bentuk panggilan jarak jauh untuk pelanggan yang tingal di wilayah yang berbeda namun masih berada di satu negara. Umumnya, masing-masing wilayah memiliki kode telepon area yang berbeda.

SMS
Short Messaging Service atau Layanan Pesan Pendek adalah bentuk teknologi yang memungkinkan pertukaran pesan antara telepon bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak.

SMS Premium
Layanan pengiriman pesan teks melalui telepon, *web*, atau sistem komunikasi bergerak dengan menggunakan protokol komunikasi standar yang memungkinkan pertukaran pesan teks antara perangkat telepon tidak bergerak atau telepon bergerak.

SOA
Sarbanes-Oxley Act, diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2002, juga dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act dan Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act.

Soft Switch
Perangkat sentral di dalam jaringan telepon yang menghubungkan panggilan dari satu saluran telepon ke saluran lainnya, dengan menggunakan *software* yang dijalankan di dalam sistem komputer. Pekerjaan ini sebelumnya dilakukan dengan menggunakan *hardware* melalui papan tombol untuk mengarahkan panggilan.

Spektrum Frekuensi Radio
Spektrum radio adalah bagian spektrum gelombang elektromagnetik terkait dengan frekuensi radio – yaitu, frekuensi yang lebih rendah daripada 300 GHz (atau setara dengan panjang gelombang yang lebih panjang dari sekitar 1 mm).

Stasiun Bumi
Antena dan perangkat terkait yang digunakan untuk menerima atau mengirim sinyal telekomunikasi via satelit.

STM-1
Synchronous Transport Module level 1 yang merupakan standar jaringan transmisi serat optik SDH ITU-T yang kecepatan 155,52 Mbit/detik. Level lainnya adalah STM-4, STM-16 dan STM-64.

Switch
Perangkat elektronik, listrik atau mekanis yang berfungsi membuka atau menutup sirkuit, melengkapi atau menghentikan jalur listrik, atau memilih jalur atau sirkuit, yang digunakan untuk mengarahkan trafik di jaringan telekomunikasi.

Telepon Kabel Tidak Bergerak
Layanan telepon melalui kabel tidak bergerak yang menghubungkan seorang pengguna di suatu lokasi dengan terminal telepon lokal, biasanya dengan menggunakan nomor telepon sendiri.

Telepon Nirkabel Tidak Bergerak
Hubungan transmisi telepon nirkabel lokal dengan menggunakan teknologi selular, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan pengguna di suatu lokasi dengan terminal telepon lokal.

Telepon Tidak Bergerak
Layanan telepon tidak bergerak kabel dan tidak bergerak nirkabel.

Terra Router
Terra router atau terabit *router* pada teorinya memungkinkan kapasitas jaringan pada skala terabits (1 terabit = 1 juta gigabits).

Terminal *Trunk*
Terminal yang berfungsi menghubungkan satu terminal telepon ke terminal telepon lainnya baik itu terminal lokal atau *trunk*.

TIMES
Telecommunication, Information, Media dan Edutainment.

TITO
Trade-In Trade-Off, adalah skema konversi untuk mengganti kabel tembaga dengan kabel optik. Lihat "Pembangunan dan Modernisasi *Broadband Access* dengan Pola TITO" pada bagian Pengembangan Jaringan.

Transponder Satelit
Perangkat penyiaran radio yang dipasang di satelit untuk menerima sinyal dari bumi dan memperkuatnya lalu mengirimnya kembali ke bumi.

TV Berbayar
TV berbayar, TV premium atau saluran premium adalah layanan siaran televisi berlangganan yang disediakan melalui kabel digital dan analog serta satelit dan juga melalui jalur digital serta televisi internet.

UKM
Usaha Kecil Menengah atau *Small and Medium Enterprise* ("SME")

UMTS
Universal Mobile Telephone System yang merupakan sistem telekomunikasi bergerak generasi ke-3 (3G) yang dikembangkan dalam kerangka IMT-2000

USO
Universal Service Obligation yang merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap seluruh operator jasa telekomunikasi dalam rangka penyediaan layanan umum di Indonesia.

VoIP
Voice over Internet *Protocol* yang merupakan cara mengirim informasi suara menggunakan IP.

VPN
Virtual Private Network, yaitu koneksi jaringan *private* yang aman, yang dibangun pada puncak infrastruktur yang mudah diakses publik, misalnya internet atau jaringan telepon umum. VPN umumnya mengombinasikan beberapa enkripsi, sertifikat digital, pengidentifikasian pengguna yang kuat dan kendali akses agar dapat mengamankan trafik. Hal ini memungkinkan konektivitas ke banyak mesin yang berada dibelakang *gateway* atau *firewall*.

VSAT
Very Small Aperture Terminal yang merupakan antena kecil berdiameter 1,5 hingga 3,0 meter, yang ditempatkan dilokasi pengguna dan digunakan untuk komunikasi dua arah melalui satelit.

Wi-*Max*
Worldwide Interoperability for Microwave Access, yang merupakan teknologi telekomunikasi untuk pengiriman data via nirkabel dengan menggunakan berbagai mode pengiriman, mulai dari titik ke titik hingga akses internet *portable*.

Wireless Access Network
Jenis jaringan komputer yang tidak terhubung dengan kabel apapun. Metode ini memungkinkan rumah, jaringan telepon dan instalasi perusahaan menghindari proses pemasangan dan penggunaan kabel yang mahal ke bangunan, atau sebagai penghubung di antara perangkat di berbagai lokasi.

Wireless Broadband
Teknologi yang melayani akses internet nirkabel berkecepatan tinggi atau akses jaringan komputer untuk wilayah yang luas.

Referensi Silang Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No.X.K.6, kami wajib menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan bentuk dan isi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Bagian ini memberikan referensi silang antara Laporan Tahunan dan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut.

Kriteria	Halaman	Bagian dalam Laporan Tahunan
1. Ikhtisar Data Keuangan Penting		
a) Ikhtisar data keuangan penting selama tiga tahun	16	Ikhtisar Keuangan
b) Informasi mengenai saham untuk setiap triwulan dalam dua tahun	20-22	Ikhtisar Saham Biasa dan Obligasi
2. Laporan Dewan Komisaris	30-33	Laporan Dewan Komisaris
3. Laporan Direksi	34-39	Laporan Direksi
4. Profil Perusahaan		
a) Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, email, *website* perusahaan dan/atau kantor cabang/perwakilan	209	Alamat
b) Riwayat singkat perusahaan	192, 2-3	Riwayat Singkat Telkom, Sejarah Panjang Menempa Kami
c) Kegiatan usaha serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan	192, 46-51	Kegiatan Usaha, Portofolio Bisnis
d) Bagan struktur organisasi perusahaan	192-195	Struktur Organisasi Perusahaan
e) Visi dan misi perusahaan	6	Visi dan Misi
f) Profil Dewan Komisaris	200-201	Profil Dewan Komisaris
g) Profil Direksi	202-203	Profil Direksi
h) Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya	78-79, 81-83	Sumber Daya Manusia
i) Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya	204-206	Komposisi Pemegang Saham
j) Skema/diagram pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan	205-206	Komposisi Pemegang Saham
k) Informasi mengenai entitas anak, asosiasi dan ventura bersama	196-198, 210-211	Entitas Anak dan Asosiasi
l) Kronologis pencatatan saham	206-207	Kronologis Pencatatan Saham
m) Kronologis pencatatan efek lainnya dan peringkat efek	207-208	Kronologis Penerbitan Obligasi
n) Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	209	Profesi Penunjang Pasar Modal
o) Informasi mengenai profesi penunjang pasar modal	208-209	Profesi Penunjang Pasar Modal
p) Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan	26-29	Penghargaan dan Sertifikasi
5. Analisis dan Pembahasan Manajemen		
a) Tinjauan operasi per segmen operasi	90-92	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
b) Analisis kinerja keuangan komprehensif dalam dua tahun	93-106	Tinjauan Keuangan
c) Kemampuan membayar utang	108	Kemampuan Membayar Hutang
d) Tingkat kolektibilitas piutang perusahaan	108-109	Kolektibilitas Piutang
e) Struktur permodalan dan kebijakan struktur permodalan	109	Struktur Modal
f) Ikatan yang material untuk investasi barang modal	110	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
g) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	117	Informasi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
h) Prospek usaha dari perusahaan	45	Prospek Usaha Perusahaan
i) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun dengan realisasi	34-39	Laporan Direksi
j) Target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun	34-39	Laporan Direksi
k) Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan	51-52	Penjualan, Pemasaran dan Distribusi
l) Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama dua tahun	208	Kebijakan Dividen
m) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum	N/A	
n) Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan	109-110	Belanja Modal
o) Perubahan peraturan Perundang-undangan	111	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
p) Perubahan kebijakan akuntansi	110-111	Perubahan Kebijakan Akuntansi
6. Tata Kelola Perusahaan		
a) Dewan Komisaris	126-130	Dewan Komisaris
b) Direksi	130-135	Direksi
c) Komite Audit	136-141	Komite Audit
d) Komite di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya	142-151	- Komite Nominasi dan Remunerasi - Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko
e) Sekretaris Perusahaan	151-154	Sekretaris Perusahaan/Investor Relations ("IR")
f) Unit audit internal	154-156	Unit Internal Audit
g) Sistem pengendalian internal	156-158	Sistem Pengendalian Internal
h) Sistem manajemen risiko	158-159	Manajemen Risiko
i) Perkara penting yang dihadapi oleh Perusahaan	159-160	Litigasi dan Perkara Hukum Penting yang sedang dihadapi Perusahaan
j) Sanksi administratif	160	Sanksi Administratif
k) Kode etik dan budaya perusahaan	161-163	Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan
l) Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen	207	Program Kepemilkan Saham Karyawan Telkom
m) Sistem pelaporan pelanggaran	163-165	Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
7. Tanggung jawab sosial Perusahaan dalam aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta tanggung jawab produk	172-189	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
8 Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit	LK 1-129	Laporan Keuangan Konsolidasian
9. Tanda tangan Dewan Komisaris dan Direksi	242	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2012

Surat Pernyataan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang
Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2012
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun 2012 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2013

Dewan Komisaris

Hadiyanto
Komisaris

Jusman Syafii Djamal
Komisaris Utama

Parikesit Suprapto
Komisaris

Johnny Swandi Sjam
Komisaris Independen

Virano Gazi Nasution
Komisaris Independen

Direksi

Arief Yahya
Direktur Utama

Honesti Basyir
Direktur Keuangan

Priyantono Rudito
Direktur Human Capital & General Affairs

Sukardi Silalahi
Direktur Konsumer

Rizkan Chandra
Direktur Network & Solution

Muhammad Awaluddin
Direktur Enterprise & Wholesale

Ririek Adriansyah
Direktur Compliance & Risk Management

Indra Utoyo
Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio

Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk

Laporan Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan tanggal 31 Desember 2011
serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 1 Januari 2011
Perusahaan Perseroan (Persero) P. T. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Entitas Anak

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Arief Yahya
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Bongo No. 1 Turangga Lengkong, Bandung
   Nomor Telepon : (022) 452 7101
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Honesti Basyir
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
   Alamat Domisili sesuai KTP : Komplek Dai-ichi Kav. 26 Antapani, Bandung
   Nomor Telepon : (022) 452 7201
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;

3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2013

Arief Yahya
Direktur Utama

Honesti Basyir
Direktur Keuangan

Kantor Perusahaan
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Jl. Japati No.1, Bandung 40133, Indonesia
T +62 22 452 7110
F +62 22 424 0313
www.telkom.co.id

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
dan Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian beserta laporan auditor independen tanggal 31 Desember 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan angka perbandingan tanggal 31 Desember 2011 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 1 Januari 2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TANGGAL
31 DESEMBER 2012 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2011 SERTA UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DAN TANGGAL 1 JANUARI 2011

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian …….....……..	1-3
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian ……..	4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian…….	5-6
Laporan Arus Kas Konsolidasian ...……..	7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian ……	8-129

ERNST & YOUNG

Purwantono, Suherman & Surja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3302/PSS/2013

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 30 Maret 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sebelum dilakukan penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan pengungkapan pelaporan segmen sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ERNST & YOUNG

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3302/PSS/2013 (lanjutan)

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan mengubah komposisi pelaporan segmen pada tahun 2012, dan informasi komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 terkait pelaporan segmen telah disajikan kembali untuk menyesuaikannya dengan penyajian pelaporan segmen tahun 2012. Prosedur audit kami yang diterapkan atas penyajian kembali pengungkapan pelaporan segmen tahun 2011 mencakup: (i) mencocokkan angka-angka pelaporan segmen yang telah disesuaikan (pendapatan, laba usaha, dan aset) ke catatan pendukung yang diperoleh dari manajemen, dan (ii) menguji keakurasian matematis rekonsiliasi angka-angka pelaporan segmen ke laporan keuangan konsolidasian. Menurut pendapat kami, pengungkapan pelaporan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah disajikan kembali, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, sudah tepat. Namun demikian, kami tidak ditugaskan untuk melakukan audit, reviu, atau prosedur lainnya atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang terkait dengan perubahan pengungkapan pelaporan segmen tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

Purwantono, Suherman & Surja

Drs. Hari Purwantono
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684

28 Februari 2013

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2c,2e,2u, 3,37,44	13.118	9.634	9.120
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2e,2u, 4,37,44	4.338	373	371
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u, 5,29,44			
Pihak berelasi	2c,37	701	406	408
Pihak ketiga		4.522	4.509	3.936
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,44	186	335	89
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	2h,6,16 20,29	579	758	515
Uang muka dan beban dibayar di muka	2c,2i,7,37	3.721	3.294	3.441
Tagihan restitusi pajak	2t,31	436	371	133
Pajak dibayar di muka	2t,31	372	787	716
Aset tersedia untuk dijual	2j,8	-	791	-
Jumlah Aset Lancar		27.973	21.258	18.729
ASET TIDAK LANCAR				
Penyertaan jangka panjang	2f,2u,9,44	275	235	254
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2l,2m,2u,10, 16,19,20,39	77.047	74.897	75.832
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	2s,34	1.032	991	744
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	2c,2i,2l,2n,2u, 11,37,41,44	3.510	3.817	3.095
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,2n,12	1.443	1.789	1.785
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,31	89	67	62
Jumlah Aset Tidak Lancar		83.396	81.796	81.772
JUMLAH ASET		**111.369**	**103.054**	**100.501**

*) Direklasifikasi, lihat catatan 48.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	2o,2r,2u, 13,44			
Pihak berelasi	2c,37	432	427	754
Pihak ketiga		6.848	7.890	6.757
Utang lain-lain	2u,44	176	38	276
Utang pajak	2t,31	1.844	1.039	736
Beban yang masih harus dibayar	2c,2r,2u,14, 27,34,37,44	6.163	4.790	3.409
Pendapatan diterima di muka	2r,15	2.729	2.821	2.681
Uang muka pelanggan dan pemasok	2c,37	257	271	500
Utang bank jangka pendek	2c,2p,2u, 16,37,44	37	100	56
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u 17,37,44	5.621	4.813	5.304
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		24.107	22.189	20.473
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,31	3.059	3.794	4.074
Liabilitas lainnya	2r	334	242	312
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,35	347	287	242
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	2c,2s,36,37	679	888	1.050
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2c,2s,34,37	2.248	1.715	1.280
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2u,17,44			
Utang sewa pembiayaan	2m,10	1.814	314	409
Pinjaman penerusan	2c,2p,18,37	1.791	2.012	2.741
Obligasi dan wesel bayar	2c,2p,19,37	3.229	3.401	3.249
Utang bank	2c,2p,20,37	6.783	7.231	10.256
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		20.284	19.884	23.613
JUMLAH LIABILITAS		**44.391**	**42.073**	**44.086**

*) Direklasifikasi, lihat catatan 48.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B				
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B	1c,22	5.040	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2v,23	1.073	1.073	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	2v,24	(8.067)	(6.323)	(4.264)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	2d,25	478	478	478
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	2f	386	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2u	42	47	50
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2f	271	240	233
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1d,2d	(508)	(485)	(485)
Komponen ekuitas lainnya	1d	49	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	33	15.337	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		37.440	31.717	26.571
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		51.541	47.510	44.419
Kepentingan nonpengendali	2b,21	15.437	13.471	11.996
JUMLAH EKUITAS		**66.978**	**60.981**	**56.415**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**111.369**	**103.054**	**100.501**

*) Direklasifikasi, lihat catatan 48.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2011
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
PENDAPATAN	2c,2r,26,37	77.143	71.253
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2r,28,37	(16.803)	(16.372)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,2r, 10,11,12	(14.456)	(14.863)
Beban karyawan	2c,2r,2s,14,27, 34,35,36,37	(9.786)	(8.555)
Beban interkoneksi	2c,2r,30,37	(4.667)	(3.555)
Beban pemasaran	2r	(3.094)	(3.278)
Beban umum dan administrasi	2c,2g,2h,2r,2t, 5,6,29,37	(3.036)	(2.935)
Rugi selisih kurs - bersih	2q	(189)	(210)
Penghasilan lain-lain	2r,10c	2.559	665
Beban lain-lain	2r,10c	(1.973)	(192)
LABA USAHA		**25.698**	**21.958**
Penghasilan pendanaan	2c,37	596	546
Biaya pendanaan	2c,2r,37	(2.055)	(1.637)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	2f,9	(11)	(10)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**24.228**	**20.857**
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,31		
Pajak kini		(6.628)	(5.673)
Pajak tangguhan		762	286
		(5.866)	(5.387)
LABA TAHUN BERJALAN		**18.362**	**15.470**
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1d,2b,2f	31	7
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u	(5)	4
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain - bersih		26	11
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**18.388**	**15.481**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	2b,21	12.850	10.965
Kepentingan nonpengendali		5.512	4.505
		18.362	15.470
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		12.876	10.976
Kepentingan nonpengendali	2b,21	5.512	4.505
		18.388	15.481
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (dalam jumlah penuh)	2x,32		
Laba bersih per saham		669,19	559,67
Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS)		26.767,60	22.386,80

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2011
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk													
											Saldo laba				
Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	Komponen ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
Saldo, 31 Desember 2011		**5.040**	**1.073**	**(6.323)**	**478**	**386**	**47**	**240**	**(485)**	**-**	**15.337**	**31.717**	**47.510**	**13.471**	**60.981**
Pendirian entitas anak	1d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32
Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1d,2d	-	-	-	-	-	-	-	(23)	-	-	-	(23)	(10)	(33)
Penerbitan saham baru entitas anak	1d	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	49	39	88
Dividen kas	2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.127)	(7.127)	(3.607)	(10.734)
Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan	2v,24	-	-	(1.744)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.744)	-	(1.744)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	1d,2b,2f, 2q,2s,9	-	-	-	-	-	(5)	31	-	-	-	12.850	12.876	5.512	18.388
Saldo, 31 Desember 2012		**5.040**	**1.073**	**(8.067)**	**478**	**386**	**42**	**271**	**(508)**	**49**	**15.337**	**37.440**	**51.541**	**15.437**	**66.978**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2011
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk												
										Saldo laba				
Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
Saldo, 31 Desember 2010		**5.040**	**1.073**	**(4.264)**	**478**	**386**	**50**	**233**	**(485)**	**15.337**	**26.571**	**44.419**	**11.996**	**56.415**
Dividen kas	2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.819)	(5.819)	(3.030)	(8.849)
Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan	2v,24	-	-	(2.059)	-	-	-	-	-	-	-	(2.059)	-	(2.059)
Kerugian dari penyertaan surat berharga	2u	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)	-	(7)
Laba komprehensif tahun berjalan	1d,2b,2f, 2q, 2s,9	-	-	-	-	-	4	7	-	-	10.965	10.976	4.505	15.481
Saldo, 31 Desember 2011		**5.040**	**1.073**	**(6.323)**	**478**	**386**	**47**	**240**	**(485)**	**15.337**	**31.717**	**47.510**	**13.471**	**60.981**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2011
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari:			
Pelanggan		71.910	67.519
Operator lain		3.993	3.586
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan		75.903	71.105
Pendapatan bunga diterima		585	549
Pembayaran kas untuk beban		(33.651)	(25.416)
Pembayaran kas kepada karyawan		(8.162)	(8.509)
Pembayaran pajak penghasilan		(5.586)	(5.359)
Beban bunga dibayar		(1.111)	(1.591)
Pengembalian kas kepada pelanggan		(37)	(226)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		**27.941**	**30.553**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari klaim asuransi	10	1.875	13
Hasil dari penjualan aset tetap	10	360	56
Hasil dari penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual dan dividen yang diterima		53	59
Pembelian aset tetap	10	(8.221)	(13.197)
Penempatan deposito berjangka dan pembelian aset keuangan tersedia untuk dijual	4	(4.008)	(33)
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	11	(487)	(834)
Pembelian aset takberwujud	12	(437)	(603)
Pembelian bisnis	1d	(230)	-
(Penambahan) penurunan uang muka dan aset lainnya	11	(134)	34
Penambahan penyertaan jangka panjang	9	(49)	-
Penambahan kepemilikan pada entitas anak dari kepentingan nonpengendali	1d	(33)	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		**(11.311)**	**(14.505)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Hasil dari utang bank	20	3.936	2.694
Hasil dari utang bank jangka pendek	16	590	316
Hasil dari wesel bayar	19	351	559
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali	1d	120	-
Hasil wesel jangka menengah	19	10	20
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	33	(7.127)	(6.069)
Pembayaran pinjaman penerusan dan utang bank	18,20	(4.259)	(7.334)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(3.607)	(3.033)
Pembayaran untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan	24	(1.744)	(2.059)
Pembayaran utang bank jangka pendek	16	(654)	(272)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	10	(418)	(176)
Pembayaran wesel bayar	19	(403)	(171)
Pembayaran wesel jangka menengah	19	(109)	(14)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		**(13.314)**	**(15.539)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		3.316	509
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		168	5
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	9.634	9.120
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	**13.118**	**9.634**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari *"Post en Telegraafdienst"*, yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 22).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir antara lain tentang perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 30 tanggal 7 Juni 2012. Perubahan tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-34558 tanggal 24 September 2012.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

a. Usaha utama:
   i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
   ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

b. Usaha penunjang:
   i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
   ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain meliputi pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan menerima beberapa izin telekomunikasi dari Pemerintah Indonesia yang berlaku untuk periode yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan telekomunikasi yang berlaku dan melakukan liabilitas sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPI" sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT")). Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran izin, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP") terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jasa teleponi dasar	381/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap lokal dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan jasa teleponi dasar	382/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional dan jasa teleponi dasar	383/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap sambungan internasional dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	398/KEP/ M.KOMINFO/ 11/2010	Jaringan tetap tertutup	12 November 2010
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	384/KEP/DJPT /M.KOMINFO/ 11/2010	ITKP	29 November 2010
Izin penyelenggaraan jasa akses internet (*internet service provider*)	83/KEP/DJPPI /KOMINFO/ 4/2011	*Internet service provider*	7 April 2011
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	169/KEP/DJPPI /KOMINFO/ 6/2011	Jasa Siskomdat	6 Juni 2011
Izin penyelenggaraan Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*	331/KEP/ /M.KOMINFO/ 07/2011	Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*	27 Juli 2011

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary* dan Karyawan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dinyatakan dalam akta notaris No. 33 tanggal 17 Desember 2010 oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris No. 14 tanggal 11 Mei 2012 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Komisaris Utama	Jusman Syafii Djamal	Jusman Syafii Djamal
Komisaris	Parikesit Suprapto	Bobby A.A Nazief
Komisaris	Hadiyanto	Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen	Virano Gazi Nasution	Rudiantara
Komisaris Independen	Johnny Swandi Sjam	Johnny Swandi Sjam
Direktur Utama	Arief Yahya	Rinaldi Firmansyah
Direktur Keuangan	Honesti Basyir	Sudiro Asno
Direktur *Network and Solution*	Rizkan Chandra	Ermady Dahlan
Direktur *Enterprise* dan *Wholesale*	Muhamad Awaluddin	Arief Yahya
Direktur Konsumer	Sukardi Silalahi	I Nyoman Gede Wiryanata
Direktur *Compliance* dan *Risk Management*	Ririek Adriansyah	Prasetio
Direktur *Information Technology Solution&Strategic Portofolio*	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur *Human Capital* dan *General Affairs*	Priyantono Rudito	Faisal Syam

2. Komite Audit dan *Corporate Secretary*

Susunan Komite Audit dan *Corporate Secretary* Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Ketua	Johnny Swandi Sjam	Rudiantara
Sekretaris	Salam	Salam
Anggota	Parikesit Suprapto	Bobby A.A Nazief
Anggota	Agus Yulianto	Agus Yulianto
Anggota	Sahat Pardede	Sahat Pardede
Anggota	Virano Gazi Nasution	Johnny Swandi Sjam
Corporate Secretary	Agus Murdiyatno	Agus Murdiyatno

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary* dan Karyawan (lanjutan)

3. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah 25.683 orang dan 26.023 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, dan RUPST Perusahaan tanggal 20 Juni 2008, dan RUPST Perusahaan tanggal 19 Mei 2011 para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III dan IV untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 54.942.205 ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE (Catatan 22).

Pada tanggal 31 Desember 2012, obligasi Perusahaan yang masih terutang yang merupakan obligasi Rupiah kedua dan diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2010 masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 19a).

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2012	2011	2012	2011
PT Telekomunikasi Selular (**"Telkomsel"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi *Global System for Mobile Communication* ("GSM")/26 Mei 1995	1995	65	65	63.576	58.723
PT Dayamitra Telekomunikasi (**"Dayamitra"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	4.931	3.264
PT Multimedia Nusantara (**"Metra"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa jaringan telekomunikasi & multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	3.395	1.955
PT Telekomunikasi Indonesia International (**"TII"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	2.440	2.279
PT Pramindo Ikat Nusantara (**"Pramindo"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.202	1.601

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung: (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2012	2011	2012	2011
PT Indonusa Telemedia (**"Indonusa"**), *Jakarta, Indonesia*	TV berlangganan dan jasa konten/ 7 Mei 1997	1997	100 (termasuk melalui 0,46% kepemilikan oleh Metra)	100 (termasuk melalui 0,46% kepemilikan oleh Metra)	771	714
PT Graha Sarana Duta (**"GSD"**), *Jakarta, Indonesia*	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	99,99	99,99	622	384
PT Napsindo Primatel Internasional (**"Napsindo"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi - menyediakan *Network Access Point* (NAP), *Voice Over Data* (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5
PT Telkom Akses (**"Telkom Akses"**), *Jakarta, Indonesia*	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	-	100	-	-	-

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2012	2011	2012	2011
PT Sigma Cipta Caraka (**"Sigma"**), *Tangerang, Indonesia*	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, *outsourcing*, dan pemeliharaan lisensi dan piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	1.014	614
PT Infomedia Nusantara (**"Infomedia"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa *call center*/ 22 September 1999	1984	100	100	985	787
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., *Singapura*	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	522	431

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung: (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2012	2011	2012	2011
PT Telkom Landmark Tower ("**TLT**") *Jakarta, Indonesia*	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	-	150	-
Telekomunikasi Indonesia International ("**TL"**) S.A., *Timor Leste*	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	-	149	-
PT Finnet Indonesia (**"Finnet"**), *Jakarta, Indonesia*	Data dan komunikasi perbankan/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	112	83
PT Administrasi Medika (**"Ad Medika"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2010	75	75	95	83
PT Metra Plasa ("**Metra Plasa**") *Jakarta, Indonesia*	Jasa portal/ 9 April 2012	2012	60	-	95	-
Telekomunikasi Indonesia International Ltd., *Hong Kong*	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	95	56
PT Metra-Net (**"Metra-Net"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	33	41
Telkomsel Finance B.V., (**"TFBV"**), *Amsterdam, The Netherlands*	Keuangan - didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meminjam, meminjamkan, dan mengumpulkan dana, termasuk menerbitkan obligasi, wesel bayar, atau instrumen utang/ 7 Februari 2005	2005	65	65	8	8
Telekomunikasi Selular Finance Limited (**"TSFL"**), *Mauritius*	Keuangan - didirikan untuk mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham *debenture*, obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya/22 April 2002	2002	65	65	-	-

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung: (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2012	2011	2012	2011
Aria West International Finance B.V. (**"AWI BV"**), *The Netherlands*	Didirikan untuk memberikan jasa di bidang perdagangan dan keuangan/ 3 Juni 1996	1996; berhenti beroperasi pada tanggal 31 Juli 2003	100	100	0	-
PT Infomedia Solusi Humanika (**"ISH"**) *Jakarta, Indonesia*	Jasa penyaluran dan penyediaan tenaga kerja/ 24 Oktober 2012	2012	100	-	0	-
PT Graha Yasa Selaras (**"GYS"**)	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	-	51	-	7	-

(a) Metra

Pada tanggal 2 April 2012, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.LI., MKn. No. 03, Metra mendirikan PT Metra Plasa ("Metra Plasa") dengan modal dasar sebesar Rp50 juta dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp12,5 juta.

Pada tanggal 20 Juli 2012, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Sirkuler Metra Plasa, yang dinyatakan dalam akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.LI., MKn No.1 tanggal 1 Oktober 2012 para pemegang saham menyetujui:

i. Peningkatan modal dasar Metra Plasa yang semula Rp50 juta menjadi Rp60 milliar yang terdiri atas 6.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 (dalam jumlah penuh) per lembar;
ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp12,5 juta yang dimiliki 100% oleh Metra menjadi Rp15,25 milliar yaitu dengan mengeluarkan 1.523.750 lembar saham tambahan dengan nilai nominal Rp10.000 (dalam jumlah penuh) per lembar;
iii. Dari penerbitan saham baru tersebut sebanyak 913.750 lembar saham dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp9 miliar diambil oleh Metra dan sebanyak 610.000 lembar saham senilai Rp6 miliar dibayarkan oleh eBay International AG dengan agio saham sebesar Rp78 miliar. Kepemilikan Metra di Metra Plasa terdilusi menjadi 60% dimana 40% kepemilikan dimiliki oleh eBay International AG.

Pada tanggal 21 September 2012, berdasarkan akta notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn. No. 11 tanggal 21 September 2012, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-50211.AH.01.01 tahun 2012 tertanggal 26 September 2012, Metra mendirikan perusahaan bersama Pelindo II, pihak berelasi Perusahaan, bernama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") dengan kepemilikan 49%. ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(b) TII

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII tanggal 11 September 2012 yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarijah, S.H. No. 04 tanggal 04 Oktober 2012, para pemegang saham TII menyetujui pendirian entitas anak di Timor Leste bernama Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A. yang bergerak dalam bidang telekomunikasi.

(c) GSD

Berdasarkan akta notaris Kartono, S.H. No. 71 tanggal 27 Desember 2011 yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-05281.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012, GSD mendirikan entitas anak bersama Yayasan Kesehatan ("Yakes"), pihak berelasi dari Perusahaan, bernama PT Telkom Landmark Tower ("TLT") dengan kepemilikan 55%. TLT bergerak dalam bidang jasa pengembangan dan manajemen properti.

Berdasarkan akta notaris Sri Ahyani, S.H. No. 48 tanggal 7 Februari 2012 yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-22272.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 27 April 2012, GSD mendirikan entitas anak bersama Yakes, pihak berelasi dari Perusahaan, bernama PT Graha Yasa Selaras ("GYS") dengan kepemilikan 51%. GYS bergerak dalam bidang pariwisata. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, belum ada aktivitas keuangan dan operasi yang diselenggarakan oleh GYS.

(d) Telkom Akses

Pada tanggal 26 November 2012, berdasarkan akta notaris Siti Safarijah, S.H. No 20 tanggal 26 November 2012, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-60691.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 28 November 2012, Perusahaan mendirikan entitas anak bernama PT Telkom Akses ("Telkom Akses") dengan kepemilikan 100%. Telkom Akses bergerak dalam bidang pembangunan, jasa dan perdagangan telekomunikasi. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, belum ada aktivitas keuangan dan operasi yang diselenggarakan oleh Telkom Akses.

(e) Sigma

Pada tanggal 29 Juni 2012, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, MKn. No. 03 tanggal 13 Agustus 2012, Sigma menandatangani Perjanjian Jual Beli untuk pembelian 150.000 lembar saham PT Sigma Solusi Integrasi ("SSI") yang mencerminkan 30% dari total saham yang diterbitkan SSI dengan nilai transaksi sebesar Rp26 miliar dari Marina Budiman, kepentingan nonpengendali. Pada tanggal 19 Juli 2012, Sigma melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Selisih antara nilai pembelian dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh sebesar Rp22 miliar dicatat sebagai "Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Kepentingan Nonpengendali pada Entitas Anak" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(e)Sigma (lanjutan)

Pada tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan akta notaris Ny. Bomantari Julianto, S.H. tanggal 15 Agustus 2012, Sigma menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Bina Data Mandiri ("BDM") untuk membeli suatu Bisnis *Data Center* dengan nilai transaksi sebesar Rp230 miliar. Berdasarkan perjanjian penutup pada tanggal 30 November 2012, aset teridentifikasi yang timbul dari akuisisi terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan dengan keseluruhan nilai wajar sebesar Rp150 miliar dan aset takberwujud berupa kontrak dan hubungan dengan pelanggan dengan nilai wajar sebesar Rp3 miliar. Akuisisi ini menimbulkan *goodwill* sebesar Rp77 miliar.

Pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., MKn. No. 10 tanggal 17 September 2012, para pemegang saham Sigma setuju untuk melikuidasi entitas anak Sigma bernama PT Sigma Karya Sempurna ("SKS"), efektif sejak tanggal 17 September 2012. Likuidasi SKS merupakan suatu proses restrukturisasi internal kelompok usaha Sigma. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan konsolidasian ini, penetapan pengadilan negeri terhadap pengajuan likuidasi tersebut masih dalam proses.

(f)Infomedia

Pada tanggal 24 Oktober 2012, berdasarkan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H. No 15 tanggal 24 Oktober 2012, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-55715.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, Infomedia mendirikan entitas anak bernama PT Infomedia Solusi Humanika ("ISH") dengan kepemilikan 100%. ISH bergerak dalam bidang jasa penyaluran dan penyediaan tenaga kerja.

Pada tanggal 17 Desember 2012, berdasarkan akta notaris M. Kholid Artha, S.H. No. 231 tanggal 17 Desember 2012, Infomedia melakukan pembelian masing-masing 1.778 dan 1.777 lembar saham Balebat, entitas anak dari Infomedia, atau masing-masing 15,73% dan 15,73% dari total kepemilikan dengan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp4,4 miliar dan Rp4,4 miliar dari Zikra Lukman dan Siti Chadijah, kepentingan nonpengendali. Selisih antara nilai pembelian dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh sebesar Rp1 miliar dicatat sebagai "Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Kepentingan Nonpengendali pada Entitas Anak" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2013.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP - 347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK dan ISAK baru dan revisi yang efektif pada tahun 2012. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak telah diterapkan seperti yang disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

- PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

  PSAK 60 mengharuskan pengungkapan hirarki nilai wajar dan pengungkapan tambahan mengenai keandalan pengukuran nilai wajar. Sebagai tambahan, standar ini mengharuskan pengungkapan risiko likuiditas.

- ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa"

  Berdasarkan ISAK 16, pendapatan terkait dengan jasa konstruksi atau pengembangan/peningkatan dari suatu perjanjian konsesi jasa diakui berdasarkan tahap penyelesaian kerja yang telah diselesaikan. Pendapatan operasi dan jasa diakui pada periode dimana jasa diberikan. Saat lebih dari satu jasa diberikan pada perjanjian konsesi jasa, penghasilan yang diterima dialokasikan dengan acuan pada nilai relatif dari jasa tersebut.

  Aset infrastruktur yang dibangun tidak diakui sebagai aset tetap, karena perjanjian ini tidak memberikan hak kepada operator untuk mengontrol penggunaan aset infrastruktur layanan publik.

- ISAK 25, "Hak Atas Tanah"

  Berdasarkan ISAK 25, hak atas tanah termasuk biaya yang timbul untuk memproses dan memperpanjang hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi dan pencabutan standar berikut tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”
- PSAK 13 (Revisi 2011), “Properti Investasi”
- PSAK 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”
- PSAK 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”
- PSAK 26 (Revisi 2011), “Biaya Pinjaman”
- PSAK 30 (Revisi 2011), “Sewa”
- PSAK 34 (Revisi 2010), “Kontrak Konstruksi”
- PSAK 46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”
- PSAK 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”
- PSAK 53 (Revisi 2010), “Pembayaran Berbasis Saham”
- PSAK 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK 56 (Revisi 2011), “Laba Per Saham”
- ISAK 15 - PSAK 24, “Batasan Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya”
- ISAK 20, “Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham”
- ISAK 22, “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”
- ISAK 23, “Sewa Operasi - Insentif”
- ISAK 24, “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk Legal Sewa”
- ISAK 26, “Penilaian Ulang Derivatif Melekat”

Pencabutan standar dan interpretasi berikut tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK 11, “Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing”
- PSAK 39, “Akuntansi Kerja Sama Operasi”
- PSAK 44, “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate”
- PSAK 52, “Mata Uang Pelaporan”
- ISAK 4, “Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs”

Perusahaan dan entitas anak sedang mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari penyesuaian atas PSAK 60 (Revisi 2010) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” yang wajib diterapkan untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2013. Penerapan dini atas penyesuaian tersebut diperkenankan.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi aset dan liabilitas Perusahaan dan entitas anaknya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki lebih dari setengah hak suara dan memiliki kemampuan mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional entitas kecuali, dalam keadaan yang jarang, dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun memiliki kurang dari atau sama dengan setengah hak suara. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Kepentingan nonpengendali merupakan bagian atas laba atau rugi dan aset neto entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya di entitas anak. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, jumlah laba atau rugi dan jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali disajikan secara terpisah, dan tidak disajikan sebagai pos pendapatan atau beban.

Saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan dan entitas anak mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP - 347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP - 347/BL/2012, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas. Sebelumnya, Perusahaan dan entitas anak dalam pengungkapannya menerapkan definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan PSAK 7 “Pihak Berelasi”, perubahan tersebut mengakibatkan reklasifikasi akun dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 48).

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan dan entitas anak. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan selisih dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang terjadi/diasumsikan dan instrumen ekuitas yang dalam pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill yang timbul dari akuisisi diakui sebagai aset dan diukur sebesar biaya yang mencerminkan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai kepentingan nonpengendali atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada perusahaan yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akusisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi secara terpisah, atau disebut unit penghasil kas. Jika jumlah terpulihkan dari suatu unit penghasil kas lebih rendah dari nilai tercatat unit tersebut, maka rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat *goodwill* yang dialokasikan pada unit tersebut dan selanjutnya ke aset lain pada unit tersebut secara prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Akuisisi entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan nilai buku seperti metode akuntansi penyatuan kepemilikan (*carry over basis*). Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai aset keuangan lancar lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan dan entitas anak mengakui bagian atas laba atau rugi entitas asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi melebihi nilai tercatat investasi di entitas asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan hingga nihil dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Penyertaan pada ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dimana bagian partisipasi pada suatu ventura bersama pada awalnya dibukukan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan terhadap perubahan dalam bagian venturer atas aset bersih dari ventura bersama yang terjadi setelah perolehan.

Perusahaan dan entitas anak pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Perusahaan dan entitas anak menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam penyertaan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara (“PSN”) dan PT Citra Sari Makmur (“CSM”) adalah Dolar Amerika Serikat (“Dolar A.S.”) dan mata uang fungsional Scicom (MSC) Berhad (“Scicom”) adalah Ringgit Malaysia (“RM”). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan” pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang kemudian dibebankan atau dialihkan ke aset tetap pada saat pemakaian. Komponen dan modul mewakili terminal telepon, kabel, suku cadang pemasangan transmisi dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), kartu *Removable User Identity Module* ("RUIM"), pesawat telepon, *set top box*, modem *wireless broadband* dan vaucer prabayar yang dibebankan pada saat penjualan. Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM, kartu RUIM, pesawat telepon, *set top box*, modem *wireless broadband* dan vaucer prabayar dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset takberwujud yang berasal dari akuisisi entitas anak/bisnis, lisensi dan piranti lunak komputer. Aset takberwujud diakui jika Perusahaan dan entitas anak kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	Tahun
Lisensi	10
Aset takberwujud lainnya	2-20

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

l. Aset tetap - perolehan langsung

Aset tetap yang diperoleh secara langsung dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya, dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20-40
Prasarana bangunan	3-7
Peralatan sentral telepon	5-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	5-25
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-10
Peralatan pengolahan data	3-10
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	5-8
Customer Premise Equipment (“CPE”)	10
Peralatan lainnya	5

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jikalau diharuskan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Perusahan dan entitas anak dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya. Perusahaan dan entitas anak menetapkan nilai residu aset tetap sebesar Rp1.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak secara periodik menelaah kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset tetap, dimana terdapat kejadian dan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat diperoleh kembali. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Suku cadang dan peralatan pemeliharaan dicatat sebagai persediaan dan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi pada saat dikonsumsi. Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi secara spesifik menjadi aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

Peralatan yang untuk sementara tidak digunakan direklasifikasi sebagai peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya.

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Perusahaan dan entitas anak melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Perusahaan dan entitas anak ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasikan untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

n. Beban tangguhan - hak atas tanah

Sejak 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak telah mengadopsi ISAK 25, “Hak Atas Tanah”, yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Berdasarkan ISAK 25, hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Hong Kong dan Telekomunikasi Indonesia International Pte., Singapura yang menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2012		2011	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar Amerika Serikat ("US$") 1	9.630	9.645	9.060	9.075
Euro 1	12.721	12.743	11.706	11.727
Yen 1	111,65	111,84	116,69	116,96

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2l).

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang estimasi jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan *review* atas informasi historis dan tren pelanggan, Perusahaan menentukan jangka waktu hubungan dengan pelanggan yang diharapkan pada tahun 2012 dan 2011 adalah masing-masing selama 10 tahun. Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

ii. Pendapatan telepon selular dan jaringan tetap nirkabel

Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan penggunaan dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan biaya pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.

- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

ii. Pendapatan telepon selular dan jaringan tetap nirkabel (lanjutan)

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM untuk telepon seluler atau kartu RUIM untuk telepon nirkabel dan vaucer perdana) dan vaucer isi ulang diakui sebagai berikut:

- Penjualan kartu SIM dan RUIM diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur atau langsung kepada pelanggan.

- Penjualan vaucer pulsa isi ulang (baik digabungkan dalam paket perdana ataupun dijual secara terpisah) diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jangka waktu dan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vaucer prabayar telah habis masa berlakunya.

- Potongan promosi yang belum digunakan disajikan sebagai pengurang pendapatan diterima di muka.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Perusahaan dan entitas anak (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Perusahaan dan entitas anak (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

vi. Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari pendapatan Pola Bagi Hasil ("PBH") dan penjualan jasa atau barang telekomunikasi lainnya.

PBH dicatat sama seperti sewa pembiayaan, dimana aset dan liabilitas PBH disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Semua pendapatan yang dihasilkan dari perjanjian PBH diakui sebagai bagian pendapatan, sementara pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai biaya pendanaan dan pengurang liabilitas PBH.

Pendapatan kompensasi Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU") yang berasal dari kegiatan konstruksi untuk merancang, membangun dan mendanai aset untuk digunakan oleh pemberi konsesi diakui sesuai dengan tahap penyelesaian. Pendapatan yang berasal dari kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan aset konsesi diakui ketika jasa diserahkan.

Dalam kontrak konsesi sehubungan dengan KPU, Perusahaan dan entitas anak memiliki hak kontraktual tak bersyarat untuk menerima pembayaran dari pemberi konsesi. Perusahaan dan entitas anak mengakui aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (merancang, membangun, menyelenggarakan atau memelihara aset konsesi). Aset keuangan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai Piutang Usaha sebesar nilai wajar aset konsesi pada pengakuan awal dan selanjutnya sebesar biaya yang diamortisasi. Piutang diselesaikan dengan pembayaran oleh pemberi konsesi. Penghasilan pendanaan ditentukan berdasarkan tingkat bunga efektif dan diakui sebagai bagian dari penghasilan pendanaan.

Pendapatan jasa atau barang telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa dan atau barang diserahkan kepada pelanggan.

vii. Multiple-elements arrangements

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan diatas.

viii. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Perusahaan dan entitas anak bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Perusahaan dan entitas anak bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

ix. Program Loyalitas Pelanggan

Perusahaan dan entitas anak melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

x. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar metode akrual.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat pegawai telah memberikan jasa kepada Perusahaan dan entitas anak.

ii. Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuaria yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan, yaitu berdasarkan informasi harga kuotasi pasar saham. Nilai dari pensiun dibayar dimuka yang diakui dibatasi pada jumlah bersih dari akumulasi kerugian aktuarial bersih dan biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai kini dari manfaat ekonomi tersedia dalam bentuk pengembalian dari program atau pengurangan pada kontribusi yang akan datang pada program.

Laba atau rugi aktuaria yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, dibebankan atau dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (*vested*) atau diamortisasi selama periode *vesting*.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya bersih berkala untuk periode iuran tersebut terutang dan dicatat sebagai biaya karyawan.

iii. Penghargaan masa kerja (“Long Service Awards” atau “LSA”) dan cuti masa kerja (“Long Service Leave” atau “LSL”)

Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Laba atau rugi aktuaria yang timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan asumsi aktuaria, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Kewajiban sehubungan dengan LSA dan LSL dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Perusahaan berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

v. Masa persiapan pensiun ("MPP")

Karyawan Perusahaan memperoleh manfaat selama MPP, dimana karyawan mulai tidak aktif selama 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Selama masa MPP, karyawan masih akan menerima manfaat yang diberikan kepada karyawan aktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaji rutin, fasilitas kesehatan, libur tahunan, bonus, dan tunjangan lainnya. Manfaat yang diberikan kepada karyawan yang memasuki MPP dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

vi. Imbalan pasca kerja lainnya

Karyawan memperoleh tunjangan persiapan pensiun dan tunjangan fasilitas perumahan terakhir pada saat masa pensiun pada usia 56 tahun. Manfaat tersebut dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti.

t. Pajak Penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak Penghasilan ("PPh") (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan dan entitas anak juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu tarif pajak dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau yang secara substansial telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

u. Instrumen keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan dan entitas anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan tersedia untuk dijual, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai (beban)/penghasilan lain-lain di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada awalnya pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Perusahaan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
b) investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
c) investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai aset keuangan lancar lainnya.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan tahun berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

ii. Liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan obligasi dan wesel bayar.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman, obligasi, dan wesel bayar.

iii. Salinghapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisa arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Analisa nilai wajar instrumen keuangan dan rincian lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar diungkapkan dalam Catatan 44.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

v. Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara handal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan. Arus kas masa depan ini yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perusahaan dan entitas anak tidak mendiskontokan arus kas yang berasal dari piutang jangka pendek, apabila pengaruh pendiskontoan tersebut tidak material.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

vi. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 40, yaitu jumlah saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

y. Informasi segmen

Informasi segmen Perusahaan dan entitas anak disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional Perusahaan dan entitas anak misalnya Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaria berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 34, 35 dan 36.

ii. Umur manfaat aset tetap dan aset takberwujud

Perusahaan dan entitas anak mengestimasi umur manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Perusahaan dan entitas anak dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan dan entitas anak secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Perusahaan dan entitas anak melakukan review atas estimasi umur manfaat paling sedikit setahun sekali pada akhir periode pelaporan dan diperbarui jika terdapat perbedaan ekspektasi dengan asumsi yang digunakan sebelumnya, seperti perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah dan saat beban dicatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat dari aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 10 dan aset takberwujud pada Catatan 12.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

iii. Provisi untuk penurunan nilai piutang

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

iv. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 31.

v. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Perusahaan dan entitas anak melakukan pengujian penurunan nilai untuk *goodwill* setiap tahun. Aset non-keuangan lain diuji untuk penurunan nilai ketika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya yang dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Dalam menentukan nilai pakai, Perusahaan dan entitas anak menggunakan pertimbangan manajemen dalam menentukan proyeksi kinerja operasional masa depan dan dalam menentukan tingkat pertumbuhan dan tingkat diskonto. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diterapkan berdasarkan pemahaman manajemen atas informasi historis dan ekspektasi atas kinerja operasional masa depan. Perubahan asumsi penting, termasuk asumsi tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan di dalam proyeksi arus kas, dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai pakai.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai atas aset tetap yang digunakan dalam penyediaan jasa sambungan nirkabel tidak bergerak masing-masing sebesar Rp247 miliar dan Rp563 miliar. Kenaikan sebesar 1% pada tingkat diskonto yang digunakan akan menambah rugi penurunan nilai masing-masing menjadi Rp458 miliar dan Rp907 miliar. Namun jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak sangat dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam melaksanakan rencananya, termasuk rencana efisiensi biaya, yang diharapkan akan menghasilkan surplus arus kas dan tingkat profitabilitas. Apabila kinerja dari unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak terus mengalami penurunan atau rencana-rencana manajemen tidak terlaksana seperti yang diharapkan dalam periode keuangan selanjutnya, analisa harus dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tambahan penurunan nilai di tahun yang akan datang (Catatan 10c).

3. KAS DAN SETARA KAS

	2012	2011
Kas	7	6
Bank		
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	913	687
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	284	302
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	87	101
Lain-lain	14	17
	1.298	1.107
Mata uang asing		
Bank Mandiri	222	198
BNI	20	48
Lain-lain	2	2
	244	248
Sub jumlah	1.542	1.355
Pihak ketiga		
Rupiah		
Deutsche Bank AG ("DB")	62	31
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	59	12
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	103	73
	224	116
Mata uang asing		
PT Bank Standard Chartered Bank ("SCB")	112	7
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	65	62
	177	69
Sub jumlah	401	185
Jumlah bank	1.943	1.540
Deposito berjangka		
Pihak berelasi		
Rupiah		
BRI	2.883	2.620
BNI	1.511	2.418
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	401	446
Bank Mandiri	312	448
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	23	77
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	20	30
	5.150	6.039
Mata uang asing		
BRI	1.966	299
Bank Mandiri	222	-
BNI	112	7
	2.300	306
Sub jumlah	7.450	6.345

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2012	2011
Deposito berjangka (lanjutan)		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")	400	-
Citibank, N.A. ("Citibank")	400	-
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	335	180
Bank CIMB Niaga	225	12
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	170	145
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	167	190
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	160	181
PT Bank Muamalat Indonesia	153	95
PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")	120	25
PT Pan Indonesia Bank Tbk	100	90
PT Bank Danamon ("Bank Danamon")	61	10
PT Bank Buana ("Bank Buana")	60	1
DB	31	78
Lain-lain	15	19
	2.397	1.026
Mata uang asing		
SCB	804	42
OCBC NISP	517	641
Lain-lain	-	34
	1.321	717
Sub jumlah	3.718	1.743
Jumlah deposito berjangka	11.168	8.088
Jumlah	**13.118**	**9.634**

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Rupiah	2,25% - 8,50%	2,85% - 9,25%
Mata uang asing	0,05% - 3,50%	0,05% - 3,00%

Pihak berelasi dimana Perusahaan dan entitas anak melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Perusahaan dan entitas anak menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	2012	2011
Deposito berjangka		
Pihak berelasi		
BRI	1.650	-
Pihak ketiga		
SCB	1.350	-
OCBC NISP	1.000	-
Sub jumlah	2.350	-
Jumlah deposito berjangka	4.000	-
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Pihak berelasi		
Pemerintah	123	140
Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”)	67	83
PT Bahana Securities (”Bahana”)	48	64
Sub jumlah	238	287
Pihak ketiga	72	74
Jumlah aset keuangan tersedia untuk dijual	310	361
Lainnya	28	12
Jumlah	**4.338**	**373**

Deposito berjangka merupakan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat suku bunga antara 6,25% - 6,75% per tahun.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan non-*retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
BUMN	549	237	315
PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“Patrakom”)	56	31	24
PT Indosat Tbk (“Indosat”)	55	36	34
CSM	51	86	91
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	62	52	23
Jumlah	773	442	487
Provisi penurunan nilai piutang	(72)	(36)	(79)
Jumlah bersih	**701**	**406**	**408**

*) Direklasifikasi, lihat catatan 48.

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

(ii) Pihak ketiga

	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
Pelanggan individual dan bisnis	6.177	5.828	4.925
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	320	377	377
Jumlah	6.497	6.205	5.302
Provisi penurunan nilai piutang	(1.975)	(1.696)	(1.366)
Jumlah bersih	**4.522**	**4.509**	**3.936**

Piutang usaha dari pihak tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan liabilitas Perusahaan dan entitas anak kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
Sampai dengan 6 bulan	442	316	293
7 sampai dengan 12 bulan	248	60	82
Lebih dari 12 bulan	83	66	112
Jumlah	773	442	487
Provisi penurunan nilai piutang	(72)	(36)	(79)
Jumlah bersih	**701**	**406**	**408**

(ii) Pihak ketiga

	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
Sampai dengan 3 bulan	3.969	3.895	3.437
Lebih dari 3 bulan	2.528	2.310	1.865
Jumlah	6.497	6.205	5.302
Provisi penurunan nilai piutang	(1.975)	(1.696)	(1.366)
Jumlah bersih	**4.522**	**4.509**	**3.936**

(iii) Umur total piutang usaha

	2012		2011	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	3.174	140	2.880	33
Jatuh tempo hingga 3 bulan	1.250	157	887	138
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	455	193	981	260
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	2.391	1.557	1.899	1.301
Jumlah	**7.270**	**2.047**	**6.647**	**1.732**

*) Direklasifikasi, lihat catatan 48.

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak telah membentuk provisi penurunan nilai piutang berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Perusahaan dan entitas anak tidak membedakan piutang pihak berelasi dan piutang pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, nilai tercatat piutang usaha Perusahaan dan entitas anak yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp2.189 miliar dan Rp2.068 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk dengan piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
Rupiah	686	399	459
Dolar A.S.	87	43	28
Jumlah	773	442	487
Provisi penurunan nilai piutang	(72)	(36)	(79)
Jumlah bersih	**701**	**406**	**408**

(ii) Pihak ketiga

	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
Rupiah	5.770	5.402	4.588
Dolar A.S.	722	802	713
Euro	3	1	1
Hong Kong Dolar	2	-	-
Jumlah	6.497	6.205	5.302
Provisi penurunan nilai piutang	(1.975)	(1.696)	(1.366)
Jumlah bersih	**4.522**	**4.509**	**3.936**

d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	2012	2011
Saldo awal	1.732	1.445
Provisi diakui selama tahun berjalan (Catatan 29)	848	856
Penghapusbukuan piutang	(533)	(569)
Saldo akhir	**2.047**	**1.732**

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp1.344 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16 dan 20).

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

*) Direklasifikasi, lihat catatan 48.

6. PERSEDIAAN

	2012	2011
Modul	316	297
Komponen	183	173
Kartu SIM, kartu RUIM, *set top box*, dan vaucer prabayar	134	238
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	94	156
Jumlah	727	864
Provisi persediaan usang		
Modul	(96)	(91)
Komponen	(51)	(15)
Kartu SIM, kartu RUIM, *set top box*, dan vaucer prabayar	(1)	-
Jumlah	(148)	(106)
Jumlah bersih	**579**	**758**

Mutasi provisi persediaan usang adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Saldo awal	106	83
Provisi diakui selama tahun berjalan (Catatan 29)	67	27
Penghapusbukuan persediaan	(25)	(4)
Saldo akhir	**148**	**106**

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi (Catatan 28) pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp633 miliar dan Rp818 miliar.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp49 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16 dan 20).

Pada 31 Desember 2012 dan 2011, modul dan komponen yang dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anak telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lain, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp275 miliar dan Rp235 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko di atas.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	2012	2011
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 41c.i dan 41c.iii)	2.563	2.211
Sewa dibayar dimuka	666	530
Gaji	165	201
Uang muka	120	184
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	207	168
Jumlah	**3.721**	**3.294**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Akun ini mencerminkan nilai buku dari peralatan Telkomsel untuk ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dan PT Huawei Tech Investment ("PT Huawei"). Peralatan tersebut akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran untuk pertukaran peralatan dari perusahaan tersebut.

Pada tahun 2012, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp791 miliar ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dan PT Huawei (Catatan 10d.vi). Biaya perolehan peralatan baru diukur sebesar jumlah tercatat peralatan yang diserahkan dan jumlah kas yang dibayarkan.

Aset tersedia untuk dijual disajikan dalam segmen perorangan (Catatan 38).

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	2012						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan	Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi	Dividen	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Scicom [a]	29,71	101	-	(2)	(8)	7	98
ILCS [b]	49,00	-	49	(1)	-	-	48
Patrakom [c]	40,00	43	-	5	(2)	-	46
PT Melon Indonesia ("Melon") [d]	51,00	44	-	(2)	-	-	42
CSM [e]	25,00	26	-	(11)	-	5	20
PSN [f]	22,38	-	-	-	-	-	-
Sub jumlah		214	49	(11)	(10)	12	254
Penyertaan jangka panjang lainnya		21	-	-	-	-	21
Jumlah penyertaan jangka panjang		**235**	**49**	**(11)**	**(10)**	**12**	**275**

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

	2012			
	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba (rugi)
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:				
Scicom [a]	223	17	399	40
ILCS [b]	104	7	1	(3)
Patrakom [c]	218	102	226	12
Melon [d]	89	7	10	(4)
CSM [e]	1.168	905	403	(44)
PSN [f]	590	1.512	292	1
Jumlah	**2.392**	**2.550**	**1.331**	**2**

	2011					
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi	Dividen	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:						
Scicom [a]	29,71	109	(1)	(7)	(0)	101
Melon [d]	51,00	51	(7)	-	-	44
Patrakom [c]	40,00	40	4	(1)	-	43
CSM [e]	25,00	33	(6)	-	(1)	26
PSN [f]	22,38	-	-	-	-	-
Sub jumlah		233	(10)	(8)	(1)	214
Penyertaan jangka panjang lainnya		21	-	-	-	21
Jumlah penyertaan jangka panjang		**254**	**(10)**	**(8)**	**(1)**	**235**

	2011			
	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba (rugi)
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:				
Scicom [a]	193	20	390	40
Melon [d]	96	10	6	(14)
Patrakom [c]	196	88	188	11
CSM [e]	1.261	1.023	460	(24)
PSN [f]	596	1.517	282	1
Jumlah	**2.342**	**2.658**	**1.326**	**14**

[a] Scicom bergerak dalam bidang penyediaan jasa *call center* di Malaysia. Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar investasi adalah sebesar Rp111 miliar. Nilai wajar investasi dihitung dari jumlah lembar saham dikalikan dengan kuotasi harga publikasian pada tanggal 28 Desember 2012 (RM0,400).

[b] ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

[c] Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan.

[d] Melon bergerak dalam bidang penyediaan jasa *Digital Content Exchange Hub* ("DCEH"). Metra tidak mempunyai kendali atas Melon sebagai hasil dari adanya hak partisipasi yang substantif yang dipegang oleh pihak lain terhadap kebijakan keuangan dan operasi Melon.

[e] CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (*"Very Small Aperture Terminal*" atau "VSAT"), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait.

[f] PSN bergerak dalam bidang penyewaan *transponder* satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Bagian rugi Perusahaan dari PSN telah melebihi nilai penyertaannya sejak 2001, oleh karena itu nilai penyertaannya telah menjadi Rp nihil. Bagian kumulatif rugi PSN yang tidak diakui hingga tahun 2012 dan 2011 adalah masing-masing sekitar Rp920 miliar.

10. ASET TETAP

	1 Januari 2012	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2012
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	842	135	-	-	(0)	977
Bangunan	3.417	98	-	(0)	272	3.787
Prasarana bangunan	650	6	-	(3)	130	783
Peralatan sentral telepon	25.470	91	-	(1.438)	(373)	23.750
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	20	-	-	-	(1)	19
Peralatan dan instalasi transmisi	78.584	746	-	(1.680)	7.639	85.289
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	7.069	35	-	-	163	7.267
Jaringan kabel	26.392	1.965	-	(244)	(455)	27.658
Catu daya	9.339	194	-	(83)	984	10.434
Peralatan pengolahan data	8.082	323	-	(210)	1	8.196
Peralatan telekomunikasi lainnya	472	-		-	(192)	280
Peralatan kantor	727	60	-	(47)	(60)	680
Kendaraan	84	6	-	(4)	(15)	71
Peralatan lainnya	111	1	-	-	(1)	111
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	139	381	-	-	(314)	206
Prasarana bangunan	3	32	-	-	(34)	1
Peralatan sentral telepon	70	883	-	-	(953)	-
Peralatan dan instalasi transmisi	826	7.951	-	(1)	(8.137)	639
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	21	125	-	-	(146)	-
Jaringan kabel	42	241	-	(42)	47	288
Catu daya	30	909	-	-	(827)	112
Peralatan pengolahan data	72	502	-	-	(508)	66
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	305	2.582	-	(10)	(4)	2.873
Peralatan pengolahan data	344	6	-	(0)	(11)	339
Peralatan kantor	27	-	-	-	(12)	15
Kendaraan	48	-	-	(48)	-	(0)
Aset CPE	22	-	-	-		22
Aset PBH:						
Peralatan sentral telepon	81	-	-	-	2	83
Peralatan dan instalasi transmisi	16	-	-	-	(8)	8
Jaringan kabel	380	-	-	-	(14)	366
Peralatan telekomunikasi lainnya	2	-	-	-	-	2
Jumlah	163.687	17.272	-	(3.810)	(2.827)	174.322

10. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2012	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2012
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	1.671	130	-	(0)	(62)	1.739
Prasarana bangunan	502	63	-	(3)	47	609
Peralatan sentral telepon	17.412	2.065	-	(1.112)	(1.260)	17.105
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	17	0	-	-	(1)	16
Peralatan dan instalasi transmisi	35.169	6.894	153	(988)	(18)	41.210
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	4.135	517	94	-	(62)	4.684
Jaringan kabel	16.952	1.057	-	(238)	(480)	17.291
Catu daya	4.916	1.221	-	(59)	(96)	5.982
Peralatan pengolahan data	6.189	1.001	-	(165)	(670)	6.355
Peralatan telekomunikasi lainnya	353	5	-	-	(99)	259
Peralatan kantor	523	61	-	(14)	(22)	548
Kendaraan	74	6	-	(4)	(15)	61
Peralatan lainnya	98	5	-	-	(1)	102
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	270	514	-	(2)	-	782
Peralatan pengolahan data	217	51	-	-	(7)	261
Peralatan kantor	9	4	-	-	(6)	7
Kendaraan	47	1	-	(48)	-	0
Aset CPE	9	2	-	-	-	11
Aset PBH:						
Peralatan sentral telepon	33	6	-	-	2	41
Peralatan dan instalasi transmisi	18	2	-	-	(8)	12
Jaringan kabel	175	28	-	-	(4)	199
Peralatan telekomunikasi lainnya	1	0	-	-	-	1
Jumlah	88.790	13.633	247	(2.633)	(2.762)	97.275
Nilai Buku Bersih	**74.897**					**77.047**

	1 Januari 2011	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2011
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	816	40	-	(14)	-	842
Bangunan	3.203	149	-	(66)	131	3.417
Prasarana bangunan	601	12	-	(5)	42	650
Peralatan sentral telepon	30.125	113	-	(5.565)	797	25.470
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	20	-	-	-	-	20
Peralatan dan instalasi transmisi	73.999	2.271	-	(829)	3.143	78.584
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	6.922	72	-	-	75	7.069
Jaringan kabel	24.541	1.491	-	(698)	1.058	26.392
Catu daya	8.269	466	-	(151)	755	9.339
Peralatan pengolahan data	7.896	298	-	(480)	368	8.082
Peralatan telekomunikasi lainnya	494	6	-	(3)	(25)	472
Peralatan kantor	644	95	-	(59)	47	727
Kendaraan	113	3	-	(3)	(29)	84
Peralatan lainnya	108	4	-	(1)	-	111
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	58	148	-	-	(67)	139
Prasarana bangunan	91	82	-	-	(170)	3
Peralatan sentral telepon	1	1.851	-	-	(1.782)	70
Peralatan dan instalasi transmisi	288	6.051	-	-	(5.513)	826
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	27	164	-	-	(170)	21
Jaringan kabel	6	38	-	-	(2)	42
Catu daya	40	704	-	-	(714)	30
Peralatan pengolahan data	68	510	-	-	(506)	72

10. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2011	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2011
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	303	11	-	-	(9)	305
Peralatan pengolahan data	298	68	-	-	(22)	344
Peralatan kantor	26	1	-	-	-	27
Kendaraan	53	-	-	(5)	-	48
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Aset PBH:						
Tanah	1	-	-	-	(1)	-
Peralatan sentral telepon	84	-	-	-	(3)	81
Peralatan dan instalasi transmisi	27	-	-	-	(11)	16
Jaringan kabel	398	-	-	-	(18)	380
Peralatan telekomunikasi lainnya	4	-	-	-	(2)	2
Jumlah	159.546	14.648	-	(7.879)	(2.628)	163.687
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	1.576	104	2	(66)	55	1.671
Prasarana bangunan	443	64	-	(5)	-	502
Peralatan sentral telepon	20.912	2.695	-	(5.324)	(871)	17.412
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	17	-	-	-	-	17
Peralatan dan instalasi transmisi	30.191	6.717	320	(511)	(1.548)	35.169
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3.621	486	176	-	(148)	4.135
Jaringan kabel	15.529	1.075	39	(698)	1.007	16.952
Catu daya	3.855	1.252	12	(144)	(59)	4.916
Peralatan pengolahan data	5.819	1.079	13	(479)	(243)	6.189
Peralatan telekomunikasi lainnya	367	13	1	(3)	(25)	353
Peralatan kantor	509	63	-	(59)	10	523
Kendaraan	100	6	-	(3)	(29)	74
Peralatan lainnya	93	6	-	(1)	-	98
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	251	23	-	-	(4)	270
Peralatan pengolahan data	171	55	-	-	(9)	217
Peralatan kantor	4	5	-	-	-	9
Kendaraan	39	12	-	(4)	-	47
Aset CPE	7	2	-	-	-	9
Aset PBH:						
Tanah	1	-	-	-	(1)	-
Peralatan sentral telepon	30	6	-	-	(3)	33
Peralatan dan instalasi transmisi	22	4	-	-	(8)	18
Jaringan kabel	154	35	-	-	(14)	175
Peralatan telekomunikasi lainnya	3	-	-	-	(2)	1
Jumlah	83.714	13.702	563	(7.297)	(1.892)	88.790
Nilai Buku Bersih	**75.832**					**74.897**

a. Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2012	2011
Hasil penjualan aset tetap	360	56
Nilai buku bersih	(282)	(18)
Nilai buku bersih pertukaran - bersih	-	24
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	**78**	**62**

b. Perjanjian kepemilikan aset KSO

(i) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO VII dengan PT Bukaka Singtel International ("BSI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO VII yang telah diakuisisi tetap berada di BSI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai buku aset tetap ini sebesar Rp710 miliar. Pada tanggal 1 Januari 2011, hak legal atas aset tetap tersebut telah diserahkan kepada Perusahaan dan aset tetap tersebut telah tercermin dalam saldo diatas.

10. ASET TETAP (lanjutan)

b. Perjanjian kepemilikan aset KSO (lanjutan)

(ii) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO IV dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia ("MGTI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO IV yang telah diakuisisi tetap berada di MGTI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai buku bersih aset tetap ini sebesar Rp161 miliar. Pada tanggal 1 Januari 2011, hak legal atas aset tetap tersebut telah diserahkan kepada Perusahaan dan aset tetap tersebut telah tercermin dalam saldo diatas.

c. Penurunan nilai aset

(i) Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, unit penghasil kas yang menghasilkan arus kas masuk secara independen adalah sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, selular dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, terdapat indikasi penurunan nilai untuk unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak (disajikan sebagai bagian dari segmen perorangan) yang terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan secara intensif di pasar sambungan nirkabel tidak bergerak yang berdampak pada tarif rata-rata yang lebih rendah, penurunan jumlah pelanggan aktif dan penurunan rata-rata pendapatan per pelanggan ("*Average Revenue Per User*" atau "ARPU"). Perusahaan menghitung jumlah terpulihkan dari kelompok aset yang tercakup dalam unit penghasil kas tersebut dan menentukan kelompok aset dalam unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang menyebabkan rugi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp247 miliar dan Rp563 miliar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai bagian dari "Penyusutan dan amortisasi". Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini menggunakan proyeksi arus kas sebelum pajak yang telah disetujui manajemen dan mencakup periode lima tahun dengan arus kas setelah periode lima tahun diekstrapolasi menggunakan tingkat pertumbuhan perpetuitas. Proyeksi arus kas mencerminkan ekspektasi manajemen terhadap pendapatan, pertumbuhan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi ("*Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*" atau "EBITDA"), dan arus kas operasi atas dasar unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak menghasilkan surplus arus kas bersih sejak tahun 2013. Proyeksi arus kas manajemen juga mempertimbangkan ekspektasi wajar manajemen terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro dan ekspektasi pasar terhadap industri telekomunikasi di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak masing-masing sebesar 12,3% dan 11,4%, yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tingkat pertumbuhan perpetuitas yang digunakan masing-masing adalah 0,5% dan 0% dengan asumsi jumlah pelanggan akan terus meningkat setelah lima tahun, akan tetapi rata-rata pendapatan per pelanggan akan menurun sehingga tingkat pertumbuhan jangka panjang dianggap tidak signifikan.

Apabila kinerja unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak terus mengalami penurunan atau rencana-rencana manajemen tidak terlaksana seperti yang diharapkan dalam periode keuangan selanjutnya, analisa harus dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tambahan penurunan nilai di tahun yang akan datang.

(ii) Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap untuk unit penghasil kas lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain

(i) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sejumlah Rp44 miliar dan Rp0 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi adalah berkisar antara 7,72% - 9,75% dan 0% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

(iii) Pada tanggal 7 Agustus 2012, Satelit Telkom-3 dengan nilai tercatat sebesar Rp1.606 miliar telah selesai dibangun dan diluncurkan, tetapi gagal mencapai orbitnya. Nilai tercatat satelit tersebut telah dibebankan sebagai bagian dari beban lain-lain dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012. Satelit Telkom-3 tersebut telah diasuransikan oleh Perusahaan dengan nilai pertanggungan asuransi yang memadai untuk menutup kerugian atas kejadian yang dipertanggungkan dan dialami Perusahaan tersebut. Proses klaim asuransi telah dilakukan dan jumlah pertanggungan asuransi telah disepakati dan disetujui oleh pihak asuransi dengan nilai sebesar Rp1.772 miliar dan dicatat sebagai bagian dari penghasilan lain-lain dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012. Pada bulan November 2012, Perusahaan telah menerima penggantian klaim asuransi tersebut.

(iv) Pada tahun 2012, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.037 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Telkomsel mengubah estimasi masa manfaat peralatan tersebut yang berdampak pada tambahan beban penyusutan sebesar Rp534 miliar yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012.

Dampak perubahan estimasi masa manfaat peralatan tersebut pada periode mendatang adalah mengurangi laba sebelum pajak sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2013	131
2014	84

Pada tahun 2011, Telkomsel mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp189 miliar. Oleh karena itu, Telkomsel mengubah estimasi masa manfaat peralatan tersebut yang berdampak pada tambahan beban penyusutan sebesar Rp154 miliar yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2011. Telkomsel juga menghentikan pengakuan peralatan tertentu dengan harga perolehan sebesar Rp584 miliar. Pada saat dihentikan pengakuannya, peralatan tersebut telah disusutkan sepenuhnya.

(v) Pada tahun 2012, masa manfaat menara Telkomsel diubah dari 10 tahun menjadi 20 tahun agar mencerminkan ekspektasi daya pakai dan tingkat keausan fisik menara saat ini. Dampak pengurangan beban penyusutan sebesar Rp635 miliar dikredit pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012.

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

Dampak perubahan estimasi masa manfaat menara tersebut pada periode mendatang adalah menambah pendapatan laba sebelum pajak sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2013	606
2014	565
2015	469
2016	301
2017	92

(vi) Pertukaran aset tetap

- Pada tahun 2011, Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI") menandatangani Surat Pesanan untuk Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off* masing-masing untuk STO Cengkareng, STO Gandaria dan STO Injoko sebesar Rp96 miliar dan untuk STO Semanggi sebesar Rp44 miliar, serta STO Kelapa Gading, STO Rawamangun, STO Slipi dan STO Manyar sebesar Rp177 miliar. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah menghapusbukukan aset jaringan tembaga dengan nilai buku sebesar Rp6 miliar dan telah mencatat aset jaringan *fiber optic* hasil pertukaran aset dengan nilai sebesar Rp430 miliar.

- Pada tahun 2012, peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana) dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.686 miliar ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dan PT Huawei, dimana sebesar Rp791 miliar berasal dari aset tersedia untuk dijual (Catatan 8).

  Pada tahun 2011, peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana) dengan harga perolehan dan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp1.730 miliar dan Rp547 miliar ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dan PT Huawei dengan jumlah harga yang disetujui sebesar US$63 juta.

  Biaya perolehan peralatan baru diukur sebesar jumlah tercatat peralatan yang diserahkan dan jumlah kas yang dibayarkan.

(vii) Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 20 - 45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2012 hingga 2052. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(viii) Pada tanggal 31 Desember 2012, aset tetap milik Perusahaan dan entitas anak kecuali tanah, dengan harga perolehan sebesar Rp72.192 miliar diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya dengan nilai maksimum klaim kerugian sebesar Rp9.523 miliar, US$52 juta, EURO1 juta, SGD14 juta, dan HKD2 juta dan basis kerugian pertama Rp6.118 miliar termasuk pemulihan kegiatan usaha sebesar Rp324 miliar dengan *Automatic Reinstatement of Loss Clause*. Di samping itu, Telkom-1 dan Telkom-2 diasuransikan terpisah dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US$9 juta dan US$33 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

(ix) Pada tanggal 31 Desember 2012, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan sekitar 36,15% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara Januari 2013 sampai dengan Maret 2014. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.

(x) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan dan entitas anak tertentu telah dijaminkan dalam perjanjian obligasi (Catatan 19a) dan *Medium Term Notes* (Catatan 19b). Aset tetap entitas anak tertentu sebesar Rp2.841 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16 dan 20).

(xi) Pada tahun 2012, Perusahaan dan Telkomsel menghentikan pengakuan aset tetap tertentu sehubungan dengan kontrak KPU (Catatan 41c.vi), dengan keseluruhan harga perolehan dan nilai tercatat, masing-masing sebesar Rp259 miliar dan Rp137 miliar. Nilai buku aset tersebut dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012.

(xii) Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Perusahaan dan entitas anak yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp39.073 miliar dan Rp32.623 miliar. Perusahaan dan entitas anak saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.

(xiii) Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar tanah dan bangunan Perusahaan dan entitas anak, yang ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan yang bersangkutan, adalah sekitar Rp10.261 miliar.

(xiv) Perusahaan dan Telkomsel menandatangani perjanjian dengan PT Solusindo Kreasi Pratama, PT Prima Media Selaras, PT Naragita Dinamika Komunika, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan perusahaan penyedia menara lainnya untuk penyewaan ruang di menara telekomunikasi (slot) dan lokasi menara dengan jangka waktu selama 10 tahun. Perjanjian sewa dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Disamping itu, Perusahaan dan entitas anak juga memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk aset tetap PBH, peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan Aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tahun	2012	2011
2012	-	259
2013	652	179
2014	548	110
2015	398	33
2016	354	23
2017	334	18
Selanjutnya	886	20
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	3.172	642
Bunga	(848)	(132)

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

Tahun	2012	2011
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	2.324	510
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)	(510)	(196)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)	**1.814**	**314**

11. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari:

	2012	2011
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	1.367	1.143
Uang muka pembelian aset tetap	775	2.017
Beban tangguhan	471	435
Piutang usaha jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 5)	294	-
Izin penggunaan frekuensi - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	279	-
Kas yang dibatasi penggunaannya	217	164
Setoran jaminan	103	54
Lain-lain	4	4
Jumlah	**3.510**	**3.817**

Sewa dibayar di muka mencerminkan sewa dibayar di muka atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 25 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, beban tangguhan mencerminkan beban Pola Bagi Hasil ("PBH") tangguhan dan beban tangguhan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"). Pada tanggal 31 Desember 2011, beban tangguhan juga termasuk hak atas tanah (Catatan 2n). Jumlah beban amortisasi untuk beban tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp87 miliar dan Rp84 miliar.

Piutang usaha jangka panjang mencerminkan piutang usaha yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan jangka waktu angsuran sampai dengan 4 tahun, terkait jasa penyediaan serta pengoperasian akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (KPU) (Catatan 41c.vi).

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan kas yang dijaminkan untuk garansi bank untuk kontrak KPU (Catatan 41c.vi) dan kontrak lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara oleh Perusahaan dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp0,4 miliar dan Rp0,8 miliar.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

12. ASET TAKBERWUJUD

(i) Perubahan nilai tercatat *goodwill,* aset takberwujud lainnya dan lisensi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Aset takberwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2011	192	2.769	815	3.776
Diperoleh secara terpisah:				
Piranti lunak Perusahaan	-	103	-	103
Piranti lunak entitas anak	-	334	-	334
Akuisisi data center BDM (Catatan 1d)	77	3	-	80
Reklasifikasi	-	158	(749)	(591)
Pengurangan	-	(58)	-	(58)
Saldo, 31 Desember 2012	269	3.309	66	3.644
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2011	(29)	(1.619)	(339)	(1.987)
Beban amortisasi tahun berjalan	-	(460)	(6)	(466)
Reklasifikasi	-	(120)	314	194
Pengurangan	-	58	-	58
Saldo, 31 Desember 2012	(29)	(2.141)	(31)	(2.201)
Nilai Buku Bersih	**240**	**1.168**	**35**	**1.443**
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi		7,21 tahun	10,43 tahun	

	Goodwill	Aset takberwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2010	192	9.875	812	10.879
Diperoleh secara terpisah:				
Piranti lunak Perusahaan	-	293	-	293
Piranti lunak entitas anak	-	309	-	309
Lisensi entitas anak	-	-	1	1
Reklasifikasi	-	(105)	2	(103)
Pengurangan	-	(7.603)	-	(7.603)
Saldo, 31 Desember 2011	192	2.769	815	3.776
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2010	(29)	(8.815)	(250)	(9.094)
Beban amortisasi tahun berjalan	-	(429)	(87)	(516)
Reklasifikasi	-	22	(2)	20
Pengurangan	-	7.603	-	7.603
Saldo, 31 Desember 2011	(29)	(1.619)	(339)	(1.987)
Nilai Buku Bersih	**163**	**1.150**	**476**	**1.789**
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi		6,47 tahun	9,39 tahun	

(ii) *Goodwill* timbul dari transaksi jual beli bisnis *data center* antara Sigma dengan BDM tahun 2012 (Catatan 1d), akuisisi Ad Medika tahun 2010, Indonusa tahun 2008 dan Sigma tahun 2008. Aset takberwujud lainnya termasuk hak atas tanah (Catatan 2n) dan juga termasuk akuisisi Dayamitra, Pramindo, TII, KSO IV dan KSO VII, dan merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO. Sehubungan dengan berakhirnya masa KSO (Catatan 10b), nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dari aset takberwujud lainnya telah dihapusbukukan.

12. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

(iii) Estimasi beban amortisasi tahunan aset takberwujud lainnya sejak 1 Januari 2013 adalah kurang lebih sebesar Rp441 miliar. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud selain hak atas tanah adalah 1-19 tahun.

(iv) Jumlah agregat dari *goodwill* yang dialokasikan ke setiap unit penghasil kas adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Sigma	88	88
Ad Medika	82	82
Jumlah	**170**	**170**

Metra melakukan pengujian penurunan setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penuruan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen dan mencakup periode lima tahun. Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2012		2011	
	Sigma	**Ad Medika**	**Sigma**	**Ad Medika**
Tingkat diskonto	11,8%	11,5%	12,5%	12,1%
Tingkat pertumbuhan berkelanjutan	4,5%	4,5%	2%	2%

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat rugi penurunan nilai yang perlu diakui untuk *goodwill* yang berasal dari akusisi entitas anak, dengan kemungkinan perubahan yang wajar terhadap asumsi-asumsi penting tidak menyebabkan nilai tercatat unit penghasil kas melebihi jumlah terpulihkan.

(v) Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya tetapi masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp821 miliar dan Rp662 miliar.

13. UTANG USAHA

	31 Desember 2012	31 Desember 2011*)	1 Januari 2011*)
Pihak berelasi			
Pembelian peralatan, barang dan jasa	412	367	550
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	20	60	204
Sub Jumlah	432	427	754
Pihak ketiga			
Pembelian peralatan, barang dan jasa	6.023	7.431	6.276
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	621	409	394
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	204	50	87
Sub Jumlah	6.848	7.890	6.757
Jumlah	**7.280**	**8.317**	**7.511**

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 48.

13. UTANG USAHA (lanjutan)

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Rupiah	4.146	4.422
Dolar A.S.	3.111	3.883
Lain-lain	23	12
Jumlah	**7.280**	**8.317**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2012	2011
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2.917	2.917
Gaji dan tunjangan	1.491	900
Umum, administrasi dan pemasaran	882	805
Program Pendi	699	-
Bunga dan beban bank	174	168
Jumlah	**6.163**	**4.790**

Beban yang masih harus dibayar untuk Program Pendi timbul dari Keputusan Direktur Human Capital dan General Affairs No. PR. 206.01/r.02/PD000/COP-B0010000/2012 tentang Program Pendi tertanggal 1 November 2012 dan sebagaimana telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada tanggal yang sama. Perusahaan memperkirakan beban yang masih harus dibayar berdasarkan jumlah karyawan yang berhak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan Perusahaan mengenai Program Pendi tersebut. Beban manfaat Pendi sebesar Rp699 miliar dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012 (Catatan 27).

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

15. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	2012	2011
Kartu pulsa prabayar	2.352	2.526
Jasa telekomunikasi lainnya	132	153
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	245	142
Jumlah	**2.729**	**2.821**

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK

		2012		2011	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Kreditur	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank CIMB Niaga	Rp	-	20	-	45
Lain-lain	Rp	-	13	-	55
	US$	0,42	4	-	-
Jumlah			**37**		**100**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank CIMB Niaga							
25 April 2005[a]	Balebat	Rp	12	29 Mei 2013	Bulanan	10,50% - 11,00%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
29 April 2008[a]	Balebat	Rp	10	29 Mei 2013	Bulanan	10,50% - 11,00%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
Bank Ekonomi							
7 Agustus 2009[b]	Sigma	Rp	35	1 Juli 2013	Bulanan	9,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 10)
7 Agustus 2009[b]	Sigma	US$	0,001	1 Juli 2013	Bulanan	6,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 10)

Fasilitas utang bank yang diperoleh entitas anak tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

[a] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 10 Oktober 2012.
[b] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 1 Oktober 2012.

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	2012	2011
Utang bank	20	4.475	3.960
Utang sewa pembiayaan	10	510	196
Obligasi dan wesel bayar	19	440	385
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	18	196	272
Jumlah		**5.621**	**4.813**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

b. Bagian jangka panjang

Pembayaran pokok utang yang dijadwalkan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

			Tahun				
	Catatan	Jumlah	2014	2015	2016	2017	Selanjutnya
Utang bank	20	6.783	3.480	2.337	548	328	90
Obligasi dan wesel bayar	19	3.229	192	1.042	-	-	1.995
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	18	1.791	198	201	204	205	983
Utang sewa pembiayaan	10	1.814	396	270	246	227	675
Jumlah		**13.617**	**4.266**	**3.850**	**998**	**760**	**3.743**

18. PINJAMAN PENERUSAN

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam valuta asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

		2012		2011	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Kreditur	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	9.215	1.031	9.983	1.167
	Rp	-	574	-	717
	US$	40	382	44	400
Jumlah			1.987		2.284
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)			(196)		(272)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)			**1.791**		**2.012**

18. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Kreditur	Mata uang	Periode Jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun
Bank luar negeri	US$	Semesteran	Semesteran	4,00%
	Rp	Semesteran	Semesteran	6,79%
	Yen	Semesteran	Semesteran	3,10%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

19. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR

		2012		2011	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi					
Seri A	Rp	-	1.005	-	1.005
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995
Wesel bayar jangka menengah (*Medium Term Notes* atau "MTN")					
PT Finnet Indonesia ("Finnet")	Rp	-	8	-	18
Metra	Rp	-	0	-	59
Sigma	Rp	-	0	-	30
Promes					
PT Huawei	US$	46	445	60	545
PT ZTE Indonesia ("ZTE")	US$	22	216	15	134
Jumlah			3.669		3.786
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)			(440)		(385)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)			**3.229**		**3.401**

19. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

a. Obligasi

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	1.005	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2015	Kuartalan	9,60%
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%
Total	**3.000**						

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 10d.x). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT CIMB Niaga Tbk.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan *system* satelit) dan optimisasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline dan wireless*).

Pada tanggal 31 Desember 2012, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio *debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. Rasio EBITDA terhadap biaya pendanaan tidak kurang dari 5:1
3. Rasio *debt service coverage* sebesar 125%

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

b. MTN

Wesel bayar	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga
MTN				
Metra I*				
Tahap 1	30	9 Juni 2009	19 Juni 2012	Kuartalan
Tahap 2	20	1 Februari 2010	2 Februari 2013	Kuartalan
Metra II				
Tahap 1	20	28 Desember 2011	28 Desember 2014	Kuartalan
Tahap 2	10	22 Februari 2012	22 Februari 2015	Kuartalan
Sigma**	30	17 November 2009	17 November 2014	Semesteran
Finnet				
Tahap 1	10	16 Oktober 2009	17 November 2012	Bulanan
Tahap 2	15	18 Maret 2010	24 Maret 2013	Bulanan

* Pada bulan Desember 2012, Metra telah melunasi saldo utang MTN melalui proses *refinancing* dengan BNI (Catatan 20).
** Pada bulan Mei 2012, Sigma telah melunasi saldo utang MTN.

19. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

b. MTN (lanjutan)

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan antara lain untuk mengembangkan usaha dan modal kerja.

Metra memberikan jaminan dengan nilai minimal 40% dari nilai pokok MTN yang masih terutang. Maksimal 60% nilai pokok MTN yang masih terutang tidak dijamin dan setiap saat diperlakukan sama (*pari passu*) dengan liabilitas Metra lainnya yang tidak dijamin. Metra dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

MTN Sigma dan Finnet tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Sigma dan Finnet baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (catatan 10d.x) menjadi jaminan bagi pemegang MTN *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sigma dan Finnet dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian, Metra, Sigma, dan Finnet dipersyaratkan untuk menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2012, Metra, Sigma, dan Finnet memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

c. Promes

Pemasok	Mata uang	Pokok utang	Tanggal perjanjian	Tanggal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
PT Huawei	US$	0,3	19 Juni 2009	Semesteran 11 Januari 2013-28 Juni 2015	Semesteran	6 bln LIBOR+2,5%
PT ZTE Indonesia ("ZTE")	US$	0,1	20 Agustus 2009	Semesteran 10 Maret 2013-10 Juni 2015	Semesteran	6 bln LIBOR+1,5% 6 bln LIBOR+2,5%

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan ZTE dan PT Huawei (*Agreement of Frame Supply and Deferred Payment Arrangement*), promes yang dikeluarkan Perusahaan kepada ZTE dan PT Huawei tersebut merupakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa jaminan untuk pembayaran 85% dari nilai berita acara serah terima proyek-proyek dengan ZTE dan PT Huawei.

20. UTANG BANK

Kreditur	Mata uang	2012 Saldo terutang Mata uang asal (dalam jutaan)	2012 Saldo terutang Setara Rupiah	2011 Saldo terutang Mata uang asal (dalam jutaan)	2011 Saldo terutang Setara Rupiah
BRI	Rp	-	4.011	-	1.131
Sindikasi bank	Rp	-	1.950	-	3.225
BCA	Rp	-	1.564	-	2.271
Bank Mandiri	Rp	-	1.417	-	2.111
BNI	Rp	-	1.201	-	400
ABN Amro Bank N.V., Stockholm ("AAB Stockholm") dan Standard Chartered Bank	US$	68	659	85	771
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US$	30	289	42	381
Bank CIMB Niaga	Rp	-	174	-	81
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ("Bank Ekonomi")	Rp	-	41	-	69
	US$	0	3	0	4
OCBC NISP	Rp	-	-	-	466
Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC")	US$	-	-	39	350
Lain-lain	Rp	-	-	-	1
Jumlah			11.309		11.261
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(51)		(70)
			11.258		11.191
Utang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)			(4.475)		(3.960)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)			**6.783**		**7.231**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Sindikasi bank								
29 Juli 2008[a] (BNI, BRI, dan BJB)	Perusahaan	Rp	2.400	600	Semesteran (2010-2013)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,20%	Tidak ada
16 Juni 2009[a] (BNI dan BRI)	Perusahaan	Rp	2.700	675	Semesteran (2011-2014)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +2,45%	Tidak ada
Sindikasi bank 19 Desember 2012 (BNI, BRI, dan Bank Mandiri)[k]	DMT	Rp	2,5	-	Semesteran (2014-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 3.00%	Aset Tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
BCA								
5 Juli 2010[b&c]	Telkomsel	Rp	2.000	667	Semesteran (2012-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,20%	Tidak ada
16 Desember 2010[a]	TII	Rp	200	40	Semesteran (2011-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada

20. UTANG BANK (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total Fasilitas (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank Mandiri								
5 Juli 2010[b&c]	Telkomsel	Rp	3.000	694	Semesteran (2012-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,20%	Tidak ada
BRI								
13 Oktober 2010[a]	Perusahaan	Rp	3.000	-	Semesteran (2013-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada
20 Juli 2011[a]	Dayamitra	Rp	1.000	-	Semesteran (2011-2017)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,40%	Aset tetap (Catatan 10)
17 April 2012 [a&j]	Indonusa	Rp	225	-	Semesteran (2013-2017)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +3,76%	Arus kas Indonusa
ABN Amro Bank N.V., Stockholm ("AAB Stockholm") dan Standard Chartered Bank 30 Desember 2009[b&d]	Telkomsel	US$	0,3	0,02	Semesteran (2011-2016)	Semesteran	6 bulan LIBOR +0,82%	Tidak ada
BNI								
13 Oktober 2010[a]	Perusahaan	Rp	1.000	143	Semesteran (2013-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada
23 Desember 2011[a]	PIN	Rp	500	-	Semesteran (2013-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,50%	Persediaan (Catatan 6) dan Piutang usaha (Catatan 5)
28 November 2012 [a]	Metra	Rp	44	-	Tahunan (2013-2015)	Bulanan	8%	Aset tetap (Catatan 10) dan Piutang usaha (Catatan 5)
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")								
26 Maret 2010 [a&e]	Perusahaan	US$	0,06	0,01	Semesteran (2010-2015)	Semesteran	4,56% dan 6 bulan LIBOR + 0,70%	Tidak ada
Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC")								
30 Desember 2009[i]	Telkomsel	US$	0,3	0,039	Semesteran (2011-2016)	Semesteran	3 bulan LIBOR +1,20%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga								
21 Maret 2007 [f]	GSD	Rp	21	8,6	Kuartalan (2007-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
23 November 2007 [f]	GSD	Rp	9	8	Bulanan (2007-2012)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
28 Juli 2009[g]	Balebat	Rp	2	0,5	Bulanan (2010-2014)	Bulanan	10,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
24 Mei 2010 [g]	Balebat	Rp	2	0,6	Bulanan (2010-2015)	Bulanan	10,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)

20. UTANG BANK (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total Fasilitas (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank CIMB Niaga (lanjutan)								
31 Maret 2011	GSD	Rp	24	3,2	Bulanan (2011-2019)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
31 Maret 2011	GSD	Rp	13	2,1	Bulanan (2011-2019)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
31 Maret 2011	GSD	Rp	12	2,1	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
9 September 2011	GSD	Rp	41	1,9	Bulanan (2011-2021)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
9 September 2011	GSD	Rp	11	3,9	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
2 Agustus 2012 [g]	Balebat	Rp	4	0,3	Bulanan (2012-2015)	Bulanan	10,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
20 September 2012[a]	TLT	Rp	1.150	-	Bulanan (2015-2030)	Bulanan	3 bulan JIBOR +3,45%	Aset tetap (Catatan 10)
20 September 2012[a]	TLT	Rp	118	-	Bulanan (2015-2030)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 10)
10 Oktober 2012 [g]	Balebat	Rp	1	0,07	Bulanan (2012-2015)	Bulanan	10,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
Bank Ekonomi								
7 Desember 2006[i]	Sigma	Rp	14	3,4	Bulanan (2006-2012)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
9 Maret 2007[i]	Sigma	Rp	13	2,7	Bulanan (2008-2012)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
10 September 2008[a&h]	Sigma	Rp	33	5,8	Bulanan (2009-2015)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)

20. UTANG BANK (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank Ekonomi (lanjutan)								
7 Agustus 2009[a&h]	Sigma	Rp	35	10,4	Bulanan beberapa cicilan (2009-2013)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
7 Agustus 2009[a&h]	Sigma	Rp	20	5,3	Bulanan beberapa cicilan (2009-2014)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
23 Februari 2011[a&h]	Sigma	Rp	30	8,6	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
23 Februari 2011[a&h]	Sigma	US$	0,002	0,0001	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	6,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)

Fasilitas utang bank yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

[a] Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian deviden, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan dan entitas anak telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut.

[b] Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Desember 2012, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

[c] Pada bulan Januari 2012, periode ketersediaan fasilitas dari BCA dan Bank Mandiri telah berakhir.

[d] Sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia ("Ericsson Indonesia") dan Ericsson AB (Catatan 41a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian EKN-Backed Facility ("fasilitas") dengan ABN Amro Bank N.V. cabang Stockholm (sebagai "*the original lender*"), Standard Chartered Bank (sebagai "*the original lender*", *"the arranger*", "*the facility agent*" dan "*the EKN agent*"), ABN Amro Bank N.V., Hong Kong (sebagai "*the arranger*") untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Ericsson. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar US$117 juta, US$106 juta, dan US$95juta. Periode ketersediaan fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing berakhir pada Juli 2010, Maret 2011, dan November 2011. Pada bulan Oktober 2011, EKN setuju untuk mengurangi premi dari fasilitas yang tak terpakai sebesar US$3 juta melalui pengembalian kas.

[e] Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NSW-Fujitsu, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, *the international arm of Japan Finance Corporation* untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Konsorsium NSW-Fujitsu. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US$36 juta dan US$24 juta.

[f] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

[g] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 10 Oktober 2012.

[h] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 1 Oktober 2012.

[i] Pada tahun 2012, Sigma dan Telkomsel telah melunasi saldo utang dan fasilitas tidak diperpanjang.

[j] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 16 Oktober 2012, Indonusa diharuskan melunasi pinjaman pada 24 April 2013.

[k] Sampai dengan 31 Desember 2012, fasilitas pinjaman dari bank sindikasi belum dipakai oleh DMT.

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	2012	2011
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	15.340	13.430
Metra*	66	33
GSD*	31	-
Infomedia*	-	8
Jumlah	**15.437**	**13.471**

	2012	2011
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) komprehensif entitas anak:		
Telkomsel	5.499	4.488
Metra*	14	16
GSD*	(1)	-
Infomedia*	-	1
Jumlah	**5.512**	**4.505**

* Jumlah ini mencerminkan bagian pihak ketiga atas kepemilikan di entitas anak pada Metra, Infomedia dan GSD.

22. MODAL SAHAM

	2012		
Keterangan	**Jumlah saham**	**Persentase kepemilikan**	**Jumlah modal disetor**
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	0
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	53,90	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	2.197.688.216	11,48	549
Direksi (Catatan 1b):			
Indra Utoyo	5.508	-	0
Priyantono Rudito	108	-	0
Sukardi Silalahi	108	-	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.630.904.168	34,62	1.658
Jumlah	19.149.068.820	100,00	4.787
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 24)	1.010.930.460	-	253
Jumlah	**20.159.999.280**	**100,00**	**5.040**

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Keterangan	2011		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	53,24	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	2.952.965.536	15,23	738
Direksi (Catatan 1b):			
Ermady Dahlan	17.604	-	0
Indra Utoyo	5.508	-	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.112.879.960	31,53	1.529
Jumlah	19.386.339.320	100,00	4.847
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 24)	773.659.960	-	193
Jumlah	**20.159.999.280**	**100,00**	**5.040**

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2012	2011
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Jumlah	**1.073**	**1.073**

24. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Tahap	Dasar	Jangka waktu	Maksimum pembelian	
			Lembar	Nilai
I	RUPSLB	21 Desember 2005 - 20 Juni 2007	1.007.999.964	Rp5.250
II	RUPST	29 Juni 2007 - 28 Desember 2008	215.000.000	Rp2.000
III	RUPST	20 Juni 2008 - 20 Desember 2009	339.443.313	Rp3.000
-	Bapepam-LK	13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	4.031.999.856	Rp3.000
IV	RUPST	19 Mei 2011 - 20 November 2012	645.161.290	Rp5.000

Mutasi saham yang dibeli kembali akibat dari program pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

	2012			2011		
	Jumlah Saham	%	Rp	Jumlah Saham	%	Rp
Saldo awal	773.659.960	3,84	6.323	490.574.500	2,43	4.264
Jumlah saham yang dibeli kembali	237.270.500	1,17	1.744	283.085.460	1,41	2.059
Saldo akhir	**1.010.930.460**	**5,01**	**8.067**	**773.659.960**	**3,84**	**6.323**

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

25. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI LAINNYA ENTITAS SEPENGENDALI

Saldo akun ini berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537 miliar.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan telah menerima pembayaran dengan total masing-masing sejumlah Rp478 miliar terkait dengan kompensasi atas terminasi dini dari hak eksklusif yang dibayarkan tahunan oleh Pemerintah sejak 2005 sampai dengan 2008 masing-masing sebesar Rp90 miliar dan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp118 miliar. Perusahaan mencatat jumlah ini sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” sebagai bagian dari ekuitas. Jumlah ini dicatat sebagai bagian dari ekuitas karena Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali atas Perusahaan.

26. PENDAPATAN

	2012	2011
Pendapatan Telepon		
Selular		
Pendapatan pemakaian	29.477	27.189
Pendapatan abonemen bulanan	696	571
Fitur	558	838
	30.731	28.598
Tidak bergerak		
Pendapatan pemakaian	7.323	8.114
Pendapatan abonemen bulanan	2.805	3.004
Call center	228	198
Pendapatan instalasi	112	135
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	194	168
	10.662	11.619
Jumlah Pendapatan Telepon	**41.393**	**40.217**
Pendapatan Interkoneksi		
Interkoneksi domestik dan *transit*	2.618	2.071
Interkoneksi internasional	1.655	1.438
Jumlah Pendapatan Interkoneksi	**4.273**	**3.509**
Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika		
Internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika	14.857	10.740
Short Messaging Service (“SMS”)	12.631	13.093
VoIP	81	53
e-Business	55	38
Jumlah Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika	**27.624**	**23.924**
Pendapatan Jaringan		
Sewa sirkit	824	911
Sewa *transponder* satelit	384	390
Jumlah Pendapatan Jaringan	**1.208**	**1.301**
Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya		
Customer Premise Equipment (“CPE”) dan terminal	1.046	739
Pendapatan TV berbayar	405	259
Pendapatan sewa	401	219
Directory assistance	295	349
Kompensasi KPU	253	430
Penjualan modem	35	163
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	210	143
Jumlah Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya	**2.645**	**2.302**
JUMLAH PENDAPATAN	**77.143**	**71.253**

26. PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari transaksi keagenan pada tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Pendapatan bruto	15.059	11.948
Kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah	(202)	(1.208)
Pendapatan neto	14.857	10.740

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

27. BEBAN KARYAWAN

	2012	2011
Cuti, insentif dan tunjangan lainnya	3.400	2.814
Gaji dan tunjangan	3.257	3.001
PPh karyawan	1.022	1.043
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 34)	789	501
Program Pendi (Catatan 14)	699	517
Perumahan	200	197
Beban LSA (Catatan 35)	121	96
Beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih (Catatan 36)	90	199
Asuransi	83	70
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34)	65	65
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	60	52
Jumlah	**9.786**	**8.555**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

28. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

	2012	2011
Operasi dan pemeliharaan	9.012	9.191
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 41c.i dan 41c.iii)	3.002	2.846
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.452	1.235
Listrik, gas dan air	879	836
Beban pokok penjualan telepon, *set top box*, kartu SIM dan RUIM	687	879
Asuransi	671	431
Sewa sirkit dan CPE	407	406
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	293	291
Beban pokok jasa teknologi informatika	222	144
Beban perjalanan	57	54
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	121	59
Jumlah	**16.803**	**16.372**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2012	2011
Provisi penurunan nilai piutang dan persediaan usang (Catatan 5d dan 6)	915	883
Beban umum	527	326
Beban penagihan	341	327
Perjalanan	259	256
Pelatihan, pendidikan dan rekruitmen	259	229
Jasa profesional	187	235
Sumbangan sosial	129	290
Rapat	105	86
Keamanan dan *screening*	62	97
Alat tulis dan cetakan	55	53
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	197	153
Jumlah	**3.036**	**2.935**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

30. BEBAN INTERKONEKSI

	2012	2011
Interkoneksi domestik dan *transit*	3.464	2.414
Interkoneksi internasional	1.203	1.141
Jumlah	**4.667**	**3.555**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

31. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	2012	2011
Entitas anak		
Bea masuk	10	-
PPh badan	18	23
PPh		
Pasal 23 - Penyerahan jasa	9	8
Pajak Pertambahan Nilai (”PPN”)	399	340
	436	**371**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak dibayar di muka

	2012	2011
Perusahaan		
PPN	-	43
Entitas anak		
PPh badan	34	610
PPN	336	131
PPh		
Pasal 23 - Penyerahan jasa	2	3
	372	744
	372	**787**

c. Utang pajak

	2012	2011
Perusahaan		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	6	4
Pasal 21 - PPh pribadi	21	68
Pasal 23 - Penyerahan jasa	10	11
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	30	40
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	3	1
Pasal 29 - PPh badan	198	1
PPN	374	-
	642	125
Entitas anak		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	37	29
Pasal 21 - PPh pribadi	60	75
Pasal 23 - Penyerahan jasa	32	25
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	378	6
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	18	10
Pasal 29 - PPh badan	674	682
PPN	3	87
	1.202	914
	1.844	**1.039**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Kini		
Perusahaan	878	777
Entitas anak	5.750	4.896
	6.628	5.673
Tangguhan		
Perusahaan	(501)	25
Entitas anak	(261)	(311)
	(762)	(286)
	5.866	**5.387**

e. PPh badan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (perhitungan PPh badan dengan menggunakan dasar konsolidasi tidak berlaku di Indonesia).

Rekonsiliasi antara hasil perkalian laba akuntansi konsolidasian dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	24.228	20.857
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku	4.846	4.171
Bagian perusahaan atas laba entitas anak sebelum pajak penghasilan dan pembalikan eliminasi konsolidasi entitas anak	(2.217)	(1.831)
Dampak pajak pada:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	177	235
Penghasilan tidak kena pajak	(2.117)	(1.785)
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final dan beban PPh final	(32)	(29)
Lain-lain	(280)	41
Beban PPh entitas anak	5.489	4.585
Jumlah beban pajak penghasilan	**5.866**	**5.387**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	24.228	20.857
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	10.536	8.925
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	34.764	29.782
Dikurangi: laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(21.616)	(18.082)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	13.148	11.700
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(344)	(462)
	12.804	**11.238**
Perbedaan temporer:		
Penyisihan beban pensiun dini	699	-
Penyisihan beban karyawan	537	(17)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	291	45
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	246	563
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan penghapusbukuan piutang	43	139
Pembayaran nilai perolehan kombinasi bisnis yang ditangguhkan	-	(106)
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(424)	(479)
Sewa pembiayaan	(196)	19
Pendapatan instalasi tangguhan	(72)	(86)
Penyisihan lain-lain	(19)	3
Jumlah perbedaan temporer	**1.105**	**81**
Perbedaan tetap:		
Manfaat kerja tidak dapat dibebankan	218	194
Sumbangan	215	293
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	90	199
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(10.583)	(8.925)
Lain-lain	360	488
Jumlah perbedaan tetap	**(9.700)**	**(7.751)**
Laba kena pajak	**4.209**	**3.568**
Beban pajak kini	842	714
Beban pajak final	36	63
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	878	777
Beban pajak kini - entitas anak	5.750	4.896
Jumlah beban pajak penghasilan kini	**6.628**	**5.673**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. (lanjutan)

Dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 diatur pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5% dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk tahun fiskal 2012 dan 2011. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk tahun fiskal 2012 dan 2011.

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan pajak penghasilan badan di atas dalam SPT Tahunan pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2012 kepada kantor pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jumlah PPh badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

f. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) melakukan pemeriksaan pajak terhadap pemungutan atas PPh pihak ketiga (*withholding tax)* untuk tahun fiskal 2008 dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan masih dalam proses.

(ii) Telkomsel

Pada tanggal 25 Februari 2009, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (“MA”), atas keputusan Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Telkomsel untuk *withholding tax* untuk tahun fiskal 2002 sebesar Rp115 miliar. Pada tanggal 3 April 2009, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Berdasarkan keputusan MA yang diterima pada bulan November 2012, MA memutuskan untuk menolak permohonan dari Otoritas Pajak. Keputusan MA secara legal memenangkan Telkomsel.

Pada tanggal 10 Agustus 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (“MA”) atas keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 24 September 2010 Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan uji materi tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 21 April 2010, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak tentang pengajuan banding Otoritas Pajak kepada MA terkait putusan Pengadilan Pajak mengenai pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8 miliar). Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, kontra memori tersebut masih dalam proses.

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Pada tahun 2010, Telkomsel diperiksa atas kurang bayar PPh badan, *withholding tax*, dan PPN, untuk tahun fiskal 2006 sebesar Rp212 miliar (termasuk denda Rp69 miliar). Pada bulan November 2010, Telkomsel membayar kurang bayar dan pada bulan Desember 2010, Telkomsel mengajukan keberatan kepada DJP atas kurang bayar potongan PPh dan PPN sebesar Rp116 miliar (termasuk denda Rp38 miliar) dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Bagian yang diterima sebesar Rp50 miliar telah diakui dan dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2008 sementara bagian sisanya sebesar Rp46 miliar dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2010. Selanjutnya pada September 2011, Otoritas Pajak menolak keberatan Telkomsel. Pada Desember 2011, Telkomsel mengajukan keberataan ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses.

Pada bulan Oktober dan November 2010, Telkomsel menerima STP atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp229 miliar (termasuk denda Rp11 miliar). STP tersebut telah dibayar pada bulan November dan Desember 2010. Pembayaran pokok sebesar Rp218 miliar diperhitungkan sebagai pembayaran pajak di muka dalam menghitung PPh badan tahun 2010 yang pada akhirnya menghasilkan lebih bayar Rp599,87 miliar. Melalui suratnya di bulan November 2010, Telkomsel meminta Otoritas Pajak untuk membatalkan STP tersebut. Selanjutnya, pada bulan April 2011, Telkomsel menerima STP dari Otoritas Pajak yang merevisi STP yang diterbitkan pada bulan Oktober dan November 2010 tersebut di atas dengan tambahan denda sebesar Rp4,3 miliar.

Pada tanggal 5 Mei 2011, Otoritas Pajak menolak permohonan Telkomsel untuk membatalkan STP-STP tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2011, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Pengadilan Pajak. Kelebihan bayar dan denda diakui sebagai tagihan restitusi pajak. Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak pada bulan Maret 2012, Pengadilan Pajak menyetujui pembatalan STP-STP tersebut. Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda sebesar Rp15,7 miliar. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada MA. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, uji materi tersebut masih dalam proses.

Pada bulan Agustus 2011, Telkomsel diperiksa atas kurang bayar *withholding tax* dan PPN, untuk tahun fiskal 2008 sebesar Rp235 miliar. Pada bulan September 2011, Telkomsel membayar kurang bayar dan pada bulan November 2011, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp232 miliar (termasuk denda sebesar Rp81,9 miliar) dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Sisanya sebesar Rp3 miliar dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2011. Selanjutnya pada bulan Agustus 2012, Otoritas Pajak menerima keberatan Telkomsel atas kurang bayar PPN tersebut dan mengembalikan seluruh tagihan tersebut.

Pada tanggal 12 Maret 2012, Telkomsel menerima Surat Ketetapan sebagai hasil dari pemeriksaaan pajak untuk tahun fiskal 2010 oleh Otoritas Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Telkomsel kelebihan bayar PPh Badan dan kurang bayar PPN masing-masing sebesar Rp597,4 miliar dan Rp302,7 miliar (termasuk denda Rp73,3 miliar). Telkomsel menerima hasil pemeriksaan lebih bayar PPh Badan dan kurang bayar PPN sebesar Rp12,1 miliar (termasuk denda Rp6,3 miliar). Bagian yang diterima dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012. Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Otoritas Pajak belum menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan.

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 5 April 2012, Telkomsel menerima pengembalian lebih bayar PPh Badan untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp294,7 miliar, bersih setelah kurang bayar PPN.

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	Direalisasi ke ekuitas	31 Desember 2012
Perusahaan				
Aset pajak tangguhan:				
Provisi penurunan nilai piutang	334	(58)	-	276
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	86	43	-	129
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	30	(8)	-	22
Penyisihan beban pendi	-	140	-	140
Penyisihan beban karyawan	82	91	-	173
Pendapatan instalasi tangguhan	85	(31)	-	54
Jumlah aset pajak tangguhan	617	177	-	794
Liabilitas pajak tangguhan:				
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.929)	348	-	(1.581)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(21)	7	-	(14)
Sewa pembiayaan	(33)	(31)	-	(64)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.983)	324	-	(1.659)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(1.366)	501	-	(865)
Telkomsel				
Aset pajak tangguhan:				
Provisi penurunan nilai piutang	64	53	-	117
Penyisihan beban karyawan	151	56	-	207
Pengakuan bunga berdasarkan perjanjian KPU	-	6	-	6
Jumlah aset pajak tangguhan	215	115	-	330
Liabilitas pajak tangguhan:				
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.529)	166	-	(2.363)
Aset takberwujud	(49)	5	-	(44)
Sewa pembiayaan	-	(22)	-	(22)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(2.578)	149	-	(2.429)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(2.363)	264	-	(2.099)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(65)	(30)	-	(95)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(3.794)**	**735**	**-**	**(3.059)**
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**67**	**27**	**(5)**	**89**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2010	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	31 Desember 2011
Perusahaan			
Aset pajak tangguhan:			
Nilai imbalan kombinasi bisnis yang ditangguhkan	27	(27)	-
Provisi penurunan nilai piutang	287	47	334
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	84	2	86
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	26	4	30
Penyisihan beban karyawan	86	(4)	82
Pendapatan sambungan tangguhan	106	(21)	85
Jumlah aset pajak tangguhan	616	1	617
Liabilitas pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.893)	(36)	(1.929)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(25)	4	(21)
Sewa pembiayaan	(39)	6	(33)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.957)	(26)	(1.983)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(1.341)	(25)	(1.366)
Telkomsel			
Aset pajak tangguhan:			
Provisi penurunan nilai piutang	50	14	64
Penyisihan beban karyawan	109	42	151
Jumlah aset pajak tangguhan	159	56	215
Liabilitas pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.783)	254	(2.529)
Aset takberwujud	(48)	(1)	(49)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(2.831)	253	(2.578)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(2.672)	309	(2.363)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(61)	(4)	(65)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(4.074)**	**280**	**(3.794)**
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**62**	**5**	**67**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp20.317 miliar dan Rp16.505 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

h. Administrasi

Sejak tahun 2008 hingga 2011, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008. Berdasarkan data tersebut, maka untuk tahun 2012 Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anak menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam peraturan. Peraturan tersebut berlaku efektif sejak 1 Juli 2012 dan Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan peraturan tersebut.

Tidak ada pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk tahun fiskal 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, dan 2010 bagi Perusahaan. Pemeriksaan pajak telah diselesaikan untuk tahun-tahun fiskal lainnya kecuali untuk tahun fiskal 2011.

Perusahaan mendapatkan sertifikat dari DJP berupa pembebasan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2007, 2008, 2009, dan 2010, kecuali jika Perusahaan melaporkan lebih bayar PPh Badan, maka pemeriksaan akan dilakukan.

32. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp12.850 dan Rp10.965 dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 19.202.263.101 dan 19.591.872.544 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Laba per saham dasar dan dilusian masing-masing sejumlah Rp669,19 dan Rp559,67 (dalam jumlah penuh) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011.

33. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 21 tertanggal 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2010 sebesar Rp6.345 miliar atau Rp322,59 per lembar saham (Rp526 miliar atau Rp26,75 per lembar saham dibagikan sebagai dividen kas interim di bulan Desember 2010).

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 14 tertanggal 11 Mei 2012, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk 2011 sebesar Rp6.031 miliar dan Rp1.096 miliar. Pada tanggal 22 Juni 2012, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas dan spesial dividen kas sebesar Rp7.127 miliar.

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

	2012	2011
Beban manfaat pensiun dibayar di muka		
Perusahaan	1.031	990
Infomedia	1	1
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	**1.032**	**991**
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya		
Pensiun		
Perusahaan	1.373	1.067
Telkomsel	419	264
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun	1.792	1.331
Imbalan pasca kerja lainnya	310	273
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	146	111
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	**2.248**	**1.715**
Beban pensiun berkala bersih		
Perusahaan	592	384
Telkomsel	197	117
Infomedia	0	0
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	**789**	**501**
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 27)	**65**	**65**
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	**38**	**30**

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom (“Dapen”). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp186 miliar dan Rp187 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 untuk program pensiun manfaat pasti:

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

	2012	2011
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	16.188	11.924
Beban jasa	372	307
Beban bunga	1.151	1.105
Kontribusi peserta program pensiun	44	44
Rugi aktuaria	2.123	3.391
Perkiraan pembayaran pensiun	(629)	(583)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	19.249	16.188
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	16.597	15.098
Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun	1.517	1.441
Kontribusi pemberi kerja	186	187
Kontribusi peserta program pensiun	44	44
Laba aktuaria	507	410
Perkiraan pembayaran pensiun	(629)	(583)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	18.222	16.597
Status pendanaan	(1.027)	409
Beban jasa lalu yang belum diakui	217	356
Rugi aktuaria bersih yang belum diakui	1.841	225
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	**1.031**	**990**

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp2.024 miliar dan Rp1.851 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Perusahaan memperkirakan kontribusi pemberi kerja sebesar Rp179 miliar untuk program pensiun manfaat pasti di tahun 2013.

Mutasi beban manfaat pensiun dibayar di muka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Beban manfaat pensiun dibayar di muka pada awal tahun	(990)	(743)
Beban (pendapatan) pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	133	(62)
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	12	2
Kontribusi pemberi kerja	(186)	(187)
Beban manfaat pensiun dibayar di muka pada akhir tahun	**(1.031)**	**(990)**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, aset program pensiun sebagian besar terdiri dari:

	2012	2011
Surat berharga ekuitas Indonesia	21,82%	22,13%
Obligasi pemerintah	37,96%	39,67%
Obligasi korporasi	16,91%	17,37%
Lainnya	23,31%	20,83%
Jumlah	**100,00%**	**100,00%**

Aset program pensiun juga termasuk penempatan pada saham Seri B dengan nilai wajar Rp223 miliar dan Rp234 miliar yang merupakan 1,23% dan 1,41% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan obligasi yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar Rp159 miliar dan Rp156 miliar yang merupakan 0,87% dan 0,94% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34b dan 34c) dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, pada laporan tertanggal 28 Februari 2013 dan 7 Maret 2012 oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan *Towers Watson* ("TW") (dahulu *Watson Wyatt Worldwide*). Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Tingkat diskonto	6,25%	7,25%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	8,25%	9,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	8%

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Beban jasa	372	307
Beban bunga	1.151	1.105
Perkiraan pengembalian aset atas program pensiun	(1.517)	(1.441)
Amortisasi beban jasa lalu	139	139
Laba aktuaria yang diakui	-	(170)
Beban (pendapatan) pensiun berkala bersih	145	(60)
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(12)	(2)
Beban (pendapatan) pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak (Catatan 27)	**133**	**(62)**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

Informasi historis:

	2012	2011	2010	2009	2008
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(19.249)	(16.188)	(11.924)	(10.131)	(9.100)
Nilai wajar aset program	18.222	16.597	15.098	12.300	8.713
(Defisit) surplus pada program	**(1.027)**	**409**	**3.174**	**2.169**	**(387)**
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	(1)	(156)	(314)	(318)	(1.308)
Penyesuaian yang timbul pada aset program	(507)	(410)	(1.604)	(2.028)	1.774

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun

1. Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp5 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dengan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan liabilitas Perusahaan sebesar Rp699 miliar yang akan diamortisasi selama 9,9 tahun hingga 2016. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan liabilitas Perusahaan sebesar Rp435 miliar yang akan diamortisasi selama 8,63 tahun hingga 2018.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun MPS dan MPP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	2011
Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun		
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	2.440	2.096
Beban jasa	104	89
Beban bunga	173	194
(Laba) rugi aktuaria	(128)	244
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(153)	(183)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir tahun	2.436	2.440
Beban jasa lalu yang belum diakui	(639)	(772)
Rugi aktuaria bersih yang belum diakui	(424)	(601)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	**1.373**	**1.067**

Mutasi liabilitas diestimasi manfaat pensiun selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	1.067	804
Beban pensiun berkala bersih	459	446
Kontribusi pemberi kerja	(153)	(183)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	**1.373**	**1.067**

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Beban jasa	104	89
Beban bunga	173	194
Amortisasi beban jasa lalu	133	133
Rugi aktuaria yang diakui	49	30
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	**459**	**446**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Informasi historis:

	2012	2011	2010	2009	2008
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(2.436)	(2.440)	(2.096)	(1.622)	(417)
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-
Defisit pada program	**(2.436)**	**(2.440)**	**(2.096)**	**(1.622)**	**(417)**
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	(72)	(30)	23	309	(3)

2. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya berjumlah Rp45 miliar dan Rp2 miliar masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011.

Rekonsiliasi antara program pensiun yang tidak didanai dan jumlah liabilitas yang disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Liabilitas manfaat pensiun	(1.472)	(1.237)
Nilai wajar aset program pensiun	666	458
Status pendanaan	(806)	(779)
Komponen yang tidak diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian:		
Beban jasa lalu yang belum diakui	0	0
Rugi aktuaria bersih yang belum diakui	387	515
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun	**(419)**	**(264)**

Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Beban jasa	119	67
Beban bunga	83	59
Perkiraan pengembalian aset program pensiun	(31)	(22)
Amortisasi beban jasa lalu	1	1
Rugi aktuaria yang diakui	25	12
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	**197**	**117**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

2. Telkomsel (lanjutan)

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dengan laporan tertanggal masing-masing 12 Februari 2013 dan 24 Februari 2012 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Tingkat diskonto	6%	6,75%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	6%	6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,5%	8%

Informasi historis:

	2012	2011	2010	2009	2008
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(1.472)	(1.237)	(663)	(399)	(284)
Nilai wajar aset program	666	458	246	154	129
Defisit pada program	**(806)**	**(779)**	**(417)**	**(245)**	**(155)**
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	71	(44)	9	(17)	(20)
Penyesuaian yang timbul pada aset program	(139)	(192)	(49)	25	23

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

Mutasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	2011
Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada awal tahun	273	241
Beban imbalan pasca kerja lainnya	65	65
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(28)	(33)
Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun	**310**	**273**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	2011
Beban jasa	10	9
Beban bunga	32	37
Amortisasi beban jasa lalu	7	7
Rugi aktuaria yang diakui	16	12
Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih (Catatan 27)	**65**	**65**

Informasi historis:

	2012	2011	2010	2009	2008
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(508)	(462)	(409)	(336)	(277)
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-
Defisit pada program	**(508)**	**(462)**	**(409)**	**(336)**	**(277)**
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	5	(13)	11	(1)	(10)

d. Kewajiban pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp146 miliar dan Rp111 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp38 miliar dan Rp30 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

35. PENGHARGAAN MASA KERJA ("*LONG SERVICE AWARDS*" ATAU "LSA")

Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp347 miliar dan Rp287 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp121 miliar dan Rp96 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 27).

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yakes.

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Kontribusi pembayaran Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp18 miliar dan Rp19 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan mutasi liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	2011
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	10.547	8.741
Beban jasa	56	43
Beban bunga	755	818
Rugi aktuaria	2.074	1.208
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(270)	(263)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	13.162	10.547
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	8.986	8.005
Perkiraan pengembalian aset program	720	662
Kontribusi pemberi kerja	300	361
Laba aktuaria	177	222
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(270)	(264)
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	9.913	8.986
Status pendanaan	(3.249)	(1.561)
Rugi aktuaria bersih yang belum diakui	2.570	673
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	**(679)**	**(888)**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, aset program sebagian besar terdiri dari:

	2012	2011
Reksadana	81,00%	84,64%
Deposito berjangka	10,72%	8,38%
Saham bursa	7,61%	6,79%
Lainnya	0,67%	0,19%
Total aset	**100,00%**	**100,00%**

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Aset program Yakes juga termasuk penempatan pada saham Seri B dengan nilai wajar sebesar Rp35 miliar dan Rp24 miliar yang merupakan 0,35% dan 0,27% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp896 miliar dan Rp884 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011. Perusahaan memperkirakan kontribusi pemberi kerja sebesar Rp300 miliar untuk program imbalan kesehatan pasca kerja di tahun 2013.

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Beban jasa	56	43
Beban bunga	755	818
Perkiraan pengembalian atas aset program	(720)	(662)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih	91	199
Jumlah yang dibebankan ke entitas anak berdasarkan perjanjian	(1)	(0)
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih dikurangi jumlah yang dibebankan ke entitas anak (Catatan 27)	**90**	**199**

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	888	1.050
Beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak (Catatan 27)	90	199
Jumlah yang dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	1	0
Kontribusi pemberi kerja	(300)	(361)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	**679**	**888**

Penilaian aktuaria untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 pada laporan masing-masing tertanggal 28 Februari 2013 dan 7 Maret 2012 oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

	2012	2011
Tingkat diskonto	6,25%	7,25%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program	7,50%	8,00%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7%	7%
Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan	7%	7%
Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir	2013	2012

Perubahan 1% pada perkiraan pertumbuhan beban kesehatan akan memberikan dampak sebagai berikut:

	Peningkatan 1%	Penurunan 1 %
Beban jasa dan beban bunga	342	(256)
Akumulasi liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	2.615	(2.085)

Informasi historis:

	2012	2011	2010	2009	2008
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(13.162)	(10.547)	(8.741)	(7.166)	(5.855)
Nilai wajar aset program	9.913	8.986	8.005	6.022	4.018
Defisit pada program	**(3.249)**	**(1.561)**	**(736)**	**(1.144)**	**(1.837)**
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	74	(64)	(231)	(722)	(479)
Penyesuaian yang timbul pada aset program	(177)	(222)	(691)	(756)	579

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Pemerintah : Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Beban bunga dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sepengendali	Beban operasi, pembelian aset tetap, jasa pembangunan dan instalasi, beban asuransi, pendapatan bunga, beban bunga, investasi pada instrumen keuangan

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, beban interkoneksi, beban atas penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasi dan pemeliharaan, pendapatan layanan sirkit langganan, pendapatan penggunaan transponder satelit, beban pemakaian sistem jaringan komunikasi data, dan pendapatan sewa
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Entitas sepengendali	Pendapatan jaringan, beban pemakaian sistem jaringan komunikasi data, dan beban layanan sirkit langganan
Indosat Mega Media	Entitas sepengendali	Pendapatan jaringan
PT Sistelindo Mitralintas	Entitas sepengendali	Pendapatan jaringan
CSM	Entitas asosiasi	Pendapatan penggunaan transponder satelit, pendapatan layanan sirkit langganan, beban sewa transmisi
Patrakom	Entitas asosiasi	Pendapatan penggunaan transponder satelit pendapatan layanan sirkit langganan, beban sewa transmisi
PSN	Entitas asosiasi	Pendapatan penggunaan transponder satelit pendapatan layanan sirkit langganan, beban sewa jaringan transmisi, pendapatan interkoneksi, dan beban interkoneksi
PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI")	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi aset tetap
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek")	Entitas sepengendali	Beban asuransi karyawan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	Entitas sepengendali	Beban listrik
PT Pos Indonesia	Entitas sepengendali	Biaya kartu SIM
Bank milik negara	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
BNI	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
Bank Mandiri	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
BRI	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
BTN	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
Bahana	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual, obligasi dan wesel bayar
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, bagi hasil pendapatan PBH
PT Sandhy Putra Makmur ("SPM")	Entitas sepengendali	Beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas sepengendali	Beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban penagihan, dan beban jasa-jasa lainnya, pendapatan penjualan kartu sim dan vaucer prabayar
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas sepengendali	Pendapatan layanan sirkit langganan Pembelian aset tetap, beban instalasi dan beban pemeliharaan
Direksi dan Komisaris	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Yakes	Entitas di bawah pengaruh Signifikan	Beban pengobatan

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Entitas sepengendali				
Kisel	2.351	3,05	2.347	3,29
Indosat	1.033	1,34	857	1,20
Lintasarta	85	0,11	93	0,13
Sub jumlah	3.469	4,5	3.297	4,62
Entitas asosiasi				
Patrakom	80	0,10	67	0,09
CSM	47	0,06	57	0,08
Sub jumlah	127	0,16	124	0,17
Lain-lain	30	0,04	28	0,04
Jumlah	**3.626**	**4,70**	**3.449**	**4,83**

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sepengendali				
Indosat	1.004	1,94	814	1,63
Kisel	825	1,59	745	1,49
Kopegtel	817	1,58	956	1,91
PLN	660	1,27	1.243	2,49
Jasindo	370	0,71	401	0,80
Yakes	150	0,29	121	0,24
PT Pos Indonesia	51	0,10	54	0,11
Jamsostek	36	0,07	33	0,07
SPM	25	0,05	91	0,18
Sub jumlah	3.938	7,6	4.458	8,92
Entitas asosiasi				
PSN	165	0,32	170	0,34
CSM	100	0,19	107	0,21
Patrakom	73	0,14	77	0,15
Sub jumlah	338	0,65	354	0,70
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	34	0,07	47	0,09
Jumlah	**4.310**	**8,32**	**4.859**	**9,71**

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	366	61,41	320	58,61

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	82	3,99	143	8,74
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	424	20,63	621	37,94
Jumlah	**506**	**24,62**	**764**	**46,68**

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
PEMBELIAN ASET TETAP (**Catatan 10**)				
Entitas sepengendali				
Kopegtel	237	1,60	183	1,25
BUMN	98	0,66	116	0,79
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	47	0,32	23	0,15
Jumlah	**382**	**2,58**	**322**	**2,19**

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a.Kas dan setara kas (**Catatan 3**)	**8.992**	**8,07**	**7.700**	**7,47**
b. Aset keuangan lancar lainnya (**Catatan 4**)	**1.888**	**1,69**	**287**	**0,27**
c. Piutang usaha - bersih (**Catatan 5**)	**701**	**0,63**	**406**	**0,39**
d. Uang muka dan beban dibayar di muka (**Catatan 7**)				
Lain-lain	18	0,02	27	0,03
e. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (**Catatan 11**)				
Entitas sepengendali				
Bank Mandiri	13	0,01	-	-
BNI	-	-	92	0,09
Lain-lain	1	-	5	0,00
Jumlah	**14**	**0,01**	**97**	**0,09**

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 13)				
Entitas sepengendali				
INTI	197	0,44	66	0,16
Kopegtel	115	0,26	92	0,22
Yakes	39	0,09	35	0,08
Indosat	31	0,07	52	0,12
BUMN	3	0,01	41	0,10
Sub jumlah	385	0,87	286	0,68
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	47	0,11	141	0,34
Jumlah	**432**	**0,98**	**427**	**1,02**
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 14)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	17	0,04	22	0,05
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	72	0,16	50	0,12
Jumlah	**89**	**0,20**	**72**	**0,17**
h. Uang muka pelanggan dan pemasok				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	**64**	**0,14**	**151**	**0,36**
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 16)				
Entitas sepengendali				
BRI	**-**	-	-	-
Bank milik negara	5	0,01	7	0,02
Jumlah	**5**	**0,01**	**7**	**0,02**
j. Pinjaman penerusan (Catatan 18)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	**1.987**	**4,48**	**2.284**	**5,43**
k. Obligasi dan wesel bayar (Catatan 19)				
Entitas sepengendali				
Bahana	**8**	**0,02**	**107**	**0,25**
l. Utang bank jangka panjang (Catatan 20)				
Entitas sepengendali				
BRI	4.630	10,43	2.131	5,07
BNI	2.349	5,29	2.273	5,40
Bank Mandiri	1.417	3,19	2.110	5,02
Jumlah	**8.396**	**18,91**	**6.514**	**15,49**

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 18).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012, dan dapat diberlakukan sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006 (Catatan 40). Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan entitas anak, yaitu PT Indosat Mega Media, Lintasarta, dan PT Sistelindo Mitralintas. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

iii. Lain-lain

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan entitas asosiasi yaitu CSM, Patrakom, PSN, dan Gratika untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi sirkit langganan Perusahaan.

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PSN untuk sewa jaringan transmisi PSN. Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 14 Maret 2001, jangka waktu sewa minimum adalah 2 tahun sejak pengoperasian jaringan transmisi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang hingga 29 Maret 2013.

Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel") adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang.

d. Remunerasi personil manajemen kunci

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1b.

Perusahaan dan entitas anak memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris. Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2012		2011	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	252	0,49%	181	0,36%
Dewan Komisaris	61	0,12%	57	0,11%

38. INFORMASI SEGMEN

Pada tahun 2012, Manajemen mengubah cara mengelola portofolio bisnis perusahaan dari pengelolaan mengunakan pendekatan berbasis produk menjadi pendekatan berbasis kelompok pelanggan, sebagai bagian dari strategi Perusahaan untuk menyediakan layanan *one-stop solution* kepada para pelanggan. Hal ini diikuti dengan perubahan struktur organisasi untuk mengakomodasi pengambilan keputusan dan melakukan penilaian kinerja berdasarkan pendekatan berbasis kelompok pelanggan. Perubahan Manajemen dalam cara mengelola bisnis Perusahaan dan perubahan struktur organisasi Perusahaan tersebut menyebabkan Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional Perusahaan mengubah penyajian informasi segmen Perusahaan dan entitas anak dari informasi segmen yang disajikan sebelumnya dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Informasi segmen dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian informasi segmen pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

38. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak memiliki empat segmen operasi utama, yaitu perorangan, perumahan, korporat, dan lain-lain. Segmen perorangan menyediakan jasa telekomunikasi selular bergerak dan nirkabel tidak bergerak kepada pelanggan perorangan. Segmen perumahan menyediakan jasa telekomunikasi telepon tidak bergerak, TV berlangganan, data dan internet kepada pelanggan perumahan. Segmen korporat menyediakan jasa telekomunikasi, diantaranya interkoneksi, sirkit langganan, satelit, VSAT, *contact center, broadband access*, usaha layanan informasi teknologi, data dan internet kepada perusahaan dan institusi. Segmen operasi yang tidak diawasi secara terpisah oleh pengambil keputusan operasional disajikan sebagai ”Lain-lain" yang menyediakan jasa pengelolaan gedung.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai pasar.

	2012						
	Korporat	Perumahan	Perorangan	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan							
Pendapatan eksternal	15.579	7.360	54.087	117	77.143	-	77.143
Pendapatan antar segmen	6.468	2.223	2.188	648	11.527	(11.527)	-
Jumlah pendapatan segmen	22.047	9.583	56.275	765	88.670	(11.527)	77.143
Beban							
Beban eksternal	(13.961)	(5.646)	(31.169)	(669)	(51.445)	-	(51.445)
Beban antar segmen	(4.015)	(2.293)	(5.203)	(16)	(11.527)	11.527	-
Jumlah beban segmen	(17.976)	(7.939)	(36.372)	(685)	(62.972)	11.527	(51.445)
Hasil segmen	4.071	1.644	19.903	80	25.698	-	25.698
Informasi lain							
Aset segmen	30.458	17.780	67.216	611	116.065	(4.971)	111.094
Penyertaan jangka panjang	254	-	21	-	275	-	275
Jumlah aset konsolidasian							111.369
Jumlah liabilitas konsolidasian	(17.143)	(11.478)	(20.414)	(327)	(49.362)	4.971	(44.391)
Pembelian barang modal	(4.375)	(2.083)	(10.664)	(150)	(17.272)	-	(17.272)
Beban penyusutan dan amortisasi	(2.079)	(1.168)	(10.940)	(22)	(14.209)	-	(14.209)
Penurunan nilai aset	-	-	(247)	-	(247)	-	(247)
Provisi penurunan nilai piutang dan persediaan usang	(92)	(505)	(318)	-	(915)	-	(915)

38. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	2011						
	Korporat	Perumahan	Perorangan	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan							
Pendapatan eksternal	14.279	8.171	48.733	70	71.253	-	71.253
Pendapatan antar segmen	5.289	1.888	2.180	350	9.707	(9.707)	-
Jumlah pendapatan segmen	19.568	10.059	50.913	420	80.960	(9.707)	71.253
Beban							
Beban eksternal	(12.362)	(6.408)	(29.999)	(526)	(49.295)	-	(49.295)
Beban antar segmen	(3.297)	(1.914)	(4.680)	184	(9.707)	9.707	-
Jumlah beban segmen	(15.659)	(8.322)	(34.679)	(342)	(59.002)	9.707	(49.295)
Hasil segmen	3.909	1.737	16.234	78	21.958	-	21.958
Informasi lain							
Aset segmen	26.842	16.893	62.368	390	106.493	(4.465)	102.028
Aset tersedia untuk dijual	-	-	791	-	791	-	791
Penyertaan jangka panjang	214	-	21	-	235	-	235
Jumlah aset konsolidasian							103.054
Jumlah liabilitas konsolidasian	(14.459)	(10.452)	(21.434)	(193)	(46.538)	4.465	(42.073)
Pembelian barang modal	(4.390)	(1.529)	(8.684)	(45)	(14.648)	-	(14.648)
Beban penyusutan dan amortisasi	(1.890)	(1.389)	(11.007)	(14)	(14.300)	-	(14.300)
Penurunan nilai aset	-	-	(563)	-	(563)	-	(563)
Provisi penurunan nilai piutang dan persediaan usang	(255)	(454)	(174)	-	(883)	-	(883)

39. POLA BAGI HASIL ("PBH")

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian PBH yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, instalasi telepon umum kartu, data dan jaringan internet, dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki 4 perjanjian PBH dengan 4 mitra usaha. Lokasi PBH berada di Jawa Timur, Makassar, Pare-pare, Manado, Denpasar, Mataram dan Kupang dengan periode penyelenggaraan antara 129 sampai dengan 148 bulan.

Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi dan Perusahaan mengelola serta mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut setelah pembangunan selesai. Biaya perbaikan dan pemeliharaan selama periode bagi hasil akan ditanggung bersama oleh Perusahaan dan mitra usaha. Secara hukum, mitra usaha berhak atas aset tetap yang dibangun oleh mitra usaha selama periode bagi hasil. Pada akhir periode bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan kepemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan pada harga nominal tertentu.

Pada umumnya pendapatan dari instalasi sambungan telepon, pulsa telepon *outgoing* dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara Perusahaan dan mitra usaha berdasarkan jumlah dan/atau rasio tertentu yang telah disepakati.

40. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo") No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap".

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah, dan/atau
- Tarif jasa multimedia,

dengan struktur tarif sebagai berikut:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

40. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 untuk jaringan bergerak selular, jaringan bergerak satelit, dan jaringan tetap lokal dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 201/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011 tanggal 29 Juli 2011, BRTI menyetujui revisi Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") Perusahaan terkait tarif interkoneksi.

BRTI, dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS dari berbasis *Sender Keep All* ("SKA") menjadi berbasis biaya (Non-SKA) efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	6.678
Dolar A.S.	380	3.674
Euro	0,2	3
SGD	0,1	0
Jumlah		**10.355**

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	27 Mei 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-3
	15 Juni 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-1
Perusahaan dan Konsorsium ZTE	2 Juni 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-2
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	3 Agustus 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi *Softswitch* dan Modernisasi MSAN Divre I, Divre II, Divre III dan Divre IV
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	4 September 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi *Softswitch* Modernisasi MSAN Divre VI dan Divre VII
Perusahaan dan Konsorsium Tekken-DMT	15 September 2009	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Kabel Serat Optik Akses Divre VI Kalimantan
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	24 November 2009	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Proyek Palapa Ring Mataram-Kupang *Cable System Project* (MKCS)
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	6 Oktober 2010	Perjanjian pengadaan dan Instalasi *Gigabit Capable Passive Optical Network* (G-PON)
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	8 Juni 2011	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM Alcatel Lucent (ALU)
Perusahaan dan Konsorsium G-Pas	14 Juni 2011	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi *Outside Plant Fiber* Optik (OSP-FO) Akses & RMJ GPAS
Perusahaan dan Konsorsium Mandiri Maju	14 Juni 2011	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi *Outside Plant Fiber* Optik (OSP-FO) Akses & RMJ
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	30 Juni 2011	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspansi Metro Ethernet ALU
Perusahaan dan PT Bina Nusantara Perkasa	9 Desember 2011	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") Sumatera-Bangka (SBCS) dan SKKL Tarakan-Tanjung Selor (TSCS)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan PT Ketrosden Triasmitra	6 Maret 2012	Perjanjian Pengadaan 2 *Fiber Pairs* (4 *Core*) SKKL Jakarta-Bangka-Batam-Singapura dan Batam-Bintan Dengan Pola IRU
Perusahaan dan PT Ketrosden Triasmitra-PT Nautic Maritime Salvage	30 Agustus 2012	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi SKKL Luwuk-Tutuyan Kabel System (LTCS)
Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia	30 Desember 2010	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off*
Perusahaan dan PT Len Industri (Persero)	29 Maret 2012	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off*

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008*	Perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements*)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008*	Perjanjian untuk dukungan teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G *(Combined 2G and 3G CS Core Network)*
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei dan PT ZTE Indonesia	Maret dan Juni 2009*	Perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN *Rollout* (*2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements*) sebagai penyedia jaringan 2G GSM BSS dan 3G UMTS *Radio Access Network*
Telkomsel, PT Trikomsel OKE dan PT Mitra Telekomunikasi Selular ("MTS")	Juli 2009**	Perjanjian pembelian iphone dan penyediaan jasa jaringan selular
Telkomsel, PT Packet Systems Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait *Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support*
Telkomsel, PT Datacraft Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait *Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support*
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian *Online Charging System* ("OCS") *and Service Control Points* ("SCP") *System Solution Development*
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian *Technical Support* untuk menyediakan jasa *technical support* untuk OCS dan SCP
Telkomsel, PT Nokia Siemens Networks dan Nokia Siemens Networks Oy	27 Januari 2011	Perjanjian pembangunan Soft HLR *(Soft HLR Rollout Agreement)*

* Sesuai dengan surat PT Nokia Siemens Networks pada bulan Juli dan September 2012, NSN sepakat untuk memperpajang perjanjian sampai tanggal 31 Desember 2012 (Catatan 47). Sesuai dengan surat PT Ericsson Indonesia tanggal 1 Oktober 2012, PT Ericsson Indonesia dan Ericsson AB sepakat untuk menerapkan penyesuaian harga untuk perangkat keras, perangkat lunak dan jasa yang dibeli oleh Telkomsel sampai dengan 31 Desember 2012. Perjanjian tersebut diperpanjang sampai 2 Maret 2013.

** Catatan 41C.IV.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel dan PT Nokia Siemens Networks	27 Januari 2011	Perjanjian jasa teknik Soft HLR *(Soft HLR Technical Support Agreement)*
Telkomsel dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk pengembangan dan perpanjangan *Customer Relationship Management* dan *Contact Center Solutions*
Telkomsel dan Nokia Siemens Networks Oy dan PT Huawei	11 Juli 2011	Perjanjian untuk pengadaan perangkat
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	21 Desember 2011	Perjanjian pengembangan dan *Rollout Operating Support System* ("OSS").
Telkomsel dan Huawei International Pte. Ltd dan PT Huawei	17 Juli 2012	Perjanjian *CS Core System Rollout* dan *CS Core System Technical Support*

(iii) GSD

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
TLT dan PT Adhi Karya	6 November 2012	Perjanjian jasa struktur dan arsitektur kontraktor utama proyek pembangunan gedung Telkom Landmark Tower

(iv) Dayamitra

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Dayamitra dan PT Aksara Indah	11 Desember 2012	Perjanjian pembangunan menara telekomunikasi
Dayamitra dan PT Citramas Heavy Industries	8 Oktober 2012	Perjanjian pengadaan menara telekomunikasi
Dayamitra dan PT Bukaka Teknik Utama	17 Februari 2012	Perjanjian pengadaan menara telekomunikasi

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

(i) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir Periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas digunakan	
				Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BRI	250	14 Maret 2014	Rp	-	173
			US$	0,03	1
BNI	250	31 Maret 2013	Rp	-	98
			US$	0,26	3
Bank Mandiri	150	23 Desember 2013	Rp	-	46
			US$	0,02	-
Jumlah	**650**				**321**

(ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2013. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US$2,1 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G (Catatan 41c.i). Bank garansi tersebut berlaku sampai dengan 7 April 2013.

(iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US$15 juta dari Mandiri. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2013. Atas fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, TII telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp96,3 miliar (setara dengan US$10 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) lisensi *mobile spectrum* di Timor Leste.

c. Lainnya

(i) Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, (Catatan 2i), Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi pada tahun 2019. Biaya BHP tahunan untuk tahun 2011 didasarkan pada surat pemberitahuan dari DJPPI yang berjumlah Rp495 miliar. Jumlah biaya per tahun bervariasi bergantung pada variabel tertentu yang ditentukan dalam formula.

2. Menyediakan akses *roaming* untuk operator 3G lainnya.

3. Berkontribusi pada pengembangan KPU.

4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah 14 propinsi pada tahun keenam diperolehnya lisensi 3G.

5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20 miliar atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Konsorsium Palapa Ring

Pada tanggal 22 November 2011, berdasarkan surat manajemen Konsorsium Palapa Ring No. 01/PR-MC/IV/2011, perjanjian Konsorsium Palapa Ring diakhiri. Selanjutnya, berdasarkan surat manajemen Konsorsium Palapa Ring No. 02/PR-MC/IV/2011 tanggal 28 Desember 2011, rekening *escrow* telah ditutup dan saldo dana *escrow* sebesar US$4,6 juta telah dikembalikan ke Perusahaan.

(iii) Pemakaian frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tanggal 15 Desember 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 16 Januari 2009, biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900MHz, dan 1800MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan. Peraturan tersebut berlaku selama 5 tahun sampai diubah lebih lanjut.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut diatas, pada tanggal 15 Desember 2010, dalam Surat Keputusan No. 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan Telkomsel tahun pertama (Y_1), yaitu tahun 2010 untuk pita frekuensi 900MHz dan 1800MHz adalah sebesar Rp716 miliar dan dibayar pada tanggal 30 Desember 2010.

Berdasarkan surat keputusan yang sama di atas dan Surat Keputusan No. 5039/T/DJPT.4/KOMINFO/12/2010 pada tanggal 16 Desember 2010, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan Perusahaan tahun pertama (Y_1), yaitu tahun 2010 untuk pita frekuensi 800MHz adalah sebesar Rp52 miliar dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2010.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan No. 590/KEP/M.KOMINFO/11/2011 pada tanggal 14 November 2011, Perusahaan dan Telkomsel dinyatakan lebih bayar masing-masing sebesar Rp31 miliar dan Rp117 miliar, yang diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun kedua.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 349/KEP/M.KOMINFO/08/2011 dan No. 350/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun kedua (Y_2), yaitu tahun 2011 masing-masing untuk Perusahaan dan Telkomsel sebesar Rp142 miliar dan Rp1.834 miliar. Biaya ini dibayar pada bulan Desember 2011, bersih setelah pembayaran dimuka.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 495 tanggal 29 Agustus 2012 dan No. 491 tanggal 29 Agustus 2012, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun ketiga (Y_3), yaitu tahun 2012 masing-masing untuk Perusahaan dan Telkomsel sebesar Rp174 miliar dan Rp1.718 miliar. Biaya ini dibayar bulan Desember 2012.

Sebelum penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan telekomunikasi yang berlaku, operator diwajibkan untuk mendaftarkan stasiun radionya kepada DJPPI untuk mendapatkan lisensi penggunaan frekuensi, kecuali stasiun radio yang menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz (Catatan 41c.i). Biaya pemakaian frekuensi radio tersebut terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah *carrier* ("TX") untuk Perusahaan dan *transceivers* ("TRX") untuk Telkomsel yang terdaftar dari stasiun radio, dengan biaya berkisar dari Rp0,07 juta hingga Rp17,55 juta untuk tiap TX dan dari Rp3,4 juta hingga Rp15,9 juta untuk tiap TRX (Catatan 7).

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) Apple, Inc

Pada tanggal 9 Januari dan 16 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple, Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE dan PT Mitra Telekomunikasi Selular), serta penyediaan layanan jaringan selular selama 3 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2012, Telkomsel mengganti perjanjian tersebut dengan perjanjian yang baru. Jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli sampai dengan Juni 2015 sekurang-kurangnya sebesar 500.000 unit.

(v) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Perusahaan dan entitas anak menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2013 hingga 2022.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum dimasa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai *lessee*	13.829	2.017	6.617	5.195
Sebagai *lessor*	5.602	1.863	3.207	532

(vi) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban sambungan).

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010, BTIP diubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI").

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(vi) KPU (lanjutan)

a. Perusahaan

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan senilai Rp322 miliar, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan yang bersifat bergerak senilai Rp528 miliar, yang meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Irian Jaya Barat.

b. Telkomsel

Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz - 2.400 MHz.

Selanjutnya, pada tahun 2010 dan 2011, perjanjian-perjanjian tersebut telah diubah, meliputi, antara lain, untuk mengubah harga menjadi Rp1,76 triliun dan untuk mengubah periode pembayaran dari kuartalan menjadi bulanan atau kuartalan. Pendapatan yang diterima dari program KPU adalah Rp237 miliar dan Rp370 miliar masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011.

Pada bulan Januari 2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi dari kementerian untuk menyediakan jasa jaringan tetap lokal dalam program KPU.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU *(Upgrading)* "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tanggal 5 Januari 2012 dan 9 Januari 2012, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel) menandatangani perjanjian dengan BPPPTI masing-masing untuk menyediakan Program KPU, yaitu Desa Pinter dan di daerah perbatasan.

Adapun isi perjanjian tersebut adalah :

- Telkomsel dan Konsorsium ("Para Pihak") akan menerima uang muka 15% dari jumlah kontrak. Sebelum pembayaran uang muka, para pihak harus mengeluarkan bank garansi dengan jumlah yang sama.
- Para Pihak disyaratkan untuk:
  - Menerbitkan jaminan penawaran 5% dari jumlah kontrak; dan
  - Menyediakan akses telekomunikasi *end-to-end* dan layanan dalam waktu kurang lebih 60 bulan yang terbagi menjadi pra-operasi dan operasi.
- Para pihak akan menerima pembayaran dari BPPPTI berdasarkan evaluasi kinerja secara bulanan atau kuartalan.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(vi) KPU (lanjutan)

b. Telkomsel (lanjutan)

Dayamitra, melalui Telkomsel, telah menerima uang muka dari BPPPTI untuk Program KPU di daerah perbatasan sebesar Rp113 miliar (setelah dikurangi pajak). Garansi bank untuk jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan telah diberikan oleh Dayamitra. Bagian dari uang muka sebesar Rp28 miliar dicatat sebagai bagian dari aset lancar lainnya dan sisanya dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya.

Telkomsel telah menerima uang muka dari BPPPTI untuk Program KPU Desa Pinter sebesar Rp36 miliar (setelah dikurangi pajak). Telkomsel telah menggunakan bank garansi dengan jumlah total Rp52 miliar untuk uang muka dan sebagai jaminan pelaksanaan.

Bagian dari uang muka yang diterima dari BPPPTI untuk Program KPU di wilayah perbatasan dan Desa Pinter sebesar Rp37 miliar dicatat sebagai bagian dari utang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2012, piutang Perusahaan dan entitas anak terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah sebesar Rp533 miliar (Catatan 5 dan 11).

42. KONTINJENSI

a. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan entitas anak mencadangkan sebesar Rp53 miliar pada tanggal 31 Desember 2012.

b. Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (“KPPU”) dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Sehubungan dengan operator-operator mengajukan keberatan di berbagai pengadilan, selanjutnya, KPPU meminta MA untuk mengkonsolidasi kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan MA tanggal 12 April 2011, MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

42. KONTINJENSI (lanjutan)

c. Sehubungan dengan perselisihan antara Telkomsel dan PT Prima, distributor vaucer pulsa isi ulang Telkomsel, sesuai perjanjian distribusi antara kedua pihak, berdasarkan putusan pada tanggal 14 September 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Telkomsel yang diajukan oleh PT Prima.

Permohonan pailit diajukan oleh PT Prima atas dasar:
- klaim PT Prima atas piutang jatuh tempo dari Telkomsel sebesar Rp5,26 miliar yang merupakan pesanan vaucer pulsa isi ulang yang dinyatakan dalam *purchase order*
- piutang perusahaan lain dari Telkomsel

Telkomsel menyatakan bahwa utang kepada perusahaan lain tersebut telah dilunasi dan PT Prima tidak memiliki hak untuk mengklaim piutang dari Telkomsel, mengingat bahwa PT Prima belum melakukan pembayaran kepada Telkomsel atas pesanan tersebut. PT Prima juga telah melanggar syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, persyaratan untuk permohonan pernyataan pailit tidak dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, Telkomsel telah melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk menyelesaikan kasus ini termasuk mengajukan banding kepada MA pada tanggal 21 September 2012.

Pada tanggal 21 November 2012, dalam putusan MA No. 704 K/Pdt.Sus/2012, MA memutuskan:
- mengabulkan permohonan banding Telkomsel
- membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, kasus ini masih dalam proses Peninjauan Kembali ("PK") di tingkat MA, karena PT Prima mengajukan PK atas putusan MA tersebut (Catatan 47 g).

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap pelaporan keuangan Perusahaan dan entitas anak.

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	2012			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	412,69	1,33	6,38	4.042
Aset keuangan lancar lainnya	7,17	-	-	69
Piutang usaha				
Pihak berelasi	9,03	-	-	87
Pihak ketiga	74,89	-	0,44	727
Piutang lain-lain	1,20	-	0,06	12
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	9,89	-	-	95
Jumlah aset	514,87	1,33	6,88	5.032

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

	2012			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(1,49)	-	-	(14)
Pihak ketiga	(320,34)	-	(2,41)	(3.120)
Utang lain-lain	(0,92)	-	(0,13)	(10)
Biaya yang masih harus dibayar	(75,07)	(32,87)	(3,00)	(759)
Uang bank jangka pendek	(0,42)	-	-	(4)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,80)	-	(0,20)	(10)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(30,75)	(767,90)	-	(383)
Obligasi dan wesel bayar	(68,62)	-	-	(661)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(112,84)	(8.446,87)	-	(2.035)
Jumlah liabilitas	(611,25)	(9.247,64)	(5,74)	(6.996)
Liabilitas bersih	**(96,38)**	**(9.246,31)**	**1,14**	**(1.964)**

***** Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan mengunakan nilai tukar umum pada akhir periode pelaporan.

	2011			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	139,03	1,18	8,81	1.340
Aset keuangan lancar lainnya	6,50	-	-	58
Piutang usaha				
Pihak berelasi	4,73	-	-	43
Pihak ketiga	88,55	-	0,06	803
Piutang lain-lain	24,99	-	0,06	227
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	10,20	-	-	93
Jumlah aset	274,00	1,18	8,93	2.564
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,41)	-	-	(4)
Pihak ketiga	(427,73)	(0,51)	(1,35)	(3.891)
Utang lain-lain	(0,52)	-	-	(5)
Biaya yang masih harus dibayar	(54,84)	(35,61)	(2,53)	(524)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,86)	-	-	(8)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(66,61)	(767,90)	-	(694)
Obligasi dan wesel bayar	(74,75)	-	-	(679)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(140,99)	(9.214,77)	-	(2.357)
Jumlah liabilitas	(766,71)	(10.018,79)	(3,88)	(8.162)
Liabilitas bersih	**(492,71)**	**(10.017,61)**	**5,05**	**(5.598)**

* Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan mengunakan nilai tukar umum pada akhir periode pelaporan.

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak membuka kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Perusahaan dan entitas anak melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 menggunakan kurs tanggal 28 Februari 2013, keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi bertambah sebesar Rp73 miliar.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

1. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Treasury Management* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Treasury Management* mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan dan entitas anak tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Perusahaan dan entitas anak diharapkan dapat disalinghapus dengan deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko nilai tukar mata uang:

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

	2012		2011	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,51	0,00	0,28	0,00
Liabilitas keuangan	(0,61)	(9,25)	(0,77)	(10,02)
Eksposur bersih	**(0,10)**	**(9,25)**	**(0,49)**	**(10,02)**

Analisa sensitifitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan dibawah, terhadap Rupiah pada 31 Desember 2012 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan dibawah. Analisa ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Perusahaan dan entitas anak pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisa mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	Ekuitas/ laba (rugi)
31 Desember 2012	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	(10)
Yen Jepang (penguatan 5%)	(52)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Desember 2012 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

b. Risiko harga pasar

Perusahaan dan entitas anak rentan terhadap pada perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada ekuitas.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Perusahaan dan entitas anak dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Perusahaan dan entitas anak.

Pada tanggal 31 Desember 2012, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijual adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang kemungkinan besar terjadi.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Perusahaan dan entitas anak terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 16, 17, 18, 19, dan 20). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan dan entitas anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Pinjaman bunga tetap	(7.025)	(5.409)
Pinjaman bunga mengambang	(12.250)	(12.462)

Analisa sensitifitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Desember 2012, perubahan 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan meningkatkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp31 miliar. Analisa mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

d. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak:

	2012	2011
Kas dan setara kas	13.118	9.634
Aset keuangan lancar lainnya	4.338	373
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	5.409	5.250
Penyertaan jangka panjang	21	21
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	614	218
Jumlah	**23.500**	**15.496**

Perusahaan dan entitas anak rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan piutang usaha dan piutang lain-lain.

Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit berdasarkan saldo dari tiga pelanggan utama masing-masing kurang dari 1% dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2012.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Perusahaan dan entitas anak telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak secara terus menerus melakukan analisa untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio likuiditas, rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

Berikut adalah analisa jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak:

	Nilai buku	Arus kas wajib	2013	2014	2015	2016	2017 dan selanjutnya
31 Desember 2012							
Utang usaha dan lain-lain	7.456	(7.456)	(7.456)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	6.163	(6.163)	(6.163)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	11.295	(12.585)	(5.118)	(3.869)	(2.518)	(602)	(478)
Utang sewa pembiayaan	2.324	(3.172)	(652)	(548)	(398)	(354)	(1.220)
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	1.987	(2.462)	(283)	(277)	(270)	(263)	(1.369)
Obligasi dan wesel bayar	3.669	(5.462)	(757)	(505)	(1.287)	(203)	(2.710)
Jumlah	**32.894**	**(37.300)**	**(20.429)**	**(5.199)**	**(4.473)**	**(1.422)**	**(5.777)**

	Nilai buku	Arus kas wajib	2012	2013	2014	2015	2016 dan selanjutnya
31 Desember 2011							
Utang usaha dan lain-lain	8.355	(8.355)	(8.355)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	4.790	(4.790)	(4.790)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	11.291	(12.763)	(4.852)	(3.854)	(2.468)	(1.156)	(433)
Utang sewa pembiayaan	510	(642)	(259)	(179)	(110)	(33)	(61)
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	2.284	(2.866)	(374)	(286)	(279)	(272)	(1.655)
Obligasi dan wesel bayar	3.786	(5.895)	(708)	(608)	(407)	(1.258)	(2.914)
Jumlah	**31.016**	**(35.311)**	**(19.338)**	**(4.927)**	**(3.264)**	**(2.719)**	**(5.063)**

Perbedaan antara nilai buku dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

a. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms-length*.

Perusahaan dan entitas anak menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

(i) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, beban yang masih harus dibayar, uang muka pelanggan dan pemasok dan utang bank jangka pendek) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
(ii) Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi korporasi dan Pemerintah. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar yang tersedia dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik valuasi. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
(iii) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasikan dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Perusahaan dan entitas anak untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Perusahaan dan entitas anak, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:
a. Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
b. Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan dan entitas anak akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Klasifikasi dan nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

	31 Desember 2012					
	Diperdagangkan	Utang dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Kas dan setara kas	-	13.118	-	-	13.118	13.118
Aset keuangan lancar lainnya	-	4.028	310	-	4.338	4.338
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	-	5.409	-	-	5.409	5.409
Penyertaan jangka panjang	-	-	21	-	21	21
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	-	614	-	-	614	614
Jumlah aset keuangan	**-**	**23.169**	**331**	**-**	**23.500**	**23.500**

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Klasifikasi dan nilai wajar (lanjutan)

	31 Desember 2012					
	Diperdagangkan	Utang dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Utang usaha dan lain-lain	-	-	-	(7.456)	(7.456)	(7.456)
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	(6.163)	(6.163)	(6.163)
Pinjaman						
Utang bank jangka pendek	-	-	-	(37)	(37)	(37)
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	(2.324)	(2.324)	(2.324)
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	-	-	-	(1.987)	(1.987)	(2.075)
Obligasi dan wesel bayar	-	-	-	(3.669)	(3.669)	(4.022)
Utang bank jangka panjang	-	-	-	(11.258)	(11.258)	(11.346)
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	-	-	**(32.894)**	**(32.894)**	**(33.423)**

	31 Desember 2011					
	Diperdagangkan	Utang dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Kas dan setara kas	-	9.634	-	-	9.634	9.634
Aset keuangan lancar lainnya	-	12	361	-	373	373
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	-	5.250	-	-	5.250	5.250
Penyertaan jangka panjang	-	-	21	-	21	21
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	-	218	-	-	218	218
Jumlah aset keuangan	**-**	**15.114**	**382**	**-**	**15.496**	**15.496**
Utang usaha dan lain-lain	-	-	-	(8.355)	(8.355)	(8.355)
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	(4.790)	(4.790)	(4.790)
Pinjaman						
Utang bank jangka pendek	-	-	-	(100)	(100)	(100)
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	(510)	(510)	(510)
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	-	-	-	(2.284)	(2.284)	(2.357)
Obligasi dan wesel bayar	-	-	-	(3.786)	(3.786)	(3.974)
Utang bank jangka panjang	-	-	-	(11.191)	(11.191)	(11.325)
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	-	-	**(31.016)**	**(31.016)**	**(31.411)**

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Hirarki nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dan unit penyertaan reksadana terbatas untuk utang yang didasari surat berharga dimana Nilai Aset Bersih ("NAB") per saham dari informasi investasi tidak dipublikasikan, dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2012			
		Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan				
Surat berharga tersedia untuk dijual	310	52	210	48

	31 Desember 2011			
		Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan				
Surat berharga tersedia untuk dijual	361	46	251	64

Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi korporasi dan Pemerintah. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi terhadap harga surat berharga sejenis pada tanggal pelaporan. Karena tidak diperdagangkan secara aktif di pasar tersedia, surat berharga ini diklasifikasikan sebagai level 2.

Saham dan reksadana secara aktif diperdagangkan pada pasar tersedia dinyatakan pada nilai wajar menggunakan harga pasar dikuotasi dan diklasifikasikan dalam level 1. Penilaian reksadana yang diinvestasikan pada obligasi korporasi dan Pemerintah mempersyaratkan penilaian signifikan dari manajemen karena tidak adanya harga pasar dikuotasi, tidak adanya likuiditas dan sifat jangka panjang dari aset tersebut. Karena investasi ini dibatasi pencairannya (seperti larangan pemindahan dan periode penguncian awal) dan aktifitas observasi atas investasi dibatasi, investasi ini karenanya diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar. Manajemen mempertimbangkan antara lain asumsi, penilaian dan harga kuotasi pengaturan reksadana.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Hirarki nilai wajar (lanjutan)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) pada tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Reksadana		
Saldo 1 Januari	64	58
Pembelian	8	16
Termasuk dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian		
Rugi direalisasi-diakui pada laba rugi	(1)	(0)
Rugi belum direalisasi-diakui pada pendapatan komprehensif lainnya	(2)	(2)
Penjualan	(21)	(8)
Saldo 31 Desember	**48**	**64**

45. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2012		2011	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	37	0,05%	100	0,15%
Utang jangka panjang	19.238	27,17%	17.771	27,18%
Total utang	19.275	27,22%	17.871	27,33%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	51.541	72,78%	47.510	72,67%
Jumlah	**70.816**	**100,00%**	**65.381**	**100,00%**

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang saham lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Perusahaan melakukan penilaian hutang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya hutang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Perusahaan akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Perusahaan juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

45. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Perusahaan dan mengkaji efektifitas utang Perusahaan. Perusahaan memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Jumlah utang dengan bunga	19.275	17.871
Dikurangi: Kas dan setara kas	(13.118)	(9.634)
Utang bersih	6.157	8.237
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	51.541	47.510
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	11,95%	17,34%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 18, 19, 20, Perusahaan dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

46. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Beberapa aktivitas investasi dan pendanaan tidak mempengaruhi arus kas dan setara kas (aktivitas non-kas investasi dan pendanaan) walaupun berpengaruh terhadap susunan modal dan aset Perusahaan dan entitas anak. Aktivitas non-kas investasi dan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	4.627	4.900
Sewa pembiayaan	2.588	80
Pertukaran nonmoneter	1.686	1.226
Pembelian bisnis *data center*	150	-
Jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan	-	6.698
Reklasifikasi aset tetap menjadi aset tersedia untuk dijual	-	791

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Pada tanggal 7 Januari 2013, sehubungan dengan telah berakhirnya perjanjian pengadaan peralatan jaringan dan layanan terkait dengan NSN, NSN setuju untuk memperpanjang periode penyesuaian harga dengan menerapkan harga akhir untuk setiap perangkat lunak, perangkat keras dan layanan dari *New Solution* yang dibeli oleh Telkomsel (Catatan 41a.ii) dari 1 Januari 2013 hingga awal dari:
   (i) tanggal bahwa NSN masuk ke dalam *New CS Core System Rollout Agreement* ("ROA") dan/atau TSA yang menggantikan Perjanjian Jaringan CS dengan Telkomsel; dan
   (ii) 31 Januari 2013.

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

b. Pada tanggal 8 Januari 2013, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., Mkn. No. 02 tanggal 8 Januari 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03276.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013, Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra Media ("MM") dengan kepemilikan 99,83%. MM bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa periklanan dan jasa lainnya.

c. Pada tanggal 8 Januari 2013, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., Mkn. No. 03 tanggal 8 Januari 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03261.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013, Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra TV ("Metra TV") dengan kepemilikan 99,83%. Metra TV bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan.

d. Pada tanggal 9 Januari 2013, berdasarkan RUPS Sirkuler TII tanggal 9 Januari 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarijah, S.H. No. 04 tanggal 6 Februari 2013, para pemegang saham TII menyetujui pendirian entitas anak TII di Australia bernama Telekomunikasi Indonesia Internasional Australia Pty. Ltd ("Telkom Australia"). Telkom Australia bergerak dalam bidang telekomunikasi dan layanan berbasis IT.

e. Pada tanggal 17 Januari 2013, Sigma menandatangani perjanjian jual saham dan pengalihan utang (*share sale and transfer and loan assignment agreement*) dengan Landeskreditbank Baden-Wurttemberg-Forderbank ("L-Bank") and Step Stuttgarter Engineering Park Gmbh ("STEP") sebagai pemegang saham PT German Center Indonesia ("GCI"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Sigma menyetujui untuk membeli seluruh saham GCI yang dimiliki oleh L-Bank dan STEP serta mengambil alih utang pemegang saham L-Bank dengan harga beli sebesar US$17,8 juta (setara dengan Rp170 miliar). Penutupan transaksi akan dilakukan pada tanggal 1 April 2013 dan perubahan jadwal tersebut dapat berubah sesuai dengan persetujuan tertulis dari seluruh pihak.

f. Pada tanggal 22 Januari 2013, berdasarkan akta notaris N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn. No. 28 tanggal 22 Januari 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03084.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013, Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra Digital Media ("MDM") dengan kepemilikan 99,83%. MDM bergerak dalam bidang menyelenggarakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa lainnya.

g. Perselisihan antara Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika ("PT Prima")

Sehubungan dengan perselisihan antara Telkomsel dan PT Prima, pada tanggal 31 Januari 2013, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Pengadilan") bahwa tanggal 29 Januari 2013, PT Prima mengajukan PK kepada MA terhadap putusan MA tertanggal 21 November 2012 yang membatalkan putusan pailit Telkomsel (Catatan 42c).

Telkomsel berkeyakinan bahwa MA telah membuat keputusan yang tepat, sehingga Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA pada tanggal 7 Februari 2013.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, PK tersebut masih dalam proses. Keputusan MA atas PK tersebut diharapkan akan diterima pada bulan Maret 2013.

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

g. Perselisihan antara Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika ("PT Prima") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2013, Pengadilan memutuskan bahwa biaya kurator sebesar Rp147 miliar harus ditanggung oleh Telkomsel. Telkomsel menolak untuk membayar biaya tersebut, melalui suratnya pada tanggal 12 Februari 2013, Telkomsel mengajukan keberatan kepada MA dan memohon pencabutan putusan Pengadilan tersebut karena putusan tersebut tidak didasarkan pada pedoman yang berlaku yang ditetapkan oleh Keputusan Menkumham No. 01 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013. Telkomsel berencana untuk mengajukan PK terhadap putusan Pengadilan tersebut.

h. Tambahan Lisensi 3G

Berdasarkan pengumuman Menkominfo No.19/PIH/KOMINFO/2/2013 tanggal 25 Februari 2013, Telkomsel terpilih sebagai salah satu perusahaan yang diberikan tambahan lisensi 3G untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz.

48. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2011 dan 31 Desember 2011 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dengan rincian reklasifikasi akun yang signifikan adalah sebagai berikut :

	Sebelum reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011:			
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu			
Pihak berelasi	932	(526)	406
Pihak ketiga	3.983	526	4.509
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	838	(411)	427
Pihak ketiga	7.479	411	7.890
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 1 JANUARI 2011:			
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu			
Pihak berelasi	780	(372)	408
Pihak ketiga	3.564	372	3.936
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	1.154	(400)	754
Pihak ketiga	6.357	400	6.757

49. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS")

Tabel berikut menyajikan rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2012, dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 untuk masing-masing perbedaan antara laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK dan IFRS.

	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2012			
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	13.118	-	13.118
Aset keuangan lancar lainnya	4.338	-	4.338
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang			
Pihak berelasi	701	683	1.384
Pihak ketiga	4.522	(683)	3.839
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	186	-	186
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	579	-	579
Uang muka dan beban dibayar di muka	3.721	-	3.721
Tagihan restitusi pajak	436	-	436
Pajak dibayar di muka	372	-	372
Jumlah Aset Lancar	27.973	-	27.973
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	275	-	275
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	77.047	(139)	76.908
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	1.032	(1.032)	-
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	3.510	-	3.510
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	1.443	-	1.443
Aset pajak tangguhan - bersih	89	13	102
Jumlah Aset Tidak Lancar	83.396	(1.158)	82.238
JUMLAH ASET	**111.369**	**(1.158)**	**110.211**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	432	609	1.041
Pihak ketiga	6.848	(609)	6.239
Utang lain-lain	176	-	176
Utang pajak	1.844	-	1.844
Beban yang masih harus dibayar	6.163	-	6.163
Pendapatan diterima di muka	2.729	-	2.729
Uang muka pelanggan dan pemasok	257	-	257
Utang bank jangka pendek	37	-	37
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.621	-	5.621
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	24.107	-	24.107

49. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS") (lanjutan)

	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.059	(574)	2.485
Liabilitas lainnya	334	-	334
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	347	-	347
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	679	2.570	3.249
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2.248	1.809	4.057
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang sewa pembiayaan	1.814	-	1.814
Pinjaman penerusan	1.791	-	1.791
Obligasi dan wesel bayar	3.229	-	3.229
Utang bank	6.783	-	6.783
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.284	3.805	24.089
JUMLAH LIABILITAS	**44.391**	**3.805**	**48.196**
EKUITAS			
Modal saham	5.040	-	5.040
Tambahan modal disetor	1.073	-	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	(8.067)	-	(8.067)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	478	(478)	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	(386)	-
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	42	(42)	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	271	(271)	-
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(508)	508	-
Komponen ekuitas lainnya	49	33	82
Saldo laba	52.777	(4.205)	48.572
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	51.541	(4.841)	46.700
Kepentingan nonpengendali	15.437	(122)	15.315
JUMLAH EKUITAS	**66.978**	**(4.963)**	**62.015**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**111.369**	**(1.158)**	**110.211**

49. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS") (lanjutan)

	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
PENDAPATAN	77.143	(16)	77.127
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	(16.803)	7	(16.796)
Beban penyusutan dan amortisasi	(14.456)	(18)	(14.474)
Beban karyawan	(9.786)	91	(9.695)
Beban interkoneksi	(4.667)	-	(4.667)
Beban pemasaran	(3.094)	-	(3.094)
Beban umum dan administrasi	(3.036)	-	(3.036)
Rugi selisih kurs - bersih	(189)	-	(189)
Penghasilan lain-lain	2.559	(0)	2.559
Beban lain-lain	(1.973)	-	(1.973)
LABA USAHA	**25.698**	**64**	**25.762**
Penghasilan pendanaan	596	-	596
Biaya pendanaan	(2.055)	-	(2.055)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(11)	-	(11)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**24.228**	**64**	**24.292**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(5.866)	(42)	(5.908)
LABA TAHUN BERJALAN	**18.362**	**22**	**18.384**
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	31	-	31
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(5)	-	(5)
Rugi aktuaria program pensiun manfaat pasti	-	(3.031)	(3.031)
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain - bersih	26	(3.031)	(3.005)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**18.388**	**(3.009)**	**15.379**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	12.850	14	12.864
Kepentingan nonpengendali	5.512	8	5.520
	18.362	22	18.384
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	12.876	(3.042)	9.834
Kepentingan nonpengendali	5.512	33	5.545
	18.388	(3.009)	15.379
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	669,19	0,73	669,92
Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS)	26.767,60	29,20	26.796,80

49. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS") (lanjutan)

a. Imbalan karyawan

Berdasarkan PSAK, keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diperkirakan.

Berdasarkan IFRS, keuntungan dan kerugian aktuarial langsung diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

b. Hak atas tanah

Berdasarkan PSAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa.

c. Perjanjian konsesi jasa

Sebelum 1 Januari 2012, PSAK tidak mengatur secara khusus mengenai pencatatan transaksi perjanjian konsesi jasa. Perusahaan dan Telkomsel memperlakukan perjanjian ini sebagai kontrak pelaksanaan (executory contract), Infrastruktur yang dibangun sehubungan dengan perjanjian ini dicatat sebagai aset tetap dan didepresiasikan sepanjang masa manfaat infrastruktur.

Berdasarkan IFRS, perjanjian tersebut diperlakukan sebagai perjanjian konsesi jasa dalam lingkup IFRIC 12, Perjanjian Konsesi Jasa. Pendapatan yang berasal dari kegiatan konstruksi untuk merancang, membangun dan mendanai aset konsesi diakui sesuai dengan tahap penyelesaian. Pendapatan yang berasal dari kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan aset konsesi diakui ketika jasa diserahkan. Aset infrastruktur yang dibangun tidak diakui sebagai aset tetap karena perjanjian ini tidak memberikan hak kepada Perusahaan dan Telkomsel untuk mengendalikan penggunaan aset infrastruktur layanan publik.

Efektif sejak 1 Januari 2012, Perusahaan dan Telkomsel menerapkan ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa, dalam mencatat kontrak konsesi. Dampak penerapan ISAK 16 diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2012 karena tidak signifikan. Selanjutnya, tidak terdapat perbedaan pencatatan perjanjian konsesi jasa berdasarkan PSAK dan IFRS.

49. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS") (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Berdasarkan IFRS, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini termasuk pemerintah, institusi pemerintah dan badan serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Investor Relations
Grha Citra Caraka Lantai 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia

T +62 21 521 5109
F +62 21 522 0500
email : investor@telkom.co.id

IDX : TLKM
NYSE : TLK
LSE : TKIA

www.telkom.co.id

Laporan ini dicetak pada kertas daur ulang